



PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMEDANG



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 2024-2026





BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 serta untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
10. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan.

12. Sasaran ...



12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

### Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 memuat:

- a. Tujuan, Sasaran dan Strategi;
- b. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
- c. Program Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

### Pasal 3

- (1) Isi dan uraian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I pendahuluan;
  - b. BAB II gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. BAB III gambaran keuangan Daerah;
  - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. BAB VII Kerangka Pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - i. BAB IX penutup.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD, rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 28 April 2023



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 28 April 2023



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 42

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR GAMBAR..... v

DAFTAR TABEL ..... x

DAFTAR LAMPIRAN .....xv

BAB I ..... I-1

PENDAHULUAN ..... I-1

1.1. Latar Belakang ..... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPD ..... I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen..... I-10

1.3.1. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2026 ..... I-11

1.3.2. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ..... I-11

1.3.3. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025..... I-11

1.3.4. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ..... I-12

1.3.5. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 ..... I-13

1.3.6. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Sektoral..... I-13

1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-13

1.4.1. Maksud ..... I-13

1.4.2. Tujuan ..... I-14

1.5. Sistematika Penulisan ..... I-15

BAB II ..... II-1

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi..... II-1

2.1.1. Aspek Geografi ..... II-1

2.1.2. Demografi..... II-9

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-15

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Indikator *Impact/Makro*) ..... II-15

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II-32

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... II-44

2.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II-52

2.3.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan ..... II-52

2.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan ..... II-57

|                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.3.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....                        | II-74  |
| 2.3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman .....                         | II-77  |
| 2.3.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..... | II-79  |
| 2.3.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial .....                                                   | II-85  |
| 2.4. Aspek Pelayanan Umum .....                                                                              | II-88  |
| 2.4.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....                                                              | II-88  |
| 2.4.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .....                                                          | II-113 |
| 2.4.3. Fokus Urusan Pilihan .....                                                                            | II-200 |
| 2.5. Aspek Daya Saing Daerah.....                                                                            | II-226 |
| 2.6. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.....                                             | II-237 |
| 2.6.1. Capaian Kinerja Sasaran .....                                                                         | II-237 |
| 2.6.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 .....     | II-238 |
| 2.6.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 .....  | II-245 |
| BAB III .....                                                                                                | III-1  |
| GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....                                                                                | III-1  |
| 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....                                                                        | III-1  |
| 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD .....                                                                        | III-2  |
| 3.1.2. Neraca Daerah.....                                                                                    | III-10 |
| 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....                                                          | III-11 |
| 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran .....                                                                    | III-12 |
| 3.2.2. Analisis Pembiayaan.....                                                                              | III-16 |
| 3.3. Kerangka Pendanaan.....                                                                                 | III-17 |
| 3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah .....                                              | III-21 |
| 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan.....                                                                   | III-26 |
| BAB IV .....                                                                                                 | IV-1   |
| PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....                                                                         | IV-1   |
| 4.1. Permasalahan Pembangunan .....                                                                          | IV-1   |
| 4.2. Isu Strategis .....                                                                                     | IV-5   |
| 4.2.1. Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Internasional.....                                                   | IV-5   |
| 4.2.2. Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Nasional.....                                                        | IV-17  |
| 4.2.3. Telaahan Kebijakan Provinsi Jawa Barat .....                                                          | IV-20  |
| 4.2.4. Telaahan RPJMD dan RPD Kabupaten Berbatasan Kabupaten Sumedang .....                                  | IV-42  |
| 4.2.5. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.....                                                | IV-47  |
| 4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Sumedang .....                                                                | IV-49  |
| 4.2.7. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....                              | IV-59  |
| BAB V .....                                                                                                  | V-1    |
| TUJUAN, DAN SASARAN.....                                                                                     | V-1    |
| 5.1. Tujuan dan Sasaran .....                                                                                | V-1    |

BAB VI ..... VI-1

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN..... VI-1

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumedang  
Tahun 2024-2026 ..... VI-1

6.2. Program Pembangunan ..... VI-13

6.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ..... VI-13

6.2.2. Program Perangkat Daerah ..... VI-16

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial..... VI-77

6.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang ..... VI-77

6.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan .. VI-88

BAB VII ..... VII-1

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT  
PEMBANGUNAN DAERAH..... VII-1

BAB VIII ..... VIII-1

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VIII-1

8.1. Indikator Makro ..... VIII-1

8.2. Indikator Kinerja Utama (Iku)..... VIII-2

8.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ..... VIII-6

BAB IX ..... IX-1

PENUTUP ..... IX-1



## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                               |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar 1.1  | Tahapan Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 .....                               | I-3   |
| Gambar 2.1  | Peta Administrasi Kabupaten Sumedang.....                                                     | II-1  |
| Gambar 2.2  | Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang .....                                             | II-4  |
| Gambar 2.3  | Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang .....                                                       | II-6  |
| Gambar 2.4  | Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang.....                                                    | II-9  |
| Gambar 2.5  | Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                         | II-12 |
| Gambar 2.6  | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022 .....                  | II-13 |
| Gambar 2.7  | Struktur Umur Penduduk Kabupaten Sumedang .....                                               | II-14 |
| Gambar 2.8  | Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita (ADHK) Tahun 2018-2022 .....                | II-16 |
| Gambar 2.9  | Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat, dan Sumedang.....                                   | II-16 |
| Gambar 2.10 | Pemetaan Posisi Kab/kota di Jabar Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita .....   | II-17 |
| Gambar 2.11 | Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....       | II-18 |
| Gambar 2.12 | Proporsi Komponen Pengeluaran PDRB (%) .....                                                  | II-19 |
| Gambar 2.13 | Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan PDRB (%) ..                                            | II-20 |
| Gambar 2.14 | Proporsi Konsumen dan Konsumsi Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang .....                       | II-22 |
| Gambar 2.15 | Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang .....                                                   | II-24 |
| Gambar 2.16 | Komparasi Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat..                                           | II-24 |
| Gambar 2.17 | Proporsi Penerima Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Sumedang .....                     | II-25 |
| Gambar 2.18 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.. | II-26 |
| Gambar 2.19 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat.....              | II-27 |
| Gambar 2.20 | Tren Gini Ratio Kabupaten Sumedang .....                                                      | II-28 |
| Gambar 2.21 | Komparasi Gini Ratio Kabupaten Kota di Jawa Barat ...                                         | II-29 |
| Gambar 2.22 | Perbandingan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Sumedang.....                                 | II-30 |
| Gambar 2.23 | IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                                                  | II-33 |
| Gambar 2.24 | Komparasi IPM Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022 .....           | II-33 |
| Gambar 2.25 | Tren Capaian Komponen IPM Kabupaten Sumedang ....                                             | II-34 |
| Gambar 2.26 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 .....        | II-37 |
| Gambar 2.27 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....                               | II-38 |
| Gambar 2.28 | Penyebab Kematian Bayi Tahun 2022 .....                                                       | II-40 |
| Gambar 2.29 | Penyebab Kematian Ibu Tahun 2022.....                                                         | II-40 |
| Gambar 2.30 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang..                                             | II-41 |
| Gambar 2.31 | Komparasi TPT Kabupaten Kota di Jawa Barat.....                                               | II-42 |
| Gambar 2.32 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                | II-44 |
| Gambar 2.33 | Cabang Olahraga Berprestasi dan Atlit Dibina di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....      | II-51 |

|             |                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar 2.34 | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%) .....II-53                                               |
| Gambar 2.35 | Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 .....II-54                                 |
| Gambar 2.36 | Rombongan Belajar Paket A, Paket B dan Paket C di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%) .....II-56                                             |
| Gambar 2.37 | Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%) .....II-56                                                    |
| Gambar 2.38 | Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 – 2022 .....II-59                                                                    |
| Gambar 2.39 | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 .....II-60                                           |
| Gambar 2.40 | Cakupan Kunjungan Neonatus dan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 ..II-61                                                |
| Gambar 2.41 | Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%) .....II-62                                                                     |
| Gambar 2.42 | Cakupan Kunjungan Balita di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....II-63                                                                         |
| Gambar 2.43 | Cakupan Kunjungan Balita di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....II-63                                                                         |
| Gambar 2.44 | Posyandu Menurut Strata Tahun 2018 – 2022 .....II-64                                                                                              |
| Gambar 2.45 | Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Jenis Imunisasi yang Diperoleh Tahun 2022.....II-65                                                                   |
| Gambar 2.46 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%) .....II-66                                     |
| Gambar 2.47 | Tren Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2022 .....II-75                                                        |
| Gambar 2.48 | Capaian Rumah Tangga ber-Sanitasi (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....II-76                                                            |
| Gambar 2.49 | Jenis Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2022.....II-80                                                                    |
| Gambar 2.50 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (orang) Tahun 2018-2022 .....II-82 |
| Gambar 2.51 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2018-2022 .....II-83                                                                   |
| Gambar 2.52 | Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – Tahun 2022 .....II-88                                                   |
| Gambar 2.53 | Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 .....II-89                                                                              |
| Gambar 2.54 | Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 .....II-90                                  |
| Gambar 2.55 | Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2022 .....II-91                                                                              |
| Gambar 2.56 | Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....II-92                                                                             |
| Gambar 2.57 | Kondisi Jalan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....II-97                                                                                       |
| Gambar 2.58 | Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....II-98                                          |



|              |                                                                                               |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar 2.59  | Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....       | II-100 |
| Gambar 2.60  | Jumlah Timbunan Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah Tidak Terkelola Tahun 2019-2022 (Ton)..... | II-101 |
| Gambar 2.61  | Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                 | II-102 |
| Gambar 2.62  | Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....    | II-107 |
| Gambar 2.63  | Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....       | II-108 |
| Gambar 2.64  | Indeks Risiko Bencana Tahun 2018-2022 .....                                                   | II-109 |
| Gambar 2.65  | Intensitas Kejadian Bencana di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                       | II-109 |
| Gambar 2.66  | Pencari Kerja Berdasarkan Lulusan Pendidikan Tahun 2022 .....                                 | II-114 |
| Gambar 2.67  | Angkatan Kerja (15 -64 Tahun) Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2022 .....         | II-114 |
| Gambar 2.68  | Instruktur BLK Tahun 2018-2022 .....                                                          | II-116 |
| Gambar 2.69  | Pelatihan Penumbuhan Wirausahawan Baru (Orang) Tahun 2019-2022 .....                          | II-116 |
| Gambar 2.70  | Peserta Pelatihan Ditempatkan (Orang) Tahun 2019-2022 .....                                   | II-117 |
| Gambar 2.71  | Kasus Konflik antara Pekerja dengan Pengusaha Tahun 2018-2022 .....                           | II-118 |
| Gambar 2.72  | Tenaga Fungsional Mediator Hubungan Industri (Orang) Tahun 2018-2022 .....                    | II-119 |
| Gambar 2.73  | Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Ditangani Tahun 2018-2021 .....                           | II-120 |
| Gambar 2.74  | Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                             | II-122 |
| Gambar 2.75  | Ketersediaan Pangan Pokok (Kg/Kapita/Tahun) Tahun 2018-2022 .....                             | II-123 |
| Gambar 2.76  | Lahan Milik Pemerintah Sudah Bersertifikat (%) Tahun 2018-2022 .....                          | II-124 |
| Gambar 2.77  | Indeks Kualitas Air (poin) Tahun 2018-2022 .....                                              | II-125 |
| Gambar 2.78  | Indeks Kualitas Udara (poin) Tahun 2018-2022 .....                                            | II-126 |
| Gambar 2.79  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin) Tahun 2018-2022 .....                                    | II-127 |
| Gambar 2.80  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) Tahun 2019-2022 .....                                 | II-128 |
| Gambar 2.81  | IKM Bidang Kependudukan Tahun 2018-2022 .....                                                 | II-129 |
| Gambar 2.82  | Rasio Penduduk ber-KTP Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                               | II-130 |
| Gambar 2.83  | Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2018-2022 .....                                           | II-131 |
| Gambar 2.84  | Status Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                                       | II-131 |
| Gambar 2. 85 | Persentase peran BUMDes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa (%) Tahun 2018-2021.....   | II-132 |
| Gambar 2.86  | Klasifikasi Keluarga Berdasarkan Kesejahteraan (Keluarga) Tahun 2018-2022 .....               | II-133 |
| Gambar 2.87  | Cakupan Pasangan Usia Subur Menggunakan Alat Kontrasepsi (%) Tahun 2018-2022 .....            | II-134 |
| Gambar 2.88  | Peserta KB per Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 .....                                            | II-135 |

|              |                                                                                                              |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar 2.89  | Angka <i>Drop Out</i> Peserta KB (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                             | II-135 |
| Gambar 2.90  | Kader KB per Desa Tahun 2018-2022 .....                                                                      | II-136 |
| Gambar 2.91  | Pengujian Mobil Penumpang (Unit) Tahun 2018-2022 .....                                                       | II-139 |
| Gambar 2.92  | Pengujian Mobil Bus (Unit) Tahun 2018-2022 .....                                                             | II-140 |
| Gambar 2.93  | Pengujian Mobil Barang (Unit) Tahun 2018-2022 .....                                                          | II-141 |
| Gambar 2.94  | Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas (Unit) Tahun 2017-2021 .....                                               | II-142 |
| Gambar 2.95  | Indeks SPBE (poin) Tahun 2018-2022 .....                                                                     | II-145 |
| Gambar 2.96  | Titik Blank Spot di Kabupaten Sumedang (Desa) Tahun 2018-2022 .....                                          | II-148 |
| Gambar 2.97  | Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat (unit) Tahun 2018-2022 .....                                        | II-167 |
| Gambar 2.98  | Jumlah Anggota Koperasi (orang) Tahun 2018-2022 .....                                                        | II-168 |
| Gambar 2.99  | Sumber Permodalan Koperasi (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022 .....                                               | II-169 |
| Gambar 2.100 | Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                                  | II-170 |
| Gambar 2.101 | Jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang Mendapatkan Pelatihan Tahun 2018-2022 .....                             | II-171 |
| Gambar 2.102 | Investasi di Kabupaten Sumedang (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022 .....                                          | II-175 |
| Gambar 2.103 | Pinjaman Investasi dari Bank Umum dan BPR Berdasarkan Jenis Mata Uang (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022 .....    | II-176 |
| Gambar 2.104 | Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tahun 2019-2022 .....                                                      | II-177 |
| Gambar 2.105 | Event Kepemudaan dan Event Olahraga Tahun 2019-2022 .....                                                    | II-181 |
| Gambar 2.106 | Jumlah Sarana Olahraga Tahun 2018-2022 .....                                                                 | II-182 |
| Gambar 2.107 | Jumlah Atlet dan Atlet Berprestasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                               | II-183 |
| Gambar 2.108 | Ketersediaan Data Tahun 2018-2022 .....                                                                      | II-183 |
| Gambar 2.109 | Hasil Assesment Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 .....                              | II-185 |
| Gambar 2.110 | Promosi Event Kebudayaan Tahun 2018-2022 .....                                                               | II-188 |
| Gambar 2.111 | Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2018-2022 .....                                                          | II-191 |
| Gambar 2.112 | Pemanfaatan Bacaan <i>Digital i-Sumedang</i> Tahun 2019-2022 .....                                           | II-192 |
| Gambar 2.113 | Jumlah Pejabat Fungsional Arsip di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                                  | II-200 |
| Gambar 2.114 | Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2018 - 2022 .....           | II-201 |
| Gambar 2.115 | Jumlah Rumah Tangga Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022 .....                                     | II-203 |
| Gambar 2.116 | Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022 .....                        | II-203 |
| Gambar 2.117 | Jumlah Kebutuhan Baku Ikan Untuk Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2018 - 2022 ..... | II-204 |
| Gambar 2.118 | Luas Kolam Air Tenang (Ha) Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022 .....                                        | II-205 |



|              |                                                                                                                             |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar 2.119 | Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022 .....                                               | II-206 |
| Gambar 2.120 | Jumlah Promosi Pariwisata (Event) Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022 .....                                                | II-210 |
| Gambar 2.121 | Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dan Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata Dibina (Orang) Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022 ..... | II-211 |
| Gambar 2.122 | Jumlah Hotel dan Rumah Makan Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022 .....                                                     | II-211 |
| Gambar 2.123 | Jumlah Komoditas Pertanian di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                                                      | II-213 |
| Gambar 2.124 | Jumlah Kelompok Ternak di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                                                          | II-215 |
| Gambar 2.125 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Ha) Tahun 2022 ...                                                                         | II-219 |
| Gambar 2.126 | Jumlah Usaha Perdagangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                                                        | II-220 |
| Gambar 2.127 | Jenis Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021 .....                                                 | II-221 |
| Gambar 2.128 | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                                             | II-222 |
| Gambar 2.129 | Proses Bisnis Aplikasi Simpati Kabupaten Sumedang.                                                                          | II-228 |
| Gambar 2.130 | Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                                                             | II-229 |
| Gambar 2.131 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin) Bidang Perizinan Tahun 2018-2022 .....                                                    | II-230 |
| Gambar 6.1   | Fokus RPD Tahun 2024-2026.....                                                                                              | VI-16  |
| Gambar 6.2   | Peta Rencana Struktur Ruang .....                                                                                           | VI-85  |
| Gambar 6.3   | Peta Rencana Pola Ruang .....                                                                                               | VI-86  |
| Gambar 6.4   | Kawasan Strategis Kabupaten .....                                                                                           | VI-87  |
| Gambar 6.5   | Kawasan Strategis Kabupaten .....                                                                                           | VI-88  |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                           |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2.1  | Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan .....                                                                                   | II-2  |
| Tabel 2.2  | Curah Hujan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                                                                        | II-4  |
| Tabel 2.3  | Suhu Udara Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                                                                            | II-5  |
| Tabel 2.4  | Kawasan Rawan Bencana.....                                                                                                                | II-7  |
| Tabel 2.5  | Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan<br>Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan<br>di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ..... | II-10 |
| Tabel 2.6  | Jumlah Penduduk dan Data Kemiskinan Ekstrem<br>Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....                                                         | II-31 |
| Tabel 2.7  | Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang<br>Tahun 2018-2022 .....                                                                        | II-38 |
| Tabel 2.8  | Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha .....                                                                                    | II-43 |
| Tabel 2.9  | Objek Cagar Budaya di Kabupaten Sumedang yang Telah<br>Ditetapkan.....                                                                    | II-45 |
| Tabel 2.10 | Objek Diduga Cagar Budaya.....                                                                                                            | II-47 |
| Tabel 2.11 | Jenis Pelaku Seni per Kecamatan di Kabupaten Sumedang<br>Tahun 2022 .....                                                                 | II-49 |
| Tabel 2.12 | Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang<br>Tahun 2021-2022 .....                                                                 | II-57 |
| Tabel 2.13 | Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut<br>Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....                                | II-67 |
| Tabel 2.14 | Data Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut<br>Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang<br>Tahun 2021-2022 .....                     | II-68 |
| Tabel 2.15 | Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang<br>Tahun 2021-2022 .....              | II-69 |
| Tabel 2.16 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)<br>di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 .....                                        | II-69 |
| Tabel 2.17 | Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan<br>Jiwa Berat di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 .....                                  | II-70 |
| Tabel 2.18 | Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sumedang<br>Tahun 2021-2022 .....                                                                  | II-70 |
| Tabel 2.19 | Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan<br>Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 .....                                          | II-77 |
| Tabel 2.20 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana<br>di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 .....                                      | II-78 |
| Tabel 2.21 | Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan<br>Permukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 .....                                           | II-79 |
| Tabel 2.22 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten<br>Sumedang .....                                                                          | II-81 |
| Tabel 2.23 | Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan<br>Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang<br>Tahun 2021-2022 .....               | II-84 |
| Tabel 2.24 | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial (Orang)<br>Tahun 2018-2022 .....                                                            | II-86 |
| Tabel 2.25 | Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Sumedang<br>Tahun 2021-2022 .....                                                                     | II-86 |
| Tabel 2.26 | Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022..                                                                                    | II-93 |
| Tabel 2.27 | Tenaga Kesehatan Tahun 2022.....                                                                                                          | II-94 |

|            |                                                                                                                          |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.28 | Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                                   | II-95  |
| Tabel 2.29 | Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....   | II-99  |
| Tabel 2.30 | Jumlah Backlog Rumah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 .....                                                                 | II-103 |
| Tabel 2.31 | Luas Kawasan Kumuh (Ha) Tahun 2018-2022 .....                                                                            | II-105 |
| Tabel 2.32 | Daftar Kawasan Kumuh Di Kabupaten Sumedang Berdasarkan SK Kumuh Kabupaten Sumedang Nomor 122 Tahun 2022 .....            | II-106 |
| Tabel 2.33 | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Oktober 2022.....                                                           | II-110 |
| Tabel 2.34 | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Orang) Tahun 2018-2022 .....                                              | II-112 |
| Tabel 2.35 | Kategori Indeks Kualitas Air .....                                                                                       | II-124 |
| Tabel 2.36 | Kategori Indeks Kualitas Udara .....                                                                                     | II-126 |
| Tabel 2.37 | Jalur Trayek Angkutan Kota.....                                                                                          | II-137 |
| Tabel 2.38 | Jalur Trayek Angkutan Pedesaan .....                                                                                     | II-137 |
| Tabel 2.39 | Lokasi CCTV Terkoordinasi dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tahun 2022.....                                | II-143 |
| Tabel 2.40 | Lokasi Perangkat <i>Traffic Counting</i> Terpasang Tahun 2022 .....                                                      | II-143 |
| Tabel 2.41 | Lokasi CCTV Berdasarkan Jenis Kamera Terpasang Tahun 2022 .....                                                          | II-143 |
| Tabel 2.42 | Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2022 .....                                                             | II-146 |
| Tabel 2.43 | Layanan Jaringan Internet Blank Spot di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                              | II-150 |
| Tabel 2.44 | Pinjaman Bank Umum Kepada UMKM Kabupaten Sumedang Berdasarkan Skala Usaha (Ribu Rupiah) Tahun 2018-2022 .....            | II-172 |
| Tabel 2.45 | Pinjaman Bank Umum dan BPR Kepada UMKM Kabupaten Sumedang Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022 ..... | II-173 |
| Tabel 2.46 | Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                            | II-177 |
| Tabel 2.47 | Data Seni dan Budaya Tahun 2018-2022 .....                                                                               | II-185 |
| Tabel 2.48 | Jenis Perpustakaan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                                                              | II-189 |
| Tabel 2.49 | Jumlah Arsip Aktif, Arsip Inaktif dan Arsip Statis di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .....                           | II-193 |
| Tabel 2.50 | Tempat Penyimpanan Arsip di Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....                                          | II-193 |
| Tabel 2.51 | Sosialisasi Pemahaman Arsip terhadap Perangkat Daerah dan BUMD Tahun 2022 .....                                          | II-199 |
| Tabel 2.52 | Jenis Ikan pada Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2018 - 2022 .....                              | II-201 |
| Tabel 2.53 | Jenis Ikan pada Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022 .....                             | II-202 |
| Tabel 2.54 | Jenis Wisata dan Jumlah Wisatawan Tahun 2022.....                                                                        | II-206 |
| Tabel 2.55 | Jumlah Pengusaha pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang (Orang) Tahun 2018 - 2022 .....                      | II-212 |



|            |                                                                                                                            |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.56 | Jumlah Kasus Hewan Ternak yang Terinfeksi Penyakit Menular di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022.....                      | II-216 |
| Tabel 2.57 | Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....                                             | II-217 |
| Tabel 2.58 | Jumlah Usaha Industri Pengolahan yang Sudah Tersertifikasi Tahun 2018 - 2022.....                                          | II-222 |
| Tabel 2.59 | Penempatan Transmigran Asal Kabupaten Sumedang .....                                                                       | II-225 |
| Tabel 2.60 | Jenis Layanan pada MPP Kabupaten Sumedang .....                                                                            | II-230 |
| Tabel 2.61 | Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi Tahun 2016-2022 .....                                                           | II-233 |
| Tabel 2.62 | Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2022 .....                                                                                 | II-235 |
| Tabel 2.63 | Rasio Pencari Kerja Lulusan S-1/S-2/S-3 di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2022 (%).....                                     | II-236 |
| Tabel 2.64 | Jumlah PNS yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan .....                                                           | II-237 |
| Tabel 2.65 | Capaian Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2021 (Sebelum Perubahan) .....                              | II-239 |
| Tabel 2.66 | Capaian Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Sesudah Perubahan) .....                                   | II-242 |
| Tabel 2.67 | Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2021 (Sebelum Perubahan) ..... | II-246 |
| Tabel 2.68 | Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Sesudah Perubahan).II-                   | 271    |
| Tabel 2.69 | Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....                                        | II-273 |
| Tabel 2.70 | Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                            | II-274 |
| Tabel 2.71 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....                                        | II-277 |
| Tabel 2.72 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....                                         | II-279 |
| Tabel 2.73 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                | II-281 |
| Tabel 2.74 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....     | II-283 |
| Tabel 2.75 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                           | II-284 |
| Tabel 2.76 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                    | II-284 |
| Tabel 2.77 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                   | II-285 |
| Tabel 2.78 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                | II-286 |
| Tabel 2.79 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                 | II-288 |
| Tabel 2.80 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan                           |        |

|            |                                                                                                                                                       |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten<br>Sumedang Tahun 2022 .....                                                                                | II-289 |
| Tabel 2.81 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                                              | II-290 |
| Tabel 2.82 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi,<br>Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten<br>Sumedang Tahun 2022 .....                     | II-291 |
| Tabel 2.83 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi,<br>Usaha Kecil, Mikro, Menengah, Perindustrian dan<br>Perdagangan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ..... | II-292 |
| Tabel 2.84 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman<br>Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten<br>Sumedang Tahun 2022 .....                          | II-293 |
| Tabel 2.85 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata,<br>Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten<br>Sumedang Tahun 2022 .....                       | II-294 |
| Tabel 2.86 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan<br>Perpustakaan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                                   | II-295 |
| Tabel 2.87 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ....                                            | II-297 |
| Tabel 2.88 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan<br>Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                                 | II-298 |
| Tabel 2.89 | Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah<br>Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....          | II-299 |
| Tabel 2.90 | Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian<br>dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten<br>Sumedang Tahun 2022 .....                      | II-300 |
| Tabel 2.91 | Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan<br>Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                                 | II-301 |
| Tabel 2.92 | Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan<br>Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                                        | II-301 |
| Tabel 2.93 | Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                                     | II-302 |
| Tabel 2.94 | Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                            | II-302 |
| Tabel 2.95 | Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ....                                               | II-303 |
| Tabel 2.96 | Rekapitulasi Capaian indikator Program dan Kegiatn<br>RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....                                                        | II-304 |
| Tabel 3.1  | Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja<br>Daerah Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2022 .....                                                 | III-5  |
| Tabel 3.2  | Necara Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 .....                                                                                                         | III-10 |
| Tabel 3.3  | Proporsi Realiasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018<br>sampai dengan Tahun 2022 .....                                                                    | III-13 |
| Tabel 3.4  | Kontirubusi Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah<br>Tahun 2018 -2023 .....                                                                         | III-15 |
| Tabel 3.5  | Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah<br>Tahun 2018 – 2023 .....                                                                           | III-15 |
| Tabel 3.6  | Defisit Rill Kabupaten Sumedang .....                                                                                                                 | III-16 |
| Tabel 3.7  | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten<br>Sumedang .....                                                                                   | III-17 |
| Tabel 3.8  | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten<br>Sumedang .....                                                                                 | III-17 |

|            |                                                                                                                                                                 |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 3.9  | Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 sampai dengan 2026 Kabupaten Sumedang ..                                                          | III-23  |
| Tabel 3.10 | Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah .....                                                                                | III-26  |
| Tabel 3.11 | Rencana Penggunaan Kapasitas Ril Keuangan Daerah .....                                                                                                          | III-26  |
| Tabel 4.1  | Telaahan RPJMD/RPD Kabupaten Berbatasan Kabupaten Sumedang .....                                                                                                | IV-42   |
| Tabel 4.2  | Keselarasan Isu Strategis Nasional dengan Isu Strategis Kabupaten Sumedang .....                                                                                | IV-51   |
| Tabel 4.3  | Keselarasan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dengan Isu Strategis Kabupaten Sumedang.....                                                                      | IV-54   |
| Tabel 4.4  | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang .....                                                                        | IV-59   |
| Tabel 5.1  | Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 .....                                                              | V-8     |
| Tabel 5.2  | Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 .....                                         | V-12    |
| Tabel 6.1  | Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 .....                                                                                        | VI-6    |
| Tabel 6.2  | Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 .....                                                                                   | VI-17   |
| Tabel 6.3  | Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah .....                                                                                                             | VI-78   |
| Tabel 6.4  | Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Sumedang .....                                                                                                              | VI-86   |
| Tabel 6.5  | Pemetaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan .....                                                                                                            | VI-90   |
| Tabel 6.6  | Daftar Program/Proyek Perpres No. 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan Di Kabupaten Sumedang ..... | VI-103  |
| Tabel 7.1  | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 .....                                                    | VII-2   |
| Tabel 7.2  | Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 .....                                                   | VII-4   |
| Tabel 8.1  | Indikator Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026                                                                                                              | VIII-2  |
| Tabel 8.2  | Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 .....                                                                       | VIII-3  |
| Tabel 8.3  | Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Dampak (Impact) Tahun 2024-2026 .....                      | VIII-7  |
| Tabel 8.4  | Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Hasil (Outcome) Tahun 2024-2026 .....                      | VIII-70 |



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024-2026

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 akan berakhir pada Tahun 2023 sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2018 - 2023. Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Sumedang yang baru akan dilakukan pada tahun 2024 melalui pilkada serentak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam upaya mewujudkan dan menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Pusat melalui Kememterian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026 yang

selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun secara teknokratik dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud dengan memperhatikan:

1. Target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
4. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi berlaku.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menerapkan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah antara lain :

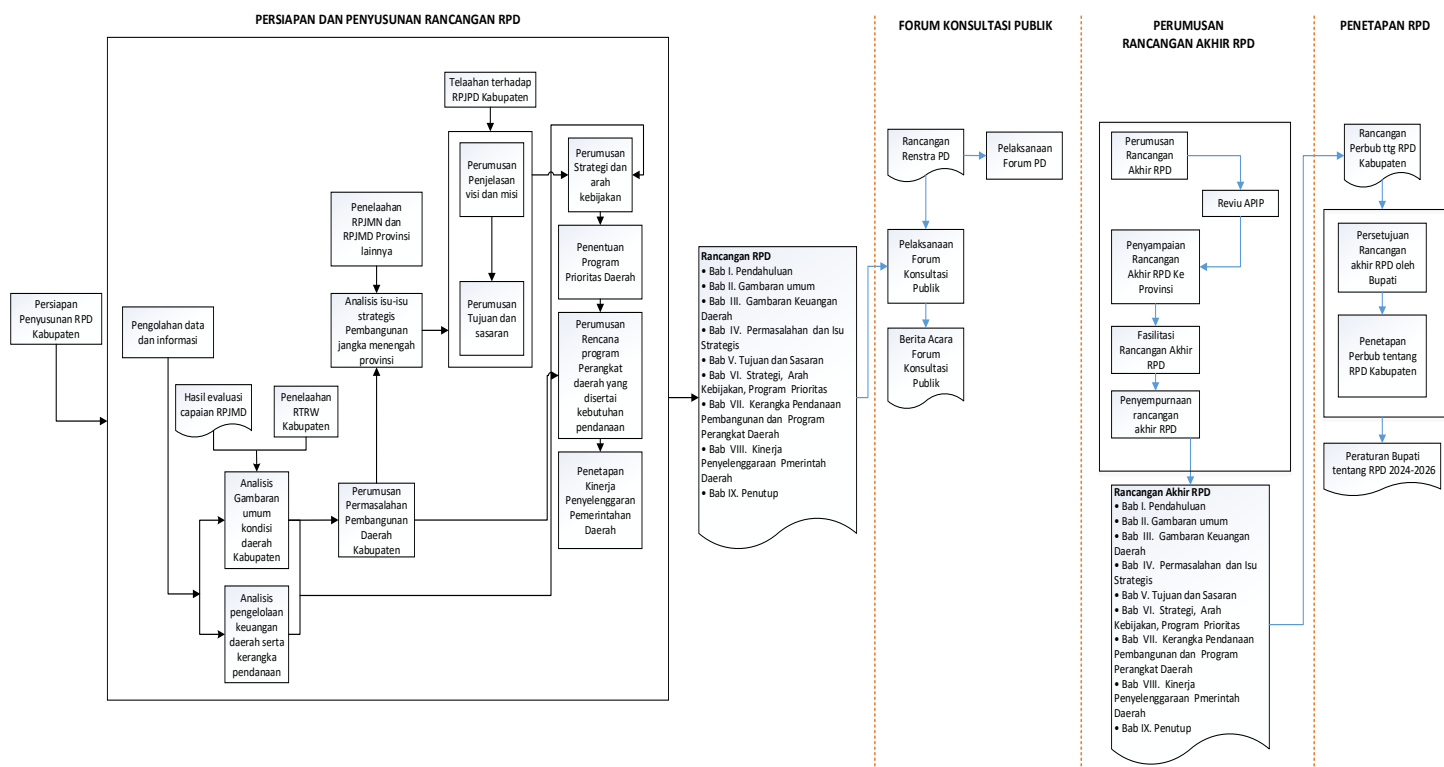
1. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
3. Pendekatan Holistik-Tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
4. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus

yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, forum konsultasi publik, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir dan penetapan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Alur penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disajikan pada gambar di bawah.

**Gambar 1.1**  
**Tahapan Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2024-2026**



Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan digunakan Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada Tahun 2024 serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024-2026 dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.



### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPD**

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara pusat dan daerah.

**1.3.1. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2026**

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 dilaksanakan dengan menyelaraskan target indikator makro dan program prioritas nasional yang tercantum dalam Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

**1.3.2. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026**

Dokumen RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dengan menyelaraskan indikator makro dan program prioritas daerah Provinsi Jawa Barat.

**1.3.3. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025**

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 02 Tahun—2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 yang termuat dalam Visi dan Misi Kabupaten Sumedang 20 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024–2026 didasarkan pada visi RPJPD Kabupaten, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.



#### **1.3.4. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 pada rentang waktu 3 (tiga) tahun, dimana Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran teknis RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka 3 (tiga) tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten dan Renstra PD agar memperhatikan:

- a. Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD Tahun 2018-2023 masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2023;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2023 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;

Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

### **1.3.5. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038**

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 memperhatikan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2038 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah Kabupaten Sumedang dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

### **1.3.6. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Sektor**

Selain hubungannya dengan beberapa dokumen perencanaan tersebut, RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain:

1. RPJMD/RPD dan RTRW Kabupaten sekitar;
2. Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
4. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kabupaten Sumedang.

## **1.4. Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1. Maksud**

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 dengan peraturan perundangan–undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya serta permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir serta penyesuaian nomenklatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Dokumen hasil RPD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama.

#### **1.4.2. Tujuan**

Selanjutnya, tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), distrik maupun kampung/kelurahan;
- b. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan pada level pemerintah, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama tahun 2024–2026;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang;
- e. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RPD ini;
- f. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024–2026;
- g. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 oleh Penjabat Kepala Daerah.

**1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 sebagai berikut:

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I   | PENDAHULUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Dalam bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari: (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum, (3) Hubungan antar Dokumen, (4) Maksud dan Tujuan serta (5) Sistematika Penulisan.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BAB II  | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Dalam bab ini menjelaskan dan menyajikan tentang Gambaran Umum selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi: (1) Aspek Geografi dan Demografi; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Pelayanan Umum; dan (4) Aspek Daya Saing Daerah.                                                                                                                                                                                                                       |
| BAB III | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Pada bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data serta analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: (1) Gambaran Keuangan Daerah terdiri dari kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah; (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu terdiri atas Proporsi Penggunaan Anggaran dan Analisis Pembiayaan; serta (3) Kerangka Pendanaan 3 (tiga) tahun yang terdiri atas Proyeksi Pendapatan dan Belanja serta Penghitungan Kerangka Pendanaan. |
| BAB IV  | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Dalam bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi: (1) Permasalahan Pembangunan; dan (2) Isu Strategis yang memperhatikan isu/kebijakan global, nasional, regional, daerah sekitar dan kebijakan Kabupaten Sumedang.                                                                                                                                                                                                                                         |
| BAB V   | TUJUAN DAN SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Pada Bab ini berisi penyajian terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024–2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BAB VI  | STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGNAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Dalam bab ini berisi tentang: (1) Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran; serta (2) Arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 3 (tiga) tahun.

**BAB VII      KERANGKA    PENDANAAN    PEMBANGUNAN    DAN  
PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Target, Perangkat Daerah Penanggung Jawab berdasarkan bidang urusan yang terdiri dari Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.

**BAB VIII    KINERJA    PENYELENGGARAAN    PEMERINTAHAN  
DAERAH**

Dalam Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode.

**BAB IX      PENUTUP**

Pada bagian ini menjelaskan tentang RPD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD dibawah kepemimpinan Penjabat Kepala Daerah. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPD dijadikan pedoman bagi setiap kepala PD dalam menyusun Renstra PD dan setelah ditetapkan RPD maka Renstra PD akan menyesuaikan.

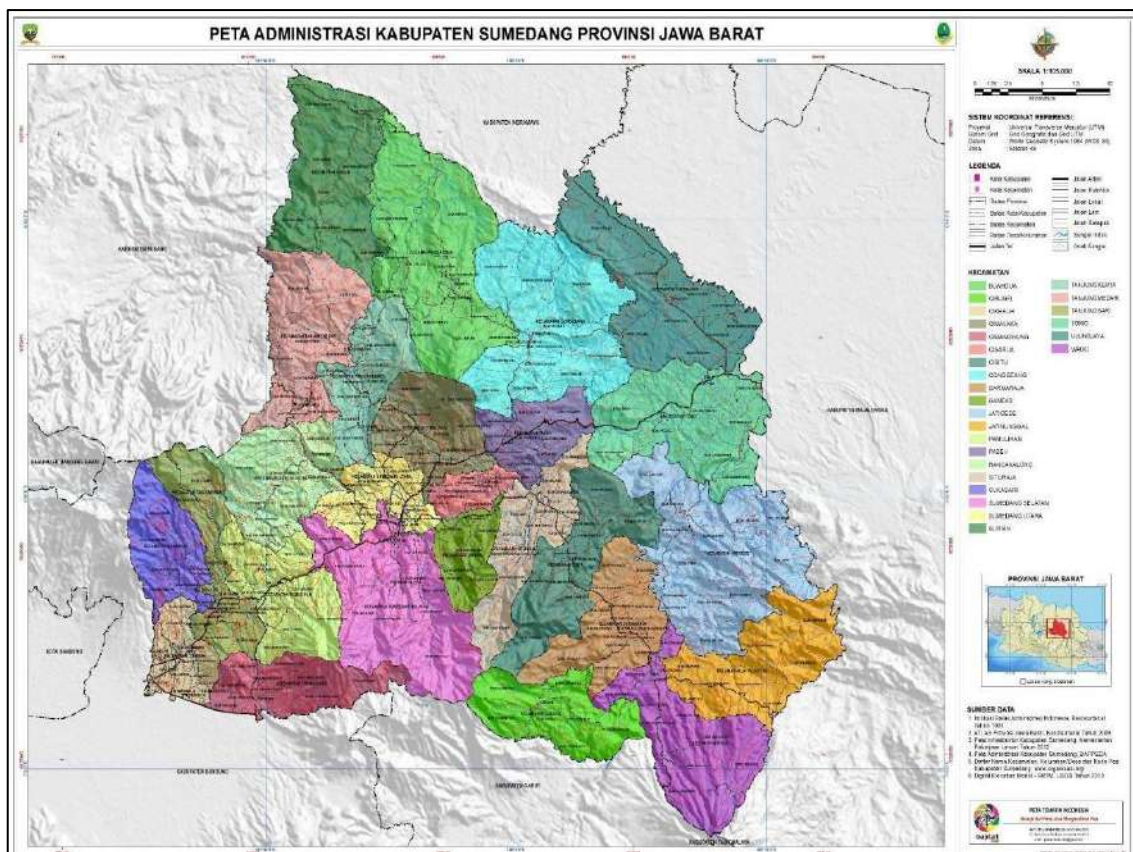
## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1. Aspek Geografi

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06°34'46,18"-7°00'56,25" Lintang Selatan dan 107°01'45,63"- 108°12'59,04" Bujur Timur (Gambar 2.1).

## Peta Administrasi Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

Batas Wilayah:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu;
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya;
- c) Sebelah Barat : Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung; dan

d) Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.

Adapun luas wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dan terbagi menjadi 270 desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Jatigede sebesar 11.394 Ha, dan luasan terkecil adalah Kecamatan Cisarua sebesar 1.452 Ha. Adapun luas wilayah per Kecamatan, sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan**  
**di Kabupaten Sumedang**

| No | Kecamatan        | Luas (Ha) | Desa | Kelurahan | Presentase (%) |
|----|------------------|-----------|------|-----------|----------------|
| 1  | Wado             | 7.331     | 10   |           | 4,71%          |
| 2  | Jatinunggal      | 6.322     | 9    |           | 4,05%          |
| 3  | Darmaraja        | 5.413     | 12   |           | 3,47%          |
| 4  | Cibugel          | 5.004     | 7    |           | 3,21%          |
| 5  | Cisitu           | 6.410     | 10   |           | 4,10%          |
| 6  | Situraja         | 5.668     | 15   |           | 3,64%          |
| 7  | Conggeang        | 11.168    | 12   |           | 7,20%          |
| 8  | Paseh            | 3.387     | 10   |           | 2,17%          |
| 9  | Surian           | 7.630     | 9    |           | 4,90%          |
| 10 | Buahdua          | 11.156    | 14   |           | 7,15%          |
| 11 | Tanjungsari      | 4.325     | 12   |           | 2,77%          |
| 12 | Sukasari         | 3.904     | 7    |           | 2,50%          |
| 13 | Pamulihan        | 5.377     | 11   |           | 3,44%          |
| 14 | Cimanggung       | 4.305     | 11   |           | 2,76%          |
| 15 | Jatinangor       | 2.570     | 12   |           | 1,64%          |
| 16 | Rancakalong      | 5.505     | 10   |           | 3,59%          |
| 17 | Sumedang Selatan | 9.675     | 10   | 4         | 6,20%          |
| 18 | Sumedang Utara   | 3.141     | 10   | 3         | 2,01%          |
| 19 | Ganeas           | 2.531     | 8    |           | 1,62%          |
| 20 | Tanjungkerta     | 4.399     | 12   |           | 2,82%          |
| 21 | Tanjungmedar     | 6.687     | 9    |           | 4,29%          |
| 22 | Cimalaka         | 4.763     | 14   |           | 3,05%          |
| 23 | Cisarua          | 1.452     | 7    |           | 0,93%          |

| No            | Kecamatan | Luas (Ha)      | Desa       | Kelurahan | Presentase (%) |
|---------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 24            | Tomo      | 7.541          | 9          |           | 4,87%          |
| 25            | Ujungjaya | 8.692          | 9          |           | 5,61%          |
| 26            | Jatigede  | 11.394         | 11         |           | 7,31%          |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>155.872</b> | <b>270</b> | <b>7</b>  | <b>100%</b>    |

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang Dalam Angka Tahun 2022

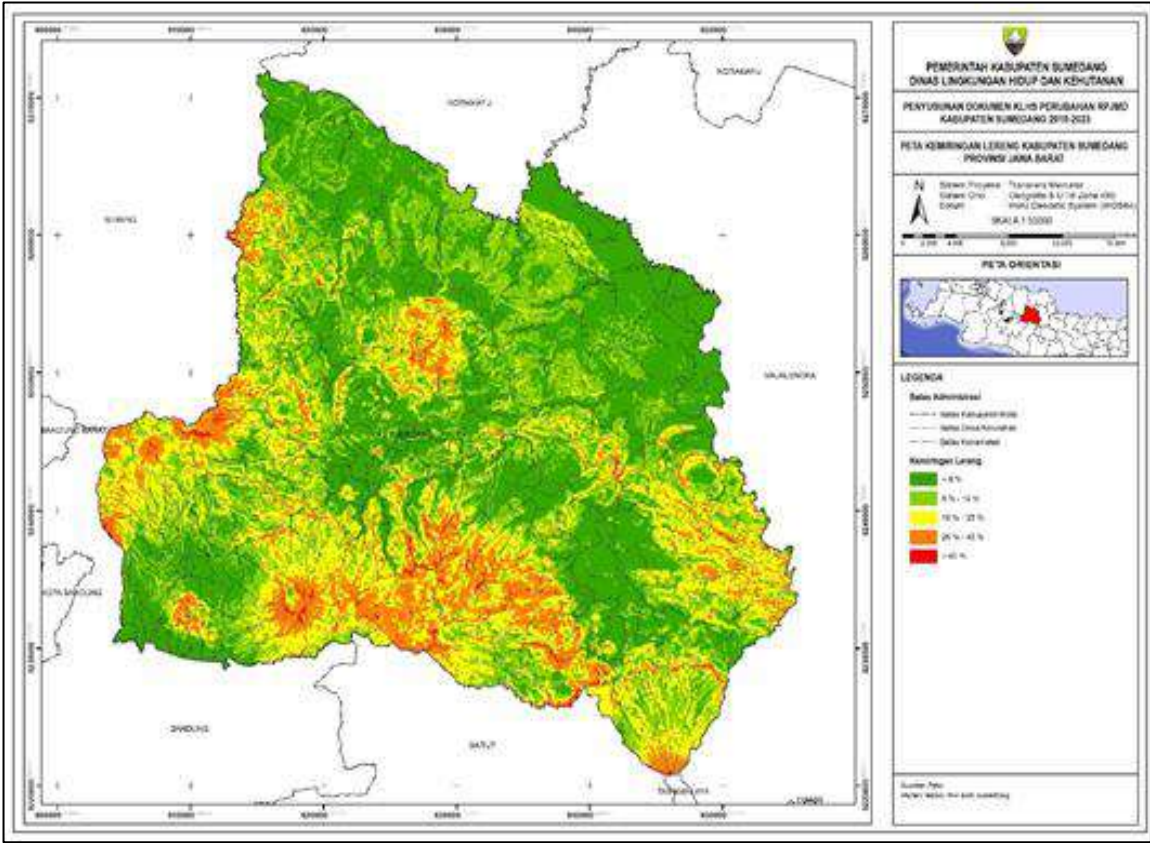
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Dataran terendah yang terdapat di Kabupaten Sumedang ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

1. 0-8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan per kabupaten-an;
2. 8-15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15-25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25-40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.



Peta Kemiringan Kabupaten Sumedang yang bersumber dari RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 diperlihatkan pada Gambar 2.2 dibawah ini.

**Gambar 2.2**  
**Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang**



Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis serta pertemuan arus udara. Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis, suhu rata-rata tahunan adalah 27,9<sup>0</sup>C. Curah hujan tertinggi sepanjang Tahun 2022 terjadi pada Bulan Maret yang mencapai 431,9 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari hujan 22 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus yaitu 22,3 mm<sup>3</sup>. Berikut adalah data curah hujan di Kabupaten Sumedang sepanjang Tahun 2022.

**Tabel 2.2**  
**Curah Hujan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| Bulan    | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| Januari  | 324,4                   | 21                       |
| Februari | 349,8                   | 23                       |
| Maret    | 431,9                   | 22                       |

| Bulan     | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) |
|-----------|-------------------------|--------------------------|
| April     | 428,0                   | 22                       |
| Mei       | 241,3                   | 18                       |
| Juni      | 105,8                   | 17                       |
| Juli      | 165,2                   | 11                       |
| Agustus   | 22,3                    | 2                        |
| September | 37,3                    | 6                        |
| Oktober   | 360,4                   | 19                       |
| November  | 374,6                   | 21                       |
| Desember  | 223,7                   | 23                       |

Sumber: [id.climate-data.org](https://id.climate-data.org), hasil pengolahan 2020

Sedangkan berdasarkan data keadaan iklim, bulan September merupakan bulan terhangat sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 28,5 °C, dan bulan Februari merupakan bulan dengan suhu terendah yaitu 26,6 °C (Tabel 2.3).

**Tabel 2.3**  
**Suhu Udara Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| Bulan             | Suhu rata-rata (°C) | Suhu maksimum rata-rata (°C) | Suhu minimum rata-rata (°C) |
|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Januari           | 27,2                | 34,2                         | 22,9                        |
| Februari          | 26,6                | 33,8                         | 22,6                        |
| Maret             | 27,3                | 35                           | 22,8                        |
| April             | 27,7                | 34,9                         | 23,3                        |
| Mei               | 27,9                | 35,8                         | 22,8                        |
| Juni              | 26,9                | 33,7                         | 21,9                        |
| Juli              | 27,5                | 34,4                         | 19,8                        |
| Agustus           | 28,1                | 35                           | 22,4                        |
| September         | 28,5                | 36,2                         | 22,8                        |
| Oktober           | 27,4                | 35,6                         | 22,8                        |
| November          | 27,3                | 35                           | 22,9                        |
| Desember          | 26,9                | 35                           | 22,6                        |
| Rata-rata tahunan | 27,44               | 34,88                        | 22,47                       |

Sumber : [accuweather.com](https://www.accuweather.com), diolah (2023)

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan di dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah. Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Sumedang sebagian besar merupakan jaringan lintas kabupaten, yaitu sungai yang hulu atau hilirnya berada di antara Wilayah Kabupaten Sumedang dengan wilayah Kabupaten tetangga. Wilayah Sungai tersebut meliputi:

1. WS Cipunagara terkait dengan Kabupaten Subang adalah Sungai Cipunagara;
2. WS Ciplanas terkait dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Ciplanas, Sungai Cigalagah, dan Sungai Cikandung;
3. WS Citarum terkait dengan Kabupaten Bandung adalah Sungai Cikeruh dan Sungai Citarik (relatif kecil);
4. WS Cimanuk terkait dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Cipelang, Sungai Cimanuk, dan Sungai Cilutung.

**Gambar 2.3**  
**Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang**



Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 (empat) DAS dengan 6 (enam) Sub DAS, yaitu:

- 1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
- 2. DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;
- 3. DAS Cipunagara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
- 4. DAS Cipanas.

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung, dan gempa bumi. Gerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada umumnya dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng.

Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlipatan terhadap kemiringan lerengnya), tata guna lahan, morfologi, dan kegempaan. Kawasan rawan bencana Gerakan tanah di Kabupaten Sumedang memiliki luas kurang lebih 21.671 hektar yang tersebar di sebagian wilayah Sumedang. Sedangkan bencana banjir sering disebabkan oleh drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan. Secara rinci Kawasan bencana Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

**Tabel 2.4 Kawasan Rawan Bencana**

| No | Kawasan Bencana | Lokasi                                                                                                                                                            | Keterangan                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Gerakan Tanah   | Tersebar di sebagian wilayah Kabupaten, terutama di sekitar Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Conggeang, | Luas kurang lebih 21.612 Ha |



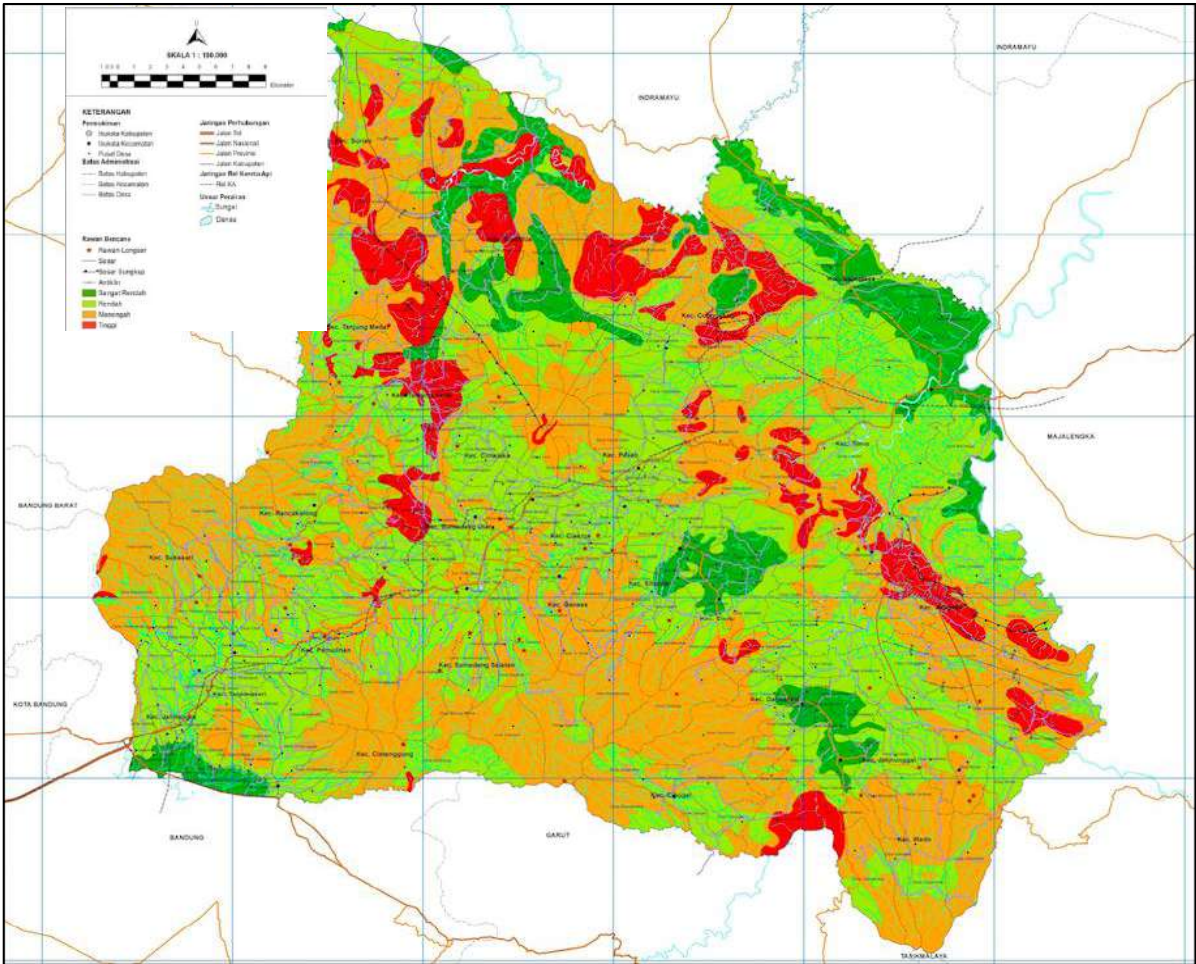
| No | Kawasan Bencana | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keterangan                                                                                                                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Tomo, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Jatinunggal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |
| 2  | Banjir          | a. Kecamatan Jatinangor;<br>b. Kecamatan Cimanggung;<br>c. Kecamatan Ujungjaya;<br>d. Kecamatan Tomo;<br>e. Kecamatan Sumedang Utara;<br>dan<br>f. Kecamatan Sumedang Selatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terjadi akibat dari drainase yang kurang memadai, tutupan lahan, dan peningkatan debit air di beberapa titik lintasan sungai. |
| 3  | Puting Beliung  | a. Kecamatan Cimanggung;<br>b. Kecamatan Cimalaka;<br>c. Kecamatan Cisarua;<br>d. Kecamatan Ujungjaya; dan<br>e. Kecamatan Wado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                             |
| 4  | Gempa Bumi      | a. Kecamatan Jatinangor;<br>b. Kecamatan Cimanggung;<br>c. Kecamatan Pamulihan;<br>d. Kecamatan Tanjungsari;<br>e. Kecamatan Sukasari;<br>f. Kecamatan Rancakalong;<br>g. Kecamatan Sumedang Utara;<br>h. Kecamatan Sumedang Selatan;<br>i. Kecamatan Ganeas;<br>j. Kecamatan Cisarua;<br>k. Kecamatan Cimalaka;<br>l. Kecamatan Paseh;<br>m. Kecamatan Tanjungkerta;<br>n. Kecamatan Tanjungsari;<br>o. Kecamatan Situraja;<br>p. Kecamatan Cisitua;<br>q. Kecamatan Darmaraja;<br>r. Kecamatan Wado;<br>s. Kecamatan Jatinunggal;<br>t. Kecamatan Jatigede;<br>u. Kecamatan Tomo;<br>v. Kecamatan Ujungjaya; | -                                                                                                                             |

| No | Kawasan Bencana | Lokasi                                                                       | Keterangan |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                 | w. Kecamatan Conggeang;<br>x. Kecamatan Buahdua; dan<br>y. Kecamatan Surian. |            |

Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Secara umum daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Gambar 2.4 dibawah ini:

Gambar 2.4  
Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038

2.1.2. Demografi

Berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2022 semester II mengenai Jumlah Penduduk, Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga yang tersebar di 26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.187.620 jiwa yang terdiri atas 598.352 jiwa penduduk laki-laki

dan 589.268 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 11.602 jiwa. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai angka 762 jiwa per Km<sup>2</sup> dan wilayah terpadat terdapat di Kecamatan Sumedang Utara dengan angka kepadatan 3.331 jiwa per km<sup>2</sup>. Dari segi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Cimanggung sebanyak 2.764 jiwa, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Jatigede sebanyak 222 jiwa.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk**  
**serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten**  
**Sumedang Tahun 2022**

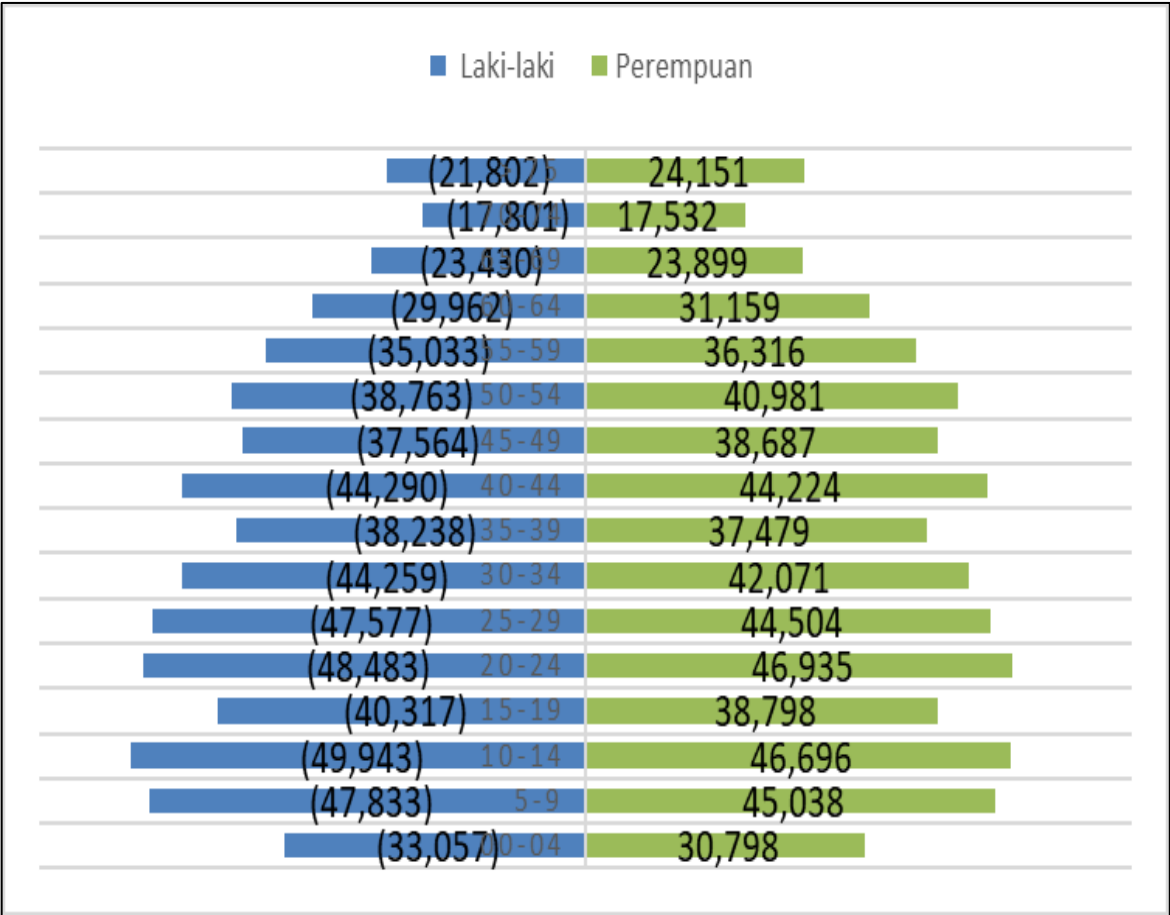
| No | Kecamatan   | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) | Pertumbuhan |
|----|-------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1  | Wado        | 44.983                 | 84,27                           | 534                               | 729         |
| 2  | Jatinunggal | 46.486                 | 72,12                           | 645                               | 674         |
| 3  | Darmaraja   | 37.597                 | 49,38                           | 762                               | 647         |
| 4  | Cibugel     | 25.174                 | 59,52                           | 423                               | 294         |
| 5  | Cisitu      | 31.090                 | 65,03                           | 478                               | 541         |
| 6  | Situraja    | 43.135                 | 43,23                           | 998                               | 883         |
| 7  | Conggeang   | 29.409                 | 106,98                          | 275                               | 516         |
| 8  | Paseh       | 38.731                 | 31,62                           | 1.225                             | 761         |
| 9  | Surian      | 12.009                 | 70,88                           | 169                               | 289         |
| 10 | Buahdua     | 33.477                 | 107,68                          | 311                               | 536         |
| 11 | Tanjungsari | 86.931                 | 44,86                           | 1,938                             | 1.948       |
| 12 | Sukasari    | 34.381                 | 41,82                           | 822                               | 664         |

| No              | Kecamatan        | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) | Pertumbuhan |
|-----------------|------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 13              | Pamulihan        | 64.182                 | 50,70                           | 1,266                             | 1.559       |
| 14              | Cimanggung       | 90.551                 | 55,55                           | 1,630                             | 2.764       |
| 15              | Jatinangor       | 92.738                 | 31,60                           | 2,935                             | 1.347       |
| 16              | Rancakalong      | 41.924                 | 55,07                           | 761                               | 918         |
| 17              | Sumedang Selatan | 82.123                 | 92,51                           | 888                               | 1.247       |
| 18              | Sumedang Utara   | 101.269                | 30,40                           | 3,331                             | 2.146       |
| 19              | Ganeas           | 26.352                 | 22,90                           | 1,151                             | 459         |
| 20              | Tanjungkerta     | 35.285                 | 43,72                           | 807                               | 686         |
| 21              | Tanjungmedar     | 26.956                 | 60,67                           | 444                               | 525         |
| 22              | Cimalaka         | 63.397                 | 43,29                           | 1,464                             | 1.118       |
| 23              | Cisarua          | 21.349                 | 17,71                           | 1,205                             | 282         |
| 24              | Tomo             | 23.623                 | 84,74                           | 279                               | 322         |
| 25              | Ujungjaya        | 31.780                 | 86,23                           | 369                               | 496         |
| 26              | Jatigede         | 22.688                 | 106,24                          | 214                               | 222         |
| Total Kabupaten |                  | 1.187.620              | 1.558,72                        | 762                               | 22.573      |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2023)

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.5.

**Gambar 2.5**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2022**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2023)

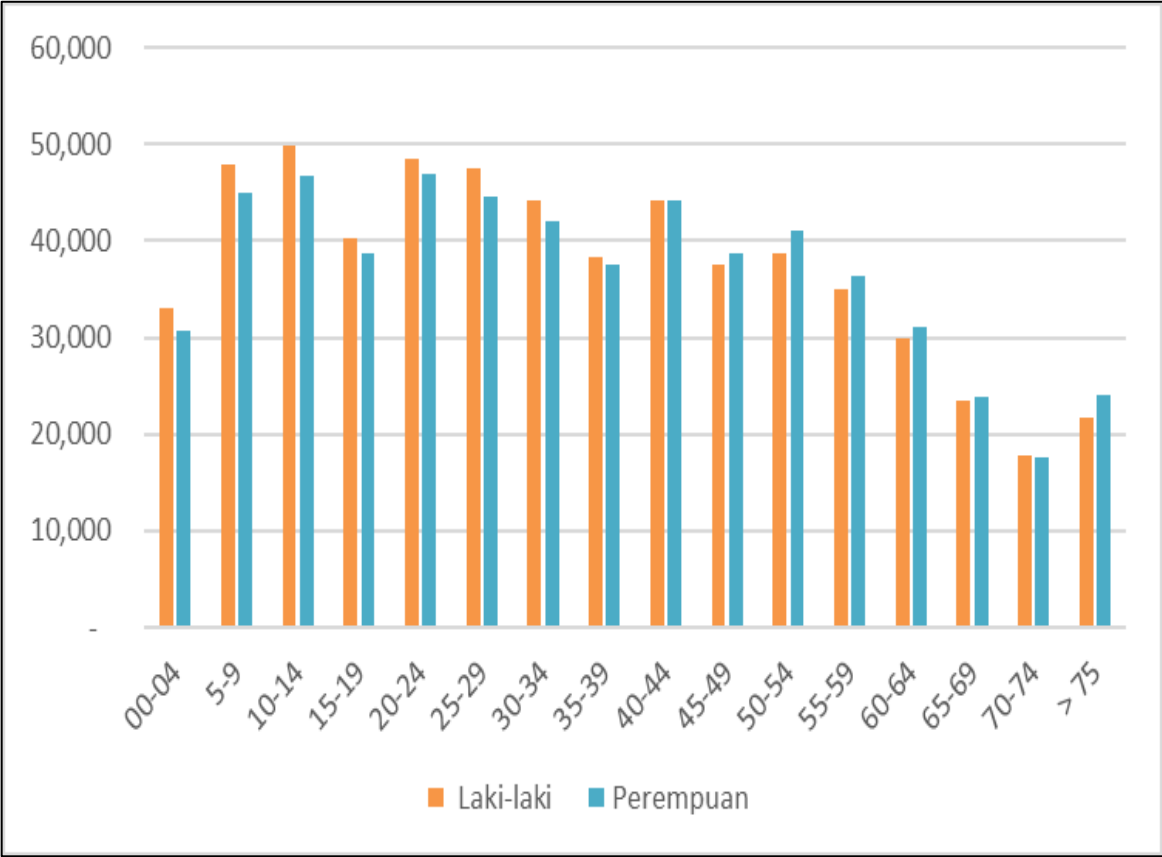
Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga, Penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 14 tahun) sebesar 26,48 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 67,83 persen, dan jumlah penduduk lansia ( $\geq 65$  tahun) tergolong kecil yaitu 10,83 persen. Dengan struktur seperti tersebut diatas merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat Angka Beban Tanggungan (ABT). Pada tahun 2022 ABT di Kabupaten



Sumedang sebesar 55 persen. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 55 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan ABT Tahun 2021 sebesar 47 persen.

**Gambar 2.6**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

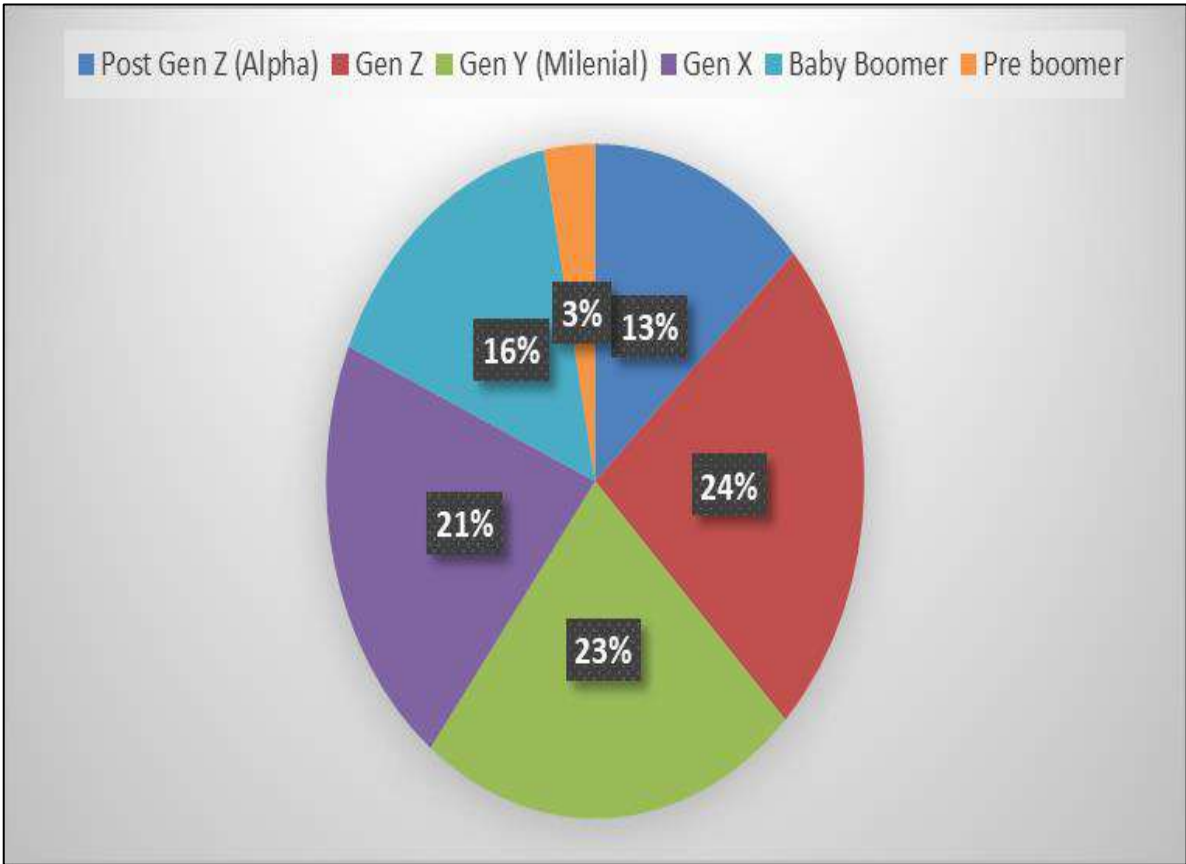


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang (2023)

Dari Gambar 2.6 dapat dilihat bahwa untuk penduduk laki-laki jumlah terbesar berada pada rentang umur 10 – 14 Tahun sebanyak 49.943 jiwa dengan proporsi sebesar 4,20%, dan jumlah penduduk Laki-laki terendah berada pada rentang umur 70 - 74 Tahun sebanyak 17.801 jiwa atau sebesar 1,50%. Begitu pula bagi penduduk perempuan, jumlah terbesar berada di rentang usia 20 - 24 Tahun sebanyak 46,935 jiwa atau 3,95% dari jumlah total penduduk, sedangkan jumlah terkecil berada di rentang usia 70 – 74 Tahun sebanyak 17.532 jiwa atau 1,48%. Jika dilihat dari data di atas, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten berpopulasi tinggi dengan jumlah usia produktif (15 sampai 64 Tahun) yang sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini,

Kabupaten Sumedang diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan mutu Pendidikan diperlukan sehingga kedepannya masyarakat Sumedang menjadi masyarakat yang maju. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah Daerah harus dapat mengelola dan memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak dikelola dan dimanfaatkan atau tidak adanya sistem serta persiapan yang baik akan menyebabkan peningkatan angka pengangguran.

**Gambar 2.7**  
**Struktur Umur Penduduk Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2022**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang (diolah) (2023)

Berdasarkan Gambar 2.7 menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 komposisi penduduk sesuai struktur umur didominasi oleh generasi Z atau tahun kelahiran 1997-2012 sebanyak 288.564 orang atau 24% dari jumlah total penduduk dengan kisaran usia 10 sampai dengan 25 tahun.

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

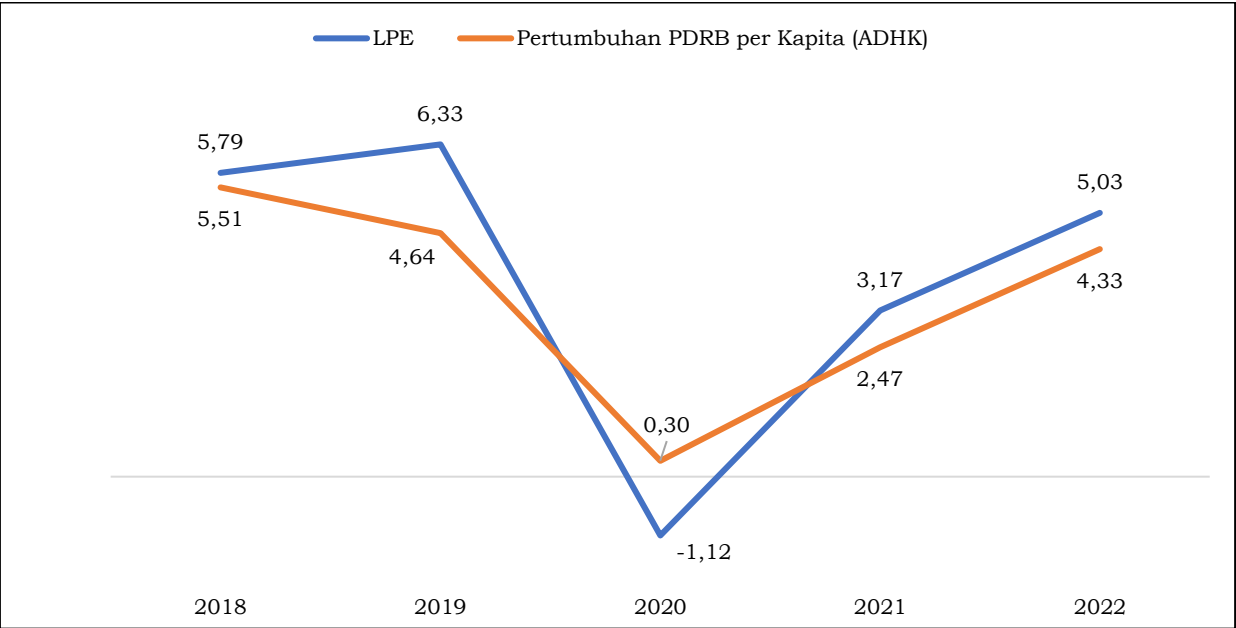
### **2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Indikator *Impact/Makro*)**

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang sudah menunjukkan tren positif sejak berkontraksi akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Berkat upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, di tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2022 mampu mencapai 5,03 % dari target 4,70 - 5,70 atau meningkat sebesar 1,86 persen poin atau meningkat 58,68 persen dibandingkan capaian tahun 2021.

PDRB per kapita juga tumbuh 4,36% (ADHK) atau naik 2,33 juta rupiah (ADHB) menjadi 34,46 juta rupiah dari target 32,0 - 33,8 juta rupiah. Capaian ini tentu sudah melampaui target karena pencapaian PDRB yang kembali tumbuh setelah pandemi. Dilihat dari nilai harga konstan, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Sumedang masih bisa lebih cepat dari Jawa Barat (4,12%), meski secara nilai nominal atau harga berlaku masih berada di bawah Jawa Barat yang mencapai 49,04 juta rupiah. Masih tertinggalnya PDRB per kapita Kabupaten Sumedang disebabkan rendahnya kontribusi pada PDRB Jawa Barat yang didominasi wilayah industri seperti Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Karawang, serta wilayah sentra perdagangan dan jasa seperti Kota Bandung.

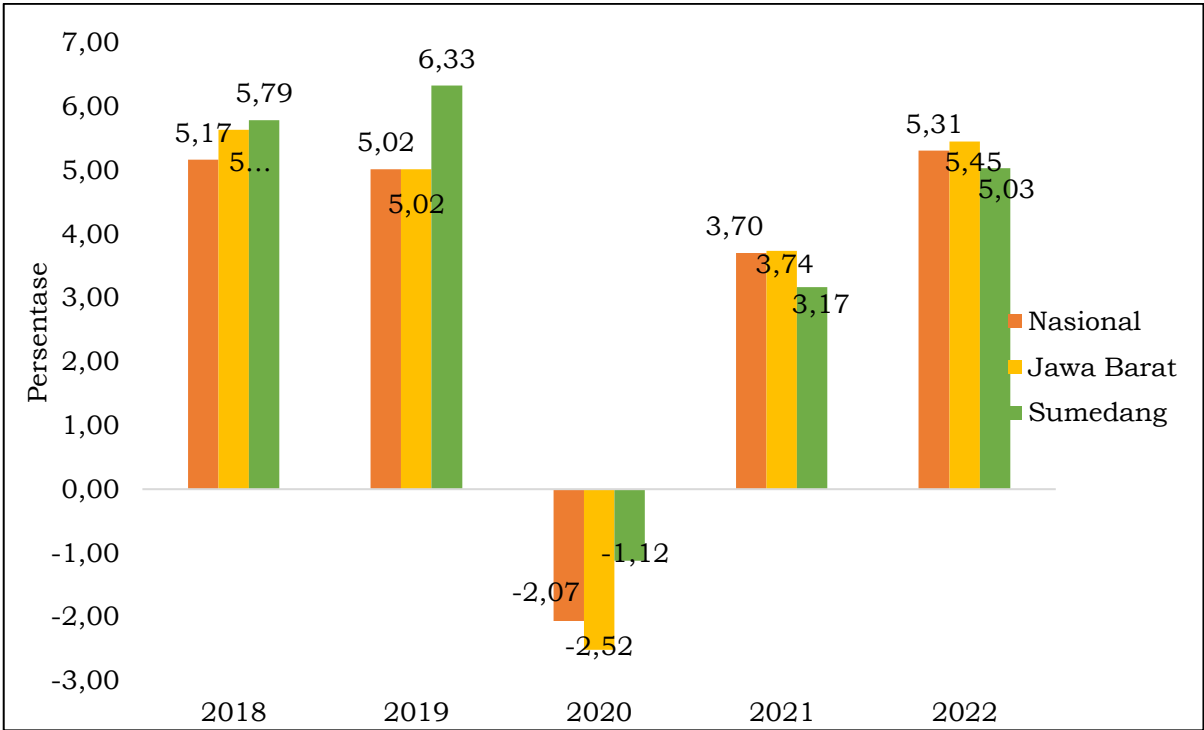
**Gambar 2.8**  
**Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita (ADHK)**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2023)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pasca pandemi Covid-19 menjadi lebih lambat dari pertumbuhan di level regional Jawa Barat dan nasional. Padahal sebelum pandemi mampu tumbuh lebih cepat, bahkan di saat awal pandemi Covid-19 (2020) masih bisa menahan kontraksi yang lebih baik.

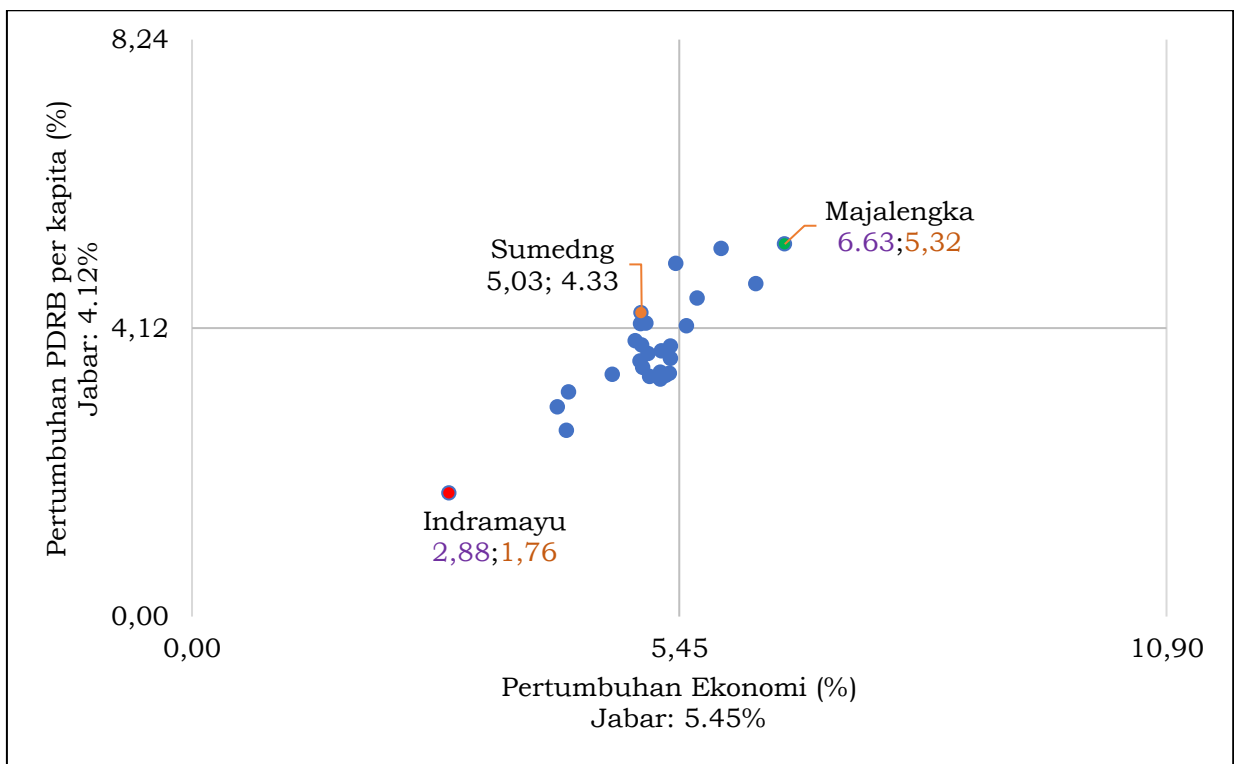
**Gambar 2.9**  
**Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat, dan Sumedang**



Sumber: BPS (2023)

Jika dibandingkan secara lebih luas di tingkat regional Jawa Barat, posisi Kabupaten Sumedang ada di kuadran 2 (dua), yaitu kelompok kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata Jawa Barat, namun pertumbuhan PDRB per kapita lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rakyat secara agregat relatif lebih baik meskipun pertumbuhan ekonomi belum secepat ketika tidak terjadi guncangan pada perekonomian. Sebagian besar kabupaten kota bahkan berada di kuadran 3 (tiga) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita berada di bawah rata-rata Jawa Barat.

**Gambar 2.10**  
**Pemetaan Posisi Kab/kota di Jabar Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita**

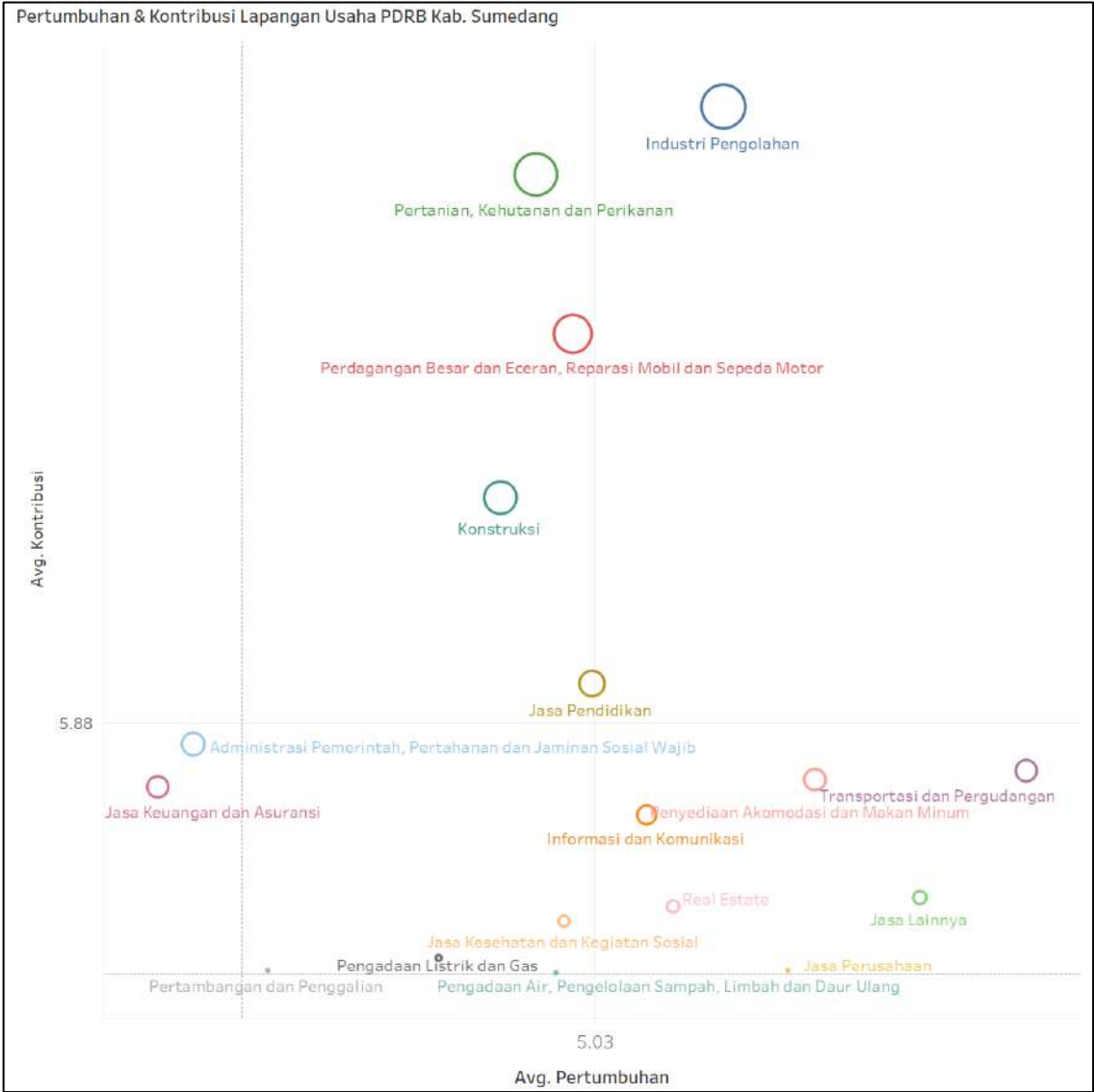


Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Masih lebih lambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan regional Jawa Barat, dapat dijelaskan dengan melihat struktur PDRB berdasarkan lapangan usaha dimana masih terdapat dua sektor yang mengalami kontraksi pada Tahun 2022, yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib, serta sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, masing-masing berkontraksi menjadi -0,69% dan -1,20%.



**Gambar 2.11**  
**Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**



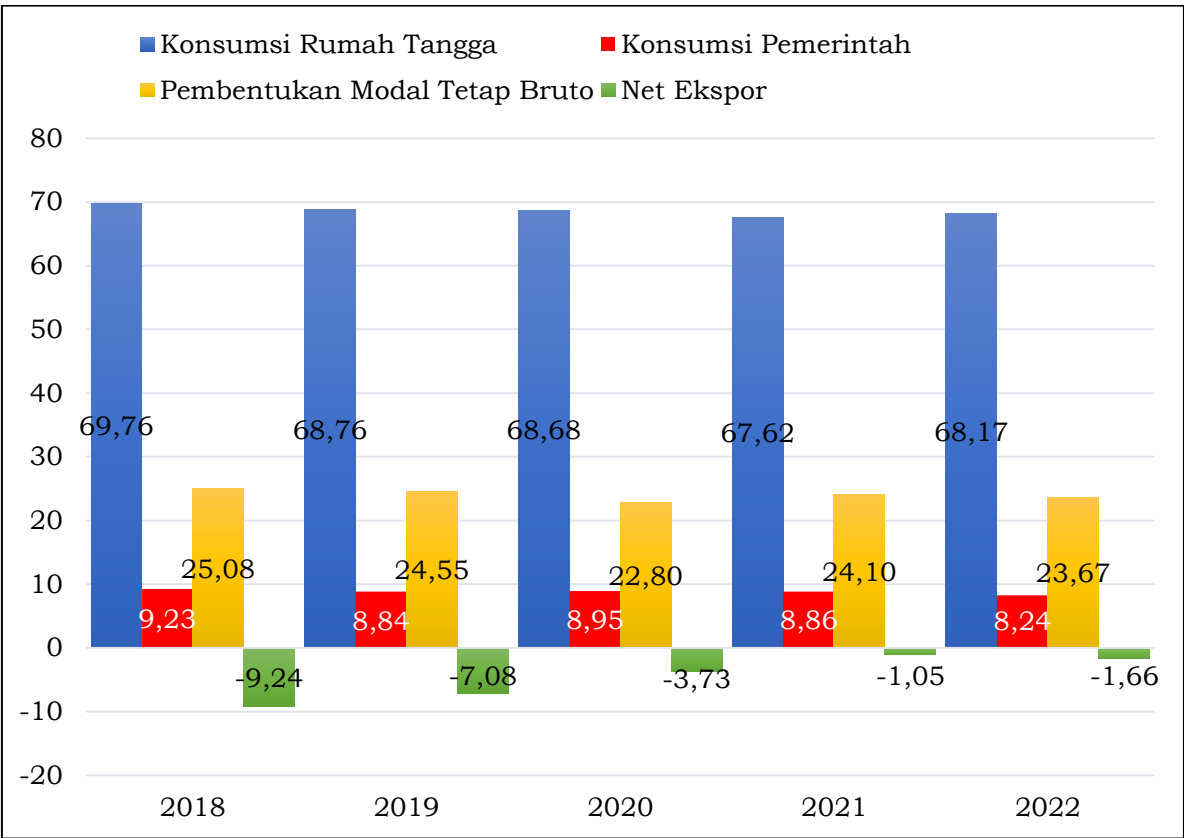
Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Lapangan usaha utama di Kabupaten Sumedang tidak banyak mengalami perubahan struktural, dimana sektor yang mendominasi masih pada sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Perubahan yang terjadi hanya pada kontribusi terbesar yang bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri sejak tahun 2019. Sektor lain yang dipandang penting untuk mendukung upaya Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten pariwisata adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang perlu mendapat perhatian khususnya dalam mendorong inovasi dan kolaborasi

pengembangan ekonomi lokal yang menjadi salah satu arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2024.

Adapun PDRB dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama perekonomian Kabupaten Sumedang sekalipun proporsinya menunjukkan tren menurun, namun kembali meningkat di tahun 2022 yang menandai pulihnya konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga yang tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang tinggi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha di Kabupaten Sumedang.

**Gambar 2.12**  
**Proporsi Komponen Pengeluaran PDRB (%)**

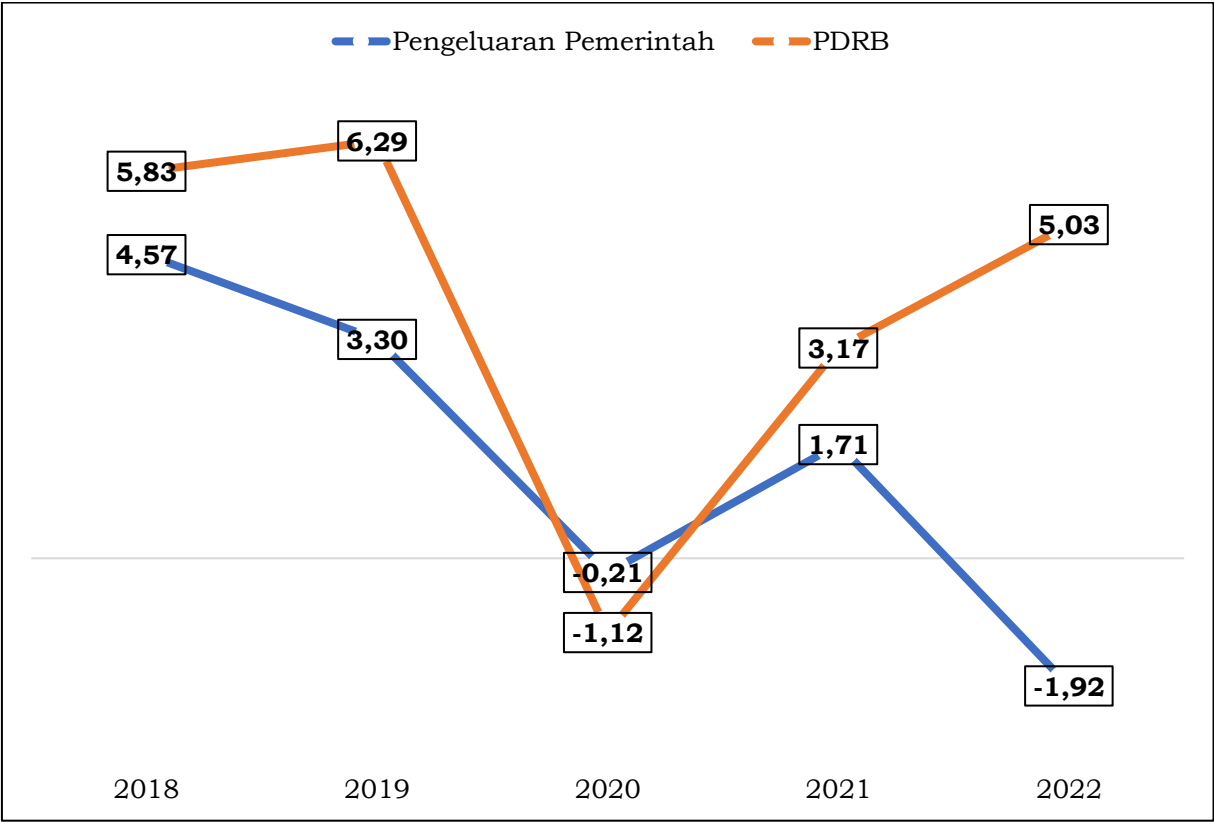


Sumber: BPS, 2023

Pengeluaran pemerintah proporsinya semakin mengecil dan tumbuh lebih lambat dari PDRB mengindikasikan kapasitas fiskal semakin terbatas. Berdasarkan hasil kajian CEDS Unpad (2020), pengeluaran pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan klasifikasi belanja selama kurun 2010-2019, sebagian alokasi

belanja sudah searah dengan target dimana peningkatan pengeluaran berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang lebih tinggi, dan berkorelasi dengan penurunan kemiskinan. Namun, sebagian besar klasifikasi belanja lainnya belum memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

**Gambar 2.13**  
**Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan PDRB (%)**



Sumber: BPS, 2023

Perbaikan perencanaan dan penganggaran menjadi upaya yang harus dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat secara signifikan berdampak pada capaian semua indikator makro pembangunan yang lebih progresif meskipun kemampuan fiskal daerah semakin terbatas. Berdasarkan hasil kajian CEDS Unpad (2020), pengeluaran pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan klasifikasi belanja selama kurun 2010-2019, sebagian alokasi belanja sudah searah dengan target dimana peningkatan pengeluaran berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang lebih tinggi, dan berkorelasi dengan penurunan kemiskinan. Namun, sebagian besar klasifikasi belanja lainnya

belum memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Perbaikan perencanaan dan penganggaran menjadi upaya yang harus dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat secara signifikan berdampak pada capaian semua indikator makro pembangunan yang lebih progresif meskipun kemampuan fiskal daerah semakin terbatas. Oleh karena itu, penerapan penganggaran melalui Perencanaan Bebasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) harus ditingkatkan efektivitasnya di seluruh unit pemerintahan. Capaian SPBE Kabupaten Sumedang yang pada tahun 2023 menjadi terbaik dibandingkan seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan skor 3,84, dapat menjadi modal utama untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

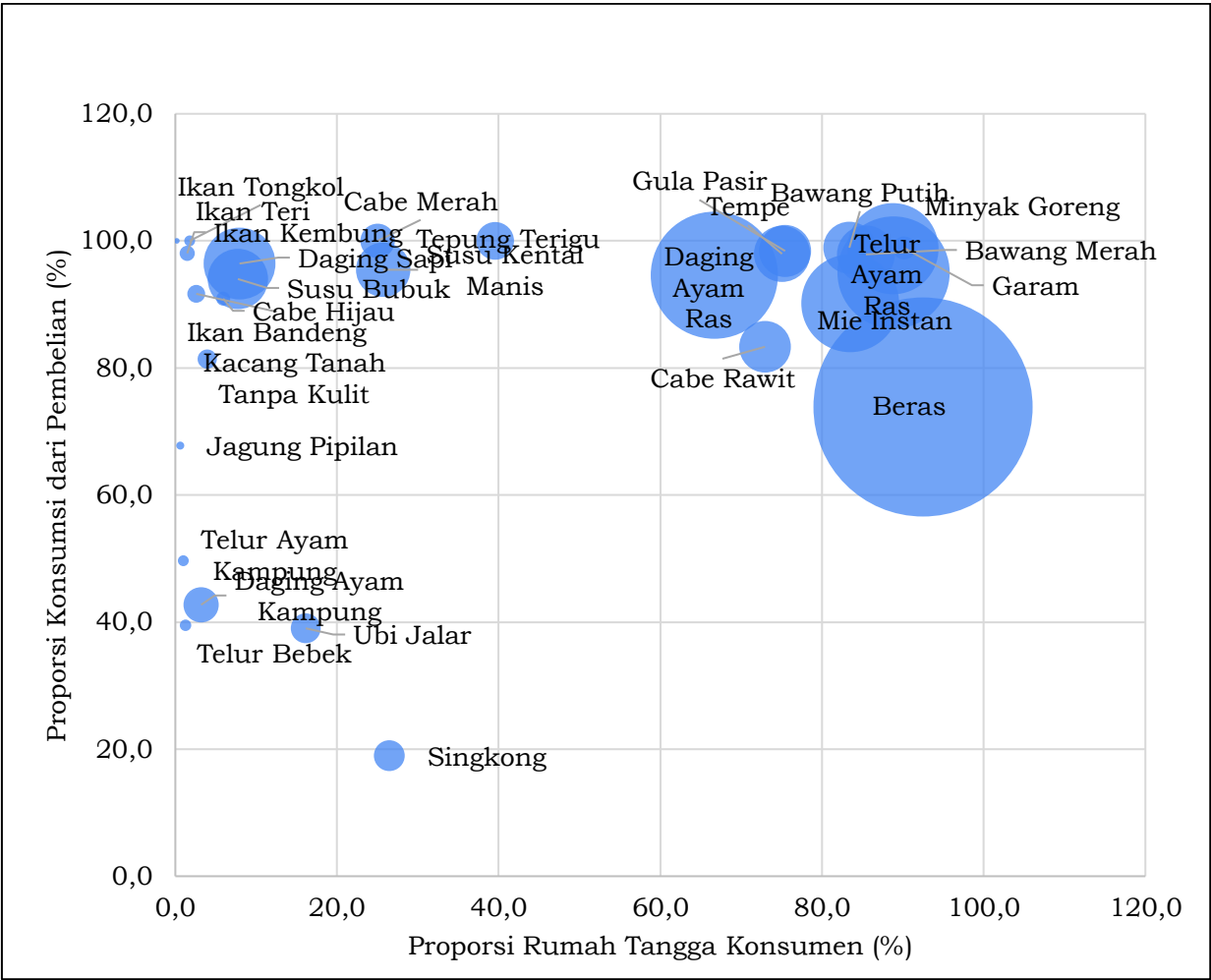
Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sekalipun proporsinya memperlihatkan tren menurun, namun investasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Investasi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang perlu ditingkatkan untuk mengimbangi Upah Minimum Kabupaten Sumedang yang kurang kompetitif jika dibandingkan kabupaten tetangga di wilayah timur. UMK tahun 2023 untuk Kabupaten Sumedang adalah Rp 3.471.134, sementara Kabupaten tetangga di wilayah timur, yaitu Kabupaten Majalengka hanya Rp 2.180.602.

Selain itu, *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Sumedang di tahun 2022 masih berada di angka 4,9 sehingga belum cukup efisien untuk berinvestasi di Sumedang juga perlu menjadi perhatian. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang dapat menekan biaya transportasi dan mempermudah konektivitas, penyediaan air bersih dan energi yang memadai, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, termasuk pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri yang akan dikembangkan.

Net ekspor masih bernilai negatif sekalipun sudah semakin baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun, mengindikasikan bahwa produk yang masuk ke wilayah Sumedang masih lebih tinggi dibandingkan produk yang dijual ke luar wilayah Sumedang, baik komoditas pangan maupun non pangan.

Bidang Litbang Bappppeda (2022) memetakan konsumsi bahan pangan pokok rumah tangga dalam modul konsumsi Susenas bulan Maret 2021 sehingga diperoleh informasi komoditas apa saja yang banyak dikonsumsi dan seberapa besar dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Pemetaan komoditas pangan pokok tersebut disajikan pada Gambar 2.14.

**Gambar 2.14**  
**Proporsi Konsumen dan Konsumsi Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang**



Sumber: Litbang Bappppeda, 2022

Dari sekian banyak kebutuhan pangan yang dikonsumsi rumah tangga di Kabupaten Sumedang, hanya beras, daging ayam, dan cabai rawit yang dapat dipenuhi secara mandiri oleh produksi

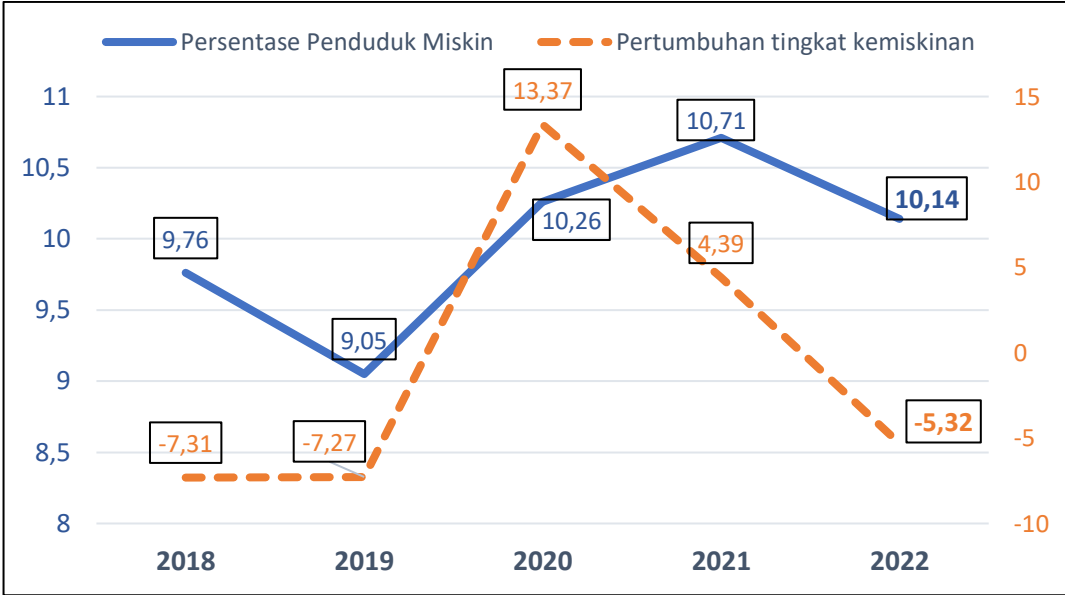


daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Sumedang terhadap produk luar daerah masih tinggi.

Adapun sektor dominan di Kabupaten Sumedang meskipun sudah terjadi peralihan kontributor utama dari sektor pertanian ke industri, namun perbedaan nilai kedua sektor tidak berbeda jauh. Dengan kata lain, peran sektor industri di Kabupaten Sumedang belum menjadi motor penggerak ekonomi wilayah yang dominan seperti di wilayah industri, melainkan sebagai transisi pergeseran struktur ekonomi. Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar untuk mengembangkan wilayah menjadi salah satu kawasan industri seiring dengan pengembangan infrastruktur jalan tol Cisumdawu yang akan beroperasi penuh di tahun 2023 sehingga meningkatkan aksesibilitas arus barang, modal, dan penduduk. Selain itu beroperasinya bandar udara internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka dan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang akan semakin meningkatkan potensi pengembangan ekonomi di masa depan. Saat ini, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Sumedang didorong oleh peningkatan aktivitas perekonomian wilayah yang tercermin dalam PDRB, dan jumlah penduduk yang relatif terkendali. Berdasarkan Laporan Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2023, laju pertumbuhan penduduk Sumedang hanya 0,72%, lebih rendah dari Jawa Barat yang mencapai 1.33%.

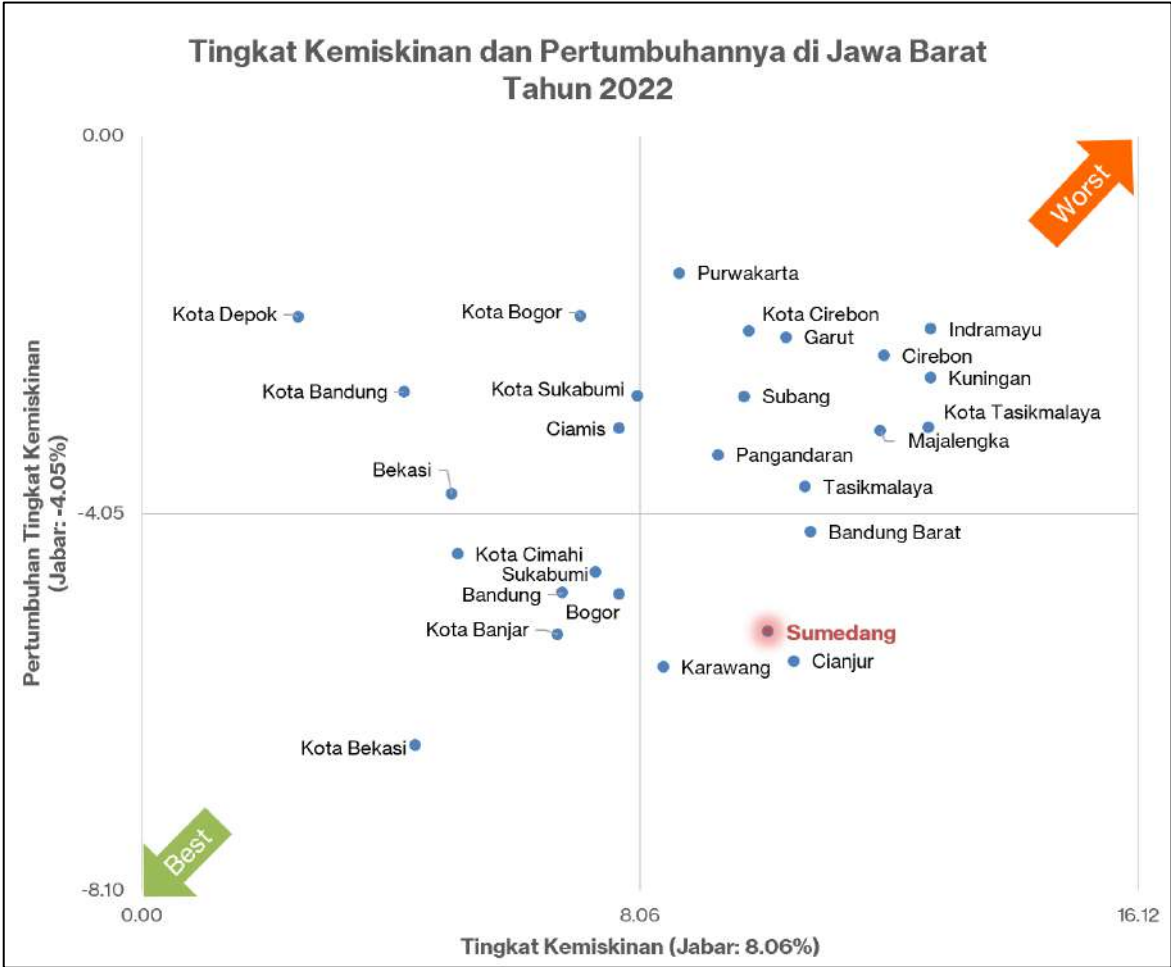
Kemiskinan biasanya diukur dengan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau dengan kata lain kemiskinan dipandang dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang tahun 2022 yaitu 10,14% dari target 10,41 - 9,54 % (menurun 5% dibandingkan tahun 2021), sehingga gap tingkat kemiskinan dari tahun 2021 ke 2022 yakni -0,57% poin menjadi ke-2 terbaik di Jawa Barat. Progress penurunan kemiskinan yang relatif lebih baik pada tahun 2022 juga mengindikasikan program pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang lebih efektif meski jika dilihat dari capaiannya masih lebih tinggi dari Jawa Barat (Gambar 2.15).

Gambar 2.15  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang



Sumber: BPS 2023 (diolah)

Gambar 2.16  
Komparasi Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat



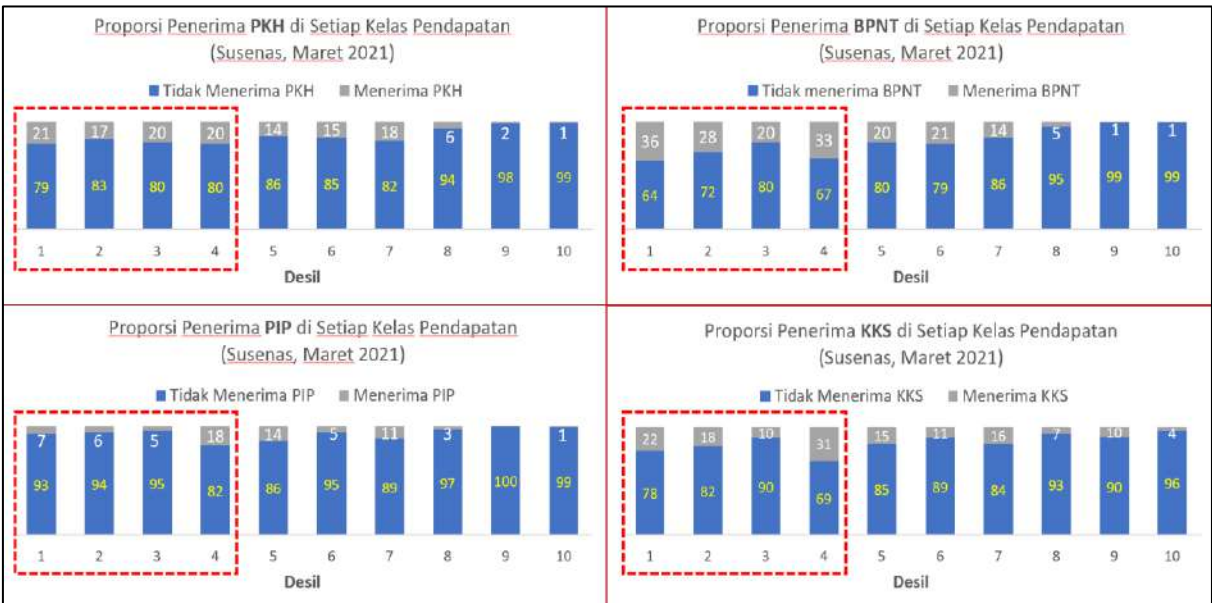
Sumber: BPS 2023 (diolah)

Menurunnya kemiskinan di Kabupaten Sumedang sejalan dengan pencapaian indikator pembangunan lainnya seperti

menurunnya pengangguran karena kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih dari pandemi *Covid-19* sehingga sebagian besar lapangan udaha, khususnya yang banyak menyerap tenaga kerja seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri, dan sektor konstruksi dapat kembali tumbuh. Implikasi meningkatnya aktivitas perekonomian adalah meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat sehingga lebih sedikit penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Hal ini karena tingkat kemiskinan diukur dari pengeluaran per kapita untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan (Gambar 2.16).

Namun demikian, efektivitas penyaluran bantuan sosial masih perlu diperbaiki mengingat masih terjadi *inclusion* dan *exclusion error*, dimana penerima bantuan belum sepenuhnya layak atau sebaliknya ada sebagian penduduk yang seharusnya menerima bantuan tapi belum menerima bansos. Berdasarkan data Susenas Maret 2021, distribusi program perlindungan sosial (perlinsos) masih belum efektif diterima oleh rumah tangga pada desil terendah, dimana proporsi penerima perlinsos pada Bottom 40 adalah PIP: 51%, KKS: 57%, PKH: 58%, dan BPNT: 66% (Gambar 2.17).

**Gambar 2.17**  
**Proporsi Penerima Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Sumedang**

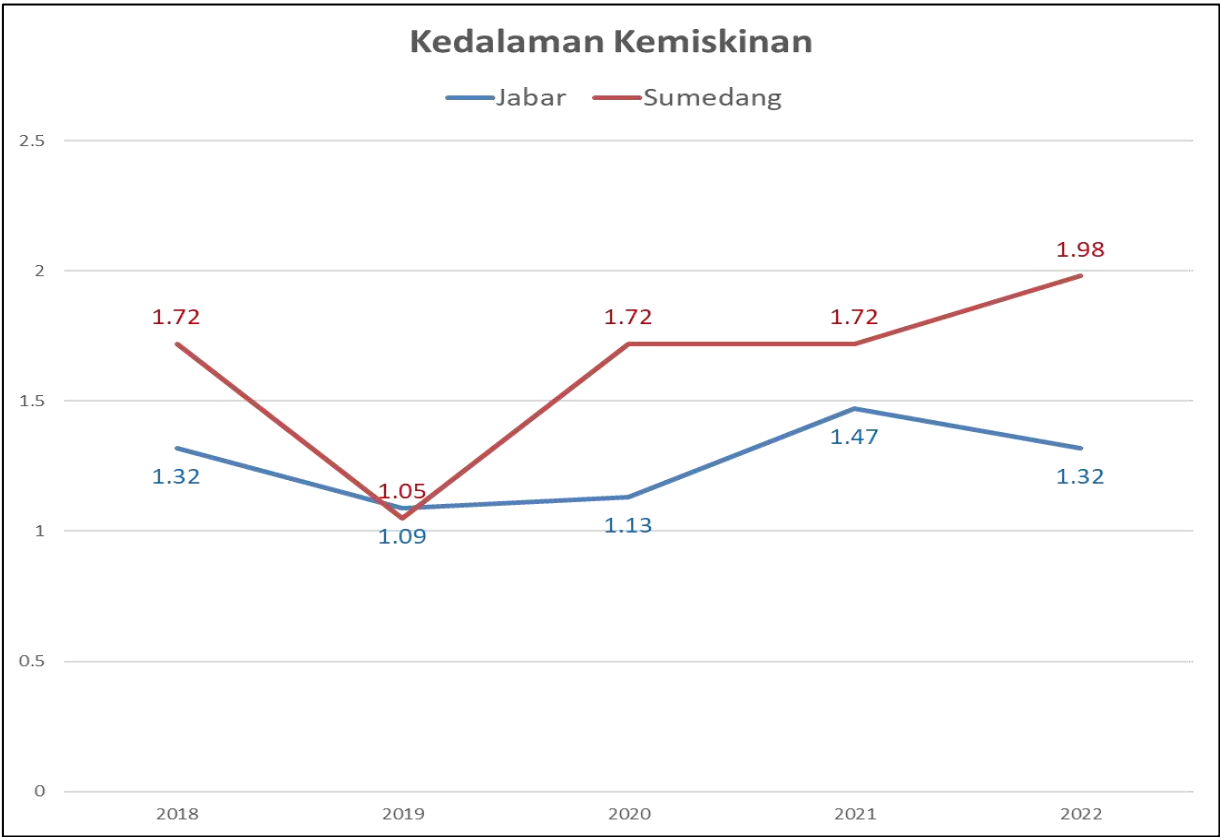


Sumber: Susenas 2021 (diolah)

Tingkat kemiskinan penduduk pun tidak lepas dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut adalah perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan antara Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

**Gambar 2.18**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022**

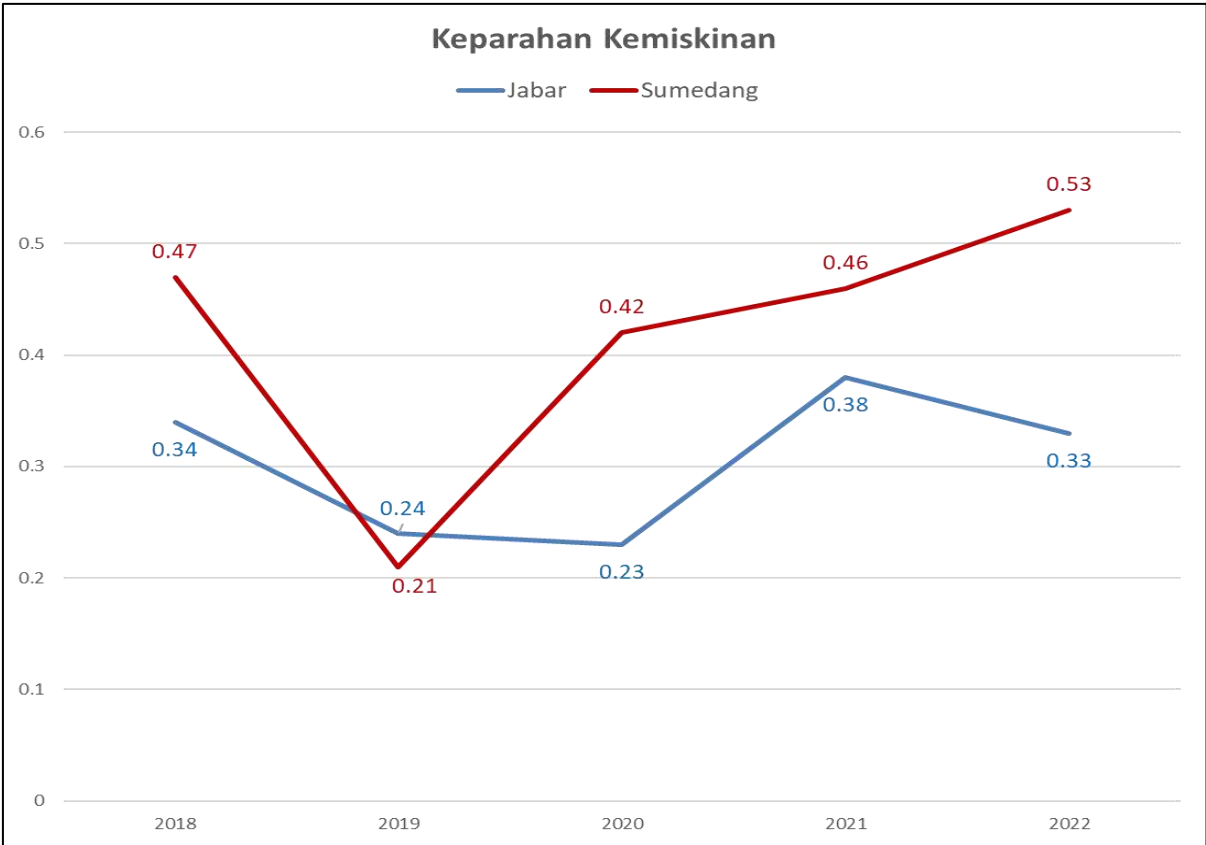


Sumber. BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2023)

Berdasarkan Gambar 2.18 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Sumedang yang lebih tinggi dari Jawa Barat, menunjukkan semakin besar effort yang diperlukan untuk mengeluarkan penduduk miskin dari kemiskinan, khususnya pasca pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketimpangan pengeluaran pendapatan masyarakat miskin di Kabupaten Sumedang masih belum membaik atau belum merata.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumedang juga cenderung meningkat. Capaian terendah P2 terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0,21% lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 0,24%. Namun Tahun berikutnya capaian P2 meningkat. indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumedang yang lebih tinggi dari Jawa Barat, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin terutama dipicu adanya pandemi Covid-19. Gambar Indeks Keparahan Kemiskinan disajikan Gambar 2.19 sebagai berikut.

**Gambar 2.19**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat**



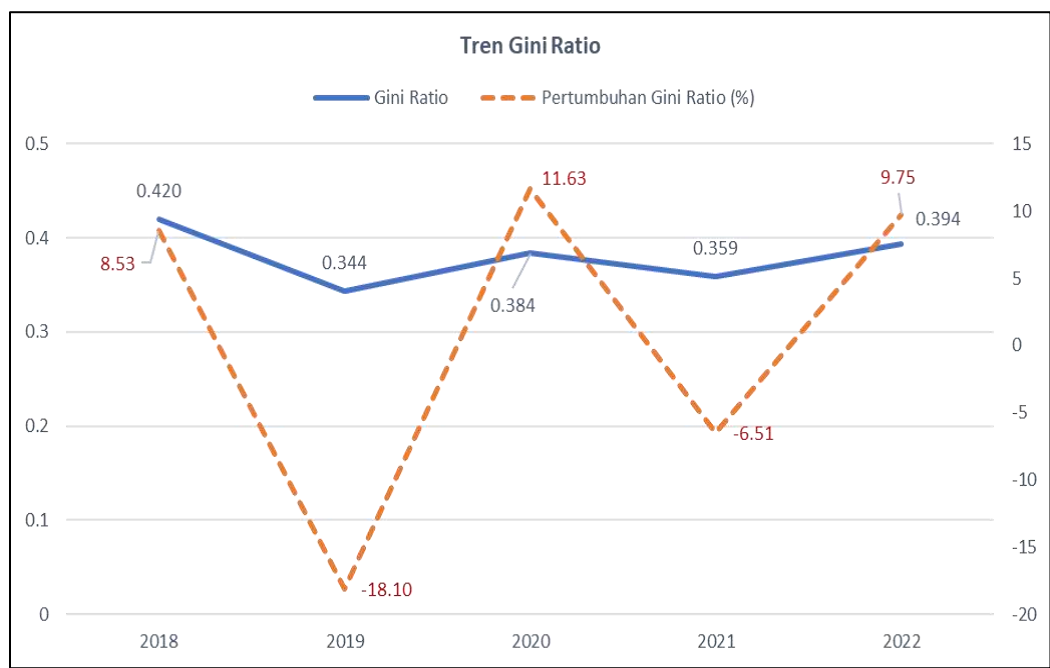
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2023)

Selain ketimpangan di antara penduduk miskin meningkat di tahun 2022, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat secara umum yang diukur dengan gini ratio juga masih fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Namun demikian, ketimpangan masih berada dalam kategori rendah ( $< 0,4$ ) sejak 2019.



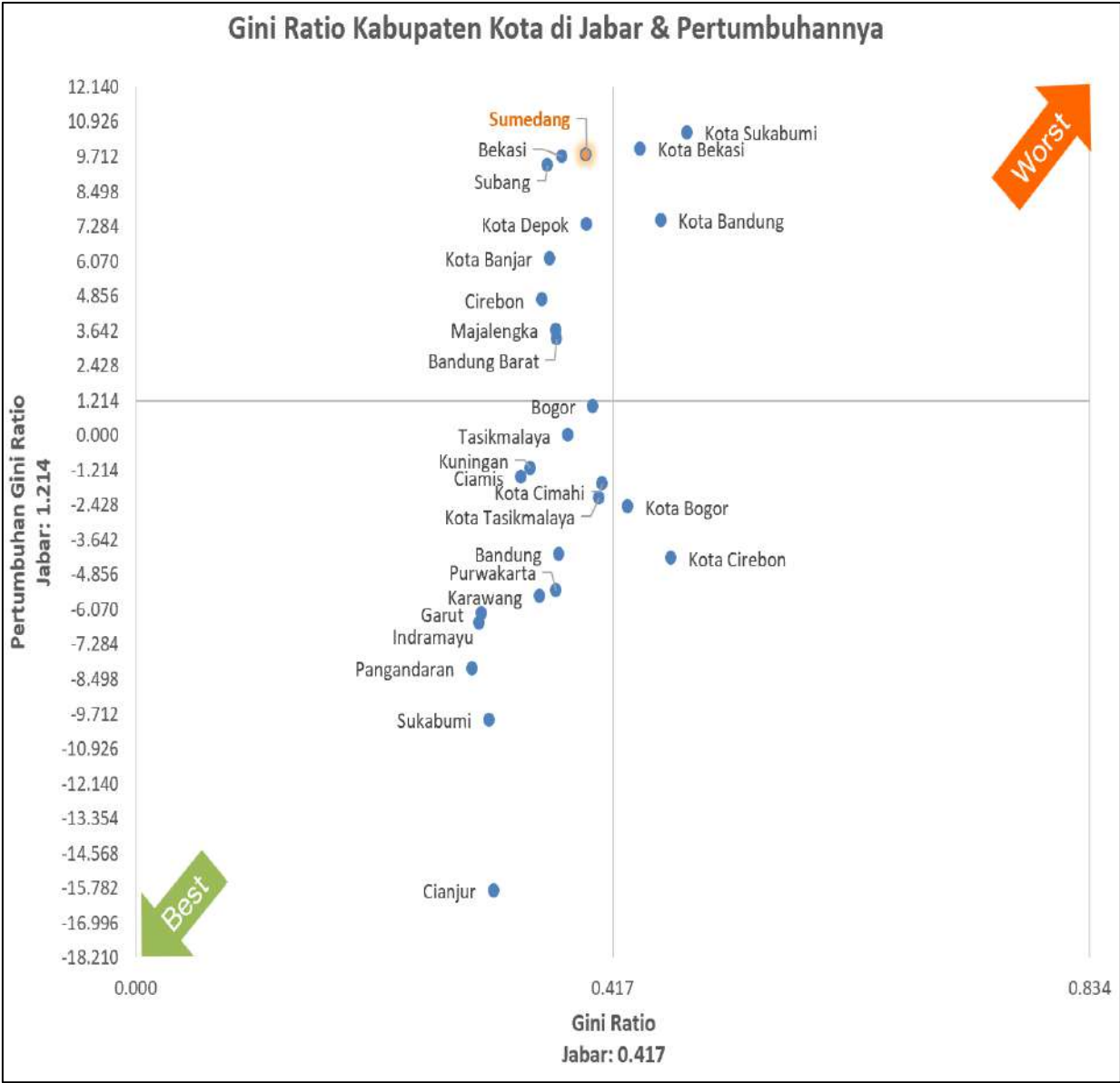
Gini ratio Kabupaten Sumedang tahun 2022 yaitu 0,394 poin dari target 0,38 poin - 0,35 poin (meningkat sebesar 0,035 poin dari capaian tahun 2021). Gini ratio Kabupaten Sumedang mengalami sedikit kenaikan tetapi masih dalam level rendah dan berada di bawah Provinsi Jawa Barat (0,417).

**Gambar 2.20**  
**Tren Gini Ratio Kabupaten Sumedang**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2023)

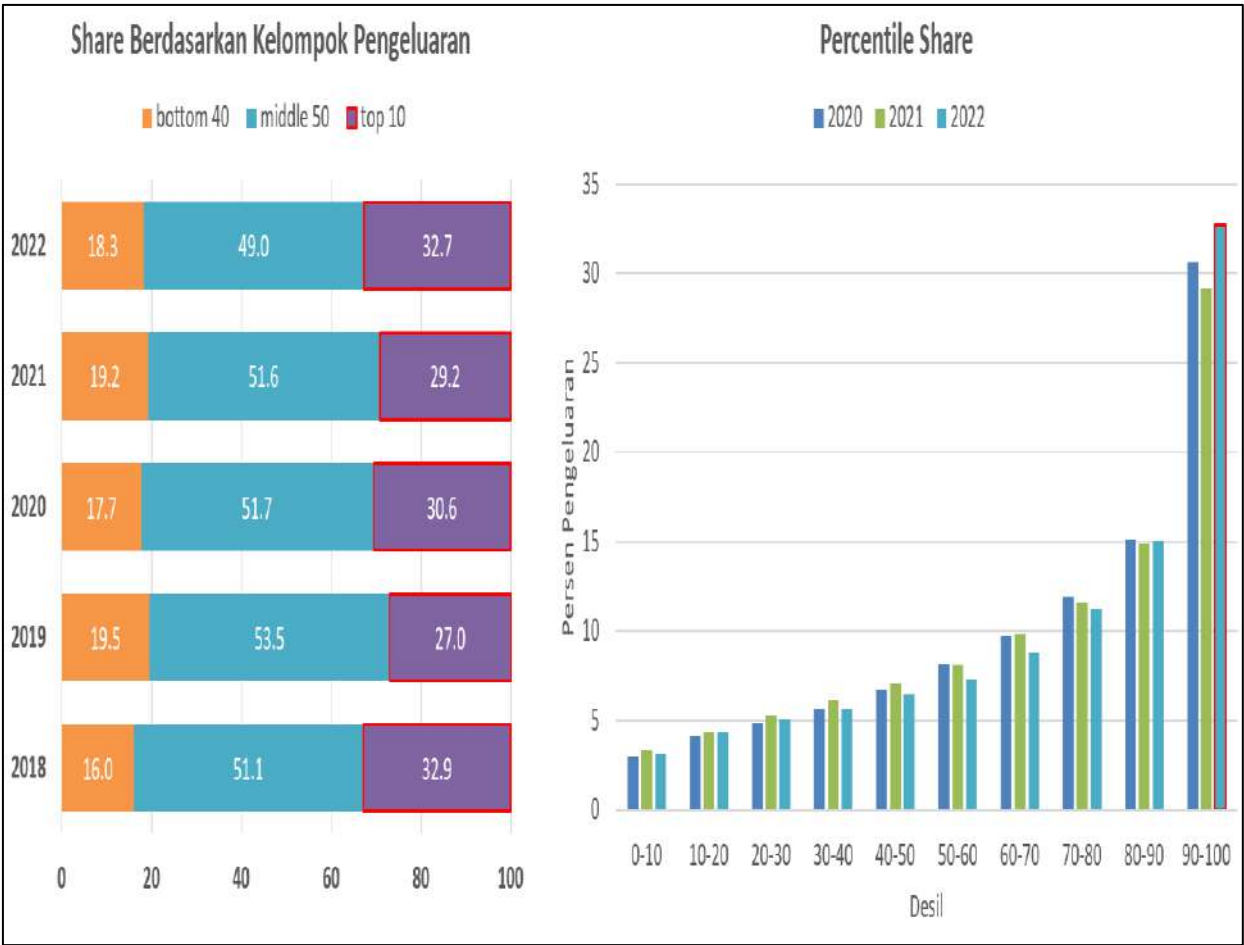
Gambar 2.21  
Komparasi Gini Ratio Kabupaten Kota di Jawa Barat



Sumber: BPS 2023 (diolah)

Meningkatnya gini ratio Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 disebabkan peningkatan proporsi pada kelompok pendapatan tertinggi (desil 10) dari 29,2% menjadi 32,7%, sementara kelompok berpendapatan menengah dan 40% terbawah mengalami penurunan proporsi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di 2022 lebih banyak dinikmati dan memperoleh manfaat yang lebih besar pada kelas ekonomi paling atas (paling kaya) sehingga ketimpangan distribusi pendapatan menjadi lebih lebar.

**Gambar 2.22**  
**Perbandingan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Sumedang**



Sumber: Susenas 2018-2022 (diolah)

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, penduduk dengan kategori masuk dalam kemiskinan ekstrem berjumlah 401.758 orang atau 33,83%. Sesuai arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, kemiskinan ekstrem harus 0% pada Tahun 2024, sehingga diperlukan upaya percepatan penanganan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk dan Data Kemiskinan Ekstrem**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| Kecamatan        | Penduduk Sumedang |          | Kemiskinan Ekstrem |          | Persentase Kemiskinan Ekstrem |          |
|------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|-------------------------------|----------|
|                  | Keluarga          | Individu | Keluarga           | Individu | Keluarga                      | Individu |
| Pamulihan        | 22.918            | 64.182   | 9.495              | 32.898   | 41,43                         | 51,26    |
| Tanjungsari      | 29.853            | 86.931   | 8.835              | 32.716   | 29,60                         | 37,63    |
| Cimanggung       | 30.181            | 90.551   | 8.589              | 33.115   | 28,46                         | 36,57    |
| Sumedang Selatan | 29.336            | 82.123   | 7.229              | 26.473   | 24,64                         | 32,24    |
| Sumedang Utara   | 34.880            | 101.269  | 7.114              | 26.696   | 20,40                         | 26,66    |
| Wado             | 15.904            | 44.983   | 5.768              | 21.384   | 36,27                         | 47,54    |
| Jatinunggal      | 17.362            | 46.486   | 5.514              | 19.245   | 31,76                         | 41,40    |
| Cimalaka         | 22.892            | 63.397   | 5.208              | 19.237   | 22,75                         | 30,34    |
| Rancakalong      | 15.734            | 41.924   | 5.058              | 17.708   | 32,15                         | 42,24    |
| Jatinangor       | 30.591            | 92.738   | 4.540              | 18.321   | 14,84                         | 19,76    |
| Situraja         | 15.975            | 43.135   | 4.394              | 16.041   | 27,51                         | 37,19    |
| Sukasari         | 12.493            | 34.381   | 4.223              | 14.359   | 33,80                         | 41,76    |
| Tanjungmedar     | 10.131            | 26.956   | 3.589              | 12.608   | 35,43                         | 46,77    |
| Cisitu           | 11.468            | 31.090   | 3.582              | 13.076   | 31,23                         | 42,06    |
| Paseh            | 14.151            | 38.731   | 3.240              | 12.192   | 22,90                         | 31,48    |
| Darmaraja        | 13.631            | 37.597   | 3.087              | 12.085   | 22,65                         | 32,14    |
| Tanjungkerta     | 13.232            | 35.285   | 2.689              | 9.568    | 20,32                         | 27,12    |
| Cibugel          | 8.800             | 25.174   | 2.683              | 10.573   | 30,49                         | 42,00    |
| Ganeas           | 9.210             | 26.352   | 2.472              | 9.303    | 26,84                         | 35,30    |
| Buahdua          | 13.389            | 33.477   | 2.362              | 8.027    | 17,64                         | 23,98    |
| Ujungjaya        | 12.480            | 31.780   | 2.160              | 7.377    | 17,31                         | 23,21    |
| Conggeang        | 12.004            | 29.409   | 1.922              | 6.818    | 16,01                         | 23,18    |
| Jatigede         | 9.065             | 22.688   | 1.914              | 6.402    | 21,11                         | 28,22    |

| Kecamatan | Penduduk Sumedang |           | Kemiskinan Ekstrem |          | Persentase Kemiskinan Ekstrem |          |
|-----------|-------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------------------|----------|
|           | Keluarga          | Individu  | Keluarga           | Individu | Keluarga                      | Individu |
| Cisarua   | 7.676             | 21.349    | 1.634              | 6.230    | 21,29                         | 29,18    |
| Tomo      | 8.979             | 23.349    | 1.554              | 5.426    | 17,31                         | 22,97    |
| Surian    | 4.788             | 12.009    | 1.031              | 3.580    | 21,53                         | 29,81    |
| Jumlah    | 427.123           | 1.187.620 | 109.886            | 401.758  | 25,73                         | 33,83    |

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (diolah) (2023)

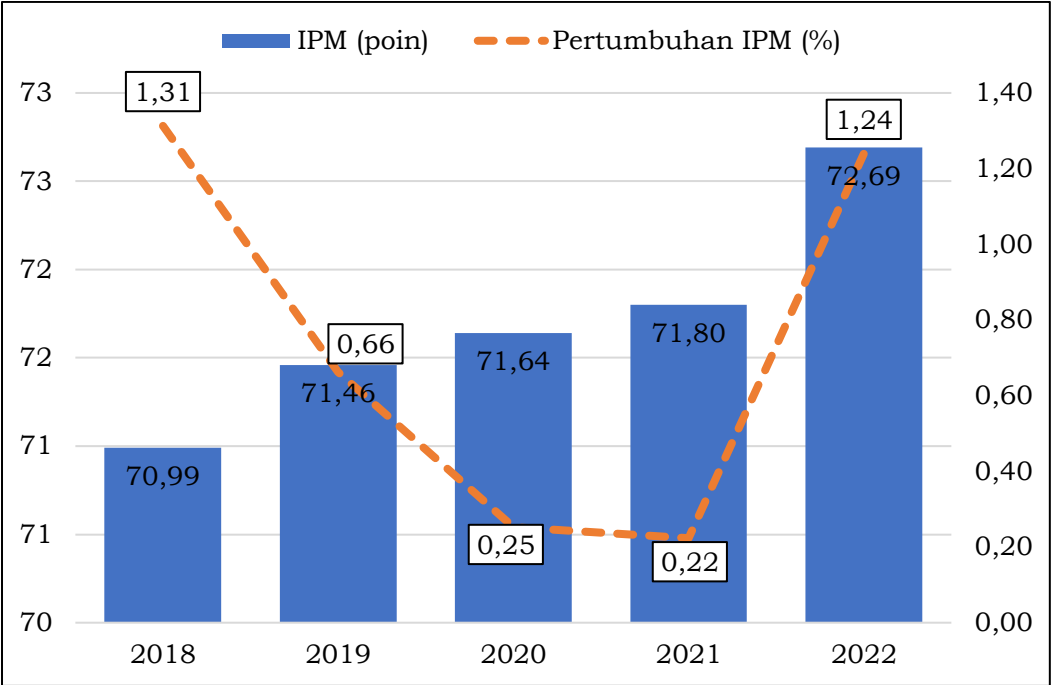
### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana masyarakat/penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Dengan pengukuran IPM terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sumedang meningkat pada tahun 2022 mencapai 72,69 poin dari target 71,9 - 72,4 poin, atau meningkat 0,89 poin dari capaian tahun 2021. Posisi IPM Kabupaten Sumedang menempati posisi 11 (sebelas) dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dan menjadi ke-5 tercepat dilihat dari pertumbuhannya.

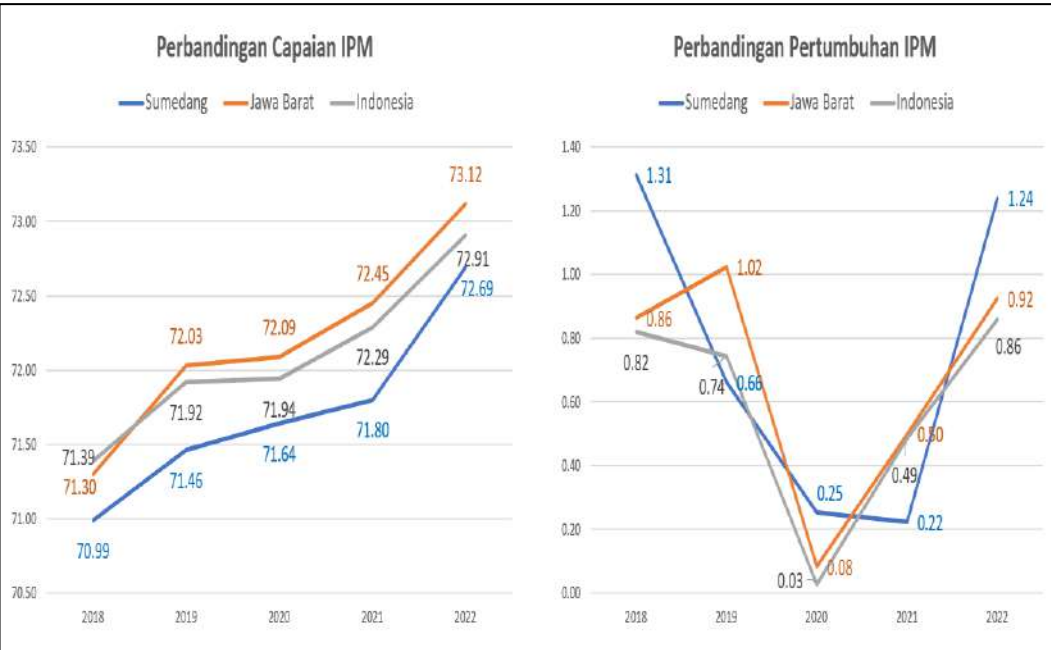


Gambar 2.23  
IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS 2023 (diolah)

Gambar 2.24  
Komparasi IPM Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022



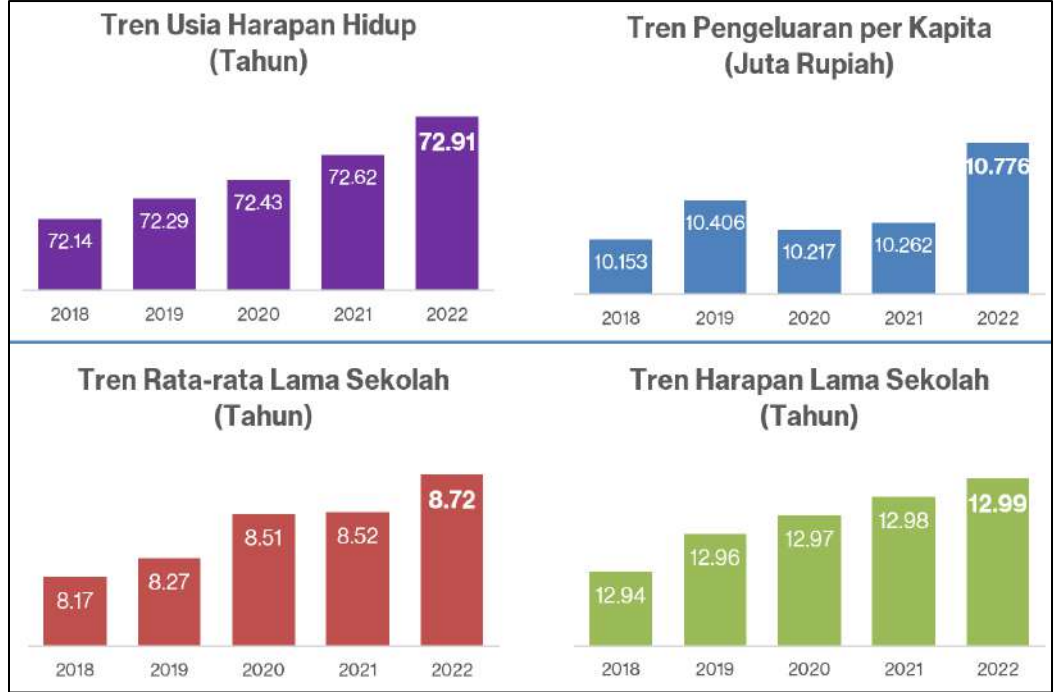
Sumber: BPS 2023 (diolah)

Capaian IPM Kabupaten Sumedang semakin mendekati nasional dan Jabar karena tumbuh lebih cepat di 2022. Peningkatan IPM Kabupaten Sumedang didorong oleh peningkatan komponen pembentuknya, terutama pengeluaran per kapita yang meningkat cukup tinggi dari 10,26 juta rupiah menjadi 10,78 juta rupiah atau tumbuh sekitar 5%. Peningkatan pengeluaran per

kapita mengindikasikan terjadinya pemulihan daya beli masyarakat setelah sebelumnya terdampak pandemi *Covid-19*.

Komponen lainnya juga mengalami peningkatan namun tumbuh lebih lambat, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan harapan lama sekolah masing-masing tumbuh 2,4%, 0,4%, dan 0,1%. Untuk meningkatkan IPM lebih cepat perlu akselerasi khususnya dari komponen yang tumbuh sangat lambat, yaitu harapan lama sekolah yang sejak 2014 hanya meningkat sekitar 0,01-0,02 per tahun sehingga di 2022 hanya mencapai 12,99 tahun.

**Gambar 2.25**  
**Tren Capaian Komponen IPM Kabupaten Sumedang**



Sumber: BPS 2023

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, sehingga AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya serta meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Tinggi rendahnya AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 1) kondisi lingkungan; 2) ketersediaan pangan; 3) Pendidikan; dan 4) perekonomian masyarakat.

Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Sumedang mengalami tren positif setiap tahunnya walaupun peningkatannya tidak terlalu besar. Pada Tahun 2022, AHH Kabupaten Sumedang mencapai 72,91 tahun, artinya rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh penduduk yang lahir menjelang Tahun 2022 lebih lama 0,29 tahun dari tahun sebelumnya. Kenaikan AHH di Kabupaten Sumedang tidak lepas dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS Kabupaten Sumedang Tahun 2022 naik 0,01 Tahun dari tahun sebelumnya sehingga diperkirakan pada Tahun 2021 rata-rata anak yang berusia 7 (tujuh) tahun dan sudah masuk jenjang Pendidikan formal dapat memiliki harapan untuk menikmati Pendidikan selama 12,99 tahun atau setara dengan diploma.

Komponen lain dari IPM yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mempunyai pengertian jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas Pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Tahun 2022 RLS Kabupaten Sumedang sebesar 8,72 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Sumedang yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 8,72 tahun atau lebih lama 0,20 tahun dari Tahun 2021. Asumsinya kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang telah mengalami perbaikan.

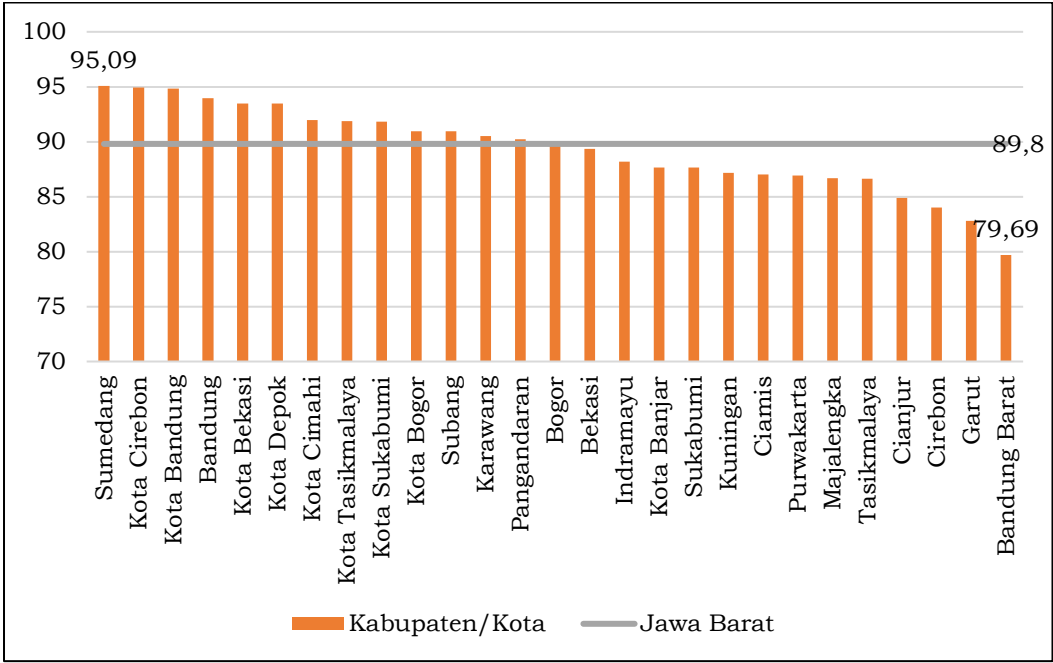
Komponen terakhir IPM adalah meningkatnya standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk

konsumsi anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita dapat dihitung dengan keseimbangan kemampuan belanja masyarakat. Tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 10.776.000,00 (*sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*). Artinya rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Sumedang selama setahun sebesar ± Rp. 10 juta-an dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 514 ribu dari tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia bisa dilihat secara lebih spesifik dari perbedaan gender. Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator utama untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender. Data IPD dan IDG sangat membantu pemerintah daerah untuk dapat mengurangi kesenjangan dalam suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 sebesar 95,09 poin, menurun 0,09 poin. Meskipun demikian, poin IPG mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah setara atau lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain bahkan dengan Provinsi Jawa Barat sendiri.

**Gambar 2.26**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022**



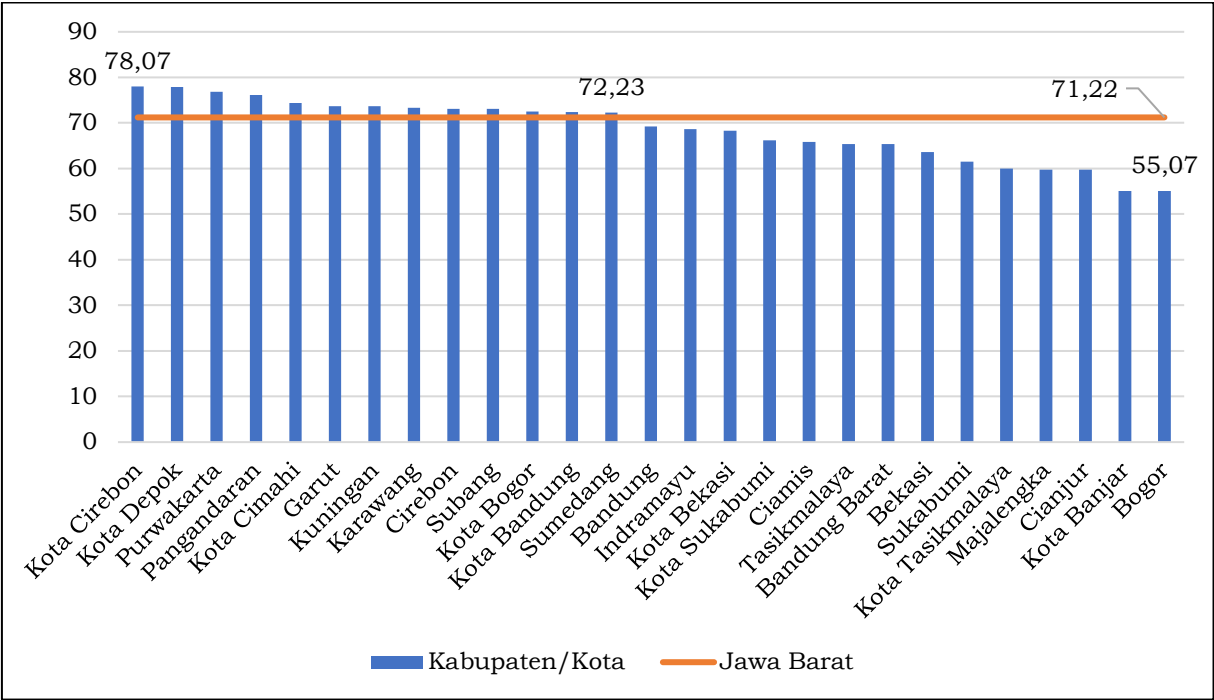
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2023) (diolah)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IDG Kabupaten Sumedang sebesar 72,23 poin atau di atas Provinsi Jawa Barat dengan 71,22 poin. Pada Tahun 2021, IDG Kabupaten Sumedang sebesar 70,13 poin atau naik 2,1 poin dari tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang perempuan berperan lebih aktif dalam bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan disbanding tahun sebelumnya.



Gambar 2.27  
Indeks Pembangunan Gender (IPG)  
Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2023) (diolah)

Selain IDG dan IPG, keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan juga oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, serta kesehatan yang akan berdampak pada layanan atau kerja professional yang dihasilkan. Salah satu indikator Kesehatan yang menunjang terhadap penentuan kualitas sumber daya manusia dijelaskan melalui Prevalensi Stunting, Jumlah/Angka Kematian Bayi, dan Jumlah/Angka Kematian Ibu per 100.000 ibu melahirkan sebagaimana tertera pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7  
Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2018-2022

| No | Uraian                       | Tahun |       |      |       |      |
|----|------------------------------|-------|-------|------|-------|------|
|    |                              | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022 |
| 1  | Prevalensi Stunting (SSGI)   | 32,2  | 24,43 | -    | 22    | 27,6 |
| 2  | Prevalensi Stunting (EPPGBM) | 32,2  | 24,43 | 17,5 | 10,99 | 8,12 |
| 3  | Jumlah Kematian Bayi (jiwa)  | 155   | 134   | 137  | 161   | 212  |
| 4  | Jumlah Kematian Ibu (jiwa)   | 16    | 13    | 21   | 36    | 17   |

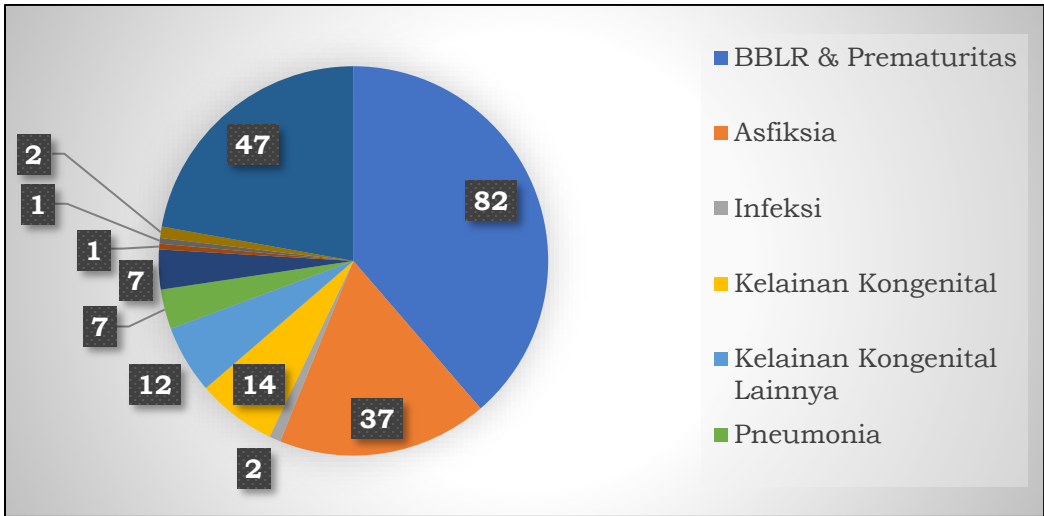
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur dibandingkan dengan menggunakan standar WHO. Prevalensi stunting merupakan indikator untuk mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk.

Berdasarkan data pada Tabel di atas, terkait dengan data prevalensi stunting terdapat 2 (dua) data yang dihasilkan, 1) data berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI); 2) data berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). Melalui kedua cara perhitungan data tersebut didapatkan perbedaan data prevalensi stunting yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode pengumpulan data. Data yang dihasilkan berdasarkan SSGI dilakukan dengan metode survei dengan mengambil sampel beberapa wilayah saja, sedangkan data yang dihasilkan berdasarkan EPPGBM dilakukan melalui pengisian aplikasi oleh kader posyandu di seluruh wilayah setiap bulan penimbangan.

Data jumlah kematian bayi dari Tahun 2018-2022 sangat fluktuatif. Namun pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 212 jiwa dari 161 jiwa pada Tahun 2021 yang merupakan angka kematian bayi tertinggi di Kabupaten Sumedang. Penyebab kematian bayi digambarkan pada Gambar 2.28.

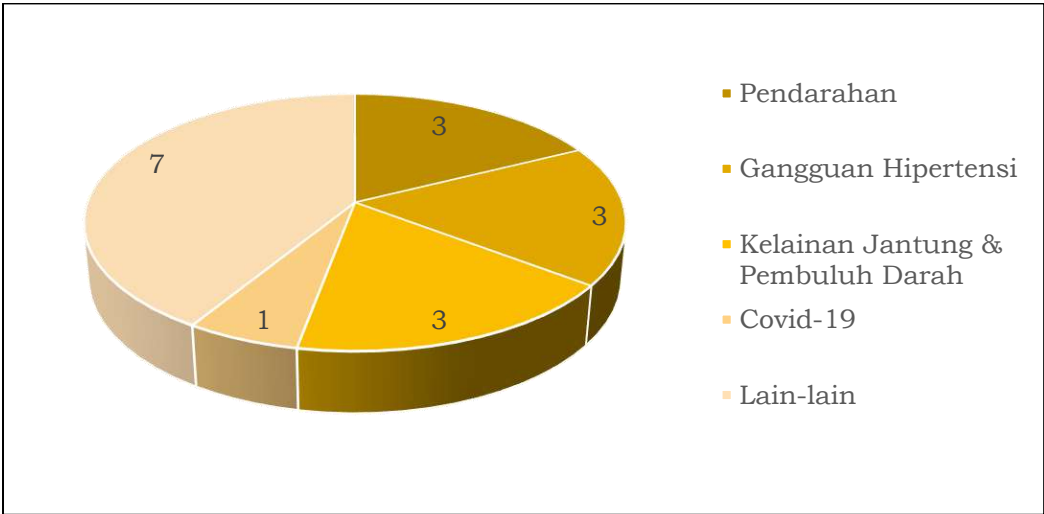
**Gambar 2.28**  
**Penyebab Kematian Bayi Tahun 2022**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

Sedangkan untuk data Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan kualitas pelayanan Kesehatan selama hamil, penanganan persalinan dan masa nifas. Jumlah AKI di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2022 turun pada angka 17 orang. Penyebab kematian ibu digambarkan pada Gambar 2.29 berikut.

**Gambar 2.29**  
**Penyebab Kematian Ibu Tahun 2022**

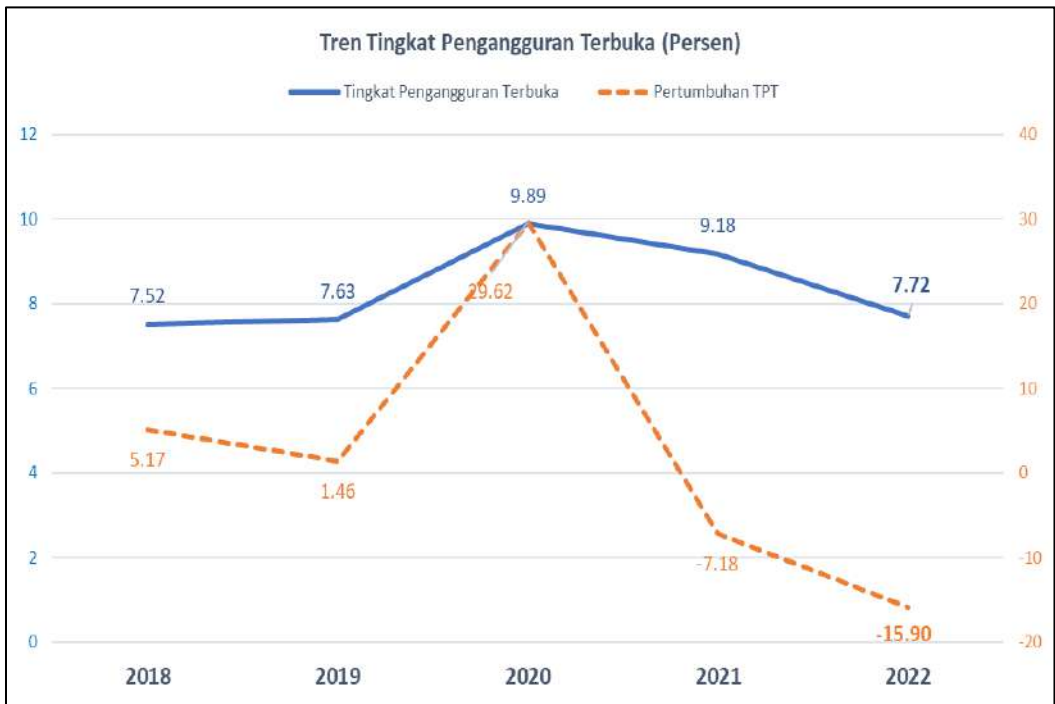


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

Aspek lain yang menggambarkan fokus kesejahteraan sosial adalah ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan

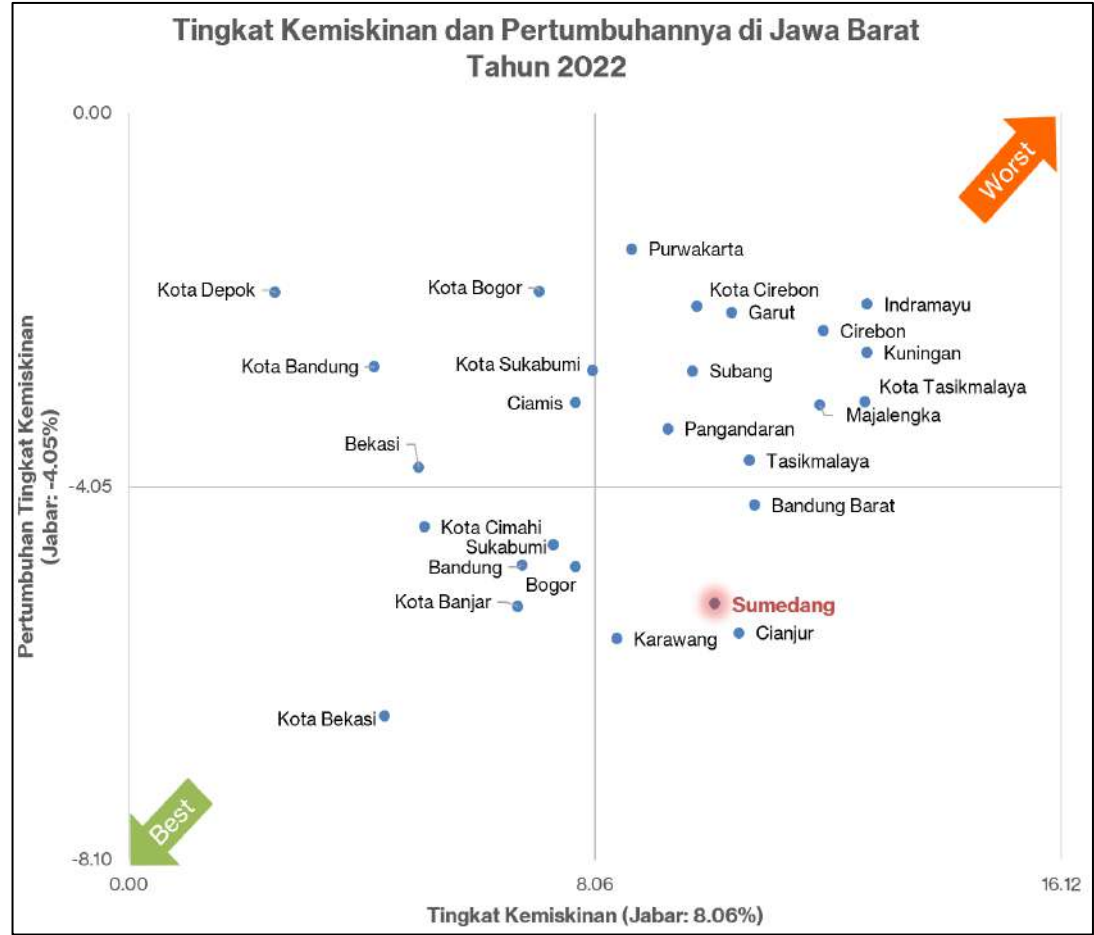
untuk mengetahui besarnya persentase Angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Diharapkan dengan mengetahui angka TPT dapat menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap *supply* tenaga kerja yang ada. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Sumedang yakni 7,72% dari target 8,78 - 7,99%. Capaian ini mampu melampaui target dengan persentase penurunan tpt mencapai 15,9% atau menurun 1,46 persen poin dibandingkan tahun 2021, capaian ini juga mampu menurun lebih cepat dari Jawa Barat.

**Gambar 2.30**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2023)

**Gambar 2.31**  
**Komparasi TPT Kabupaten Kota di Jawa Barat**



Sumber: BPS 2023 (diolah)

Menurunnya TPT lebih cepat juga menjadi implikasi dari keberhasilan pemulihan ekonomi pasca Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sumedang. Peningkatan serapan tenaga kerja berdasarkan data Sakernas Agustus 2022 terjadi di sektor utama seperti sektor pertanian (23,65%), sektor perdagangan (21,75%) dan sektor industri pengolahan (19,20%). Tiga lapangan usaha dominan ini mampu menyerap sekitar 65% tenaga kerja di Kabupaten Sumedang. Meskipun terjadi peralihan lapangan usaha dengan kontribusi PDRB tertinggi dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan, namun peran sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja dan mata pencaharian utama penduduk Sumedang masih belum tergantikan. Bahkan, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sangat tinggi di awal pandemi (2020) dengan beralihnya sebagian pekerja terdampak pandemi dari sektor non pertanian.



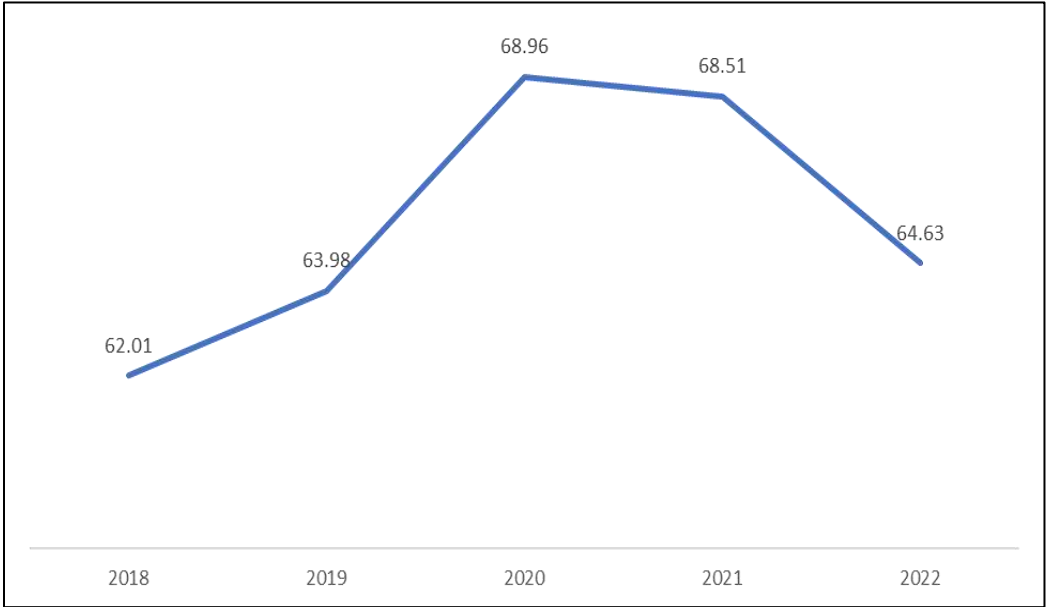
**Tabel 2.8**  
**Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha**

| Lapangan Usaha                                                | Persentase |       |       |       | Rank 2022 | Tren                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | 2019       | 2020  | 2021  | 2022  |           |                                                                                       |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 20.18      | 25.87 | 22.55 | 23.65 | 1         |    |
| Pertambangan dan Penggalian                                   | 0.99       | 0.96  | 0.90  | 0.77  | 12        |    |
| Industri Pengolahan                                           | 19.34      | 16.37 | 17.97 | 19.20 | 3         |    |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 0.29       | 0.46  | 0.36  | 0.35  | 15        |    |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang     | 0.71       | 0.08  | 0.46  | 0.09  | 16        |    |
| Konstruksi                                                    | 11.26      | 8.91  | 10.24 | 9.22  | 4         |    |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20.19      | 20.70 | 20.85 | 21.75 | 2         |    |
| Transportasi dan Pergudangan                                  | 3.75       | 4.12  | 3.46  | 2.89  | 8         |    |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 6.77       | 6.80  | 6.36  | 8.68  | 5         |    |
| Informasi dan Komunikasi                                      | 0.54       | 0.78  | 0.93  | 0.55  | 14        |   |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 0.73       | 0.69  | 1.02  | 0.85  | 10        |  |
| Real Estate                                                   | 0.63       | 0.22  | 0.10  | 0.00  | 17        |  |
| Jasa Perusahaan                                               | 0.71       | 0.38  | 0.77  | 0.75  | 13        |  |
| Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 3.07       | 3.26  | 3.09  | 2.38  | 9         |  |
| Jasa Pendidikan                                               | 6.68       | 6.97  | 7.30  | 5.07  | 6         |  |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                            | 0.64       | 0.85  | 0.89  | 0.79  | 11        |  |
| Jasa Lainnya                                                  | 3.52       | 2.56  | 2.75  | 3.04  | 7         |  |

Sumber: Sakernas, Agustus 2022 (diolah)

Namun, kantong pengangguran di Kabupaten Sumedang masih berada pada angkatan kerja usia muda (generasi Z) dimana sekitar separuh dari TPT merupakan anak muda berusia 15-24 tahun. TPT akan lebih cepat diturunkan jika angkatan kerja usia muda, khususnya pada usia 18 tahun atau mereka yang baru lulus SMA/SMK dapat diintervensi dengan program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri.

**Gambar 2.32**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2023)

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan proporsi penduduk usia kerja di suatu daerah yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja dan menjadi faktor penting dalam menggerakkan pembangunan. Biasanya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang mengalami tren positif setiap tahunnya, yang berarti pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan namun di tahun 2022 kembali menurun. Pembangunan di suatu wilayah tidak bisa terlepas dari peran perempuan. Diasumsikan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang ada hubungannya dengan penurunan IDG Kabupaten Sumedang karena adanya penurunan partisipasi perempuan terutama dalam kegiatan ekonomi.

**2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Seni dan budaya merupakan produk dari kreativitas manusia yang digunakan sebagai alat ekspresi keinginan, pemikiran dan pemahaman terhadap alam dan lingkungan dengan memasukkan unsur keindahan dan kebenaran subjektif maupun universal dan

diterapkan dalam masyarakat. Kebudayaan menjadi penting artinya bagi pembentukan karakter yang berkebangsaan Indonesia sekaligus membangkitkan identitas kebudayaan yang berciri *kasumedangan*. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan sosio-ekonomi dan politik pendukung kebudayaannya.

Implementasi aspek seni dan budaya sebagai bukti keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dituangkan dalam Perda Kabupaten Sumedang tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (SPBS). SPBS yang bersifat lokal dapat dijadikan sebagai pedoman bertindak sekaligus mengarahkan kehidupan bersama dalam tataran sosial yang selaras dan seimbang serta dapat digunakan juga sebagai rencana mencapai tujuan bersama dalam kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Salah satu bentuk implementasi SPBS di Kabupaten Sumedang ialah “mempopulerkan” kembali berbagai kesenian tradisional melalui berbagai acara pemerintahan skala lokal maupun nasional serta mengenalkan cagar budaya yang dilestarikan kepada masyarakat Sumedang.

Kabupaten Sumedang mempunyai beberapa tempat yang merupakan warisan budaya. Berikut adalah Objek Cagar Budaya di Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.9**  
**Objek Cagar Budaya di Kabupaten Sumedang yang Telah Ditetapkan**

| No | Nama Cagar Budaya                       |
|----|-----------------------------------------|
| 1  | Monumen Lingga                          |
| 2  | Gedung Bumi Kaler                       |
| 3  | Benteng Gunung Gadung                   |
| 4  | Benteng Gunung Kunci                    |
| 5  | Benteng Gunung Palasari                 |
| 6  | Gedung Disparbudpora                    |
| 7  | Struktur Jembatan Cincin Cikuda         |
| 8  | Struktur Jembatan Cincin Kuta Mandiri   |
| 9  | Makam Cut Nyak Dien                     |
| 10 | Makuta Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun |
| 11 | Meriam Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun |
| 12 | Bunker Jatisari                         |

| No | Nama Cagar Budaya                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 13 | Pendopo Kecamatan Sumedang Utara                                |
| 14 | Prasasti Pembangunan Jalan raya Pos (Postweg) di Cadas Pangeran |
| 15 | Rumah Cut Nyak Dien                                             |
| 16 | Siger Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun                          |
| 17 | Gedung Srimanganti                                              |
| 18 | Struktur Bendungan Ragadiem                                     |
| 19 | Wisma Gending                                                   |
| 20 | Monumen Loji                                                    |
| 21 | Situs Gunung Lingga                                             |
| 22 | Situs Dayeuhluhur                                               |
| 23 | Situs Jaya Perkasa                                              |
| 24 | Situs Cigobang                                                  |
| 25 | Struktur Panday                                                 |
| 26 | Situs Pasarean Gede                                             |
| 27 | Situs Gunung Puyuh                                              |
| 28 | Situs Buyut Lengka                                              |
| 29 | Situs Marongge/Gunung Hade                                      |
| 30 | Situs Astana Gede Cipaku                                        |
| 31 | Situs Pasir Cengkok                                             |
| 32 | Situs Pasir Putrapada                                           |
| 33 | Situs Pranantaka                                                |
| 34 | Situs Aria Wiraradja I                                          |
| 35 | Situs Pasir Ipis                                                |
| 36 | Situs Cikadu                                                    |
| 37 | Situs Mekarmulya                                                |
| 38 | Situs Nanggan                                                   |
| 39 | Situs Citembong Girang                                          |

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Namun, terdapat pula beberapa objek cagar budaya yang statusnya belum ditetapkan dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Dibawah ini adalah sebaran Objek yang Diduga Cagar Budaya.

**Tabel 2.10**  
**Objek Diduga Cagar Budaya**

| No | Nama Kecamatan             | Objek Diduga Cagar Budaya |          |          |       |
|----|----------------------------|---------------------------|----------|----------|-------|
|    |                            | Situs                     | Struktur | Bangunan | Benda |
| 1  | Kecamatan Wado             | 17                        | -        | -        | -     |
| 2  | Kecamatan Jatinunggal      | 8                         | 1        |          |       |
| 3  | Kecamatan Sumedang Selatan | 31                        | 1        | 6        |       |
| 4  | Kecamatan Darmaraja        | 12                        | 1        |          |       |
| 5  | Kecamatan Ganeas           | 3                         |          |          |       |
| 6  | Kecamatan Cisitu           | 7                         |          |          |       |
| 7  | Kecamatan Pamulihan        | 3                         |          |          |       |
| 8  | Kecamatan Buahdua          | 9                         |          |          |       |
| 9  | Kecamatan Tomo             | 1                         |          |          |       |
| 10 | Kecamatan Sumedang Utara   | 11                        |          |          |       |
| 11 | Kecamatan Jatigede         | 8                         |          |          |       |
| 12 | Kecamatan Conggeang        | 8                         |          |          |       |
| 13 | Kecamatan Situraja         | 8                         |          |          |       |
| 14 | Kecamatan Cibugel          | 7                         |          |          |       |
| 15 | Kecamatan Tanjungmedar     | 1                         |          |          |       |
| 16 | Kecamatan Ujungjaya        | 72                        |          |          |       |
| 17 | Kecamatan Cisarua          | 7                         |          |          |       |
| 18 | Kecamatan Cimalaka         | 8                         |          |          |       |
| 19 | Kecamatan Tanjungkerta     | 5                         |          |          |       |
| 20 | Kecamatan Paseh            | 2                         |          |          |       |
| 21 | Kecamatan Tanjungsari      | 1                         |          |          |       |
| 22 | Kecamatan Rancakalong      | 17                        |          |          |       |
| 23 | Kecamatan Cimanggung       | 2                         |          |          |       |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)*

Selain Cagar Budaya, terdapat pula jenis seni budaya yang dilestarikan di Kabupaten Sumedang meliputi:

- 1) Seni tradisional/seni pertunjukan, diantaranya Kuda Renggong, Tarawangsa, Celempungan, Calung, Kiliningan dan Jaipongan;

- 2) Seni Musik
- 3) Seni tari, diantaranya Tari Jayengrana, Tari Topeng Kasumedangan, Tari Gandamanah, Tari Tayuban, dll.; dan
- 4) Seni kemas, diantaranya Prosesi penyambutan tamu, pembukaan dan penutupan festival.

Adapun jumlah pelaku seni per kecamatan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 disajikan pada tabel dibawah ini.



**Tabel 2.11**  
**Jenis Pelaku Seni per Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| No | Kecamatan   | Jenis Seni    |        |       |         |            |           |              |        |           |                      |
|----|-------------|---------------|--------|-------|---------|------------|-----------|--------------|--------|-----------|----------------------|
|    |             | Kuda Renggong | Kacapi | Tanji | Jaipong | Tarawangsa | Seni Tari | Wayang Golek | Calung | Karawitan | Aneka Seni/Lain-lain |
| 1  | Buahdua     | 5             | -      | 11    | 4       | -          | 1         | 1            | 1      | 1         | 12                   |
| 2  | Cibugel     | -             | -      | -     | -       | -          | 1         | -            | -      | 1         | 2                    |
| 3  | Cimalaka    | -             | 2      | -     | 3       | -          | 1         | 2            | -      | -         | 10                   |
| 4  | Cimanggung  | 5             | -      | -     | 1       | -          | 1         | -            | 3      | -         | 7                    |
| 5  | Cisarua     | 1             | -      | 3     | 5       | -          | 1         | -            | 1      | -         | 9                    |
| 6  | Cisitu      | 4             | -      | -     | 1       | -          | -         | -            | -      | -         | 6                    |
| 7  | Congeang    | 31            | 1      | -     | 4       | -          | 6         | -            | -      | 2         | 11                   |
| 8  | Darmaraja   | 3             | -      | -     | 1       | -          | 1         | -            | -      | -         | 8                    |
| 9  | Ganeas      | 5             | -      | -     | 1       | -          | -         | -            | -      | -         | 2                    |
| 10 | Jatigede    | 2             | -      | -     | 3       | -          | -         | -            | 1      | -         | 2                    |
| 11 | Jatinangor  | 9             | 3      | -     | 1       | -          | -         | 1            | -      | -         | 10                   |
| 12 | Jatinunggal | 4             | -      | -     | 3       | -          | -         | -            | 1      | -         | 5                    |
| 13 | Pamulihan   | 6             | 3      | -     | 4       | 1          | -         | 4            | 2      | 1         | 13                   |

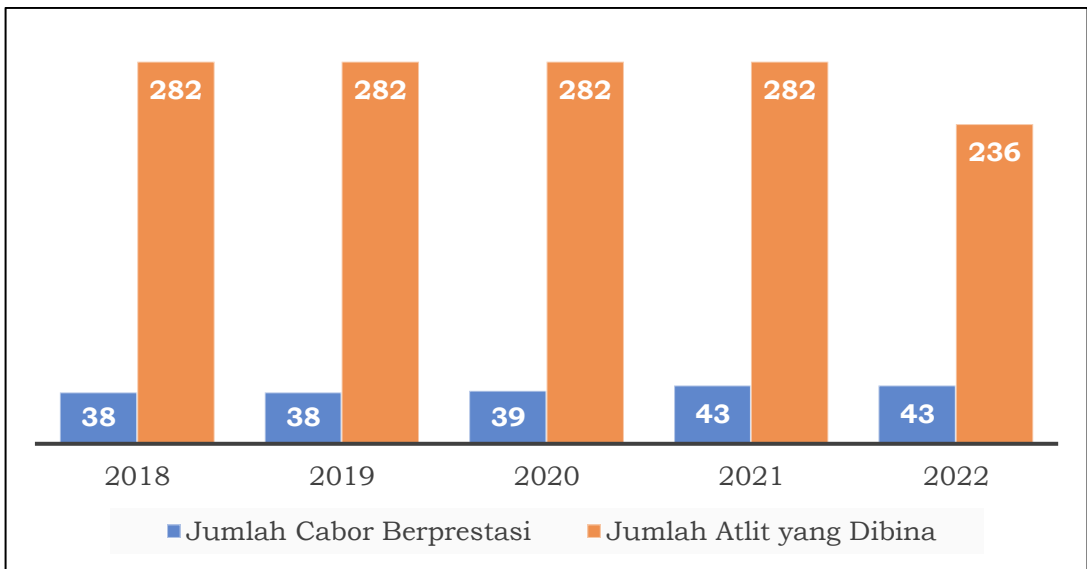
| No              | Kecamatan        | Jenis Seni    |           |           |           |            |           |              |          |           |                      |
|-----------------|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|----------|-----------|----------------------|
|                 |                  | Kuda Renggong | Kacapi    | Tanji     | Jaipong   | Tarawangsa | Seni Tari | Wayang Golek | Calung   | Karawitan | Aneka Seni/Lain-lain |
| 14              | Paseh            | 4             | -         | -         | -         | -          | -         | -            | -        | -         | 3                    |
| 15              | Rancakalong      | 10            | 1         | 2         | 3         | 4          | 3         | 1            | -        | 2         | 25                   |
| 16              | Situraja         | 4             | -         | -         | 3         | -          | 1         | -            | -        | 2         | 10                   |
| 17              | Sukasari         | -             | -         | -         | 2         | -          | -         | -            | -        | -         | 1                    |
| 18              | Sumedang Selatan | 1             | 3         | -         | 1         | -          | 2         | -            | -        | 2         | 16                   |
| 19              | Sumedang Utara   | 1             | 1         | -         | 4         | -          | 5         | 1            | -        | 1         | 16                   |
| 20              | Surian           | -             | -         | -         | -         | -          | -         | -            | -        | -         | -                    |
| 21              | Tanjungkerta     | 3             | -         | -         | -         | -          | -         | -            | -        | -         | 1                    |
| 22              | Tanjungmedar     | 1             | -         | 1         | -         | -          | -         | -            | -        | -         | 2                    |
| 23              | Tanjungsari      | 18            | -         | -         | 1         | -          | 2         | -            | -        | -         | 8                    |
| 24              | Tomo             | 3             | -         | -         | -         | -          | -         | -            | -        | -         | 1                    |
| 25              | Ujungjaya        | 5             | 1         | -         | 2         | -          | -         | -            | -        | -         | 2                    |
| 26              | Wado             | 1             | -         | -         | 2         | -          | -         | -            | -        | -         | 3                    |
| <b>SUMEDANG</b> |                  | <b>126</b>    | <b>15</b> | <b>17</b> | <b>49</b> | <b>5</b>   | <b>25</b> | <b>10</b>    | <b>9</b> | <b>12</b> | <b>185</b>           |

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Selanjutnya, urusan olahraga dititikberatkan kepada upaya peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkolaborasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Sumedang dalam peningkatan keolahragaan.

Kabupaten Sumedang memiliki lebih dari 30 jenis cabang olahraga, dan hanya beberapa cabang olah raga saja telah menorehkan prestasi. Dengan berkolaborasi dengan KONI Kabupaten Sumedang, setiap cabang olahraga mendapatkan pembinaan dan dilakukan penyeleksian jenis cabang olahraga yang siap untuk dipertandingkan. Berikut adalah Cabang Olahraga Berprestasi di Kabupaten Sumedang

**Gambar 2.33**  
**Cabang Olahraga Berprestasi dan Atlit Dibina di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber : KONI Kabupaten Sumedang, 2023

Dari data diatas (Gambar 2.33) dapat dilihat bahwa jumlah cabang olahraga menunjukan tren positif. Sampai Tahun 2022 jumlah cabang olahraga yang berprestasi berjumlah 43 cabor yang sebelumnya berjumlah 39 cabor di Tahun 2020. Jenis cabang olahraga baru yang terseleksi untuk ikut dipertandingkan dalam setiap event olahraga antara lain : Cabang olahraga tenis meja, tinju, wushu dan Perwosi. Lain halnya dengan jumlah atlet yang dibina yang mengalami penurunan pada Tahun 2022. Penurunan ini terjadi

karena penyeleksian yang ketat terhadap atlet yang akan diikutsertakan dalam Porprov XIV.

**2.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu (1) Urusan Pendidikan, (2) Urusan Kesehatan, (3) Urusan Pekerjaan Umum, (4) Urusan Perumahan Rakyat, (5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan (6) Urusan Sosial. Sedangkan muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar.

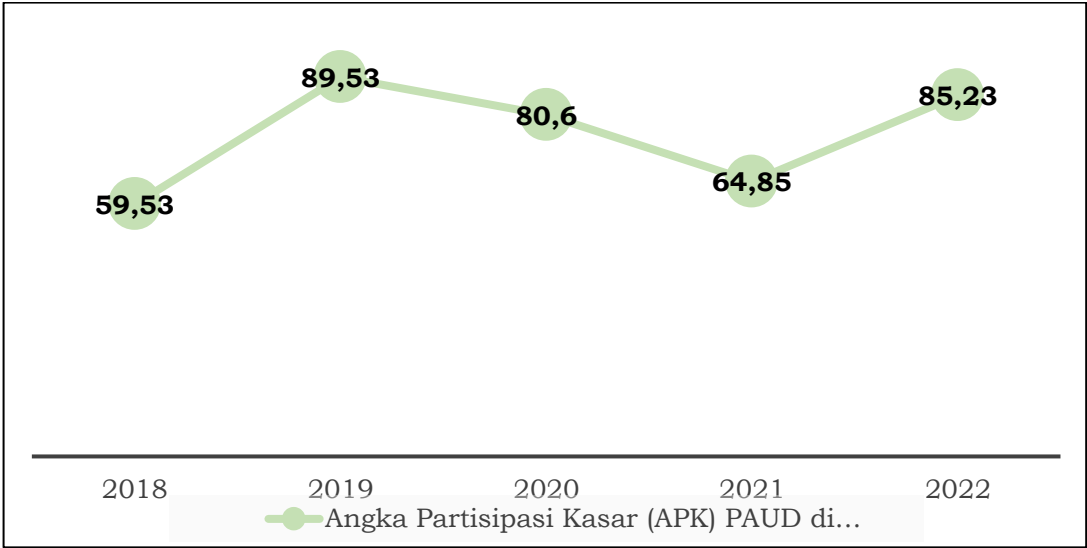
**2.3.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan**

Jenis SPM urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan terdiri atas:

**a. Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang diberikan sebelum anak masuk ke jenjang pendidikan dasar. Pendidikan PAUD ini diupayakan untuk membina anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Berikut adalah tren Partisipasi Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sumedang.

**Gambar 2.34**  
**Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)**



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2023)

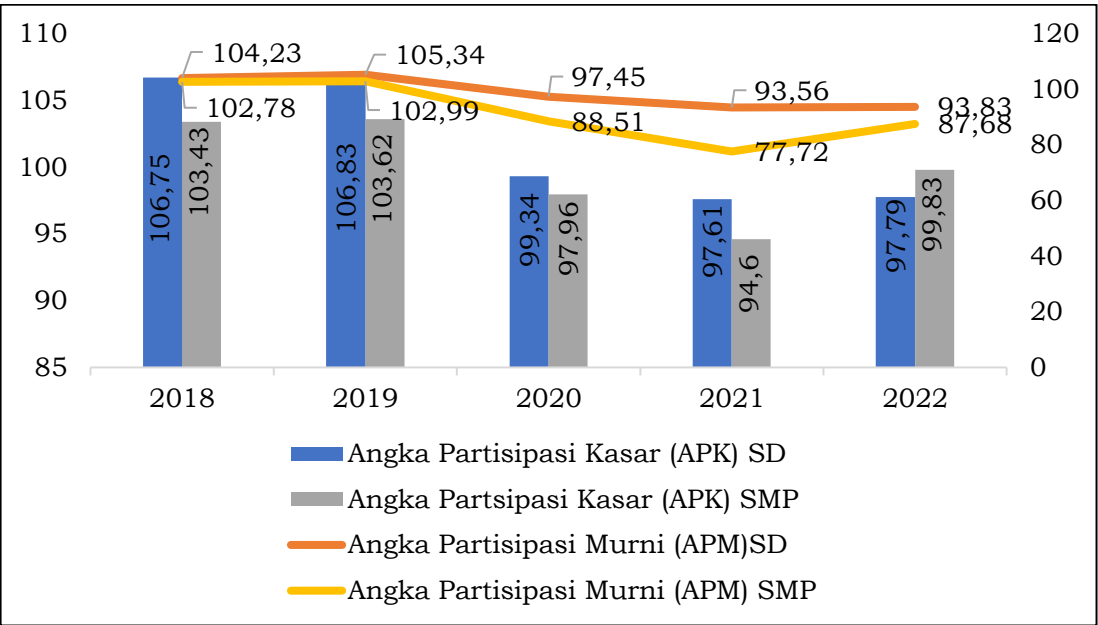
Berdasarkan data diatas bahwa tren angka partisipasi pendidikan PAUD sangat fluktuatif. Realisasi tertinggi pada Tahun 2019 sebesar 89,53% dan terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2021 realisasi partisipasi PAUD hanya 64,85%. Diperkirakan menurunnya angka partisipasi PAUD di Kabupaten Sumedang sebagai salah satu dampak dari Covid-19 yang mengakibatkan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan dilaksanakan secara daring atau *online*, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mengikutsertakan anak yang berusia 5-6 Tahun dalam pendidikan PAUD serta pendataan yang belum optimal. Akan tetapi dengan semakin membaiknya kondisi pandemi covid-19 di Kabupaten Sumedang berpengaruh juga terhadap tren angka partisipasi PAUD pada tahun 2022 yang menunjukkan adanya peningkatan menjadi 85,23% atau naik 20,38% dari tahun sebelumnya. Peningkatan partisipasi PAUD diasumsikan terjadi karena Kabupaten Sumedang memberlakukan pembelajaran secara tatap muka atau luring di seluruh satuan pendidikan dengan sejumlah ketentuan.

**b. Pendidikan Dasar**

Pendidikan Dasar merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut, sehingga peningkatan mutu pendidikan dan jumlah masyarakat yang bersekolah harus terus diupayakan. Untuk mengetahui banyaknya penduduk usia sekolah yang memanfaatkan

fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Indikator Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumedang tersaji pada Gambar 2.35.

**Gambar 2.35**  
**Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022**



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2023)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan serta untuk menunjukkan besaran kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Kegunaan APM salah satunya untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur sesuai dengan ketentuan kelompok usia di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Pada Tahun 2021, baik APK maupun APM dari jenjang Pendidikan SD dan SMP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk APK SD turun sebanyak 1,73 persen sedangkan untuk APK SMP sebanyak 3,36 persen dari tahun sebelumnya.



Adapun untuk APM jenjang SD turun sebesar 3,89 persen dan APM jenjang SMP sebesar 10,79 persen. Diperkirakan penyebab penurunan APK dan APM untuk jenjang Pendidikan SD dan SMP ini dikarenakan adanya penurunan keterlibatan penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan kelompok usia 13-15 tahun dalam bidang pendidikan, selain itu juga faktor pandemi *covid-19* pun ikut mempengaruhi terhadap penurunan APK dan APM di tiap jenjang Pendidikan dimana pembelajaran dilakukan secara daring sehingga ada kendala terkait dengan keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah. Namun pada Tahun 2022 ada tren peningkatan pada APK maupun APM.

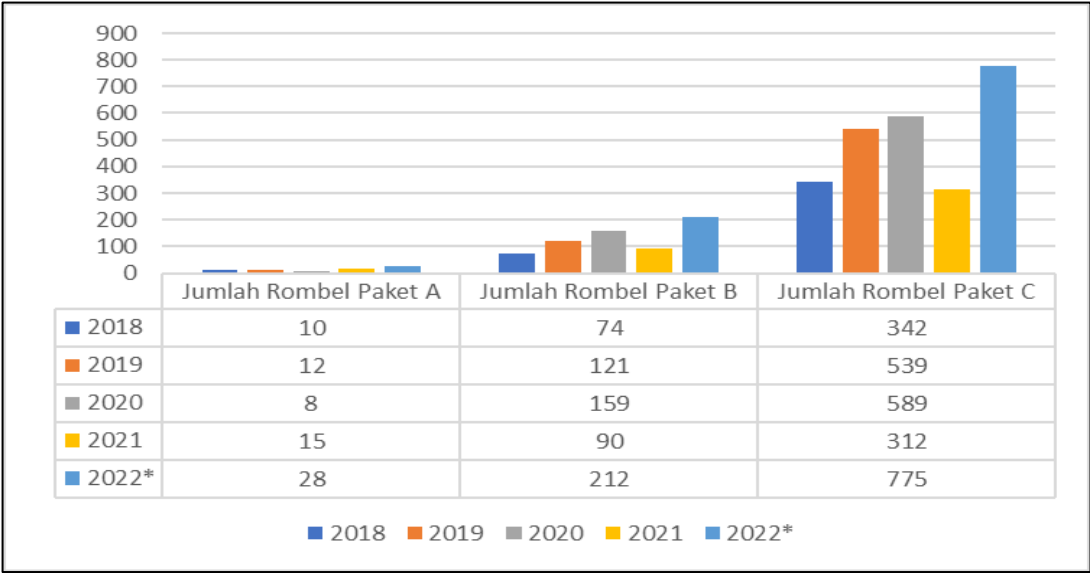
APK SD dan SMP mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan dengan masing-masing kenaikan 0,18 persen untuk APK SD sehingga menjadi 97,79 persen dan 5,23 persen untuk APK SMP sehingga menjadi 99,83 persen. Begitu juga dengan APM SD dan APM SMP yang masing-masing capaiannya 93,83 persen untuk APM SD dan 87,68 persen untuk APM SMP. Kenaikan ini diindikasikan sebagai salah satu dampak dari diluncurkannya berbagai bantuan oleh Pemerintah seperti bantuan Kartu Indonesia Pintar.

### **c. Pendidikan kesetaraan**

Pendidikan kesetaraan merupakan pengganti pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan non-formal. Pendidikan kesetaraan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan kesetaraan ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan bagi warga yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal.

Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. Berikut Rombongan Belajar untuk Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.

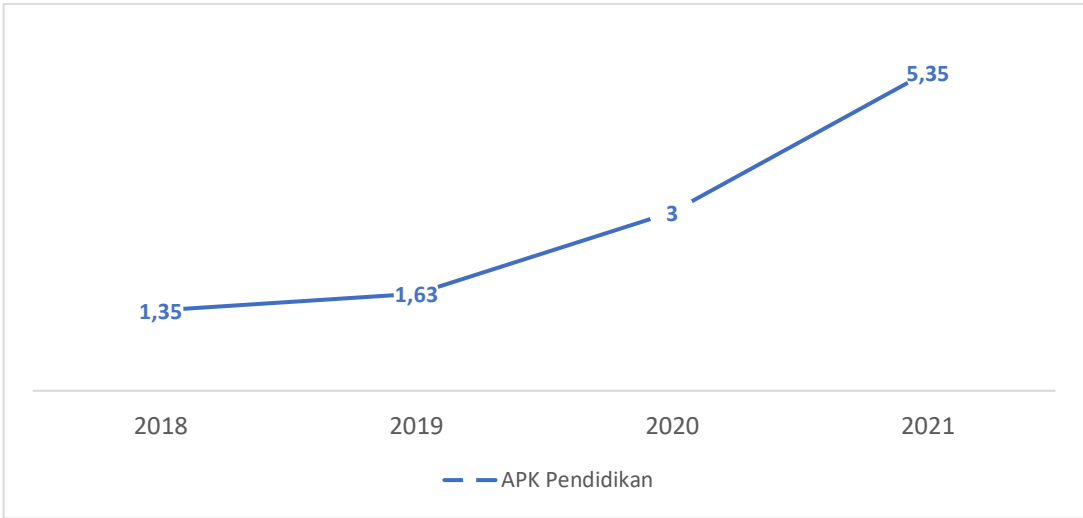
**Gambar 2.36**  
**Rombongan Belajar Paket A, Paket B dan Paket C di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)**



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2023)

Adapun angka partisipasi Pendidikan kesetaraan tren nya terus meningkat pada setiap tahunnya. Angka partisipasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,35 persen. Peningkatan ini sebagai dampak dari optimalisasi Lembaga Pendidikan non formal/kesetaraan yang ada di Kabupaten Sumedang.

**Gambar 2.37**  
**Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)**



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2023)

Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.12**  
**Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2021-2022**

| No  | Jenis Pelayanan Dasar/Indikator                                                                                                                 | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Perangkat Daerah        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                 | Target     | Capaian | Target     | Capaian |                         |
| (1) | (2)                                                                                                                                             | (3)        | (4)     | (5)        | (6)     | (7)                     |
| 1.  | <b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>                                                                                                                |            |         |            |         | <b>Dinas Pendidikan</b> |
|     | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Paud                                                                    | 100%       | 44,41   | 100%       | 92%     |                         |
| 2.  | <b>Pendidikan Dasar</b>                                                                                                                         |            |         |            |         |                         |
|     | Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar                                                                 | 100%       | 89,31   | 100%       | 89,55%  |                         |
| 3.  | <b>Pendidikan Kesetaraan</b>                                                                                                                    |            |         |            |         |                         |
|     | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasai Dalam Pendidikan Kesetaraan | 100%       | 43,42   | 100%       | 58,47 % |                         |

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2022

**2.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan**

Jenis Pelayanan Dasar SPM Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas:

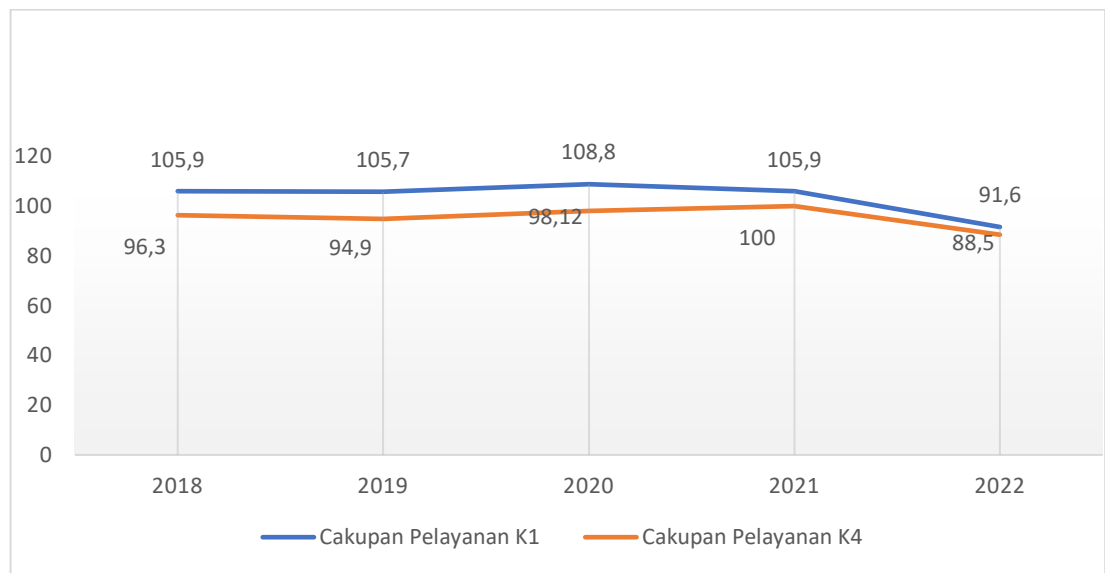
**a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Kesehatan ibu hamil merupakan masalah kesehatan yang harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Salah satu metode peningkatan kesehatan ibu hamil ialah dengan peningkatan pelayanan antenatal. Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada Ibu selama masa kehamilannya secara berkala. Tujuannya untuk pengawasan tumbuh kembang janin dalam rahim serta untuk menjaga keselamatan ibu dan janin.

Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui cakupan pelayanan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan cakupan K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, yakni paling sedikit 4 (empat) kali sesuai jadwal yang dianjurkan tiap trimester dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan kunjungan ibu hamil meningkat menjadi 6 (enam) kali kunjungan. Pada tahun 2022 terjadi 14.700 kunjungan dari 17.877 ibu hamil atau 82,2%.

Tren pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang cenderung fluktuatif. Untuk cakupan pelayanan K1 selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami penurunan, kecuali pada Tahun 2020 naik menjadi 108,8% dari 105,7% pada Tahun 2019. Akan tetapi Tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 91,6%. Cakupan pelayanan K4 pun mengalami penurunan. Pada tahun 2021 cakupan pelayanan K4 sebesar 100% menjadi 85,5% di Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan lingkungan ibu hamil masih rendah. Karena itu diperlukan upaya peningkatan peran bidan, meningkatkan peran dan dukungan suami serta keluarga agar ibu hamil dapat melaksanakan kunjungan antenatal *care* secara lengkap. Cakupan pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.38 berikut:

**Gambar 2.38**  
**Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2012 – 2022**



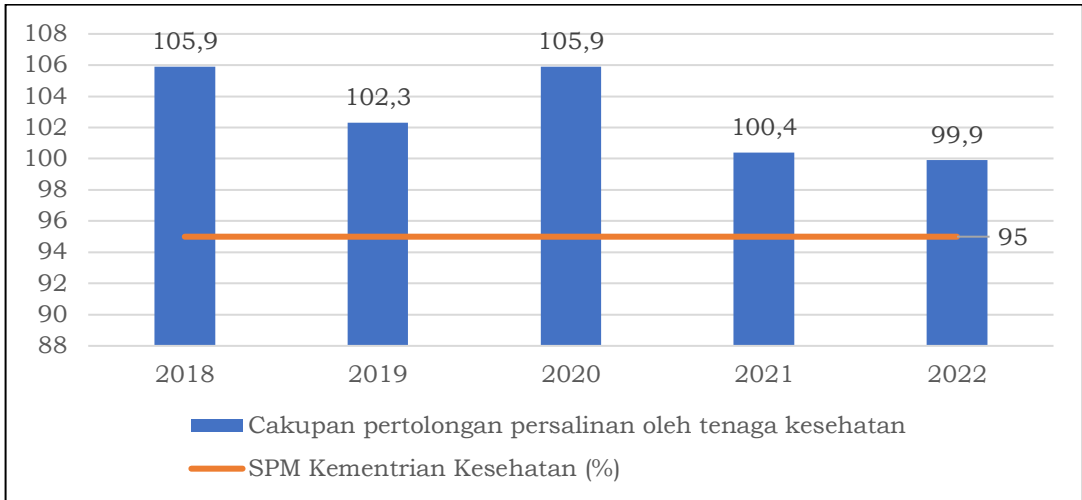
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

**b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Pelayanan kesehatan ibu bersalin merupakan salah satu cara untuk menurunkan kematian ibu dan bayi, yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan ibu bersalin ialah dengan melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun sangat fluktuatif. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah mencapai 100% yang artinya bahwa seluruh proses persalinan sudah seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Data tertinggi terjadi pada Tahun 2018 dan Tahun 2020 yaitu 105,9%. Untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada Tahun 2022 menurun 0,5% dari tahun sebelumnya menjadi 99,9%.

**Gambar 2.39**  
**Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022**



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

**c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir berupa kunjungan neonatal (KN) yakni kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 3 (tiga) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar fasilitas kesehatan seperti di bidan, polindes dan kunjungan ke rumah. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, sehingga dapat mengetahui sedini mungkin apabila terdapat kelainan atau masalah pada neonatus. Dengan demikian dapat diketahui efektivitas dan pelayanan kesehatan neonatal. Tren cakupan Kunjungan *Neonatus* di Kabupaten Sumedang setiap tahunnya sebagian besar mengalami penurunan. Penurunan terendah terjadi pada Tahun 2021 sebesar 12,3% dari tahun 2020 menjadi 98,2%. Penurunan ini sebagai salah satu akibat dari adanya pandemi covid-19 yang membatasi jumlah kunjungan tenaga kesehatan terhadap neonatus untuk meminimalisir sebaran *covid-19*.

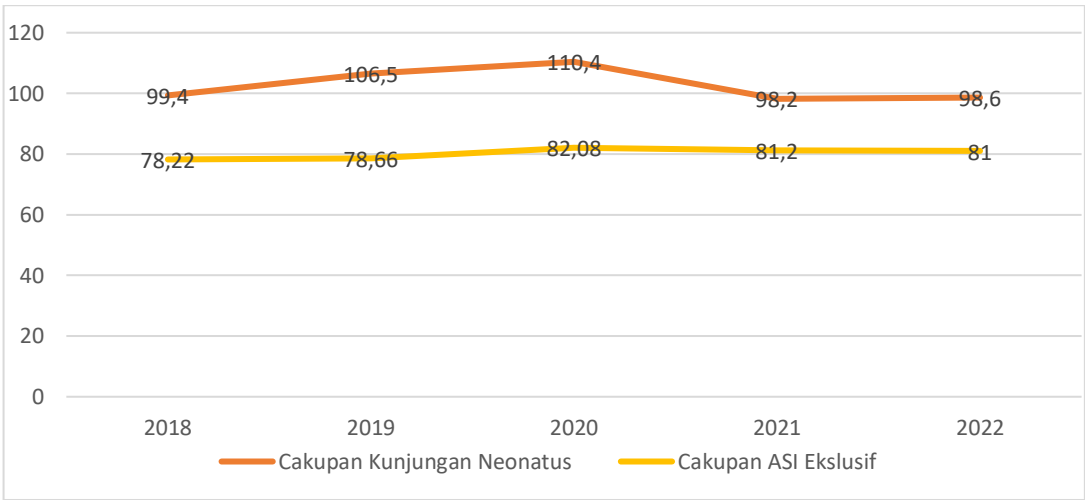
Pelayanan lainnya ialah Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif. IMD merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Asi eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 (enam) bulan pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain. ASI menyediakan semua nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang bayi dan mengandung antibodi yang berfungsi melawan penyakit serta membantu menyempurnakan sistem kekebalan tubuh bayi. Proses



untuk keberhasilan ASI eksklusif bayi 6 (enam) bulan dilaksanakan selama rentang usia bayi 0 sampai 5 bulan.

Keberhasilan ASI eksklusif di Kabupaten Sumedang tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 82,08%, dan menunjukkan tren menurun dengan persentase 81,26% di Tahun 2021 dan kembali menurun dengan persentase 81% pada Tahun 2022. Penurunan ini terjadi karena banyak faktor, diantaranya jumlah bayi ASI Eksklusif yang gugur sebelum usia 6 bulan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran ibu akan pentingnya ASI bagi pertumbuhan anak serta rendahnya implementasi regulasi pemberian ASI, sehingga terlihat regulasi tersebut agak teracuhkan. Dengan demikian keberhasilan cakupan pemberian ASI eksklusif sangat dipengaruhi oleh kerja sama dari semua pihak.

**Gambar 2.40**  
**Cakupan Kunjungan Neonatus dan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023) (diolah)

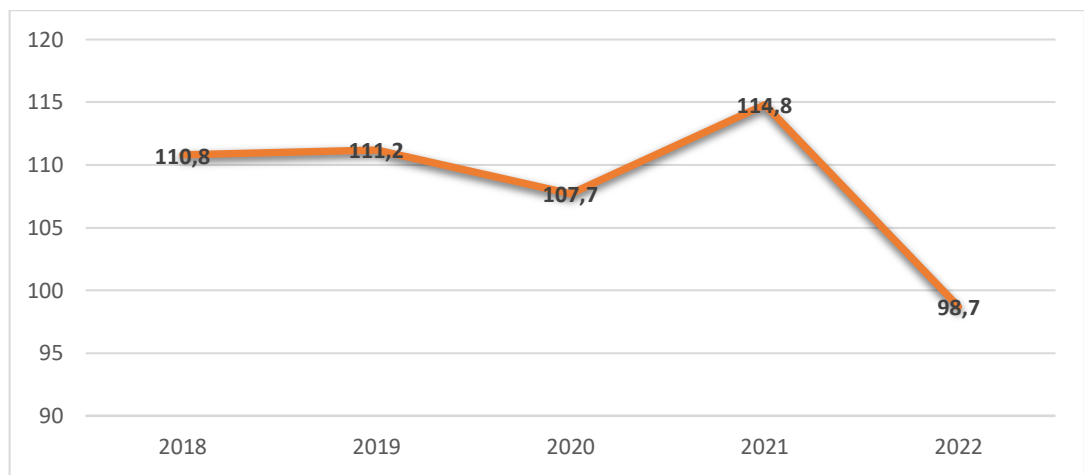
**d. Pelayanan Kesehatan Balita**

Balita diartikan sebagai salah satu periode usia dengan rentang usia mulai 12-59 bulan. Masa balita merupakan masa keemasan atau disebut juga *golden period* yaitu masa ketika terbentuknya dasar-dasar kemampuan keindraan, berfikir, berbicara serta pertumbuhan mental intelektual yang intensif dan awal pertumbuhan moral. Pelayanan kesehatan balita meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan serta tata laksana balita sakit.

Upaya deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita menjadi sangat penting agar dapat dikoreksi sedini mungkin sehingga mencegah gangguan ke arah yang lebih berat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan balita adalah cakupan kunjungan anak balita yang diartikan sebagai cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 (empat) kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sumedang pada Gambar di bawah ini dan tren berfluktuasi. Pada Tahun 2022 persentasenya hanya mencapai 98,7% atau 15.777 bayi telah mendapatkan pelayanan paripurna.

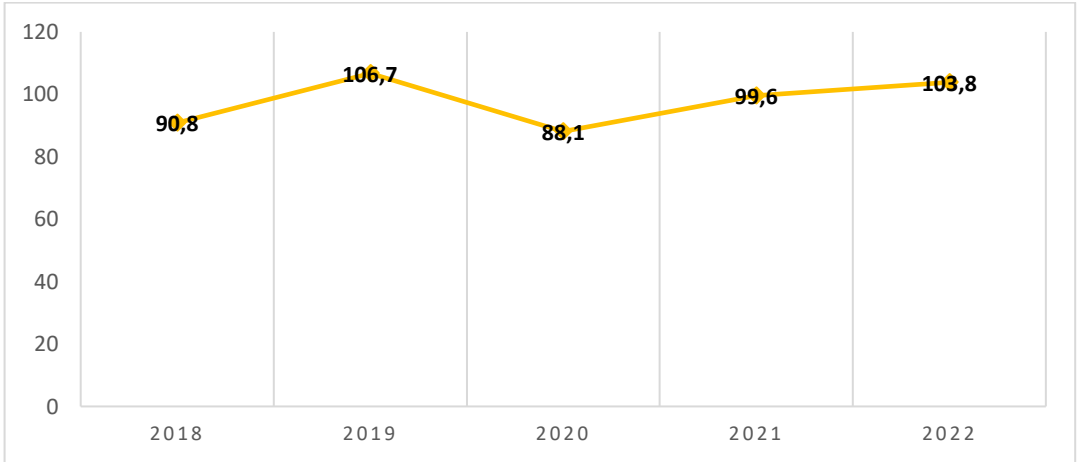
**Gambar 2.41**  
**Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018 – 2022 (%)**



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

Berdasarkan Gambar 2.42 dapat dilihat bahwa pencapaian cakupan kunjungan balita Tahun 2022 mencapai target diatas 100% yaitu 103,8%.

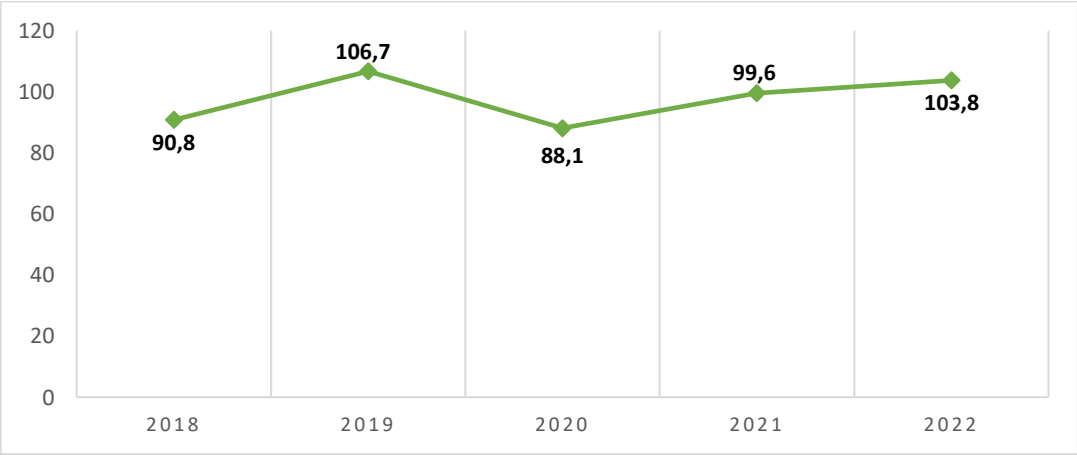
**Gambar 2.42**  
**Cakupan Kunjungan Balita di Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

Berdasarkan Gambar 2.43 dapat dilihat bahwa pencapaian cakupan kunjungan balita Tahun 2022 mencapai target diatas 100% yaitu 103,8%.

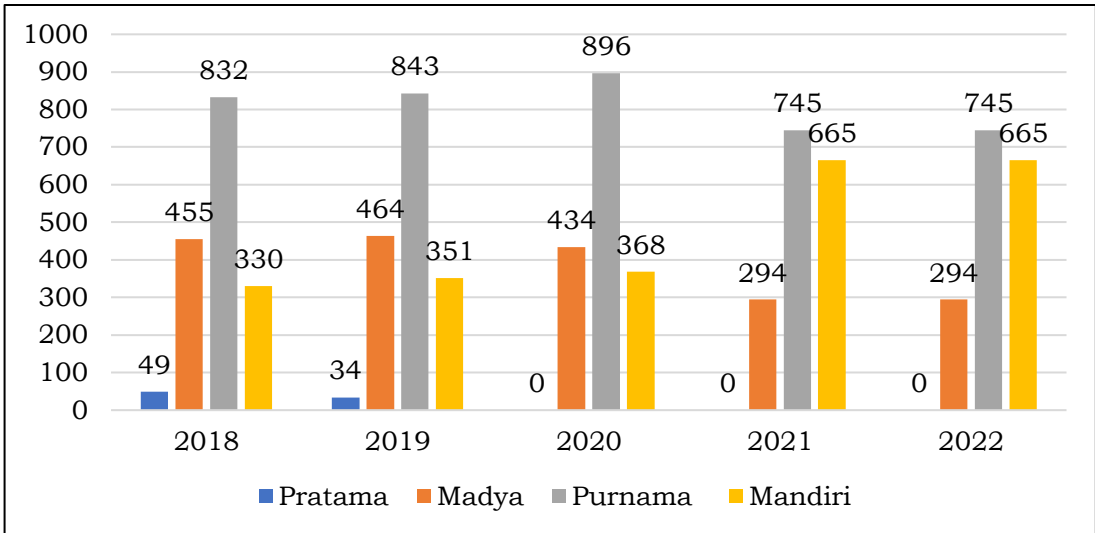
**Gambar 2.43**  
**Cakupan Kunjungan Balita di Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

Posyandu berdasarkan strata terdiri dari 4 (empat) tingkatan terdiri dari Pratama, Madya, Purnama dan mandiri. Jumlah Posyandu strata Pratama menjadi nol sejak tahun 2020. Hal tersebut menandakan adanya peningkatan status strata posyandu. Pada Tahun 2022 terdapat 1.704 Posyandu dan Posyandu dengan strata mandiri sebanyak 39 % atau 665 Posyandu.

**Gambar 2.44**  
**Posyandu Menurut Strata Tahun 2018 – 2022**

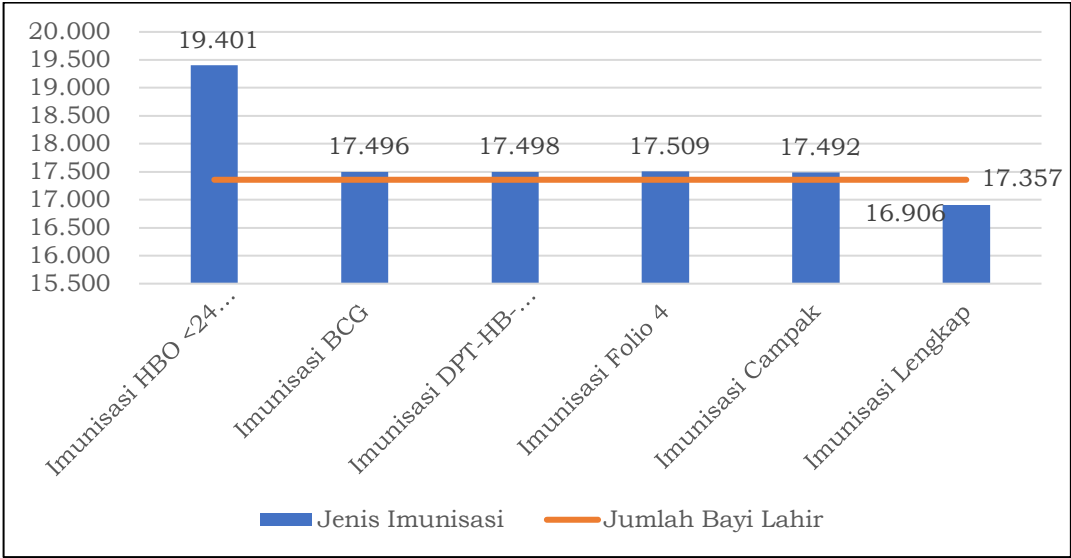


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

Posyandu merupakan kegiatan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar terutama bagi ibu, bayi dan anak balita. Posyandu memiliki 5 (lima) program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare.

Imunisasi yang diberikan pada bayi berupa imunisasi Hepatitis-B0 dengan 2 (dua) kategori pemberian imunisasi yaitu untuk bayi baru lahir kurang dari 24 jam dan bayi berumur 1-7 hari. Namun Imunisasi HBO biasanya segera dilakukan setelah bayi lahir, sehingga tidak ada bayi yang diimunisasi pada umur 1-7 hari. Imunisasi lainnya yang diberikan adalah BCG, DPT -HB-HiB 3, Polio 4 dan Campak Rubela. Dari 17.357 bayi lahir hidup, terdapat 16.906 bayi dengan imunisasi dasar lengkap atau sebanyak 97,3%.

**Gambar 2.45**  
**Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Jenis Imunisasi yang Diperoleh Tahun 2022**



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

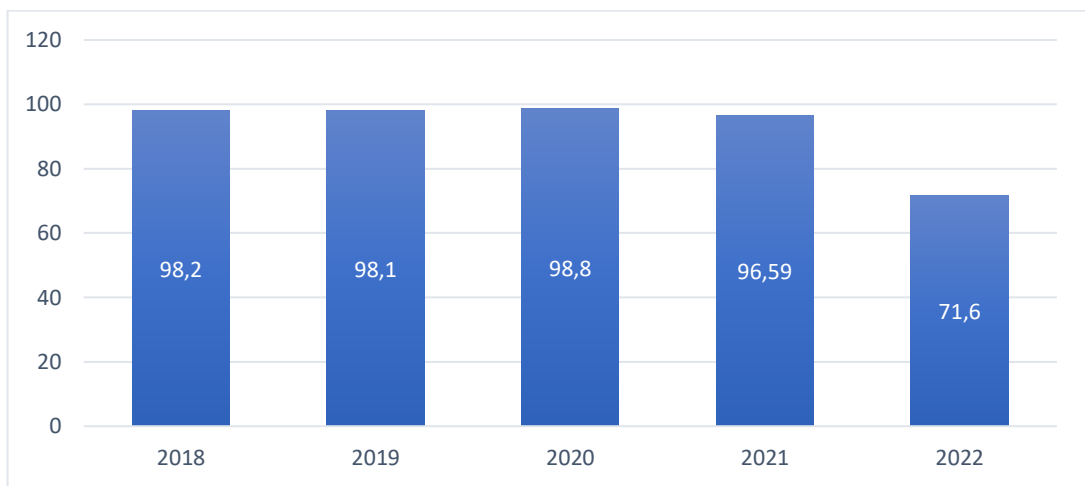
**e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**

Usia Pendidikan Dasar berkisar antara 6-15 Tahun. Pada usia tersebut pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia serta keterampilan yang dikuasai pun semakin beragam. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah merupakan salah satu indikator SPM urusan kesehatan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Sasaran pelayanan kesehatan adalah anak usia sekolah yang berada dalam kuasa asuh dari orang tua/wali, maka informasi penjangkaran kesehatan/ pemeriksaan berkala perlu diberikan untuk orangtua/wali. Pelayanan kesehatan merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya agar terhindar dari keadaan yang lebih buruk, selain itu juga dengan adanya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dapat diperoleh data dan informasi mengenai perkembangan anak.

Adapun jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan antara lain penilaian riwayat kesehatan, penilaian status imunisasi, riwayat kesehatan keluarga, penilaian perilaku berisiko, penilaian kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kesehatan intelegensia, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan kebersihan diri, pemeriksaan kesehatan indera penglihatan, pemeriksaan kesehatan indera pendengaran, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan

kebugaran jasmani yang dilakukan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali di sekolah. Hasil dari pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.46 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)**



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

Berdasarkan Gambar di atas cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 100%. Pada Tahun 2022 cakupan pelayanan dari 152.296 siswa, terlayani sebanyak 109.007 siswa atau terlayani sebanyak 71,6%. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai jadwal pemeriksaan yang disampaikan oleh petugas/guru kepada komite sekolah sehingga pada saat pelayanan kesehatan ada siswa yang tidak hadir, selain itu belum optimalnya *sweeping* yang dilakukan oleh petugas dan peran dari Tim TP UKS di tiap tingkatan serta kegiatan masih dianggap hanya bertumpu pada sektor kesehatan yakni Dinas Kesehatan.

**f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**

Usia produktif berkisar antara 15-59 Tahun dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi (termasuk keluarga berencana) dan skrining kesehatan di wilayahnya dalam kurun waktu satu tahun. Skrining usia produktif merupakan salah satu indikator SPM bidang kesehatan, sehingga Pemerintah Daerah wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja



sama dengan Pemerintah Daerah. Skrining kesehatan dilakukan untuk mengamati faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Berikut adalah Kesehatan Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

**Tabel 2.13**  
**Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| Jenis Kelamin | Pelayanan Kesehatan | Beresiko |
|---------------|---------------------|----------|
| Laki-laki     | 52.024              | 83       |
| Perempuan     | 62.586              | 318      |
| Total         | 114.610             | 401      |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)*

**g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut diberikan kepada setiap warga yang telah berusia 60 tahun ke atas. Bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular sesuai standar paling sedikit 1 (satu) kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Tujuan dari pelayanan kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pada lansia untuk memelihara kesehatan sendiri, meningkatkan kemampuan serta peran serta keluarga dan masyarakat dalam mengatasi kesehatan lansia, meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan lansia serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia.

Pelayanan kesehatan penduduk usia lansia di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 berupa skrining yang dilakukan di 26 Kecamatan pada 35 puskesmas dengan jumlah penduduk usia lanjut sebanyak 159.665 jiwa. Adapun penduduk yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar berjumlah 134.571 jiwa atau 84,3%. Ini berarti belum seluruh penduduk usia lanjut mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut adalah Data Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.14**  
**Data Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022**

| Jenis Kelamin     | Pelayanan Kesehatan | Persentase  |
|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>Tahun 2021</b> |                     |             |
| Laki-laki         | 60.976              | 66,1        |
| Perempuan         | 86.559              | 89,1        |
| Total             | 147.535             | 77,9        |
| <b>Tahun 2022</b> |                     |             |
| Laki-laki         | 54.575              | 69,4        |
| Perempuan         | 79.996              | 98,8        |
| <b>Total</b>      | <b>134.571</b>      | <b>84,3</b> |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

**h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang paling umum dan paling banyak disandang masyarakat. Hipertensi disebut sebagai *the silent killer* karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Hipertensi merupakan penyakit yang berada pada 10 (sepuluh) besar penyakit di Kabupaten Sumedang. Tabel di bawah ini adalah Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.15**  
**Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**  
**Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2021-2022**

| Jenis Kelamin     | Penderita Dilayani | Persentase  |
|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>Tahun 2021</b> |                    |             |
| Laki-laki         | 100.673            | 100,8       |
| Perempuan         | 144.236            | 108,9       |
| Total             | 244.911            | 98,7        |
| <b>Tahun 2022</b> |                    |             |
| Laki-laki         | 94.170             | 76,2        |
| Perempuan         | 111.707            | 104,4       |
| <b>Total</b>      | <b>227.972</b>     | <b>98,9</b> |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Sumedang sebanyak 230.490 jiwa. Adapun penderita yang mendapat pelayanan kesehatan telah mencapai 227.972 jiwa atau 98,9% hampir mendekati target yang telah ditentukan.

**i. Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus***

*Diabetes Melitus* (DM) atau Kencing Manis merupakan penyakit saat kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula didalam darah tidak dapat dimetabolisme. *Diabetes Melitus* disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Berikut adalah Data Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus* (DM) di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022.

**Tabel 2.16**  
**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) di**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022**

| Uraian                | 2021   | 2022   |
|-----------------------|--------|--------|
| Jumlah Penderita DM   | 64.920 | 62.100 |
| Penderita DM Dilayani | 62.409 | 61.143 |
| Persentase Terlayani  | 96,1   | 98,5   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

**j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**

Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa berat (psikotik akut dan *skizofrenia*) sebagai upaya pencegahan sekunder, meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. Berdasarkan pencatatan dan pelaporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap ODGJ telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya deteksi dini faktor resiko kepada Dinas Instansi, Tatanan Pendidikan serta kepada komunitas masyarakat. Berikut adalah Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ).

**Tabel 2.17**  
**Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022**

| Uraian                  | 2021  | 2022  |
|-------------------------|-------|-------|
| Jumlah Sasaran ODGJ     | 1.665 | 1.614 |
| Penderita ODGJ Dilayani | 1.331 | 1.585 |
| Persentase Terlayani    | 80,4  | 98,2  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini (Tabel 2.17).

**Tabel 2.18**  
**Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar/Indikator      | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Perangkat Daerah       |
|----|--------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------------------|
|    |                                      | Target     | Capaian | Target     | Capaian |                        |
| 1. | <b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b> |            |         |            |         | <b>Dinas Kesehatan</b> |
|    | Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan    | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    |                        |

| No | Jenis Pelayanan Dasar/Indikator                        | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Perangkat Daerah |
|----|--------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------------|
|    |                                                        | Target     | Capaian | Target     | Capaian |                  |
|    | Layanan Kesehatan                                      |            |         |            |         |                  |
| 2. | <b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>                |            |         |            |         |                  |
|    | Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    |                  |
| 3. | <b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>             |            |         |            |         |                  |
|    | Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapat Layanan Kesehatan | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    |                  |
| 4. | <b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>                      |            |         |            |         |                  |
|    | Jumlah Balita Yang Mendapat Layanan Kesehatan          | 100%       | 100%    | 100%       | 99,73%  |                  |
| 5. | <b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>  |            |         |            |         |                  |
|    | Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar              | 100%       | 96.59%  | 100%       | 72,23%  |                  |

| No | Jenis Pelayanan Dasar/Indikator                                          | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Perangkat Daerah |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------------|
|    |                                                                          | Target     | Capaian | Target     | Capaian |                  |
|    | Yang Mendapat Layanan Kesehatan                                          |            |         |            |         |                  |
| 6. | <b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>                           |            |         |            |         |                  |
|    | Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapat Layanan Kesehatan       | 100%       | 96.32%  | 100%       | 97%     |                  |
| 7. | <b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>                              |            |         |            |         |                  |
|    | Jumlah Warga Negara Pada Usia Lanjut Yang Mendapat Layanan Kesehatan     | 100%       | 77.88%  | 100%       | 84,72%  |                  |
| 8. | <b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>                          |            |         |            |         |                  |
|    | Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapat Layanan Kesehatan | 100%       | 98.69%  | 100%       | 98,58%  |                  |
| 9. | <b>Pelayanan Kesehatan Penderita</b>                                     |            |         |            |         |                  |
|    |                                                                          |            |         |            |         |                  |
|    |                                                                          |            |         |            |         |                  |



| No  | Jenis Pelayanan Dasar/Indikator                                                 | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Perangkat Daerah |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------------|
|     |                                                                                 | Target     | Capaian | Target     | Capaian |                  |
|     | <b>Diabetes Melitus</b>                                                         |            |         |            |         |                  |
|     | Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapat Layanan Kesehatan  | 100%       | 97.40%  | 100%       | 98.65%  |                  |
| 10. | <b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</b>                     |            |         |            |         |                  |
|     | Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Berat (ODGJ) Yang Terlayani Kesehatan       | 100%       | 80.52%  | 100%       | 95,66%  |                  |
| 11. | <b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>                           |            |         |            |         |                  |
|     | Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis Yang Mendapat Layanan Kesehatan        | 100%%      | 25.62%  | 100%%      | 80,78%  |                  |
| 12. | <b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan</b> |            |         |            |         |                  |
|     |                                                                                 |            |         |            |         |                  |
|     |                                                                                 |            |         |            |         |                  |
|     |                                                                                 |            |         |            |         |                  |

| No | Jenis Pelayanan Dasar/Indikator                                                                                                                                     | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Perangkat Daerah |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                     | Target     | Capaian | Target     | Capaian |                  |
|    | <b>Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)</b>                                                                                               |            |         |            |         |                  |
|    | Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) Yang Mendapat Layanan Kesehatan | 100%       | 66.92%  | 100%       | 98,33%  |                  |

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2022

**2.3.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

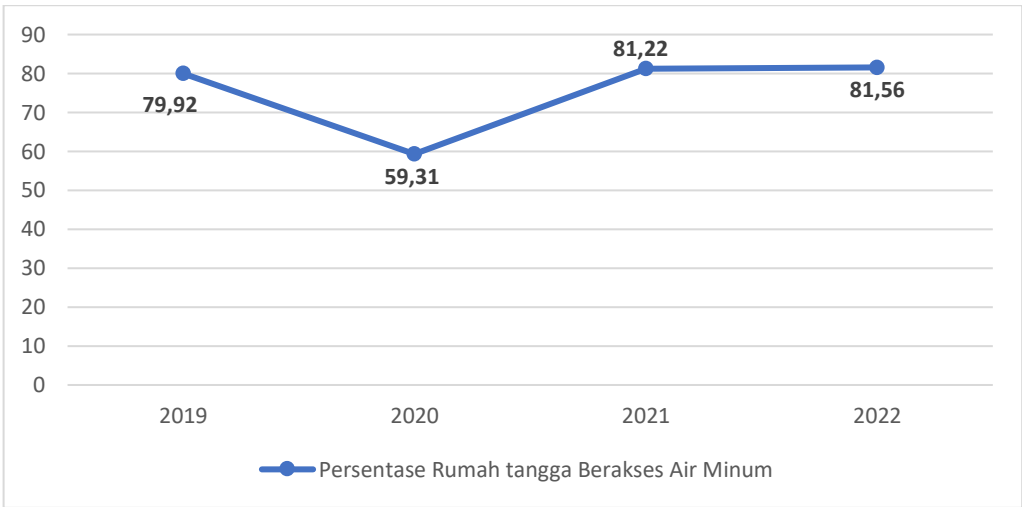
Jenis Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

**a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**

Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat juga meningkat jumlahnya. Untuk menjamin semua masyarakat mempunyai akses terhadap air minum yang layak dan aman, Kementerian Kesehatan menargetkan 100% akses air minum layak dan 15% air minum aman di Tahun 2022.

Air minum yang ideal adalah yang aman dikonsumsi, jernih, tidak berbau, tidak berasa aneh, bersuhu wajar, bersih dari bakteri serta mengandung sejumlah mineral. Menurut data dari Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang bahwa capaian rumah tangga berakses air minum mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2022 rumah tangga berakses air minum mencapai 81,56 persen atau 244.688 RT. Kenaikan ini sudah melebihi target awal yang ditentukan yaitu sebesar 79,02 persen atau 237.060 RT. Hal ini dikarenakan adanya percepatan akses pasokan air, sanitasi dan kebersihan yang dikelola dengan naman oleh Pemerintah Daerah, selain itu juga sosialisasi perilaku hidup bersih kepada masyarakat sekitar terus digalakkan. Tren Rumah Tangga Berakses Air Bersih dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar 2.47**  
**Tren Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)**  
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2022**



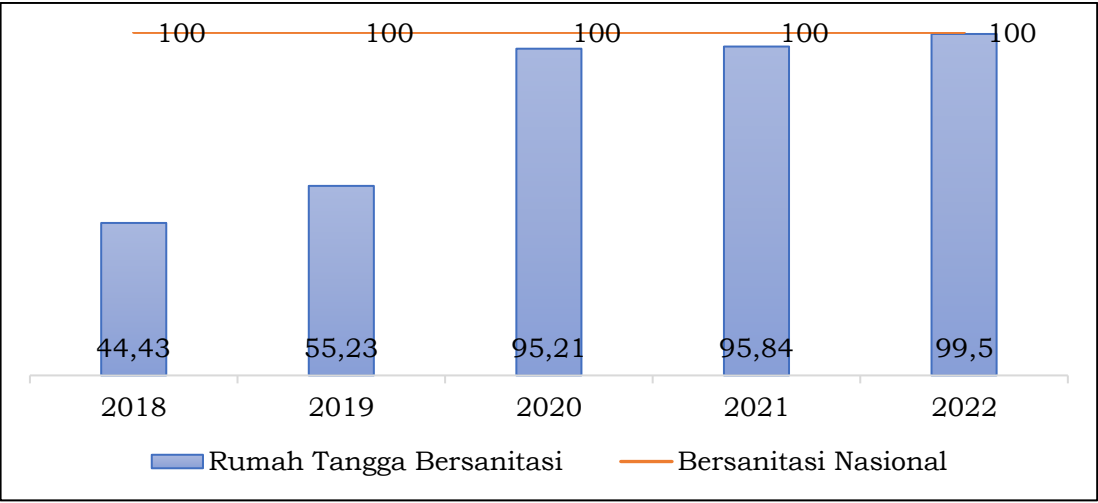
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (2023)

**b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Air limbah rumah tangga seperti air sisa deterjen, air sabun dan air tinja merupakan satu diantaranya. Limbah rumah tangga berpotensi dapat merusak ekosistem air, mencemari tanah, serta berpengaruh terhadap sumber air minum masyarakat. Rumah tangga bersanitasi salah satu kriterianya adalah mempunyai WC dan akses sanitasi yang layak. Target capaian untuk rumah tangga bersanitasi nasional adalah 100%.

Di Kabupaten Sumedang, peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi melesat di Tahun 2020. Dari 55,23 persen pada tahun 2019 menjadi 95,21 persen di tahun berikutnya. Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Tahun 2022, persentase rumah tangga bersanitasi mencapai 99,5 persen dan hampir mendekati standar pelayanan nasional. Jumlah rumah tangga yang telah bersanitasi atau telah melakukan perilaku “Stop BABS” di Tahun 2022 mencapai 396.836 keluarga dari total keluarga sasaran sebanyak 398.779 keluarga. Melalui program Kabupaten Sehat, Pemerintah Daerah membangun tempat pengolahan limbah domestik rumah tangga, terutama untuk limbah kakus dengan pembangunan septi tank komunal di beberapa wilayah yang masyarakatnya masih masih membuang limbah kakus ke sungai. Capaian Rumah Tangga ber-sanitasi dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 2.48**  
**Capaian Rumah Tangga ber-Sanitasi (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penanataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 bisa dilihat pada Tabel 2.18 dibawah ini.

**Tabel 2.19**  
**Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2021–2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar/Indikator                            | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Perangkat Daerah                                         |
|----|------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
|    |                                                            | Target     | Capaian | Target     | Capaian |                                                          |
| 1. | <b>Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari</b>     |            |         |            |         | <b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan</b> |
|    | Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum                 | 100%       | 95,55%  | 100%       | 52,10%  |                                                          |
| 2. | <b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</b> |            |         |            |         |                                                          |
|    | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi                        | 100%       | 79,23%  | 100%       | 90,14%  |                                                          |

*Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2022*

**2.3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

**a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota**

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di permukiman rawan bencana untuk menata kembali kehidupannya di tempat yang baru. Berikut adalah data penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.20**  
**Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana di**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                 | Tahun (KK) |      |
|----|-------------------------------------------------------|------------|------|
|    |                                                       | 2021       | 2022 |
| 1  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | 30         | 0    |

*Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)*

Pada tahun 2021 terjadi bencana alam berupa tanah longsor di Kecamatan Cimanggung, jumlah keluarga yang terdampak bencana tersebut berjumlah 135 kepala keluarga. Pasca bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang menindaklanjuti program Pemerintah Pusat, baru merelokasi sekitar 30 kepala keluarga yang termasuk ke dalam daftar warga terdampak bencana prioritas I, melalui penyediaan rumah khusus yang diperuntukan bagi warga terdampak bencana. Adapun untuk Tahun 2022, Pemerintah Daerah belum melakukan relokasi sisa warga yang terdampak bencana dikarena belum tersedianya lokasi pembangunan pemukiman di daerah sekitar yang jauh dari zona merah bencana.

**b. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, belum pernah terjadi di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2022. Dikarenakan program-program Pemerintah Daerah lebih dititikberatkan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti program dalam upaya penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting serta memperbaiki fasilitas umum dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 secara umum disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 2.21**  
**Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2021–2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar/Indikator                                                                                                   | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Perangkat Daerah                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   | Target     | Capaian | Target     | Capaian |                                                           |
| 1. | <b>Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota</b>                                |            |         |            |         | <b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan</b> |
|    | 1. Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana<br>2. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana                 | 100%       | 98,91%  | 100%       | 98,91%  |                                                           |
| 2. | <b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |            |         |            |         |                                                           |
|    | 1. Subsidi Uang Sewa<br>2. Penyediaan Rumah Layak Huni                                                                            | 100%       | 99,52%. | 100%       | 100%    |                                                           |

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2022

**2.3.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

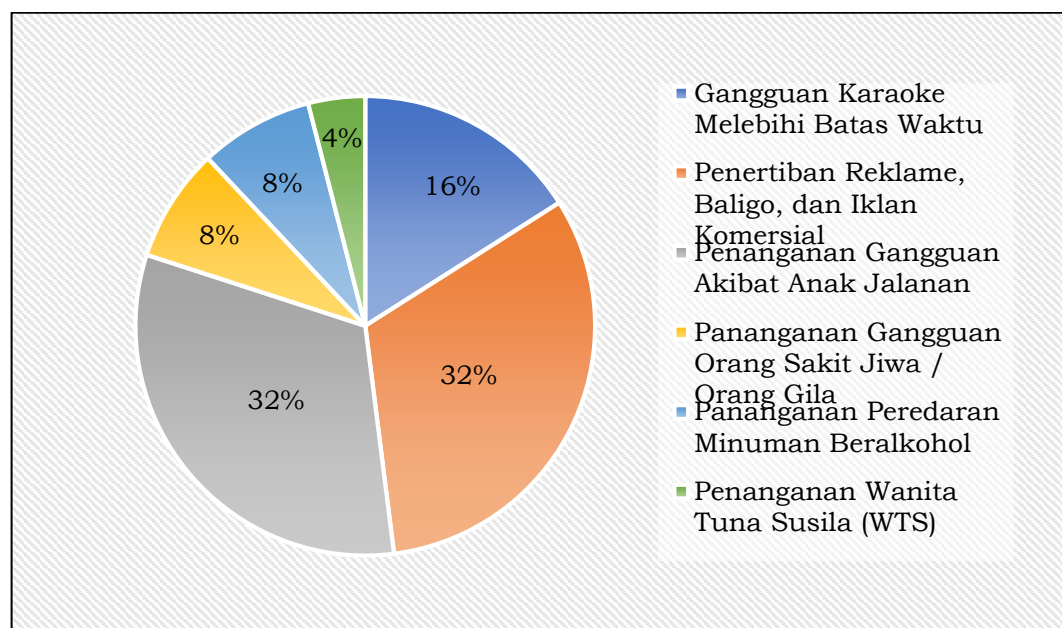
Jenis Pelayanan Dasar SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

**a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum**

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Pemerintah

memberikan pelayanan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum. Tingkat gangguan tibumtranmas di Kabupaten Sumedang meliputi kejadian kebakaran, konflik sosial, penyakit masyarakat dan dukungan bencana lainnya yang masih relative tinggi. Beberapa jenis gangguan yang sering ditemukan di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.49**  
**Jenis Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2022**



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (2023)

Jumlah gangguan yang terjadi sepanjang Tahun 2022 didominasi oleh gangguan akibat anak jalanan dan penertiban reklame, baligo dan iklan komersial sebesar 32 persen. Anak jalanan menjadi permasalahan sosial terutama di kota besar yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Keberadaan anak jalanan salah satunya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan penyimpangan kepribadian. Dampak dari keberadaan anak jalanan juga berpengaruh negative, diantaranya merusak pemandangan dan keindahan kota, masalah kebersihan dan mengganggu stabilitas keamanan serta kenyamanan masyarakat.

**b. Pelayanan informasi rawan bencana**

Pelayanan informasi rawan bencana merupakan pelayanan informasi tentang bagian wilayah yang rawan bencana secara terperinci berbasis kajian resiko bencana serta wilayah yang

berpotensi terpapar bencana. Jenis informasi rawan bencana dapat berupa sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana. Berikut adalah data pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Sumedang selama Tahun 2021-2022.

**Tabel 2.22**  
**Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Sumedang**

| No | Jenis Pelayanan                           | Tahun   |         |
|----|-------------------------------------------|---------|---------|
|    |                                           | 2021    | 2022    |
| 1  | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (orang) | 691.534 | 715.525 |

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (2023)*

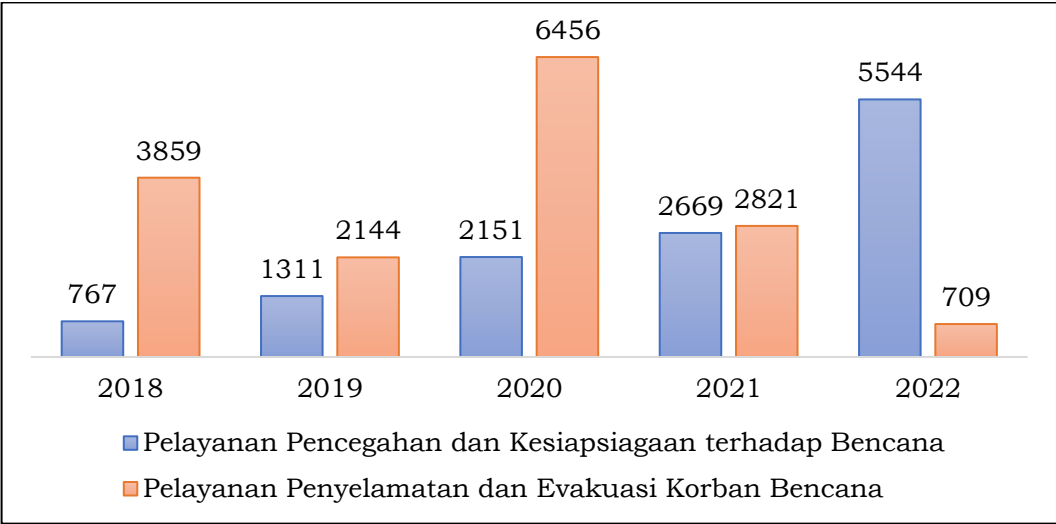
Pada tahun 2021 di Kabupaten Sumedang sudah terbentuk layanan informasi rawan bencana. Layanan tersebut berupa informasi terkait perubahan iklim, titik lokasi rawan bencana dan layanan pengaduan dan laporan ke tingkat kabupaten. Diawal tahun pembentukan informasi rawan bencana sudah tersampaikan kepada 691.634 orang, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 23.991 orang menjadi 715.525 orang yang dilakukan sosialisasi dan media sosial. Kenaikan ini dikarenakan pada tahun 2022, terjadi 140 kejadian bencana di Kabupaten Sumedang seperti longsor dan pergerakan tanah, banjir dan banjir bandang, pohon tumbang, angin puting beliung dan kebakaran hutan, sehingga untuk mengantisipasi kecajian bencana dilakukan sosialisasi informasi rawan bencana terutama di daerah-daerah yang berpotensi bencana, sehingga juga informasi kebencanaan dilakukan melalui media sosial sehingga dapat menjangkau semua jenis usia terutama usia produktif yang aktif menggunakan media sosial.

**c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapan Terhadap Bencana merupakan kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim sedangkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana merupakan tindakan setelah adanya kejadian bencana. Pada Tahun 2021, Pelayanan pencegahan dan kesiapan terhadap bencana mencapai 2.661 orang, sedangkan Tahun 2022 naik menjadi 5.544

orang. Pelayanan tersebut dilakukan dengan memberikan edukasi kebencanaan, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah rawan dan potensi bencana dapat memitigasi kejadian bencana lebih awal terlebih pada tahun 2022 banyak kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Lain halnya dengan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang mengalami penurunan menjadi 709 orang pada Tahun 2022. Hal tersebut berkesinambungan dengan pelayanan pencegahan dan kesiapan terhadap bencana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pembenahan fisik di daerah-daerah rawan dan berpotensi bencana, maka tindakan evakuasi korban bencana pun dapat diminimalisir, seperti yang tergambar pada gambar berikut.

**Gambar 2.50**  
**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (orang) Tahun 2018-2022**

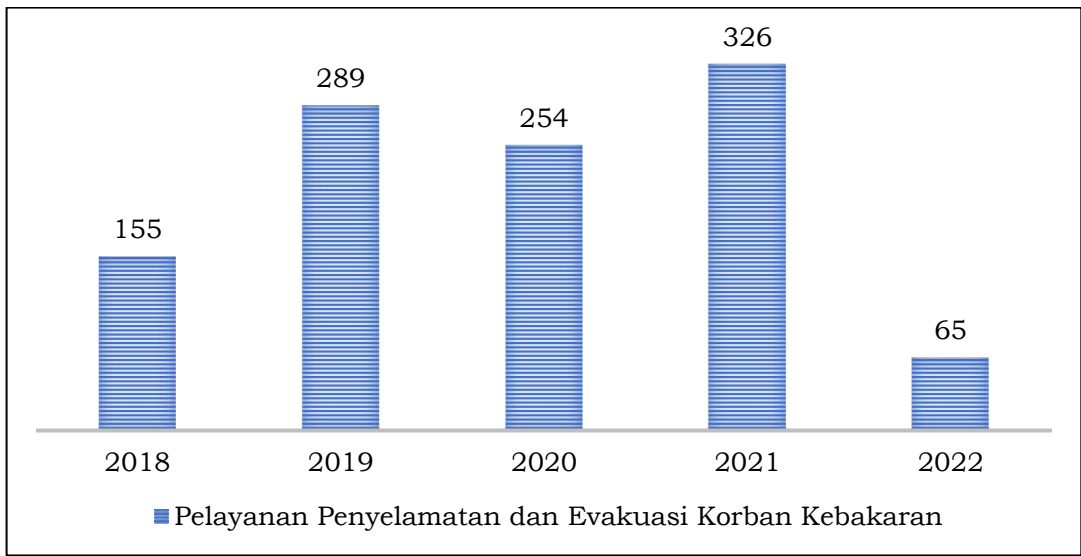


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (2023)

**d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan salah satu jenis SPM yang termasuk ke dalam bidang tantribumlinmas. Berkembangnya Kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang saat ini belum sepenuhnya patuh dan taat terhadap implementasi aturan yang berlaku terutama terkait dengan pencegahan penanggulangan kebakaran. Adapun pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.51**  
**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (2023)

Berdasarkan gambar diatas, jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran sebanyak 65 layanan dari total jumlah kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sumedang sebanyak 88 kejadian, atau sekitar 73,86% kejadian kebakaran yang dapat ditangani. Ketimpangan antara jumlah kejadian kebakaran dengan jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dikarenakan terbatasnya jumlah mobil pemadam kebakaran. Bahkan tidak semua wilayah/kecamatan yang difasilitasi atau disediakan mobil pemadam, sehingga jarak jangkauan tim pemadam pun akan berdampak terhadap jumlah kejadian kebakaran yang tertangani.

Adapun capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang Tahun 2021–2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.23**  
**Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan**  
**Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2021-2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar/Indikator                                                           | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Perangkat Daerah                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|--------------------------------------------|
|    |                                                                                           | Target     | Capaian | Target     | Capaian |                                            |
| 1. | <b>Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>                                         | 100%       | 100%    | 100%       | 90%     | <b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>          |
| 2. | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>                                                  |            |         |            |         | <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b> |
|    | Jumlah Yang Harus Dilayani                                                                | 100%       | 100%    | 100%       | 96%     |                                            |
| 3. | <b>Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                            |            |         |            |         |                                            |
|    | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    |                                            |
| 4. | <b>Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana</b>                                 |            |         |            |         |                                            |
|    | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana      | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    |                                            |
| 5. | <b>Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>                               |            |         |            |         | <b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>          |

| No | Jenis Pelayanan Dasar/Indikator                                                                                                           | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Perangkat Daerah |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------------|
|    |                                                                                                                                           | Target     | Capaian | Target     | Capaian |                  |
|    | Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja                                                       | 100%       | 84,16%  | 100%       | 84,16%  |                  |
|    | Jumlah Layanan Pemadaman Yang Dilakukan Oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, Dan Atau Kebakaran Dan Penyelamatan / Perangkat Daerah | 100%       | 6,63%   | 100%       | 6,63%   |                  |

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2022

**2.3.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial**

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial berdasarkan permendagri Nomor 69 Tahun 2012 terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Realisasi Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial dapat dilihat pada Tabel 2.24 di bawah ini:



Tabel 2.24  
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial (Orang)  
Tahun 2018-2022

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                | Tahun |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Penanganan penyandang disabilitas terlantar          | 962   | 1053  | 993   | 442   | 782   |
| 2  | Penanganan anak terlantar                            | 376   | 83    | 83    | 407   | 317   |
| 3  | Penanganan lanjut usia terlantar                     | 530   | 3.729 | 3.729 | 874   | 736   |
| 4  | Penanganan gelandang dan pengemis                    | -     | -     | 13    | 7     | 8     |
| 5  | Penanganan Korban Bencana Kewenangan Daerah Kab/Kota | 977   | 2.253 | 2.253 | 1.053 | 5.283 |

Sumber : Dinas Sosial (2023)

Sedangkan capaian SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada Tabel 2.24 di bawah ini:

Tabel 2.25  
Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021-2022

| No | Jenis Pelayanan Dasar/Indikator                                                 | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Perangkat Daerah                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 | Target     | Capaian | Target     | Capaian |                                                                   |
| 1. | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti</b> |            |         |            |         | <b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b> |
|    | Persentase Penyandang Disabilitas Yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar  | 100%       | 18.30 % | 100%       | 95,53%  |                                                                   |
| 2. | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti</b>                   |            |         |            |         |                                                                   |

| No | Jenis Pelayanan Dasar/Indikator                                                                                                | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Perangkat Daerah |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------------|
|    |                                                                                                                                | Target     | Capaian | Target     | Capaian |                  |
|    | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                                    | 100%       | 51.65%  | 100%       | 98,04%  |                  |
| 3. | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti</b>                                                           |            |         |            |         |                  |
|    | Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                             | 100%       | 9.6%    | 100%       | 97,81%  |                  |
| 4. | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti</b>                                  |            |         |            |         |                  |
|    | Persentase Tuna Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                                       | 100%       | 83.33%  | 100%       | 100%    |                  |
| 5. | <b>Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota</b> |            |         |            |         |                  |
|    | Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana      | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    |                  |

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2023

**2.4. Aspek Pelayanan Umum**

Pada tahun 2021 terjadi Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Hal tersebut mempengaruhi fokus urusan-urusan Pemerintahan Daerah.

**2.4.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

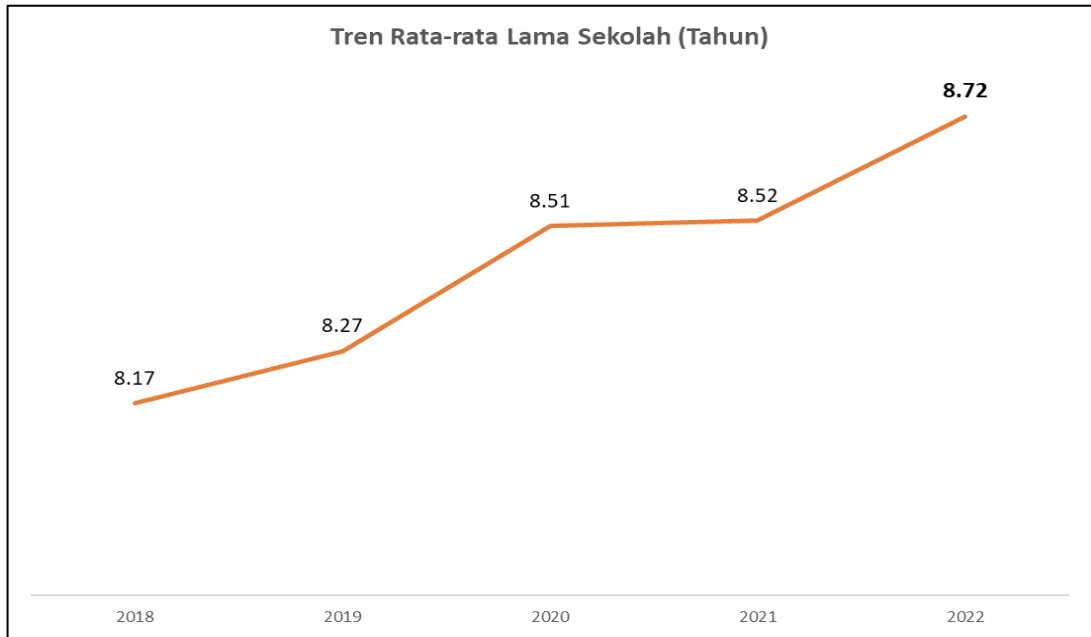
**2.4.1.1. Urusan Pendidikan**

Urusan pendidikan memiliki beberapa aspek yang merupakan fokus urusan wajib pelayanan dasar Kabupaten. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan salah satunya adalah menangani pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Berikut adalah beberapa indikator penentu dalam urusan pendidikan.

**1) Rata-rata Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sumedang mempunyai tren positif setiap tahunnya. Meski sempat melambat capaian di 2021, namun dapat kembali tumbuh lebih cepat pada tahun 2022 seperti disajikan pada Gambar berikut.

**Gambar 2.52**  
**Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – Tahun 2022**



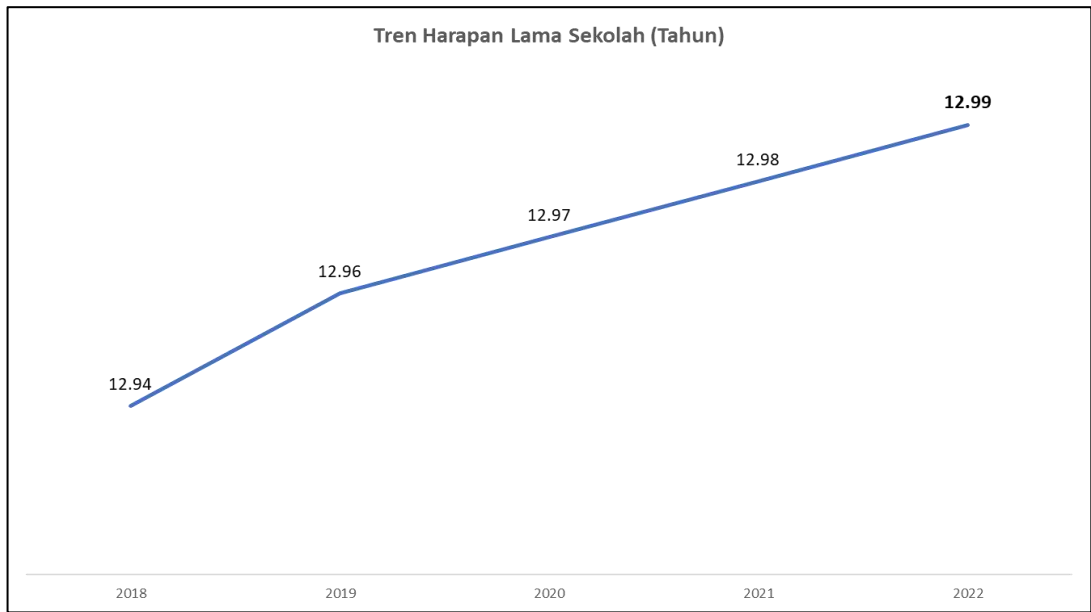
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Faktor pendukung naiknya angka rata-rata lama sekolah antara lain tenaga pendidik yang adaptif terhadap perubahan metode pembelajaran, penyediaan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan, penyediaan wifi gratis, dan tingginya partisipasi orangtua dalam pendampingan proses pembelajaran.

**2) Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sumedang juga mengalami peningkatan namun tumbuh sangat lambat, hanya meningkat 0,01 tahun setiap tahun sejak 2019. Berikut adalah Gambar HLS Kabupaten Sumedang, Tahun 2018-2022.

**Gambar 2.53**  
**Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018 – 2022**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Faktor pendukung naiknya angka harapan lama sekolah antara lain meningkatnya akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan walaupun belum signifikan.

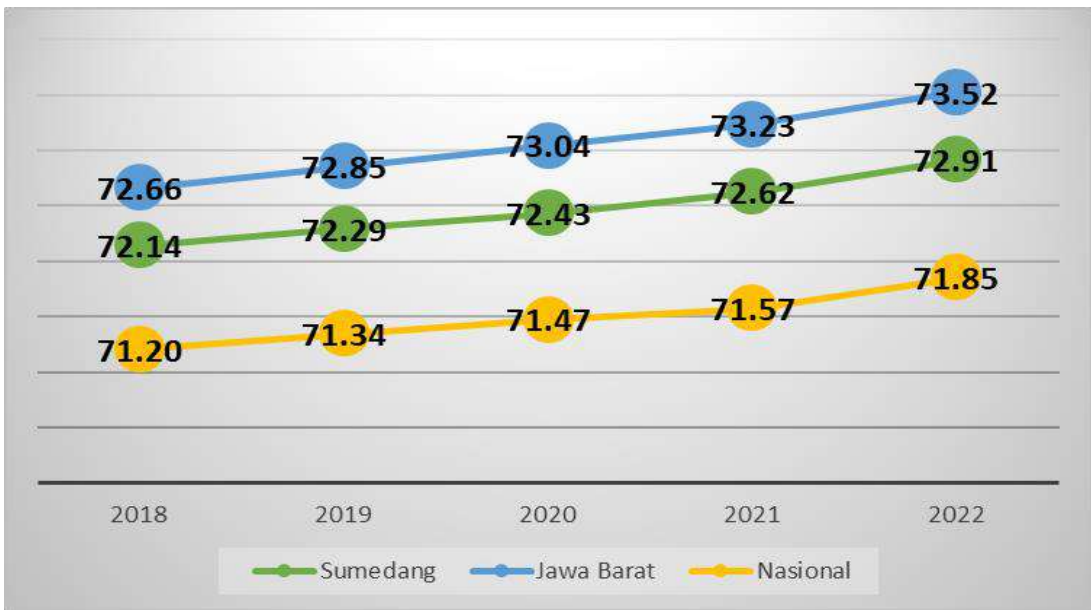
**2.4.1.2. Urusan Kesehatan**

Urusan kesehatan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan dalam pemerintahan. Beberapa indikator yang menunjang sasaran Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, adalah sebagai berikut:

**1) Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah. AHH Kabupaten Sumedang terus mengalami kenaikan seperti yang tersaji pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 2.54**  
**Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Indonesia (2023) (diolah)

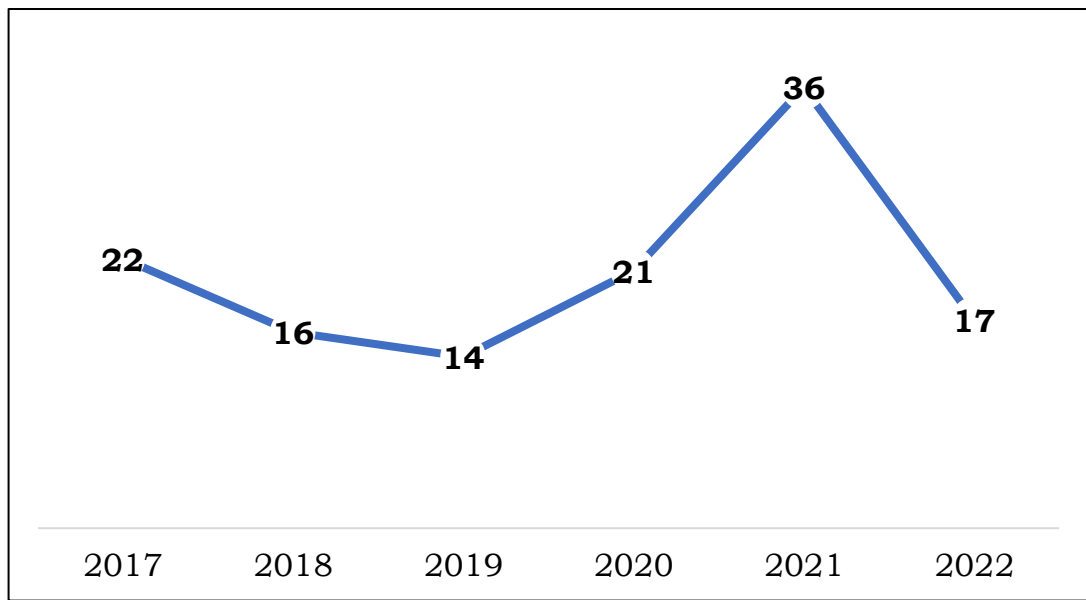
Berdasarkan Gambar di atas dapat diketahui bahwa AHH Kabupaten Sumedang menunjukkan tren positif. Bahkan Tahun 2022 AHH Kabupaten Sumedang mencapai 72,91 tahun dengan capaian lebih tinggi dari AHH Nasional yaitu 71,85 tahun meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Jawa Barat sebesar 73,52 tahun. Kenaikan AHH ini dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Dengan semakin tingginya AHH di Kabupaten Sumedang menandakan adanya keberhasilan dari beberapa program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Sumedang.

**2) Jumlah Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI masih merupakan masalah tertinggi kesehatan di Indonesia dan tingginya AKI

mencerminkan kualitas akan pelayanan kesehatan. Pendataan mengenai AKI sangat bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas resiko tinggi.

**Gambar 2.55**  
**Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2017-2022**



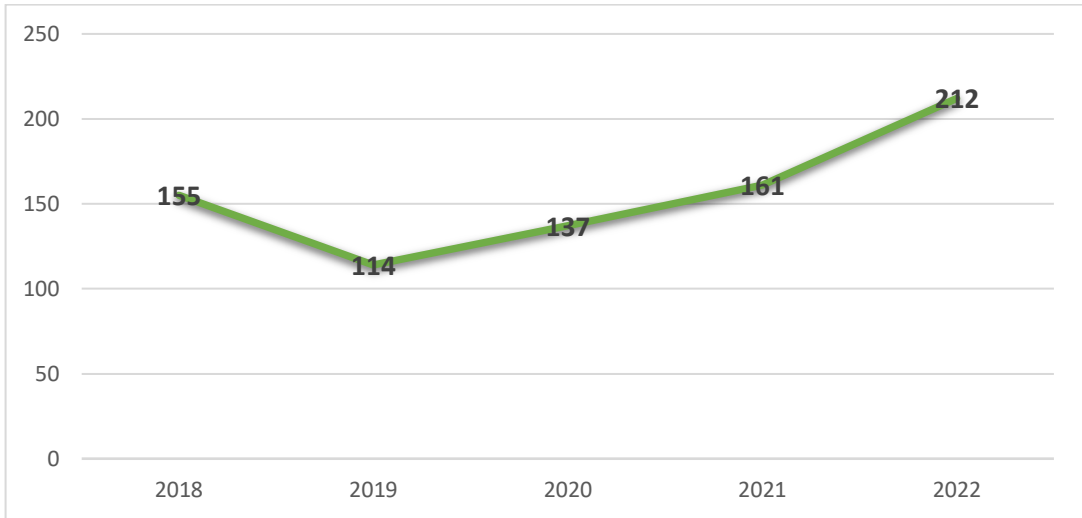
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023) (diolah)

Berdasarkan Gambar di atas, trend kematian ibu di Kabupaten Sumedang pada mulanya mengalami penurunan. Namun sejak terjadi pandemic Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 terjadi peningkatan jumlah Kematian Ibu yang cukup tinggi. Namun menurun pada angka 17 pada Tahun 2022.

**3. Jumlah Kematian Bayi**

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tren rasio kematian bayi sangat fluktuatif. Tahun 2022 merupakan realisasi tertinggi jumlah kematian bayi di Kabupaten Sumedang yaitu sebanyak 212 jiwa Tren Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 disajikan dalam Gambar berikut.

**Gambar 2.56**  
**Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023) (diolah)

**4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Sesuai Standar**

Fasilitas Kesehatan (Faskes) merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Faskes terbagi menjadi tingkat 1, 2 dan 3 dapat diartikan sebagai jenis tingkatan pelayanan kesehatan yang dihadirkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Fungsi Faskes yaitu sebagai tempat perawatan kesehatan membuat fasilitas publik yang satu ini sangat penting keberadaannya di setiap wilayah.

Faskes tingkat pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. FKTP meliputi puskesmas atau yang setara, praktek dokter, praktek dokter gigi, klinik pratama atau yang setara, dan Rumah Sakit kelas D atau yang setara. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu serta merata dan non diskriminatif. Sehingga setiap pasien dapat memperoleh pelayanan kesehatan efektif serta lebih mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. Berikut adalah Fasilitas Kesehatan.



**Tabel 2.26**  
**Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| Fasilitas Kesehatan                | Jumlah |
|------------------------------------|--------|
| Rumah Sakit Umum                   | 3      |
| Puskesmas Rawat Inap               | 17     |
| Puskesmas Non Rawat Inap           | 18     |
| Puskesmas Pembantu                 | 66     |
| Klinik Pratama                     | 74     |
| Klinik Utama                       | 9      |
| Tempat Praktik Mandiri Dokter      | 91     |
| Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi | 27     |

Sumber : Dinas Kesehatan (2023)

Jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2016-2021 berjumlah 35 puskesmas. Hal ini menggambarkan bahwa dari 26 kecamatan seluruhnya telah memiliki fasilitas puskesmas. Adapun kecamatan yang memiliki puskesmas lebih dari satu yakni Kecamatan Jatinangor (2 puskesmas), Cimanggung (2 puskesmas), Pamulihan (2 puskesmas), Tanjungsari (2 puskesmas), Sumedang Selatan (2 puskesmas), Sumedang Utara (3 puskesmas), Tanjungkerta (2 puskesmas), dan Buahdua (2 puskesmas). Berdasarkan SPM Kemenkes rasio puskesmas adalah 1:10.000 atau dengan kata lain satu puskesmas diperuntukan melayani 10.000 penduduk. Melihat hal tersebut maka jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang masih sangat kurang. Untuk membantu pelayanan kesehatan Kabupaten Sumedang memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu).

Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas, selain itu juga Pustu merupakan bagian integral Puskesmas yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas, dan bertujuan untuk meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Meskipun demikian, untuk optimalisasi kualitas pelayanan perlu ada peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan atau pembangunan Puskesmas/Pustu atau meningkatkan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas.

**5. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan Memenuhi Standar**

Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan. Tenaga Kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi: 1) Tenaga Medis; 2)Psikologi klinis; 3) Keperawatan; 4) Kebidanan (Bidan); 5) Kefarmasian (Apoteker, tenaga teknis kefarmasian); 6) Tenaga Kesehatan Masyarakat; 7) Kesehatan Lingkungan; 8) Gizi (Nutrisionis dan Dietisien); 8) Keterampilan Fisik (Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapi Wicara, Akupuntur); 9) Keteknisan Medis; 10) Biomedika (Radiografer, Elektromedis, Radioterapis, Ortitik Prostetik, ahli laboratorium Medik, dan Fisikawan Medik. Sedangkan Asisten Tenaga Kesehatan meliputi 1) Asisten Perawat; 2) Asisten Tenaga Kefarmasian; 3) Asisten Dental; 4) Asisten teknisi Laboratorium Medik; dan 5) Asisten Teknisi Pelayanan Darah.

Tenaga kesehatan merupakan pokok dari subsistem SDM kesehatan, yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu juga banyaknya tenaga kesehatan yang pensiun dan terbatasnya kuota pengangkatan PNS dan PPPK Bidang kesehatan. Berikut adalah Data Tenaga Kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.27**  
**Tenaga Kesehatan Tahun 2022**

| No | Tenaga Kesehatan   | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1. | Dokter             | 136    |
| 2. | Dokter Spesialis   | 85     |
| 3. | Dokter Gigi        | 221    |
| 4. | Tenaga Keperawatan | 940    |
| 5. | Tenaga Kebidanan   | 758    |

Sumber : Dinas Kesehatan (2023)

6. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Faskes Tingkat 2 (dua) atau Faskes Tingkat Lanjutan (FKRTL) merupakan Faskes yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik/subspesialisistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pelaksanaan sistem rujukan di Indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga, yang dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri namun berada di suatu sistem dan saling berhubungan.

Rujukan merupakan proses yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan terutama untuk daerah dengan keterbatasan fasilitas. Dengan proses rujukan yang baik pasien bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas serta komprehensif. Di Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan mewakili 35 Puskesmas membuat perjanjian kerja sama untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan program rujuk balik dengan Rumah Sakit. Jumlah Rumah Sakit Umum di Kabupaten Sumedang berjumlah 3 (tiga), yaitu RSUD Sumedang, RSUD Pakuwon dan RSUD Harapan Keluarga.

Menurut WHO idealnya suatu negara memiliki 1 (satu) tempat tidur Rumah Sakit untuk setiap 1.000 penduduk atau dengan kata lain memiliki *ed to population ratio* 1:1.000. Dengan demikian indikator dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tersebut. Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Kabupaten Sumedang Tahun 2022 disajikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.28**  
**Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2022**

| No  | Nama Rumah Sakit     | Jumlah Tempat Tidur |
|-----|----------------------|---------------------|
| (1) | (2)                  | (3)                 |
| 1   | RSUD Sumedang        | 352                 |
| 2   | RSU Pakuwon          | 117                 |
| 3   | RSU Harapan Keluarga | 50                  |

Sumber : Dinas Kesehatan (2023)

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa total dari jumlah tempat tidur dari ketiga RSUD adalah 519 buah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumedang saat ini maka kebutuhan tempat tidur di RSUD sekitar 646 tempat tidur.

#### **2.4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

##### **1) Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap**

Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 sepanjang 774,606 km. Namun dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1350-Rek/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor 2 (JKP-2), Jalan Kolektor 3 (JKP-3), Jalan Kolektor 4 (JKP-4), Jalan Lokal (JLP), Jalan Lingkungan (JLingP) dan Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAS), Jalan Kolektor (JKS), Jalan Lokal (JLS) dan Jalan Lingkungan (JLingS), maka ada penurunan status fungsi menjadi jalan lingkungan sebanyak 10 ruas jalan sepanjang 7,238 km yaitu:

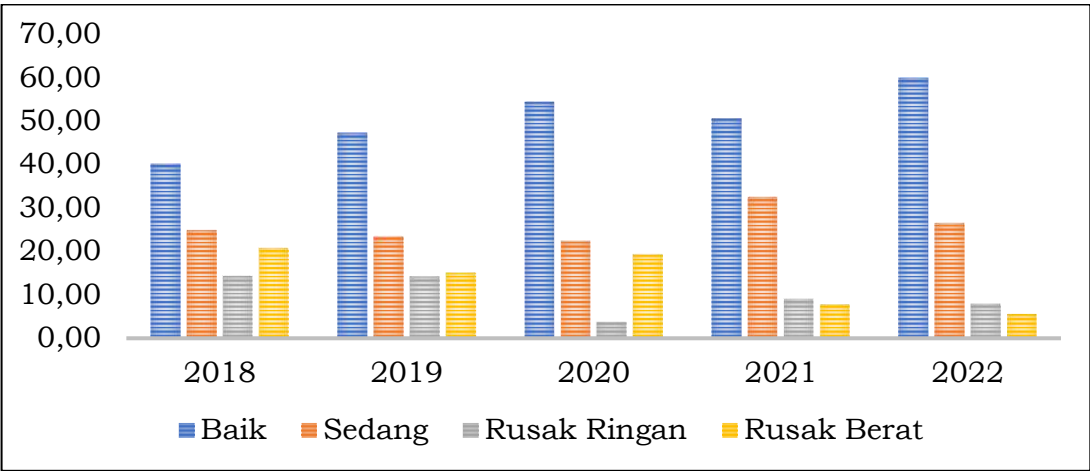
1. Ruas jalan Mesjid 0,100 km;
2. Ruas jalan Pendopo 0,123 km;
3. Ruas jalan Terminal Ketib 0,157 km;
4. Ruas jalan Talun Pojok 0,458 m;
5. Ruas jalan Mekarsari 0,750 m;
6. Ruas jalan Komplek Persekolahan Licin 1,100 Km;
7. Ruas jalan Komplek Workshop 0,700 m;
8. Ruas jalan Komplek Prabu Kian Santang 1,500 Km;
9. Ruas jalan Joglo-Paseh 1,500 Km; dan
10. Ruas jalan Komp Puskopad 0,850 Km.

Akan tetapi dengan adanya Keputusan Gubernur tersebut terdapat penambahan ruas jalan sepanjang 7,000 Km dengan lokasi sebagai berikut:

1. Ruas Jalan Citengah - Cigumentang/Sindangwangi (Batas Kabupaten Bandung), 5,000 km;
2. Ruas Jalan Wado - Cikareo 0,500 km; dan
3. Ruas Jalan Jalan Cikawung - Darmaraja 1,500 km.

Sehingga panjang jalan kabupaten semula 774,606 km menjadi 774,368 km. Berdasarkan kondisinya dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi berat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

**Gambar 2.57**  
**Kondisi Jalan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**

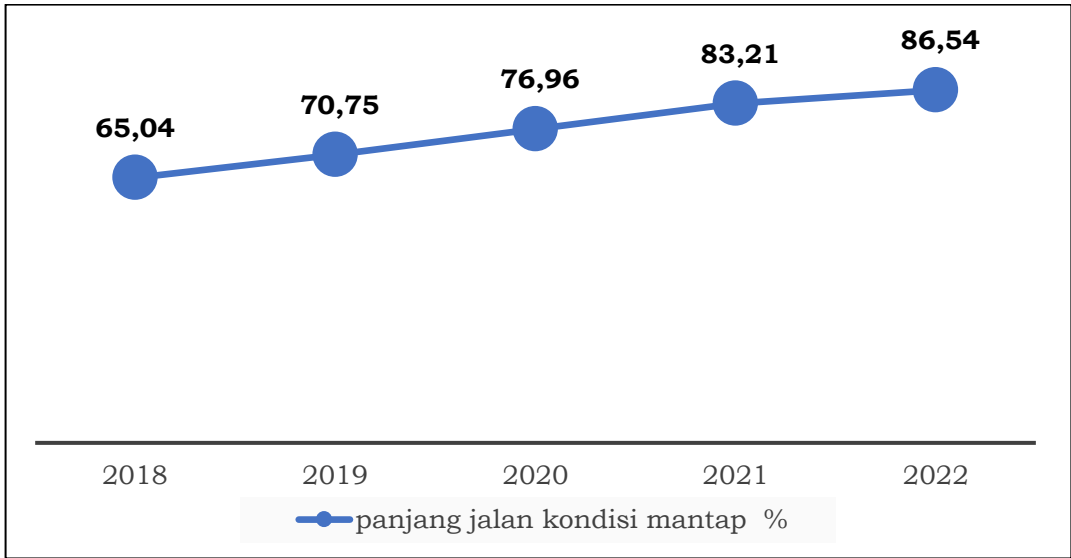


Sumber : Dinas PUPR Kab Sumedang (2023)

Kondisi jalan mantap dapat diartikan sebagai kondisi ruas jalan dengan kualitas fisik dan layanan jalan yang dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan, dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan  $\leq 6\%$ ), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Tentunya walaupun kondisi sedang masuk pada kriteria teknis yang memenuhi syarat untuk dikatakan jaringan jalan dalam kondisi mantap karena masih bisa dilalui dengan kecepatan  $>40$  Km/Jam.

Jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan pada setiap tahun dan pada tahun 2022 mencapai 86,54% atau 670.138 km. Upaya perbaikan infrastruktur jalan ini sebagai salah satu bentuk peningkatan penunjang perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumedang serta dapat dilihat pada Gambar 2.58 di bawah ini:

**Gambar 2.58**  
**Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas PUPR Kab Sumedang (2023)

**2) Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi dan Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik.**

Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan infrastruktur irigasi. Tiga pilar pengelolaan sumber daya air meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Komponen utama jaringan irigasi meliputi bangunan, saluran pembawa, saluran pembuang serta petak yang diairi. Dengan adanya system irigasi dapat mempermudah petani dalam penggunaan air serta meningkatkan produktivitas hasil produksi padi, dikarenakan salah satu tujuan dari irigasi adalah untuk menambah air di lahan pertanian dan mencukupi kebutuhan air saat tidak turun hujan, selain itu juga fungsi lain dari irigasi adalah sebagai penunjang usaha pertanian, pengatur suhu tanah dan meningkatkan kualitas air.

Kondisi cakupan irigasi di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.29**  
**Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam**  
**Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**

| No | Indikator                                           | Tahun      |            |            |            |            |
|----|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| 1  | Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) | 41,15      | 43,08      | 44,10      | 45,2       | 46,6       |
| a  | Luas Irigasi Kondisi Baik (Ha)                      | 23.452     | 24.552,6   | 19.692,17  | 20,122,17  | 20.633,4   |
| b  | Luas Irigasi Kabupaten (Ha)                         | 56.993     | 56.993     | 56.993     | 30.069     | 30.069     |
| 2  | Rasio Jaringan Irigasi (Rasio)                      | 4,33       | 4,53       | 30,81      | 31,98      | n/a        |
| a  | Panjang Saluran Irigasi yang Baik (m)               | 135.941,96 | 142.321,61 | 926.569,33 | 961.589,67 | 991.373,43 |
| b  | Luas Lahan Budidaya Pertanian (ha)                  | 31.417     | 31.417     | 31.417     | 30.069     | 30.069     |

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2023)*

Persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 tercatat 41,15%, kemudian selama lima tahun meningkat menjadi 46,6% di Tahun 2022. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan kuantitas irigasi di Kabupaten Sumedang semakin membaik. Meskipun secara tren meningkat namun angka realisasi masih dibawah 50%, sehingga perlu terus diupayakan agar persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dalam upaya menunjang produktivitas pertanian

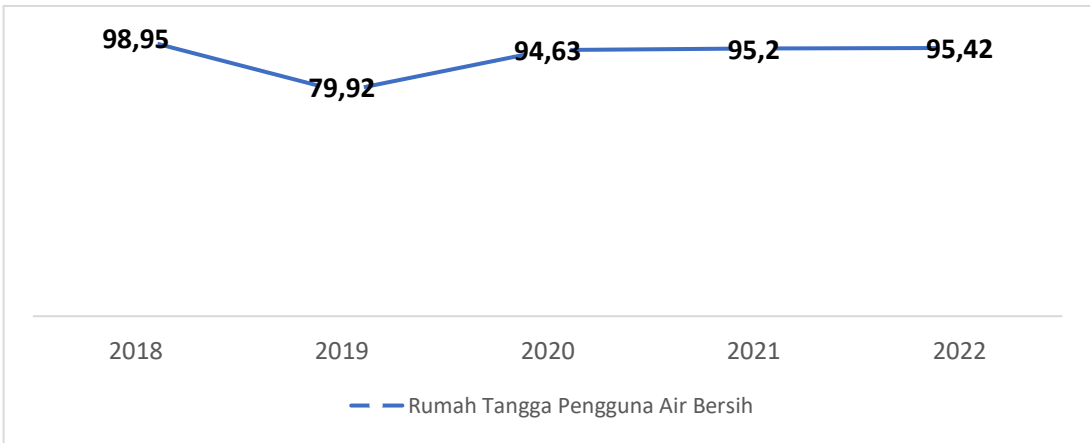


3) **Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Ketersediaan sumber air bersih di Kabupaten Sumedang telah sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Berdasarkan gambar di bawah, jumlah rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Dan pada Tahun 2022 jumlah rumah tangga yang mempunyai akses air bersih mencapai 95,42 persen, meskipun masih berada di bawah target nasional yakni 100 persen.

Peningkatan persentase rumah tangga yang mempunyai akses air bersih dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air minum (Pamsimas, Dana APBD, Banprov dan DAK) serta pembangunan infrastruktur sanitasi dalam upaya meminimalisir air limbah domestik masyarakat dikarenakan masih ada masyarakat yang menggunakan air tanah sebagai sumber air bersihnya dengan tingkat resiko cemaran yang tinggi sampai amat tinggi, selain itu juga penggalakan penerapan PHBS di masyarakat terus dilakukan.

**Gambar 2.59**  
**Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas PUPR Kab Sumedang (2023)

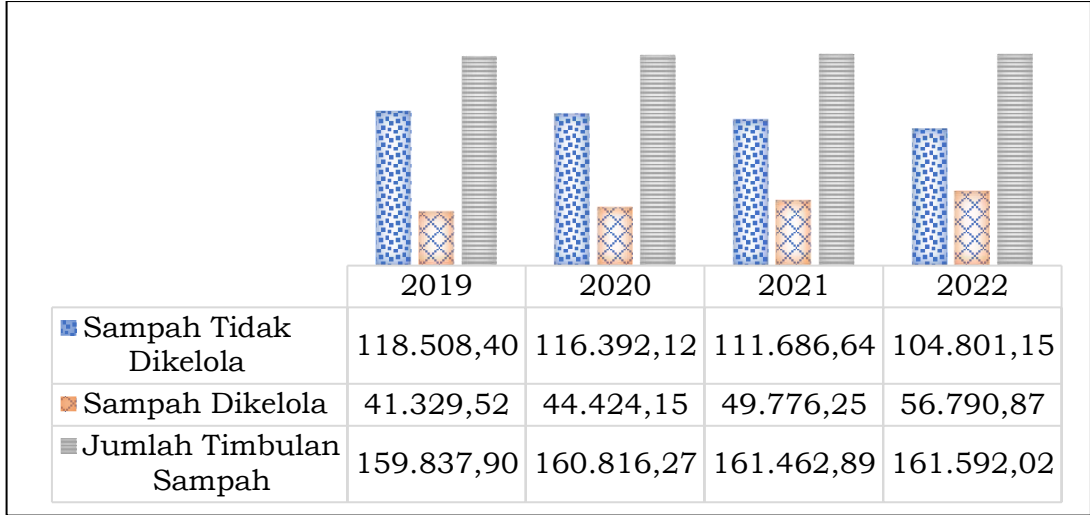
4) **Persampahan**

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat digolongkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Untuk mengurangi timbunan sampah di

masyarakat maka diperlukan usaha untuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah yang ditujukan untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau estetika.

Metode pengelolaan sampah yang banyak digunakan di Indonesia melalui metode open dumping dan landfill, namun ada juga metode lain seperti pembuatan kompos, pembakaran, pemilahan dan daur ulang meskipun tidak banyak digunakan. Berikut adalah data Jumlah Timbulan Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah Tidak Terkelola di Kabupaten Sumedang.

**Gambar 2.60**  
**Jumlah Timbulan Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah Tidak Terkelola Tahun 2019-2022 (Ton)**



Sumber : Dinas DLHK Kab Sumedang (2023)

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Factor yang mempengaruhi timbulan sampah adalah jumlah penduduk, system pengumpulan/pembuangan sampah, jenis sampah dan kebiasaan masyarakat. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di II-101amper seluruh wilayah Sumedang, yang jika tidak dikelola akan berdampak negative bagi masyarakatnya, salah satunya ialah menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air dan udara.

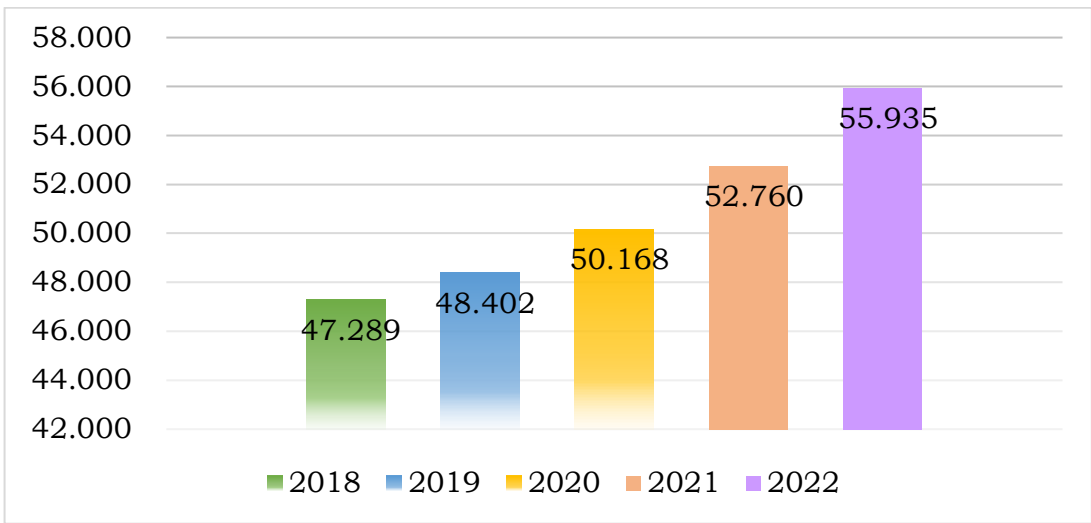
Namun, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan pengelolaan sampah, sehingga jumlah sampah yang dikelola menunjukkan tren positif. Pada tahun 2022 jumlah sampah yang dikelola mencapai 56.790,87 ton atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7.014,62 ton. Pengelolaan sampah ini dilakukan melalui metode pengurangan sampah (pendaur ulangan sampah) dan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir. Meskipun demikian Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang masih belum terlaksana secara optimal, karena jumlah sampah yang tidak dikelola masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang terkelola.

**2.4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

**1) Rumah Tidak Layak Huni**

Rumah Tidak Layak Huni yang telah diperbaiki sampai dengan Tahun 2022 mencapai 55.935 unit atau 93,22% dari target sebanyak 60.000 unit, secara capaian target cukup baik namun masih perlu penanganan lebih lanjut karena data untuk rumah tidak layak huni secara keseluruhan masih perlu pendataan lebih lanjut. Untuk Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dapat dilihat pada Gambar 2.61 di bawah ini.

**Gambar 2.61**  
**Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki di Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)

2) **Backlog Rumah**

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masih menjadi salah satu masalah di Indonesia. Hal ini pun diperparah dengan semakin tingginya harga properti akibat lahan yang sempit di daerah perkotaan yang masih menjadi tempat utama masyarakat mencari nafkah. Selain itu juga tingginya tingkat urbanisasi menjadi ancaman ekonomi bisa tetap tumbuh secara berkelanjutan, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.

*Backlog* rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik Nasional maupun Daerah yang terkait bidang perumahan. Tujuannya adalah untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia masih menghadapi permasalahan kesenjangan antara ketersediaan rumah dengan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. Perhitungan *backlog* rumah diperoleh dari jumlah keluarga eksisting dikurangi dengan jumlah rumah eksisting. Apabila ada selisih, maka keluarga tersebut belum memperoleh rumah dan masuk kedalam kategori *backlog*. Begitu pula di Kabupaten Sumedang, pendataan *backlog* rumah dilakukan pada Tahun 2020 dengan hasil analisis sebagai berikut.

**Tabel 2.30**  
**Jumlah Backlog Rumah Kabupaten Sumedang Tahun 2020**

| Kabupaten | Jumlah Rumah Tangga (unit) | Jumlah Backlog (unit) |
|-----------|----------------------------|-----------------------|
| Sumedang  | 292.088                    | 51.580                |

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Sumedang, 2020

Analisis *backlog* rumah di Kabupaten Sumedang dilakukan melalui survei dalam kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang terakhir dilakukan pada Tahun 2020 dan akan dilaksanakan Kembali pada Tahun 2023.

3) **Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Adapun jenis PSU yang harus tersedia sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Prasarana perumahan dan permukiman meliputi : jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan pembuangan air hujan (drainase) dan tempat pembuangan sampah.
- b. Sarana perumahan dan permukiman meliputi ; sarana perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana Pendidikan, Kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau serta sarana parkir
- c. Utilitas perumahan dan permukiman meliputi : jaringan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran dan sarana penerangan jasa umum.

Pada Tahun 2023, total pengajuan perumahan dan perumahan baru di Kabupaten Sumedang berjumlah 320 perumahan akan tetapi yang baru diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah berjumlah 39 perumahan, dengan demikian oleh Pemerintah Daerah hanya memberikan PSU kepada perumahan yang telah diserahterimakan.

#### **4) Kawasan Kumuh**

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Permukiman kumuh pada umumnya mencakup 3 (tiga) segi yaitu kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi kesehatan dan sumber pencemaran. Kawasan permukiman kumuh merupakan penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman.

Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan

pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Permukiman kumuh di Kabupaten Sumedang semula tersebar hanya di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Cimanggung. Tahun 2017 luas total permukiman kumuh hanya 57,04 Ha (Keputusan Bupati No. 660/Kep.196-CIPTARUM/2016) dan di Tahun 2022 bertambah menjadi 164,69 Ha (Keputusan Bupati Nomor 122 Tahun 20). Penambahan luasan wilayah terjadi karena adanya penambahan lokus permukiman kumuh di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Sumedang Utara. Data luas permukiman kumuh Tahun 2018 dan 2019 masih null karena pada tahun tersebut sedang melakukan kajian mengenai permukiman kumuh dan kajian baru selesai pada awal Tahun 2020 dan tidak ada penambahan luasan sampai dengan tahun 2021. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 31**  
**Luas Kawasan Kumuh (Ha) Tahun 2018-2022**

| Variabel Data      | 2018                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022   |
|--------------------|-----------------------|------|------|------|--------|
| Luas Kawasan Kumuh | Masih dalam pendataan |      |      |      | 169,64 |

*Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)*

**Tabel 2.32**  
**Daftar Kawasan Kumuh Di Kabupaten Sumedang Berdasarkan SK**  
**Kumuh Kabupaten Sumedang Nomor 122 Tahun 2022**

| NO. | NAMA KAWASAN                        | KECAMATAN        | KELURAHAN/DESA | RW                      | LUAS SPOT KUMUH | LUAS TOTAL KUMUH | Kobarasi Penanganan  |
|-----|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1   | Kawasan Karasak                     | JATINANGOR       | CISEMPUR       | RW 04                   | 2,44            |                  |                      |
| 2   | Kawasan Cisempur-Cibungur-Cipajaran | JATINANGOR       | CISEMPUR       | RW 09 & 05              | 5,00            | 18,70            | Pemerintah Pusat     |
|     |                                     | JATINANGOR       | CINTAMULYA     | RW 05, 06, 07 & 08      | 13,70           |                  |                      |
| 3   | Kawasan Mandalangu                  | JATINANGOR       | CIPACING       | RW 07 & 08              | 8,55            | 8,55             | Pemerintah Daerah    |
| 4   | Kawasan Dangdeur-Sirmagalih         | JATINANGOR       | MEKARGALIH     | RW 08,09,10,11, 12 & 13 | 16,40           | 16,40            | Pemerintah Pusat     |
| 5   | Kawasan Sayang                      | JATINANGOR       | SAYANG         | RW 01                   | 2,52            |                  | Pemerintah Kabupaten |
| 6   | Kawasan Depok                       | TANJUNGSARI      | JATISARI       | RW 01,02 & 03           | 7,70            | 7,70             | Pemerintah Kabupaten |
| 7   | Kawasan Pamagersari - Mariuk        | TANJUNGSARI      | JATISARI       | RW 07 & 08              | 9,30            | 15,65            | Pemerintah Pusat     |
|     |                                     | TANJUNGSARI      | MARGALLUYU     | RW 02 & 04              | 6,35            |                  |                      |
| 8   | Kawasan Lebak Biru-Pasigaran-Talun  | TANJUNGSARI      | PASIGARAN      | RW 03 & 04              | 4,53            | 13,23            | Pemerintah Provinsi  |
|     |                                     |                  |                | RW 02                   | 8,70            |                  |                      |
| 9   | Kawasan Pagaden                     | TANJUNGSARI      | MARGAJAYA      | RW 01 & 02              | 6,85            | 6,85             | Pemerintah Kabupaten |
| 10  | Kawasan Citulampa                   | TANJUNGSARI      | MARGAJAYA      | RW 16 & 19              | 5,87            | 5,87             | Pemerintah Kabupaten |
| 11  | Kawasan Gordah                      | TANJUNGSARI      | MARGAJAYA      | RW 17                   | 2,78            | 2,78             | Pemerintah Kabupaten |
| 12  | Kawasan Lembang                     | TANJUNGSARI      | GUNUNGMANIK    | RW 11                   | 6,30            | 6,30             | Pemerintah Kabupaten |
| 13  | Kawasan Panday                      | SUMEDANG SELATAN | REGOL WETAN    | RW 01                   | 4,14            | 4,14             | Pemerintah Kabupaten |
| 14  | Kawasan Singaparna                  | SUMEDANG SELATAN | REGOL WETAN    | RW 011                  | 3,21            | 3,21             | Pemerintah Kabupaten |
| 15  | Kawasan Ciraja                      | SUMEDANG SELATAN | MEKARRAHAYU    | RW 05 & 06              | 4,24            | 4,24             | Pemerintah Kabupaten |
| 16  | Kawasan Ciranggon                   | SUMEDANG SELATAN | MEKARRAHAYU    | RW 07                   | 5,87            | 5,87             | Pemerintah Kabupaten |
| 17  | Kawasan Nalegong                    | SUMEDANG SELATAN | KOTAKULON      | RW 10                   | 6,34            | 6,34             | Pemerintah Kabupaten |
| 18  | Kawasan Burujul                     | SUMEDANG SELATAN | KOTAKULON      | RW 16                   | 2,81            | 2,81             | Pemerintah Kabupaten |
| 19  | Kawasan Genteng Pacing-Cibunut      | SUMEDANG SELATAN | CIPAMEUNGPEUK  | RW 10                   | 7,70            | 7,70             | Pemerintah Kabupaten |
| 20  | Kawasan Leles-Kebon Seureuh         | SUMEDANG SELATAN | CIPAMEUNGPEUK  | RW 11                   | 2,83            | 2,83             | Pemerintah Kabupaten |
| 21  | Kawasan Warung Cina II              | CIMANGGUNG       | MANGUNGARGA    | RW 01 & 02              | 4,35            | 4,35             | Pemerintah Kabupaten |
| 22  | Kawasan Legok Cabe                  | CIMANGGUNG       | CIHANJUANG     | RW 09                   | 3,54            | 3,54             | Pemerintah Kabupaten |
| 23  | Kawasan Talun                       | SUMEDANG UTARA   | TALUN          | RW 06                   | 7,59            | 7,59             | Pemerintah Kabupaten |
| 24  | Kawasan Situ                        | SUMEDANG UTARA   | SITU           | RW 09                   | 5,08            | 5,08             | Pemerintah Kabupaten |
|     | JUMLAH                              |                  |                |                         | 164,69          | 164,69           |                      |

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)

**2.4.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

**1) Penegakan Perda**

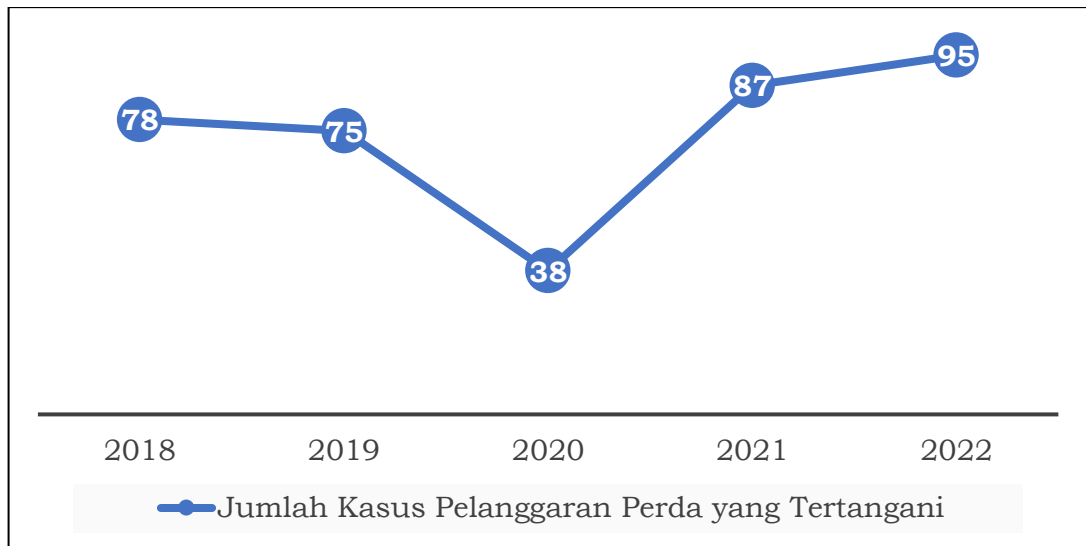
Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Jumlah kasus pelanggaran Perda yang tertangani tren nya menunjukkan ada kenaikan setiap tahunnya terutama sejak tahun 2021 sebanyak 87 kasus yang tertangani lalu Tahun 2022 naik menjadi 95 kasus yang tertangani dan merupakan penanganan kasus terbanyak selama 5 (lima) tahun terakhir. Sosialisasi Perda yang kurang efektif mengakibatkan dangkalnya pemahaman masyarakat akan suatu Perda, yang pada akhirnya berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat.

Jenis pelanggaran Perda yang banyak terjadi di Kabupaten Sumedang meliputi : 1) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Pembangunan bangunan dan Gedung yang belum memiliki izin; 2)



Pengendalian dan pengawasan monitoring pajak; 3) Pelanggaran Perda/Perkada terkait peredaran minuman beralkohol dan WTS; 4) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang harus dilengkapi SPPL (pertambangan, disposal, dll); dan 5) pelanggaran Perda/perkada terkait adanya keramba jarring apung di Kawasan Waduk Jatigede. Jenis pelanggaran yang tertangani terbanyak pada Tahun 2022 ialah Pelanggaran Perda/Perkada terkait peredaran minuman beralkohol dan WTS sebanyak 31 kasus. Jumlah pelanggaran Perda yang tertangani yang digambarkan pada Gambar dibawah ini.

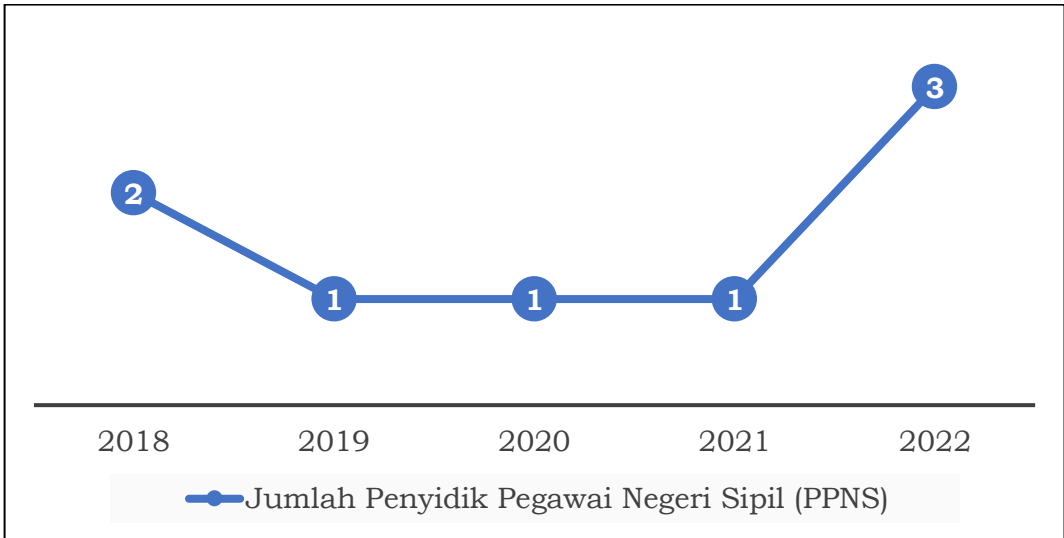
**Gambar 2.62**  
**Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2023)

Dengan tingginya kasus pelanggaran Perda, maka perlu didukung oleh kualitas sumber daya optimal serta sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sumber daya manusia yang maksimal belum dapat dipenuhi dalam sistem perekrutan aparat. Salah satunya ialah minimnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Kabupaten Sumedang yang tergambar pada Gambar di bawah ini.

**Gambar 2.63**  
**Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2023)

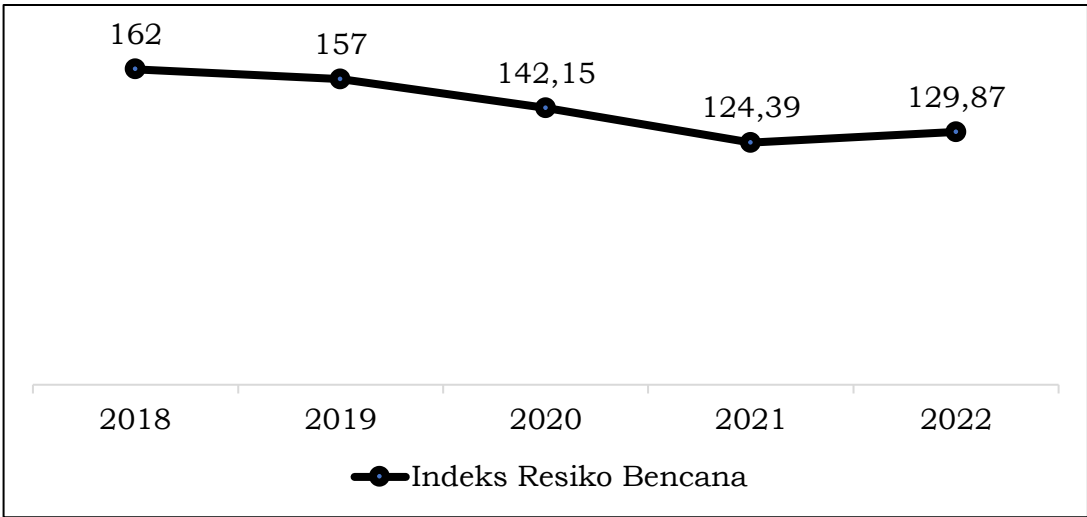
Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan. Tahun 2022 jumlah PPNS di Kabupaten Sumedang mengalami penambahan jumlah menjadi 3 (tiga) orang, dikarenakan adanya anggota Satpol PP Kabupaten Sumedang yang telah memiliki kualifikasi sebagai PPNS.

## 2) Indeks Resiko Bencana

Indeks risiko bencana merupakan perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan Riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Indeks risiko bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor *Hazard*, *Vulnerability*, dan *Capacity*. Dengan demikian, indeks risiko bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.

Dari tahun ke tahun Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sumedang mengalami tren penurunan sehingga pada Tahun 2021 mencapai 124,39 poin, namun pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 129,87 poin, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

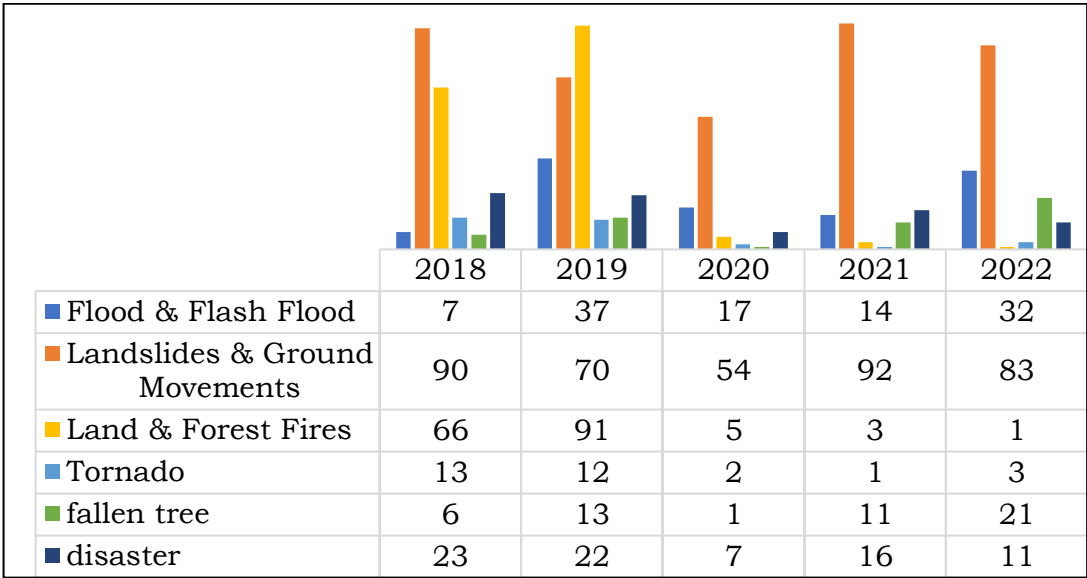
Gambar 2.64  
Indeks Risiko Bencana Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (2023)

Kenaikan ini terjadi dikarenakan banyaknya kejadian bencana di beberapa wilayah Kabupaten Sumedang, yang ditimbulkan oleh faktor alam seperti longsor dan pergerakan tanah, puting beliung, pohon tumbang, banjir dan banjir bandang, kebakaran lahan dan hutan serta musibah. Rekap kejadian bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Gambar 2.65 berikut.

Gambar 2.65  
Intensitas Kejadian Bencana di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.1.6. **Urusan Sosial**

1) **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

Target tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan:

- 1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga melalui bantuan sosial
- 2. meningkatkan produktivitas
- 3. Penyediaan infrastruktur dasar

Menurut BPS Jawa Barat, rasio ketergantungan pada kelompok penduduk miskin adalah 71,61, di mana 100 orang miskin usia produktif harus menanggung beban 71-72 orang yang non produktif.

Selain itu, per bulan Oktober Tahun 2022 terdapat 735.313 orang yang masuk data DTKS. Data tersebut akan menjadi rujukan sasaran penerima program-program pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. Sehingga program-program tersebut tepat sasaran.

**Tabel 2.33**  
**Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Oktober 2022**

| No | Kecamatan   | Keluarga | Anggota Rumah Tangga | Jumlah |
|----|-------------|----------|----------------------|--------|
| 1  | Buahdua     | 9.555    | 14.106               | 23.661 |
| 2  | Cibugel     | 5.651    | 9.712                | 15.363 |
| 3  | Cimalaka    | 12.460   | 18.557               | 31.017 |
| 4  | Cimanggung  | 21.636   | 38.446               | 60.082 |
| 5  | Cisarua     | 5.438    | 8.971                | 14.409 |
| 6  | Cisitu      | 8.520    | 14.452               | 22.972 |
| 7  | Conggeang   | 7.087    | 9.447                | 16.534 |
| 8  | Darmaraja   | 9.861    | 17.140               | 27.001 |
| 9  | Ganeas      | 5.756    | 9.627                | 15.383 |
| 10 | Jatigede    | 4.920    | 5.844                | 10.764 |
| 11 | Jatinangor  | 20.957   | 37.723               | 58.680 |
| 12 | Jatinunggal | 13.340   | 21.844               | 35.184 |
| 13 | Pamulihan   | 16.119   | 37.723               | 42.747 |

| No            | Kecamatan        | Keluarga       | Anggota Rumah Tangga | Jumlah         |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 14            | Paseh            | 8.917          | 14.600               | 23.517         |
| 15            | Rancakalong      | 10.843         | 15.981               | 26.824         |
| 16            | Situraja         | 11.299         | 18.341               | 29.640         |
| 17            | Sukasari         | 8.650          | 13.842               | 22.492         |
| 18            | Sumedang Selatan | 18.801         | 31.435               | 50.236         |
| 19            | Sumedang Utara   | 20.848         | 35.722               | 56.570         |
| 20            | Surian           | 2.710          | 3.576                | 6.286          |
| 21            | Tanjungkerta     | 7.960          | 11.449               | 19.409         |
| 22            | Tanjungmedar     | 6.967          | 10.877               | 17.844         |
| 23            | Tanjungsari      | 17.215         | 29.489               | 46.704         |
| 24            | Tomo             | 6.276          | 9.269                | 15.545         |
| 25            | Ujungjaya        | 7.173          | 8.612                | 15.785         |
| 26            | Wado             | 11.156         | 19.508               | 30.664         |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>280.115</b> | <b>455.198</b>       | <b>735.313</b> |

Sumber : Dinas Sosial (2023)

## 2) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS digunakan sebagai database bagi pemerintah daerah guna menangani PPKS.

PPKS yang direhabilitasi tetapi untuk penanganannya dikembalikan ke keluarga PPKS (reunifikasi). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi

sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk data PPKS dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 2.34**  
**Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Orang)**  
**Tahun 2018-2022**

| PPKS                                                              | 2018 | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|
| Anak Bayi terlantar                                               | 5    | 6     | 6     | 6    | 1    |
| Anak terlantar                                                    | 376  | 83    | 83    | 407  | 317  |
| Anak yang berhadapan dengan hukum                                 | 66   | 15    | 40    | 40   | 16   |
| Anak jalanan                                                      | 52   | 52    | 0     | 0    | 0    |
| Anak dengan kedisabilitasan (ADK)                                 | 27   | 0     | 0     | 57   | 70   |
| Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | 91   | 15    | 15    | 15   | 1    |
| Anak yang memerlukan perlindungan khusus                          | 73   | 0     | 0     | 0    | 19   |
| Lanjut usia terlantar                                             | 530  | 3.729 | 3.729 | 874  | 736  |
| Penyandang disabilitas                                            | 962  | 1.053 | 993   | 442  |      |
| Tuna susila                                                       | 180  | 0     | 0     | 0    | 17   |
| Gelandangan                                                       | 0    | 0     | 0     | 5    | 5    |
| Pengemis                                                          | 0    | 0     | 13    | 2    | 3    |
| Pemulung                                                          | 0    | 10    | 0     | 8    | 0    |
| Kelompok minoritas                                                | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    |

| PPKS                                       | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bekas warga binaan lembaga pemasayarakatan | 111    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Korban penyalahgunaan NAPZA                | 70     | 0      | 91     | 14     | 1      |
| Korban trafficking                         | 4      | 0      | 1      | 0      | 1      |
| Korban tindak kekerasan                    | 148    | 0      | 56     | 6      | 52     |
| Pekerja migran bermasalah sosial           | 67     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Korban Bencana Alam                        | 977    | 2.253  | 2.253  | 1.053  | 5.283  |
| Fakir miskin                               | 68.992 | 59.100 | 33.411 | 44.744 | 58.863 |
| Keluarga bermasalah sosial psikologis      | 22     | 0      | 0      | 0      | 0      |

Sumber : Dinas Sosial (2023)

**2.4.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

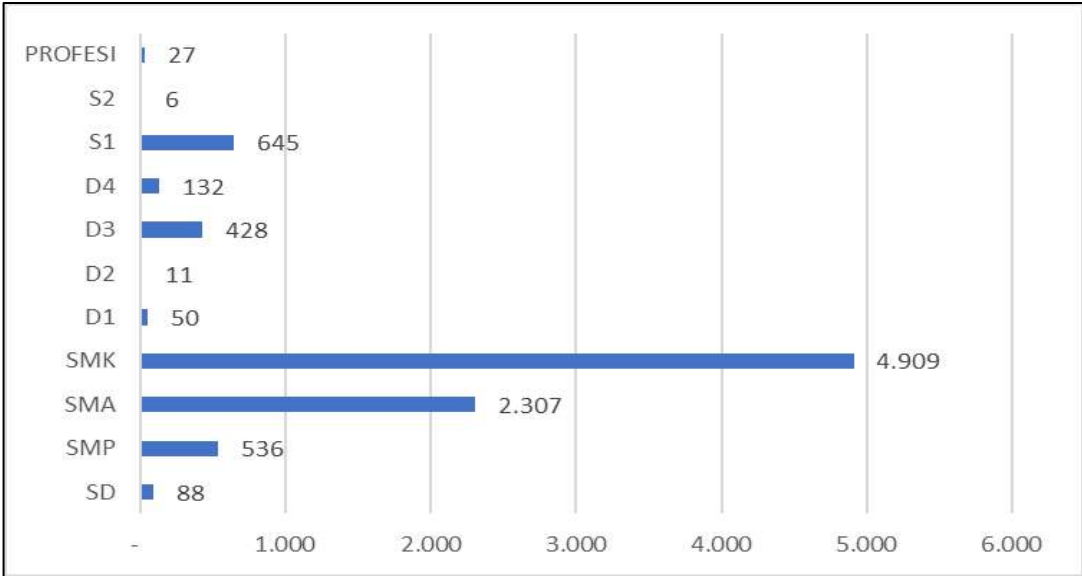
**2.4.2.1. Urusan Tenaga Kerja**

**1) Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja**

Pencari kerja di Kabupaten Sumedang berdasarkan data lulusan pendidikan pada Tahun 2022 didominasi oleh lulusan SMK sebanyak 4.909 orang. Dikarenakan SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan menengah dengan tujuan mempersiapkan lulusannya bisa langsung bekerja. Daftar Pencari Kerja Berdasarkan lulusan dapat dilihat pada Gambar 2.66 dibawah ini.



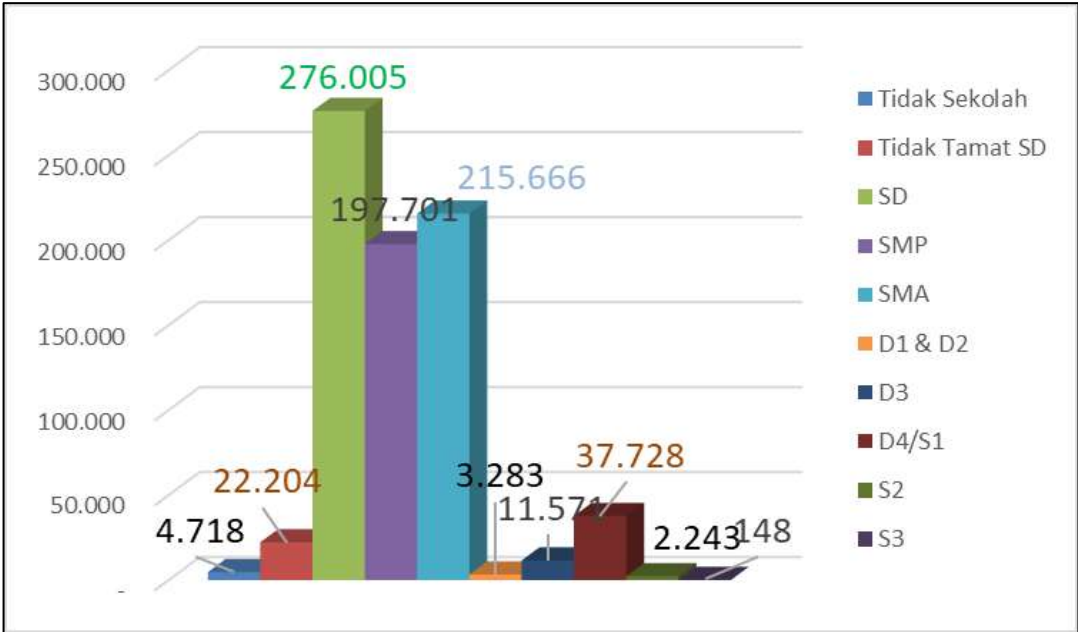
**Gambar 2.66**  
**Pencari Kerja Berdasarkan Lulusan Pendidikan Tahun 2022**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2023)

Adapun berdasarkan data kependudukan di Kabupaten Sumedang bahwa angkatan kerja lebih di dominasi oleh pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 276.005 orang, sedangkan yang paling rendah yaitu pendidikan Strata 3 (S3) sebanyak 148 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 2.67**  
**Angkatan Kerja (15 -64 Tahun) Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2022**



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2023)

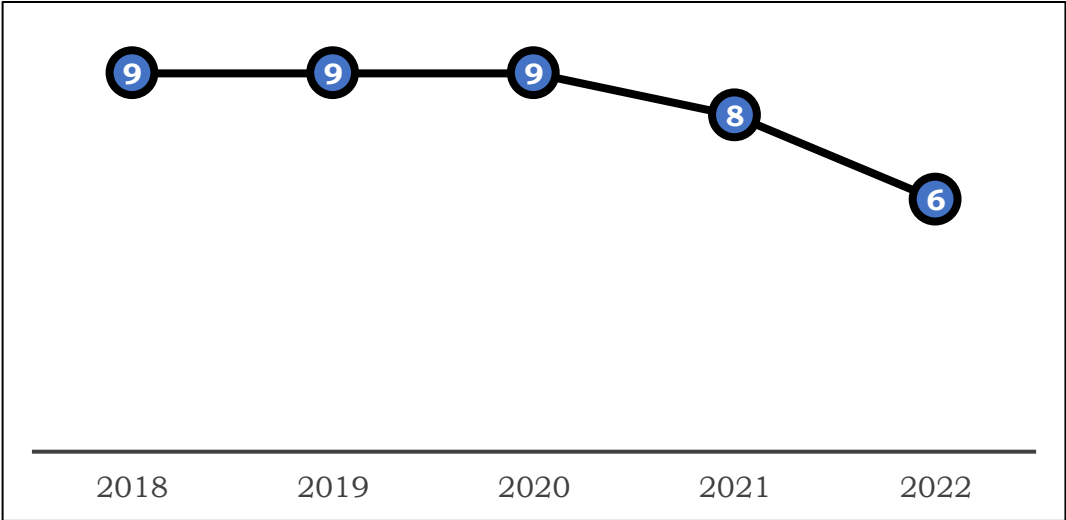
Ketimpangan pertumbuhan lapangan kerja dari waktu ke waktu tidak sebanding dengan pertambahan jumlah lulusan pendidikan yang mencari atau membutuhkan pekerjaan. Selain itu juga akses informasi lapangan kerja yang sulit serta keterampilan kerja yang rendah menjadikan kualitas tenaga kerja diragukan. Hal ini menjadi masalah yang mendasar dan memicu peningkatan pengangguran.

Pencari kerja dengan lulusan pendidikan kejuruan atau pendidikan umum yang tidak memperoleh bekal keterampilan kejuruan menjadi suatu permasalahan dalam pemberantasan pengangguran, melihat tingginya jumlah pencari kerja dengan lulusan kedua jenjang pendidikan tersebut. Dalam upaya meningkatkan kualitas para pencari kerja terutama para Angkatan muda yang baru lulus SMK/SMA, UPTD Balai Pelatihan Kerja (BLK) yang merupakan lembaga pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang membuka 12 Kejuruan, yaitu

1. Kejuruan Otomotif (service sepeda motor, Operator Forklift)
2. Kejuruan Garment (operator menjahit pakaian)
3. Kejuruan Teknik Listrik (Pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana, Listrik Industri)
4. Pariwisata (Barista, Pembuatan roti dan Patiserie)
5. Pertanian (Pembudidayaan Jamur)
6. Peternakan (Pembudidayaan Domba, ternak Ayam dan Itik)
7. Perikanan (Pembudidayaan ikan hias, Budi daya lele terpal)
8. Processing (Pembuatan Roti dan kue, Pengolahan Ikan, Pengolahan hasil pertanian, Operator Packing Makanan)
9. Bangunan (Meubelair, Finishing kayu)
10. Teknik Las ( Pengelasan SMAW)
11. TIK (*Practical Office*, Teknisi Komputer, Internet Marketing)
12. Teknik Elektronika ( Servis HP, Perawatan AC Split)

Diharapkan melalui pelatihan tersebut kompetensi atau keahlian para pencari kerja dapat meningkat. Dari jumlah kejuruan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah instruktur. Jumlah instruktur terus mengalami penurunan jumlah setiap tahunnya. Berikut adalah Jumlah Instruktur BLK Tahun 2018-2022.

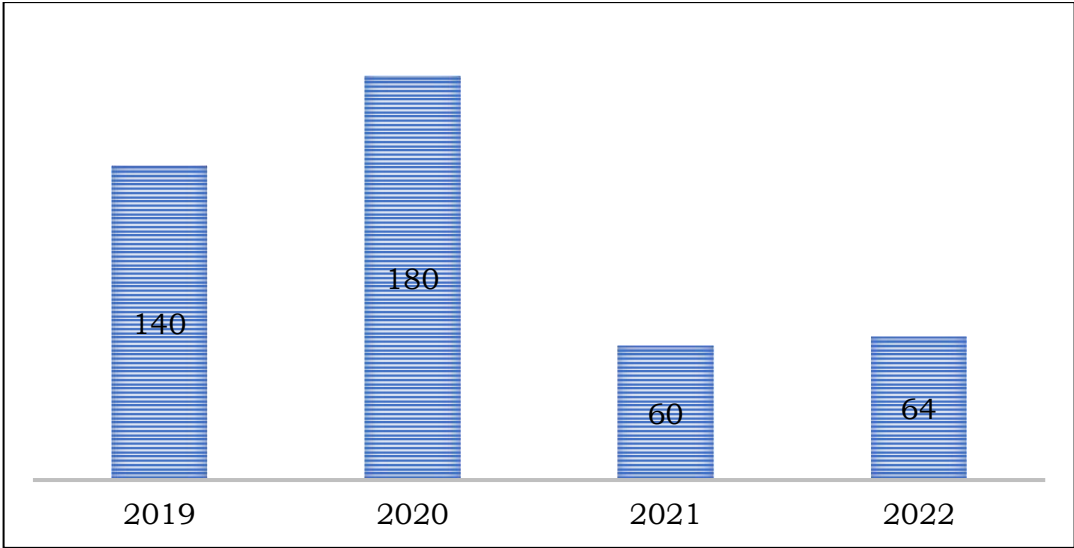
**Gambar 2.68**  
**Instruktur BLK Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2023)

Penurunan jumlah instruktur BLK ini disebabkan banyaknya instruktur yang telah berakhir masa tugasnya atau purnabakti. Selain membuka pelatihan berbasis kompetensi, UPTD BLK Kabupaten Sumedang juga membuka pelatihan penumbuhan wirausahawan yang diharapkan untuk mendorong terciptanya wirausahawan baru.

**Gambar 2.69**  
**Pelatihan Penumbuhan Wirausahawan Baru (Orang)**  
**Tahun 2019-2022**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2023)

Berdasarkan Gambar diatas, diketahui bahwa pelatihan penumbuhan wirausahawan baru sangat fluktuatif. Jumlah peserta pelatihan terbanyak tercatat pada Tahun 2020 sebanyak 180 orang,

sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan jumlah peserta yang signifikan dikarenakan adanya pandemi sehingga jumlah peserta dikurangi dan pembatasan jenis pelatihan.

Pelatihan yang dikembangkan oleh UPTD BLK juga membantu para lulusannya dalam penempatan pada perusahaan sesuai dengan kejuruan yang ada pada UPTD BLK. Berikut adalah tren peserta pelatihan yang ditempatkan.

**Gambar 2.70**  
**Peserta Pelatihan Ditempatkan (Orang) Tahun 2019-2022**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2023)

Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan menjadi 120 orang dari 19 orang pada tahun sebelumnya. Adanya sebuah Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Database Online (SIPEDO) yang dibangun oleh Disnakertrans Kabupaten Sumedang berhasil mendongkrak jumlah peserta pelatihan serta jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan, karena melalui aplikasi SIPEDO masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai jenis pelatihan disertai dengan jadwal pelaksanaan pelatihan dan dapat mengetahui Lembaga atau perusahaan yang bekerja sama dengan BLK.

**2) Hubungan Industri**

Perselisihan Hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,

perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Berdasarkan Gambar 2.69, Tahun 2018 merupakan tahun dengan kasus konflik tertinggi sebanyak 22 kasus konflik yang telah diselesaikan, dan pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 10 (sepuluh) kasus. Tahun 2022 konflik antara pekerja dan pengusaha kembali mengalami peningkatan menjadi 12 kasus. Hal ini sebagai salah satu dampak dari pasca pandemi *covid-19* yang mengakibatkan kondisi industri di Kabupaten Sumedang belum stabil, selain itu juga kondisi ekonomi, perang Rusia-Ukraina serta isu resesi ekonomi menjadi pemicu konflik terutama bagi perusahaan dengan *export oriented*.

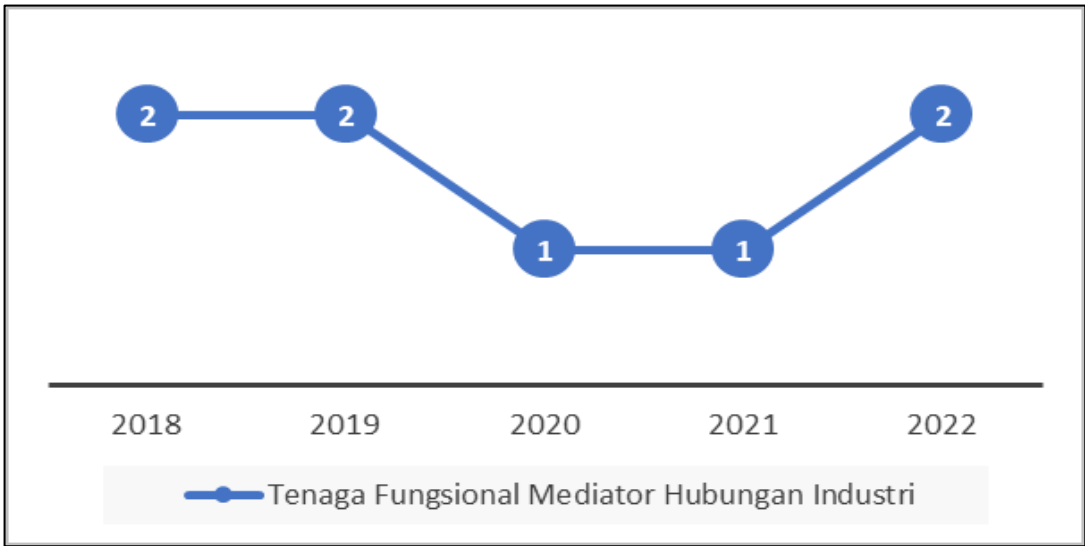
**Gambar 2.71**  
**Kasus Konflik antara Pekerja dengan Pengusaha**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2022)

Penyelesaian kasus-kasus perselisihan antara pekerja dengan pengusaha tidak lepas dari peran atau dukungan Sumber Daya Manusia dalam hal ini fungsional Mediator Hubungan Industri yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang seperti yang tergambar pada Gambar berikut.

**Gambar 2.72**  
**Tenaga Fungsional Mediator Hubungan Industri (Orang)**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2022)

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Sumedang hanya mempunyai 2 (dua) orang fungsional Mediator Hubungan Industri walaupun demikian jumlahnya bertambah dari tahun sebelumnya.

**2.4.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**1) Indeks Ketimpangan Gender**

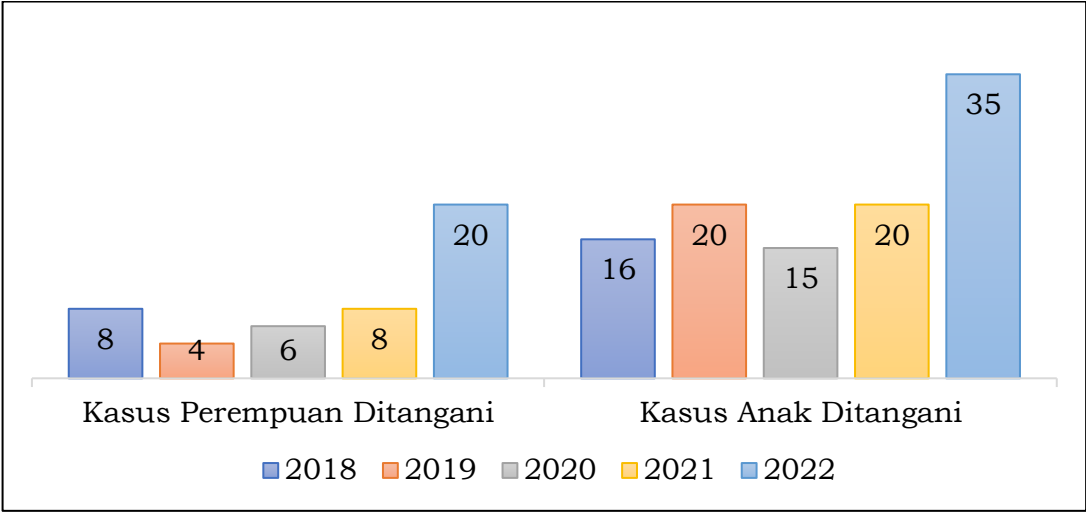
Kesetaraan Gender menjadi target pembangunan di banyak negara terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Semakin rendah nilai IKG menunjukkan keadaan yang lebih baik.

**2) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

Kasus Kekerasan kepada Perempuan dan anak di Kabupaten Sumedang terlihat fluktuatif, hal tersebut dengan adanya peran P2TP2A dalam penanganan korban kekerasan dan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat dengan cepat ditangani dan pelaku tindak kekerasan dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera. Penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut data tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani.

**Gambar 2.73**  
**Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Ditangani**  
**Tahun 2018-2021**



Sumber : DPPKBP3A (2022)

Berdasarkan data dari Gambar diatas, Tahun 2022 merupakan penanganan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Korban kekerasan merupakan perempuan dengan usia 18 Tahun keatas. Jumlah kasus perempuan yang ditangani pada tahun 2022 naik 12 kasus dari tahun sebelumnya menjadi 20 kasus. Adapun jenis kasus yang ditangani oleh DPPKBP3A Kabupaten Sumedang sebanyak 10 (sepuluh) jenis kasus yang terdiri dari : 1) Kasus Pemisahan istri dari suaminya; 2) Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 3) Kasus pengasuhan anak; 4) Kasus permasalahan rumah tangga; 5) Kasus pelecehan seksual; 6) Kasus penyekapan di Batam; 7) Kasus kekerasan berbasis gender online; 8) Kasus kekerasan dalam bekerja; 9) Kasus kekerasan;



10) Kasus kekerasan dalam pacaran. Dan penanganan kasus tertinggi ialah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 8 (delapan) kasus. Sedangkan untuk penanganan kasus kekerasan pada anak dengan usia dibawah 18 tahun, pada Tahun 2022 meningkat menjadi 35 kasus dari 20 kasus di Tahun 2021. Jenis kasus yang ditangani diantaranya : 1) Kasus penyekapan; 2) Kasus kekerasan; 3) Kasus *bullying*; 4) Kasus pelecehan; 5) Kasus trauma anak; dll. Kasus kekerasan pada anak tertinggi adalah kasus pelecehan anak yang tersebar di hampir semua kecamatan dengan jumlah kasus sebanyak 20 kasus yang terjadi pada anak perempuan maupun laki-laki.

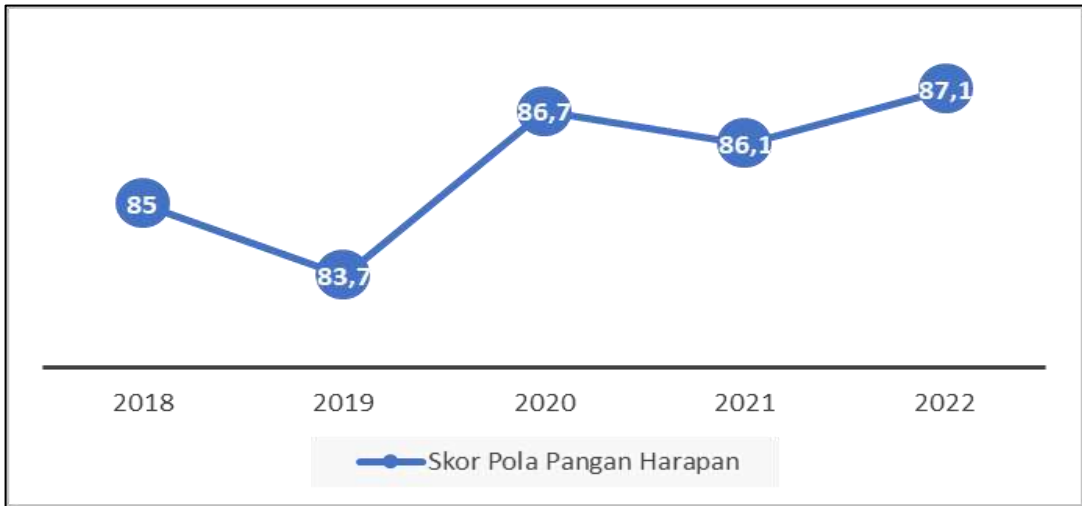
#### **2.4.2.3. Urusan Pangan**

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk.

##### **1) Skor Pola Pangan Harapan**

Pola pangan harapan merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Faktor yang berpengaruh terhadap pola pangan harapan terdiri dari jumlah pengeluaran rumah tangga, besaran anggota keluarga serta tingkat pendidikan.

**Gambar 2.74**  
**Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (2023)

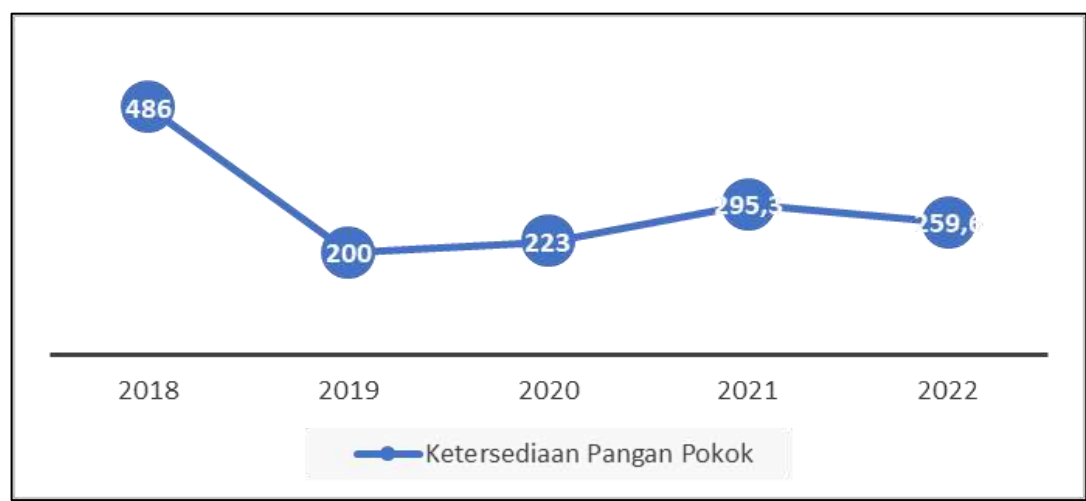
Berdasarkan Gambar 2.74 menunjukkan bahwa skor pola pangan harapan di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif dan belum mencapai skor ideal yaitu 100, hal ini disebabkan hampir semua kelompok pangan belum mencapai konsumsi energi yang cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumedang perlu ditingkatkan keberagamannya melalui gerakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga pemenuhan asupan gizi lebih seimbang.

**2) Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok**

Berdasarkan Gambar dapat diketahui ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif. Ketersediaan pangan utama tertinggi pada Tahun 2018 yang mencapai 486kg/jiwa/tahun, sedangkan ketersediaan pangan utama terendah pada Tahun 2019 yaitu sebesar 200 kg/jiwa/tahun. Penurunan tersebut dikarenakan perbedaan cara perhitungan di tahun sebelumnya menggunakan perhitungan Gabah Kering Giling sedangkan untuk Tahun 2019 perhitungannya menggunakan standar beras hasil giling dengan perbedaan 62% dari gabah kering giling. Namun walaupun terjadi penurunan masih dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Sumedang karena didukung juga oleh adanya regulasi ketahanan pangan, sehingga pasokan pangan aman. Ketersediaan pangan pokok mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 295,3 Kg/Kapita/Tahun akan tetapi menurun kembali pada

Tahun 2022 menjadi 259,6 Kg/Kapita/Tahun atau selisih 35,7 Kg/Kapita/Tahun dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

**Gambar 2.75**  
**Ketersediaan Pangan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)**  
**Tahun 2018-2022**



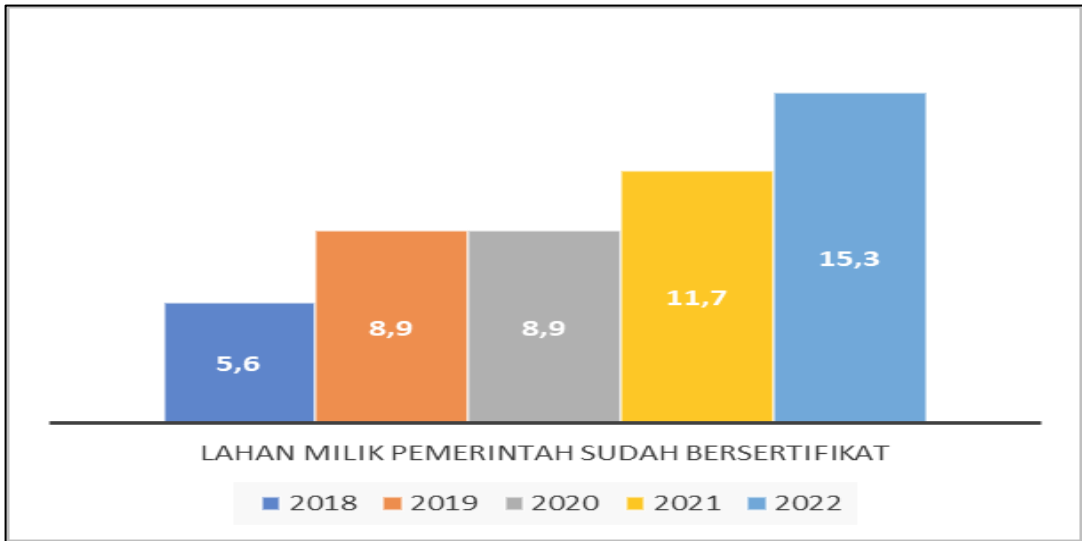
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang (2023)

**2.4.2.4. Urusan Pertanahan**

**1) Persentase Lahan Milik Pemerintah Yang Sudah Bersertifikat**

Hasil Verifikasi Administrasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 2.031 Bidang Tanah, dan yang telah bersertifikat sebanyak 239 sertifikat atau sekitar 11,7%. Tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 3,6% atau meningkat menjadi 15,3%. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. Jumlah Aset Pemerintah Daerah kemungkinan bertambah dengan adanya Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah Daerah.

Gambar 2.76  
Lahan Milik Pemerintah Sudah Bersertifikat (%)  
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (*Water Quality Index* / WQI) merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pencemaran perairan yang cukup efektif dengan informasi yang komprehensif, mudah dipahami dan dapat digunakan oleh masyarakat (Bardolo et al, 2006; Alam & Pathak, 2010). Kategori IKA dikembangkan menjadi lima kategori sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu:

Tabel 2.35  
Kategori Indeks Kualitas Air

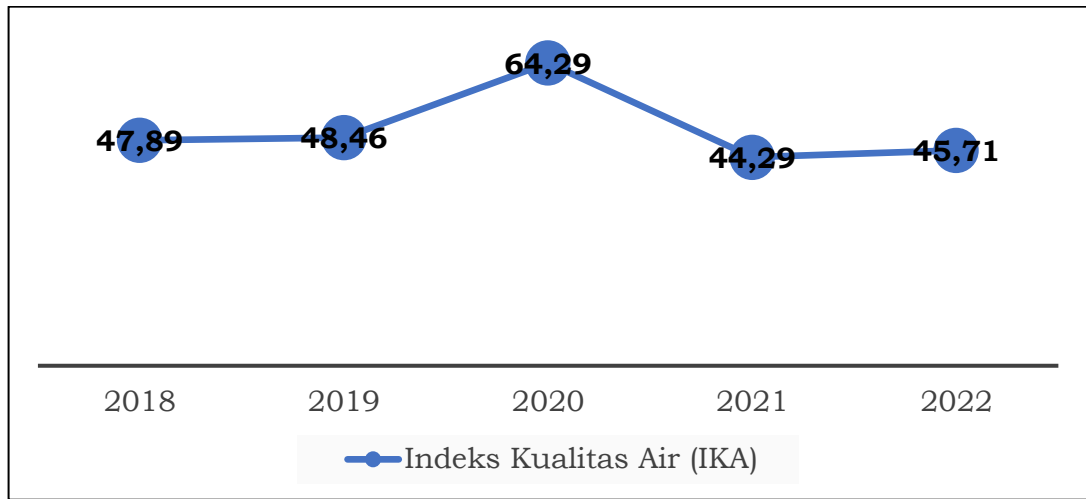
| Nomor | Kategori      | Angka Rentang        |
|-------|---------------|----------------------|
| 1.    | Sangat Baik   | $90 \leq x \leq 100$ |
| 2.    | Baik          | $70 \leq x < 90$     |
| 3.    | Sedang        | $50 \leq x < 70$     |
| 4.    | Kurang        | $25 \leq x < 50$     |
| 5.    | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$      |

Memperhatikan Gambar di bawah, bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif. Pada tahun 2022 indeks kualitas air meningkat menjadi 45,71 poin dari 44,29 poin di

tahun 2021. Jika melihat rentang angka kategori indeks, maka kualitas air di Kabupaten Sumedang termasuk ke dalam kategori “Kurang” karena masih dibawah 50 poin.

Penurunan kualitas air ini dapat diakibatkan oleh eksploitasi air yang dilakukan olah manusia, limbah rumah tangga serta kegiatan industri, yang mengakibatkan semakin banyaknya pemanfaatan air tanah atau air permukaan untuk memenuhi kebutuhan. Di Kabupaten Sumedang sendiri, perbaikan sanitasi sudah melampaui target, hanya saja untuk mencapai sanitasi yang aman dalam artian pengelolaan limbah rumah tangga yang baik masih belum optimal. Hal ini berdampak pula pada kualitas air yang dihasilkan. Selain itu perindustrian yang mulai Kembali menggeliat juga berdampak terhadap peningkatan jumlah limbah industry yang dihasilkan.

**Gambar 2.77**  
**Indeks Kualitas Air (poin) Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2023)

**2) Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.

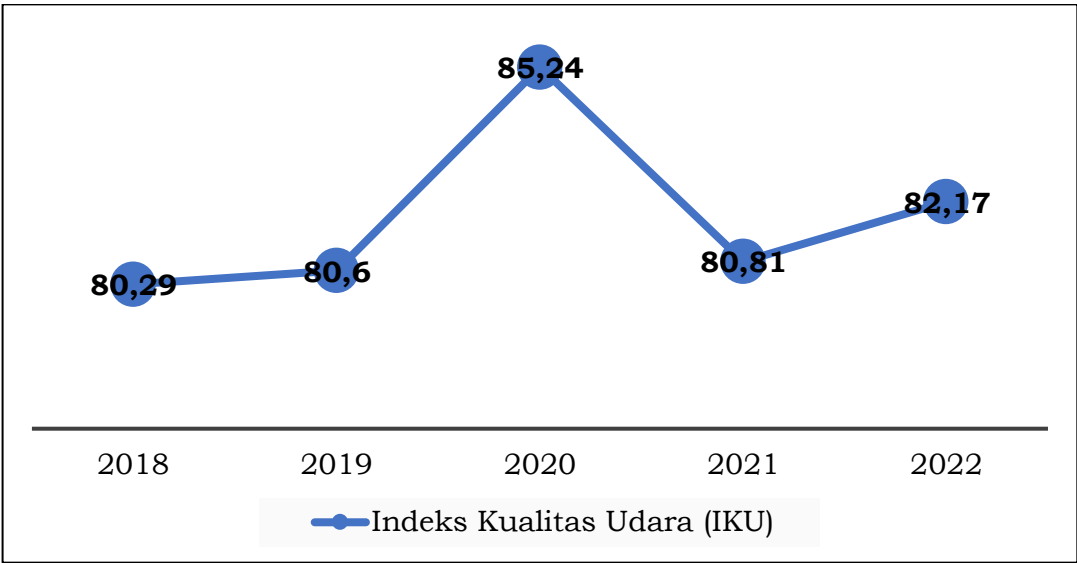
Untuk pengukuran kategori indeks kualitas udara (IKU) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.36**  
**Kategori Indeks Kualitas Udara**

| Nomor | Kategori      | Angka Rentang        |
|-------|---------------|----------------------|
| 1.    | Sangat Baik   | $90 \leq x \leq 100$ |
| 2.    | Baik          | $70 \leq x < 90$     |
| 3.    | Sedang        | $50 \leq x < 70$     |
| 4.    | Kurang        | $25 \leq x < 50$     |
| 5.    | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$      |

Memperhatikan Gambar di bawah bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 mencapai 80,81 atau kategori baik, namun lebih rendah dari tahun 2020 yaitu 85,24 hal tersebut disebabkan pada Tahun 2020 adanya kondisi Pandemi *Covid 19* dan pembatasan aktivitas serta mobilitas masyarakat maka kegiatan dan aktivitas industri tidak tinggi sehingga pencemaran udara berasal dari industri jumlahnya berkurang dan kurangnya mobilitas penduduk dalam menggunakan kendaraan bermotor. Diefektifkannya kembali beberapa roda perindustrian dan perekonomian berdampak pada kualitas udara di Kabupaten Sumedang sehingga penurunan indeks kualitas udara tampak di Tahun 2021 dan Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2020.

**Gambar 2.78**  
**Indeks Kualitas Udara (poin) Tahun 2018-2022**



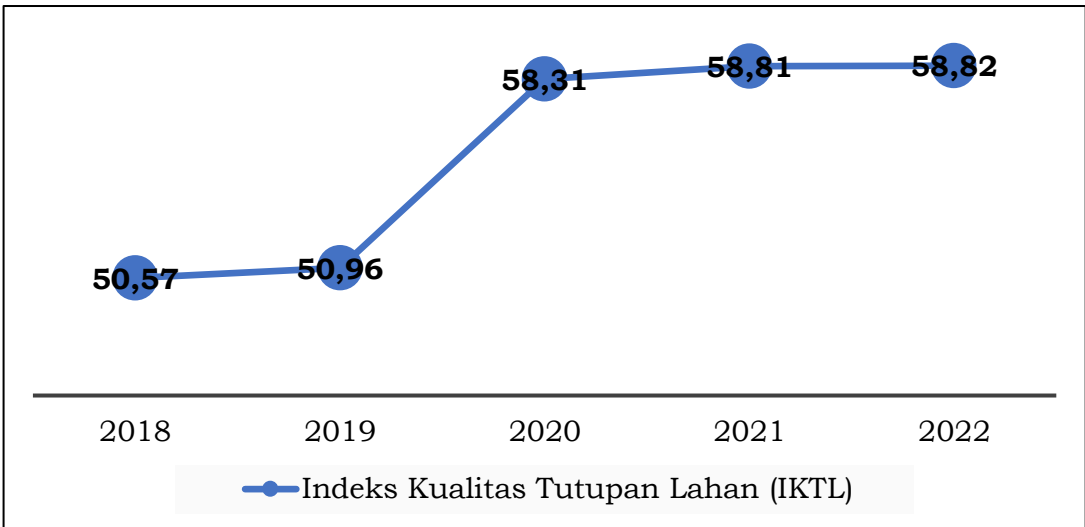
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2023)

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, IKTL Kabupaten Sumedang seperti yang tergambar pada Gambar dibawah.

Gambar 2.79  
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin) Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2023)

4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan

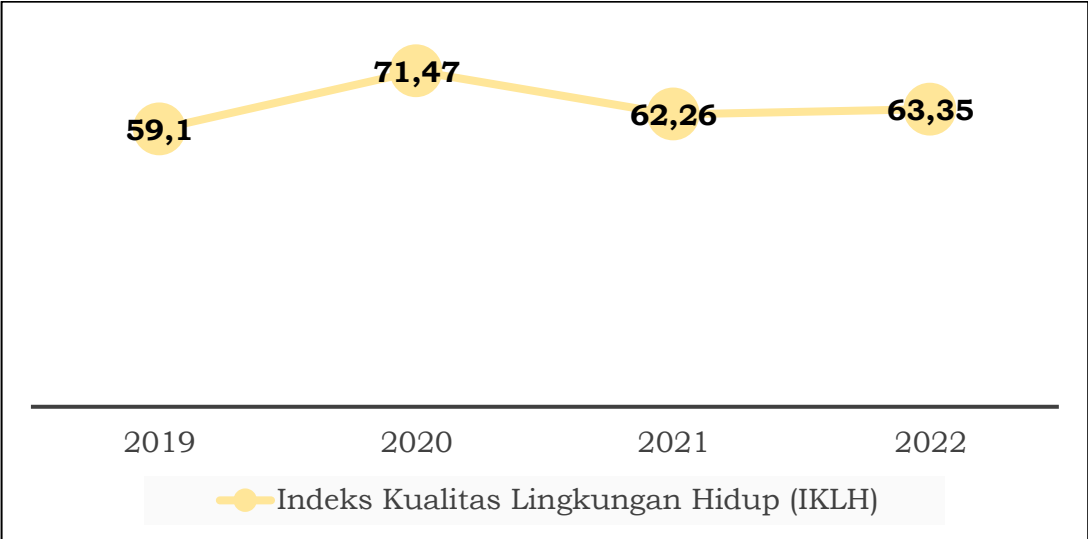


pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH pada Tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2021, tentunya dalam berbading lurus dengan capaian IKA, IKU dan IKLH. Capaian IKLH dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

**Gambar 2.80**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) Tahun 2019-2022**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2022)

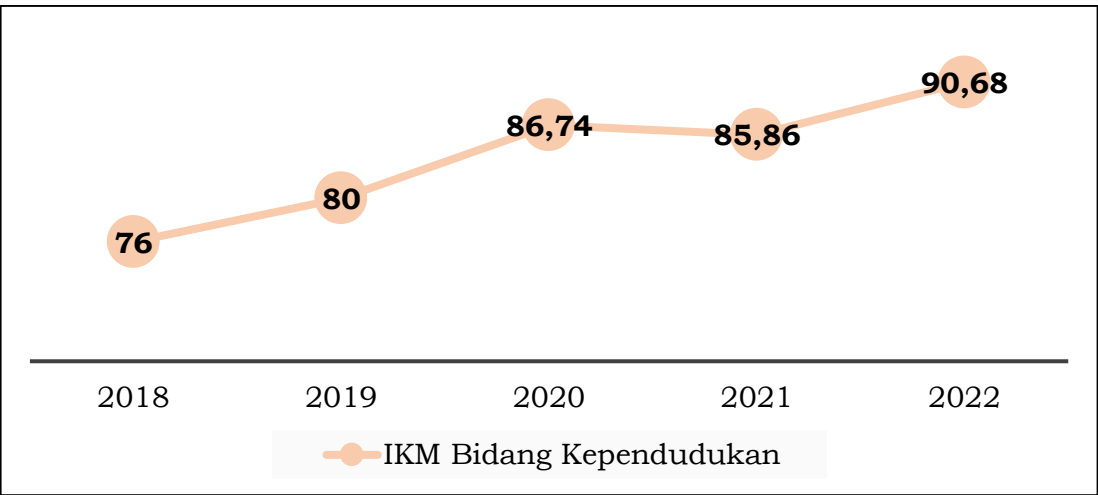
**2.4.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan**

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebagai salah satu cara untuk mengukur apakah pelayanan yang diberikan oleh para aparatur daerah sudah baik atau harus ada yang dibenahi kembali. Selama ini, Pemerintah sebenarnya juga selalu mengumandangkan bahwa aparatur pemerintah adalah merupakan abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat, sudah jelas bahwa tugas utama dari aparatur pemerintah yaitu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari

para aparatur pemerintah. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Dalam kaitan inilah maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua para aparatur pemerintah.

Saat ini data kependudukan sudah dianggap penting karena masyarakat akan sangat membutuhkan data kependudukan untuk berbagai kepentingan dalam melakukan segala bentuk kegiatan baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Karena sangat pentingnya dokumen kependudukan ini maka sudah pasti masyarakat akan membuat data kependudukannya karena tanpa adanya data kependudukan maka masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan dengan leluasa, sebagai contoh untuk masuk sekolah maka seorang anak akan membutuhkan akta kelahiran, sedangkan untuk mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit maka sudah pasti masyarakat akan diminta KTP (Kartu Tanda Penduduk). Untuk proses pelayanan kependudukan tentunya diharapkan dapat tepat dan cepat. Peningkatan pelayanan bidang kependudukan akan berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, seperti yang tergambar pada gambar berikut.

**Gambar 2.81**  
**IKM Bidang Kependudukan Tahun 2018-2022**



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2022)

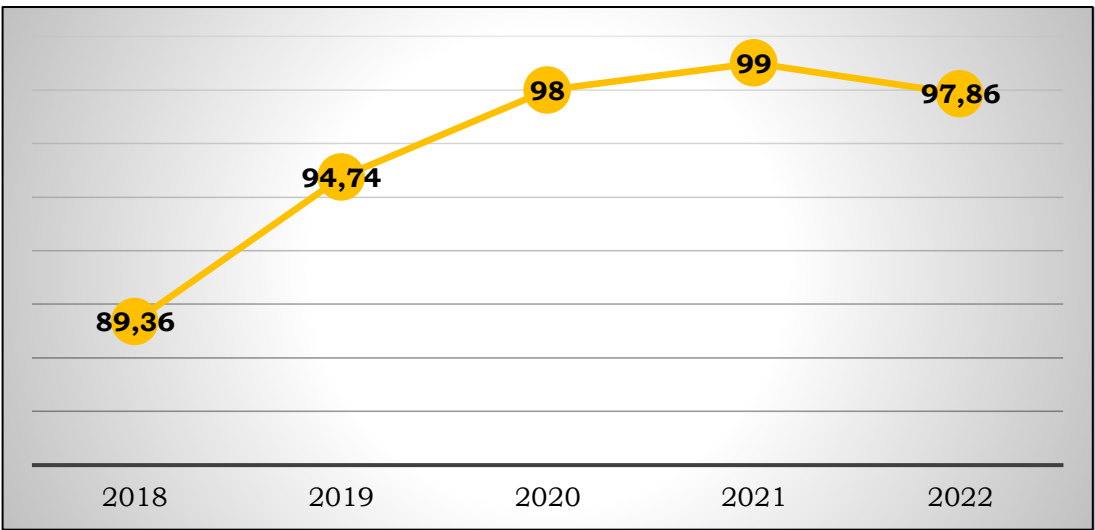
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap bidang kependudukan terus mengalami peningkatan. Bahkan pada Tahun 2022 IKM bidang kependudukan telah mencapai 90,68 persen dan dikategorikan “Sangat Baik”. Hal ini dikarenakan berbagai inovasi pelayanan kependudukan yang dikembangkan di Kabupaten Sumedang, seperti pembangunan sistem/aplikasi Silasidakep dan Jampe Harupat dalam upaya percepatan pelayanan serta mempermudah masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

## 2. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Tren rasio penduduk ber-KTP mengalami penurunan dan secara umum target per tahunnya tidak tercapai.

Pada Tahun 2022, rasio penduduk ber-KTP mencapai 0,98. artinya dari 896.320 penduduk wajib KTP, yang telah memiliki KTP sebanyak 877.104 penduduk.

**Gambar 2.82**  
**Rasio Penduduk ber-KTP Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2022**

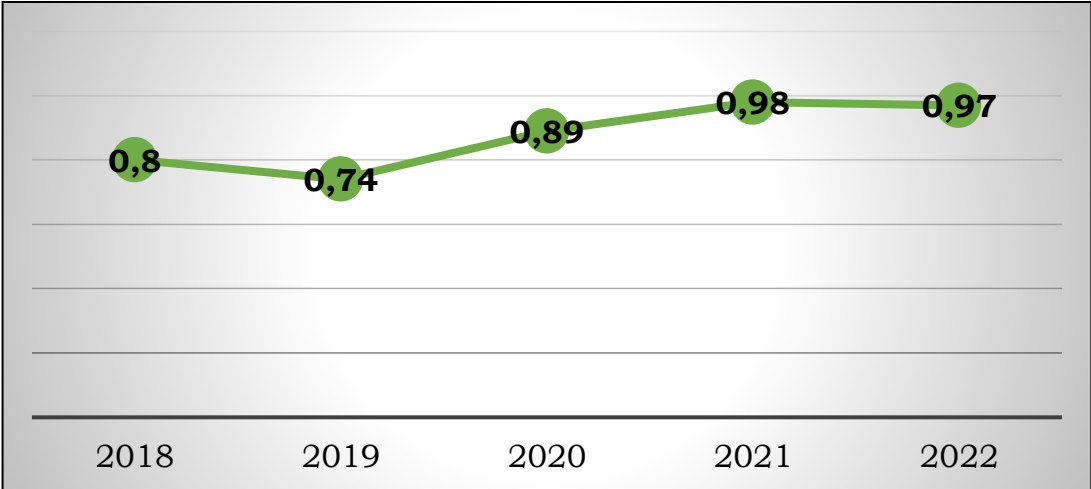


Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2023)

## 3. Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Rasio bayi ber-akte kelahiran (rentang usia 0-18 tahun) secara tren berfluktuasi. Tahun 2021 terdapat bayi lahir yang memiliki akte kelahiran sebanyak 98%, namun pada Tahun 2022 turun menjadi 97,5% atau 308.212 akta kelahiran dari 314.651 penduduk.

Gambar 2.83  
Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2018-2022



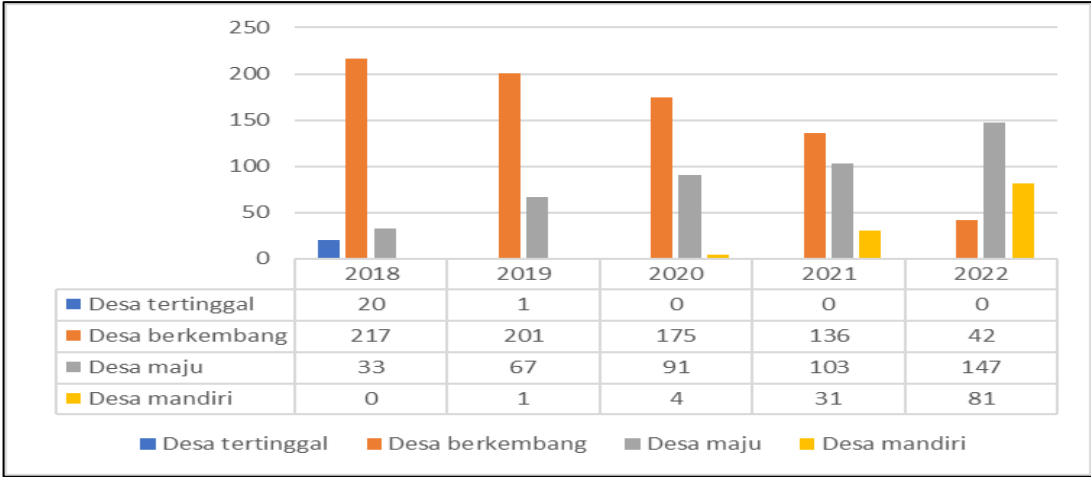
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Status Desa

Status Desa dibagi menjadi 4 (empat) kriteria yaitu Desa tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Berkembang. Status desa di Kabupaten terus meningkat, tergambarkan dengan tren positif terkait status desa tertinggal yang dari tahun 2020 sudah tidak ada status Desa tertinggal. Dengan adanya intervensi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan SDM dan pembinaan dari mulai perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan. Ditambah adanya program SAKIP Desa sehingga pelayanan yang dilakukan Pemerintah Desa menjadi tepat sasaran. Peningkatan status desa dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.84  
Status Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022

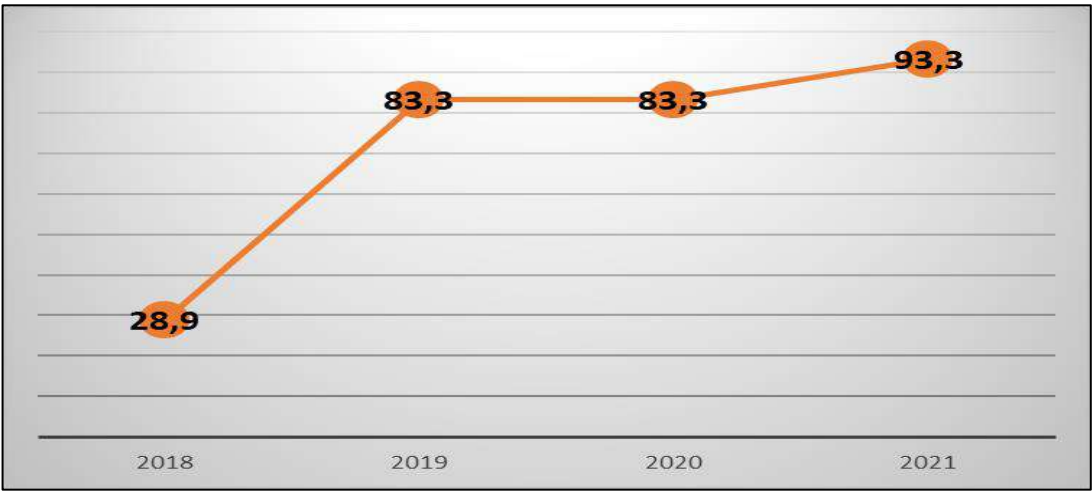


Sumber : DPMD Kabupaten Sumedang (2023)

**2) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang dikelola secara baik dan profesional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes). Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa. Dengan adanya regulasi dari Pemerintah Pusat maupun daerah yang menunjang untuk intervensi permodalan bagi Bumdes sehingga mampu mendorong pemberdayaan masyarakat melalui BUMDES. Capaian Persentase BUMDes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dapat lihat pada Gambar dibawah ini dimana trendnya cukup positif pada Tahun 2021 mencapai 93,3%.

**Gambar 2. 85**  
**Persentase peran BUMDes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa (%) Tahun 2018-2021**



Sumber : DPMD Kabupaten Sumedang (2022)

**2.4.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

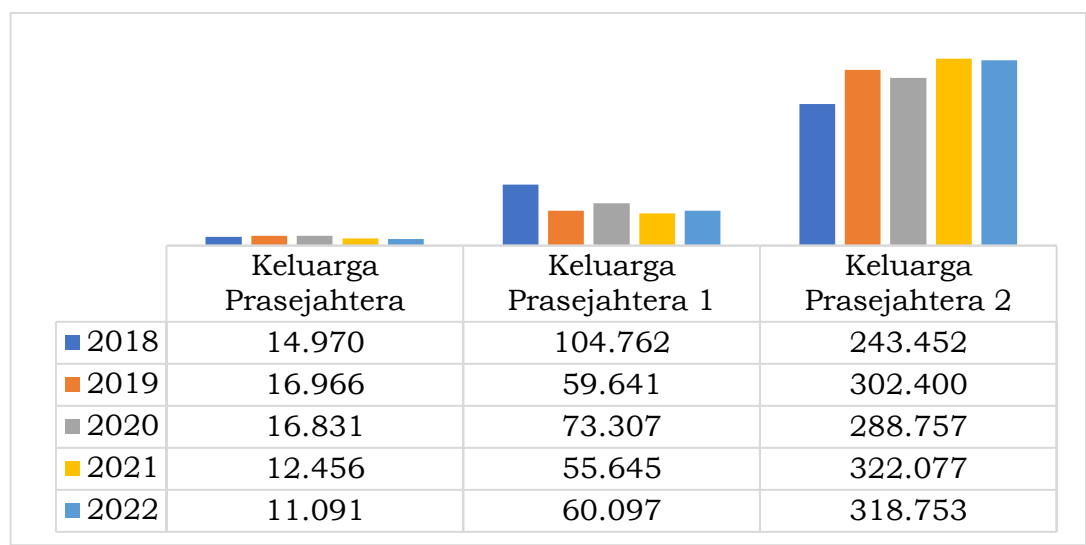
**1) Kesejahteraan Keluarga**

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Tren jumlah keluarga pra sejahtera dari tahun ke tahun sangat fluktuatif. Namun, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 11.091 KK dari yang sebelumnya sebanyak 12.456 KK di tahun 2021. Bantuan yang diberikan oleh

Pemerintah baik berupa kebutuhan pokok ataupun uang menjadi salah satu faktor pendorong penurunan jumlah penduduk keluarga prasejahtera di Kabupaten Sumedang.

Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis keluarga. Jumlah Keluarga Sejahtera I tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 4.452 KK. Hal ini bisa diakibatkan adanya perpindahan status keluarga, dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera I karena diperkirakan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Lain halnya dengan jumlah keluarga prasejahtera 2 yang menurun sebanyak 3.324 KK dari tahun sebelumnya. Diindikasikan penurunan ini dikarenakan adanya peningkatan status beberapa kepala keluarga, yang tersaji pada Gambar berikut.

**Gambar 2.86**  
**Klasifikasi Keluarga Berdasarkan Kesejahteraan (Keluarga)**  
**Tahun 2018-2022**



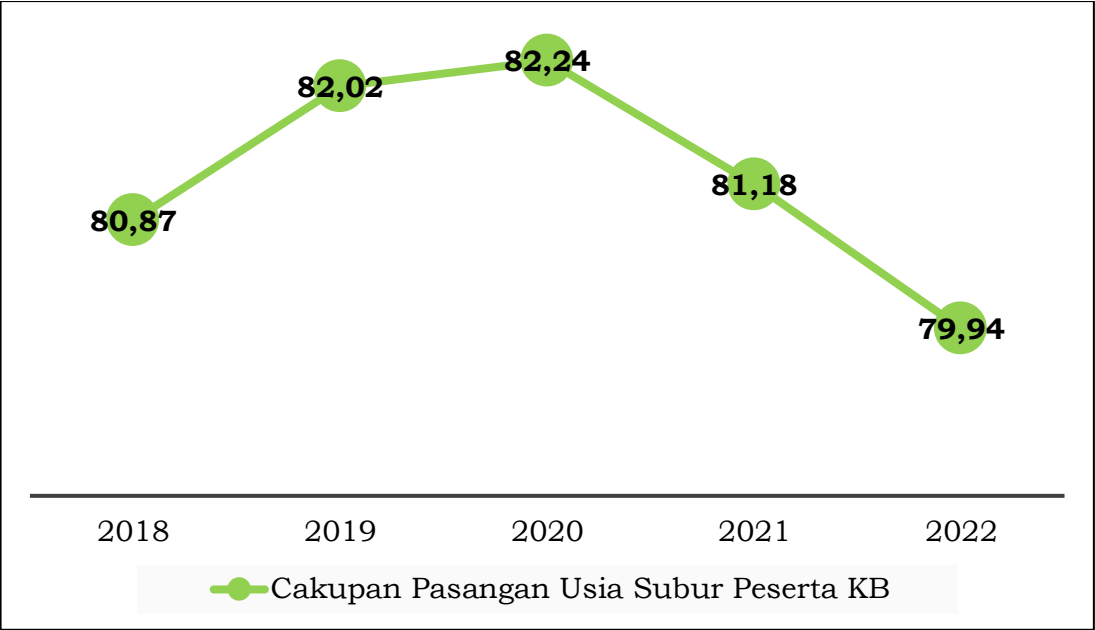
Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Sumedang (2023)

**2) Peserta KB**

Pasangan Usia Subur (PUS) pemakai kontrasepsi/CPR bagi yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeetneed*) merupakan kondisi yang mengisyaratkan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga diambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeetneed*) mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Berdasarkan Gambar di bawah dapat diketahui bahwa cakupan pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi terus mengalami penurunan, dan pada Tahun 2022 cakupannya mencapai 79,94 persen. Tingginya angka *unmet need* KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang akan berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadinya ledakan penduduk.

**Gambar 2.87**  
**Cakupan Pasangan Usia Subur Menggunakan Alat Kontrasepsi (%)**  
**Tahun 2018-2022**

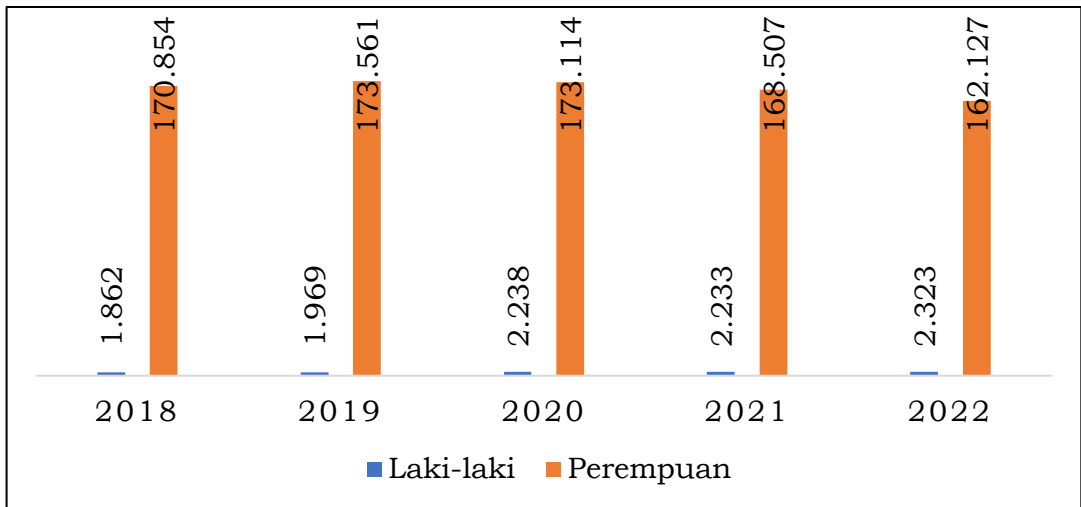


Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Sumedang (2023)

Adapun berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh kaum perempuan. Namun demikian jumlah peserta KB terus mengalami penurunan, seperti yang disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2.88  
Peserta KB per Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

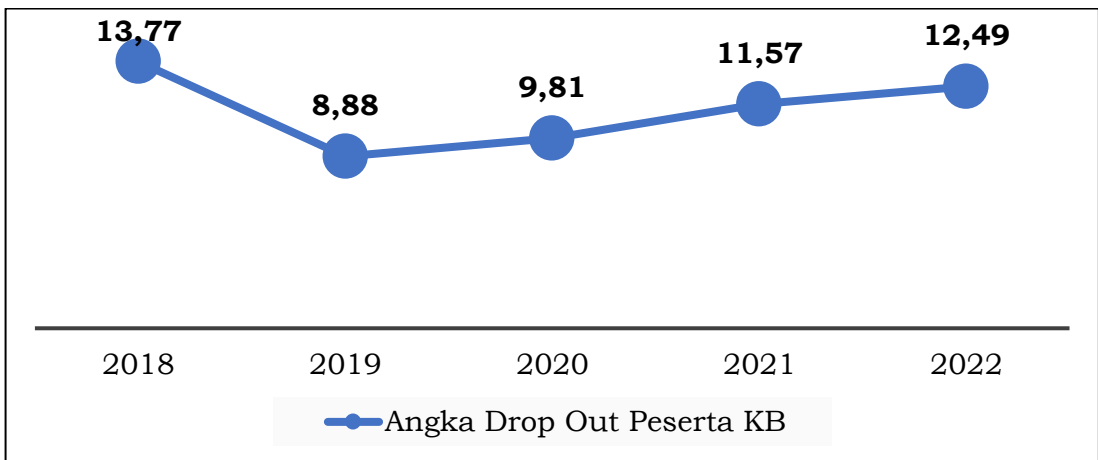


Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Sumedang (2023)

Hal ini berdampak pula pada angka *drop out* peserta KB, artinya akseptor atau pengguna KB menghentikan kontrasepsi lebih dari 3 (tiga) bulan. Angka *drop out* peserta KB tahun 2022 merupakan angka tertinggi kedua setelah tahun 2018 dengan persentase 12,49 persen.

Adapun beberapa indikasi masyarakat keluar dari kepesertaan KB disebabkan beberapa hal diantaranya : 1) kegagalan KB; 2) komplikasi; 3) ingin mempunyai keturunan/hamil; 4) adanya efek samping yang timbul akibat penggunaan alat KB; 5) biaya serta aksesibilitas; 6) frekuensi hubungan seksual yang jarang; 7) akseptor bercerai; dan 8) menopause. Berikut adalah Angka Drop Out Peserta KB di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.89  
Angka Drop Out Peserta KB (%) di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2018-2022



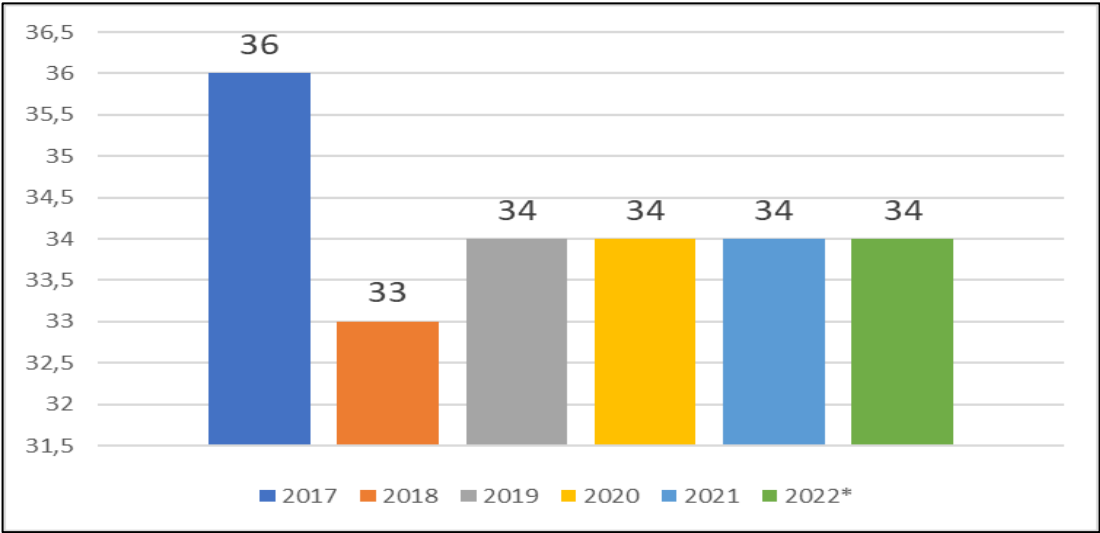
Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Sumedang (2023)

3) Kader KB per Desa

Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat. Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh KB dan/atau petugas lapangan KB melakukan pendataan keluarga.

Pendataan dimaksud wajib dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota secara serentak setiap lima tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Jumlah Kader KB per Desa sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 di rata-ratakan sejumlah 34 orang/desa. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2.90  
Kader KB per Desa Tahun 2018-2022



Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.9. Urusan Perhubungan

1) Trayek Angkutan

Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang baik di perkotaan, antar kota dalam

provinsi ataupun antar kota antar provinsi. Sesuai kewenangan Kabupaten/Kota untuk izin trayek terdiri dari Angkutan Kota dan Pedesaan, jalur trayek dapat dilihat pada Tabel 2.36 dan 2.37 di bawah ini.

**Tabel 2.37**  
**Jalur Trayek Angkutan Kota**

| No  | Jalur Trayek                                | Jarak (Km) |
|-----|---------------------------------------------|------------|
| 1.  | Terminal Ciakar-Padasuka                    | 19         |
| 2.  | Terminal Ciakar - Perum Jatihurip           | 14         |
| 3.  | Terminal Ciakar - Paseh                     | 14         |
| 4.  | Terminal Ciakar - Tolengas                  | 34         |
| 5.  | Terminal Ciakar - Tanjungsari               | 17         |
| 6.  | Terminal Ciakar - Situraja - Corenda        | 24         |
| 7.  | Terminal Ciakar - Rancakalong - Tanjungsari | 42         |
| 8.  | Terminal Ciakar - Buahdua - Hariang         | 40         |
| 9.  | Terminal Ciakar - Tanjungkerta - Hariang    | 30         |
| 10. | Terminal Ciakar - Buahdua                   | 28         |
| 11. | Terminal Ciakar - Darmaraja - Wado          | 31         |
| 12. | Conggeang - Ujungjaya                       | 15         |
| 13. | Terminal Ciakar - Wado - Kirisik            | 43         |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

**Tabel 2.38**  
**Jalur Trayek Angkutan Pedesaan**

| No | Jalur Trayek                             | Jarak (Km) |
|----|------------------------------------------|------------|
| 1. | Tanjungkerta - Jinkang - Surian          | 26         |
| 2. | Sub Term. Situraja - Cijeler             | 4          |
| 3. | Sub Term. Situraja - Cikadu - Bangbayang | 14         |
| 4. | Ganeas - Dayeuhluhur                     | 9          |

| No  | Jalur Trayek                                        | Jarak (Km) |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|
| 5.  | Sub Term. Cipameungpeuk - Semir - Cigobang          | 6          |
| 6.  | Terminal Ciakar - Kandang - Pamarisen               | 9          |
| 7.  | Sub. Term. Situraja - Cicarimanah-Warung Peti       | 13         |
| 8.  | Sub Term. Situraja - Cilopang - Pamulihan           | 5          |
| 9.  | Sub Term. Situraja - Pajagan - Jatigede             | 18         |
| 10. | Terminal Ciakar - Bojong - Burujul                  | 6          |
| 11. | Terminal Ciakar - Bojong - Sukamantri               | 12         |
| 12. | Terminal Ciakar - Sukamantri - Cikaramas            | 27         |
| 13. | Terminal Ciakar - Cimalaka - Naluk                  | 8          |
| 14. | Terminal Ciakar - Citimun - Cipadung                | 15         |
| 15. | Terminal Ciakar - Selaawi                           | 12         |
| 16. | Sub Term. Cipameungpeuk - Citengah                  | 8          |
| 17. | Terminal Tanjungsari - Genteng                      | 12         |
| 18. | Terminal Tanjungsari - Cijambu                      | 12         |
| 19. | Tolengas - Kulinyar                                 | 14         |
| 20. | Tolengas - Cibuluh                                  | 26         |
| 21. | Terminal Ciakar - Garis                             | 12         |
| 22. | Terminal Wado - Cibugel                             | 20         |
| 23. | Darmaraja - Cibugel                                 | 15         |
| 24. | Sub Term. Situraja - Darmaraja - Wado - Cilengkrang | 27         |
| 25. | Terminal Wado - Kirisik - Cipeundeuy                | 14         |
| 26. | Tanjungsari - Sindulang                             | 27         |
| 27. | Terminal Ciakar - Padasuka - Gelewing - Cimanglid   | 16         |
| 28. | Buahdua - Ciawitali                                 | 12         |

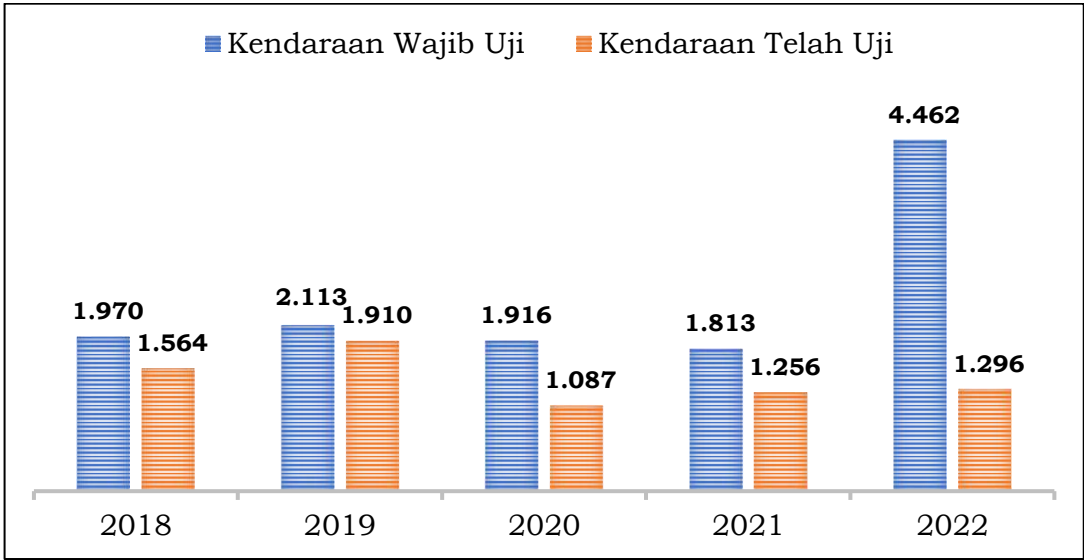
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

2) Pengujian Kendaraan

Kelaikan jalan kendaraan umum merupakan salah satu faktor pendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Laik Jalan kendaraan diuji dari mulai uji rem, suspensi, sorot lampu, emisi gas buang dan kondisi sasis kendaraan. Karena salah satu faktor tingginya kecelakaan lalu lintas bersumber dari kesadaran para pemilik kendaraan wajib uji dalam melaksanakan Uji Kelaikan Kendaraan Umum. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini dimaksudkan untuk mengecek kondisi kendaraan bermotor yang akan dioperasikan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau tidak. Dan pengujian tersebut dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Kendaraan mobil penumpang merupakan kendaraan umum angkutan penumpang berupa Angkutan Perkotaan, Perdesaan dan angkutan khusus (mini bus) dengan kapasitas maksimal 14 *seat*. Dari Gambar di bawah dapat terlihat perbandingan Kendaraan Wajib Uji mobil penumpang dan kendaraan telah melaksanakan Uji kelaikan.

Gambar 2.91  
Pengujian Mobil Penumpang (Unit)  
Tahun 2018-2022



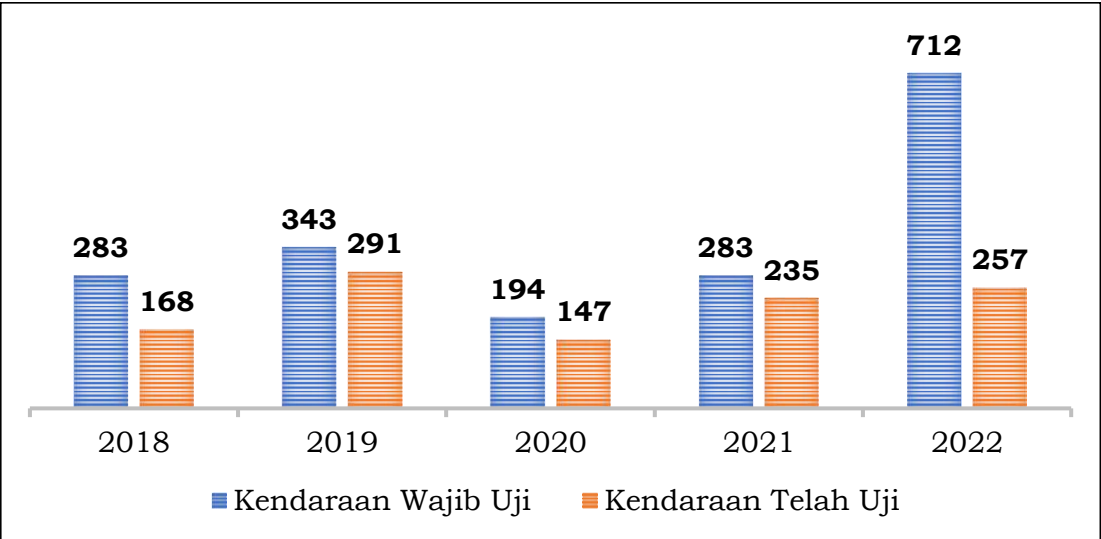
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kendaraan wajib uji jumlahnya fluktuatif setiap tahunnya. Begitu pula dengan kendaraan yang telah diuji. Pada tahun 2022 dari jenis kendaraan umum penumpang (angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan) jumlah

kendaraan yang telah diuji mencapai 96 persen dari total kendaraan yang wajib uji.

Kendaraan Bus merupakan kendaraan umum penumpang yang dapat mengangkut penumpang dengan kapasitas mulai dari 24 *seat* sampai dengan 59 *seat*. Pengujian kendaraan ini ditujukan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat dari ketidaklaikan kendaraan bermotor, terutama kendaraan bus karena bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang serta pengguna jalan lainnya. Berikut adalah data Pengujian Kendaraan Bus di Kabupaten Sumedang.

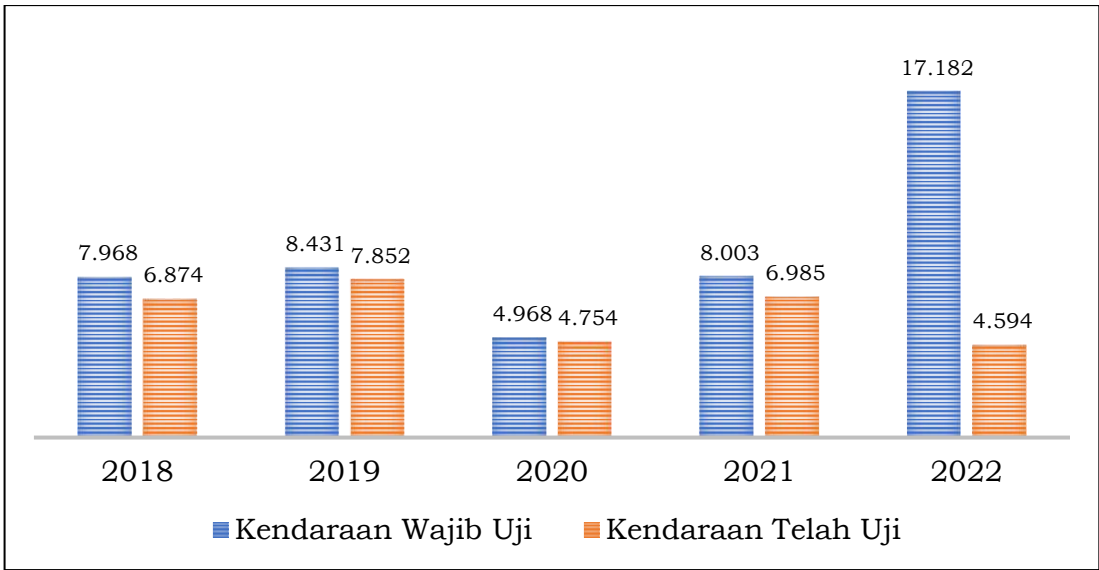
**Gambar 2.92**  
**Pengujian Mobil Bus (Unit) Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Tentunya dalam mobilitasnya kendaraan angkutan barang harus laik jalan, karena untuk menunjang keselamatan lalu lintas harus teruji sesuai kapasitas kendaraan angkutan barang. Pengujian mobil barang disajikan pada Gambar berikut.

**Gambar 2.93**  
**Pengujian Mobil Barang (Unit)**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2023)

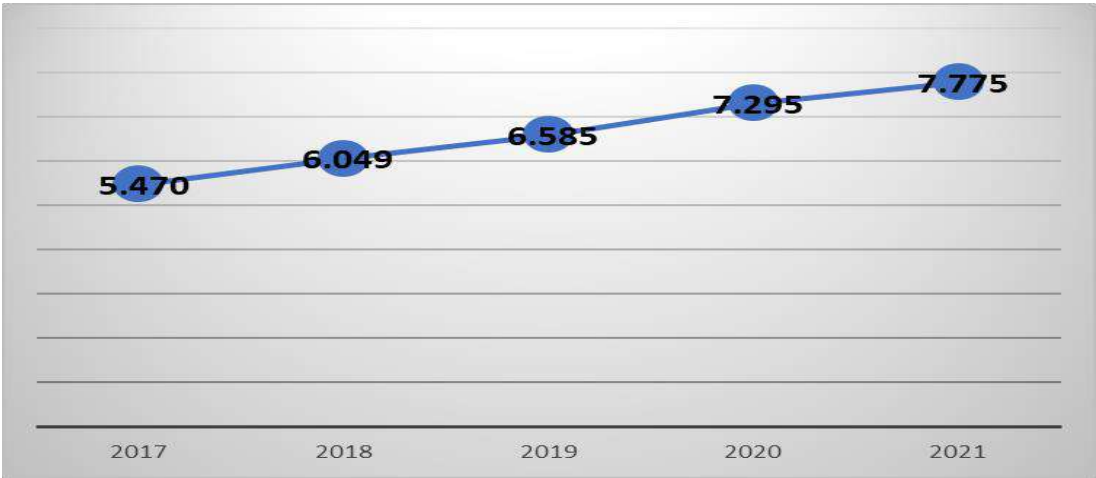
Memperhatikan ketiga gambar diatas, perbandingan jumlah kendaraan yang telah melaksanakan uji laik jalan dengan kendaraan wajib uji mulai dari kendaraan angkutan penumpang, bus dan angkutan barang masih rendah, dikarenakan belum optimalnya pelayanan, ketersediaan alat uji yang ada, serta kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengujian kendaraan bermotor. Selain itu juga karena luasnya wilayah Kabupaten Sumedang tentunya perlu adanya alat Uji keliling yang dapat menjangkau seluruh wilayah. Kondisi eksisting saat ini untuk pelayanan uji laik jalan hanya bersifat statis, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**3) Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas**

Salah satu peningkatan angka keselamatan di jalan raya adalah dengan pemasangan rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas di beberapa jalan yang rawan kecelakaan, rawan bencana serta Kawasan pendidikan. Pemasangan rambu-rambu dan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif setiap tahunnya. Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas terdiri dari jumlah rambu-rambu, dan jumlah Penerangan Jalan Umum. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



**Gambar 2.94**  
**Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas (Unit)**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

**4) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Berbasis Teknologi.**

Sarana dan Prasarana Perhubungan berbasis teknologi berupa Kamera pengawas di setiap persimpangan ruas jalan perkotaan yang terintegrasi dengan *Command Center* (ruang pengawasan). Teknologi tersebut atau dinamakan ATCS (*Area Traffic Control System*) yang merupakan suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimal dan koordinasi lampu lalu lintas di setiap persimpangan jalan.

Pemasangan ATCS di Kabupaten Sumedang dimulai pada Tahun 2021 dan baru terdapat 64 titik kamera pengawas di wilayah perkotaan, namun terdapat kekurangan sebanyak 113 titik kamera pada 14 ruas jalan guna terjaminnya keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan, dan pada tahun 2022 tidak ada pemasangan tambahan untuk ATCS di Kabupaten Sumedang.

Kondisi eksisting ATCS pada saat ini belum optimal tentunya dapat perlu dukungan yang maksimal dari Pemerintah Daerah agar menjamin keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

**Tabel 2.39**  
**Lokasi CCTV Terkoordinasi dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tahun 2022**

| No | Lokasi              |
|----|---------------------|
| 1. | Simpang Binokasih   |
| 2. | Simpang RSUD        |
| 3. | Simpang Pajaji      |
| 4. | Simpang Taman Endog |
| 5. | Simpang Ojolali     |
| 6. | Simpang Angkrek     |
| 7. | Simpang Alamsari    |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

**Tabel 2.40**  
**Lokasi Perangkat Traffic Counting Terpasang Tahun 2022**

| No | Lokasi   |
|----|----------|
| 1. | Cisero   |
| 2. | Cimayor  |
| 3. | Padasuka |
| 4. | Samoja   |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

**Tabel 2.41**  
**Lokasi CCTV Berdasarkan Jenis Kamera Terpasang Tahun 2022**

| Kamera PTZ | Jumlah | Kamera PIX | Jumlah |
|------------|--------|------------|--------|
| Dishub     | 1      | Dishub     | 1      |
| Griya      | 1      | Griya      | 2      |
| Ojolali    | 1      | Ojolali    | 1      |
| BTN        | 1      | BTN        | 1      |
| Angkrek    | 1      | Angkrek    | 2      |

| Kamera PTZ         | Jumlah | Kamera PIX         | Jumlah |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Taman Endog        | 2      | Taman Endog        | 5      |
| PKB                | 1      | PKB                | 1      |
| Alun-alun Utara    | 1      | Alun-alun Utara    | 2      |
| Alun-alun Sumedang | 4      | Alun-alun Sumedang | 3      |
| BNI                | 2      | BNI                | 3      |
| RSUD               | 1      | RSUD               | 2      |
| BJB                | 1      | BJB                | 1      |
| Bundaran Binokasih | 1      | Bundaran Binokasih | 6      |
| Pajaji             | 1      | Pajaji             | 1      |
| Cimayor            | 1      | Cimayor            | 1      |
| Patung Kuda        | 1      | Patung Kuda        | 1      |
| Bundaran Alam Sari | 1      | Bundaran Alam Sari | 5      |
| UPI                | 1      | UPI                | 1      |
| -                  | -      | Cisero             | 1      |
| -                  | -      | Padasuka           | 1      |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2023)

**2.4.2.10.Urusan Komunikasi dan Informatika**

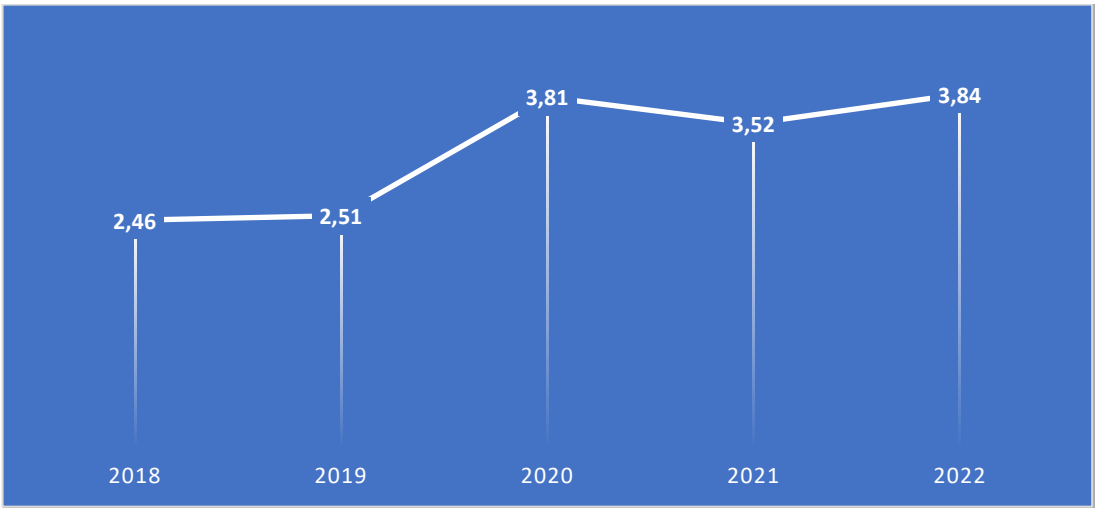
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime*). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

**1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Pemerintah Kabupaten Sumedang bergerak cepat dalam masalah digitalisasi, capaian indeks SPBE kabupaten Sumedang masuk pada kategori baik terutama pada tahun 2020 mencapai 3,81 poin,

walaupun sempat turun pada tahun 2021 menjadi 3,52 poin, namun pada Tahun 2022 kembali naik menjadi 3,84 poin. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

**Gambar 2.95**  
**Indeks SPBE (poin) Tahun 2018-2022**



*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2023)*

Penurunan capaian Indeks SPBE disebabkan oleh perubahan formulasi penilaian. Dari perbedaan penilaian tersebut maka banyaknya faktor-faktor pendukung yang harus dilengkapi. Pada Tahun 2020 penilaian SPBE terdiri hanya 3 (tiga) domain namun pada Tahun 2021 menjadi 12 domain. Meskipun mengalami kenaikan capaian indeks SPBE pada tahun 2022 akan tetapi terdapat beberapa domain yang mengalami penurunan nilai sehingga diperlukan reviu dan /atau tindaklanjut terhadap domain yang mengalami penurunan. Dikarenakan setiap domain diampu oleh beberapa SKPD maka untuk mencapai nilai yang sempurna diperlukan kontribusi dari beberapa SKPD terkait. Tabel dibawah ini adalah Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.42**  
**Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2022**

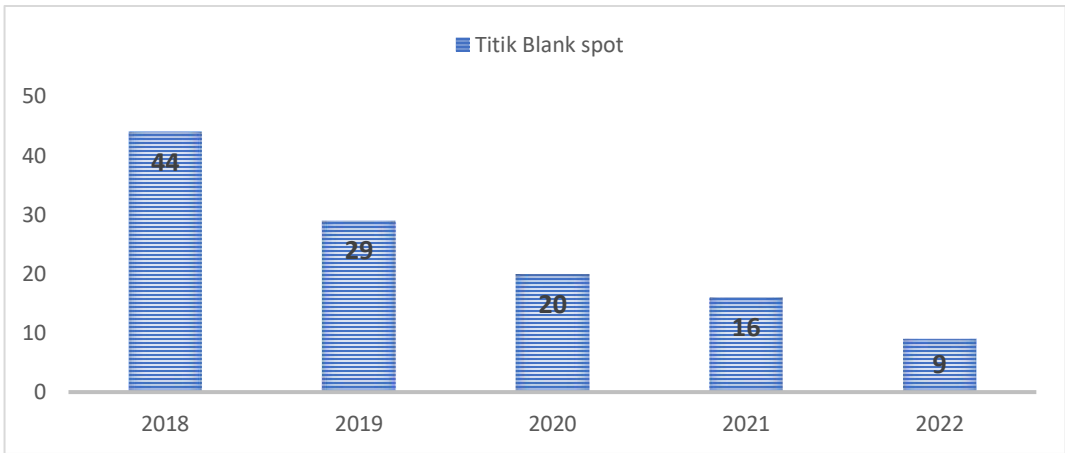
| 2020           |       | 2021                                        |       | 2022                                        |       |
|----------------|-------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|
| Domain         | Nilai | Domain                                      | Nilai | Domain                                      | Nilai |
| Kebijakan SPBE | 3,88  | Kebijakan SPBE                              | 3,2   | Kebijakan SPBE                              | 4,70  |
| Tata Kelola    | 3,57  | Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE | 3,2   | Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE | 4,70  |
| Layanan        | 3,91  | Tata Kelola SPBE                            | 3,6   | Tata Kelola SPBE                            | 2,60  |
|                |       | Perencanaan Strategis SPBE                  | 3,25  | Perencanaan Strategis SPBE                  | 2,75  |
|                |       | Teknologi Informasi dan Komunikasi          | 3,75  | Teknologi Informasi dan Komunikasi          | 2,75  |
|                |       | Penyelenggara SPBE                          | 4     | Penyelenggara SPBE                          | 2     |
|                |       | Manajemen SPBE                              | 2,45  | Manajemen SPBE                              | 3,55  |
|                |       | Penerapan Manajemen SPBE                    | 2,13  | Penerapan Manajemen SPBE                    | 3,75  |
|                |       | Audit TIK                                   | 2,33  | Audit TIK                                   | 3     |
|                |       | Layanan SPBE                                | 3,95  | Layanan SPBE                                | 4,38  |
|                |       | Administrasi Pemerintahan Berbasis          | 3,7   | Administrasi Pemerintahan Berbasis          | 4,20  |

| 2020   |       | 2021                               |       | 2022                               |       |
|--------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Domain | Nilai | Domain                             | Nilai | Domain                             | Nilai |
|        |       | Elektronik                         |       | Elektronik                         |       |
|        |       | Layanan Publik Berbasis Elektronik |       | Layanan Publik Berbasis Elektronik | 4,67  |

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2023)

Seiring dengan tingginya penggunaan internet di Kabupaten Sumedang, namun masih terdapat titik-titik *blank spot* di beberapa wilayah yang tersebar di beberapa kecamatan. Blank spot merupakan suatu kondisi dimana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon ataupun komunikasi digital seperti jaringan internet. Beberapa penyebab timbulnya blank spot di beberapa wilayah dipengaruhi oleh kondisi geografis dan faktor cuaca. Berikut adalah data titik *blank spot* di Kabupaten Sumedang.

**Gambar 2.96**  
**Titik Blank Spot di Kabupaten Sumedang (Desa)**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2022)

*Blank spot* menjadi salah satu permasalahan pada era digitalisasi saat ini, karena sistem informasi sangatlah penting dan utama. Berdasarkan gambar di atas, jumlah titik blank spot di wilayah Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2022 tinggal 9 (sembilan) tempat yang belum memiliki akses jaringan internet. Beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah titik blank spot salah satunya dengan memperkuat sinyal di wilayah yang menjadi titik blank spot. Adapun data layanan jaringan internet di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut. Penggunaan Internet

Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat melek informasi. Kondisi saat ini penggunaan internet tidak memandang kalangan, baik kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas



maupun kalangan atas, tentunya internet menjadi salah satu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu pengguna internet juga mulai dari usia 10 (sepuluh) Tahun sudah menggunakan internet. Seperti dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

**Tabel 2.43**  
**Layanan Jaringan Internet Blank Spot di Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |                 | Alamat                                                       | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket.                    |
|----|----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-------------------------|
|    |                |             |                 |                                                              | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |                         |
| 1  | Wado           | 1           | Cimungkal       |                                                              |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 2           | Ganjarresik     |                                                              |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 3           | Cilengkrang     |                                                              |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 4           | Cikareo Selatan |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 5           | Cikareo Utara   |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 6           | Wado            |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 7           | Mulyajaya       |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 8           | Sukajadi        |                                                              |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 9           | Cisurat         |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 10          | Sukapura        |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
| 2  | Jatinunggal    | 1           | Sirnasari       |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 2           | Tarikolot       |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 3           | Sarimekar       |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 4           | Banjarsari      | Banjarsari, Jatinunggal, Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45376 | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 5           | Sukamanah       |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 6           | Cipeundeuy      |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 7           | Cimanintin      |                                                              |                                | √   | √       | √             |                         |
|    |                | 8           | Pawenang        |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 9           | Kirisik         |                                                              |                                | √   |         |               |                         |
| 3  | Darmaraja      | 1           | Darmaraja       |                                                              |                                | √   |         |               |                         |

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |              | Alamat                                                                   | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket.                    |
|----|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-------------------------|
|    |                |             |              |                                                                          | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |                         |
|    |                | 2           | Darmajaya    |                                                                          |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 3           | Sukamenak    |                                                                          |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 4           | Sukaratu     |                                                                          |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 5           | Cikeusi      |                                                                          |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 6           | Cipeuteuy    |                                                                          |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 7           | Cieunteung   | Cieunteung, Darmaraja, Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45372               | √                              | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 8           | Karangpakuan |                                                                          |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 9           | Pakualam     |                                                                          |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 10          | Neglasari    |                                                                          |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 11          | Tarunajaya   |                                                                          |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 12          | Ranggon      |                                                                          |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
| 4  | Cibugel        | 1.          | Jayamekar    |                                                                          |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 2.          | Buanamekar   |                                                                          |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 3.          | Cibugel      |                                                                          |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 4           | Cipasang     |                                                                          |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 5           | Tamansari    |                                                                          |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 6           | Suka raja    |                                                                          |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 7           | Jayamandiri  |                                                                          |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
| 5  | Cisitu         | 1.          | Cisitu       |                                                                          |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 2           | Situmekar    | Situmekar, Cisitu Situmekar Sumedang Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45363 | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 3           | Pajagan      |                                                                          |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 4.          | Cigintung    |                                                                          |                                | √   |         |               |                         |

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |                | Alamat                                                                            | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket.                    |
|----|----------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-------------------------|
|    |                |             |                |                                                                                   | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |                         |
|    |                | 5.          | Sundamekar     |                                                                                   |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Linggajaya     | Kucing, Linggajaya, Cisitu Linggajaya Sumedang Jawa Barat 45363                   | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 7.          | Ranjeng        |                                                                                   |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 8.          | Cilopang       |                                                                                   |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 9.          | Cimarga        |                                                                                   |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 10.         | Cinangsi       |                                                                                   |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
| 6  | Situraja       | 1.          | Situraja Utara |                                                                                   |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Situraja       |                                                                                   |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 3.          | Mekarmulya     | Jl.Cigodeg Mekarmulya Situraja KabupatenSumedang Jawa Barat 45371                 | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 4.          | Cikadu         | Cikadu Situraja, KabupatenSumedang Jawa Barat 45371                               | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 5.          | Kaduwulung     |                                                                                   |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Karangheuleut  |                                                                                   |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 7.          | Cijeler        |                                                                                   |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 8.          | Ambit          |                                                                                   |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 9.          | Malaka         | Jl. Samoja No.2 Malaka Situraja KabupatenSumedang Jawa Barat 45371                | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 10.         | Sukatali       | Jl. Raya Sukatali No.55 Sukatali Kec. Situraja KabupatenSumedang Jawa Barat 45371 | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 11.         | Pamulihan      |                                                                                   |                                | √   |         | √             |                         |
|    |                | 12.         | Jatimekar      |                                                                                   |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 13.         | Bangbayang     |                                                                                   |                                | √   |         | √             | Sinyal GSM kurang Bagus |

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |                 | Alamat                                                                               | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket.                    |
|----|----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-------------------------|
|    |                |             |                 |                                                                                      | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |                         |
| 7  | Conggeang      | 14.         | Cijati          | Cijati Situraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45371                                  | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 15.         | Cicarimanah     |                                                                                      |                                | √   |         | √             |                         |
|    |                | 1.          | Conggeang Kulon |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Conggeang Wetan | Jl.Legok-Conggeang No.325 Conggeang Wetan KabupatenSumedang Jawa Barat 45391         | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 3.          | Cipamekar       | Jl. Sirah Cipelang Cipamekar Conggeang KabupatenSumedang Jawa Barat 45391            | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 4.          | Cibeureuyeuh    | Cibeureuyeuh, Kec. Conggeang KabupatenSumedang Jawa barat 45391                      | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 5.          | Jambu           | Jl. Raya Legok Conggeang N0.69 Cipamker Conggeang KabupatenSumedang Jawa Barat 45391 | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Babakan Asem    |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 7.          | Padaasih        |                                                                                      |                                | √   | √       |               |                         |
|    |                | 8.          | Ungkal          |                                                                                      |                                | √   | √       |               |                         |
|    |                | 9.          | Karanglayung    | Jl. Ujungjaya Conggeang Babakan Asem Conggeang KabupatenSumedang Jawa Barat 45391    | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 10.         | Cacaban         | Cacaban Conggeang KabupatenSumedang Jawa Barat 45391                                 | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 11.         | Narimbang       |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 12.         | Cibubuan        |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
| 8  | Paseh          | 1.          | Paseh Kidul     | Jl. Siliwangi No.253 Paseh Kidul Kec. Paseh KabupatenSumedang Jawa Barat 45381       | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Paseh Kaler     |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 3.          | Legok Kidul     |                                                                                      |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |              | Alamat                                                                                    | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket. |
|----|----------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|------|
|    |                |             |              |                                                                                           | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |      |
|    |                | 4.          | Legok Kaler  | Jl. Padjajaran Legok Kaler Kec.Paseh KabupatenSumedang Jawa Barat                         | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 5.          | Bongkok      |                                                                                           |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 6.          | Padanaan     |                                                                                           |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 7.          | Pasireungit  |                                                                                           | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 8.          | Cijambe      | Cijambe Paseh KabupatenSumedang Jawa Barat 45381                                          | √                              | √   | √       |               |      |
|    |                | 9           | Haur Kuning  | Jl. Desa Haur Kuning no.12 Paseh Haurkuning Kec. Paseh KabupatenSumedang Jawa Barat 45381 | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 10          | Citepok      |                                                                                           |                                | √   |         |               |      |
| 9  | Surian         | 1           | Wanasari     |                                                                                           |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 2           | Wanajaya     |                                                                                           |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 3           | Pamekarsari  |                                                                                           |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 4           | Tanjung      |                                                                                           |                                | √   |         | √             |      |
|    |                | 5           | Surian       |                                                                                           |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 6           | Suriamukti   |                                                                                           |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 7           | Suriamedal   |                                                                                           |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 8           | Ranggasari   |                                                                                           |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 9           | Nanjungwangi |                                                                                           |                                | √   |         | √             |      |
| 10 | Buahdua        | 1.          | Buahdua      | Jl.Raya Buahdua No.1 Kec. Buahdua KabupatenSumedang Jawa Barat 45354                      | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 2.          | Hariang      | Jl.Buahdua Hariang KabupatenSumedang Jawa Barat 45354                                     | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 3.          | Karangbungur |                                                                                           |                                | √   | √       |               |      |

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |              | Alamat                                                                               | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket.                    |
|----|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-------------------------|
|    |                |             |              |                                                                                      | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |                         |
|    |                | 4.          | Mekarmukti   |                                                                                      |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 5.          | Citaleus     |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Nagrak       | Ngarak Buahdua KabupatenSumedang Jawa Barat 45354                                    | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 7.          | Cibitung     |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 8.          | Sekarwangi   | Conggeang Buahdua Sekarwangi kec.Buahdua Kabupatensumedang Jawa Barat 45354          | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 9.          | Gendereh     |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 10          | Panyindangan |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 11          | Cilangkap    | Jl.Raya Buahdua kec.Buahdua KabupatenSumedang Jawa Barat 45354                       | √                              | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 12          | Bojongloa    |                                                                                      |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 13.         | Cikurubuk    |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 14.         | Ciawitali    |                                                                                      |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
| 11 | Tanjungsari    | 1.          | Gudang       | Jl.Raya Tanjungsari No.365 Gudang Kec.Tanjungsari KabupatenSumedang Jawa Barat 45362 | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Tanjungsari  |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 3.          | Jatisari     |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 4.          | Margaluyu    |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 5.          | Kutamandiri  |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Margajaya    | Jl.Pamagersari Marga Jaya Kec.Tanjungsari KabupatenSumedang Jawa Barat 45362         | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 7.          | Raharja      |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 8.          | Cijambu      |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 9.          | Pasigaran    |                                                                                      |                                | √   |         |               |                         |



| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |              | Alamat                                                                                       | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket.                    |
|----|----------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-------------------------|
|    |                |             |              |                                                                                              | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |                         |
| 12 | Sukasari       | 10.         | Gunungmanik  | Jl.Gunungmanik Kec.Tanjungsari<br>KabupatenSumedang Jawa Barat 45362                         | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 11          | Kadakajaya   |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 12          | Cinanjung    |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 1.          | Sukasari     |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Genteng      |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 3.          | Banyuresmi   |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 4.          | Nanggerang   |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 5.          | Mekarsari    |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Sindangsari  |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 7.          | Sukarapih    | Sukarapi Sukasari KabupatenSumedang Jawa Barat<br>45366                                      | √                              | √   |         |               |                         |
| 13 | Pamulihan      | 1.          | Cigendel     |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Cijeruk      |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 3.          | Pamulihan    |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 4.          | Haurgombong  | Jl. Simoang Parakanmuncang Haurngombong Kec.<br>Pamulihan KabupatenSumedang Jawa Barat 45362 | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 5.          | Cilembu      | Jl. Raya Cilembu Desa Cilembu Kec. Pamulihan<br>KabupatenSumedang Jawa Barat 45365           | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Cimarias     |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 7.          | Cinanggerang |                                                                                              |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 8.          | Mekarbakti   | Jl. Desa Mekarbakti Desa mekarbakti kec. Pamulihan<br>KabupatenSumedang Jawa Barat 45365     | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 9.          | Sukawangi    |                                                                                              |                                | √   |         |               |                         |

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |               | Alamat                                                                                                  | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket.                    |
|----|----------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-------------------------|
|    |                |             |               |                                                                                                         | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |                         |
| 14 | Cimanggun<br>g | 10.         | Ciptasari     | Jl. Tanjungsari-Rancakalong No. 480a Ciptasarai<br>Kec. Pamulihan KabupatenSumedang Jawa Barat<br>45362 | √                              | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 11.         | Citali        |                                                                                                         |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 1.          | Cimanggung    | Cimanggung KabupatenSumedang Jawa Barat 45364                                                           | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Sindangpakuon | Jl. Parakanmuncang No.199 Sindangpakuon<br>Kec.Cimanggung KabupatenSumedang Jawa Barat<br>45364         | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 3.          | Tegalmanggung |                                                                                                         |                                | √   | √       |               |                         |
|    |                | 4.          | Sindulang     |                                                                                                         |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 5.          | Sindanggalih  |                                                                                                         |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Sawahdadap    | Jl. Sawah Dadap Mangunarga Kec.Cimanggung<br>KabupatenSumedang 45364                                    | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 7.          | Cikahuripan   |                                                                                                         |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 8.          | Sukadana      | Jl. Bunter No.13 Sukadana Kec.Cimanggung<br>KabupatenSumedang Jawa Barat 45364                          | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 9.          | Mangunarga    | Jl.Sawah Dadap No.16 Mangunarga Kec.<br>Cimanggung Sumedang Jawa Barat 45364                            | √                              | √   |         |               |                         |
| 15 | Jatinangor     | 10.         | Cihanjuang    | Cihanjuang Kec.Cimanggung KabupatenSumedang<br>Jawa Barat 45364                                         | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 11.         | Pasirnanjung  |                                                                                                         |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 1.          | Cikeruh       | Jl.Kolonel Ahmad Syam No.192 Cikeruh Jatinangor<br>Ka.Sumedang Jawa Barat 45363                         | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Hegarmanah    | Jl.Raya Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat<br>45363                                                | √                              | √   |         |               |                         |

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |             | Alamat                                                                                 | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket. |
|----|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|------|
|    |                |             |             |                                                                                        | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |      |
|    |                | 3.          | Cibeusi     | Jl.KH.Hasan Mustofa Cibeusi Kec.Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363          | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 4.          | Cipacing    | Cipacing Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363                                 | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 5.          | Sayang      | Jl.Kolonel Ahmad Syam no.226 Sayang Kec. Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363 | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 6.          | Mekargalih  | Mekargalih Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363                               | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 7.          | Cintamulya  | Cibungur No.76 Cinta Mulya Kec.Jatinangir Kabupaten,Sumedang Jawa Barat 45363          | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 8.          | Jatimukti   |                                                                                        |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 9.          | Cisempur    | Cisempur Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363                                 | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 10.         | Jatiroke    | Jl.Letda Lukito No.90 Jatiroke.Kec Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363       | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 11.         | Cileles     | Jl.Cikuda No.18 kec. Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363                     | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 12.         | Cilayung    |                                                                                        |                                | √   |         |               |      |
| 16 | Rancakalong    | 1.          | Nagarawangi | Nagarawangi Rancakalong KabupatenSumedang Jawa Barat 45361                             | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 2.          | Cibunar     |                                                                                        |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 3.          | Pangadegan  |                                                                                        |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 4.          | Sukahayu    | Sukahayu Rancakalong KabupatenSumedang Jawa Barat 45361                                | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 5.          | Sukamaju    |                                                                                        |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 6.          | Pamekaran   |                                                                                        |                                | √   |         |               |      |

| No | Nama Kecamatan   | Kantor Desa |                        | Alamat                                                                                      | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket. |
|----|------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|------|
|    |                  |             |                        |                                                                                             | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |      |
|    |                  | 7.          | Rancakalong            | Rancakalong KabupatenSumedang Jawa Barat 45361                                              | √                              | √   |         |               |      |
|    |                  | 8.          | Sukasirnarasa          |                                                                                             |                                | √   |         |               |      |
|    |                  | 9.          | Cibungur               |                                                                                             |                                | √   |         |               |      |
|    |                  | 10.         | Pasirbiru              | Pasir Biru rancakalong KabupatenSumedang Jawa Barat 45361                                   | √                              | √   |         |               |      |
| 17 | Sumedang Selatan | 1           | Sukagalih              | Sukagalih, Kec. Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311                         | √                              | √   |         |               |      |
|    |                  | 2           | Baginda                | Baginda Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311                                 | √                              | √   |         |               |      |
|    |                  | 3           | Cipancar               | Cipancar Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311                                | √                              | √   |         |               |      |
|    |                  | 4           | Citengah               | Jl.Pager betis Kec.Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311                      | √                              | √   |         |               |      |
|    |                  | 5           | Gunasari               | Jl.Suradinata Sembir Gunasari Kec.Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311       | √                              | √   |         |               |      |
|    |                  | 6           | Sukajaya               | Sukajaya Sumedang Selatan Jawa Barat 45311                                                  | √                              | √   |         |               |      |
|    |                  | 7           | Margamekar             |                                                                                             |                                | √   |         |               |      |
|    |                  | 8           | Ciherang               | Ciherang Sumedang Selatan Kabupatensumedang Jawa Barat 45311                                | √                              | √   |         |               |      |
|    |                  | 9           | Margalaksana           |                                                                                             |                                | √   |         |               |      |
|    |                  | 10          | Mekar Rahayu           |                                                                                             |                                | √   |         |               |      |
|    |                  | 11          | Kel. Regol Wetan       | Jl.Cut Nyak Dien No.29 Regol Wetan Kec.Sumedang Utara Jawa Barat 45311                      | √                              | √   |         |               |      |
|    |                  | 12          | Kel. Pasanggrahan Baru | KJl.Pangeran Kornel pasanggrah Baru Kec.Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311 | √                              | √   |         |               |      |

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |                   | Alamat                                                                                      | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket. |
|----|----------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|------|
|    |                |             |                   |                                                                                             | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |      |
|    |                | 13          | Kel. Kota Kulon   | Jl.Pangeran Santri No.73 Kotajulon Kec.Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311  | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 14          | Kel. Cipameunpeuk | Jl.Pager Betis No.42 Kel.Cipameungpeuk KabupatenSumedang Selatana Jawa Barat 45311          | √                              | √   |         |               |      |
| 18 | Sumedang Utara | 1           | Padasuka          | Padasaujka. Sumedang Utara KabupatenSumedang Jawa Barat 45621                               | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 2           | Mulyasari         |                                                                                             |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 3           | Girimukti         |                                                                                             |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 4           | Mekarjaya         | Margamukti Kec. Suedang Utara KabupatenSumedang Jawa Barata 45621                           |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 5           | Margamukti        |                                                                                             | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 6           | Sirnamulya        |                                                                                             |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 7           | Kebonjati         | Kebonjati Kec.Sumedang Utara KabupatenSumedang Jawa Barat 45621                             | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 8           | Jatihurip         |                                                                                             |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 9           | Jatimulya         |                                                                                             |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 10          | Rancamulya        |                                                                                             |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 11          | Kel.Situ          | Jl;.Karapyak No.12 Situ.Kec.Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45621              | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 12          | Kel.Talun         | Jl. Talun Kec Sumedang Utara KabupatenSumedang Jawa Barat 45621                             | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 13          | Kel.Kota Kaler    | Jl.Mayor Abdurahman No.214 Kota Kaler Kec.Sumedang Utara KabupatenSumedang Jawa Barat 45621 | √                              | √   |         |               |      |
| 19 | Ganeas         | 1.          | Ganeas            | Ganeas Kec. Ganeas KabupatenSumedang Jawa Barat 45365                                       | √                              | √   |         |               |      |

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |                | Alamat                                                                | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket. |
|----|----------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|------|
|    |                |             |                |                                                                       | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |      |
|    |                | 2.          | Dayeuhluhur    |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 3.          | Cikoneng       |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 4.          | Sukaluyu       |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 5.          | Sukawening     |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 6.          | Tanjunghurip   |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 7.          | Cikondang      |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 8.          | Cikoneng Kulon |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
| 20 | Tanjungkerta   | 1.          | Sukamantri     | Sukamantri Tanjungkerta KabupatenSumedang Jawa Barat 45354            | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 2.          | Cipanas        | Cipanas Tanjungkerta KabupatenSumedang Jawa Barat 45354               | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 3.          | Gunturmekar    | Desa Guntur Mekar Kec.Tanjungjerta KabupatenSumedang Jawa Barat 45354 | √                              | √   | √       |               |      |
|    |                | 4.          | Mulyamekar     |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 5.          | Banyuasih      | Banyuasih Tanjungkerta KabupatenSumedang Jawa Barat 45354             | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 6.          | Kertamekar     |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 7.          | Kertaharja     |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 8.          | Cigentur       |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 9.          | Tanjungmekar   | Tanjungmekar, Kec.Tanjungkerta KabupatenSumedang Jawa Barat 45354     | √                              | √   |         |               |      |
|    |                | 10.         | Tanjungmulya   |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 11.         | Boros          |                                                                       |                                | √   |         |               |      |
|    |                | 12.         | Awilega        | Tanjungmulya Tanjungkerta KabupatenSumedang Jawa Barat 45354          | √                              | √   |         |               |      |

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |                 | Alamat                                                                          | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket.                    |
|----|----------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-------------------------|
|    |                |             |                 |                                                                                 | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |                         |
| 21 | Tanjungmedar   | 1.          | Cikaramas       | Cikaramas Tanjungmedar KabupatenSumedang Jawa Barat 45353                       | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Wargaluyu       |                                                                                 |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 3.          | Jingkang        |                                                                                 |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 4.          | Kamal           |                                                                                 |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 5.          | Kertamukti      |                                                                                 |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Tanjungwangi    |                                                                                 |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 7.          | Sukamukti       |                                                                                 |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 8.          | Sukatani        |                                                                                 |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 9.          | Tanjungmedar    |                                                                                 |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
| 22 | Cimalaka       | 1.          | Cimalaka        | Jl. Raya Cimalaka Kec. Cimalak KabupatenSumedang Jawa Barat 45353               | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Galudra         | Galudra Cimalaka KabupatenSumedang Jawa Barat 45353                             | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 3.          | Cibeureum Kulon |                                                                                 |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 4.          | Naluk           | Naluk Cimalak KabupatenSumedang Jawa Barat 45353                                | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 5.          | Nyalindung      |                                                                                 |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Trunamanggala   |                                                                                 |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 7.          | Cikole          |                                                                                 |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 8.          | Cibeureum Wetan | Jl.Raya Sumedang-Cirebo Desa Cibeureum Wetan KabupatenSumedang Jawa Barat 45353 | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 9.          | Mandalaherang   | Manadalaherang Cimalak KabupatenSumedang Jawa Barat 45353                       | √                              | √   |         |               |                         |



| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |               | Alamat                                                                           | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket.                    |
|----|----------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-------------------------|
|    |                |             |               |                                                                                  | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |                         |
|    |                | 10.         | Licin         | Jl.Margamukti No.72 RT.04 RW.05 Licin Cimalak KabupatenSumedang Jawa Barat 45353 | √                              | √   | √       |               |                         |
|    |                | 11.         | Citimun       | Citimun Cimalaka KabupatenSumedang Jawa Barat 45353                              | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 12.         | Serang        |                                                                                  |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 13.         | Padasari      |                                                                                  |                                | √   | √       |               |                         |
|    |                | 14.         | Cimuja        |                                                                                  |                                | √   |         |               |                         |
| 23 | Cisarua        | 1.          | Cisarua       | Cisarua, Kec. Cisarua KabupatenSumedang Jawa Barat                               | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Ciuyah        |                                                                                  |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 3.          | Cimara        |                                                                                  |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 4.          | Bantarmara    |                                                                                  |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 5.          | Cipandanwangi |                                                                                  |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Cisalak       |                                                                                  |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 7           | Kebon Kalapa  | Kebon Kalapa Cisarua KabupatenSumedang Jawa Barat 4535                           | √                              | √   |         |               |                         |
| 24 | Tomo           | 1.          | Tomo          | Jl. Nasional 5 No.1945 Kec. Tomo KabupatenSumedang Jawa Barat 45382              | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Tolengas      | Jl. Tolengas Kec. Tomo KabupatenSumedang Jawa Barat 45382                        | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 3.          | Darmawangi    | Darmawangi Kec. Tomo KabupatenSumedang Jawa Barat 45382                          | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 4.          | Marongge      |                                                                                  |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 5.          | Jembarwangi   |                                                                                  |                                | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |             | Alamat                                                                | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket.                    |
|----|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-------------------------|
|    |                |             |             |                                                                       | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |                         |
|    |                | 6.          | Bugel       | Bugel Kec.Tomo KabupatenSumedang Jawa Barat 45382                     | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 7.          | Cipeles     | Jl.Desa Cipeles Kec.Tomo KabupatenSumedang Jawa Barat 45382           | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 8.          | Karyamukti  | Jl. Karyamukti Kec. Tomo Ka.Sumedang Jawa Barat 45382                 | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 9.          | Mekarwangi  | Darmawangsi Kec. Tomo KabupatenSumedang Jawa Barat 45382              | √                              | √   |         |               | Sinyal GSM kurang Bagus |
| 25 | Ujungjaya      | 1.          | Ujungjaya   | Jl. Ujungjaya No.42 Kec.Ujungjaya KabupatenSumedang jawa Barat 45383  | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 2.          | Palabuan    | Palabuan Kec. Ujungjaya KabupatenSumedang Jawa Barat 45383            | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 3.          | Palasari    | Palasari, Kec. Ujungjaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45383          | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 4.          | Keboncau    | Jl. Kebon Cau Ujung Jaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45383          | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 5.          | Sakurjaya   | Jl. Ujungjaya Kec.Ujungjaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45383       | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Kudangwangi | Kudangwangi kec. Ujungjaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45383        | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 7.          | Sukamulya   | Sukamulya, Ujungjaya KabupatenSumedang Jawa Barat 45383               | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 8.          | Cipelang    |                                                                       |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 9.          | Cibuluh     |                                                                       |                                | √   |         |               |                         |
| 26 | Jatigede       | 1.          | Cijeungjing | Cijeungjing Jatigede Kec. Jatigede KabupatenSumedang Jawa Barat 45377 | √                              | √   |         |               |                         |

| No | Nama Kecamatan | Kantor Desa |           | Alamat                                               | Layanan Internet yang tersedia |     |         |               | Ket.                    |
|----|----------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-------------------------|
|    |                |             |           |                                                      | Fiber Optik<br>Telkomsel       | GSM | Satelit | Blank<br>Spot |                         |
|    |                | 2           | Kadujaya  | Kadujaya Jatigede KabupatenSumedang Jawa Barat 45377 | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 3           | Lebaksiuh |                                                      |                                | √   | √       | √             |                         |
|    |                | 4           | Cintajaya |                                                      |                                | √   |         | √             | Sinyal GSM kurang Bagus |
|    |                | 5.          | Cipicung  | Cipicung Jatigede KabupatenSumedang Jawa Barat 45377 | √                              | √   |         |               |                         |
|    |                | 6.          | Mekarasih |                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 7           | Ciranggem |                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 8           | Cisampih  |                                                      |                                | √   | √       | √             |                         |
|    |                | 9           | Jemah     |                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 10          | Karedok   |                                                      |                                | √   |         |               |                         |
|    |                | 11          | Kadu      |                                                      |                                | √   | √       |               |                         |

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2022)

#### **2.4.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal.

##### **1) Koperasi**

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Berdasarkan statusnya koperasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu koperasi aktif dan koperasi tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota, sedangkan koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha. Selain dari status keaktifan koperasi pun terbagi menjadi koperasi sehat dan tidak sehat. Indikator suatu koperasi dinyatakan sehat dinilai dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Berikut adalah Jumlah Koperasi Status Aktif dan Sehat di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022.

**Gambar 2.97**  
**Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat (unit)**  
**Tahun 2018-2022**



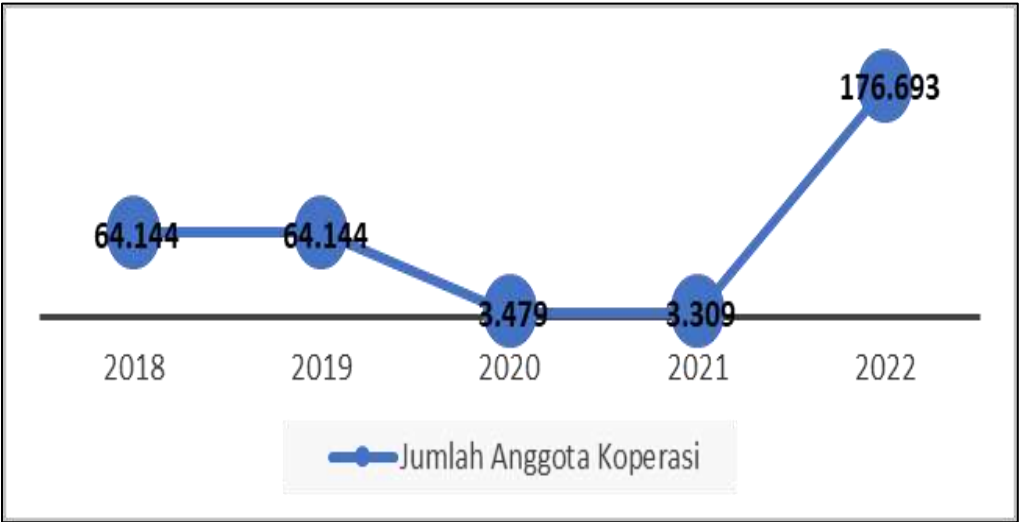
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

Jumlah koperasi aktif dan koperasi sehat di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya menjadi 355 koperasi, ini terjadi karena pendataan koperasi dilakukan secara *Online Data System* (ODS) sehingga pendataan koperasi menjadi lebih akurat. Lain halnya dengan jumlah koperasi sehat yang mengalami penurunan jumlah pada Tahun 2022 menjadi 60 koperasi atau turun 156 koperasi dari tahun sebelumnya. Data koperasi sehat pada tahun 2021 ditentukan dengan jumlah koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan, sedangkan penentuan jumlah koperasi sehat pada tahun 2022 berdasarkan beberapa indikator koperasi sehat yang ditentukan oleh tim penilai.

Peningkatan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sumedang juga berdampak terhadap peningkatan jumlah anggota koperasi yang cukup signifikan. Tercatat bahwa pada Tahun 2022 jumlah anggota koperasi mencapai 176.693 orang. Peningkatan ini sebagai dampak dari penerapan *Online Data System* (ODS) dari Kementerian Koperasi sehingga data koperasi menjadi lebih akurat selain itu juga meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa koperasi dapat menjadi wadah ekonomi yang sehat dan menguntungkan. Data

jumlah anggota koperasi di Kabupaten Sumedang disajikan pada Gambar dibawah ini.

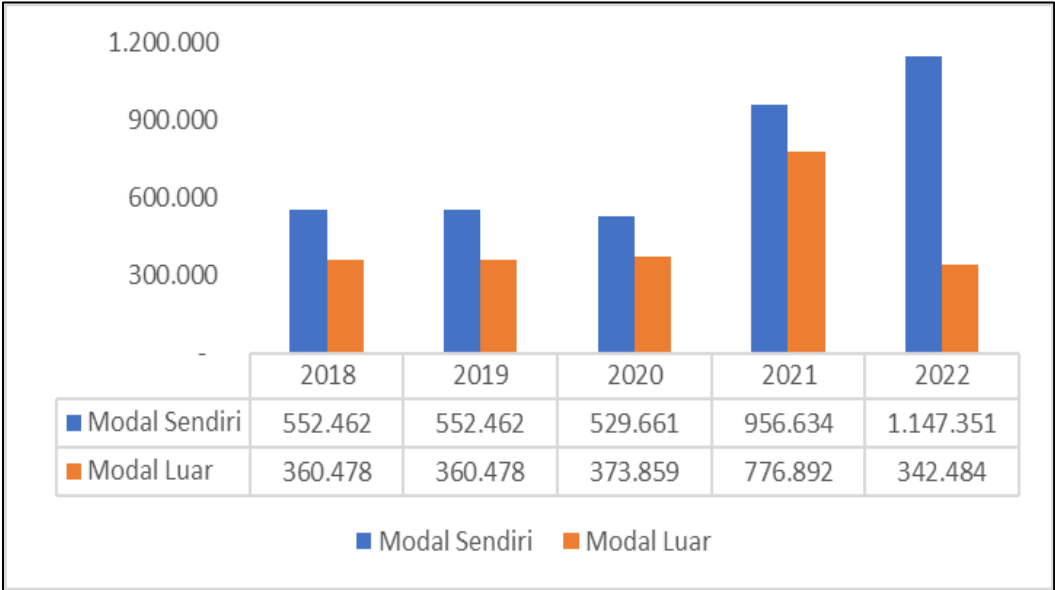
**Gambar 2.98**  
**Jumlah Anggota Koperasi (orang) Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

Banyaknya jumlah anggota koperasi juga berdampak pada sumber permodalan koperasi yang ada di Kabupaten Sumedang. Sumber permodalan koperasi berasal dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman. Modal sendiri atau disebut juga modal ekuiti yaitu modal yang berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal luar/pinjaman merupakan modal yang dipinjam koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank/lembaga keuangan, penerbitan obligasi/surat berharga dan sumber lainnya. Sumber permodalan sangat mempengaruhi terhadap rentabilitas usaha koperasi. Sumber permodalan koperasi disajikan pada Gambar berikut.

**Gambar 2.99**  
**Sumber Permodalan Koperasi (Juta Rupiah)**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

Berdasarkan data Gambar diatas bahwa permodalan koperasi yang bersumber dari modal sendiri terus mengalami peningkatan, seiring dengan terus bertambahnya jumlah keanggotaan, terutama pada Tahun 2022 yang mencapai Rp. 1,147 T. Tingginya modal sendiri akan berpengaruh signifikan terhadap pelayanan dan sisa hasil usaha anggota.

Permodalan luar/pinjaman koperasi pun menunjukkan perkembangan positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan jumlah modal luar dari Rp. 776.892 jt pada tahun 2021 menjadi Rp. 342.484 jt pada tahun 2022. Dengan semakin turunnya permodalan luar/pinjaman mengindikasikan kemandirian permodalan koperasi semakin baik.

**2) Usaha Kecil dan Menengah**

Usaha kecil dan menengah atau UKM merupakan jenis usaha yang meliputi industri dan perdagangan. UKM memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan dan jumlah UKM di Kabupaten Sumedang ini juga cukup besar. Gambar 2.100 Berikut adalah jumlah UKM yang terdapat di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022.

**Gambar 2.100**  
**Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2018-2022 mengalami tren positif. Lonjakan tertinggi di Tahun 2021 tercatat terdapat 61.567 UKM. Adanya regulasi yang mendukung percepatan perizinan UKM di Kabupaten Sumedang tercipta UKM-UKM baru dan jumlahnya terus meningkat menjadi 63.225 UKM pada tahun 2022.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas, kualitas usaha, serta pengelolaan modal usaha, Pemerintah Daerah mengadakan pelatihan yang diikuti oleh UKM. Adapun jumlah UKM yang telah mendapatkan pelatihan disajikan pada Gambar 2.101 berikut.



**Gambar 2.101**  
**Jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang Mendapatkan Pelatihan Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

Jumlah UKM yang telah mendapatkan pelatihan tertinggi pada tahun 2020 mencapai 1.670 UKM, dan terus menurun hingga pada tahun 2022 hanya 580 UKM yang dilatih. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya pembatasan jumlah UKM serta beberapa persyaratan yang harus ditempuh oleh UKM calon peserta pelatihan, sehingga tidak semua UKM mendapatkan pelatihan.

Bentuk lain dukungan Pemerintah Daerah terhadap UKM di Kabupaten Sumedang, salah satunya ialah dengan mempermudah akses permodalan. Pemerintah Daerah membentuk suatu regulasi dan kebijakan dalam bentuk bantuan permodalan. Bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan bantuan permodalan dengan beban cicilan yang ringan. Dengan adanya bantuan tersebut terjadi peningkatan pinjaman kepada Bank umum bagi UMKM trend nya sangat positif. pada Tahun 2021 totalnya mencapai kurang lebih Rp.4.733.759.000,-. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.44**  
**Pinjaman Bank Umum Kepada UMKM Kabupaten Sumedang**  
**Berdasarkan Skala Usaha (Ribu Rupiah) Tahun 2018-2022**

| Skala    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mikro    | 1.505.615 | 1.736.725 | 1.419.153 | 2.583.275 | 3.158.217 |
| Kecil    | 920.990   | 1.075.272 | 1.279.222 | 1.557.103 | 1.375.118 |
| Menengah | 580.465   | 556.910   | 931.254   | 593.382   | 382.976   |
| Jumlah   | 3/007.069 | 3.368.907 | 3.629.629 | 4.733.759 | 4.916.311 |

*Sumber : Bank Indonesia (2023)*

Dari Tabel 2.43, dapat dijabarkan pinjaman Bank dan BPR kepada UMKM berdasarkan lapangan usaha. Untuk lebih detil dapat dilihat pada Tabel 2.44 berikut.

**Tabel 2.45**  
**Pinjaman Bank Umum dan BPR Kepada UMKM Kabupaten Sumedang**  
**Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022**

| LAPANGAN USAHA                                           | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1)                                                      | (2)       | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                       | 79.300    | 133.654   | 219.700   | 346.983   | 530.718   |
| Pertambangan dan Penggalian                              | 39.925    | 33.716    | 21.270    | 19.712    | 15.912    |
| Industri Pengolahan                                      | 275.372   | 288.804   | 359.627   | 558.572   | 597.292   |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                | 1.670     | 6.785     | 6.535     | 5.754     | 4.211     |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1.534     | 3.422     | 3.994     | 4.529     | 4.077     |
| Konstruksi                                               | 241.272   | 259.484   | 222.090   | 286.641   | 161.002   |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor   | 1.815.662 | 1.978.810 | 2.163.931 | 2.850.347 | 3.031.906 |
| Transportasi dan Pergudangan                             | 138.446   | 217.833   | 153.106   | 47.112    | 69.072    |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                     | 38.139    | 46.759    | 77.458    | 136.885   | 152.681   |
| Informasi dan Komunikasi                                 | 1.625     | 1.695     | 3.318     | 2.633     | 3.767     |

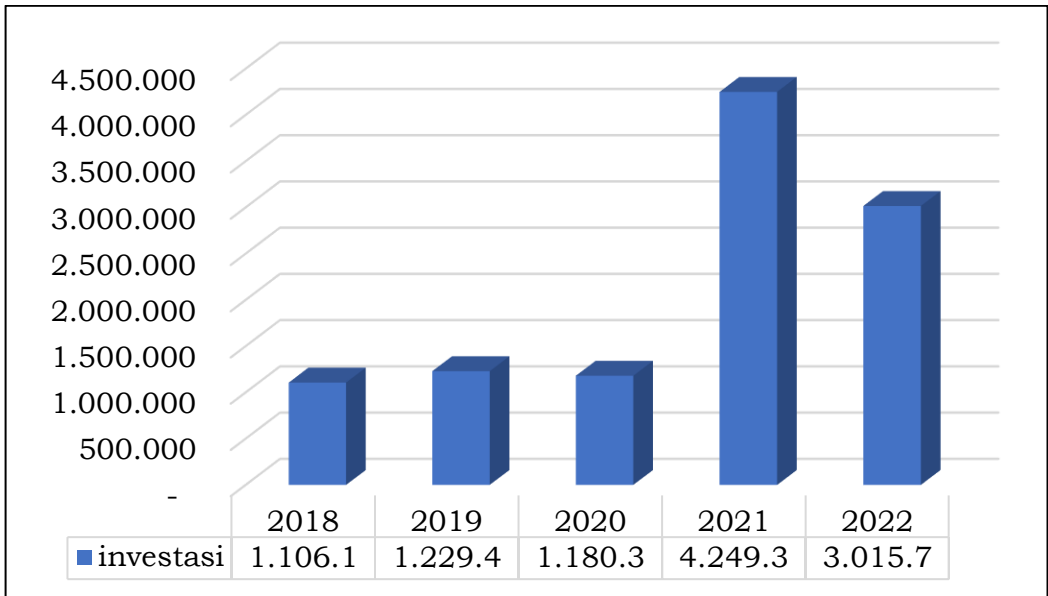
| LAPANGAN USAHA                                                  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1)                                                             | (2)       | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       |
| Jasa Keuangan Dan Asuransi                                      | 51.706    | 44.768    | 48.374    | 94.438    | 61.987    |
| Real Estate                                                     | 158.365   | 155.842   | 153.249   | 156.651   | 19.516    |
| Jasa Perusahaan                                                 | 38.461    | 34.738    | 27.161    | 26.784    | 31.699    |
| Admministrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | 0         | 153       | 114       | 78        | 39        |
| Jasa Pendidikan                                                 | 5.745     | 15.324    | 17.046    | 7.991     | 10.385    |
| Jasa Kesehatan Dan Kegiatan lainnya                             | 25.411    | 28.826    | 22.400    | 32.364    | 42.997    |
| Jasa Lainnya                                                    | 94.437    | 118.256   | 130.256   | 156.285   | 179.052   |
| Total                                                           | 3.007.069 | 3.368.907 | 3.629.629 | 4.733.759 | 4.916.311 |

Sumber : Bank Indonesia (2022) (Diolah)

**2.4.2.12.Urusan Penanaman Modal**

Investasi atau penanaman modal merupakan bentuk kegiatan yang sangat berpengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten dimana tentunya membuka lapangan pekerjaan dan menggali potensi-potensi ekonomi berbasis kemasyarakatan. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan investasi disebabkan oleh pembangunan Jalan Tol Cisumdawu sudah selesai, sehingga investasi pada Tahun 2022 hanya mencapai Rp. 3.015.702.714.481,-. untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.102 di bawah ini.

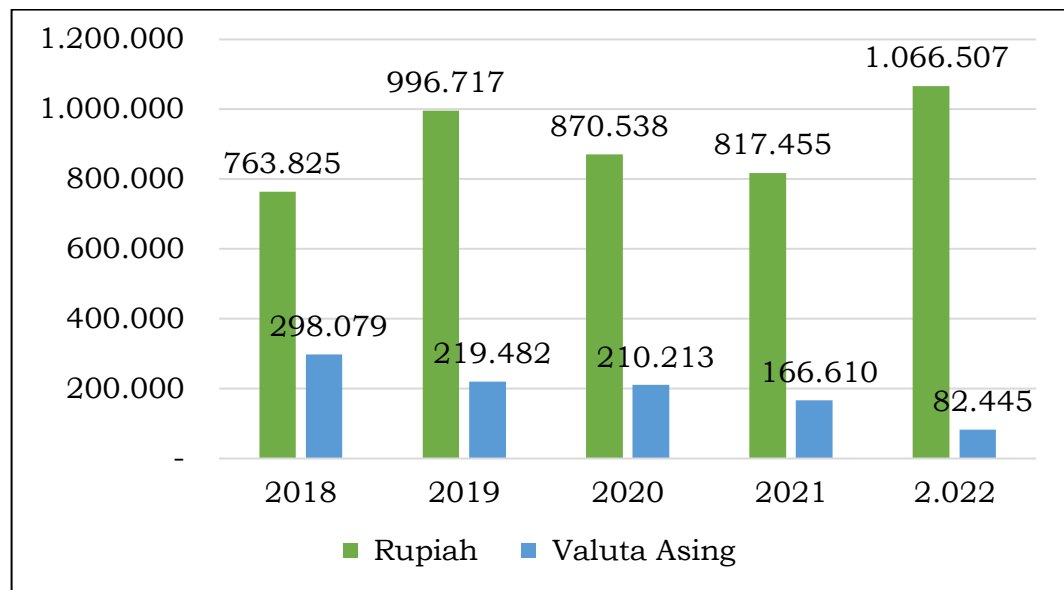
**Gambar 2.102**  
**Investasi di Kabupaten Sumedang (Juta Rupiah)**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : DPMPSTP (2023)

Investasi dapat berupa pinjaman investasi yang merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru dan atau kebutuhan khusus terkait investasi. Pinjaman Investasi selain dalam bentuk rupiah ada pula dalam bentuk valuta asing. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan pinjaman investasi dalam bentuk valuta asing. Untuk lebih detil dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

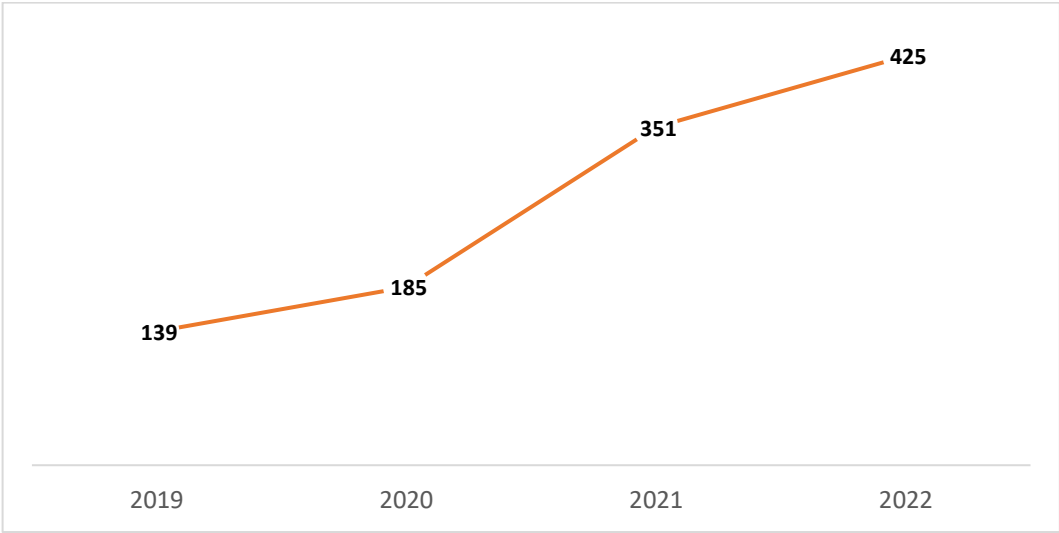
**Gambar 2.103**  
**Pinjaman Investasi dari Bank Umum dan BPR Berdasarkan Jenis Mata Uang (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022**



Sumber : Bank Indonesia (2022) (diolah)

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM yang rutin dilaporkan oleh pelaku usaha, pemerintah bisa mendapatkan data yang valid untuk merumuskan kebijakan yang efektif guna memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berusaha. Peningkatan pelaporan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 meningkat secara Fluktuatif mencapai 351 pelaku usaha yang melaporkan. Peningkatan tersebut dampak dari kemudahan dalam menyampaikan laporan secara online. Secara detail dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 2.104**  
**Perusahaan yang Menyampaikan LKPM**  
**Tahun 2019-2022**



Sumber : DPMPTSP (2022)

**2.4.2.13.Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Pemuda merupakan generasi produktif yang harus dipersiapkan dalam menghadapi era global yang semakin pesat berkembang. Disini peran Pemerintah sangat kuat dalam mempersiapkan generasi muda yang tangguh dan mampu menjadi *Agent of Change* serta dituntut dapat memberikan dampak yang positif di lingkungannya. Di Kabupaten Sumedang sendiri terdapat 96 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang dibina oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumedang. KNPI sendiri berfungsi sebagai wadah perjuangan pemuda dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, selain itu juga sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi OKP dalam meningkatkan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan social. Berikut adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.46**  
**Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)**  
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| No | Nama OKP                                       |
|----|------------------------------------------------|
| 1  | Angkatan Muda Demokrat Indonesia               |
| 2  | Angkatan Muda Kabah Kabupaten Sumedang         |
| 3  | Angkatan Muda Partai Golkar Kabupaten Sumedang |

| No | Nama OKP                                               |
|----|--------------------------------------------------------|
| 4  | Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Kabupaten Sumedang |
| 5  | Banteng Muda Indonesia Kabupaten Sumedang              |
| 6  | Barisan Muda Kosgoro 1957 Kabupaten Sumedang           |
| 7  | BKPRMI Kabupaten Sumedang                              |
| 8  | Baladika Karya Kabupaten Sumedang                      |
| 9  | BM PAN Kabupaten Sumedang                              |
| 10 | Bamusi Kabupaten Sumedang                              |
| 11 | Brigade Hizbullah                                      |
| 12 | Brigez Indonesia Kabupaten Sumedang                    |
| 13 | Fatayat Nu Kabupaten Sumedang                          |
| 14 | FKPPK Kabupaten Sumedang                               |
| 15 | Fokusmaker Kabupaten Sumedang                          |
| 16 | GAMKI Kabupaten Sumedang                               |
| 17 | Garda Bangsa Kabupaten Sumedang                        |
| 18 | Gema Keadilan                                          |
| 19 | Gema Kosgoro Kabupaten Sumedang                        |
| 20 | Gema Mkgr Kabupaten Sumedang                           |
| 21 | Gema Ormas Mkgr Kabupaten Sumedang                     |
| 22 | Gempa Bbc Kabupaten Sumedang                           |
| 23 | Generasi Muda Ams Kabupaten Sumedang                   |
| 24 | Generasi Muda Bbc                                      |
| 25 | Generasi Muda Kosgoro Kabupaten Sumedang               |
| 26 | Gerakan Pemuda Islam Kabupaten Sumedang                |
| 27 | Gerakan Pemuda Ka'bah Kabupaten Sumedang               |
| 28 | Gerakan Pemuda Perjuangan Kabupaten Sumedang           |
| 29 | Gerakan Pemuda Sehat                                   |
| 30 | Gerakan Siswa Nasionalis Indonesia                     |
| 31 | Gibas Resort Kabupaten Sumedang                        |
| 32 | GKPI Kabupaten Sumedang                                |
| 33 | GM FKPPI Kabupaten Sumedang                            |



| No | Nama OKP                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 34 | GMII Kabupaten Sumedang                                      |
| 35 | GMKI Kabupaten Sumedang                                      |
| 36 | GMNI Kabupaten Sumedang                                      |
| 37 | GMPI Kabupaten Sumedang                                      |
| 38 | GP Anshor Kabupaten Sumedang                                 |
| 39 | GPM Gibas Kabupaten Sumedang                                 |
| 40 | Hima Kosgoro '57 Kabupaten Sumedang                          |
| 41 | Himpunan Wanita Karya                                        |
| 42 | Hipmi Kabupaten Sumedang                                     |
| 43 | Hmi Kabupaten Sumedang                                       |
| 44 | Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Kabupaten Sumedang |
| 45 | Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sumedang             |
| 46 | Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Sumedang                       |
| 47 | Ikatan Remaja Muhammadiyah Kabupaten Sumedang                |
| 48 | Ima AMS Kabupaten Sumedang                                   |
| 49 | Ikatan Pelajar Muhamdiyah                                    |
| 50 | IPNU Kabupaten Sumedang                                      |
| 51 | IPPNU Kabupaten Sumedang                                     |
| 52 | IPPWI Kabupaten Sumedang                                     |
| 53 | IPTI Kabupaten Sumedang                                      |
| 54 | Ismakes Kabupaten Sumedang                                   |
| 55 | Keluarga Besar Putra Putri Polri Kabupaten Sumedang          |
| 56 | KIM-PG                                                       |
| 57 | KMNU Kabupaten Sumedang                                      |
| 58 | Kohati Kabupaten Sumedang                                    |
| 59 | Koti Mahatidana Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang          |
| 60 | Mapancas Kabupaten Sumedang                                  |
| 61 | Nasyiatul Aisiyah Kabupaten Sumedang                         |
| 62 | Pemuda Bulan Bintang Kabupaten Sumedang                      |
| 63 | Pemuda Demokrat Kabupaten Sumedang                           |

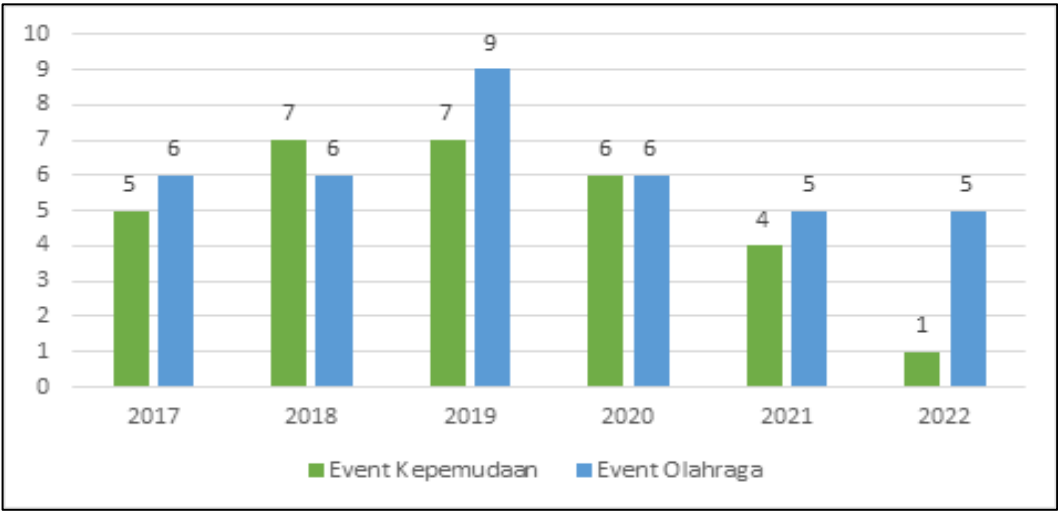
| No | Nama OKP                                        |
|----|-------------------------------------------------|
| 64 | Pemuda Justisia Kabupaten Sumedang              |
| 65 | Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumedang          |
| 66 | Pemuda Muslimin Kabupaten Sumedang              |
| 67 | Pemuda Panca Marga Kabupaten Sumedang           |
| 68 | Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang             |
| 69 | Pemuda Peduli Bangsa Kabupaten Sumedang         |
| 70 | Pemuda Persis Kabupaten Sumedang                |
| 71 | Pemuda Pui Kabupaten Sumedang                   |
| 72 | Pemudi Persis Kabupaten Sumedang                |
| 73 | Pitaloka Siliwangi Kabupaten Sumedang           |
| 74 | PMII Kabupaten Sumedang                         |
| 75 | PMKRI Kabupaten Sumedang                        |
| 76 | Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sumedang   |
| 77 | Refdem Kabupaten Sumedang                       |
| 78 | Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang       |
| 79 | Srikandi Demokrasi Kabupaten Sumedang           |
| 80 | Senkom Polri                                    |
| 81 | Srikandi Pancasila Kabupaten Sumedang           |
| 82 | Taruna Merah Putih Kabupaten Sumedang           |
| 83 | Wanita Swadiri Kabupaten Sumedang               |
| 84 | Wira Karya Indonesia Kabupaten Sumedang         |
| 85 | Tunas Indonesia Raya                            |
| 86 | Satria Gerindra                                 |
| 87 | Perempuan Indonesia Raya                        |
| 88 | Gema Nasdem                                     |
| 89 | Gerakan Mahasiswa Kebangkitan Bangsa (Gemasaba) |
| 90 | Perempuan Bangsa                                |
| 91 | Barak Bangsa                                    |
| 92 | Damas                                           |
| 93 | Generasi Muda Demokrat                          |

| No | Nama OKP                     |
|----|------------------------------|
| 94 | Barisan Massa Demokrat       |
| 95 | Gatara                       |
| 96 | Wanita Persatuan Pembangunan |

Sumber : KNPI Kabupaten Sumedang, 2022

Agar dapat terarah secara positif dalam mengembangkan potensi diri tentunya harus didukung oleh penyelenggaraan event kepemudaan dan olahraga. Namun kondisi saat ini pada Tahun 2022 hanya ada 1 (satu) *event* kepemudaan dan 5 (lima) *event* olahraga, kondisi tersebut dinilai masih belum optimal dalam pengembangan dan menyalurkan potensi serta bakat. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan baik berupa anggaran maupun kebijakan lainnya dalam penyelenggaraan *event-event* tersebut. Selanjutnya untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

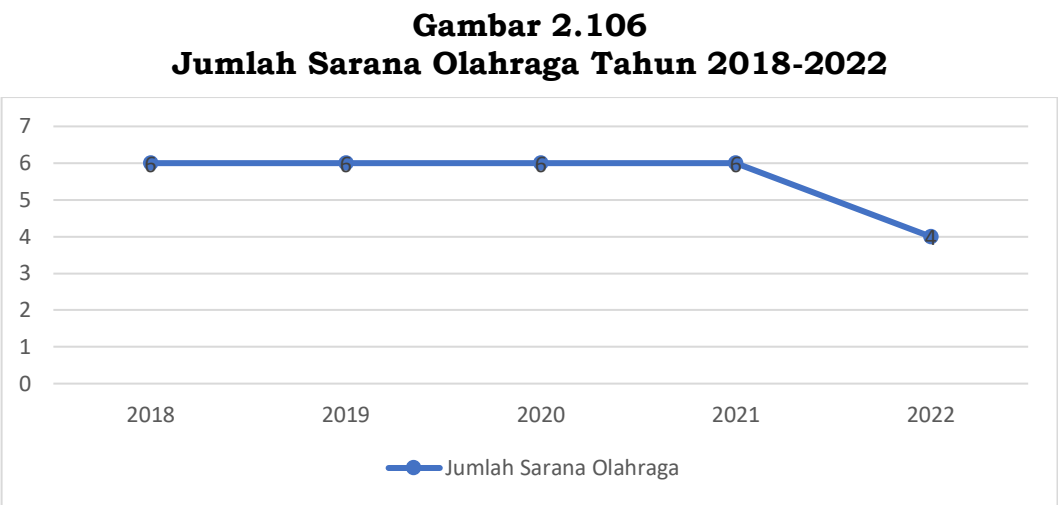
**Gambar 2.105**  
**Event Kepemudaan dan Event Olahraga**  
**Tahun 2019-2022**



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Selain pelaksanaan event olahraga tentunya harus didukung sarana olahraga yang memadai. Sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 belum ada penambahan sarana olahraga yang dikelola Pemerintah Daerah. Walaupun sampai saat ini Pemerintah Daerah berusaha melakukan peningkatan fasilitas olahraga namun dari

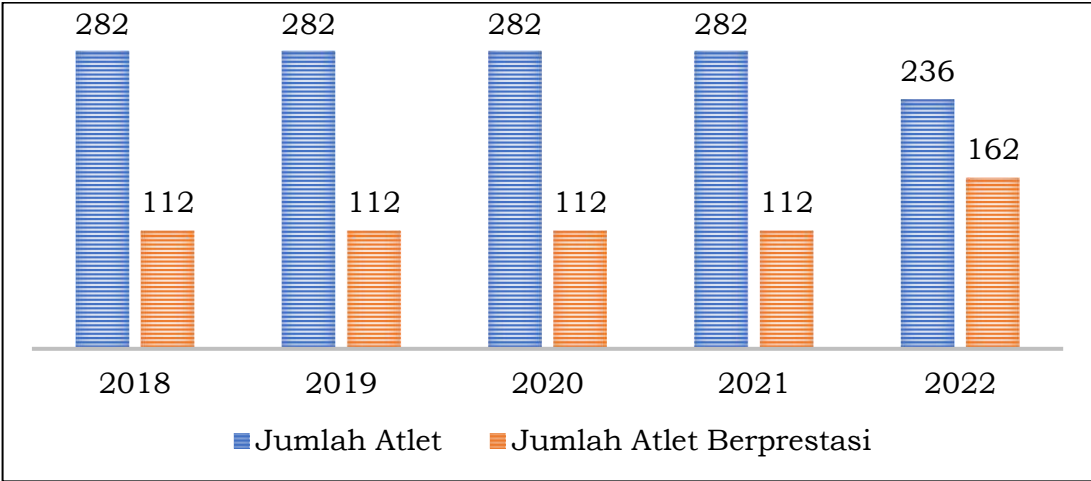
jumlah yang ada belum optimal dalam mendukung pengembangan potensi-potensi yang ada. Jumlah sarana olahraga dapat dilihat pada Gambar 2.106 berikut.



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Dengan kondisi sarana olahraga yang masih belum optimal tentunya berpengaruh terhadap capaian prestasi para atlet di Kabupaten Sumedang. Pada Tahun 2022, KONI Kabupaten Sumedang melakukan pembinaan terhadap 236 orang yang tersebar pada 43 cabang olah raga. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 282 atlet yang dibina. Penurunan ini dikarenakan ketatnya seleksi yang dilaksanakan oleh KONI Sumedang dalam menjaring atlet yang akan diperlombakan di berbagai kejuaraan. Namun demikian, meskipun jumlah atlet yang dibina menurun namun jumlah atlet yang berprestasi atau menyumbangkan medali dalam kejuaraan mengalami peningkatan menjadi 162 atlet dari sebelumnya hanya 112 orang. Jumlah Atlet dan Atlet Berprestasi di Kabupaten Sumedang disajikan pada Gambar 2.107 berikut.

**Gambar 2.107**  
**Jumlah Atlet dan Atlet Berprestasi**  
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**

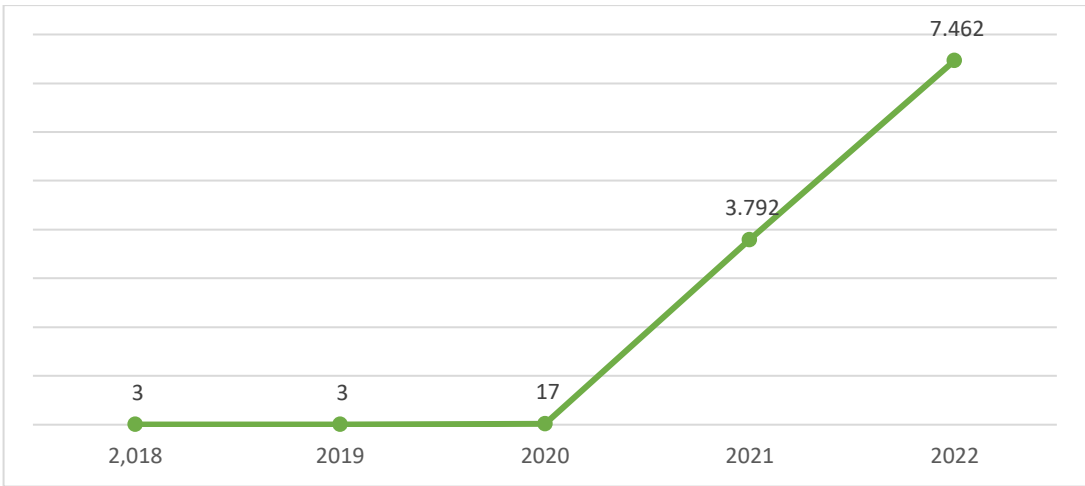


Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

**2.4.2.14. Urusan Statistik**

Ketersediaan data pada tahun 2018- 2022 dihitung berdasarkan dokumen data yang dihasilkan dan ditampilkan pada [opendata.sumedangkab.go.id](https://opendata.sumedangkab.go.id). Berikut ketersediaan data ditampilkan pada Gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.108**  
**Ketersediaan Data Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2023)

**2.4.2.15. Urusan Persandian**

Urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Modernisasi pemerintahan akan sangat

bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgeting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Jenis layanan publik yang diselenggarakan di Kabupaten Sumedang terbagi dalam layanan infrastruktur seperti server, jaringan dan NOC, serta aplikasi sistem informasi seperti *e-office* ASN, *e-office* Desa dan sistem kepegawaian.

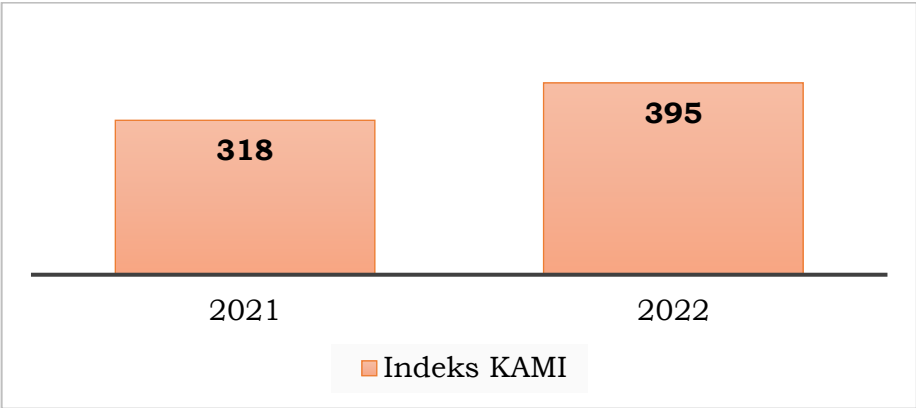
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disruptif pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan mitigasi keamanan baru agar proses bisnis pemerintahan dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Indeks KAMI bukan ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Dalam pengukurannya terdapat beberapa indikator yang diukur antara lain :

- a. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan;
- b. Tata Kelola Keamanan Informasi;
- c. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi;
- d. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
- e. Pengelolaan Aset Informasi;
- f. Teknologi dan Keamanan Informasi;
- g. Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (*Cloud Service*) dan Perlindungan Data Pribadi.

Pengukuran Indeks KAMI di Kabupaten Sumedang dimulai pada tahun 2021, dan berikut adalah hasil Assesment Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022.

Gambar 2.109  
Hasil Assesment Indeks KAMI Pemerintah  
Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.16.Urusan Kebudayaan

Kebudayaan menurut para ahli dapat diartikan sebagai hal kompleks yang mencakup beberapa hal di dalamnya seperti kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat serta kemampuan yang dapat diperoleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Kebudayaan dapat dikenali melalui cirinya seperti memiliki sifat yang dinamis serta selektif. Berikut adalah data pembangunan bidang seni dan budaya Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

Tabel 2.47  
Data Seni dan Budaya Tahun 2018-2022

| No | Variabel Seni dan Budaya                         | Tahun |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                                  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Objek Cagar Budaya                               | 21    | 21   | 21   | 32   | 39   |
| 2  | Pelaku Seni Budaya Dibina                        | 650   | 225  | 150  | 650  | 1141 |
| 3  | Pelaku Seni Budaya                               | 779   | 985  | 1021 | 1314 | 1500 |
| 4  | Promosi Event Kebudayaan                         | 6     | 4    | 4    | 4    | 32   |
| 5  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kebudayaan | 4     | 6    | 6    | 6    | 13   |

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

#### **a. Objek Cagar Budaya**

Cagar budaya diartikan sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jumlah objek cagar budaya di Kabupaten Sumedang mengalami penambahan sejak tahun 2021, dari 21 jenis objek cagar budaya menjadi 32 jenis objek cagar budaya. Dan pada Tahun 2022 jumlah objek cagar budaya bertambah 7 (tujuh) jenis objek sehingga jumlahnya menjadi 39 jenis objek cagar budaya yang terdiri dari situs, struktur, benda dan bangunan. Penambahan jumlah objek cagar budaya ini dikarenakan adanya penetapan situs dan/atau bangunan dan/atau struktur yang semula diduga sebagai objek cagar budaya menjadi objek cagar budaya.

#### **b. Seni Budaya**

Jenis seni budaya meliputi seni rupa, seni musik, seni tari, seni drama/teater dan seni kriya. Seni memiliki 2 (dua) fungsi yaitu : 1) sebagai fungsi praktis yang artinya fungsi karya seni yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam segi fungsional/benda pakai, serta 2) sebagai fungsi estetis yaitu karya seni yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dari segi hiasan. Jenis seni budaya yang dibina oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang meliputi seni tari, seni musik, seni tradisional/seni pertunjukan dan seni kemasan. Beberapa jenis seni budaya yang terdapat di Kabupaten Sumedang seperti Seni pertunjukan Tarawangsa dan Kuda renggong serta Seni Tari Jayengrana saat ini sedang dalam proses penetapan Warisan Budaya Indonesia.

Adapun jumlah pelaku seni budaya di Kabupaten Sumedang yang tercatat sampai dengan Tahun 2022 sekitar 1.500 orang, namun yang baru dibina baru 1.141 orang. Pembinaan pelaku seni dilakukan melalui pembinaan beberapa sanggar seni, sehingga diperkirakan masih terdapat pelaku seni yang terdaftar akan tetapi tidak tergabung dalam sanggar ataupun sanggar tidak/belum aktif.



### **c. Event Kebudayaan**

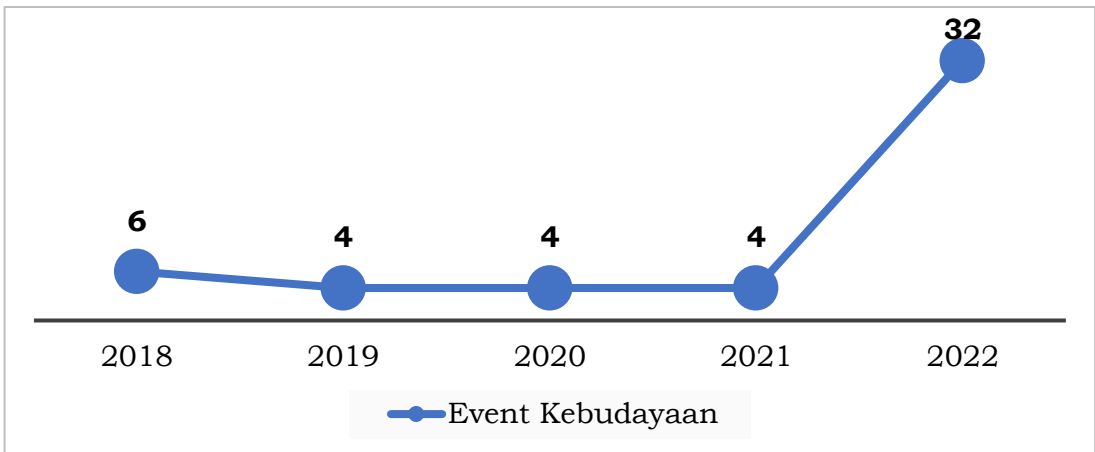
Penyelenggaraan event kebudayaan merupakan salah satu cara untuk mempromosikan, memperkenalkan serta melestarikan kebudayaan kasumedangan. Tahun 2021 pelaksanaan event kebudayaan hanya 4 (empat) kali dalam setahun dikarenakan adanya pandemi maka penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak orang ditiadakan. Akan tetapi pada tahun 2022, event kebudayaan sampai diselenggarakan 32 event, dan merupakan penyelenggaraan event terbanyak selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dilakukan dalam upaya melestarikan serta memperkenalkan kebudayaan Sumedang kepada generasi muda yang mulai tergerus arus modernisasi.

### **d. Sarana dan Prasarana pendukung Kebudayaan**

Sarana dan prasarana pendukung kebudayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan pada tahun 2022 jumlah sarana kebudayaan telah berjumlah 13 unit, yang meliputi Gedung kesenian, kendaraan, alat kesenian berupa gamelan, metal detector serta GPS.

Dalam upaya melestarikan kebudayaan serta menjaga nilai-nilai luhur budaya Pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya ialah melalui promosi dan mengenalkan budaya ke luar daerah baik nasional maupun internasional. Untuk melaksanakan hal tersebut diadakan event-event kebudayaan sebagai wadah promosi, menjaga dan melestarikan budaya serta kearifan lokal. Kegiatan event kebudayaan pada tahun 2022 hanya melaksanakan 32 kali dalam 1 (satu) tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.110 dibawah ini.

**Gambar 2.110**  
**Promosi Event Kebudayaan Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2022)

Jumlah event yang terjadi pada Tahun 2022 merupakan jumlah penyelenggaraan terbanyak selama 5 (lima) tahun terakhir. Dicabutnya larangan penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak orang mengakibatkan mulai meningkatnya penyelenggaraan event-event kebudayaan.

**2.4.2.17. Urusan Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting bagi semua lapisan masyarakat. Secara harfiah perpustakaan dapat diartikan sebagai suatu tempat yang berisi buku atau bahan lainnya yang diorganisasikan dan dipelihara untuk keperluan membaca atau dengan cara khusus memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui berbagai cara interaksi pengetahuan. Terdapat beberapa jenis perpustakaan yang ada di Indonesia antara lain : 1) Perpustakaan Sekolah; 2) Perpustakaan Perguruan Tinggi; 3) Perpustakaan Umum/Masyarakat; 4) Perpustakaan Khusus; dan 5) Perpustakaan Daerah. Dalam upaya meningkatkan minat literasi masyarakatnya, Kabupaten Sumedang membangun beberapa sarana literasi tidak hanya perpustakaan namun juga terdapat perpustakaan keliling dan pojok baca. Berikut adalah Jenis dan Jumlah Perpustakaan yang terdapat di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.48**  
**Jenis Perpustakaan Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2022**

| Jenis Perpustakaan            | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                               | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Perpustakaan Sekolah          | 881   | 881  | 881  | 881  | 954  |
| Perpustakaan Perguruan Tinggi | 10    | 10   | 10   | 10   | 9    |
| Perpustakaan Khusus           | 85    | 85   | 85   | 85   | 55   |
| Perpustakaan Desa             | 50    | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Perpustakaan Masyarakat       | 50    | 50   | 50   | 52   | 59   |
| Pojok Baca                    | n/a   | 5    | 6    | 7    | 14   |
| Perpustakaan Keliling         | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    |

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023)

Pada Tahun 2022 dilakukan pendataan perpustakaan berbasis wilayah oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, sehingga dapat terlihat kenaikan data yang cukup besar pada jumlah perpustakaan sekolah dari yang semula berjumlah 881 perpustakaan menjadi 954 perpustakaan atau mengalami kenaikan sebanyak 73 perpustakaan dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan perpustakaan perguruan tinggi yang setelah dilakukan pendataan per wilayah mengalami pengurangan jumlah.

Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya, baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan. Perpustakaan khusus di Kabupaten Sumedang meliputi perpustakaan SKPD, Kecamatan dan BUMD/BUMN. Tahun 2022 jumlah perpustakaan khusus menurun jumlahnya menjadi 55

perpustakaan dari jumlah 85 perpustakaan pada tahun 2021. Ini terjadi karena pendataan dilakukan pada SKPD/Kecamatan/BUMN/BUMD yang telah mengaplikasikan perpustakaan digital. Dengan demikian penggunaan perpustakaan digital belum dipergunakan secara maksimal.

Lain halnya dengan perpustakaan masyarakat dan pojok baca yang terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 perpustakaan masyarakat berjumlah 59 perpustakaan atau bertambah 7 perpustakaan dari tahun sebelumnya, begitu dengan pojok baca dari semula berjumlah 7 tempat pada tahun 2021 menjadi 14 tempat pada tahun 2022. Selain itu juga Dinas Arsip dan Perpustakaan Sumedang pun menyediakan pelayanan perpustakaan keliling. Sampai dengan Tahun 2022 armada/kendaraan perpustakaan keliling yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang masih berjumlah 3 (tiga) mobil. Pembangunan perpustakaan dan pojok baca serta pelayanan perpustakaan keliling ini ditujukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Sumedang sehingga berdampak pada peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat.

Kenaikan jumlah perpustakaan serta berakhirnya masa pandemi di Kabupaten Sumedang berdampak langsung pada jumlah kunjungan perpustakaan. Tahun 2021 merupakan capaian terendah kunjungan perpustakaan selama 5 (lima) tahun dengan jumlah pengunjung 3.778 orang. Jumlah kunjungan meningkat pada tahun 2022 menjadi 10.407 pengunjung. Peningkatan ini terjadi karena mulai dibuka kembali perpustakaan untuk dikunjungi. Berikut adalah data kunjungan perpustakaan di Kabupaten Sumedang.

**Gambar 2.111**  
**Jumlah Kunjungan Perpustakaan**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023)

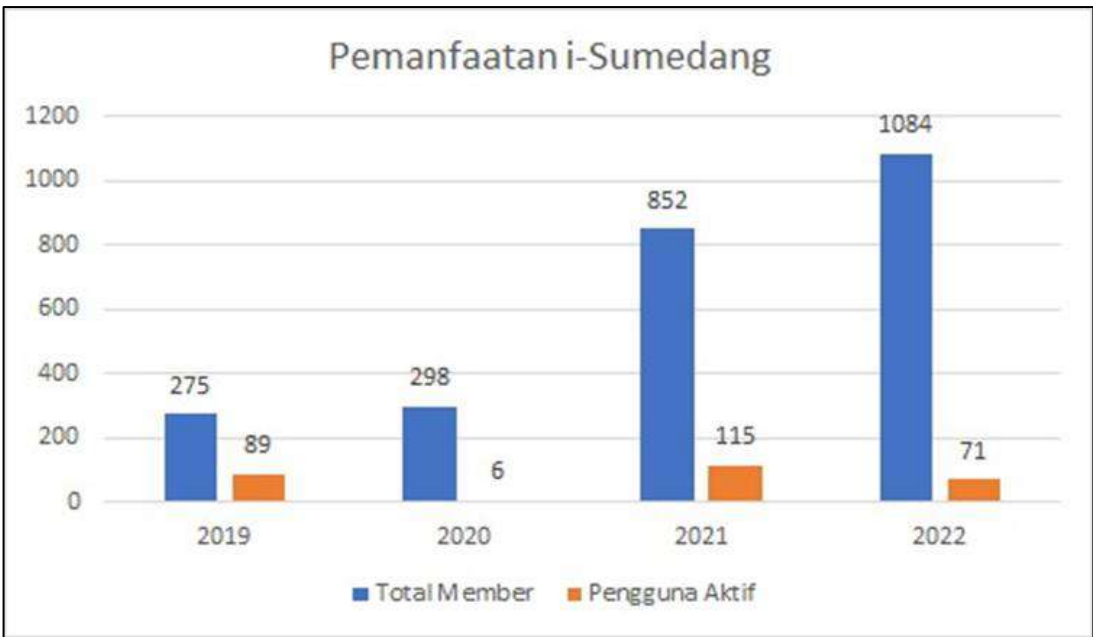
Memperhatikan jumlah perpustakaan dan pojok baca yang terdapat di Kabupaten Sumedang, tidak sebanding dengan jumlah pengelola Perpustakaan binaan Dinas dan Pustakawan yang tersedia. Tercatat jumlah pengelola perpustakaan binaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2022 berjumlah 86 orang sedangkan pustakawan berjumlah 3 (tiga) orang. Namun demikian keterbatasan jumlah pengelola perpustakaan serta pustakawan tidak menurunkan optimalisasi pelayanan perpustakaan.

Selain itu juga, sejak tahun 2019 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang telah mengembangkan ruang baca digital atau *Digital i-Sumedang* dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan perpustakaan. Tercatat jumlah pemanfaatan *Digital i-Sumedang* terus mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2022 jumlah pengguna *Digital i-Sumedang* mencapai 1084 anggota. Berbanding terbalik dengan jumlah pengguna aktifnya. Pengguna aktif ruang baca digital sangat fluktuatif. Pada tahun 2021, kenaikan signifikan terlihat dari total pengguna *Digital i-Sumedang* yang mencapai 115 pengguna aktif.

Dampak pandemi *covid-19* yang menyebabkan ditutupnya akses perpustakaan-perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang mengakibatkan akses *Digital i-Sumedang* mengalami peningkatan. Akan tetapi pada Tahun 2022 pemanfaatan *Digital i-Sumedang* mengalami penurunan jumlah pengguna aktif sebanyak 34 orang,

diasumsikan penurunan tersebut dikarenakan mulai dibukanya layanan perpustakaan serta kurangnya pembaharuan jenis buku digital yang disajikan pada layanan *Digital i-Sumedang*. Berikut adalah data pemanfaatan *Digital i-Sumedang* Tahun 2019-2022.

**Gambar 2.112**  
**Pemanfaatan Bacaan *Digital i-Sumedang***  
**Tahun 2019-2022**



Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023)

**2.4.2.18. Urusan Kearsipan**

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan fungsi dan kegunaannya arsip dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Arsip Statis dan Arsip Dinamis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Jenis arsip dinamis terbagi menjadi arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah

menurun, sedangkan arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. Berikut adalah data jumlah arsip aktif, arsip inaktif dan arsip statis di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.49**  
**Jumlah Arsip Aktif, Arsip Inaktif dan Arsip Statis**  
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**

| Jenis Arsip   | Tahun |      |       |        |         |
|---------------|-------|------|-------|--------|---------|
|               | 2018  | 2019 | 2020  | 2021   | 2022    |
| Arsip Aktif   | n/a   | n/a  | 1.452 | 671    | 425.938 |
| Arsip Inaktif | 2.588 | 3000 | 6.464 | 15.656 | 16.350  |
| Arsip Statis  | n/a   | n/a  | n/a   | 1.018  | 1.074   |

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023)

Berdasarkan Tabel 2.48 dapat dilihat bahwa semua jenis arsip mengalami penambahan jumlah. Data kenaikan yang signifikan terlihat pada jumlah arsip aktif yang mencapai 425.938 arsip. Pelaksanaan pembinaan serta penataan arsip yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Sumedang mengakibatkan terdata dan tertatanya arsip baik itu arsip aktif, arsip inaktif serta arsip pasif yang ada di Kabupaten Sumedang. Berikut adalah kondisi tempat penyimpanan arsip di setiap Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.50**  
**Tempat Penyimpanan Arsip di Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| No | Perangkat Daerah                          | Jenis Tempat Penyimpanan Arsip                                       | Kondisi       |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Sekretariat Daerah                        | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai       |
| 2  | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip,                                | Cukup Memadai |

| No | Perangkat Daerah                                        | Jenis Tempat Penyipanan Arsip                                        | Kondisi        |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | dan Pengembangan Daerah                                 | Filling Kabinet, Sekat, Folder                                       |                |
| 3  | Badan Pendapatan Daerah                                 | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Kurang Memadai |
| 4  | Badan Keuangan Dan Aset Daerah                          | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Kurang Memadai |
| 5  | Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia     | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Cukup Memadai  |
| 6  | Inspektorat                                             | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Cukup Memadai  |
| 7  | Sekretariat DPRD                                        | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 8  | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                    | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 9  | Dinas Perhubungan                                       | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Tidak Memadai  |
| 10 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan       | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 11 | Dinas Sosial                                            | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 12 | Dinas Arsip dan Perpustakaan                            | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Sangat Memadai |
| 13 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |



| No | Perangkat Daerah                                       | Jenis Tempat Penyipanan Arsip                                        | Kondisi        |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14 | Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian    | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Tidak Memadai  |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 16 | Dinas Pendidikan                                       | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Cukup Memadai  |
| 17 | Dinas Perikanan dan Peternakan                         | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Tidak Memadai  |
| 18 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                   | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 19 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Tidak Memadai  |
| 20 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Tidak Memadai  |
| 21 | DPPKB & P3A                                            | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Tidak Memadai  |
| 22 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Kurang Memadai |
| 23 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                    | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Kurang Memadai |
| 24 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Kurang Memadai |

| No | Perangkat Daerah                    | Jenis Tempat Penyimpanan Arsip                                       | Kondisi       |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa  | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Tidak Memadai |
| 26 | Dinas Kesehatan                     | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai       |
| 27 | Rumah Sakit Umum                    | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Tidak Memadai |
| 28 | Satuan Polisi Pamong Praja          | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Cukup Memadai |
| 29 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai       |
| 30 | Kecamatan Jatinangor                | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Cukup Memadai |
| 31 | Kecamatan Cimanggung                | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Tidak Memadai |
| 32 | Kecamatan Tanjungsari               | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai       |
| 33 | Kecamatan Sukasari                  | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Tidak Memadai |
| 34 | Kecamatan Pamulihan                 | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Tidak Memadai |
| 35 | Kecamatan Sumedang Selatan          | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai       |
| 36 | Kecamatan Sumedang Utara            | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip,                                | Memadai       |

| No | Perangkat Daerah      | Jenis Tempat Penyimpanan Arsip                                       | Kondisi        |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                       | Filling Kabinet, Sekat, Folder                                       |                |
| 37 | Kecamatan Ganeas      | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 38 | Kecamatan Cisarua     | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Tidak Memadai  |
| 39 | Kecamatan Cimalaka    | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 40 | Kecamatan Rancakalong | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 41 | Kecamatan Situraja    | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 42 | Kecamatan Darmaraja   | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Kurang Memadai |
| 43 | Kecamatan Wado        | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Kurang Memadai |
| 44 | Kecamatan Cibugel     | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Kurang Memadai |
| 45 | Kecamatan Jatinunggal | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 46 | Kecamatan Jatigede    | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 47 | Kecamatan Paseh       | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Kurang Memadai |

| No | Perangkat Daerah       | Jenis Tempat Penyimpanan Arsip                                       | Kondisi        |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 48 | Kecamatan Conggeang    | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 49 | Kecamatan Buahdua      | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Cukup Memadai  |
| 50 | Kecamatan Tanjungkerta | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 51 | Kecamatan Tanjungmedar | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Kurang Memadai |
| 52 | Kecamatan Surian       | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Cukup Memadai  |
| 53 | Kecamatan Tomo         | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Memadai        |
| 54 | Kecamatan Ujungjaya    | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Kurang Memadai |
| 55 | Kecamatan Cisit        | Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder | Kurang Memadai |

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (diolah) (2023)

Berdasarkan Tabel 2.49 dapat diketahui bahwa kondisi penyimpanan arsip di seluruh Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Sumedang masih banyak yang kurang memadai, sehingga diperlukan rekondisi tempat penyimpanan agar arsip yang telah diinventarisir dapat tertata dan terdokumentasikan dengan baik. Selain pendokumentasian, pemahaman akan pentingnya arsip sangat diperlukan. Tabel berikut adalah jumlah Sosialisasi Arsip terhadap

Perangkat Daerah dan BUMD yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

**Tabel 2.51**  
**Sosialisasi Pemahaman Arsip terhadap Perangkat Daerah dan BUMD Tahun 2022**

| NO     | LEMBAGA     | TAHUN |      |
|--------|-------------|-------|------|
|        |             | 2021  | 2022 |
| 1      | Dinas/Badan | 357   | 349  |
| 2      | Kecamatan   | 312   | 312  |
| 3      | BUMD        | -     | 2    |
| Jumlah |             | 669   | 663  |

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (diolah) (2023)

Sosialisasi pemahaman arsip pada Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan sebanyak 669 kali, dan dilakukan setiap bulan secara online. Sedangkan sosialisasi pada BUMD baru dilakukan pada Tahun 2022. Namun demikian pada tahun ini juga sosialisasi mengalami penurunan menjadi 663 kali, karena penyelenggaraan sosialisasi tidak dilakukan secara rutin setiap bulan.

Keberhasilan dalam pengelolaan arsip di Kabupaten Sumedang sangat ditunjang oleh sumber daya manusia yang memadai yang dalam hal ini memiliki keahlian dalam pengelolaan arsip. Adapun sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip atau dikenal dengan pejabat fungsional arsip (arsiparis) sampai dengan tahun 2022 berjumlah 27 orang. Penambahan jumlah arsiparis di Kabupaten Sumedang tersebut dikarenakan banyaknya ASN yang lulus dalam uji kompetensi sebagai arsiparis. Jumlah pejabat fungsional arsip di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 disajikan dalam Gambar di bawah ini.

**Gambar 2.113**  
**Jumlah Pejabat Fungsional Arsip di Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2022**



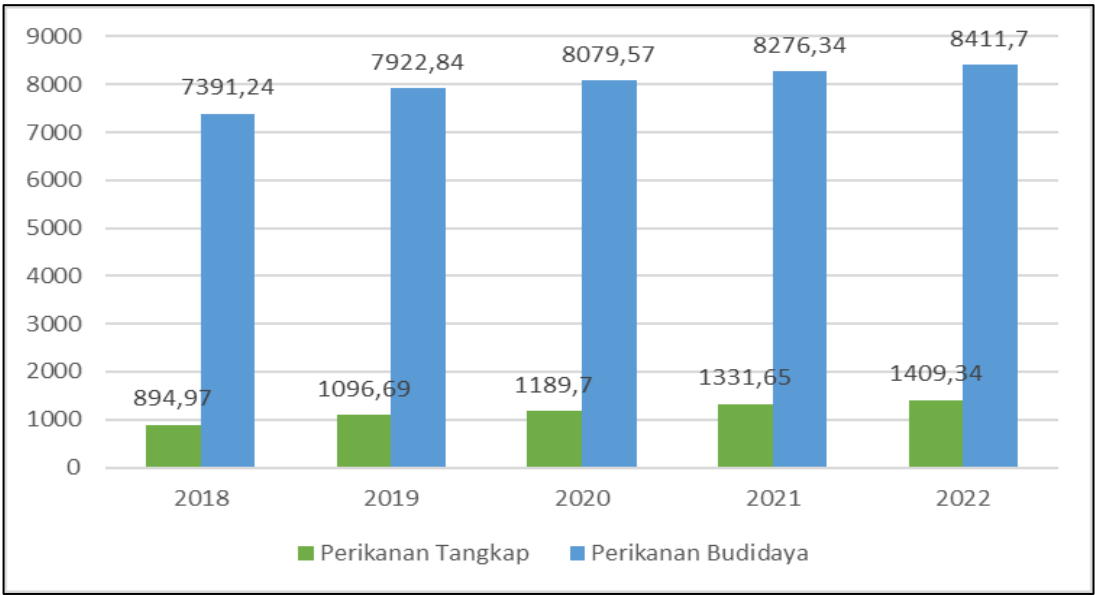
Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023)

**2.4.3. Fokus Urusan Pilihan**

**2.4.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Produksi Perikanan di Kabupaten Sumedang merupakan salah satu komoditi unggulan yang menunjang perekonomian masyarakat. Dengan adanya Waduk Jatigede dan wilayah Kabupaten Sumedang banyak dilalui aliran sungai sangat mendorong mata pencaharian masyarakat melalui produksi Perikanan Tangkap. Selain itu kondisi geografis Kabupaten Sumedang sangat mendukung pula untuk Produksi Perikanan Budidaya. Pada Tahun 2022 Produksi Perikanan Tangkap mencapai sebesar 1.409,34 ton dan Produksi Perikanan Budidaya sebanyak 8.411,70 Ton. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.114  
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya  
Kabupaten Sumedang (Ton)  
Tahun 2018 - 2022



Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

Memperhatikan Gambar diatas dapat dirinci jenis ikan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Sumedang sebagaimana Tabel 2.51 dan Tabel 2.52 di bawah ini.

Tabel 2.52  
Jenis Ikan pada Produksi Perikanan Tangkap  
Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2018 - 2022

| No  | Jenis Ikan | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1) | (2)        | (3)    | (4)    | (5)    | (6)    | (7)    |
| 1   | Patin      | 140,09 | 186,43 | 228,09 | 54,36  | 198,52 |
| 2   | Nila       | 376,60 | 351,14 | 283,74 | 593,27 | 622,65 |
| 3   | Mas        | 275,95 | 234,50 | 276,00 | 386,69 | 189,36 |
| 4   | Lalawak    | 32,87  | 40,28  | 19,27  | 50,16  | 49,18  |
| 5   | Lele       | 22,38  | 98,94  | 58,79  | 34,81  | 59,69  |
| 6   | Berod      | 0,90   | 12,46  | 7,78   | -      | 7,29   |
| 7   | Hampal     | 18,02  | 5,90   | 49,95  | 121,08 | 74,16  |
| 8   | Tawes      | 10,25  | 131,61 | 107,56 | 36,00  | 109,82 |
| 9   | Nilem      | 12,10  | 29,87  | 32,98  | 37,17  | 37,05  |

| No  | Jenis Ikan                                                                  | 2018 | 2019 | 2020  | 2021  | 2022 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|
| (1) | (2)                                                                         | (3)  | (4)  | (5)   | (6)   | (7)  |
| 10  | Udang Galah                                                                 | -    | 0,10 | 0,32  | 0,50  | 0,50 |
| 11  | Udang Tawar                                                                 | 0,11 | 0,17 | 0,14  | 1,19  | 0,82 |
| 12  | Gabus                                                                       | 0,01 | 0,10 | 0,04  | 0,45  | -    |
| 13  | Bandeng                                                                     | -    | 0,32 | 0,50  | 0,82  | 0,82 |
| 14  | Ikan Lainnya (Sepat, Toman, Siput, Gabus, Beunteur, Ikan Sapu, Ikan Seribu) | 5,70 | 4,87 | 24,54 | 15,17 | 5,30 |

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

**Tabel 2.53**  
**Jenis Ikan pada Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022**

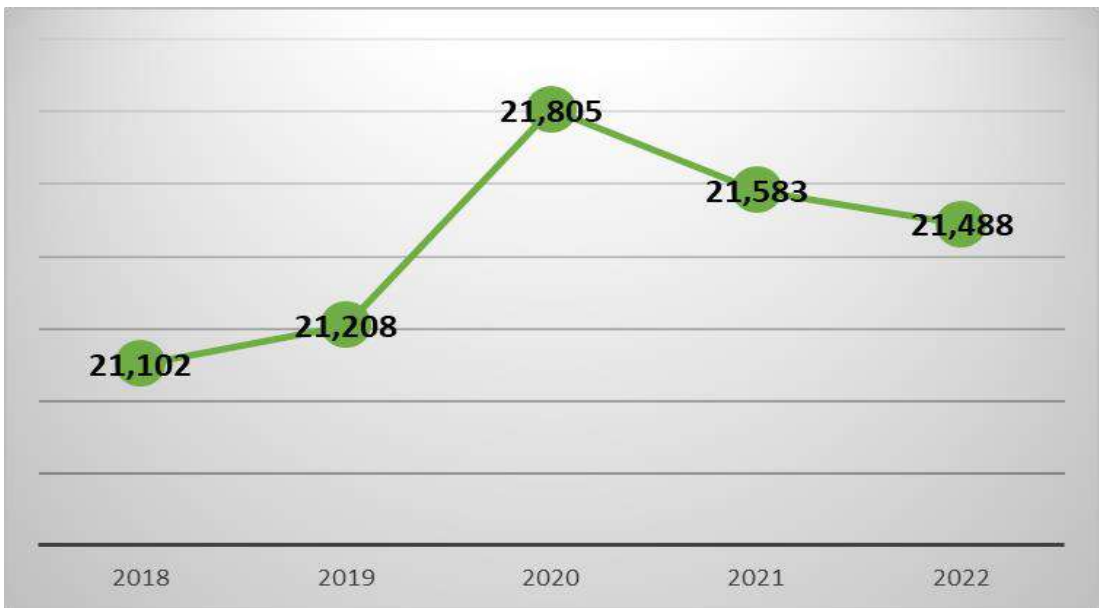
| No | Jenis Ikan                                             | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|----|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | Nila                                                   | 3.291,76 | 3.657,43 | 3.681,71 | 3.916,24 | 3.931,36 |
| 2  | Mas                                                    | 3.762,95 | 3.973,50 | 4.095,82 | 4.139,68 | 3.693,36 |
| 3  | Lele                                                   | 150,60   | 150,85   | 160,15   | 164,80   | 158,39   |
| 4  | Gurame                                                 | 0,44     | 0,98     | 1,28     | 2,27     | 2,26     |
| 5  | Lainnya (Mujaer, Nilem, Tawes, Tarbakan, Sepat, Patin) | 185,49   | 140,07   | 140,62   | 53,36    | 51,8     |

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan dari mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 terdiri dari 28 Kelompok. Untuk pengolahan hasil perikanan rata-rata dilakukan oleh perorangan. Sehingga perlu peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan baik secara regulasi maupun bantuan permodalan untuk memancing terbentuknya kelompok pengolahan hasil perikanan. Hal tersebut dapat memberikan dampak secara ekonomi dalam pengolahan hasil perikanan sebagai nilai tambah penghasilan. Dari Gambar di bawah dapat dilihat dari jumlah Rumah Tangga Perikanan dan jumlah kelompok pengolahan hasil perikanan.

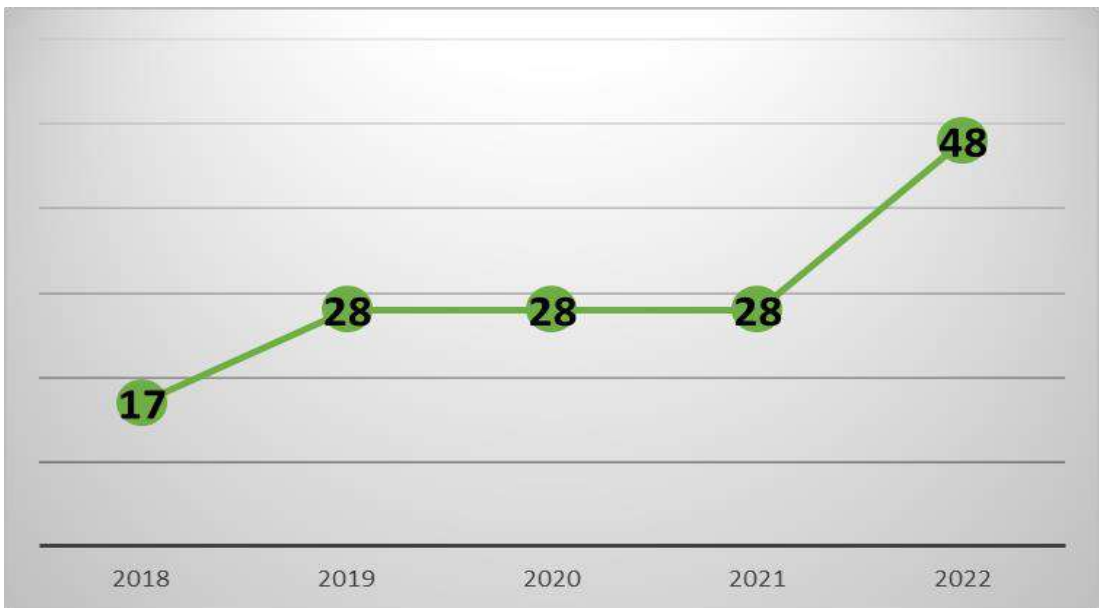


**Gambar 2.115**  
**Jumlah Rumah Tangga Perikanan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022**



Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

**Gambar 2.116**  
**Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022**

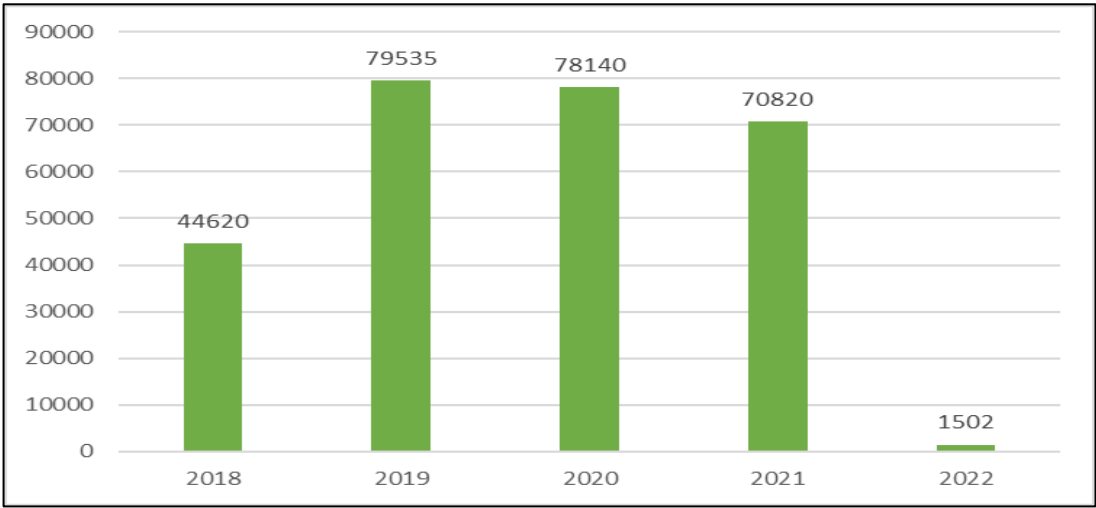


Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

Dari Gambar 2.116 menunjukkan kesinambungan terhadap kebutuhan bahan baku Pengolahan hasil perikanan, jumlah bahan baku ikan tertinggi pada Tahun 2019 sebanyak 79.535 ton, trendnya terus menurun sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.502 ton. Hal ini berakibat dari produksi hasil pengolahan perikanan yang

terdampak dari pandemi covid. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

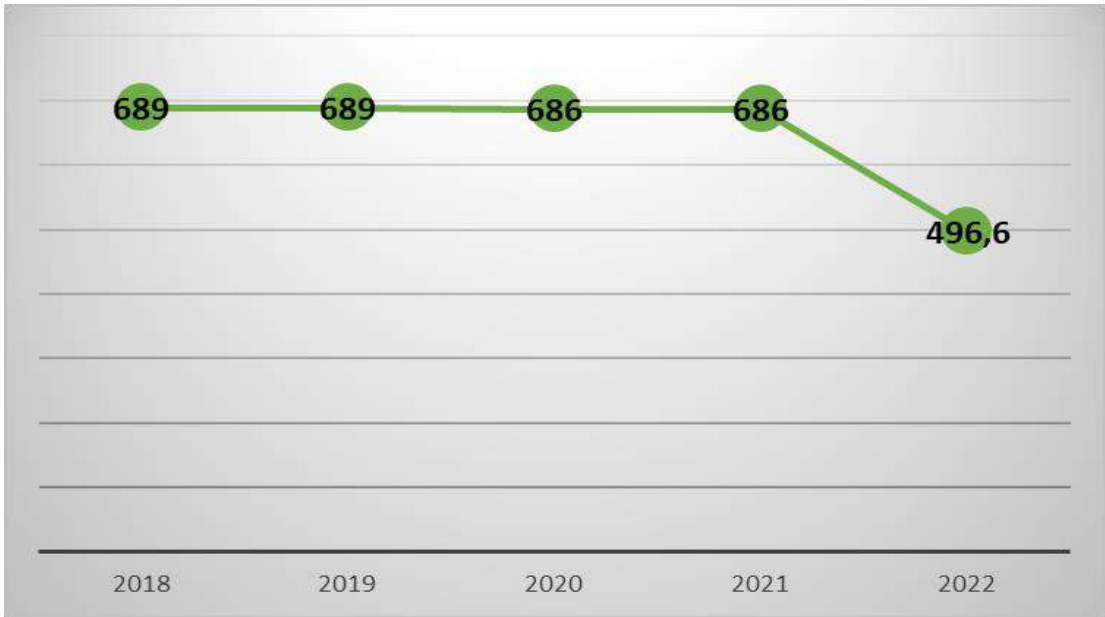
**Gambar 2.117**  
**Jumlah Kebutuhan Baku Ikan Untuk Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2018 - 2022**



Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

Luas kolam air tenang jumlahnya semakin menurun, hal tersebut diakibatkan adanya alih fungsi lahan terutama yang menjadi lokasi pembangunan oleh Pemerintah Pusat, terutama kawasan yang tergenang oleh proyek Waduk Jatigede, Sadawarna, Cipanas, Rengrang dan pembangunan Jalan Tol cisumdawu. Dari seluas 689 ha pada Tahun 2019 turun menjadi 686 Ha mulai Tahun 2020 sampai Tahun 2021. Selanjutnya untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 2.118**  
**Luas Kolam Air Tenang (Ha)**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022**



Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

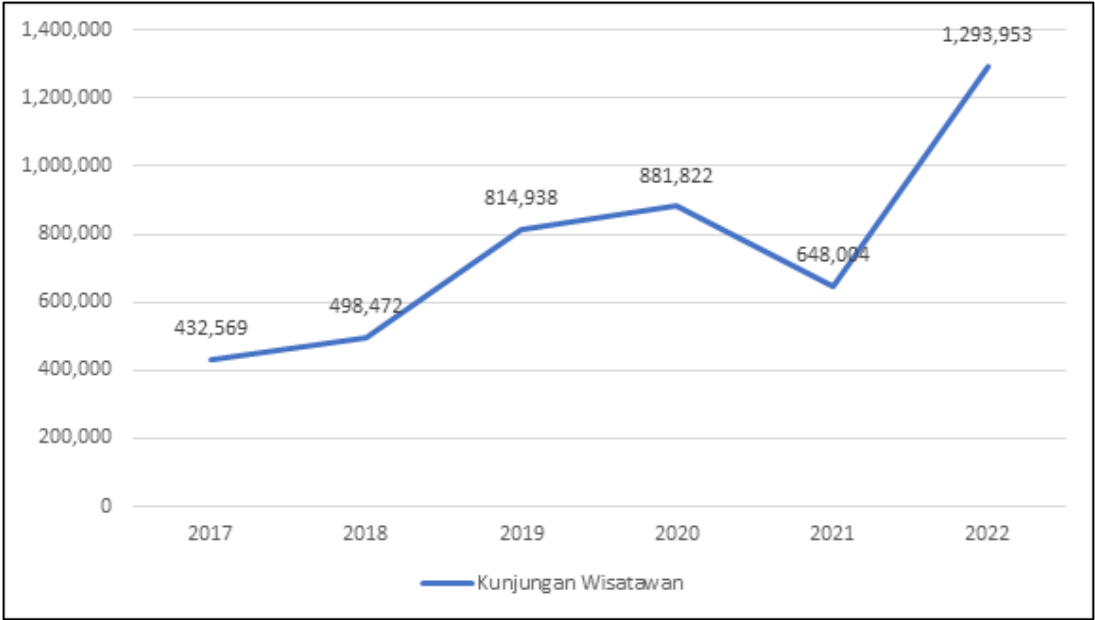
#### 2.4.3.2. Urusan Pariwisata

##### 1) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tujuan pariwisata adalah meningkatkan pendapatan devisa serta pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah sektor pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang didominasi oleh objek wisata alam dan memiliki daya tarik yang hampir mirip antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya.

Objek wisata di Kabupaten Sumedang terus dilakukan pengembangan baik objek wisata alam, Cagar Budaya dan Objek Wisata religi. Sampai Tahun 2021 terdapat 71 Objek dengan Jumlah Kunjungan wisatawan sebanyak 640.004 orang adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 881.882 orang pengunjung ke berbagai objek wisata walaupun pada masa pandemi *Covid 19* tidak mengurangi kunjungan wisata.

**Gambar 2.119**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022**



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Dari Gambar di atas dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2022 mencapai 648.004 orang. Memperhatikan jumlah kunjungan tersebut terbagi ke kunjungan beberapa obyek wisata, terdiri dari Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Ziarah dan Wisata Buatan. Jumlah kunjungan lebih terperinci per objeknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.54**  
**Jenis Wisata dan Jumlah Wisatawan Tahun 2022**

| No          | Jenis Wisata          | Jumlah Wisatawan |
|-------------|-----------------------|------------------|
| Wisata Alam |                       |                  |
| 1           | Cipanas - Cileungsing | 76.889           |
| 2           | Cipacet Sukasari      | 3.863            |
| 3           | Cipanteneun           | 0                |
| 4           | Gunung Geulis         | 0                |
| 5           | Gunung Lingga         | 2.304            |
| 6           | Mata Air Cigirang     | 42.173           |
| 7           | Cigumentong           | 757              |

| No                   | Jenis Wisata                                     | Jumlah Wisatawan |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 8                    | Cikandung                                        | 22.815           |
| 9                    | Cipadayungan                                     | 8.065            |
| 10                   | Ciputrawangi Narimbang                           | 2.816            |
| 11                   | Curug Pasir Wangi                                | 0                |
| 12                   | Curug Cihonje Cisitu                             | 4.011            |
| 13                   | Curug Gorobog                                    | 3.584            |
| 14                   | Curug Sabuk                                      | 0                |
| 15                   | Curug Sindulang                                  | 2.773            |
| 16                   | Gunung Buleud                                    | 318              |
| 17                   | Gunung Gadung                                    | 520              |
| 18                   | Sirah Cipelang                                   | 3.821            |
| 19                   | Situ Sari                                        | 0                |
| 20                   | Gunung Golempang                                 | 0                |
| 21                   | Pangjujungan                                     | 23.844           |
| 22                   | Pesona Cakra                                     | 0                |
| 23                   | Arung Jeram Pangcalikan                          | 0                |
| 24                   | Taman Batu Ciagung                               | 0                |
| 25                   | Gunung Kerenceng                                 | 5.132            |
| 26                   | Basisir Muda Demang                              | 29               |
| 27                   | Kawasan Cisoka                                   | 63.506           |
| 28                   | Cigirang                                         | 42.173           |
| 29                   | Leuweung Tiis/Trumanggala                        | 1.766            |
| 30                   | Bukit Pareugreug                                 | 1.082            |
| <b>Wisata Budaya</b> |                                                  |                  |
| 1                    | Keraton Sumedang Larang/Museum Prabu Geusan Ulun | 10.636           |
| 2                    | Sumur Kajayaan                                   | 0                |

| No            | Jenis Wisata                      | Jumlah Wisatawan |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 3             | Panenjoan                         | 84.396           |
| 4             | Rumah Tinggal Cut Nyak Dhien      | 2.681            |
| 5             | Tahura Gunung Kunci               | 19.804           |
| 6             | Tahura Gunung Palasari            | 6.623            |
| Wisata Ziarah |                                   |                  |
| 1             | Dayeuh Luhur                      | 19.375           |
| 2             | Marongge                          | 8.257            |
| 3             | Sagara Munjul                     | 1.981            |
| 4             | Cipeueut Astana Gede              | 79               |
| 5             | Eyang Sanca Nagara (Mbah Mogana)  | 0                |
| 6             | Gunung Puyuh/Makam Cut Nyak Dhien | 21.750           |
| 7             | Pasarean Gede                     | 0                |
| 8             | Dewi Candrawulan                  | 6.752            |
| Wisata Buatan |                                   |                  |
| 1             | BGG Golf & Resort                 | 29.996           |
| 2             | Taman Cecenet                     | 10.273           |
| 3             | Kawasan Wisata Batudua            | 221              |
| 4             | Agrowisata Sawah Menak            | 0                |
| 5             | Bukit Galau Sindulang             | 2.677            |
| 6             | Kawasan Buricak Burinong          | 35.006           |
| 7             | Wisata Cari Pacar                 | 1.313            |
| 8             | Cibingbin                         | 1968             |
| 9             | Wisata Air Dewa Siwa              | 19.375           |
| 10            | Dewilipa                          | 3.583            |
| 11            | Wisata Gendeng                    | 1.901            |
| 12            | Kampung Ciherang                  | 29.678           |

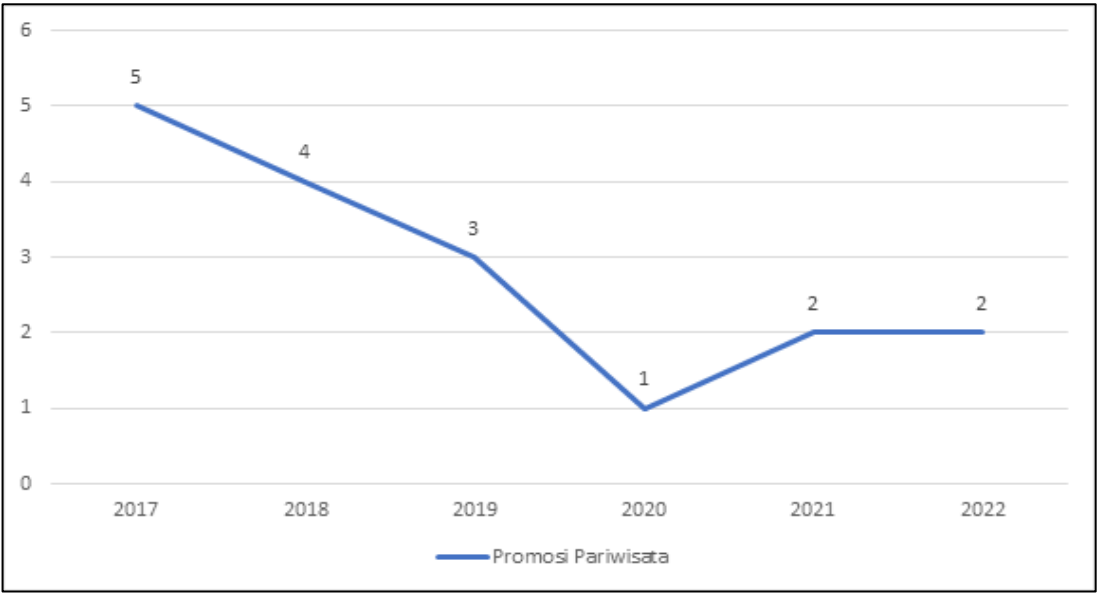
| No | Jenis Wisata                                | Jumlah Wisatawan |
|----|---------------------------------------------|------------------|
| 13 | Kampung Karuhun                             | 23.891           |
| 14 | Nabawadata                                  | 6.751            |
| 15 | Nangorak Camp/Kawasan Agroteknobis Sumedang | 1.094            |
| 16 | Pesona Jatigede                             | 44               |
| 17 | Puncak Permata                              | 116.493          |
| 18 | Samalengoh                                  | 2.229            |
| 19 | Sapatapaan                                  | 0                |
| 20 | Taman Empang Sindulang                      | 1.039            |
| 21 | Pesona Taman Puspa                          | 6.598            |
| 22 | Janspark                                    | 23.984           |
| 23 | Panineungan Hegar                           | 5.190            |
| 24 | Tanjung Duriat                              | 130.344          |
| 25 | Tegaljarong                                 | 53.731           |
| 26 | Puncak Damar                                | 0                |
| 27 | Waterboom Gajah Depa                        | 29.069           |
| 28 | Balong Geulis                               | 16.223           |
| 29 | Kampung Jarami                              | 9.708            |
| 30 | Kolam Renang Wijaya Kusuma                  | 4.798            |
| 31 | Desa Wisata Pasirnanjung Cimanggung         | 243.326          |
| 32 | 95 Farm                                     | 39.777           |
| 33 | Karedok                                     | 1.814            |
| 34 | Teras Kahuripan                             | 2.470            |

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Selain peningkatan dan pengembangan objek wisata, tentunya perlu didukung dengan adanya agenda promosi Pariwisata, guna lebih memperkenalkan objek wisata dan budaya. Pada Tahun 2022 hanya

melaksanakan 2 (dua) event, seperti dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

**Gambar 2.120**  
**Jumlah Promosi Pariwisata (Event)**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022**

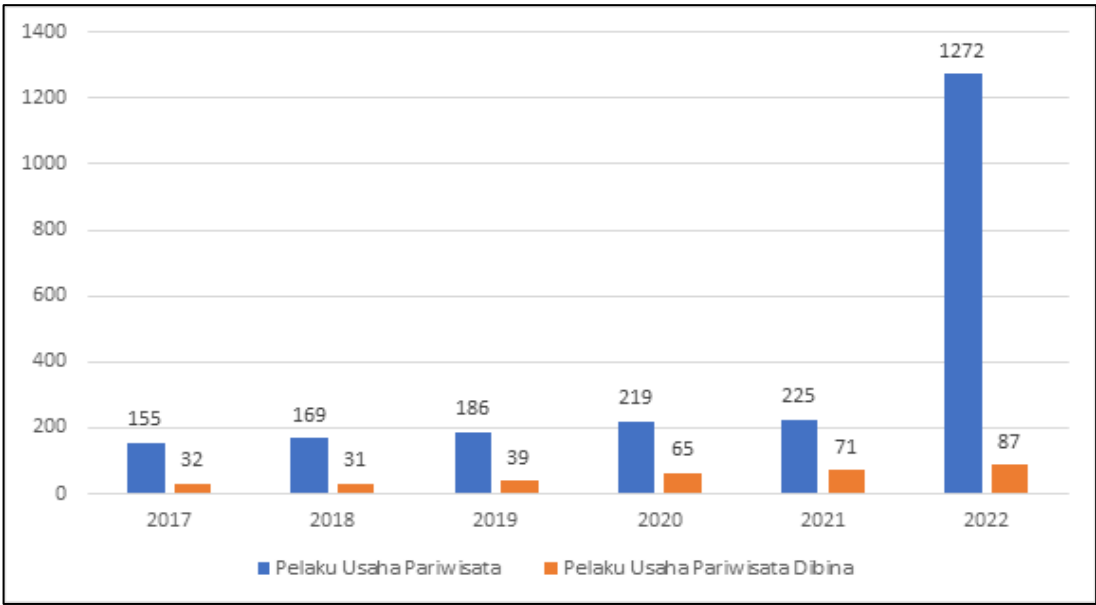


Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Dari jumlah pelaku pariwisata yang ada belum sebanding dengan jumlah pelaku usaha pariwisata yang bina. Pada Tahun 2022 dari jumlah 1.272 pelaku usaha pariwisata hanya 87 pelaku yang mendapat pembinaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



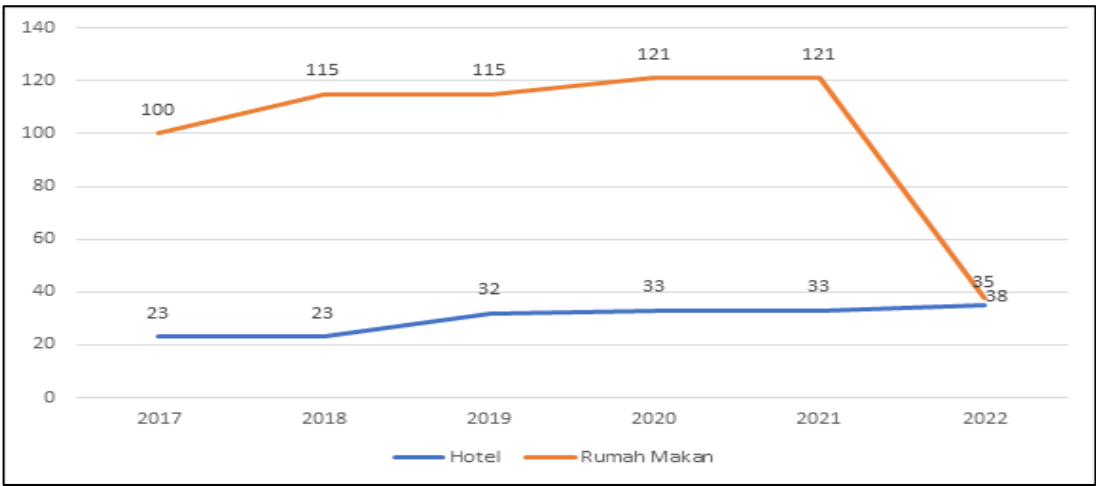
**Gambar 2.121**  
**Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dan Jumlah Pelaku Usaha**  
**Pariwisata Dibina (Orang)**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022**



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang belum seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, biro wisata dan toko cenderamata. Tahun 2022 tercatat di Kabupaten Sumedang baru mempunyai 35 hotel saja dan klasifikasi hotel masih belum merupakan hotel berbintang. Untuk restoran dan cafetaria masing-masing berjumlah 38 restoran.

**Gambar 2.122**  
**Jumlah Hotel dan Rumah Makan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022**



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

2) **Ekonomi Kreatif**

Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang berkembang sangat pesat sehingga sektor ekonomi kreatif dapat dikembangkan secara digital dan mudah diakses secara nasional maupun internasional, pada Tahun 2018 teridentifikasi 99 usaha dari 6 (enam) jenis usaha ekonomi kreatif berkembang menjadi 481 usaha dari 17 jenis usaha ekonomi kreatif.

**Tabel 2.55**  
**Jumlah Pengusaha pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif**  
**Kabupaten Sumedang (Orang) Tahun 2018 - 2022**

| No     | Jenis Usaha              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| 1      | Kuliner                  | -    | 15   | 30   | 41   | 43   |
| 2      | Fashion                  | -    | 8    | 15   | 24   | 28   |
| 3      | Kriya                    | 41   | 61   | 97   | 124  | 124  |
| 4      | Arsitektur               | -    | 2    | 2    | 2    | 3    |
| 5      | Desain Produk            | 9    | 9    | 17   | 17   | 17   |
| 6      | Desain Interior          | 5    | 5    | 5    | 5    | 6    |
| 7      | Musik                    | -    | 25   | 87   | 112  | 119  |
| 8      | Seni Rupa                | -    | 20   | 29   | 29   | 34   |
| 9      | Periklanan               | -    | -    | -    | 2    | 4    |
| 10     | Penerbitan               | -    | -    | 1    | 1    | 3    |
| 11     | Film Animasi dan Video   | 4    | 10   | 10   | 10   | 14   |
| 12     | Fotografi                | 13   | 25   | 33   | 39   | 42   |
| 13     | Desain Komunikasi Visual | -    | 4    | 4    | 4    | 6    |
| 14     | Aplikasi                 | -    | -    | 2    | 2    | 4    |
| 15     | Pengembang Permainan     | -    | 1    | 1    | 1    | 3    |
| 16     | TV dan Radio             | -    | 1    | 1    | 1    | 33   |
| 17     | Seni Pertunjukan         | 27   | 45   | 58   | 67   | 74   |
| Jumlah |                          | 99   | 231  | 392  | 481  | 557  |

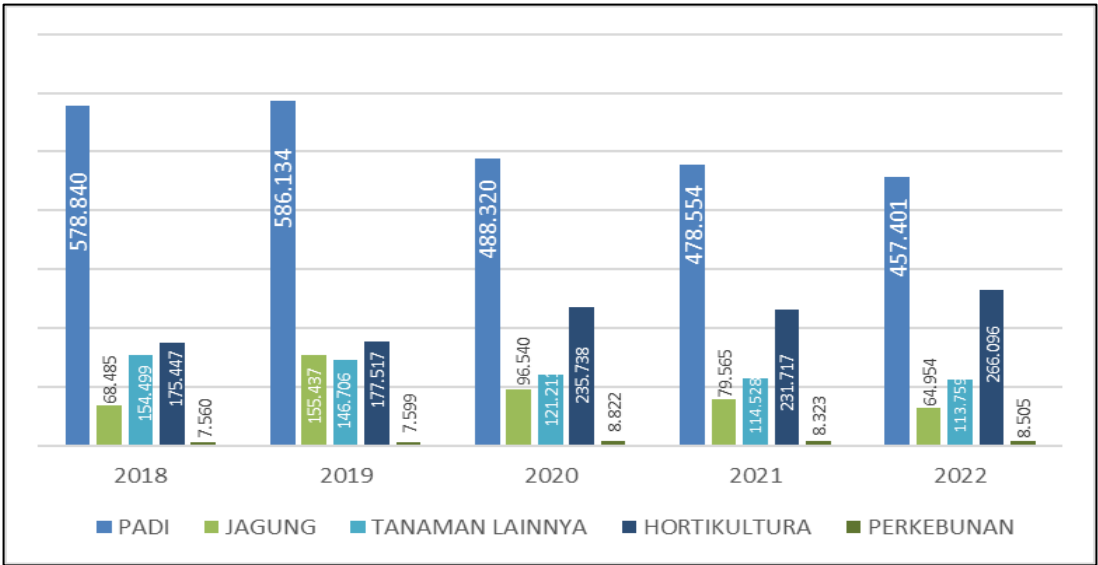
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.3.3. **Urusan Pertanian**

Pertanian merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian terdiri dari 5 (lima) sub sektor yaitu tanaman pangan, kehutanan, peternakan, perkebunan dan perikanan. Adapun peran sektor pertanian dalam perkembangan ekonomi salah satunya sebagai sektor penghasil bahan pangan, sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain, dan sebagai salah satu penghasil sumber devisa. Sebagian besar hasil pertanian adalah bahan makanan dan seluruh hasil perkebunan adalah diekspor.

Berdasarkan sub sektornya, berikut adalah jumlah produksi pertanian sub sektor tanaman pangan dan perkebunan yang terdapat di Kabupaten Sumedang.

**Gambar 2.123**  
**Jumlah Komoditas Pertanian**  
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang (2023)

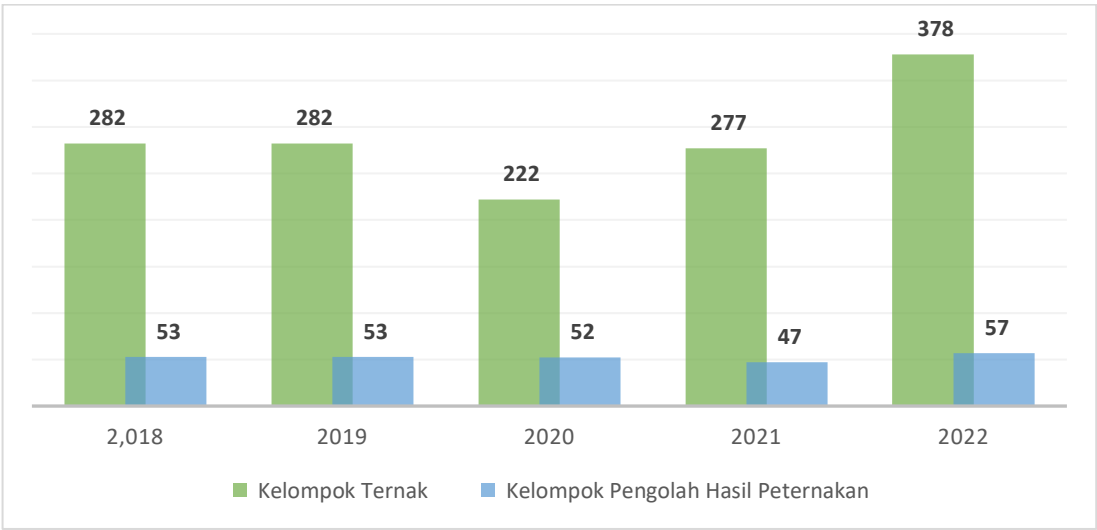
Dari Gambar 2.123 dapat diketahui bahwa sebagian besar hasil pertanian merupakan bahan makanan. Secara keseluruhan jumlah komoditas pertanian hampir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya penurunan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang baik lahan pertanian untuk persawahan maupun lahan pertanian bukan untuk persawahan. Jumlah produksi tanaman pangan padi masih mendominasi secara keseluruhan hasil produksi

pertanian di Kabupaten Sumedang, walaupun pada tahun 2022 produksi tanaman padi mengalami penurunan sebanyak 21.153 ton dari tahun sebelumnya menjadi 457.401 ton. Hasil produksi terendah tahun 2022 juga dari komoditas jagung yang hanya menghasilkan 64954 ton hal ini disebabkan adanya ketergantungan para petani jagung terhadap bantuan benih dari pemerintah karena tinggi harga benih jagung di pasaran. Begitu pula dengan hasil produksi untuk tanaman pangan lainnya yang mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 113.759 ton. Penurunan produktivitas sebagai dampak dari tingginya curah hujan serta minat petani dalam usaha budidaya pertanian terutama ubi kayu yang harga jualnya terus menurun.

Produksi Komoditas Pertanian pada tahun 2018-2022 meskipun mengalami penurunan, namun di komoditas Perkebunan masih stabil pada 8.505 ton pada tahun 2022 dan komoditas Hortikultura yang mengalami peningkatan produksi setiap Tahun bahkan pada Tahun 2022 mencapai titik produksi tertinggi 266.096 ton. Berbagai upaya untuk meningkatkan minat petani pembudidaya perkebunan dan hortikultura diantara pendampingan dan bantuan sarana produksi serta gerakan memasifkan gerakan tanaman di pekarangan membuat komoditas ini produksinya terus meningkat.

Sub sektor lainnya dari pertanian adalah sub sektor peternakan. Sub sektor peternakan di Kabupaten Sumedang tersebar di 26 Kecamatan yang terbagi menjadi beberapa kelompok ternak ataupun perorangan serta kelompok/perorangan pengolahan produksi peternakan. Berikut adalah jumlah kelompok ternak dengan jenis ternak sapi potong, sapi perah, domba, ayam ras petelur, ayam buras, itik dan puyuh serta kelompok pengolahan produksi peternakan.

**Gambar 2.124**  
**Jumlah Kelompok Ternak**  
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

Berdasarkan data di atas terdapat penurunan jumlah kelompok ternak pada Tahun 2020 menjadi 222 kelompok, turun sebanyak 60 kelompok dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena banyaknya peternak ayam ras pedaging yang berhenti akibat dari tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan terutama dari sisi penyediaan pakan ternak. Namun kenaikan kembali terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 55 kelompok menjadi 277 kelompok. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi kenaikan lagi jumlah kelompok peternakan untuk berbagai komoditas (sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam ras petelur, itik, dan puyuh) menjadi sebanyak 378 kelompok. Kenaikan jumlah kelompok yang signifikan ini adanya animo masyarakat untuk beternak melalui kelompok serta adanya bantuan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN Kementerian Pertanian.

Adapun untuk kelompok pengolahan produksi peternakan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sehingga jumlah kelompok menjadi 47 kelompok/perorangan dari 52 kelompok/perorangan pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan modal dan akses pemasaran hasil produksi sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2022, terjadi kenaikan kembali jumlah kelompok/perorangan untuk pengolahan peternakan menjadi **57** kelompok / perorangan.

Selain memperhatikan jumlah kelompok ternak dan pengolahan produksi ternak. Cakupan pengendalian kesehatan hewan ternak pun perlu mendapatkan perhatian. Beberapa jenis penyakit menular yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Sumedang, diantaranya:

- a. *Brucellosis*/Keluron merupakan penyakit yang menginfeksi ternak sapi, kambing, kerbau, dan domba;
- b. *Avian Influenza*/Flu Burung merupakan penyakit yang menginfeksi burung/unggas/ayam; dan
- c. PMK (Penyakit Kuku dan Mulut) merupakan penyakit yang menyerang semua hewan yang berkuku belah/genap, seperti sapi, kerbau, kambing dan domba.

Jumlah kasus infeksi/penyakit yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.56**  
**Jumlah Kasus Hewan Ternak yang Terinfeksi Penyakit Menular di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**

| Jumlah Kasus Hewan Ternak Terinfeksi Penyakit Menular | Tahun |      |      |      |       |
|-------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-------|
|                                                       | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  |
|                                                       | n/a   | n/a  | 33   | 2    | 3.115 |

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2022)

Berdasarkan Tabel 2.55 menunjukkan bahwa ada lonjakan tertinggi kasus hewan ternak yang terinfeksi penyakit menular di Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 dengan jenis kasus PMK yang menyerang ternak sapi, kerbau, kambing dan domba yang mencapai 3.115 kasus. Kasus PMK yang terjadi pada tahun 2022 juga merupakan salah satu dari dampak wabah PKM nasional. Namun demikian dari jumlah kasus tersebut 98 persen hewan ternak yang terinfeksi PMK dapat disembuhkan melalui program vaksinasi, pengobatan dan penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah untuk menekan penularan PMK di Kabupaten Sumedang.

Dari sisi pemanfaatan limbah organik ternak, sejak Tahun 2018 telah dibentuk kelompok pengolah sampah organik dan biogas yang

berjumlah 23 kelompok, dan kelompok ini tidak mengalami penambahan sampai dengan Tahun 2022..

**2.4.3.4. Urusan Kehutanan**

Hutan Kabupaten merupakan salah satu dari ruang terbuka hijau yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang, salah satu fungsi hutan dalam kelompok vegetasi adalah untuk tujuan proteksi, rekreasi, estetika dan kegunaan fungsi lainnya bagi kepentingan masyarakat. Selain itu juga hutan merupakan bagian dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga dan memiliki peranan yang sangat penting sebagai daerah tangkapan dan resapan air hujan, menekan polusi udara dan penghasil O2, serta sebagai tempat studi dan penelitian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kabupaten bahwa pada Pasal 8 ayat 3 dinyatakan bahwa persentase luas lahan Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari luas wilayah.

Hutan di wilayah Kabupaten Sumedang tersusun dari komponen hutan kota dan kelompok vegetasi lainnya, seperti taman, jalur hijau serta kebun dan pekarangan. Berikut adalah luas hutan berdasarkan fungsi dan status di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.57**  
**Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status**  
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| No                                 | Fungsi Hutan                 | Luas (Ha)  |
|------------------------------------|------------------------------|------------|
| <b>A. Berdasarkan Fungsi Hutan</b> |                              |            |
| 1                                  | Hutan Produksi               | 27.145, 59 |
| 2                                  | Hutan Lindung                | 9.401, 80  |
| 3                                  | Taman Wisata Alam            | 1.074,84   |
| 4                                  | Taman Buru                   | 8.654, 01  |
| 5                                  | Cagar Alam                   | 133,64     |
| 6                                  | Taman Hutan Raya             | 34,89      |
| <b>B. Berdasarkan Status Hutan</b> |                              |            |
| 1                                  | Hutan Negara (Kawasan Hutan) | 31.121, 00 |

| No | Fungsi Hutan                | Luas (Ha) |
|----|-----------------------------|-----------|
| 2  | Hutan Hak/Hutan Rakyat      | 55,249,32 |
| 3  | Taman Hutan Raya            | 34,89     |
| 4  | Taman Keanekaragaman Hayati | 25,00     |

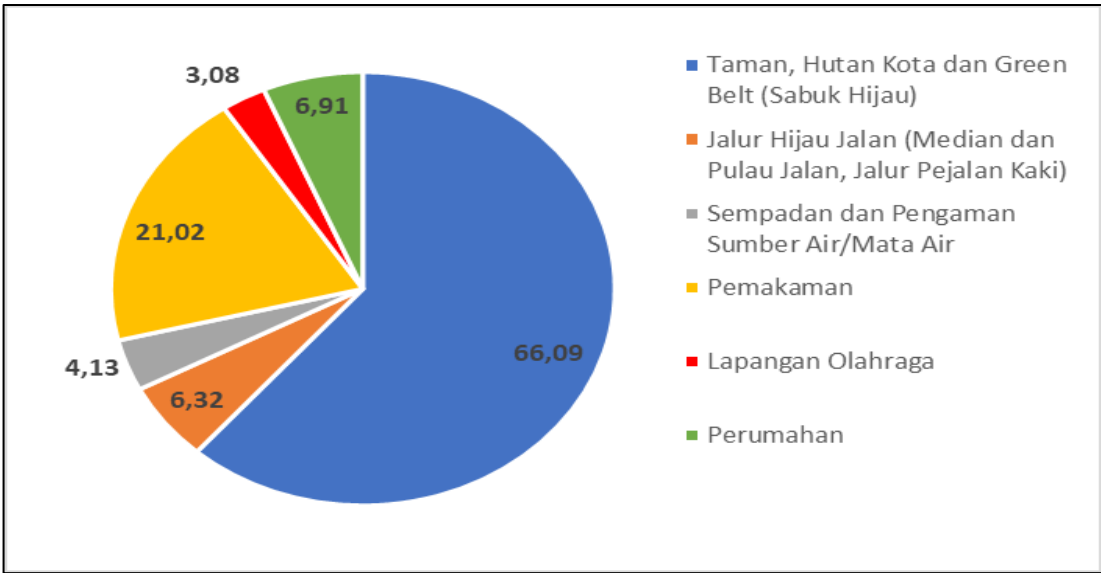
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2023)

Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Luas RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis minimal 30% dari total luas wilayah kota yang terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%.

Secara kondisi geografis wilayah perkotaan di Kabupaten Sumedang masih didominasi kawasan perkebunan dan pertanian yang dikelola masyarakat dan adanya alih fungsi lahan hijau akibat pembangunan Tol Cisumdawu yang melintasi Kabupaten Sumedang di kawasan perkotaan, tentunya mengurangi Luasan RTH di kawasan Perkotaan. Meskipun demikian, luas RTH di Kabupaten Sumedang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Luas Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang terkelola oleh Pemerintah Daerah berupa taman, hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, daerah pengamanan sumber air baku, pemakaman, Lapangan olahraga serta perumahan mencapai 107,55 Ha atau bertambah 0,46 Ha dari tahun sebelumnya. Berikut adalah Ruang Terbuka Hijau yang Terkelola di Kabupaten Sumedang.



**Gambar 2.125**  
**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Ha) Tahun 2022**

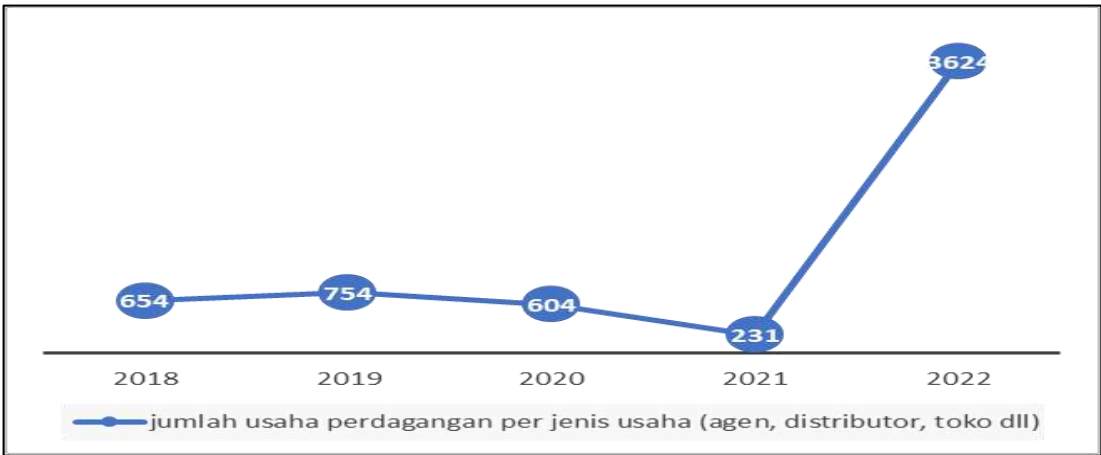


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2023)

**2.4.3.5. Urusan Perdagangan**

Perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa. Percepatan sektor perdagangan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Berikut adalah Jumlah Usaha Perdagangan di Kabupaten Sumedang.

**Gambar 2.126**  
**Jumlah Usaha Perdagangan**  
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

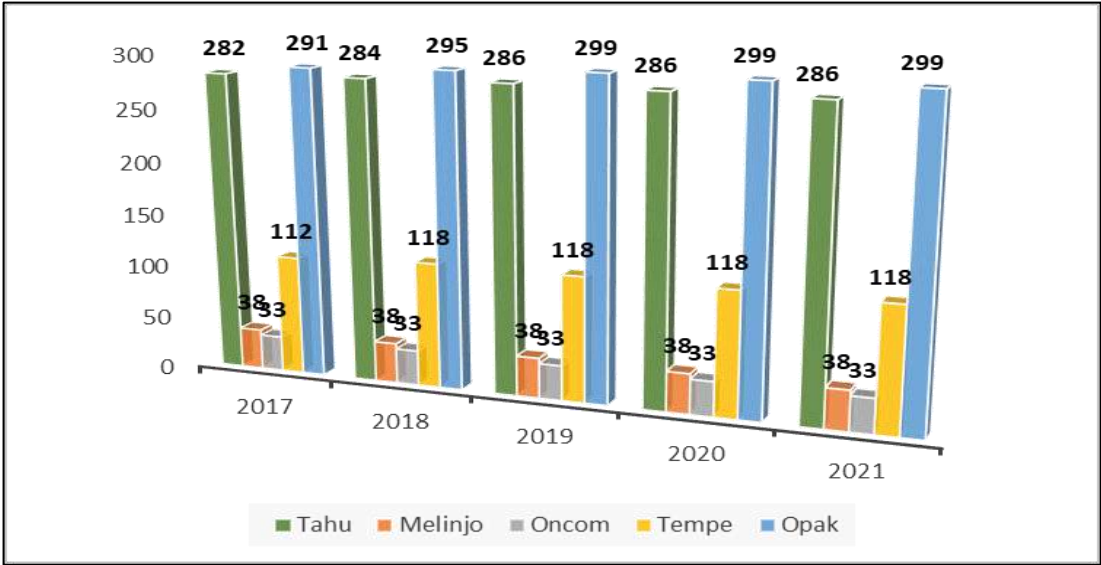
Berdasarkan Gambar 2.126 tergambar jelas bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah usaha perdagangan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 yang mencapai 3624 jenis usaha. Hal ini sebagai dampak dari adanya kerjasama yang dilakukan oleh DiskopUMKMdagin dengan DMPTSP terkait dengan program perizinan yang mempermudah pengeluaran Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi masyarakat Sumedang.

**2.4.3.6. Urusan Perindustrian**

Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi dengan mesin ataupun dengan tangan (BPS, 2021). Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi cukup besar dalam perekonomian. Salah satu jenis sektor industri pengolahan yang banyak dikembangkan adalah industri rumahan (mikro) dan industri kecil.

Di Kabupaten Sumedang jenis industri pengolahan terdiri jenis industri kecil tahu, melinjo, oncom, tempe dan opak. Berikut adalah Jenis Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022.

**Gambar 2.127**  
**Jenis Usaha Industri Pengolahan**  
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021**



Sumber. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

Berdasarkan Gambar diatas, jenis usaha yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Sumedang ialah IKM Opak sebanyak 299 IKM, yang diikuti dengan IKM Tahu sebanyak 286 IKM. Sedangkan IKM Oncom merupakan jenis IKM yang paling sedikit di Kabupaten Sumedang hanya 33 IKM. Dampak pandemi menjadi salah satu penyebab tidak meningkatnya jumlah jenis IKM di Kabupaten Sumedang.

Untuk menerapkan standar mutu suatu produk pangan dalam industri pengolahan dibutuhkan sertifikasi produk. Sertifikasi produk pangan meliputi Sertifikat PIRT, Sertifikasi Halal LPPOM MUI, dll. Adapun untuk standar mutu suatu produk atau jasa atas ide dan karya dalam pembuatan karya cipta dengan nilai ekonomis atau komersil yang tercakup di dalamnya seperti desain industri diperlukan Sertifikat HAKI. Jumlah usaha industri pengolahan yang sudah bersertifikat jumlah sangat fluktuatif. Pada Tahun 2022 jumlah usaha industri pengolahan yang sudah bersertifikat baik itu sertifikat HAKI, PIRT ataupun halal mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi dikarenakan adanya program PIRT dan sertifikat halal gratis melalui program “Self Declair” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk sertifikasi halal dan Pemerintah Daerah untuk PIRT. Sedangkan sertifikat HAKI untuk

produk UMKM, Diskopumkmdagin mengeluarkan suatu rekomendasi sehingga para pengusaha UMKM mendapatkan pengurangan biaya. Dengan adanya kemudahan dalam perolehan sertifikasi produk menyebabkan meningkatnya jumlah usaha industri di Kabupaten Sumedang seperti yang tersaji dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.58**  
**Jumlah Usaha Industri Pengolahan yang Sudah Tersertifikasi Tahun 2018 - 2022**

| Jenis Sertifikasi | Tahun  |        |        |       |         |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
|                   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  | 2022    |
| PIRT              | 20 IKM | 13 IKM | 12 IKM | -     | 317 IKM |
| Halal             | 20 IKM | 13 IKM | 16 IKM | 5 IKM | 144 IKM |
| HAKI              | -      | -      | 8 IKM  | -     | 36 IKM  |

Sumber. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2022)

Adapun pengaruh sektor industri terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar 2.128**  
**Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2022)

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan terus mengalami kenaikan sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2019. Dan sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 para pelaku di sektor industri pengolahan tidak

melakukan penambahan jumlah tenaga kerja, sehingga jumlah tenaga kerja tetap sebanyak 1040 orang. diindikasikan hal ini sebagai dampak dari pandemi yang mengakibatkan menurunnya produksi dan permintaan produk industri pengolahan.

#### **2.4.3.7. Urusan Transmigrasi**

Transmigrasi merupakan suatu program yang dibuat oleh Pemerintah untuk pemerataan penduduk dari daerah-daerah yang padat ke daerah dengan penduduk yang jarang di dalam wilayah Indonesia. Program ini ditujukan untuk pemerataan dan kesatuan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan tujuan lainnya diharapkan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pelaksanaan transmigrasi saat ini dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta difasilitasi oleh pemerintah pusat ditujukan bagi kemanfaatan daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) dan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerja sama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Selama periode Tahun 2018-2022, Kabupaten Sumedang telah memberangkatkan transmigran sebanyak 25 KK, dengan jumlah pemberangkatan transmigran terbanyak terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 14 KK yang disebar ke 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Provinsi

Kalimantan Tengah dan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Sedangkan Tahun 2018, 2020 dan Tahun 2022 tidak ada penempatan transmigran dikarenakan Kabupaten Sumedang tidak mendapatkan kuota. Adapun rinciannya disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.59**  
**Penempatan Transmigran Asal Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2022**

| Uraian/<br>Indikator            | 2018                                                 | 2019      | 2020                                                | 2021      |             |                                                       | 2022                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 | Jumlah KK                                            | Jumlah KK | Jumlah KK                                           | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Lokasi                                                | Jumlah KK                                           |
| Jumlah Peserta Transmigran Umum | Tidak Ada Penempatan<br>Dikarena kan tidak ada kuota | 6 KK      | Tidak Ada Penempatan<br>Dikarenakan tidak ada kuota | 6 KK      | 17 Jiwa     | Kec. Dadahup Kabupaten Kapuas Prov. Kalimantan Tengah | Tidak Ada Penempatan<br>Dikarenakan tidak ada kuota |
|                                 |                                                      |           |                                                     | 8 KK      | 33 Jiwa     | Kabupaten Simeulue Prov. Aceh                         |                                                     |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang (2023)

## 2.5. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Badan Riset dan Invoasi Nasional (BRIN), bahwa Kabupaten Sumedang masuk pada kategori Daya Saing Tinggi dengan nilai 3,28:

- 1) Inovasi Daerah: Inovasi SIMPATI Dalam Upaya Penurunan Stunting Di Kabupaten Sumedang;
- 2) Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sumedang;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan;
- 4) Layanan pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang;
- 5) Rasio Ketergantungan; dan
- 6) Rasio Pencari Kerja Lulusan S1/S2/S3.

Latar belakang kegiatan Inovasi SIMPATI dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Sumedang ini adalah keperluan akan sumber daya manusia dalam pembangunan. Pembangunan memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik secara fisik dan mental, sehingga mampu bersaing di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) saat ini. Hal ini juga merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi COVID-19. Terlebih dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi Bonus Demografi 2030, yakni jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia non-produktif (lebih dari 64 tahun). Ini berarti, stunting menjadi ancaman nyata terhadap kualitas manusia. Pasalnya, balita stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, melainkan juga perkembangan otaknya. Karenanya, pencegahan stunting penting untuk mencapai SDM yang berkualitas.

Tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang menjadi ancaman terhadap ketersediaan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Stunting akan menyebabkan anak gagal tumbuh, juga terganggunya perkembangan kognitif, motorik serta metabolik mereka pada usia dewasa. Banyaknya balita yang terkategori stunting merupakan ancaman bagi masa depan daerah dan nasional,



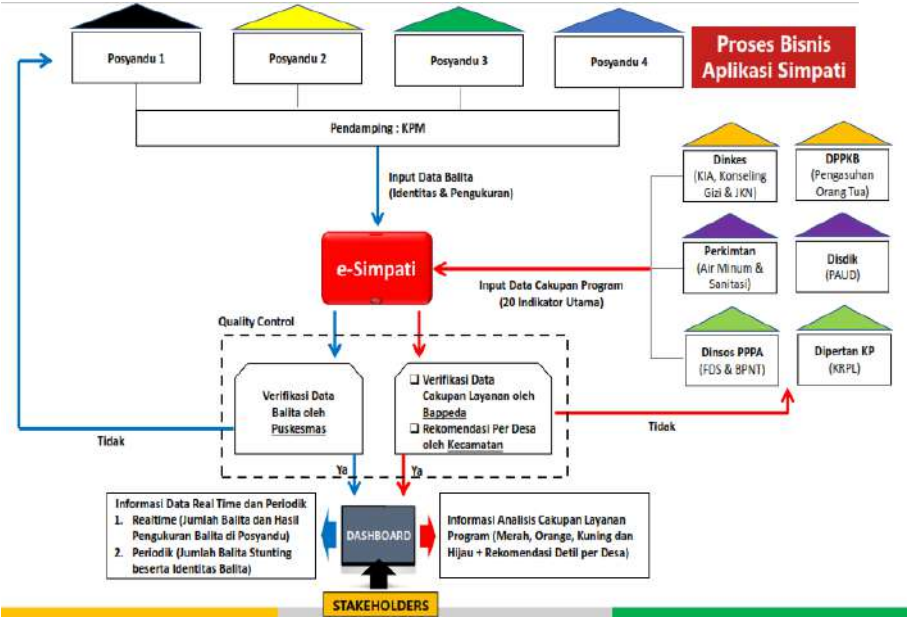
karena potensi individu menjadi terbatas perkembangannya, yang dapat menghambat pembangunan baik di level individu itu sendiri maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan upaya dalam menurunkan dan mencegah stunting melalui intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik. Namun, upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil yang optimal. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan program intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik tidak tepat sasaran, dikarenakan ketidakakuratan data sebagai bahan pengambilan kebijakan intervensi.

Pada tahun 2019, Bappeda Kabupaten Sumedang selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penurunan Stunting Terintegrasi membuat inovasi yaitu Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi (SIMPATI), yaitu aplikasi yang mampu menyediakan data balita dan data cakupan intervensi percepatan penurunan stunting yang cepat, dinamis dan akurat. Sehingga, pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dapat mengambil kebijakan yang tepat dan efektif dalam menangani wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi stunting cukup tinggi. Empat tahun berjalan, aplikasi SIMPATI telah memberikan dampak dalam meningkatkan efektivitas program intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik. Hal ini dapat dilihat dari dampak pelaksanaan program yang mampu menurunkan angka prevalensi stunting dari 32,3 persen pada tahun 2018, menjadi 8,27 persen pada tahun 2022.

Adapun ringkasan kerangka kerja logis inovasi yaitu melalui Alur kerja implementasi Aplikasi SIMPATI dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.129  
Proses Bisnis Aplikasi Simpati Kabupaten Sumedang



a. Tahapan Inovasi

Tahapan-tahapan yang dilaksanakan untuk memperoleh dampak inovasi yang diharapkan:

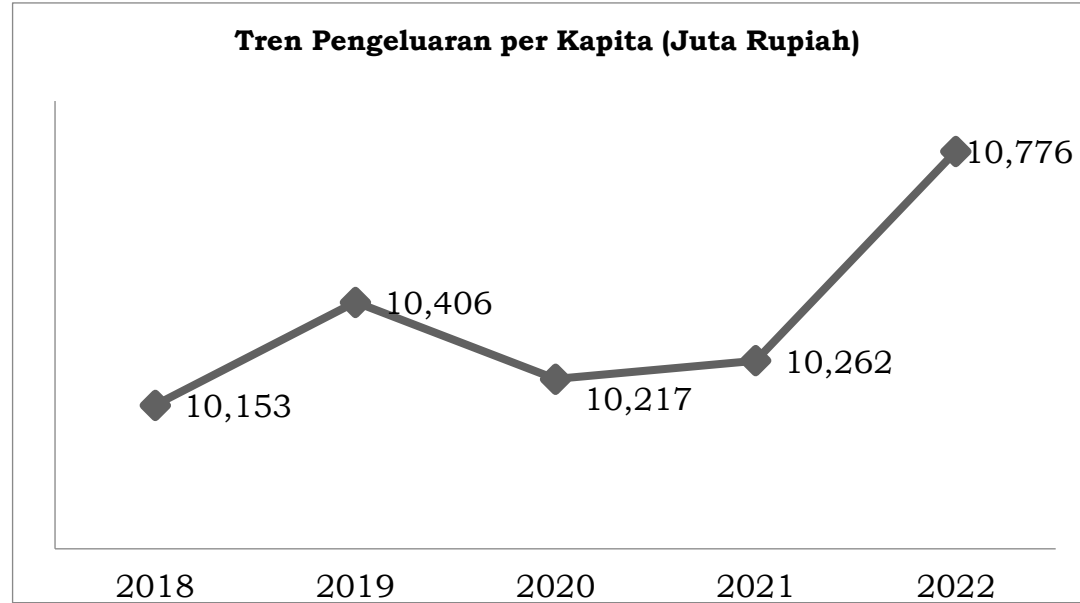
1. Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi .
2. Memberikan informasi tentang sebaran stunting dan cakupan intervensi percepatan penurunan stunting per desa sehingga stakeholders di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten akan memiliki informasi yang factual dan akurat tentang stunting sehingga memicu munculnya kepedulian terhadap kondisi stunting di wilayahnya yang pada akhirnya seluruh stakeholders akan berperan dalam menurunkan dan mencegah stunting sesuai kemampuannya masing-masing.
3. Bimbingan teknis dan pendampingan kepada kader posyandu dan pegawai perangkat daerah tentang pengoperasian aplikasi simpati. Dan untuk pemanfaat data akan diberikan sosialisasi tata cara pemanfaatan data pada aplikasi simpati. Untuk mempermudah updating data dan memanfaatkan data, dibuatkan video tutorial bagi produsen data dan pemanfaat data.

4. Suporting anggaran dari pemerintah Kabupaten dan Desa serta Telkomsel untuk keberlanjutan Aplikasi Simpati.

Tren pengeluaran per kapita masyarakat Sumedang secara umum mengalami kenaikan, seperti halnya Tahun 2020, mencapai Rp10,217 juta mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp10,262 juta, dan mengalami peningkatan kembali di Tahun 2022 sebesar Rp 10.776 juta. Hal tersebut tidak terlepas dari akibat pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 yang menyebabkan mulai meningkatnya daya beli masyarakat dan disebabkan sector usaha sudah mulai bangkit.

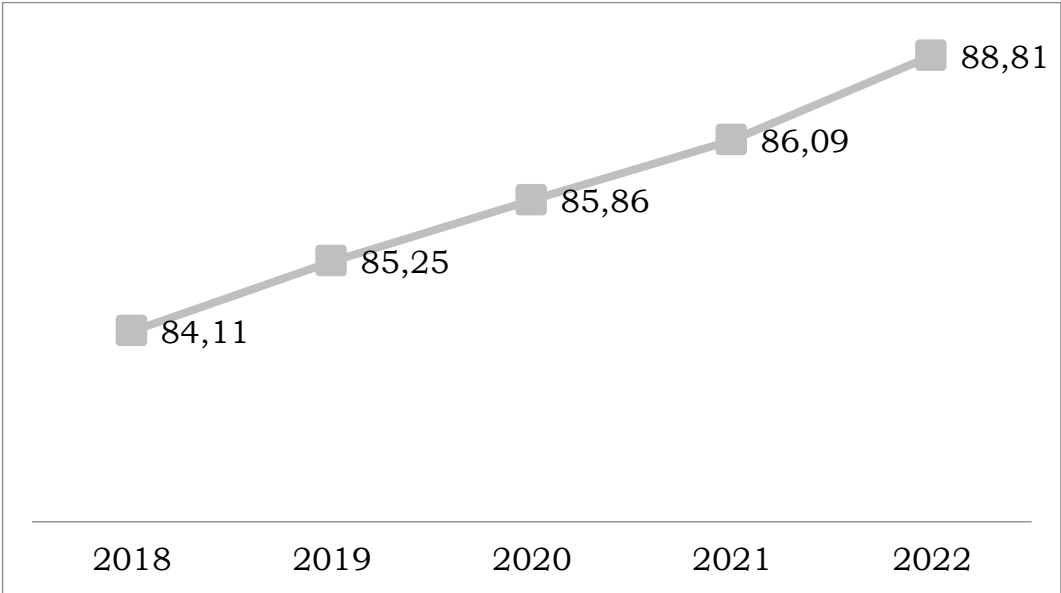
Kondisi terus diperkuat dengan peningkatan indeks kepuasan masyarakat dalam bidang perizinan (Tahun 2018-2021). Sehingga mencapai diatas 80% yaitu sebesar 88,81% di tahun 2022. Sementara itu, di tahun 2021 sebesar 86,09%. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,72% (Tabel 2.120).

**Gambar 2.130**  
**Pengeluaran per Kapita**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang dan Bappppeda Kabupaten Sumedang (2022)

Gambar 2.131  
Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin) Bidang Perizinan  
Tahun 2018-2022



Sumber : DPMPTSP (2023)

Tabel 2.60  
Jenis Layanan pada MPP Kabupaten Sumedang

| Loket | Perangkat Daerah /Instansi Vertikal | Jenis Layanan                                                                                                                                                                                                        | Petugas |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A     | Badan Pendapatan Daerah             | BPHTB, PBB, Pajak Lainnya, Reklame, Layanan Informasi/Customer Service                                                                                                                                               | 5       |
| B     | KPP Pratama                         | Informasi Umum Perpajakan, Pembuatan NPWP dan Cetak Ulang, Pembuatan dan Aktivasi E-FIN, dan Pembuatan ID Billing                                                                                                    | 2       |
| C     | SAMSAT                              | Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Pengesahan STNK Tahunan, Cetak Pembayaran PKB Online                                                                                                                                     | 2       |
| D     | PT. TASPEN                          | Pengajuan SPP Klaim, Pengajuan Mutasi Pensiun, Pengajuan KPT, Pengajuan Mutasi Keluarga, Pengajuan usul/ralat SK/Pensiun janda/duda/YP, Pengajuan JKK/JKM, Informasi Ketaspenan, Enrollment/Perekaman Data Biometrik | 2       |
| E     | DPMPTSP Kabupaten Sumedang          | Pelayanan Perizinan (87 Layanan Perizinan) dan Informasi Investasi                                                                                                                                                   | 22      |

| Loket | Perangkat Daerah /Instansi Vertikal     | Jenis Layanan                                                                                                                                                                                                                                                  | Petugas |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| F     | DPMPTSP Provinsi Jawa Barat             | Pelayanan Perizinan (197 Layanan Perizinan dan Non Izin), pelayanan informasi LKPM dan Informasi Investasi                                                                                                                                                     | 1       |
| G     | Polres Sumedang                         | Perpanjangan SIM, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Briva Tilang, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Pelayanan Sidik Jari dan Izin Keramaian                                                                                                       | 10      |
| H     | Kejaksaan Negeri Sumedang               | Informasi hukum, Layanan Tilang dan Layanan konsultasi hukum                                                                                                                                                                                                   | 2       |
| I     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Penerbitan KTP Elektronik, Perekaman KTP Elektronik, Penerbitan KK, Pelayanan Data Kependudukan (Data Online), Akta Kelahiran, Akta Kematian, SKPWNi, Kartu Identitas Anak, Akta Nikah non Muslim, dan Legalisir                                               | 19      |
| J     | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi     | Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja/AK 1, Pelayanan Registrasi Calon Pekerja Migran Indonesia, dan Pelayanan Validasi TKA                                                                                                                                      | 3       |
| K     | BAZNAS                                  | Layanan Penghimpunan Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Layanan Bantuan dan Layanan Informasi                                                                                                                                                                         | 1       |
| L     | PT. PLN                                 | Informasi Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |
| M     | PT. POS                                 | Penjualan materai dan perangko/benda pos, Penerimaan kiriman surat, dokumen dan paket, Pos Pay (pembayaran berbagai jenis angsuran seperti kendaraan, PLN, PDAM, pajak billing dll), dan Pengiriman uang dan penarikan/wesel/ WU dan transfer antar Bank (C2A) | 1       |
| N     | Dinas Kesehatan                         | Pelayanan kesehatan                                                                                                                                                                                                                                            | 2       |
| O     | Kemenag Sumedang                        | Pembuatan Surat Rekomendasi Passport UMROH, Pelayanan                                                                                                                                                                                                          | 4       |

| Loket | Perangkat Daerah /Instansi Vertikal | Jenis Layanan                                                                                                                                                        | Petugas |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |                                     | informasi Haji dan UMROH, Pelayanan informasi zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqaf, Pendaftaran perkawinan, dan Pelayanan perkawinan                                     |         |
| P     | PDAM Tirta Medal                    | Loket pembayaran, dan Pelayanan informasi dan pengaduan                                                                                                              | 1       |
| Q     | BPJS Ketenagakerjaan                | Pendaftaran pemberi kerja/Badan Usaha baru, Pelayanan informasi, Pelayanan pengajuan klaim melalui antrian online, dan Pendaftaran peserta Bukan Penerima Upah (BPU) | 1       |
| R     | BPJS Kesehatan                      | Pendaftaran Baru, Perubahan Data, dan Layanan informasi dan pengaduan                                                                                                | 2       |
| S     | Bank BRI                            | Layanan e-Tilang dan Layanan Perbankan                                                                                                                               | 2       |
| T     | Bank BJB                            | Layanan Perbankan, Modul Penerimaan negara, Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah, Pembayaran Kendaraan Bermotor dan Penerimaan Pembayaran Universitas                  | 4       |
| U     | Bank Sumedang                       | Layanan Perbankan                                                                                                                                                    | 2       |
| V     | Dinas Arsip dan Perpustakaan        | Penyediaan buku dan fasilitas ruang baca                                                                                                                             | 1       |
| W     | Dinas Sosial                        | Pelayanan tempat permainan anak, Pelayanan tempat ibu menyusui dan Rekomendasi Jamkesda                                                                              |         |

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang menggambarkan Aspek daya saing daerah dalam konteks fokus iklim berinvestasi antara lain adalah : (1) lama proses perizinan; (2) jumlah macam pajak dan retribusi daerah; dan (3) jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Kelengkapan data dan informasi indikator

tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf selanjutnya dengan mengacu pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.61**  
**Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi**  
**Tahun 2016-2022**

| Indikator                               | Tahun                                              |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                         | 2016                                               | 2017                                               | 2018                                               | 2019                                               | 2020                                               | 2021                                               | 2022                                               |
| Lama Proses Perizinan                   | 14 HK                                              | 14 HK                                              | Max. 5 HK                                          | Max. 5 HK                                          | Max. 5 HK                                          | Max. 5 HK                                          | Max. 5 HK                                          |
| Jumlah dan macam pajak retribusi daerah | Retribusi IMB, Ho dan Trayek                       | Retribusi IMB, Ho dan Trayek                       | Retribusi IMB, Ho dan Trayek                       | Retribusi IMB, Ho dan Trayek                       | Retribusi IMB, Ho dan Trayek                       | Retribusi IMB, Ho dan Trayek                       | Retribusi PBG dan Trayek                           |
| Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu |

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sumedang (2023)

Indikator Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2017 lama perizinan mencapai 14 hari kerja Dengan adanya aplikasi SI ICE MANDIRI dengan sistem *Online Single Submission*, lamanya pengurusan perizinan bisa diperpendek hingga 5 (lima) hari kerja, dengan ketentuan semua persyaratan perizinan terpenuhi.

Pajak dan retribusi yang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Sumedang selama Tahun 2016-2021 antara lain adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak restoran Retribusi IMB, Ho, Trayek angkutan dan untuk kedepannya dengan adanya retribusi yang bersumber dari Parkir Berlangganan dengan harapan dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha selama kurun waktu

Tahun 2016-2021 adalah Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang menggambarkan daya saing daerah dalam konteks fokus sumber daya manusia di suatu daerah antara lain adalah (1) Rasio ketergantungan; (2) jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan; (3) jumlah PNS menurut pendidikan yang ditamatkan. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf di bawah ini.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong sebagai negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Tahun 2021 angka ketergantungan Kabupaten Sumedang mencapai 51,058%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Walaupun kenaikan penduduk terbesar di Kabupaten Sumedang berkisar di usia < 15 tahun yang merupakan usia non produktif, namun secara total jumlah penduduk usia produktif berkisar antara 15-64 tahun tetap tertinggi, sehingga berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi.



**Tabel 2.62**  
**Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2022**

| Uraian                                                                       | Tahun   |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                              | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| Jumlah Penduduk<br>Usia < 15 Tahun                                           | 256.140 | 259.870 | 267.175 | 265.798 | 275.312 | 305.610 | 253.365 |
| Jumlah Penduduk<br>Usia > 64 Tahun                                           | 100.345 | 95.447  | 100.574 | 109.319 | 101.934 | 88.178  | 128.615 |
| Jumlah Penduduk<br>Usia Tidak Produktif<br>(Usia <15 Tahun + usia >64 Tahun) | 356.485 | 355.317 | 367,749 | 375.117 | 377.246 | 393.788 | 381.980 |
| Penduduk Usia 15-64                                                          | 759.569 | 775.974 | 784.247 | 780.449 | 779.341 | 771.259 | 805.640 |
| Rasio ketergantungan (%)                                                     | 46,25   | 45,94   | 48,87   | 47,12   | 48,13   | 51,058  | 47,41   |

Sumber : Bapppeda dan Disdukcapil Kab. Sumedang (diolah) (2023)

Rasio pencari kerja lulusan S-1/S-2/S-3 dan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan dapat menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah, sehingga dapat menjadi landasan pembuatan strategi peningkatan kualitas SDM dan strategi peningkatan lapangan kerja.

Berdasarkan Tabel dibawah diketahui bahwa pada Tahun 2022 pencari kerja yang terdaftar dengan tingkat pendidikan S1 mencapai 928 orang. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 di mana pencari kerja yang terdaftar berjumlah 182 orang, maka terjadi penurunan. Hal ini diduga kemungkinan karena tingkat kesadaran pendidikan dan bersekolah ke jenjang perguruan tinggi di masyarakat meningkat.

**Tabel 2.63**  
**Rasio Pencari Kerja Lulusan S-1/S-2/S-3**  
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2022 (%)**

| Uraian                                   | Tahun     |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                          | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| Pencari kerja yang terdaftar lulusan S-1 | 108       | 143       | 1.576     | 511       | 390       | 182       | 928       |
| Pencari kerja yang terdaftar lulusan S-2 | 5         | 7         | 12        | 2         | 0         | 0         | 7         |
| Pencari kerja yang terdaftar lulusan S-3 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Jumlah Lulusan S-1/S-2/S-3               | 113       | 150       | 1.588     | 513       | 390       | 825       | 935       |
| Jumlah Penduduk (Jiwa)                   | 1.142.097 | 1.146.435 | 1,148,198 | 1.154.458 | 1.159.454 | 1.165.047 | 1.187.620 |
| Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3                | 1,0       | 1,31      | 13,83     | 0,04      | 0,03      | 0,07      | 7,87      |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2023)*

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Sumedang mayoritas berpendidikan terakhir S-1. Hal ini bermakna pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang secara umum telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berpikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (*Benjamin S. Bloom, 1956*).

Namun demikian dalam perspektif ke depan perlu terus ditingkatkan kualitas pendidikan pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang pada jenjang S2 dan S-3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang terus berkembang dan bersifat multidimensi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.64**  
**Jumlah PNS yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan**

| Uraian                       | Tahun  |        |        |        |       |       |       |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|                              | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  |
| Jumlah PNS di Pemda Sumedang | 11.656 | 11.344 | 10.614 | 10.006 | 9.945 | 9.252 | 8.695 |
| PNS Lulusan D3 ke Bawah      | 2.054  | -      | 1.858  | 3.413  | 2.986 | 2.675 | 2.415 |
| PNS Lulusan S1               | 6.450  | 6.305  | 6.337  | 6.038  | 6.416 | 6.643 | 5759  |
| PNS Lulusan S2               | 574    | 552    | 538    | 548    | 539   | 529   | 517   |
| PNS Lulusan S3               | 10     | 9      | 6      | 5      | 4     | 5     | 4     |

*Sumber : Bappppeda Kabupaten Sumedang dan BKPSDM Kab. Sumedang (2023)*

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa PNS di wilayah PEMDA mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Hal ini salah satunya diduga karena adanya pensiunan dan tingkat pengangkatan CPNS terbaru berjumlah sedikit. Adapun tingkat pendidikan PNS didominasi oleh lulusan S1, dan yang terkecil dari lulusan S3. Hal ini diduga karena aksesibilitas pendidikan yang kurang mudah dan kesadaran PNS lulusan S1 dan dibawahnya masih rendah. Sehingga diperlukan langkah solutif untuk mengatasi hal tersebut.

**2.6. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022**

**2.6.1. Capaian Kinerja Sasaran**

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah memuat prioritas pembangunan daerah yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat urgensi dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan Tahun 2022 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada Tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumedang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Pada bagian ini dirumuskan Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

1. Korelasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
2. Korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD, didalamnya terdapat arahan pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah serta isu strategis daerah;
3. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana;
4. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, Perangkat Daerah pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas;
5. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.

**2.6.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023**

Sementara itu, terkait indikator sasaran daerah, di dalam dokumen perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan 19 (sembilan belas) indikator sasaran daerah. 19 (sembilan belas) indikator sasaran daerah tersebut diampu oleh Badan/Dinas/Kantor Satuan terkait untuk mendukung kinerja Kepala Daerah. Adapun capaian indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.65**  
**Capaian Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2021 (Sebelum Perubahan)**

| NO | TUJUAN/SASARAN                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 (SEBELUM PERUBAHAN) | SATUAN | TARGET DAN CAPAIAN |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                             |                                                             |        | KONDISI AWAL 2018  | TARGET TAHUN 2019 | CAPAIAN TAHUN 2019 | TARGET TAHUN 2020 | CAPAIAN TAHUN 2020 | TARGET TAHUN 2021 | CAPAIAN TAHUN 2021 |
|    | MISI 1 :Memenuhi kehidupan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau                                                     |                                                             |        |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| 1. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                                                                   | Angka Harapan Hidup                                         | Tahun  | 72.14              | 72.26             | 72.29              | 72.44             | 72.43              | 72.51-72.70       | 72.62              |
| 2. | Terwujudnya sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata                                                                   | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)                                | Tahun  | 8.17               | 8.29              | 8.27               | 8.48              | 8.51               | 8.50-8.57         | 8.52               |
|    |                                                                                                                             | Harapan Lama Sekolah (HLS)                                  | Tahun  | 12.94              | 13.22             | 12.96              | 13.44             | 12.97              | 12.91-12.98       | 12.98              |
| 3. | Terwujudnya Penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak                                          | Persentase Penduduk Miskin                                  | Persen | 9.76               | 8.96              | 9.05               | 8.16              | 10.26              | 10,75-9,71        | 10.71              |
|    |                                                                                                                             | Indeks Pembangunan Gender                                   | Poin   | 94.88              | 94.87             | 95.01              | 95.34             | 95.34              | 95,81             | 95.18              |
|    |                                                                                                                             | Indeks Pemberdayaan Gender                                  | Poin   | 70.57              | 69.23             | 70.57              | 69.77             | 70.78              | 70,80             | 70.13              |
|    | MISI 2 :Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan                                   |                                                             |        |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| 4. | Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang                                                                     | Indeks Kerukunan Umat Beragama                              | Poin   | 80.74              | 72.5              | 82.27              | 83                | 83                 | 73,5              | 74                 |
|    | MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal |                                                             |        |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |

| NO  | TUJUAN/SASARAN                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 (SEBELUM PERUBAHAN) | SATUAN   | TARGET DAN CAPAIAN |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                             |                                                             |          | KONDISI AWAL 2018  | TARGET TAHUN 2019 | CAPAIAN TAHUN 2019 | TARGET TAHUN 2020 | CAPAIAN TAHUN 2020 | TARGET TAHUN 2021 | CAPAIAN TAHUN 2021 |
| 5.  | Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata                                                     | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                    | Persen   | 5.83               | 6.74              | 6.32               | 7.01              | -1.12              | 5.38              | 3.17               |
| 6.  | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air                                                                 | Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap           | Persen   | 62.8               | 66.8              | 70.75              | 70.80             | 76.96              | 71,65             | 74.80              |
|     |                                                                                                                                             | Rasio Jaringan Irigasi                                      | Persen   | 60                 | 62                | 62.02              | 64                | 64.46              | 66                | 66                 |
| 7.  | Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan                                                                                              | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                            | Poin     | 58.68              | 58.92             | 59.01              | 59.18             | 59.18              | 63,85             | 62.26              |
|     |                                                                                                                                             | Indeks Resioko Bencana                                      | Poin     | 162                | 155               | 157                | 150               | 150                | 0,47              | 145                |
|     | <b>MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat</b>              |                                                             |          |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| 8.  | Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi                                                                                   | Opini BPK                                                   | Opini    | WTP                | WTP               | WTP                | WTP               | WTP                | WTP               | WTP                |
|     |                                                                                                                                             | Nilai Sakip Kabupaten                                       | Kategori | B                  | B                 | B                  | B                 | BB                 | A                 | A                  |
|     |                                                                                                                                             | Indeks Reformasi Birokrasi                                  | Poin     | 56.06              | 65                | 97.34              | 70                | 66.74              | 75                | 66.74              |
| 9.  | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas                                                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                  | Poin     | 80.74              | 81                | 82.27              | 83                | 83                 | 86                | 83.08              |
|     | <b>MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang</b> |                                                             |          |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| 10. | Terwujudnya perekonomian                                                                                                                    | Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan                      | Poin     | 10.153             | 10.060            | 10.406             | 10.380            | 10.380             | 10.700            | 10.262             |

| NO  | TUJUAN/SASARAN                                                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 (SEBELUM PERUBAHAN) | SATUAN | TARGET DAN CAPAIAN |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     |                                                                               |                                                             |        | KONDISI AWAL 2018  | TARGET TAHUN 2019 | CAPAIAN TAHUN 2019 | TARGET TAHUN 2020 | CAPAIAN TAHUN 2020 | TARGET TAHUN 2021 | CAPAIAN TAHUN 2021 |
|     | Sumedang yang kreatif dan berdaya saing                                       |                                                             |        |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
|     |                                                                               | Jumlah UMKM                                                 | UMKM   | 15.467             | 16.467            | 2.800              | 17.467            | 1.557              | 18.467            | 18.467             |
| 11. | Menciptakan wirausaha dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar | Tingkat Pengangguran Terbuka                                | Persen | 7.52               | 6.55              | 7.63               | 7.9-7.87          | 9.89               | 8.51-9.35         | 9.18               |

**Tabel 2.66**  
**Capaian Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2022 (Sesudah Perubahan)**

| NO                                                                                         | TUJUAN/ SASARAN                                         |                                                                           | INDIKATOR KINERJA                | SATUAN | TARGET      | CAPAIAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|---------|
|                                                                                            |                                                         |                                                                           |                                  |        | 2022        | 2022    |
| MISI 1 : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU                   |                                                         |                                                                           |                                  |        |             |         |
| 1                                                                                          | Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat                    |                                                                           | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin   | 71.93-72.48 | 72.69   |
|                                                                                            |                                                         |                                                                           | Persentase Penduduk Miskin       | Persen | 10.41-9,54  | 10.14   |
|                                                                                            | 1.1                                                     | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                 | Angka Harapan Hidup (AHH)        | Tahun  | 72.65-72.82 | 72.91   |
|                                                                                            | 1.2                                                     | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan                          | Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)   | Tahun  | 8.58-8.80   | 8.72    |
|                                                                                            |                                                         |                                                                           | Angka Harapan lama sekolah (HLS) | Tahun  | 12.99-13.04 | 12.99   |
|                                                                                            | 1.3                                                     | Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Penduduk Miskin       | Persen | 10.41-9.54  | 10.14   |
|                                                                                            | 1.4                                                     | Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak                 | Indeks Pembangunan Gender        | Poin   | 96.28       | 95.09   |
|                                                                                            |                                                         |                                                                           | Indeks Pemberdayaan Gender       | Poin   | 70.84       | 72.23   |
| MISI 2 : MENGUATKAN NORMA AGAMA DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN |                                                         |                                                                           |                                  |        |             |         |
| 2                                                                                          | Terwujudnya Kehidupan Yang Agamis Di Kabupaten Sumedang |                                                                           | Indeks Kerukunan Umat Beragama   | Poin   | 74          | 75.32   |
|                                                                                            | 1.1                                                     | Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama                      | Indeks kerukunan umat beragama   | Poin   | 74          | 75.32   |



| NO                                                                                                                          | TUJUAN/ SASARAN                                                                                             |                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                            | SATUAN | TARGET      | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|
|                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                  |                                                              |        | 2022        | 2022    |
| MISI 3 : MENGEMBANGKAN WILAYAH EKONOMI DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SERTA PENGUATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL |                                                                                                             |                                                                                                  |                                                              |        |             |         |
| 3                                                                                                                           | Terwujudnya Percepatan Pengembangan Wilayah Ekonomi Agribisnis, Industri, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan |                                                                                                  | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                     | Persen | 4,70 - 5,70 | 5.03    |
|                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                  | Indeks Resiko Bencana                                        | Poin   | 140         | 119,39  |
|                                                                                                                             | 3.1                                                                                                         | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri                           | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan                  | persen | 2,20 - 4,15 | 6,85    |
|                                                                                                                             | 3.2                                                                                                         | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis                                 | Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  | Persen | 3,45-5,28   | 4,18    |
|                                                                                                                             | 3.3                                                                                                         | Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata | Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Persen | 4,50-6,01   | 8,15    |
|                                                                                                                             | 3.4                                                                                                         | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian                               | Indeks Kualitas Infrastruktur                                | Persen | 74,65       | 79,89   |
|                                                                                                                             | 3.5                                                                                                         | Meningkatnya Ketahanan Daerah                                                                    | Indeks Ketahanan Daerah                                      | poin   | 0,49        | 0,49    |
|                                                                                                                             | 3.6                                                                                                         | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah                                                             | Skor Pola Pangan Harapan                                     | persen | 89,4        | 87,1    |
|                                                                                                                             | 3.7                                                                                                         | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup                                                           | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                             | Poin   | 64,26       | 63,35   |
|                                                                                                                             | 3.8                                                                                                         | Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang                                               | Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang | Persen | 20          | -29,03  |

| NO                                                                                                                                   | TUJUAN/ SASARAN                                                  |                                                       | INDIKATOR KINERJA                                     | SATUAN    | TARGET      | CAPAIAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                       |                                                       |           | 2022        | 2022    |
| MISI 4 : MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT              |                                                                  |                                                       |                                                       |           |             |         |
| 4                                                                                                                                    | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi        |                                                       | Indeks Reformasi Birokrasi                            | Poin      | 80          | 71,03   |
|                                                                                                                                      | 4.1                                                              | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan       | Nilai SAKIP Kabupaten                                 | Kategori  | A           | BB (76) |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                       | Opini BPK                                             | Opini     | WTP         | WTP     |
|                                                                                                                                      | 4.2                                                              | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                | Indeks Kepuasan Masyarakat                            | Poin      | 89          | 88,19   |
|                                                                                                                                      | 4.3                                                              | Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Poin      | 4,1         | 3,84    |
| MISI 5 : MENGEMBANGKAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG MENDUKUNG KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG |                                                                  |                                                       |                                                       |           |             |         |
| 5                                                                                                                                    | Terwujudnya Perekonomian Sumedang Yang Kreatif Dan Berdaya Saing |                                                       | PDRB per Kapita                                       | Rp (juta) | 32.09-33.84 | 34.46   |
|                                                                                                                                      | 5.1                                                              | Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat  | Tingkat Pengangguran Terbuka                          | Persen    | 8,78 – 7.99 | 7,72    |

Dari Tabel 2.66 diatas, diketahui bahwa beberapa indikator sasaran daerah telah mencapai bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang berada dibawah target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor diasumsikan menjadi penyebab ketidaktercapaian indikator-indikator sasaran tersebut, misalnya:

- a. Telah rampungnya beberapa ruas jalan tol Cisumdawu sehingga mengakibatkan turunnya nilai investasi di Kabupaten Sumedang;
- b. Tingginya angka UMR Kabupaten Sumedang yang mengakibatkan para insvestor menarik diri untuk berinvestasi di Sumedang;
- c. Menurunnya iklim berinvestasi di Kabupaten Sumedang mengakibatkan turunnya nilai investasi;
- d. Belum tercapainya beberapa indikator yang menjadi penilaian baik SAKIP, IKM ataupun SPBE mengakibatkan turunnya nilai ketiga indeks tersebut; dan
- e. Belum terpenuhinya ketersediaan pangan dan keragaman pangan di Kabupaten Sumedang menyebabkan skor pola pangan harapan pun belum mencapai target.

### **2.6.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023**

**Tabel 2.67**  
**Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2021 (Sebelum Perubahan)**

| No           | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|              |                                                                                          |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                     |
| (1)          | (2)                                                                                      | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                |
| <b>1</b>     | <b>URUSAN WAJIB</b>                                                                      |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                     |
| <b>1.1</b>   | <b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>                                                      |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                     |
| <b>1.1.1</b> | <b>PENDIDIKAN</b>                                                                        |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                     |
| 1.1.1.1      | Angka partisipasi Kasar (APK) SD                                                         | Persen | 106,75                                              | 106,83     | 106,93     | 107,03     | 104,46     | 99,34      | 107.03     | Dinas Pendidikan    |
| 1.1.1.2      | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                                                        | Persen | 103,42                                              | 103642     | 103,72     | 103,82     | 103,80     | 97,96      | 103.82     | Dinas Pendidikan    |
| 1.1.1.3      | Angka Partisipasi Murni (APM) SD                                                         | Persen | 105,23                                              | 105,34     | 105,44     | 105,55     | 104,06     | 97,45      | 105.55     | Dinas Pendidikan    |
| 1.1.1.4      | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                                                        | Persen | 102,78                                              | 102,99     | 103,19     | 103,40     | 103,74     | 88,51      | 103.40     | Dinas Pendidikan    |
| 1.1.1.5      | Persentase Guru uang Bersertifikasi                                                      | Persen | 65,03                                               | 66,09      | 73,77      | 82,52      | 63,26      | 90,23      | 82.52      | Dinas Pendidikan    |
| 1.1.1.6      | Sekolah Pendidikan Dasar kondisi bangunan baik                                           | Persen | 13,45                                               | 21,51      | 2950       | 37,49      | 21,51      | 37,92      | 37.49      | Dinas Pendidikan    |
| 1.1.1.7      | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD)                       | Rasio  | 1:27                                                | 1:27       | 1:27       | 1:27       | 1:27       | 1:17       | 1:27       | Dinas Pendidikan    |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|              |                                                                                          |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                     |
| (1)          | (2)                                                                                      | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                |
| 1.1.1.8      | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP)                      | Rasio  | 1:32                                                | 1:32       | 1:32       | 1:32       | 1:32       | 1:15       | 1:32       | Dinas Pendidikan    |
| 1.1.1.9      | APK PAUD                                                                                 | Persen | 88,44                                               | 89,53      | 89,62      | 89,71      | 89,53      | 80,6011    | 89.71      | Dinas Pendidikan    |
| 1.1.1.10     | Persentase PAUD yang terakreditasi                                                       | Persen | 31,08                                               | 52,89      | 74,7       | 96,51      | 74,7       | 45,32      | 96.51      | Dinas Pendidikan    |
| 1.1.1.11     | Angka partisipasi kasar kesetaraan                                                       | Persen | 1,35                                                | 1,63       | 1,9        | 2,1        | 1,63       | 3          | 2.1        | Dinas Pendidikan    |
| 1.1.1.12     | Persentase siswa bersertifikat DIniyah                                                   | Persen | n/a                                                 | 0          | 100        | 100        | 0          | 100        | 100        |                     |
| <b>1.1.2</b> | <b>Kesehatan</b>                                                                         |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                     |
| 1.1.2.1      | Jumlah Kematian Ibu                                                                      | Jiwa   | 16                                                  | 13         | 10         | 14         | 14         | 21         | 36         | Dinas Kesehatan     |
| 1.1.2.2      | Jumlah Kematian Bayi                                                                     | Jiwa   | 155                                                 | 140        | 120        | 114        | 114        | 137        | 161        | Dinas Kesehatan     |
| 1.1.2.3      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan                                        | Poin   | 78,73                                               | 85         | 87         | 82,5       | 82,5       | 100        | 86.89      | Dinas Kesehatan     |
| 1.1.2.4      | Persentase Balita Stunting                                                               | Persen | 32,2                                                | 29         | 26         | 24,4       | 24,4       | 17,5       | 10.99      | Dinas Kesehatan     |
| 1.1.2.5      | Prevalensi HIV /AIDS                                                                     | Persen | <0,04                                               | <0,04      | <0,04      | <0,04      | <0,04      | <0,04      | <0.4       | Dinas Kesehatan     |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target      |             |              | Realisasi  |            |              | Perangkat Daerah                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                             |        |                                         | Tahun 2019  | Tahun 2020  | Tahun 2021   | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021   |                                         |
| (1)          | (2)                                                                         | (3)    | (4)                                     | (5)         | (6)         | (7)          | (8)        | (9)        | (10)         | (11)                                    |
| 1.1.2.6      | Angka Kesakitan Penyakit Menular                                            | Angka  | 113/100.000                             | 111/100.000 | 109/100.000 | <107/100.000 | 56/100.000 | 0          | <107/100.000 | Dinas Kesehatan                         |
| 1.1.2.7      | Universal Health Coverage                                                   | Persen | 73,17                                   | 96          | 97          | 98           | 76,46      | 77,06      | 78.79        | Dinas Kesehatan                         |
| 1.1.2.8      | Indeks Keluarga Sehat (IKS)                                                 | Poin   | 0,12                                    | 0,2         | 0,3         | 0,40         | 0,13       | 0,13       | 0.1          | Dinas Kesehatan                         |
| 1.1.2.9      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai Kewenangan Kelas B               | Persen | 98                                      | 98          | 98          | 100          | 98,92      | 96,12      | 98.69        | Rumah Sakit Umum Daerah                 |
| 1.1.2.10     | IKM Rumah Sakit                                                             | Poin   | 83,7                                    | 90          | 91          | 92           | 83,79      | 83,92      | 90           | Rumah Sakit Umum Daerah                 |
| 1.1.2.11     | Persentase Pencapaian Indikator Mutu Pelayanan di Rumah Sakit               | Persen | 88,25                                   | 90          | 91          | 92           | 91,03      | 90         | 86.35        | Rumah Sakit Umum Daerah                 |
| <b>1.1.3</b> | <b>Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>                                    |        |                                         |             |             |              |            |            |              |                                         |
| 1.1.3.1      | Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap                           | Persen | 62,8                                    | 66,8        | 70,8        | 74,80        | 70,75      | 76,96      | 74.80        | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.1.3.2      | Rasio jaringan irigasi                                                      | Persen | 60                                      | 62          | 64          | 60           | 62,02      | 64,46      | 66           | Dinas Pekerjaan Umum Dan                |

| No      | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
|         |                                                                                          |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                    |
| (1)     | (2)                                                                                      | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                               |
|         |                                                                                          |        |                                                     |            |            |            |            |            |            | Penataan Ruang                                     |
| 1.1.3.3 | Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang                                 | Persen | 100                                                 | 100        | 100        | 100        | 70,22      | 75,11      | 80         | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang            |
| 1.1.3.4 | Usaha jasa konstruksi yang terstandarisasi                                               | Persen | n/a                                                 | 20         | 40         | 60         | 23         | 40,06      | 40         | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang            |
| 1.1.3.5 | Persentase bangunan pemerintahan yang tertata                                            | Persen | 20                                                  | 28,75      | 48,75      | 58,75      | 35         | 58,75      | 58.75      | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.1.3.6 | Persentase penanganan sampah                                                             | Persen | n/a                                                 | 80         | 75         | 70         | 99,975     | 99,9733    | 70         | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan               |
| 1.1.3.7 | Persentase pengurangan sampah                                                            | Persen | n/a                                                 | 20         | 25         | 30         | 99,9       | 99,92      | 29.66      | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan               |
| 1.1.3.8 | Persentase RTH Terkelola                                                                 | Persen | 11,04                                               | 11,04      | 11,07      | 11,11      | 11,04      | 11,07      | 32.33      | Dinas Lingkungan                                   |

| No      | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|
|         |                                                                                          |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                          |
| (1)     | (2)                                                                                      | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                                     |
|         |                                                                                          |        |                                                     |            |            |            |            |            |            | Hidup Dan<br>Kehutanan                                   |
| 1.1.4   | Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman                                                  |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                          |
| 1.1.4.1 | Rasio rumah layak huni                                                                   | Persen | 80                                                  | 80,67      | 81,33      | 82         | 80,13      | 80,34      | 58.18      | Dinas Perumahan,<br>Kawasan Permukiman<br>Dan Pertanahan |
| 1.1.4.2 | Persentase lingkungan pemukiman kumuh                                                    | Persen | 0,31                                                | 0,3        | 0,27       | 0,15       | 0,3        | 0,3        | 0.02       | Dinas Perumahan,<br>Kawasan Permukiman<br>Dan Pertanahan |
| 1.1.4.3 | Persentase rumah tangga berakses air minum                                               | Persen | 79,02                                               | 80         | 83         | 85         | 79,92      | 80,45      | 80         | Dinas Perumahan,<br>Kawasan Permukiman<br>Dan Pertanahan |
| 1.1.4.4 | Persentase rumah tangga bersanitasi                                                      | Persen | 55                                                  | 60         | 65         | 70         | 55,23      | 55,29      | 60         | Dinas Perumahan,<br>Kawasan Permukiman<br>Dan Pertanahan |



| No      | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan)                | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|         |                                                                                                         |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                           |
| (1)     | (2)                                                                                                     | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                      |
| 1.1.5   | <b>Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat</b>                                              |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                           |
| 1.1.5.1 | Rasio petugas<br>perlindungan<br>masyarakat (linmas)<br>di kabupaten<br>sumedang (1 orang<br>setiap RT) | Persen | 60,55                                               | 65         | 70         | 75         | 60,55      | 81,42      | 65         | Satuan<br>Pamong<br>Praja |
| 1.1.5.2 | Persentase<br>penyelesaian<br>pelanggaran K3<br>(Ketertiban,<br>Ketentraman,<br>Keindahan)              | Persen | 100                                                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Satuan<br>Pamong<br>Praja |
| 1.1.5.3 | Cakupan penegakan<br>peraturan daerah<br>yang tertangani                                                | Persen | 100                                                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Satuan<br>Pamong<br>Praja |
| 1.1.5.4 | Cakupan pelayanan<br>bencana kebakaran                                                                  | Persen | 32,04                                               | 60         | 70         | 80         | 32,04      | 93,17      | 70         | Satuan<br>Pamong<br>Praja |
| 1.1.5.5 | Tingkat waktu<br>tanggap (Response<br>time) daerah<br>layanan wilayah<br>manajemen<br>kebakaran (WMK)   | Persen | 87,5                                                | 87,5       | 90         | 90         | 75,1       | 94,32      | 80         | Satuan<br>Pamong<br>Praja |
| 1.1.5.6 | Indeks resiko<br>bencana                                                                                | Poin   | 162                                                 | 155        | 150        | 145        | 157        | 150        | 145        | Badan<br>Penanggulangan   |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                          |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                                            |
| (1)          | (2)                                                                                      | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                                                       |
|              |                                                                                          |        |                                                     |            |            |            |            |            |            | gan Bencana<br>Daerah                                                      |
| <b>1.1.6</b> | <b>Sosial</b>                                                                            |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                                            |
| 1.1.6.1      | Persentase<br>penyandangan<br>masalah<br>kesejahteraan sosial<br>(PMKS)                  | Persen | 10,05                                               | 9,25       | 8,45       | 7,65       | 9,11       | 8,1        | 7.23       | Dinas Sosial,<br>Pemberdayaa<br>n Perempuan<br>Dan<br>Perlindungan         |
| <b>1.2</b>   | <b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>                                                  |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                                            |
| <b>1.2.1</b> | <b>Tenaga Kerja</b>                                                                      |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                                            |
| 1.2.1.1      | Tingkat<br>pengangguran<br>terbuka                                                       | Persen | 7,04                                                | 6,55       | 6,35       | 6,15       | 7,63       | 9,89       | 9.18       | Dinas<br>Tenaga Kerja<br>Dan<br>Transmigrasi                               |
| 1.2.1.2      | Persentase<br>penyelesaian<br>perselisihan<br>hubungan industrial                        | Persen | 100                                                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 98.16      | Dinas<br>Tenaga Kerja<br>Dan<br>Transmigrasi                               |
| <b>1.2.2</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>                                      |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                                            |
| 1.2.2.1      | Persentase<br>perlindungan<br>perempuan dan anak                                         | Persen | 100                                                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Dinas Sosial,<br>Pemberdayaa<br>n Perempuan<br>Dan<br>Perlindungan<br>Anak |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat Daerah                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
|              |                                                                             |        |                                         | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                            |
| (1)          | (2)                                                                         | (3)    | (4)                                     | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                                       |
| 1.2.2.2      | Kabupaten layak anak                                                        | Skor   | 501                                     | 601        | 650        | 701        | 549,7      | 549        | 549        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 1.2.2.3      | Persentase perempuan kepala keluarga yang meningkat ekonomi keluarganya     | Persen | 0,7                                     | 1,7        | 2,7        | 3,70       | 0,7        | 9,7        | 3.7        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| <b>1.2.3</b> | <b>Pangan</b>                                                               |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                                            |
| 1.2.3.1      | Skor pola pangan harapan (PPH)                                              | Persen | 85                                      | 87,3       | 88,5       | 89,60      | 87,7       | 89,10      | 86.10      | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan                       |
| <b>1.2.4</b> | <b>Pertanahan</b>                                                           |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                                            |
| 1.2.4.1      | Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi                            | Persen | 100                                     | 100        | 100        | 100        | 100        | 79,82      | 100        | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan         |
| 1.2.4.2      | Persentase (Jumlah bidang) pengadaan                                        | Persen | 100                                     | 100        | 100        | 100        | 96,37      | 99,19      | 95.82      | Dinas Perumahan,                                           |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                                          |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                         |
| (1)          | (2)                                                                                      | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                    |
|              | tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi                                           |        |                                                     |            |            |            |            |            |            | Kawasan Permukiman Dan Pertanahan       |
| <b>1.2.5</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>                                                                  |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                         |
| 1.2.5.1      | Indeks kualitas air (IKA)                                                                | Poin   | 47,89                                               | 48,09      | 48,29      | 48,49      | 48,15      | 64,29      | 44.29      | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan    |
| 1.2.5.2      | Indeks kualitas udara (IKU)                                                              | Poin   | 80,29                                               | 80,49      | 80,69      | 80,89      | 80,60      | 85,24      | 80.81      | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan    |
| 1.2.5.3      | Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)                                                     | Poin   | 50,57                                               | 50,86      | 51,22      | 51,63      | 50,96      | 58,31      | 58.81      | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan    |
| <b>1.2.7</b> | <b>Administrasi Kependudukan</b>                                                         |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                         |
| 1.2.7.1      | Indeks kepuasan masyarakat bidang kependudukan                                           | Poin   | 76                                                  | 80         | 83         | 85         | 80         | 83         | 85         | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 1.2.7.2      | Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk wajib KTP                                | Persen | 89                                                  | 97         | 97         | 98         | 97         | 97         | 98         | Dinas Kependudukan Dan                  |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                                          |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                         |
| (1)          | (2)                                                                                      | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                    |
|              |                                                                                          |        |                                                     |            |            |            |            |            |            | Pencatatan Sipil                        |
| 1.2.7.3      | Persentase bayi ber Akte kelahiran                                                       | Persen | 81                                                  | 91         | 91         | 93         | 91,2       | 93         | 93         | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 1.2.7.4      | Persentase data ganda dan anomaly                                                        | Persen | 17                                                  | 9          | 3          | 3          | 9          | 3          | 3          | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| <b>1.2.8</b> | <b>Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>                                                  |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                         |
| 1.2.8.1      | Persentase desa berkembang dan cepat berkembang                                          | Persen | 56,3                                                | 74,8       | 92,6       | 100        | 94         | 95,50      | 100        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  |
| 1.2.8.2      | Persentase klasifikasi BUMDES maju dan berkembang                                        | Persen | 24,8                                                | 50         | 81,5       | 100        | 29,37      | 82,22      | 100        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  |
| 1.2.8.3      | Persentase penerapan siskudes kategori optimal                                           | Persen | 32,2                                                | 100        | 100        | 100        | 100        | 80,47      | 100        | Dinas Pemberdayaan                      |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                          |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                                   |
| (1)          | (2)                                                                                      | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                                              |
|              |                                                                                          |        |                                                     |            |            |            |            |            |            | Masyarakat<br>Dan Desa                                            |
| <b>1.2.8</b> | <b>Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana</b>                                    |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                                   |
| 1.2.8.1      | Total fertility rate<br>(TFR)                                                            | Angka  | 2,09                                                | 2,07       | 2,05       | 2,03       | 2,07       | 2,12       | 2.1        | Dinas<br>Pengendalian<br>Penduduk<br>Dan<br>Keluarga<br>Berencana |
| 1.2.8.2      | Persentase keluarga<br>pra sejahtera                                                     | Persen | 4,12                                                | 3,71       | 3,3        | 2,88       | 4,01       | 4,51       | 3.23       | Dinas<br>Pengendalian<br>Penduduk<br>Dan<br>Keluarga<br>Berencana |
| 1.2.8,3      | Presentase keluarga<br>sejahtera I                                                       | Persen | 67,03                                               | 58,22      | 49,42      | 40,61      | 17,28      | 18,26      | 14.41      | Dinas<br>Pengendalian<br>Penduduk<br>Dan<br>Keluarga<br>Berencana |
| <b>1.2.9</b> | <b>Perhubungan</b>                                                                       |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                                   |
| 1.2.9.1      | Cakupan<br>ketersediaan<br>prasarana dan<br>fasilitas perhubungan                        | Persen | 25,31                                               | 31,27      | 42,12      | 51,83      | 98,47      | 79,04      | 50.48      | Dinas<br>Perhubungan                                              |

| No            | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan             | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
|               |                                                                                          |                    |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                        |
| (1)           | (2)                                                                                      | (3)                | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                                   |
| 1.2.9.2       | Cakupan trayek angkutan umum                                                             | Persen             | 58,45                                               | 59,85      | 61,24      | 62,64      | 88,32      | 5074       | 45.11      | Dinas Perhubungan                                      |
| 1.2.9.3       | Peningkatan penumpang angkutan umum                                                      | Orang/hari         | 10044                                               | 10284      | 10524      | 10764      | 10284      | 10428      | 10.305     | Dinas Perhubungan                                      |
| 1.2.9.4       | Persentase kendaraan laik jalan                                                          | Persen             | 83,4                                                | 86,7       | 90         | 93,30      | 91,92      | 62,59      | 78.93      | Dinas Perhubungan                                      |
| 1.2.9.5       | Jumlah pelanggaran lalu lintas                                                           | Jumlah pelanggaran | 1787                                                | 1490       | 1133       | 984        | 30         | 135,48     | 211        | Dinas Perhubungan                                      |
| 1.2.9.6       | Cakupan satuan ruas parkir (SRP)                                                         | Persen             | 50                                                  | 60         | 70         | 80         | 60         | 100        | 80         | Dinas Perhubungan                                      |
| <b>1.2.10</b> | <b>Komunikasi Dan Informasi</b>                                                          |                    |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                        |
| 1.2.10.1      | Cakupan layanan komunikasi dan informasi                                                 | Persen             | n/a                                                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistic |
| 1.2.10.2      | Nilai SPBE                                                                               | Poin               | 2,46                                                | 3          | 3,3        | 3,60       | 2,51       | 3,81       | 3.6        | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistic |
| <b>1.2.11</b> | <b>Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</b>                                                |                    |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                        |

| No            | Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target           |                   |                   | Realisasi       |                   |                   | Perangkat Daerah                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                             |        |                                         | Tahun 2019       | Tahun 2020        | Tahun 2021        | Tahun 2019      | Tahun 2020        | Tahun 2021        |                                                                    |
| (1)           | (2)                                                                         | (3)    | (4)                                     | (5)              | (6)               | (7)               | (8)             | (9)               | (10)              | (11)                                                               |
| 1.2.11.1      | Cakupan koperasi aktif                                                      | Persen | 72,93                                   | 75               | 78                | 81                | 77,41           | 38,39             | 40.41             | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan |
| 1.2.11.2      | Jumlah UMKM                                                                 | UMKM   | 15467                                   | 16467            | 17467             | 18467             | 2800            | 1557              | 61.587            | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan |
| <b>1.2.12</b> | <b>Penanaman Modal</b>                                                      |        |                                         |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                                                                    |
| 1.2.12.1      | Jumlah nilai investasi di sumedang                                          | Rupiah | 1.106.170.000                           | 1.216.787.000.00 | 1.338.465.700.000 | 1.606.158.840.000 | 915.825.600.000 | 1.338.465.700.000 | 4.249.320.950.689 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu             |
| 1.2.12.2      | Indeks kepuasan masyarakat bidang perizinan                                 | Poin   | 84,11                                   | 84,95            | 86,25             | 87,23             | 85,25           | 86,25             | 87.23             | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu             |



| No            | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi     |                 |            | Perangkat<br>Daerah                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------|
|               |                                                                                          |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019    | Tahun 2020      | Tahun 2021 |                                                        |
| (1)           | (2)                                                                                      | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)           | (9)             | (10)       | (11)                                                   |
| <b>1.2.13</b> | <b>Kepemudaan Dan Olahraga</b>                                                           |        |                                                     |            |            |            |               |                 |            |                                                        |
| 1.2.13.1      | Persentase organisasi kepemudaan yang aktif                                              | Persen | n/a                                                 | 80         | 90         | 100        | 80            | 100             | 100        | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga    |
| 1.2.13.2      | Jumlah atlet yang berprestasi tingkat nasional                                           | Atlet  | 14                                                  | 20         | 20         | 20         | 13            | 20              | 20         | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga    |
| <b>1.2.14</b> | <b>Statistik</b>                                                                         |        |                                                     |            |            |            |               |                 |            |                                                        |
| 1.2.14.1      | Presentase ketersediaan data yang akurat dan berkualitas                                 | Persen | 45,5                                                | 70         | 85         | 95         | 67,8          | 100             | 95         | Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik  |
| <b>1.2.15</b> | <b>Persandian</b>                                                                        |        |                                                     |            |            |            |               |                 |            |                                                        |
| 1.2.15.1      | Cakupan pengamanan informasi daerah                                                      | Persen | n/a                                                 | 33,33      | 50         | 66,67      | 27,59 (8 OPD) | 207,14 (29 OPD) | 66.67      | Dinas Komunikasi, Informatika Persandian Dan Statistik |
| <b>1.2.16</b> | <b>Kebudayaan</b>                                                                        |        |                                                     |            |            |            |               |                 |            |                                                        |

| No            | Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat Daerah                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
|               |                                                                             |        |                                         | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                     |
| (1)           | (2)                                                                         | (3)    | (4)                                     | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                                |
|               | Cakupan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan    | Persen | 100                                     | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga |
| <b>1.2.17</b> | <b>Perpustakaan</b>                                                         |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                                     |
| 1.2.17.1      | Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan                                  | Orang  | 70235                                   | 73511      | 75716      | 77988      | 73671      | 12304      | 37.558     | Dinas Arsip Dan Perpustakaan                        |
| 1.2.17.2      | Cakupan lokasi yang terlayani melalui pusling                               | Persen | 22,22                                   | 31         | 48         | 64         | 31         | 82,27      | 50         | Dinas Arsip Dan Perpustakaan                        |
| 1.2.17.3      | Tingkat kepuasan pengunjung                                                 | Persen | 74,4                                    | 76         | 80         | 84         | 88,05      | 0,34       | 84         | Dinas Arsip Dan Perpustakaan                        |
| <b>1.2.18</b> | <b>Kearsipan</b>                                                            |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                                     |
| 1.2.18.1      | Persentase perangkat daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar     | Persen | 3,64                                    | 21,82      | 40         | 58.18      | 21,82      | 40         | 58.18      | Dinas Arsip Dan Perpustakaan                        |
| <b>2</b>      | <b>Urusan Pilihan</b>                                                       |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                                     |

| No         | Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat Daerah                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
|            |                                                                             |        |                                         | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                     |
| (1)        | (2)                                                                         | (3)    | (4)                                     | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                                |
| <b>2.1</b> | <b>Kelautan Dan Perikanan</b>                                               |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                                     |
| 2.1.1      | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan                                       | Persen | 3,15                                    | 4          | 4,6        | 5,20       | 2,34       | 3,48       | 4,82       | Dinas Perikanan Dan Peternakan                      |
| <b>2.2</b> | <b>Pariwisata</b>                                                           |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                                     |
| 2.2.1      | Jumlah kunjungan wisatawan                                                  | Orang  | 498472                                  | 598166     | 717800     | 861360     | 81494      | 717800     | 861.860    | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga |
| 2.2.2      | Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional  | Persen | 44                                      | 63         | 75         | 100        | 63         | 100        | 100        | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga |
| <b>2.3</b> | <b>Pertanian</b>                                                            |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                                     |
| 2.3.1      | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian:                                 |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                                     |
|            | Tanaman pangan                                                              | Persen | 10,04                                   | 10,14      | 10,24      | 10,34      | 19,14      | 3.81       | 2.18       | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan                |

| No         | Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat Daerah                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
|            |                                                                             |        |                                         | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                      |
| (1)        | (2)                                                                         | (3)    | (4)                                     | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                 |
|            | Tanaman hortikultura                                                        | Persen | 3,2                                     | 4          | 4,7        | 5,40       | 4          | 2.13       | 1.38       | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
|            | Perkebunan                                                                  | Persen | 4,12                                    | 4,2        | 4,8        | 5,50       | 18,79      | 5.65       | 6.52       | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.3.2      | Laju pertumbuhan subsector peternakan                                       | Persen | 3,68                                    | 4,3        | 4,9        | 5,50       | 4,18       | 5,78       | -0,37      | Dinas Perikanan Dan Peternakan       |
| <b>2.4</b> | <b>Kehutanan</b>                                                            |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                      |
| 2.4.1      | Presentase pengelolaan kawasan konservasi                                   | Persen | 60                                      | 63         | 64         | 66         | n/a        | n/a        | n/a        | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.4.2      |                                                                             | Nilai  | 83                                      | 83         | 83         | 83         | n/a        | n/a        | n/a        | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| <b>2.5</b> | <b>Perdagangan</b>                                                          |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                      |
| 2.5.1      | Laju pertumbuhan sub sektor                                                 | Persen | 4,59                                    | 4,89       | 5,19       | 5,49       | 4,89       | 5,19       | 6.35       | Dinas Koperasi Usaha Kecil           |

| No         | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                          |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                                   |
| (1)        | (2)                                                                                      | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                                              |
|            | perdagangan besar dan eceran                                                             |        |                                                     |            |            |            |            |            |            | Menengah Perindustrian Dan Perdagangan                            |
| <b>2.6</b> | <b>Perindustrian</b>                                                                     |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                                   |
| 2.6.1      | Laju pertumbuhan sub sektor industri pengolahan                                          | Persen | 5,29                                                | 5,32       | 5,35       | 5,38       | 5,32       | 5,35       | 11.78      | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan |
| <b>2.7</b> | <b>Transmigrasi</b>                                                                      |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                                   |
| 2.7.1      | Jumlah transmigran yang ditempatkan                                                      | KK     | 51                                                  | 56         | 61         | 66         | 6          | 56         | 65         | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi                               |
| <b>3</b>   | <b>Urusan Penunjang Dan Pendukung</b>                                                    |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                                   |
| <b>3.1</b> | <b>Inspektorat</b>                                                                       |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                                   |
| 3.1.1      | Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah                                          | Persen | 20                                                  | 80         | 80         | 90         | 80         | 80         | 90         | Inspektorat                                                       |
| 3.1.2      | Persentase perangkat daerah yang nilai                                                   | Persen | 36                                                  | 80         | 80         | 90         | 80         | 80         | 90         | Inspektorat                                                       |

| No         | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan)                     | Satuan   | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                              |          |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                                               |
| (1)        | (2)                                                                                                          | (3)      | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                                                          |
|            | SAKIP berkategori<br>"BAIK"                                                                                  |          |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                                               |
| 3.1.3      | Tingkat kapabilitas<br>APIP/IACM                                                                             | Kategori | Level 3                                             | Level 3    | Level 3    | Level 3    | Level 3    | Level 3    | Level 4    | Inspektorat                                                                   |
| 3.1.4      | Persentase perangkat<br>daerah yang<br>melaksanakan<br>pembangunan zona<br>integritas menuju<br>WBK dan WBBM | Persen   | n/a                                                 | 20         | 100        | 100        | 20         | 100        | 100        | Inspektorat                                                                   |
| 3.1.5      | Persentase<br>tindaklanjut hasil<br>pemeriksaan (TLHP)<br>yang diselesaikan<br>sesuai rekomendasi            | Persen   | 75                                                  | 80         | 90         | 90         | 82         | 85         | 84.41      | Inspektorat                                                                   |
| 3.1.6      | Persentase temuan<br>penyimpangan<br>terhadap APBD                                                           | Persen   | 8,79                                                | 8          | 7          | 6          | 8          | 7          | 6          | Inspektorat                                                                   |
| <b>3.2</b> | <b>Perencanaan</b>                                                                                           |          |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                                               |
| 3.2.1      | Tingkat kesesuaian<br>renstra terhadap<br>RPJMD                                                              | Persen   | 85                                                  | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Badan<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Penelitian<br>Dan<br>Pengembang<br>an |

| No         | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi Kinerja<br>Pada Awal Periode<br>RPJMD | Target      |             |             | Realisasi   |             |             | Perangkat Daerah                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                                                                       |        |                                               | Tahun 2019  | Tahun 2020  | Tahun 2021  | Tahun 2019  | Tahun 2020  | Tahun 2021  |                                                           |
| (1)        | (2)                                                                                   | (3)    | (4)                                           | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         | (9)         | (10)        | (11)                                                      |
| 3.2.2      | Tingkat kesesuaian RKPD terhadap RPJMD                                                | Persen | 85                                            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan |
| 3.2.3      | Tingkat kesesuaian Renja terhadap RKPD                                                | Persen | 85                                            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan |
| 3.2.4      | Tingkat ketercapaian target pembangunan daerah yang berkategori baik                  | Persen | 85                                            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan |
| <b>3.3</b> | <b>Keuangan</b>                                                                       |        |                                               |             |             |             |             |             |             |                                                           |
| 3.3.1      | Opini BPK                                                                             | Opini  | WTP                                           | WTP         | WTP         | WTP         | WTP         | WTP         | WTP         | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset                      |
| 3.3.2      | APBD tepat waktu                                                                      | Status | Tepat waktu                                   | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat Waktu | Badan Pengelolaan                                         |

| No         | Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat Daerah                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
|            |                                                                             |        |                                         | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                        |
| (1)        | (2)                                                                         | (3)    | (4)                                     | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                                   |
|            |                                                                             |        |                                         |            |            |            |            |            |            | Keuangan Dan Asset                                     |
| 3.3.3      | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah                                   | Persen | 16,47                                   | 17,03      | 17,77      | 17,03      | 17.13      | 17.87      | 17.33      | Badan Pengelolaan Pendapatan                           |
| 3.3.4      | Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pajak daerah                           | Poin   | 77,34                                   | 85         | 87         | 90         | 85         | 87         | 90         | Badan Pengelolaan Pendapatan                           |
| <b>3.4</b> | <b>Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan</b>                                 |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                                        |
| 3.4.1      | Indeks profesionalisme ASN                                                  | Poin   | 59                                      | 65         | 70         | 75         | 59,45      | 65,03      | 74.87      | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3.4.2      | Indeks sistem merit ASN                                                     | Poin   | 48,9                                    | 60         | 66,25      | 72,50      | 60,88      | 74,47      | 96.61      | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| <b>3.5</b> | <b>Penelitian Dan Pengembangan</b>                                          |        |                                         |            |            |            |            |            |            |                                                        |
| 3.5.1      | Persentase hasil penelitian dan                                             | Persen | 80                                      | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Badan Perencanaan                                      |



| No         | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan)                  | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------|
|            |                                                                                                           |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                |
| (1)        | (2)                                                                                                       | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                           |
|            | pengembangan yang diimplementasikan                                                                       |        |                                                     |            |            |            |            |            |            | Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| <b>3.6</b> | <b>Sekretariat Daerah</b>                                                                                 |        |                                                     |            |            |            |            |            |            |                                                |
| 3.6.1      | Persentase perangkat daerah yang capaian target tahunannya berkategori “baik”                             | Persen | n/a                                                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Sekretariat Daerah                             |
| 3.6.2      | Persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan berkategori “baik”                              | Persen | n/a                                                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Sekretariat Daerah                             |
| 3.6.3      | Persentase perangkat daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori “baik” | Persen | n/a                                                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Sekretariat Daerah                             |
| 3.6.4      | Persentase perangkat daerah bidang pembangunan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori “baik”  | Persen | n/a                                                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Sekretariat Daerah                             |

| No     | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan)                          | Satuan   | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|        |                                                                                                                   |          |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                     |
| (1)    | (2)                                                                                                               | (3)      | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                |
| 3.6.5  | Persentase perangkat daerah bidang administrasi umum yang capaian target kinerja tahunannya berkategori “baik”    | Persen   | n/a                                                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Sekretariat Daerah  |
| 3.6.6  | Nilai LPPD kabupaten                                                                                              | Angka    | 3,092                                               | 3,15       | 3,3        | 3,45       | 3,15       | 3.51       | 3.64       | Sekretariat Daerah  |
| 3.6.7  | Indeks reformasi birokrasi                                                                                        | Poin     | 56,06                                               | 65         | 70         | 75         | 22,38      | 66.74      | 66.74      | Sekretariat Daerah  |
| 3.6.8  | Nilai SAKIP kabupaten                                                                                             | Kategori | B                                                   | B          | BB         | A          | B          | BB         | BB         | Sekretariat Daerah  |
| 3.6.9  | Cakupan layanan pembentukan produk hukum daerah                                                                   | Persen   | 100                                                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Sekretariat Daerah  |
| 3.6.10 | Persentase dokumen yang ditindak lanjuti ke dalam perjanjian Kerjasama                                            | Persen   | 46,67                                               | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Sekretariat Daerah  |
| 3.6.11 | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan administrative kinerja pembangunan triwulanannya berkategori “baik” | Persen   | 60                                                  | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Sekretariat Daerah  |

| No         | Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan) | Satuan   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat Daerah   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
|            |                                                                             |          |                                         | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                    |
| (1)        | (2)                                                                         | (3)      | (4)                                     | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)               |
| 3.6.12     | Tingkat kematangan UKPBJ                                                    | Kategori | Level 1                                 | Level 3    | Level 3    | Level 4    | Level 2    | Level 2    | Level 2    | Sekretariat Daerah |
| 3.6.13     | Cakupan fasilitasi dan dukungan pelayanan kepada pimpinan daerah            | Persen   | 100                                     | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 99,85      | Sekretariat Daerah |
| 3.6.14     | Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program sumedang simpati            | Persen   | 30                                      | 65         | 70         | 75         | 89         | 82         | 99,32      | Sekretariat Daerah |
| 3.6.15     | Cakupan tertib administrative keuangan                                      | Persen   | 90                                      | 100        | 100        | 100        | 98         | 97,07      | 100        | Sekretariat Daerah |
| 3.6.16     | Cakupan pengelolaan barang milik daerah                                     | Persen   | 80                                      | 100        | 100        | 100        | 96         | 83,98      | 100        | Sekretariat Daerah |
| <b>3.7</b> | <b>Sekretariat Dprd</b>                                                     |          |                                         |            |            |            |            |            |            |                    |
| 3.8.1      | Persentase fasilitasi dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsins DPRD | Persen   | 93,4                                    | 100        | 100        | 100        | 92,75      | 93,68      | 97.14      | Sekretariat DPRD   |
| <b>4</b>   | <b>Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>                                   |          |                                         |            |            |            |            |            |            |                    |
| <b>4.1</b> | <b>Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>                                          |          |                                         |            |            |            |            |            |            |                    |
| 4.1.1      | Indeks kerukunan umat beragama                                              | Poin     | 72,2                                    | 72,5       | 73         | 100        | 74         | 74         | 74         | Kantor Kesatuan    |

| No    | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>(Sebelum Perubahan) | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD | Target     |            |            | Realisasi  |            |            | Perangkat<br>Daerah                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|
|       |                                                                                          |        |                                                     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                    |
| (1)   | (2)                                                                                      | (3)    | (4)                                                 | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                               |
|       |                                                                                          |        |                                                     |            |            |            |            |            |            | Bangsa Dan Politik                 |
| 4.1.2 | Tingkat cipta kondisi kondusif                                                           | Persen | 100                                                 | 100        | 100        | 80,65      | 100        | 100        | 100        | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 4.1.3 | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu                                              | Persen | 80,60                                               | 80,65      | 80,65      | 100        | 83,5       | 79         | 80         | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 4.1.4 | Persentase ormas yang dibina kategori aktif                                              | Persen | 100                                                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |                                    |

Sumber : Data diolah oleh BAPPPEDA  
 \*) n/a belum ada data dari Perangkat Daerah

**Tabel 2.68**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten**  
**Sumedang Tahun 2022 (Sesudah Perubahan)**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)                                                                    | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TARGET TAHUN 2022 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
| 1. | Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam menunjang Kinerja Pemerintah Daerah dalam menciptakan Kerukunan beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang                                                                           | hasil survei terhadap variabel persepsi, sikap dan kerjasama umat beragama                                                                                                                                                                                                                 | Poin   | 74                | 75.32                     |
| 2. | Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten                            | Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Persentase Realisasi kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat / Persentase Target kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat x 100 % | persen | 100               | 99.49                     |
| 3. |                                                                                                                       | Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi              | Persentase Realisasi kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi / Persentase Target kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang                                                             | persen | 100               | 93.75                     |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)                                               | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                | SATUAN   | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TARGET TAHUN 2022 |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                                           | pembangunan dan ekonomi x 100%                                                                                                                                                                                                            |          |                   |                           |
| 4. |                                                                  | Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi bidang administrasi umum | Persentase Realisasi kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang administrasi umum /Persentase Target perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang administrasi umum x 100 % | persen   | 100               | 95.54                     |
| 5. | Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Indeks Reformasi Perangkat Daerah                                                                         | Skor penilaian dari inspektorat                                                                                                                                                                                                           | poin     | 29.04             | 34.16                     |
| 6. | Perangkat Daerah                                                 | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                              | Skor penilaian dari inspektorat                                                                                                                                                                                                           | Kategori | A                 | A (81.922)                |

Sumber : Analisis Bappppeda 2023

Capaian Sekretariat Daerah dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 98.80 Persen. Adapun Indikator yang belum mencapai target, diantaranya:

A. Indikator Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, ketidaktercapaian indikator ini karena Adanya salah satu indikator program lingkup asisten pemerintahan dan kesra yaitu "Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama serta rencana aksi yang jelas dan terukur" tidak tercapai (target 100%, realisasi 95.92%). Rendahnya respon Perangkat Daerah terkait potensi kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti serta rendahnya kompetensi SDM yang terdapat di lingkup bidang

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menjadi penyebab ketidaktercapaian indikator ini.

- B. Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi, ketidak tercapaian indikator ini karena Adanya salah satu indikator program lingkup asisten perekonomian dan pembangunan yaitu "tingkat kematangan UKPBJ" tidak tercapai (target level 4, realisasi level 2). Kurangnya SDM dalam bidang barang/jasa menjadi salah satu penghambat pencapaian kinerja indikator tersebut.;
- C. Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi bidang administrasi umum, ketidaktercapaian indikator ini karena adanya salah satu indikator program lingkup asisten administrasi umum yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi" tidak tercapai (target 80.00 poin, realisasi 71.82 poin) dikarenakan data yang tersedia kurang memadai, dll.

**Tabel 2.69**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                       | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)                          | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                        | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TARGET TAHUN 2022 |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
| 1. | Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Tingkat Dukungan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                    | Rumus***<br>Penjelasan :<br>Mengukur pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | Persen | 100               | 100                       |
| 2. |                                                         | Tingkat Kepuasan DPRD Atas Dukungan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |                                                                                   | Persen | 80                | 80                        |

Sumber : Analisis Bappppeda 2023

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD sudah mencapai 100 (seratus) Persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut antara lain : 1) Komitmen pimpinan dalam rangka memfasilitasi pencapaian IKU Sekretariat DPRD; 2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang

memadai; 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM; 4) Terjalinnnya kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan unsur Pimpinan dan Anggota DPRD.

**Tabel 2.70**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)               | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TARGET TAHUN 2022 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
| 1. | Optimalnya Fungsi Inspektorat Daerah sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang | Persentase tindak lanjut pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi | Rumus**<br>untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi. | Persen | 92                | 73                        |
| 2. |                                                                                                                                   | Maturitas SPIP                                                            | Rumus***<br>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase implementasi SPIP di setiap OPD yang berjumlah 55 OPD, dalam rangka penilaian level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian Self assessment (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan pengendalian, 2.                                                                                                                                                                      | Persen | Level 3+          | Level 3                   |



| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)     | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TARGET TAHUN 2022 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
|    |                   |                                                                 | Penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern). Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Indikator Opini BPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                           |
| 3. |                   | Persentase penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD          | Rumus*** untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD yang material hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                    | Persen | 5                 | 5                         |
| 4. |                   | Persentase pemenuhan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP | IACM bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan audit internal melalui langkah evolusi kecil yang disusun menjadi lima level kapabilitas progresif, yaitu : Level 1 : Initial, Level 2 : Infrastructure, Level 3 : Integrated, Level 4 : Managed Level 5 : Optimizing Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit internal yang bersangkutan. Semakin meningkatnya ukuran, kompleksitas maupun risiko organisasi. Pada masing-masing level kapabilitas | Persen | 67,08             | 67,08                     |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)                                   | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TARGET TAHUN 2022 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
|    |                   |                                                                                               | tersebut,terdapat enam elemen audit internal,yaitu : Peran dan layanan audit intern;Manajemen SDM;Praktik profesional;Manajeme n kinerja dan akuntabilitas;Hubung an dan budaya organisasi; Struktur tata kelola.Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |                           |
| 5. |                   | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM | Rumus***<br>Zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Pembangunan zona integritas dimulai dari penancangan unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat kementerian/Lembag a, inspektorat daerah). Tim penilai internal penilaian mandiri (self assessment) lembar Kerja Evaluasi (ZI) menuju WBK/WBBM terhadap OPD yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK, sesuai dengan | Level  | 100               | 100                       |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TARGET TAHUN 2022 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
|    |                   |                                                             | Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi |        |                   |                           |

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat sudah mencapai 100 Persen sesuai target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor pendorong ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan perencanaan dengan melakukan *cascade down* agar program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
- b. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan; dan
- c. Adanya pelaksanaan program peningkatan SPIP ke setiap Perangkat Daerah.

**Tabel 2.71**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)                        | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                  | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TARGET TAHUN 2022 |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
| 1. | Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Bermutu | Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum | S Peserta Memenuhi Nilai Literasi x 100%<br>S Peserta Didik | Persen | 46.84             | 61.50                     |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)                        | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                  | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TARGET TAHUN 2022 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
| 2. |                   | Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum | S Peserta Memenuhi Nilai Numerasi x 100%<br>S Peserta Didik | Persen | 26.77             | 41.69                     |

Sumber : Analisis Bappppeda 2023

Literasi dan numerasi merupakan kompetensi yang sifatnya mendasar dan general. Kompetensi literasi merupakan budaya yang harus dimiliki oleh siswa dan diharapkan siswa dapat memahami, menggunakan serta mengevaluasi berbagai jenis teks dalam tulisan, kemampuan dalam berhitung, menghafal dan mendalami sebuah korteks dan cakupan yang luas. Sedangkan kompetensi numerasi merupakan kemampuan guru untuk mendampingi peserta didik dalam mengakses, menggunakan, menafsirkan dan mengkomunikasikan informasi dan ide matematika untuk mengelola berbagai situasi. Berdasarkan data diatas bahwa capaian seluruh indikator kinerja utama Dinas Pendidikan telah melebihi target yang ditetapkan. Ketercapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi para pengajar/guru;
- b. Antusiasme dan semangat para pengajar/guru dan peserta didik dalam pengaplikasian kompetensi literasi dan kompetensi numerasi di tempat belajar dan mengajar;
- c. Pendampingan dan bimbingan teknis terhadap pengajar/guru dalam penerapan kompetensi numerasi dan mengembangkan kompetensi literasi kepada peserta didik; dan
- d. Adanya modul standar kompetensi bagi pengajar/guru Pendidikan Dasar yang digunakan sebagai acuanbagi Lembaga penyelenggaraan Pendidikan dalam merancang dan melaksanakan program pelatihan dan pendampingan pengajar/guru terkait kompetensi numerasi.

**Tabel 2.72**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN          | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TARGET TAHUN 2022 |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 1. | Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan | Ratio Kematian Ibu                                          | Jumlah Kematian Ibu x 100.000 (Konstanta Kelahiran hidup pada kematian ibu) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu 1 tahun                                                                                                                                              | Kelahiran Hidup | 100/100.000 KH    | 107/100.000 KH            |
| 2. |                                               | Ratio Kematian Bayi                                         | Jumlah Kematian Bayi usia 0 – 1 Tahun dikali 1000 ( konstanta kelahiran hidup pada kematian bayi) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu 1 tahun                                                                                                                        | Kelahiran Hidup | 18/1.000 KH       | 14/1.000 KH               |
| 3. |                                               | Prevalensi stunting                                         | Jumlah Balita Usia 0 – 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z – score kurang dari -2 SD dibagi jumlah anak usia 0 – 59 bulan yang diukur PB/TB pada periode tertentu x 100 % | Persen          | 12                | 8.27                      |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TARGET TAHUN 2022 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
| 4. |                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Kesehatan           | Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya dengan kenyataan yang didapatkan | Persen | 91                | 88.44                     |
| 5. |                   | Angka kematian karena DBD (CFR DBD)                         | Jumlah Kematian akibat Penyakit DBD x 100%<br>Jumlah Penderita DBD pada Periode tertentu                                                                                                                                                                                                            | Persen | <1                | 0.688                     |
| 6. |                   | PHBS Tatanan Rumah Tangga                                   | Jumlah Rumah Tangga<br>Jumlah Rumah Tangga yang Sehat                                                                                                                                                                                                                                               | Persen | 60                | 59.12                     |
| 7. |                   | IKM Rumah Sakit                                             | Nilai Indeks X Nilai Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poin   | 93                | 85.31                     |
| 8. |                   | Akreditasi Rumah Sakit sesuai Standar Nasional              | X 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nilai  | 84                | 82                        |

Sumber : Analisis Bapppeda 2023

Secara umum Capaian Dinas Kesehatan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 97.32 Persen. Indikator yang belum mencapai target, diantaranya:

- a. Indikator Ratio Kematian Ibu. Ketidaktercapaian indikator ini karena sebagian besar kematian ibu disebabkan adanya beberapa faktor resiko, yaitu usia ibu > 35 tahun, jumlah kehamilan > 3, Ibu dengan penyakit penyerta (Hypertensi, HIV, DBD, Covid-19);

- b. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Kesehatan. Kurangnya sosialisasi terkait dengan survei yang dilakukan secara digital terhadap kepuasan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien berdampak pula terhadap rendahnya nilai indeks kepuasan yang didapatkan.
- c. Indikator PHBS Tatanan Rumah Tangga terdiri dari 10 indikator. Belum tercapainya indikator ini disebabkan karena adanya beberapa indikator yang belum terpenuhi, diantaranya masih tingginya rumah tangga dengan kategori tidak sehat berdasarkan indikator merokok di dalam ruangan;
- d. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator IKM Rumah Sakit, yaitu terdapat beberapa unit pelayanan yang belum memenuhi target unsur pelayanan dikarenakan pandemi covid 19. Hal ini disebabkan adanya beberapa peraturan mengenai pembatasan jumlah pasien rawat jalan, pembatasan waktu dan jumlah kunjungan pada pasien rawat inap serta penutupan sementara pelayanan baik IGD maupun instalasi lainnya.

**Tabel 2.73**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                     | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten | Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap           | (Panjang Jalan Kondisi Baik dan SEdang)/(Total Panjang Jalan Kabupaten))x 100% | Persen | 81.3              | 86.54              |
| 2. | Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi            | Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi                            | Jumlah Cakupan Areal Irigasi Yang terairi                                      | ha     | 20.633,40         | 20.633,40          |
| 3. | Meningkatnya Keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah      | Ketaatan terhadap RTR                                       | (Realisasi RTRW)/(Rencana Peruntukan))x 100%                                   | Persen | 65                | 68.64              |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)                                           | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                       | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 4. | Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi  | Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria | (Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria)/ (Total Jumlah Penyedia Jasa KONstruksi di Kabupaten Sumedang))x 100% | Persen | 80                | 81.94              |
| 5. | Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum           | Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak                                                    | (Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum)/(JUmlah Penduduk Kabupaten Sumedang))x 100%                                                                           | Persen | 73.6              | 81.56              |
| 6. | Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata | Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata                                         | Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata terhadap Jumlah Bangunan dan Lingkungan                                                                              | Persen | 68.75             | 66.25              |

Sumber : Analisis Bappppeda 2023

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah melampaui target yang ditentukan, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target, yaitu indikator Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata. Faktor penghambat pencapaian indikator tersebut diantaranya adalah 1) kurangnya sosialisasi informasi terkait dengan peta terbaru dalam penataan ruang; dan 2) masih rendahnya pendataan, pengendalian dan pengawasan bangunan Gedung pemerintah.



**Tabel 2.74**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)                         | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                     | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Mewujudkan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas dan Berkelanjutan | Rasio Rumah Layak Huni                                                              | Jumlah Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Seluruh Rumah                                          | Persen | 82.67             | 81.51              |
| 2. |                                                                                          | Persentase Luas Kawasan Kumuh                                                       | Jumlah Luas Permukiman Kumuh terhadap Jumlah Luas Permukiman dan Perumahan                     | Persen | 44.99             | 71.96              |
| 3  |                                                                                          | Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Layak                                   | Jumlah Penduduk terlayani Akses air Limbah Layak x 100 %<br>Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang | Persen | 1.57              | 1.01               |
| 4  | Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan                       | Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi                                    | Jumlah Kasus yang ditangani x 100 %<br>Jumlah Kasus                                            | Persen | 100               | 100                |
| 5  |                                                                                          | Persentase (Jumlah Bidang) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang difasilitasi | Jumlah Luasan Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                    | Persen | 85.63             | 96.46              |

Sumber : Analisis Bappppeda 2023

Beberapa indikator utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan capaiannya belum memenuhi target yang ditentukan, salah satu indikator yang belum tercapai ialah Persentase Luas Kawasan Kumuh. Faktor penghambat pencapaian indikator tersebut erat kaitannya dengan ketidaktercapaian indikator

Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Layak, dikarenakan salah satu kriteria permukiman kumuh adalah peningkatan dalam penyediaan akses sanitasi layak di masyarakat dan dalam hal ini cakupan pelayanan akses sanitasi layak di Kabupaten Sumedang masih belum optimal sehingga berdampak pada aspek lingkungan dan kualitas hidup, selain itu juga factor social budaya, penyediaan sarana dan prasarana, tingkat urbanisasi, dan penyempitan lahan di perkotaan menjadi penyebab lainnya.

**Tabel 2.75**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)                             | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                  | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Jumlah PPKS yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar dibagi Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial kebutuhan dasar x 100 % | Persen | 65                | 86.33              |

Sumber : Analisis Bappppeda 2023

Capaian Dinas Sosial dari Seluruh Indikator Kinerja Utama Melebihi 100.00 Persen dengan Capaian 86,33% dari Target 65% pada Tahun 2022. Data ini menunjukkan tidak ada kendala dalam pelaksanaan.

**Tabel 2.76**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS          | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Jumlah Tenaga | Persentase Pencari kerja                                    |                            | Persen | 20                | 40                 |

|    |                                     |                                                          |  |        |     |     |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------|-----|-----|
|    | Kerja yang ditempatkan              | yang terdaftar dan ditempatkan                           |  |        |     |     |
| 2. | Meningkatnya Hubungan Industrial    | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial |  | Persen | 100 | 100 |
| 3. | Meningkatnya Penempatan Transmigran | Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan                     |  | KK     | 5   | 0   |

Capaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 66.67 Persen, adapun Indikator yang belum mencapai target yaitu Indikator Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan capaiannya yaitu 0 persen. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2022 tidak ada penempatan transmigrasi di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.77**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Optimalnya Pengelolaan Persampahan                                             | Persentase penanganan sampah                                |                                                                                                                                                                                                                                           | Persen | 73                | 100                |
| 2. |                                                                                | Persentase pengurangan sampah                               |                                                                                                                                                                                                                                           | Persen | 26                | 20,04              |
| 3. | Menurunnya Tingkat Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim | Indeks Kualitas Air (IKA)                                   | IKA = $100 - (\sum \text{Sample IPA} > 1 / \sum \text{Sampel} \times 100)$<br>Merupakan Status mutu air yaitu tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan | Poin   | 48,69             | 93,88              |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                         | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
|    |                   |                                                             | membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan |        |                   |                    |
| 4. |                   | Indeks Kualitas Udara (IKU)                                 |                                                    | Poin   | 81,09             | 100                |
| 5. |                   | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)                        |                                                    | Poin   | 59,86             | 98,26              |

Capaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 82,44 Persen, walaupun masih terdapat indikator yang belum mencapai target yaitu Persentase Pengurangan Sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan Kembali sampah menjadi salah satu penghambat pencapaian indikator ini.

**Tabel 2.78**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                            | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Terwujudnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan              | Skor/Nilai Survey Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                                 | Poin   | 91                | 90,68              |
| 2. |                                                                   | Persentase Kependudukan Dokumen Kependudukan                | Jumlah Kartu Keluarga yang <u>diterbitkan</u> x 100%<br>Jumlah Pemohon Kartu keluarga<br>Jumlah KTP yang <u>diterbitkan</u> x 100%<br>Jumlah Pemohon KTP<br>Jumlah KIA yang <u>diterbitkan</u> x 100% | Persen | 97                | 99,98              |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
|    |                   |                                                             | Jumlah Pemohon KIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                    |
| 3. |                   | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil             | <p>Jumlah Akte Kelahiran 0- 18 Tahun yang <u>diterbitkan</u> x 100%</p> <p>Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun</p> <p>Jumlah Akte Kematian yang <u>diterbitkan</u> x 100%</p> <p>Jumlah Pemohon Akta Kematian</p> <p>Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang <u>diterbitkan</u> x 100%</p> <p>Jumlah Pemohon Pasangan Nikah Non Muslim</p> | Persen | 92                | 98,33              |

Capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 99,88 Persen, adapun Indikator yang belum mencapai target yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan dengan capaian kinerja 90,68 persen, indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan karena adanya keluhan masyarakat terhadap jumlah antrian pelayanan Adminduk di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang yang terbatas serta kurangnya sosialisasi terkait dengan berbagai aplikasi pelayanan Adminduk secara online.

**Tabel 2.79**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat | Persentase status Desa Mandiri                              | umlah Desa (Berkembang+Cepat Berkembang) x 100%<br>Jumlah Desa (270 Desa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persen | 30,74             | 30                 |
| 2. |                                                      | Persentase Status Desa Maju                                 | Jumlah BUMDes (Maju+Berkembang) x 100%<br>Jumlah BUMDes (270 Desa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persen | 52,22             | 54,81              |
| 3. |                                                      | Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan          | Jumlah Bobot Seluruh Desa (*Jumlah Desa (270 Desa))<br>Keterangan*<br>1. Penetapan APBDES Tepat Waktu (20%)<br>2. Perencanaan telah menggunakan Siskeudes (15%)<br>3. Penganggaran telah menggunakan Siskeudes (15%)<br>4. Penatausahaan telah menggunakan siskeudes (15%)<br>5. Pelaporan telah menggunakan siskeudes (15%)<br>Operator telah terlatih menggunakan siskeudes (20%) | Persen | 20                | 20                 |

Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 99.20 Persen. Adapun faktor yang mendorong pencapaian tersebut adalah peran pemerintah desa yang signifikan terhadap pembangunan desanya melalui peningkatan infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintah.

**Tabel 2.80**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI | SATUAN    | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 1. | Optimalisasi Pengendalian Penduduk Melalui KB                                  | Total Fertility Rate (TFR)                                  |                            | Kelahiran | 2.07              | 2.08               |
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Keluarga                                              | Persentase Keluarga Pra Sejahtera                           |                            | Persen    | 3,97              | 2.84               |
| 3. |                                                                                | Persentase Keluarga Sejahtera 1                             |                            | Persen    | 17,09             | 15.41              |
| 4. | Meningkatnya Perlindungan Serta Pemberdayaan Perempuan dan Anak Secara Optimal | Persentase Perempuan Yang Mampu Memenuhi Kehidupan Keluarga |                            | Persen    | 22,65             | 1.91               |
| 5. |                                                                                | Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan                |                            | Persen    | 0,003             | 0.003              |
| 6. |                                                                                | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak                    |                            | Persen    | 0,005             | 0.018              |
| 7. |                                                                                | Kabupaten Layak Anak                                        | Skor KLA yang diperoleh    | Persen    | 750               | 674.6              |

Capaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 75.10 Persen, adapun indikator yang belum mencapai target, antara lain :

a. Indikator Persentase Perempuan yang Mampu Memenuhi Kehidupan Keluarga, indikator ini tidak dapat mencapai target diasumsikan karena masih rendahnya latar belakang Pendidikan, masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam sector formal

ataupun informal terutama dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta kewirausahaan.

- b. Indikator Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak, indikator ini tidak dapat mencapai target karena 1) masih rendahnya bimbingan dan pembinaan terhadap keluarga dalam mendidik anak dan membina keluarga; dan 2) belum tersedianya legalitas atau kebijakan perlindungan anak (pencegahan pelecehan seksual dan perundungan) di lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat.
- c. Indikator Kabupaten Layak Anak, indikator ini tidak dapat mencapai target karena masih terdapat kekurangan yang harus dipenuhi dalam syarat penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
- d. Indikator Total Fertility Rate (TFR), indikator ini tidak mencapai target yang telah ditentukan karena 1) masih tingginya angka drop out akseptor; 2) masih rendahnya angka kesertaan KB; dan 3) masih tingginya angka kelahiran menurut umur.

**Tabel 2.81**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                       | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)     | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Fasilitas Penunjang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Cakupan Kelancaran , Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Pemasangan Pemasangan Jalan/Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan x 100 %<br>Jumlah Kendaraan yang diuji /registrasi per tahun x 100 %<br>Jumlah Kendaraan Wajib Uji / Registrasi per Tahun<br>Jumlah Jaringan Manajemen Rekayasa yg direalisasikan /Jumlah Jaringan Manajemen Rekayasa Lalu | Persen | 64,96             | 85,22              |



| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN / FORMULASI | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|--------------------|
|    |                   |                                                             | Lintas Ruas Jalan<br>x100 % |        |                   |                    |

Capaian Dinas Perhubungan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

**Tabel 2.82**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                             | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)                                      | CARA PENGUKURAN / FORMULASI                                                                                                                                                                                                  | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik                        | Persentase Masyarakat dalam memahami program - program unggulan bupati dan wakil bupati Sumedang | Jumlah koresponden yg memahami<br>Jumlah koresponden yg ada X100%<br>( Sesuai kesepakatan dengan pihak BAPPPPEDA Kab. Sumedang )                                                                                             | Persen | 50                | 74,29              |
| 2. | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai SPBE                                                                                       | Penjumlahan dari Setiap Nilai Indikator yang dihitung X nilai tingkat kematangan dan bobot indicator ( Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2018 KEMENPAN RB) | Poin   | 4,1               | 3,84               |
| 3. | Tingkat Kemanaan Informasi Pemerintah Daerah                  | Score Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)                                                    | Penjumlahan dari Setiap Nilai Indikator yang dihitung X nilai tingkat kematangan dan bobot indicator                                                                                                                         | Skor   | 350               | 395                |

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                           | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
|    |                                        |                                                             | Penilaian dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia ( BSSN-RI ) |        |                   |                    |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan | Persentase Ketersediaan data sesuai dengan standar          | Jumlah Datasheet yg masuk/ada<br>Jumlah Datasheet yg harus ada X 100%                | Persen | 100               | 100                |

Capaian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dari Seluruh Indikator Kinerja Utama mencapai 98.41 persen, adapun indikator yang belum mencapai target yaitu indikator Nilai SPBE, karena berdasarkan hasil reuiu yang dilakukan oleh Kemenpan RB masih terdapat beberapa indikator yang harus diperbaiki ataupun dilengkapi kekurangannya sehingga sesuai dengan penilaian per kategorinya.

**Tabel 2.83**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Menengah, Perindustrian**  
**dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)           | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                            | SATUAN   | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
| 1. | Terwujudnya Koperasi Modern di Kabupaten Sumedang | Jumlah Koperasi Yang Modern                                           | Jumlah Koperasi Modern Thn (n)                                                        | Koperasi | 2                 | 2                  |
| 2. | Meningkatnya Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang    | Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omset                                    | Jumlah Usaha Mikro Thn (n)                                                            | UMKM     | 1000              | 1000               |
| 3. | Peningkatan Volume Perdagangan                    | Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil | Jumlah Kontribusi PDRB dari:<br><u>Sektor Perdagangan</u><br>Jumlah Total PDRB x 100% | Persen   | 1,55 – 2,77       | 2,78               |

| NO | SASARAN STRATEGIS                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
|    |                                      | dan Sepedah Motor                                           |                                                                           |        |                   |                    |
| 4. | Peningkatan Unit Usaha Industri Baru | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengelolaan                | $\frac{\text{PDRB Industri t-1}}{\text{PDRB Industri t-1}} \times 100 \%$ | Persen | 2,20 – 4,15       | 3,12               |

Capaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 93.80 Persen, adapun Indikator yang belum mencapai target yaitu indikator Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengelolaan.

**Tabel 2.84**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                  | SATUAN        | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal                                     | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang                          | Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang | Rupiah (Juta) | 1.927.391         | 3.015.703          |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan PTSP | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan                 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan | Poin          | 88,31             | 88,61              |

Capaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

**Tabel 2.85**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)            | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                              | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Peran Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan | Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif                            | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang ada dibagi Jumlah Organisasi yang dibina              | Persen | 100               | 100                |
| 2. | Meningkatnya Capaian Prestasi Olahraga                     | Jumlah Atlet Berprestasi dan Memperoleh Medali dan Penghargaan Atlet   | Jumlah Perolehan Medali yang mendapatkan medali/penghargaan pada penyelenggaraan        | Orang  | 20                | 15                 |
| 3. | Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah                       | Cakupan Perlindungan/ Pengembangan/ Pemanfaatan / Pembinaan Kebudayaan | Jumlah OPK dibagi Jumlah OPK yang dilindungi/dilestarikan/dikembangkan dan dimanfaatkan | Persen | 100               | 100                |
| 4. | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan                           | Jumlah Kunjungan Wisatawan                                             | Data Jumlah Wisatawan yang berkunjung                                                   | Orang  | 700.000           | 1.293.953          |
| 5. | Mengembangkan SubSektor Ekonomi Kreatif                    | Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan                   | Jumlah Sub Sektor dibagi Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina/dikembangkan            | Persen | 100               | 100                |

Capaian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 90,10 Persen, adapun indikator yang belum mencapai target, diantaranya:

- a. Indikator Persentase organisasi kepemudaan yang aktif, ketidaktercapaian pada indikator ini karena 1) belum optimalnya sistem manajemen data bidang kepemudaan serta tata kelola induk organisasi kepemudaan; 2) Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan; 3) Rendahnya partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan.

- b. Indikator Jumlah Atlet berprestasi dan Memperoleh Medali dan Penghargaan Atlet, pada indikator ini belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena 1) Belum optimalnya penyelenggaraan event-event keolahragaan yang dilaksanakan; 2) Semakin ketatnya penyeleksian atlet cabor yang dilakukan oleh KONI.

**Tabel 2.86**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Arsip dan Perpustakaan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN   | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan Arsip   | Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal                      | Jumlah seluruh nilai pengawasan internal perangkat daerah dibagi dengan jumlah perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kategori | BB                | B                  |
| 2. | Meningkatnya Literasi Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                      | Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi dengan Jumlah Penduduk kemudian dikalikan 100%<br>Keterangan : UPLM<br>1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM<br>2 = Ketercukupan koleksi UPLM<br>3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM<br>4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM<br>5 = Perpustakaan berSNP UPLM<br>6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM<br>7 = Anggota perpustakaan | Poin     | 11,08             | 12,16              |

| NO | SASARAN STRATEGIS                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 3. | Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat | Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat                        | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk + Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat + Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk + Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Poin   | 50,50             | 48.71              |

Capaian Dinas Arsip dan Perpustakaan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 98.81 Persen, adapun Indikator yang belum mencapai target, diantaranya:

- a. Indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat, faktor penghambat dalam pencapaian kinerja pada target yang telah ditetapkan yaitu 1) Pelaksanaan kegiatan tingkat kegemaran membaca menggunakan sistem survei sehingga masyarakat tidak seluruhnya mengisi kuesioner yang disebarakan sehingga kami mengambil sampel sebanyak 400 responden, 2) belum adanya sosialisasi tentang budaya baca melalui perpustakaan digital yang telah diperkenalkan sejak tahun 2021 dalam Upaya pelayanan bidang perpustakaan selama pandemi berlangsung; 3) masih rendahnya minat baca masyarakat.
- b. Indikator Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal, ketidaktercapaian pada indikator ini karena 1) Jumlah fungsional arsiparis di Kabupaten Sumedang masih sedikit sehingga di setiap Perangkat Daerah belum tersedia arsiparis; 2) Tidak tersedianya sarana prasarana kearsipan sesuai standar nasional, 3) Masih rendahnya perhatian pimpinan Perangkat daerah terhadap kearsipan.

**Tabel 2.87**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                       | SATUAN            | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian | Jumlah Produksi Komoditas pertanian :                       |                                                                                                                                                  | Ton               | 903.027           |                    |
| 2. |                                           | A. Tanaman Pangan:                                          | Menjumlahkan produksi padi dan tanaman pangan lainnya dari tiap kecamatan                                                                        | Ton               | 647.544           | 636.114            |
| 3. |                                           | - Padi                                                      | Menjumlahkan produksi padi (sawah dan ladang) dari tiap kecamatan                                                                                | Ton               | 414.398           | 457.401            |
| 4. |                                           | - Jagung                                                    | Menjumlahkan produksi jagung (sawah dan ladang) dari tiap kecamatan                                                                              | Ton               | 117.816           | 64.954             |
| 5. |                                           | - Tanaman Pangan Lainnya                                    | Menjumlahkan produksi kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan talas dari tiap kecamatan                                                   | Ton               | 115.330           | 113.759            |
| 6. |                                           | B. Hortikultura                                             | Menjumlahkan produksi sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias dari tiap kecamatan                                                    | Ton               | 247.937           | 266.096            |
| 7. |                                           | C. Perkebunan                                               | Menjumlahkan produksi tanaman tahunan (kopi, kelapa, kakao, cengkeh, teh, aren) dan tanaman semusim (tembakau, lada, vanili) dari tiap kecamatan | Ton               | 7.547             | 8.505              |
| 8. | Menjamin Ketersediaan Pangan Pokok        | Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok                            | Ketersediaan pangan pokok =                                                                                                                      | Kg/ Kapita/ tahun | 216               | 259,6              |

Capaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 94.00 Persen, adapun Indikator yang belum mencapai target, diantaranya:

- a. Indikator Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Jagung belum mencapai sesuai target yang telah ditetapkan karena tingginya harga benih jagung yang mengakibatkan timbulnya ketergantungan petani terhadap bantuan benih jagung dari pemerintah, hal ini mengakibatkan berkurangnya luas tanam jagung.
- b. Indikator Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Lainnya belum mencapai target yang sudah ditetapkan disebabkan oleh penurunan produktivitas dari komoditas tanaman pangan karena curah hujan yang tinggi, serta menurunnya minat petani dalam usaha budidaya komoditas tanaman pangan selain pagi dikarenakan harga jual yang rendah.

**Tabel 2.88**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Peternakan dan Perikanan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                   | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Terwujudnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdayasaing | Produksi Perikanan Tangkap                                  | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Tercatat                                                                                                              | Ton    | 1.400,54          | 1.409,36           |
| 2. |                                                                 | Produksi Perikanan Budidaya                                 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang Tercatat                                                                                                             | Ton    | 8.241,16          | 8.411,71           |
| 3. | Meningkatnya Produktivitas Pertanian                            | Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan             | ((Populasi Ternak & Produksi Peternakan Tahun n - Populasi Ternak & Produksi Peternakan Tahun n-1)/ Populasi Ternak & Produksi Peternakan Tahun n-1) X 100 % | Persen | 5,18              | 5,86               |
| 4. | Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada                       | Persentase Wilayah yang Terkendali dari                     | (Jumlah Kecamatan yang terkendali dari PHMS / Jumlah                                                                                                         | Persen | 80,8              | 84,62              |



| NO | SASARAN STRATEGIS                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI     | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
|    | Tanaman Serta Penyakit pada Hewan | Penyakit Hewan Menular Strategis                            | Kecamatan Keseluruhan) X 100 % |        |                   |                    |

Capaian Dinas Perikanan dan Peternakan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

**Tabel 2.89**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)   | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah | $\frac{(X1 + X2 + X3)}{3} \times 100\%$ <p>X1 =<br/> <u>Jumlah Sasaran Renstra Tahun Berkenaan</u> x 100%<br/> Jumlah Sasaran RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan</p> <p>X2 =<br/> <u>Jumlah Sasaran RKPD Tahun Berkenaan</u> x 100%<br/> Jumlah Sasaran RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan</p> <p>X3 =<br/> <u>Jumlah Sasaran Renja Tahun Berkenaan</u> x 100%<br/> Jumlah Sasaran RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan</p> | Persen | 100               | 100                |
| 2. |                                                      | Tingkat Ketercapaian                                          | <u>Realisasi Pembangunan</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Persen | 100               | 100                |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                           | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)         | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                          | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
|    |                                                             | Target Pembangunan Daerah yang Berkategori "Baik"                   | <u>Daerah Tahun Berkenaan</u><br>Target Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan                                                                          |        |                   |                    |
| 3. | Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan | Jumlah Penelitian dan pengembangan yang <u>diimplementasikan</u> $(n) \times 100\%$<br>Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan $(n-1)$ | Persen | 100               | 100                |

Capaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

**Tabel 2.90**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                               | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, Disiplin ASN dan Pelayanan Kepegawaian | Indeks Sistem Merit                                         | Penilaian Secara Online melalui Situs SIPINTER ( <a href="https://sipinter.kasn.go.id">https://sipinter.kasn.go.id</a> ) | Poin   | 315               | 328,5              |
| 2. |                                                                          | Indeks Profesionalitas ASN                                  | Penilaian Secara Online melalui Situs DJASN ( <a href="https://ip-jasn.bkn.go.id">https://ip-jasn.bkn.go.id</a> )        | Poin   | 74                | 63,78              |

Capaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 93.09 Persen, adapun Indikator yang belum mencapai target yaitu Indikator Indeks

Profesionalitas ASN ketidaktercapaian pada indikator ini karena Masih dalam proses penilaian.

**Tabel 2.91**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                                   | SATUAN   | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan                         | Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)                                 | Kategori | WTP               | WTP                |
| 2. |                                                            | Penetapan APBD                                              | Tepat waktu atau tidak tepat Waktu (penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Pedoman penyusunan APBD Yang dikeluarkan oleh Kemendagri | Status   | Tepat Waktu       | Tepat Waktu        |

Capaian Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

**Tabel 2.92**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                      | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                   | Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Realisasi Pendapatan | Persen | 17,77             | 18,22              |

Capaian Badan Pendapatan Daerah dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

**Tabel 2.93**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                           | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)                  | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                   | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Terciptanya Kondisi Wilayah yang aman, nyaman, tertib, teratur, dan tentram | Cakupan Penanganan Penyelenggaraan K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban) | $\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3}}{\text{Jumlah Penyelesaian}} \times 100 \%$ | Persen | 100               | 100                |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran                             | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran                                          | $\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran}}{\text{Jumlah Penanganan Kebakaran}}$                   | Persen | 90                | 72,73              |

Capaian Satuan Polisi Pamong Praja dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

**Tabel 2.94**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN/ FORMULASI                                                                                                                 | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Negara Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat | Indeks Ketahanan Daerah                                     | Penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana<br>Formulasi :<br>Tool IKD BPBD Provinsi Jawa Barat | Poin   | 0,49              | 0,49               |
| 2. |                                                                                                                   | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif                              | $100 \% - \frac{\text{kejadian (kejadian konflik) / Potensi Konflik}}{100\%}$                                                              | Persen | 100               | 100                |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN / FORMULASI                                                 | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 3. | Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengurus atau Anggota Partai Politik dalam Kehidupan Berdemokrasi | Tingkat Bina Demokratisasi                                  | Jumlah Parpol yang mengikuti Pembinaan / Jumlah Total Anggota Parpol x 100% | Persen | 100               | 100                |

Capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

**Tabel 2.95**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN) | CARA PENGUKURAN / FORMULASI                                                 | SATUAN | TARGET TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Negara Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif                              | 100 % - kejadian (kejadian konflik) / Potensi Konflik) x 100%               | Persen | 100               | 100                |
| 2. | Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengurus atau Anggota Partai Politik dalam Kehidupan Berdemokrasi                 | Tingkat Bina Demokratisasi                                  | Jumlah Parpol yang mengikuti Pembinaan / Jumlah Total Anggota Parpol x 100% | Persen | 100               | 100                |

Capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

**Tabel 2.96**  
**Rekapitulasi Capaian indikator Program dan Kegiatan**  
**RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

| NO | PERANGKAT DAERAH<br>/ UNIT KERJA                            | ANGGARAN        | REALISASI       | JUMLAH<br>PROGRAM | JUMLAH<br>KEGIATAN | CAPAIAN<br>KINERJA<br>Triwulan IV<br>TAHUN 2022 |        |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|
|    |                                                             |                 |                 |                   |                    | K                                               | Rp (%) |
| 1  | DINAS PENDIDIKAN                                            | 951.076.053.059 | 921.338.161.139 | 2                 | 11                 | 97.10                                           | 96.87  |
| 2  | DINAS KESEHATAN                                             | 202.182.354.205 | 194.943.617.811 | 6                 | 14                 | 97.32                                           | 96.42  |
|    | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH                                  | 231.679.963.244 | 231.679.963.244 | 2                 | 2                  | 100                                             | 100.00 |
| 3  | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN TATA<br>RUANG                   | 119.569.214.792 | 118.849.713.052 | 9                 | 19                 | 99.39                                           | 99.39  |
| 4  | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN | 33.694.911.521  | 33.494.816.470  | 9                 | 18                 | 95.80                                           | 91.41  |
| 5  | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                               | 18.804.492.196  | 17.548.362.049  | 3                 | 10                 | 100                                             | 93.32  |
| 6  | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH                   | 5.470.429.973   | 5.404.732.827   | 2                 | 10                 | 100                                             | 98.80  |

| NO | PERANGKAT DAERAH<br>/ UNIT KERJA                                                                                   | ANGGARAN       | REALISASI      | JUMLAH<br>PROGRAM | JUMLAH<br>KEGIATAN | CAPAIAN<br>KINERJA<br>Triwulan IV<br>TAHUN 2022 |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                                                    |                |                |                   |                    | K                                               | Rp (%) |
| 7  | DINAS SOSIAL                                                                                                       | 20.319.198.693 | 19.742.433.245 | 6                 | 14                 | 100                                             | 97.16  |
| 8  | DINAS TENAGA KERJA<br>DAN TRANSMIGRASI                                                                             | 11.929.425.312 | 11.399.752.486 | 6                 | 17                 | 96.67                                           | 95.56  |
| 9  | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP DAN<br>KEHUTANAN                                                                         | 28.456.886.374 | 26.619.548.956 | 9                 | 14                 | 92.44                                           | 91.54  |
| 10 | DINAS<br>KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                                                                      | 9.846.994.528  | 9.374.882.887  | 4                 | 13                 | 99.88                                           | 95.21  |
| 11 | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA                                                                    | 14.002.583.337 | 13.352.118.087 | 4                 | 9                  | 99.20                                           | 95.35  |
| 12 | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK | 28.513.095.043 | 27.591.037.678 | 8                 | 19                 | 95.10                                           | 94.77  |

| NO | PERANGKAT DAERAH<br>/ UNIT KERJA                                              | ANGGARAN       | REALISASI      | JUMLAH<br>PROGRAM | JUMLAH<br>KEGIATAN | CAPAIAN<br>KINERJA<br>Triwulan IV<br>TAHUN 2022 |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                               |                |                |                   |                    | K                                               | Rp (%) |
| 13 | DINAS PERHUBUNGAN                                                             | 25.596.576.075 | 24.023.544.067 | 2                 | 16                 | 100                                             | 93.85  |
| 14 | DINAS KOMUNIKASI,<br>INFORMATIKA,<br>PERSANDIAN DAN<br>STATISTIK              | 15.803.246.259 | 14.998.542.704 | 5                 | 12                 | 98.41                                           | 94.91  |
| 15 | DINAS KOPERASI<br>USAHA KECIL<br>MENENGAH<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN | 16.154.849.476 | 15.421.965.847 | 9                 | 19                 | 93.80                                           | 92.46  |
| 16 | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU               | 9.889.657.948  | 9.304.073.425  | 6                 | 13                 | 100                                             | 94.08  |
| 17 | DINAS ARSIP DAN<br>PERPUSTAKAAN                                               | 9.139.862.732  | 8.591.449.272  | 4                 | 14                 | 98.80                                           | 94.00  |
| 18 | DINAS PERIKANAN DAN<br>PETERNAKAN                                             | 18.370.432.156 | 17.450.996.656 | 9                 | 17                 | 100                                             | 95.00  |
| 19 | DINAS PARIWISATA,<br>KEBUDAYAAN,                                              | 15.930.722.026 | 15.250.238.766 | 11                | 26                 | 90.14                                           | 90.04  |



| NO | PERANGKAT DAERAH<br>/ UNIT KERJA                                              | ANGGARAN        | REALISASI       | JUMLAH<br>PROGRAM | JUMLAH<br>KEGIATAN | CAPAIAN<br>KINERJA<br>Triwulan IV<br>TAHUN 2022 |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                               |                 |                 |                   |                    | K                                               | Rp (%) |
|    | KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                                    |                 |                 |                   |                    |                                                 |        |
| 20 | DINAS PERTANIAN DAN<br>KETAHANAN PANGAN                                       | 50.861.473.969  | 49.496.900.709  | 8                 | 19                 | 94.00                                           | 93.32  |
| 21 | INSPEKTORAT                                                                   | 21.316.452.663  | 19.908.537.825  | 3                 | 11                 | 100                                             | 93.37  |
| 22 | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN,<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>DAERAH | 17.374.936.484  | 16.286.671.090  | 4                 | 18                 | 100                                             | 93.74  |
| 23 | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH                                                    | 18.743.177.477  | 17.520.822.646  | 2                 | 9                  | 100                                             | 93.48  |
| 24 | BADAN KEUANGAN<br>DAN ASET DAERAH                                             | 551.592.509.550 | 549.968.918.734 | 3                 | 13                 | 100                                             | 99.71  |
| 25 | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA               | 14.601.778.932  | 13.943.915.105  | 2                 | 11                 | 93.09                                           | 92.49  |
| 26 | SEKRETARIAT DAERAH                                                            | 69.181.900.648  | 65.752.897.668  | 3                 | 19                 | 98.80                                           | 95.04  |
| 27 | SEKRETARIAT DPRD                                                              | 67.781.537.600  | 62.862.166.446  | 2                 | 16                 | 100                                             | 92.74  |

| NO | PERANGKAT DAERAH<br>/ UNIT KERJA     | ANGGARAN       | REALISASI      | JUMLAH<br>PROGRAM | JUMLAH<br>KEGIATAN | CAPAIAN<br>KINERJA<br>Triwulan IV<br>TAHUN 2022 |        |
|----|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|
|    |                                      |                |                |                   |                    | K                                               | Rp (%) |
| 28 | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK | 12.495.278.080 | 11.974.733.775 | 6                 | 12                 | 100                                             | 95.83  |
| 29 | KECAMATAN BUAHDUA                    | 3.151.546.497  | 2.963.526.309  | 6                 | 13                 | 100                                             | 94.03  |
| 30 | KECAMATAN CIBUGEL                    | 3.109.998.601  | 2.902.540.427  | 6                 | 13                 | 100                                             | 93.33  |
| 31 | KECAMATAN<br>CIMALAKA                | 3.521.009.468  | 3.276.553.238  | 6                 | 13                 | 100                                             | 93.06  |
| 32 | KECAMATAN<br>CIMANGGUNG              | 3.693.584.808  | 3.440.064.753  | 6                 | 13                 | 100                                             | 93.14  |
| 33 | KECAMATAN CISARUA                    | 3.622.291.776  | 3.376.490.029  | 6                 | 13                 | 100                                             | 93.21  |
| 34 | KECAMATAN CISITU                     | 3.248.044.716  | 3.021.205.199  | 6                 | 13                 | 100                                             | 93.02  |
| 35 | KECAMATAN<br>CONGGEANG               | 3.395.261.280  | 3.162.124.970  | 6                 | 16                 | 100                                             | 93.13  |
| 36 | KECAMATAN<br>DARMARAJA               | 4.029.654.453  | 3.828.196.242  | 6                 | 14                 | 100                                             | 95.00  |
| 37 | KECAMATAN GANEAS                     | 2.875.543.844  | 2.679.829.831  | 6                 | 13                 | 100                                             | 93.19  |
| 38 | KECAMATAN JATIGEDE                   | 3.852.835.208  | 3.565.747.845  | 6                 | 14                 | 100                                             | 92.55  |

| NO | PERANGKAT DAERAH<br>/ UNIT KERJA | ANGGARAN       | REALISASI      | JUMLAH<br>PROGRAM | JUMLAH<br>KEGIATAN | CAPAIAN<br>KINERJA<br>Triwulan IV<br>TAHUN 2022 |        |
|----|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|
|    |                                  |                |                |                   |                    | K                                               | Rp (%) |
| 39 | KECAMATAN<br>JATINANGOR          | 4.377.566.608  | 4.106.020.771  | 6                 | 15                 | 100                                             | 93.80  |
| 40 | KECAMATAN<br>JATINUNGGAL         | 2.964.691.672  | 2.819.080.670  | 6                 | 14                 | 100                                             | 95.08  |
| 41 | KECAMATAN<br>PAMULIHAN           | 3.820.037.912  | 3.588.329.647  | 6                 | 15                 | 100                                             | 93.93  |
| 42 | KECAMATAN PASEH                  | 3.462.279.373  | 3.296.842.041  | 6                 | 13                 | 100                                             | 95.22  |
| 43 | KECAMATAN<br>RANCAKALONG         | 3.481.861.400  | 3.313.714.495  | 6                 | 15                 | 100                                             | 95.17  |
| 44 | KECAMATAN SITURAJA               | 3.785.545.728  | 3.531.037.321  | 6                 | 15                 | 100                                             | 93.28  |
| 45 | KECAMATAN SUKASARI               | 3.336.333.972  | 3.103.686.346  | 6                 | 14                 | 100                                             | 93.03  |
| 46 | KECAMATAN<br>SUMEDANG SELATAN    | 10.966.886.080 | 10.542.078.642 | 6                 | 15                 | 100                                             | 96.13  |
| 47 | KECAMATAN<br>SUMEDANG UTARA      | 9.469.009.156  | 8.885.004.842  | 6                 | 14                 | 100                                             | 93.83  |
| 48 | KECAMATAN SURIAN                 | 3.068.590.196  | 2.856.177.137  | 6                 | 14                 | 100                                             | 93.08  |
| 49 | KECAMATAN<br>TANJUNGKERTA        | 3.207.373.052  | 2.988.702.541  | 6                 | 14                 | 100                                             | 93.12  |

| NO     | PERANGKAT DAERAH<br>/ UNIT KERJA | ANGGARAN          | REALISASI         | JUMLAH<br>PROGRAM | JUMLAH<br>KEGIATAN | CAPAIAN<br>KINERJA<br>Triwulan IV<br>TAHUN 2022 |        |
|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|
|        |                                  |                   |                   |                   |                    | K                                               | Rp (%) |
| 50     | KECAMATAN<br>TANJUNGMEDAR        | 3.030.926.388     | 2.882.795.077     | 6                 | 14                 | 100                                             | 95.11  |
| 51     | KECAMATAN<br>TANJUNGSARI         | 3.967.488.288     | 3.695.758.201     | 6                 | 14                 | 100                                             | 93.15  |
| 52     | KECAMATAN TOMO                   | 2.778.081.392     | 2.587.622.632     | 6                 | 14                 | 100                                             | 93.14  |
| 53     | KECAMATAN<br>UJUNGJAYA           | 3.727.583.656     | 3.366.428.800     | 6                 | 14                 | 100                                             | 90.31  |
| 54     | KECAMATAN WADO                   | 3.055.173.393     | 2.914.476.465     | 6                 | 13                 | 100                                             | 95.39  |
| JUMLAH |                                  | 2.795.322.749.856 | 2.722.728.104.724 |                   |                    | 98.92                                           | 97.40  |

1. Dinas Pendidikan

Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan melaksanakan 2 program dan 11 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.951.076.053.059,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pendidikan mencapai 96.87% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 97.10% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Pengelolaan Pendidikan terdapat sub kegiatan yang belum mampu mencapai target hal tersebut dikarenakan hasil evaluasi Dinas Pendidikan ada sebanyak 8 SD dan 4 SMP dinyatakan Jauh di bawah kompetensi minimum dan sebanyak 24 SD dan 4 SMP Jauh di bawah kompetensi minimum, dan tindak lanjut Dinas Pendidikan dalam perbaikan pencapaian kinerja pada kegiatan tersebut yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan.

2. Pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.202.182.354.205,00 (Dua Ratus Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Kesehatan mencapai 96.42% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 97.32% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdapat kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, hal tersebut tidak mencapai target karena Sebagian besar kematian ibu disebabkan karena adanya faktor resiko, yaitu usia ibu > 35 tahun, jumlah kehamilan > 3, Ibu dengan penyakit penyerta (Hypertensi, HIV, DBD, Covid-19), pada sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan pada sub kegiatan tersebut belum mencapai target dikarenakan Belum semua pelanggan /pasien yang mengakses survei kepuasan masyarakat melalui barcode paham cara penggunaannya dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Ada beberapa unit pelayanan yang belum memenuhi target unsur pelayanan dikarenakan pandemic covid 19, ada beberapa peraturan yang yang memang perlu ditekankan seperti pembatasan jumlah pasien rawat jalan, pembatasan waktu dan jumlah kunjungan pada pasien rawat inap serta penutupan sementara pelayanan baik IGD maupun instalasi lainnya, dan pada Program Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan yaitu pada kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan pada sub Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, ketidak tercapaian indikator kinerja program tersbut dikarenakan Masih tingginya rumah tangga dengan katagori tidak sehat berdasarkan indikator merokok di dalam ruangan.

3. Pada Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan 9 program dan 19 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.119.569.214.792,00 (Seratus Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mencapai 99.39% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 99.39% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan

pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

4. Pada Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 9 program dan 18 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.33.694.911.521,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencapai 91.41% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 95.80% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum tercapainya target pada program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota hal tersebut disebabkan karena berbenturan dengan masyarakat dengan sumber daya manusia tidak menggunakan pekerja setempat dalam pelaksanaan pengerjaan rumah tidak layak huni.
5. Pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 3 program dan 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.18.804.492.196,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Juta Empat ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja mencapai 93.32% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 pada realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.5.470.429.973,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan

Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencapai 98.80% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

7. Pada Tahun 2022 Dinas Sosial melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.20.319.198.693,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Sosial mencapai 97.16% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 pada realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial.
8. Pada Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 6 program dan 17 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.11.929.425.312,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai 95.56% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 96.67% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum tercapainya target pada program Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



hal ini disebabkan karena Pada Tahun 2022 tidak ada Penempatan Transmigrasi.

9. Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan 9 program dan 14 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.28.456.886.374,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai 91.54% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 92.44% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Pada Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 4 program dan 13 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.9.846.994.528,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 95.21% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 99.88% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.14.002.583.337,00 (Empat Belas Miliar Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai 95.35% atau

masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 99.20% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

12. Pada Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 8 program dan 19 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.28.513.095.043,00(Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 94.77% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 95.10% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal belum mencapai target hal tersebut disebabkan karena masih tingginya angka Pasangan Usia Subur muda dan masih cukup tinggi angka kelahiran, pada program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota program tersebut belum memenuhi target karena Masih rendahnya perempuan yang mandiri, pada program Program Perlindungan Perempuan pada kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota pada program ini belum mencapai target karena Tingginya kasus

kekerasan terhadap anak sehingga dapat melebihi angka semula yang telah di targetkan.

13. Pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan melaksanakan 2 program dan 16 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.25.596.576.075,00 (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Perhubungan mencapai 93.85% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
14. Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.15.803.246.259,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mencapai 94.91% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 98.41% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
15. Pada Tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan 9 program dan 19 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.16.154.849.476,00 (Enam Belas Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

mencapai 92.46% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 93.80% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri belum mencapai target yang dipengaruhi oleh sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri hal tersebut disebabkan karena peningkatan unit usaha baru dalam sub kegiatan ini data yang ada masih perlu di perbaharui.

16. Pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.9.889.657.948,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencapai 94.08% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
17. Pada Tahun 2022 Dinas Arsip dan Perpustakaan melaksanakan 4 program dan 14 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.9.139.862.732,00 (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan mencapai 94.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 98.80% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum

mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Pembinaan Perpustakaan belum mencapai target hal tersebut dipengaruhi oleh sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tingkat kegemaran membaca menggunakan sistem survei sehingga masyarakat tidak seluruhnya mengisi kuisioner yang disebarkan sehingga kami mengambil sampel sebanyak 400 responden, belum adanya sosialisasi tentang budaya baca melalui media digital, pada tahun 2021-2022 masih terkendala dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga perpustakaan daerah belum melayani masyarakat secara optimal, dan pada Program Pengelolaan Arsip belum mencapai target yang telah ditetapkan hal tersebut dipengaruhi oleh sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis hal tersebut disebabkan karena Belum tersebarnya arsiparis di OPD, Tidak Tersedianya sarana prasarana kearsipan sesuai standar nasional Masih Rendahnya perhatian pimpinan SKPD terhadap kearsipan.

18. Pada Tahun 2022 Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan 9 program dan 17 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.18.370.432.156,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan mencapai 95.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan.
19. Pada Tahun 2022 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan 11 program dan 26 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.15.930.722.026,00 (Lima Belas Milyar

Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Puluh Enam Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mencapai 90.04% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 90.14% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan belum mncapai target yang telah ditentukan hal tersebut dipengaruhi oleh sub kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota hal ini disebabkan karena Belum Optimalnya Sistem manajemen data dan informasi bidang kepemudaan, Belum Optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan; dan Belum optimalnya tata kelola induk organisasi kepemudaan, dan ketidak tercapaian pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dipengaruhi oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan OlahragaTingkat Daerah Kabupaten/Kota hal ini disebabkan karena Belum optimalnya penyelenggaraan event-event keolahragaan yang dilaksanakan.

20. Pada Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan 8 program dan 19 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.50.861.473.969,00 (Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencapai 93.32% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 94.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian belum mencapai target yang telah ditetpkan hal ini dipengaruhi oleh kegiatan Pengembangan

Prasarana Pertanian dan Pembangunan Prasarana Pertanian hal ini disebabkan karena Penurunan luas tanam jagung dikarenakan ketergantungan petani terhadap bantuan benih jagung dari pemerintah, ketergantungan ini disebabkan oleh harga benih jagung yang tinggi, dan Penurunan produktivitas dari komoditas tanaman pangan lainnya karena curah hujan yang tinggi serta menurunnya minat petani dalam usaha budidaya ubi kayu dikarenakan harga jual rendah, sehingga program tersebut belum dapat mencapai target.

21. Pada Tahun 2022 Inspektorat melaksanakan 3 program dan 11 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.21.316.452.663,00 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Inspektorat mencapai 93.37% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumedang.
22. Pada Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 4 program dan 18 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.17.374.936.484,00 (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mencapai 93.74% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan



Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

23. Pada Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.18.743.177.477,00 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sempat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah mencapai 93.48% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
24. Pada Tahun 2022 Badan Keuangan Dan Aset Daerah melaksanakan 3 program dan 13 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.551.592.509.550,00 (Lima Ratus Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah mencapai 99.71% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
25. Pada Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 2 program dan 11 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.14.601.778.932,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mencapai 92.49% atau



masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 93.09% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Kepegawaian Daerah capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan hal tersebut juga dipengaruhi oleh kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN pada kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditentukan karena dalam kegiatan tersebut ada aktifitas penilaian peningkatan kompetensi yang telah diinput dalam Situs DJASN BKN dan peningkatan kompetensi tersebut masih dalam proses penilaian, sehingga mengakibatkan dalam kegiatan ini belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

26. Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program dan 19 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.69.181.900.648,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Sekretariat Daerah mencapai 95.04% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 98.80% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada program tersebut belum dapat mencapai target dan dipengaruhi oleh salah satu kegiatan Fasilitasi Kerjasama pada kegiatan ini belum dapat mencapai target dikarenakan Masih rendahnya respon Perangkat Daerah terkait potensi Kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti, kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memenuhi kompetensi, dll. Program Perekonomian dan Pembangunan belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ketidak tercapaian dalam kegiatan ini disebabkan karena tingkat kematangan UKPBJ" tidak tercapai

(target level 4, realisasi level 2) dikarenakan kurangnya SDM bidang Barang/Jasa, dll, dan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ketidak tercapaian program ini dipengaruhi oleh kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi ketidak tercapaian kegiatan tersebut dikarenakan "indeks reformasi birokrasi" tidak tercapai (target 80.00 poin, realisasi 71.82 poin) dikarenakan data yang tersedia kurang memadai, dll sehingga pada program tersebut belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

27. Pada Tahun 2022 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program dan 16 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.67.781.537.600,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Sekretariat DPRD mencapai 92.74% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD.
28. Pada Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 program dan 12 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.12.495.278.080,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai 95.83% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi setiap tahun yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang disusun berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda yang disusun berdasarkan Nota Kesepakatan KUA serta PPA dan berpedoman Kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, dan aspek belanja, dan aspek pembiayaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Pendapatan terdiri dari:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Dana Transfer; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
2. Aspek Belanja Terdiri dari:
  - a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Subsidi;
  - c. Belanja Hibah;
  - d. Belanja Bantuan Sosial;
  - e. Belanja Modal;
  - f. Belanja Tidak Terduga; dan
  - g. Belanja Transfer.
3. Aspek Pembiayaan Terdiri dari :
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Perencanaan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan keuangan daerah dengan menganalisis pengelolaan keuangan daerah yang ada pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026 ini dilakukan analisis terhadap kinerja APBD dan neraca keuangan daerah tahun 2018-2023.

Pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada Tahun 2020 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana secara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mendapatkan reviu dari BPK RI dengan hasil Opini BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan Pemda Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan merupakan salah satu bukti kualitas pengelolaan keuangan Pemda Kabupaten Sumedang yang baik. Secara umum, komponen APBD Kabupaten Sumedang terdiri atas:

1. Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Subsidi, Belanja Modal, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer; dan
3. Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan negara di daerah diantaranya ditunjukkan dengan ;

1. Kepatuhan Terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditunjukkan dengan Penetapan APBD Tepat waktu Pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
2. Pencapaian Indikator Opini BPK. Selama periode 2015- 2021, Pemda Kabupaten Sumedang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Kinerja Keuangan Lima Tahun kebelakang terdapat perbedaan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, namun Tahun 2021 dan Tahun 2022 telah dikonversikan kedalam struktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan

lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran 2022 dapat dilihat Bahwa:

1. Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Sumedang (1,27)% hal ini akibatnya adanya dampak covid pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 yang mengakibatkan terkontraskimya perekonomian nasional dan daerah, hal ini menyebabkan roda perekonomian melambat yang secara langsung berdampak terhadap penerimaan daerah baik pada sektor pendapatan asli daerah maupun kemampuan dana transfer pemerintah pusat.
2. Pada sektor Belanja terdapat pertumbuhan yang sangat signifikan pada belanja sosial dan belanja tidak terduga, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang secara berkelanjutan melakukan intervensi terhadap dampak penyebaran covid -19, adapun Pertumbuhan Pada Belanja tidak terduga sangat besar hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian serta Fleksibilitas dalam penanganan dampak covid 19 serta mengakomodir kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam pemulihan ekonomi atas dampak dari penyebaran covid -19.

Adapun Kinerja keuangan Tahun Anggarn 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**  
**Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2022**

| NO                                 | Uraian                                             | REALIASI             |                      |                      |                      |                      |                      | PERTUMBUHAN |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                                    |                                                    | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022 * unaudit       | %           |
| 1                                  | Pendapatan Asli Daerah                             | 553.257.332.797,18   | 432.181.933.419,04   | 463.528.449.322,47   | 444.430.247.449,44   | 470.281.819.936,29   | 518.977.017.762,84   | (1,27)      |
| 1.1                                | Pajak Daerah                                       | 157.256.500.230,00   | 188.935.600.771,00   | 205.521.153.763,00   | 180.222.612.157,00   | 198.326.131.839,00   | 221.379.897.839,00   | 7,08        |
| 1.2                                | Retribusi Daerah                                   | 11.985.080.540,00    | 11.186.704.824,00    | 10.263.528.592,00    | 8.300.206.720,00     | 6.731.513.966,00     | 9.276.102.181,00     | (5,00)      |
| 1.3                                | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan | 7.846.040.130,00     | 8.659.141.530,00     | 9.727.083.922,00     | 10.929.327.383,00    | 11.164.520.965,00    | 12.643.497.231,00    | 10,01       |
| 1.4                                | Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah        | 376.169.711.897,18   | 223.400.486.294,04   | 238.016.683.045,47   | 244.978.101.189,44   | 254.059.653.166,29   | 275.677.520.511,84   | (6,03)      |
| Kontribusi pad terhadap Pendapatan |                                                    | 20,81                | 15,72                | 15,10                | 15,30                | 16,58                | 17,97                |             |
| 2                                  | Pendapatan Transfer                                | 2.071.212.093.959,00 | 2.197.209.580.315,00 | 2.477.441.508.850,00 | 2.318.347.156.451,00 | 2.233.686.395.115,00 | 2.365.573.220.560,00 | 2,69        |
| 2.1                                | Pendapatan Transfer Pusat                          | 1.811.817.714.778,00 | 1.856.138.700.762,00 | 2.010.347.393.385,00 | 1.934.732.545.970,00 | 1.892.016.917.253,00 | 2.039.555.091.538,00 | 2,40        |
| 2.1.1                              | Dana Bagi Hasil                                    | 95.607.165.916,00    | 103.162.614.015,00   | 86.594.143.619,00    | 97.420.477.270,00    | 131.182.200.770,00   | 103.446.216.613,00   | 1,59        |
| 2.1.2                              | Dana Alokasi Umum                                  | 1.119.198.604.000,00 | 1.125.798.410.000,00 | 1.180.828.452.000,00 | 1.065.253.951.000,00 | 1.058.905.256.000,00 | 1.052.231.192.000,00 | (1,23)      |
| 2.1.3                              | Dana Alokasi Khusus                                | 379.742.961.862,00   | 409.715.609.147,00   | 474.761.839.166,00   | 465.666.387.700,00   | 429.547.869.483,00   | 609.455.496.125,00   | 9,92        |
| 2.1.5                              | Dana Insentif Daerah                               | -                    | 25.000.000.000,00    | 49.222.417.000,00    | 84.002.531.000,00    | 45.061.971.000,00    | 37.001.635.000,00    | 10,30       |
| 2.1.6                              | Dana Desa                                          | 217.268.983.000,00   | 192.462.067.600,00   | 218.940.541.600,00   | 222.389.199.000,00   | 227.319.620.000,00   | 237.420.551.800,00   | 1,79        |
| 2.2                                | Pendapatan Transfer antar Daerah                   | 259.394.379.181,00   | 341.070.879.553,00   | 467.094.115.465,00   | 383.614.610.481,00   | 341.669.477.862,00   | 326.018.129.022,00   | 4,68        |
| 2.2.1                              | Pendapatan Bagi Hasil                              | 122.309.363.299,00   | 138.154.127.057,00   | 136.437.021.093,00   | 134.266.775.232,00   | 138.496.690.338,00   | 164.239.295.900,00   | 6,07        |

| NO                                                  | Uraian                               | REALIASI                    |                             |                             |                             |                             |                             | PERTUMBUHAN |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                                     |                                      | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020                        | 2021                        | 2022 * unaudit              | %           |
| 2.2.2                                               | Bantuan Keuangan                     | 137.085.015.882,00          | 202.916.752.496,00          | 330.657.094.372,00          | 249.347.835.249,00          | 203.172.787.524,00          | 161.778.833.122,00          | 3,37        |
| <b>Kontribusi dana transfer terhadap pendapatan</b> |                                      | <b>77,90</b>                | <b>79,90</b>                | <b>80,71</b>                | <b>79,82</b>                | <b>78,77</b>                | <b>81,91</b>                |             |
| 3                                                   | Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah | 34.473.960.000,00           | 120.505.200.000,00          | 128.579.320.000,00          | 141.612.082.721,00          | 131.896.910.224,00          | 3.411.071.029,00            | (37,04)     |
| 3.1                                                 | Pendapatan Hibah                     | 34.473.960.000,00           | 120.505.200.000,00          | 128.579.320.000,00          | 141.612.082.721,00          | 131.896.910.224,00          | 3.411.071.029,00            | (37,04)     |
| <b>Kontribusi lain lain terhadap pendapatan</b>     |                                      | <b>1,30</b>                 | <b>4,38</b>                 | <b>4,19</b>                 | <b>4,88</b>                 | <b>4,65</b>                 | <b>0,12</b>                 |             |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>                     |                                      | <b>2.658.943.386.756,18</b> | <b>2.749.896.713.734,04</b> | <b>3.069.549.278.172,47</b> | <b>2.904.389.486.621,44</b> | <b>2.835.865.125.275,29</b> | <b>2.887.961.309.351,84</b> |             |
| 5                                                   | Belanja Daerah                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |             |
| 5.1                                                 | Belanja Operasi                      | 1.763.442.461.556,00        | 1.939.209.336.796,20        | 2.033.478.659.494,69        | 1.949.881.150.929,00        | 1.955.814.792.559,00        | 1.967.401.426.401,00        | 2,21        |
| 5.1.1                                               | Belanja Pegawai                      | 1.120.921.326.924,00        | 1.207.726.369.047,00        | 1.237.660.161.762,00        | 1.176.209.206.916,00        | 1.182.261.056.674,00        | 1.169.624.519.375,00        | 0,85        |
| 5.1.2                                               | Belanja Barang dan Jasa              | 605.780.947.732,00          | 667.454.118.674,20          | 756.858.884.832,69          | 738.886.933.513,00          | 709.093.186.272,00          | 733.747.913.310,00          | 3,91        |
| 5.1.3                                               | Belanja Subsidi                      | -                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 95.782.500,00               |             |
| 5.1.4                                               | Belanja Bunga                        | -                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 500.587.500,00              | 0,00                        |             |
| 5.1.5                                               | Belanja Hibah                        | 35.249.088.900,00           | 61.460.999.575,00           | 35.591.700.000,00           | 33.562.360.500,00           | 59.369.641.613,00           | 57.220.254.016,00           | 10,17       |
| 5.1.6                                               | Belanja Bantuan Sosial               | 1.491.098.000,00            | 2.567.849.500,00            | 3.367.912.900,00            | 1.222.650.000,00            | 4.590.320.500,00            | 6.712.957.200,00            | 35,11       |
| <b>Kontribusi Belanja Operasi Terhadap Belanja</b>  |                                      | <b>67,24</b>                | <b>72,09</b>                | <b>67,28</b>                | <b>67,98</b>                | <b>72,11</b>                | <b>69,50</b>                |             |
| 5.2                                                 | Belanja Modal                        | 498.572.941.044,00          | 410.348.713.390,02          | 605.698.351.012,28          | 498.497.676.052,00          | 353.171.282.580,00          | 470.908.866.968,00          | (1,14)      |
| 5.2.1                                               | Belanja Modal Tanah                  | 9.542.001.250,00            | 1.495.850.000,00            | 18.722.717.888,00           | 33.328.265.935,00           | 734.126.000,00              | 27.007.255.100,00           | 23,13       |



| NO                                                  | Uraian                                     | REALIASI                    |                             |                             |                             |                             |                             | PERTUMBUHAN   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                     |                                            | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020                        | 2021                        | 2022 * unaudit              | %             |
| 5.2.2                                               | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 107.607.831.115,00          | 153.458.978.889,00          | 241.517.168.061,00          | 198.148.478.293,00          | 114.178.507.498,00          | 183.985.337.475,00          | 11,32         |
| 5.2.3                                               | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 73.933.672.273,00           | 68.450.328.843,00           | 135.342.553.756,28          | 142.070.482.407,00          | 137.937.639.826,00          | 129.991.095.312,00          | 11,95         |
| 5.2.4                                               | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 269.965.794.218,00          | 125.051.716.488,00          | 145.563.152.918,00          | 68.315.142.935,00           | 87.697.349.012,00           | 116.106.286.763,00          | (15,53)       |
| 5.2.5                                               | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 10.931.946.500,00           | 8.917.460.300,00            | 14.605.384.629,00           | 7.089.359.075,00            | 12.623.660.244,00           | 13.275.041.363,00           | 3,96          |
| 5.2.6                                               | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 26.591.695.688,00           | 52.974.378.870,02           | 49.947.373.760,00           | 49.545.947.407,00           | 0,00                        | 543.850.955,00              | (54,06)       |
| <b>Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja</b>    |                                            | <b>19,01</b>                | <b>15,25</b>                | <b>20,04</b>                | <b>17,38</b>                | <b>13,02</b>                | <b>16,64</b>                |               |
| <b>5.3</b>                                          | <b>Belanja Tidak Terduga</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>71.844.600,00</b>        | <b>12.699.900,00</b>        | <b>46.401.777.454,00</b>    | <b>23.812.747.069,00</b>    | <b>2.786.124.220,00</b>     | <b>149,55</b> |
| 5.3.1                                               | Belanja Tidak Terduga                      | 0,00                        | 71.844.600,00               | 12.699.900,00               | 46.401.777.454,00           | 23.812.747.069,00           | 2.786.124.220,00            | 149,55        |
| <b>Kontribusi BTT Terhadap Belanja</b>              |                                            | <b>-</b>                    | <b>127,65</b>               | <b>168,64</b>               | <b>141,04</b>               | <b>99,24</b>                | <b>132,54</b>               |               |
| <b>5.4</b>                                          | <b>Belanja Transfer</b>                    | <b>360.477.725.200,00</b>   | <b>340.456.714.540,00</b>   | <b>383.432.110.751,00</b>   | <b>373.484.680.048,00</b>   | <b>379.331.582.631,00</b>   | <b>389.605.052.943,00</b>   | <b>1,57</b>   |
| 5.4.1                                               | Belanja Bagi Hasil Pajak                   | 12.400.670.000,00           | 16.954.494.800,00           | 22.205.040.000,00           | 19.380.406.816,00           | 21.817.918.102,00           | 27.321.453.500,00           | 17,11         |
| 5.4.2                                               | Belanja Bagi Hasil Retribusi               | 1.828.815.500,00            | 1.364.464.000,00            | 1.133.614.000,00            | 663.701.000,00              | 1.623.351.820,00            | 2.164.870.000,00            | 3,43          |
| 5.4.3                                               | Bantuan Keuangan ke Desa                   | 345.342.361.300,00          | 321.452.739.940,00          | 359.171.585.751,00          | 353.440.572.232,00          | 355.890.312.709,00          | 355.289.549.126,00          | 0,57          |
| 5.4.4                                               | Bantuan Keuangan Lainnya                   | 905.878.400,00              | 685.015.800,00              | 921.871.000,00              | 0,00                        | 0,00                        | 4.829.180.317,00            | 39,75         |
| <b>Kontribusi Belanja Transfer Terhadap Belanja</b> |                                            | <b>13,75</b>                | <b>12,66</b>                | <b>12,69</b>                | <b>13,02</b>                | <b>13,99</b>                | <b>13,76</b>                |               |
| <b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>                        |                                            | <b>2.622.493.127.800,00</b> | <b>2.690.086.609.326,22</b> | <b>3.022.621.821.157,97</b> | <b>2.868.265.284.483,00</b> | <b>2.712.130.404.839,00</b> | <b>2.830.701.470.532,00</b> | <b>1,54</b>   |

| NO                            | Uraian                                                               | REALIASI          |                   |                    |                    |                    |                    | PERTUMBUHAN |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                               |                                                                      | 2017              | 2018              | 2019               | 2020               | 2021               | 2022 * unaudit     | %           |
| SURPLUS /DEFISIT              |                                                                      | 36.450.258.956,18 | 59.810.104.407,82 | 46.927.457.014,50  | 36.124.202.138,44  | 123.734.720.436,29 | 57.259.838.819,84  | 9,45        |
| 6                             | Pembiayaan Daerah                                                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |             |
| 6.1                           | Penerimaan Pembiayaan Daerah                                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |             |
| 6.1.1                         | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                     | 22.521.812.431,85 | 47.929.367.789,03 | 107.166.975.872,67 | 112.930.843.943,17 | 117.474.646.639,61 | 232.339.367.075,90 | 59,48       |
| 6.1.2                         | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank                        | 0,00              | 21.000.000.000,00 | 124.443.530.800,00 | 51.000.000.000,00  | 0,00               | 0,00               | 55,84       |
| 6.1.3                         | Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 7.000.000.000,00   | 0,00               |             |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan  |                                                                      | 22.521.812.431,85 | 68.929.367.789,03 | 231.610.506.672,67 | 163.930.843.943,17 | 124.474.646.639,61 | 232.339.367.075,90 | 59,48       |
| 6.2                           | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                               |                   |                   |                    |                    |                    |                    |             |
| 6.2.1                         | Pembentukan Dana Cadangan                                            |                   |                   |                    |                    |                    | 15.000.000.000,00  |             |
| 6.2.2                         | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank       | 1.600.000.000,00  | 11.730.815.171,00 | 158.688.567.480,00 | 71.000.000.000,00  | 7.000.000.000,00   | 0,00               | 44,63       |
| 6.2.3                         | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.180.399.442,00   | 0,00               | 0,00               |             |
| 6.2.4                         | Penyertaan Modal Daerah                                              | 7.623.306.332,00  | 7.649.367.436,00  | 6.918.552.264,00   | 9.400.000.000,00   | 8.870.000.000,00   | 12.329.670.795,00  | 10,09       |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan |                                                                      | 9.223.306.332,00  | 19.380.182.607,00 | 165.607.119.744,00 | 82.580.399.442,00  | 15.870.000.000,00  | 27.329.670.795,00  | 24,27       |
| PEMBIYAAAN NETTO              |                                                                      | 13.298.506.099,85 | 49.549.185.182,03 | 66.003.386.928,67  | 81.350.444.501,17  | 108.604.646.639,61 | 205.009.696.280,90 | 72,82       |

| NO | Uraian                                             | REALIASI          |                    |                    |                    |                    |                    | PERTUMBUHAN |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|    |                                                    | 2017              | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022 * unaudit     | %           |
|    | SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN<br>ANGGARAN BERKENAAN | 49.748.765.056,03 | 109.359.289.589,85 | 112.930.843.943,17 | 117.474.646.639,61 | 232.339.367.075,90 | 262.269.535.100,74 | 39,44       |

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menyajikan informasi posisi keuangan (suatu entitas pelaporan) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Persentase kenaikan/(penurunan) Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selama tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2  
Necara Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

| NO  | URAIAN                             | 31 DESEMBER 2020<br>(Rp) | 31 DESEMBER<br>2021 (Rp) | KENAIKAN/<br>(PENURUNA<br>N) (%) | 31 DESEMBER<br>2022 (ESTIMASI)<br>(Rp) | KENAIKAN/<br>(PENURUNAN)<br>(%) |
|-----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | ASET                               |                          |                          |                                  |                                        |                                 |
| 1.1 | ASET LANCAR                        | 197.856.046.636,21       | 325.915.892.336,96       | 64,72                            | 239.231.629.474,82                     | (26,60)                         |
| 1.2 | INVESTASI<br>JANGKA PANJANG        | 108.755.751.125,34       | 138.049.272.383,73       | 26,94                            | 146.036.922.359,35                     | 5,79                            |
| 1.3 | ASET TETAP                         | 2.999.729.426.716,04     | 3.060.050.155.275,52     | 2,01                             | 3.666.236.359.199,89                   | 19,81                           |
| 1.4 | DANA CADANGAN                      | -                        | -                        | -                                | 15.000.000.000,00                      | -                               |
| 1.5 | ASET LAINNYA                       | 45.381.383.891,37        | 3.795.589.724,56         | (91,64)                          | 4.499.547.773,32                       | 18,55                           |
|     | JUMLAH ASET                        | 3.351.722.608.368,96     | 3.527.810.909.720,77     | 5,25                             | 4.071.004.458.807,38                   | 15,40                           |
| 2.  | KEWAJIBAN                          |                          |                          |                                  |                                        |                                 |
| 2.1 | KEWAJIBAN<br>JANGKA PENDEK         | 39.212.641.743,00        | 45.767.985.652,15        | 16,72                            | 90.894.611.842,93                      | 98,60                           |
|     | JUMLAH<br>KEWAJIBAN                | 39.212.641.743,00        | 45.767.985.652,15        | 16,72                            | 90.894.611.842,93                      | 98,60                           |
| 3.  | EKUITAS                            |                          |                          |                                  |                                        |                                 |
| 3.1 | EKUITAS                            | 3.312.509.966.625,96     | 3.482.042.924.068,62     | 5,12                             | 3.980.109.846.964,45                   | 14,30                           |
|     | JUMLAH<br>KEWAJIBAN DAN<br>EKUITAS | 3.351.722.608.368,96     | 3.527.810.909.720,77     | 5,25                             | 4.071.004.458.807,38                   | 15,40                           |

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari tahun 2020 ke tahun 2021 secara umum mengalami kenaikan sebesar 5,25%, hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan terdapat penurunan pada aset lainnya. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 secara keseluruhan menunjukkan kenaikan kembali dengan total persentase 15,40%, yang dipengaruhi oleh kenaikan investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, serta penurunan pada aset lainnya.

Kewajiban dari tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar 16,72%, kemudian dari tahun 2021 ke tahun 2022

mengalami kenaikan kembali sebesar 98,60%. Ekuitas dari tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar 5,12%, dan dari tahun 2021 ke tahun 2022 kenaikannya sebesar 14,30%.

Rata-rata persentase kenaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana selama tiga tahun terakhir sebesar 10,33%, masing-masing secara berturut-turut mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 5,25%, kemudian dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 15,40%.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan Pengelolaan Keuangan telah di atur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang mekanisme Penyusunan Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 kebijakan Pengelolaan Keuangan bersifat dinamis sehingga sangat mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal ini banyaknya regulasi – regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat setelah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan. Pemerintah daerah dalam pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggarna 2020 telah melaksanakan *refocusing* dan realokasi berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat dalam Penanganan Dampak Ekonomi atas penyebaran wabah covid-19.

Bedasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa kebijakan terkait dengan proporsi penggunaan belanja pegawai tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paing rendah atau tidak boleh kurang dari 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa serta Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai dan Infrastruktur Pelayanan Publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung

sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan atau paling lama pada Tahun Anggaran 2026.

**3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Berdasarkan Realisasi Anggaran Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, Proporsi Alokasi Anggaran sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Proporsi Realiasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022**

| NO                                                 | Uraian                                     | REALIASI                    |                             |                             |                             |                             | RENCANA                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                    |                                            | 2018                        | 2019                        | 2020                        | 2021                        | 2022 * unaudit              | 2023                        |
| <b>5</b>                                           | <b>Belanja Daerah</b>                      |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>5.1</b>                                         | <b>Belanja Operasi</b>                     | <b>1.939.209.336.796,20</b> | <b>2.033.478.659.494,69</b> | <b>1.949.881.150.929,00</b> | <b>1.955.814.792.559,00</b> | <b>1.967.401.426.401,00</b> | <b>2.134.972.336.184,00</b> |
| 5.1.1                                              | Belanja Pegawai                            | 1.207.726.369.047,00        | 1.237.660.161.762,00        | 1.176.209.206.916,00        | 1.182.261.056.674,00        | 1.169.624.519.375,00        | 1.255.084.934.591,00        |
| 5.1.2                                              | Belanja Barang dan Jasa                    | 667.454.118.674,20          | 756.858.884.832,69          | 738.886.933.513,00          | 709.093.186.272,00          | 733.747.913.310,00          | 673.184.501.593,00          |
| 5.1.3                                              | Belanja Subsidi                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 95.782.500,00               | 350.000.000,00              |
| 5.1.4                                              | Belanja Bunga                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 500.587.500,00              | 0,00                        | 0,00                        |
| 5.1.5                                              | Belanja Hibah                              | 61.460.999.575,00           | 35.591.700.000,00           | 33.562.360.500,00           | 59.369.641.613,00           | 57.220.254.016,00           | 193.362.870.000,00          |
| 5.1.6                                              | Belanja Bantuan Sosial                     | 2.567.849.500,00            | 3.367.912.900,00            | 1.222.650.000,00            | 4.590.320.500,00            | 6.712.957.200,00            | 12.990.030.000,00           |
| <b>Kontribusi Belanja Operasi Terhadap Belanja</b> |                                            | <b>72,09</b>                | <b>67,28</b>                | <b>67,98</b>                | <b>72,11</b>                | <b>69,50</b>                | <b>76,38</b>                |
| <b>5.2</b>                                         | <b>Belanja Modal</b>                       | <b>410.348.713.390,02</b>   | <b>605.698.351.012,28</b>   | <b>498.497.676.052,00</b>   | <b>353.171.282.580,00</b>   | <b>470.908.866.968,00</b>   | <b>217.570.638.977,00</b>   |
| 5.2.1                                              | Belanja Modal Tanah                        | 1.495.850.000,00            | 18.722.717.888,00           | 33.328.265.935,00           | 734.126.000,00              | 27.007.255.100,00           | 1.202.500.000,00            |
| 5.2.2                                              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 153.458.978.889,00          | 241.517.168.061,00          | 198.148.478.293,00          | 114.178.507.498,00          | 183.985.337.475,00          | 54.799.095.687,00           |
| 5.2.3                                              | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 68.450.328.843,00           | 135.342.553.756,28          | 142.070.482.407,00          | 137.937.639.826,00          | 129.991.095.312,00          | 75.150.624.290,00           |
| 5.2.4                                              | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 125.051.716.488,00          | 145.563.152.918,00          | 68.315.142.935,00           | 87.697.349.012,00           | 116.106.286.763,00          | 82.864.099.000,00           |
| 5.2.5                                              | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 8.917.460.300,00            | 14.605.384.629,00           | 7.089.359.075,00            | 12.623.660.244,00           | 13.275.041.363,00           | 516.900.000,00              |
| 5.2.6                                              | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 52.974.378.870,02           | 49.947.373.760,00           | 49.545.947.407,00           | 0,00                        | 543.850.955,00              | 3.037.420.000,00            |
| <b>Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja</b>   |                                            | <b>15,25</b>                | <b>20,04</b>                | <b>17,38</b>                | <b>13,02</b>                | <b>16,64</b>                | <b>7,78</b>                 |
| <b>5.3</b>                                         | <b>Belanja Tidak Terduga</b>               | <b>71.844.600,00</b>        | <b>12.699.900,00</b>        | <b>46.401.777.454,00</b>    | <b>23.812.747.069,00</b>    | <b>2.786.124.220,00</b>     | <b>13.155.296.795,00</b>    |
| 5.3.1                                              | Belanja Tidak Terduga                      | 71.844.600,00               | 12.699.900,00               | 46.401.777.454,00           | 23.812.747.069,00           | 2.786.124.220,00            | 13.155.296.795,00           |

| NO                                           | Uraian                       | REALIASI             |                      |                      |                      |                      | RENCANA              |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                              |                              | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022 * unaudit       | 2023                 |
| Kontribusi BTT Terhadap Belanja              |                              | 0,003                | 0,00                 | 1,62                 | 0,88                 | 0,10                 | 0,47                 |
| 5.4                                          | Belanja Transfer             | 340.456.714.540,00   | 383.432.110.751,00   | 373.484.680.048,00   | 379.331.582.631,00   | 389.605.052.943,00   | 429.624.477.900,00   |
| 5.4.1                                        | Belanja Bagi Hasil Pajak     | 16.954.494.800,00    | 22.205.040.000,00    | 19.380.406.816,00    | 21.817.918.102,00    | 27.321.453.500,00    | 28.867.662.500,00    |
| 5.4.2                                        | Belanja Bagi Hasil Retribusi | 1.364.464.000,00     | 1.133.614.000,00     | 663.701.000,00       | 1.623.351.820,00     | 2.164.870.000,00     | 1.683.386.400,00     |
| 5.4.3                                        | Bantuan Keuangan ke Desa     | 321.452.739.940,00   | 359.171.585.751,00   | 353.440.572.232,00   | 355.890.312.709,00   | 355.289.549.126,00   | 399.073.429.000,00   |
| 5.4.4                                        | Bantuan Keuangan Lainnya     | 685.015.800,00       | 921.871.000,00       | 0,00                 |                      | 4.829.180.317,00     | 10.000.000.000,00    |
| Kontribusi Belanja Transfer Terhadap Belanja |                              | 12,66                | 12,69                | 13,02                | 13,99                | 13,76                | 15,37                |
| JUMLAH BELANJA DAERAH                        |                              | 2.690.086.609.326,22 | 3.022.621.821.157,97 | 2.868.265.284.483,00 | 2.712.130.404.839,00 | 2.830.701.470.532,00 | 2.795.322.749.856,00 |

\*2018s.d 2019 LRA (audit bpk), 2022 (Unaudit) dan 2023 (APBD)



Berdasarkan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat bahwa proposi penggunaan Anggaran paling tinggi untuk Belanja Operasi Rata – Rata sebesar 69,79% yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negera dan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan Proporsi Anggaran untuk Belanja Modal dikabupaten Sumedang rata- rata sebesar 16,47%, dan apabila dilihat kedalaman penggunaan pada belanja pegawai dan belanja modal yang memiliki proporsi penggunaan yang tinggi selama tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Kontirubusi Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah**  
**Tahun 2018 -2023**

| NO    | Uraian                  | REALISASI |       |       |       |       | RENCANA |
|-------|-------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|
|       |                         | 2018      | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023    |
| 5     | Belanja Daerah          |           |       |       |       |       |         |
| 5.1   | Belanja Operasi         | 72,09     | 67,28 | 67,98 | 72,11 | 69,50 | 76,38   |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai         | 44,90     | 40,95 | 41,01 | 43,59 | 41,32 | 44,90   |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24,81     | 25,04 | 25,76 | 26,15 | 25,92 | 24,08   |
| 5.1.3 | Belanja Subsidi         | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01    |
| 5.1.4 | Belanja Bunga           | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,02  | 0,00  | -       |
| 5.1.5 | Belanja Hibah           | 2,28      | 1,18  | 1,17  | 2,19  | 2,02  | 6,92    |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial  | 0,10      | 0,11  | 0,04  | 0,17  | 0,24  | 0,46    |

*\*2018 s.d 2019 LRA (Audit BPK), 2022 (Unaudit) dan 2023 (APBD)*

**Tabel 3.5**  
**Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah**  
**Tahun 2018 – 2023**

| NO    | Uraian                            | REALIASI |       |       |       |       | RENCANA |
|-------|-----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|
|       |                                   | 2018     | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023    |
| 5.2   | Belanja Modal                     | 15,25    | 20,04 | 17,38 | 13,02 | 16,64 | 7,78    |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah               | 0,06     | 0,62  | 1,16  | 0,03  | 0,95  | 0,04    |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5,70     | 7,99  | 6,91  | 4,21  | 6,50  | 1,96    |

| NO    | Uraian                                     | REALIASI |      |      |      |      | RENCANA |
|-------|--------------------------------------------|----------|------|------|------|------|---------|
|       |                                            | 2018     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 2,54     | 4,48 | 4,95 | 5,09 | 4,59 | 2,69    |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 4,65     | 4,82 | 2,38 | 3,23 | 4,10 | 2,96    |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 0,33     | 0,48 | 0,25 | 0,47 | 0,47 | 0,02    |
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 1,97     | 1,65 | 1,73 | 0,00 | 0,02 | 0,11    |

*\*2018 s.d 2019 LRA (Audit BPK), 2022 (Unaudit) dan 2023 (APBD)*

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

**Tabel 3.6**  
**Defisit Rill Kabupaten Sumedang**

| No | Uraian                        | Tahun 2020                 | Tahun 2021                | Tahun 2022               |
|----|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1  | Realisasi Pendapatan          | 2.904.389.486.621,44       | 2.835.865.125.275,29      | 2.887.961.309.351,84     |
| 2  | Dikurangi Realisasi           |                            |                           |                          |
| 3  | Belanja Daerah                | 2.868.265.284.483,00       | 2.712.130.404.839,00      | 2.830.701.470.532,00     |
| 4  | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 82.580.399.442,00          | 15.870.000.000,00         | 27.329.670.795,00        |
|    | <b>Defisit riil</b>           | <b>(46.456.197.303,56)</b> | <b>107.864.720.436,29</b> | <b>29.930.168.024,84</b> |

*\* Tahun 2022 Unaudit*

**Tabel 3.7**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sumedang**

| No | Uraian                                                            | Proporsi dari total defisit riil |                |                |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
|    |                                                                   | Tahun 2020 (%)                   | Tahun 2021 (%) | Tahun 2022 (%) |
| 1  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | (243,09)                         | 108,91         | 93,53          |
| 2  | Pencairan Dana Cadangan                                           | -                                | -              | -              |
| 3  | Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan                   | -                                | -              | -              |
| 4  | Penerimaan Pinjaman Daerah                                        | (109,78)                         | -              | -              |
| 5  | Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD                          | -                                | 6,49           | -              |
| 6  | Penerimaan Piutang Daerah                                         | -                                | -              | -              |

\* Tahun 2022 Unaudit

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sumedang**

| No | Uraian                                                            | Tahun 2020                | Tahun 2021                | 2022                      |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 112.930.843.943,17        | 117.474.646.639,61        | 232.339.367.075,90        |
| 2  | Pencairan Dana Cadangan                                           | -                         | -                         | -                         |
| 3  | Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan                   | -                         | -                         | -                         |
| 4  | Penerimaan Pinjaman Daerah                                        | 51.000.000.000,00         | -                         | -                         |
| 5  | Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD                          | -                         | 7.000.000.000,00          | -                         |
| 6  | Penerimaan Piutang Daerah                                         | -                         | -                         | -                         |
|    | <b>Defisit riil</b>                                               | <b>163.930.843.943,17</b> | <b>124.474.646.639,61</b> | <b>232.339.367.075,90</b> |

\* Tahun 2022 Unaudit

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah.<sup>[1]</sup> Pendanaan Pembangunan Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah yang dapat dilihat dari ruang fiskal/pendapatan dalam mewujudkan pembangunan

daerah yang di susun secara bertahap dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Dalam Penyusunan Pembangunan maka harus terlebih dahulu susun perencanaan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Adapun Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

## **I. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan komponen sebagai berikut:

### **A. Pendapatan Asli Daerah**

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

### **B. Pendapatan Transfer**

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.

### **C. Pendapatan Daerah Yang Sah**

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat;
- 3) Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa

yang akan datang. Pada tahun 2019, Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tercatat sebesar 3,07 Triliun dan sehubungan dampak pandemi Covid-19, pendapatan daerah dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 memiliki rata-rata penurunan sebesar minus 1,97 persen. Komponen Pendapatan Asli Daerah, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,02 persen dengan persentase pertumbuhan tertinggi didapat dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Komponen Pendapatan Transfer memiliki rata-rata penurunan sebesar minus 1,39 persen. Selain itu, untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah juga menunjukkan penurunan sebesar minus 31,38 persen.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang diperkirakan tumbuh membaik. Beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi APBD tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Asumsi proyeksi fiskal mempertimbangkan pada perlambatan ekonomi di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 serta mulai membaik di tahun 2022 pasca pandemi;
  2. Melakukan restrukturisasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, ekstensifikasi basis pajak, dan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi;
  3. Melakukan penyesuaian untuk komponen rincian dampak pembangunan jalan tol dan kawasan industri BUTOMGEDE (Buahdua-Ujungjaya-Tomo-Jatigede);
  4. Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian

Dengan melihat performa Pendapatan Daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Pendapatan Daerah pada masa

yang akan datang diharapkan dapat lebih meningkat dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menegakan regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
4. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).
5. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.
6. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
7. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
8. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan pendapatan asli daerah dengan instansi terkait.
9. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
10. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
11. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
12. Meningkatkan pertumbuhan capaian realisasi potensi Pendapatan Daerah
13. Mengembangkan inovasi transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah
14. Kebijakan akan mengalami penyesuaian Apabila dalam penyusun Perencanaan Tahunan terdapat Kebijakan – Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

## **II. Belanja Daerah**

Belanja Daerah merupakan instrument Peniting dalam menstimulus Pembangunan Daerah dan sangat di pengaruhi oleh kondisi Penerimaan daerah. Hal yang paling utama dari belanja adalah untuk menjaga kualitas belanja daerah agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan hal yang sangat penting bagaimana menjaga integritas belanja agar mampu menjawab secara bertahap permasalahan – permasalahan yang di hadapi oleh Masyarakat.

Mempertahikan Kinerja komponen Belanja pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 bahwa kontribusi terbesar masih pada belanja pegawai, maka pada tahun anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 secara bertahap harus menyesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan Prioritas Belanja Daerah Pada Tahun 2024 Sampai dengan Tahun 2026 diarahkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pendanaan untuk Belanja Wajib dan Mengikat;
2. Pemenuhan Pendanaan untuk Belanja Standar Pelayanan Minimal;
3. Pemenuhan Prosentase Belanja pegawai dan Belanja infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Pemenuhan pendanaan Prioritas Daerah.

### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**

Pada Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun anggaran 2026 memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Komponen Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
2. Arahan dari Pemerintah Pusat terlebih dengan ditetapkannya Undang – Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Pemenuhan Mandatory Spending

4. Skala Prioritas Pendaan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target indikator

Namun dalam proyeksi Pendapatan, Belanja dan pembiayaan dapat terjadi penyesuaian-penyesuaian pada penyusunan Dokumen perencanaan dan Keuangan tahunan baik pada sektor pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dipengaruhi oleh Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kinerja Keuangan pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut proyeksi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 -2026 adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.9**  
**Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2024 sampai dengan 2026 Kabupaten Sumedang**

| NO                                                  | Uraian                                             | Proyeksi                    |                             |                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                     |                                                    | 2024                        | 2025                        | 2026                        |
| <b>1</b>                                            | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                      | <b>704.184.540.664,00</b>   | <b>848.487.223.743,00</b>   | <b>1.061.347.890.499,00</b> |
| 1.1                                                 | Pajak Daerah                                       | 314.226.737.136,00          | 383.094.330.086,00          | 508.389.997.142,00          |
| 1.2                                                 | Retribusi Daerah                                   | 362.741.536.155,00          | 435.304.924.720,00          | 520.908.259.777,00          |
| 1.3                                                 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan | 15.201.592.379,00           | 16.721.751.617,00           | 17.539.764.214,00           |
| 1.4                                                 | Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah        | 12.014.674.994,00           | 13.366.217.320,00           | 14.509.869.366,00           |
| <b>Kontribusi pad terhadap Pendapatan</b>           |                                                    | <b>22,69</b>                | <b>25,95</b>                | <b>30,45</b>                |
| <b>2</b>                                            | <b>Pendapatan Transfer</b>                         | <b>2.398.847.598.388,00</b> | <b>2.421.186.175.456,00</b> | <b>2.424.698.514.594,00</b> |
| 2.1                                                 | Pendapatan Transfer Pusat                          | 2.107.106.838.918,00        | 2.126.001.946.244,00        | 2.126.001.946.244,00        |
| 2.2                                                 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                   | 291.740.759.470,00          | 295.184.229.212,00          | 298.696.568.350,00          |
| <b>Kontribusi dana transfer terhadap pendapatan</b> |                                                    | <b>77,31</b>                | <b>74,05</b>                | <b>69,55</b>                |
| <b>3</b>                                            | <b>Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>        | -                           | -                           | -                           |
| 3.1                                                 | Pendapatan Hibah                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Kontribusi lain lain terhadap pendapatan</b>     |                                                    | -                           | -                           | -                           |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>                     |                                                    | <b>3.103.032.139.052,00</b> | <b>3.269.673.399.199,00</b> | <b>3.486.046.405.093,00</b> |
| <b>5</b>                                            | <b>Belanja Daerah</b>                              |                             |                             |                             |
| <b>5.1</b>                                          | <b>Belanja Operasi</b>                             | <b>1.961.323.996.881,00</b> | <b>1.943.407.057.362,00</b> | <b>1.989.367.678.727,00</b> |
| 5.1.1                                               | Belanja Pegawai                                    | 1.255.084.934.591,00        | 1.255.084.934.591,00        | 1.255.084.934.591,00        |
| 5.1.2                                               | Belanja Barang dan Jasa                            | 588.238.062.290,00          | 617.822.122.771,00          | 656.682.744.136,01          |

| NO                                                  | Uraian                                     | Proyeksi                    |                             |                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                     |                                            | 2024                        | 2025                        | 2026                        |
| 5.1.3                                               | Belanja Subsidi                            | 450.000.000,00              | 500.000.000,00              | 600.000.000,00              |
| 5.1.4                                               | Belanja Bunga                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 5.1.5                                               | Belanja Hibah                              | 100.000.000.000,00          | 50.000.000.000,00           | 50.000.000.000,00           |
| 5.1.6                                               | Belanja Bantuan Sosial                     | 17.551.000.000,00           | 20.000.000.000,00           | 27.000.000.000,00           |
| <b>Kontribusi Belanja Operasi Terhadap Belanja</b>  |                                            | <b>62,38</b>                | <b>59,54</b>                | <b>57,16</b>                |
| <b>5.2</b>                                          | <b>Belanja Modal</b>                       | <b>691.871.541.700,00</b>   | <b>807.234.791.024,00</b>   | <b>1.460.678.724.340,00</b> |
| 5.2.1                                               | Belanja Modal Tanah                        | 33.254.033.200,0            | 41.005.548.300,00           | 50.490.131.000,00           |
| 5.2.2                                               | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 184.812.477.000,0           | 205.733.249.300,00          | 275.674.489.000,00          |
| 5.2.3                                               | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 213.866.705.500,0           | 251.785.990.424,00          | 431.874.415.340,00          |
| 5.2.4                                               | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 246.137.593.000,0           | 294.362.761.000,00          | 687.724.297.000,00          |
| 5.2.5                                               | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 13.800.733.000,0            | 14.347.242.000,00           | 14.915.392.000,00           |
| 5.2.6                                               | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja</b>    |                                            | <b>22,01</b>                | <b>24,73</b>                | <b>41,97</b>                |
| <b>5.3</b>                                          | <b>Belanja Tidak Terduga</b>               | <b>30.000.000.000,00</b>    | <b>30.000.000.000,00</b>    | <b>30.000.000.000,00</b>    |
| 5.3.1                                               | Belanja Tidak Terduga                      | 30.000.000.000,00           | 30.000.000.000,00           | 30.000.000.000,00           |
| <b>Kontribusi BTT Terhadap Belanja</b>              |                                            | <b>162,59</b>               | <b>183,03</b>               | <b>323,84</b>               |
| <b>5.4</b>                                          | <b>Belanja Transfer</b>                    | <b>460.836.600.471,00</b>   | <b>483.622.369.378,00</b>   | <b>508.397.234.678,00</b>   |
| 5.4.1                                               | Belanja Bagi Hasil                         | 35.304.107.100,00           | 42.578.052.500,00           | 57.352.917.800,00           |
| 5.4.2                                               | Belanja bantuan Keuangan                   | 425.532.493.371,00          | 441.044.316.878,00          | 451.044.316.878,00          |
| <b>Kontribusi Belanja Transfer Terhadap Belanja</b> |                                            | <b>14,66</b>                | <b>14,82</b>                | <b>14,61</b>                |
| <b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>                        |                                            | <b>3.144.032.139.052,00</b> | <b>3.264.264.217.764,00</b> | <b>3.480.046.405.093,00</b> |

| NO                                              | Uraian                                           | Proyeksi            |                    |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                                                 |                                                  | 2024                | 2025               | 2026               |
| SURPLUS /DEFISIT                                |                                                  | (41.000.000.000,00) | 5.409.181.435,00   | 6.000.000.000,00   |
| 6                                               | Pembiayaan Daerah                                |                     |                    |                    |
| 6.1                                             | Penerimaan Pembiayaan Daerah                     |                     |                    |                    |
| 6.1.1                                           | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 15.000.000.000,00   | 10.000.000.000,00  | 5.000.000.000,00   |
| 6.1.2                                           | Pencairan Dana Cadangan                          | 40.000.000.000,00   |                    |                    |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan                    |                                                  | 55.000.000.000,00   | 10.000.000.000,00  | 5.000.000.000,00   |
| 6.2                                             | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           |                     |                    |                    |
| 6.2.4                                           | Penyertaan Modal Daerah                          | 14.000.000.000,00   | 15.409.181.435,00  | 11.000.000.000,00  |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                   |                                                  | 14.000.000.000,00   | 15.409.181.435,00  | 11.000.000.000,00  |
| PEMBIYAAAN NETTO                                |                                                  | 41.000.000.000,00   | (5.409.181.435,00) | (6.000.000.000,00) |
| SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN |                                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00               |

\* Tahun 2023 Pada Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

\* Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 Proyeksi

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Tabel 3.10  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah

| No | Uraian                                | Proyeksi                    |                             |                             |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|    |                                       | Tahun 2024                  | Tahun 2025                  | Tahun 2026                  |
| 1  | Pendapatan                            | 3.103.032.139.052,00        | 3.269.673.399.199,00        | 3.486.046.405.093,00        |
| 2  | Pencairan dana cadangan               | 40.000.000.000,00           |                             |                             |
| 3  | Sisa lebih Riil Penghitungan Anggaran | 15.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           | 5.000.000.000,00            |
|    | <b>Total Penerimaan</b>               | <b>3.158.032.139.052,00</b> | <b>3.279.673.399.199,00</b> | <b>3.491.046.405.093,00</b> |
|    | Dikurangi:                            |                             |                             |                             |
| 4  | Belanja Pegawai                       | 1.183.602.184.881,00        | 1.086.659.864.662,00        | 1.045.770.251.625,00        |
| 5  | Belanja Dana Cadangan                 | 40.000.000.000,00           |                             |                             |
| 6  | Pengeluaran Pembiayaan                | 14.000.000.000,00           | 15.409.181.435,00           | 11.000.000.000,00           |
| 7  | Kapasitas riil kemampuan keuangan     | <b>1.960.429.954.171,00</b> | <b>2.177.604.353.102,00</b> | <b>2.434.276.153.468,00</b> |

Tabel 3.11  
Rencana Penggunaan Kapasitas Ril Keuangan Daerah

| Uraian                                                                                                                                | Proyeksi                    |                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                       | Tahun 2024                  | Tahun 2025                  | Tahun 2026                  |
| <b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>                                                                                              | <b>1.888.947.204.461,00</b> | <b>2.009.179.283.173,00</b> | <b>2.224.961.470.502,00</b> |
| <b>Prioritas I</b>                                                                                                                    | <b>1.171.634.161.448,00</b> | <b>1.249.366.834.996,00</b> | <b>1.355.916.348.405,00</b> |
| <i>Belanja Langsung wajib dan Mengikat</i>                                                                                            | <i>1.171.634.161.448,00</i> | <i>1.249.366.834.996,00</i> | <i>1.355.916.348.405,00</i> |
| <b>Prioritas II</b>                                                                                                                   | <b>444.348.737.349,66</b>   | <b>515.367.688.160,70</b>   | <b>600.484.739.889,42</b>   |
| <i>Belanja Prioritas Pembangunan Daerah</i>                                                                                           | <i>444.348.737.349,66</i>   | <i>515.367.688.160,70</i>   | <i>600.484.739.889,42</i>   |
| <b>Prioritas III</b>                                                                                                                  | <b>272.964.305.663,34</b>   | <b>244.444.760.016,30</b>   | <b>424.369.116.778,50</b>   |
| <i>Belanja Urusan Pemerintahan Lainnya (Urusan Pilihan, unsur Pendukung, unsur Penunjang, unsur pengawasan dan unsur kewilayahan)</i> | <i>272.964.305.663,34</i>   | <i>244.444.760.016,30</i>   | <i>424.369.116.778,50</i>   |
| <b>Jumlah Prioritas</b>                                                                                                               | <b>1.888.947.204.461,00</b> | <b>2.009.179.283.173,00</b> | <b>2.224.961.470.502,00</b> |

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Permasalahan dan isu strategis menjadi bagian terpenting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Analisis permasalahan yang dilakukan secara tepat akan meningkatkan upaya intervensi melalui kebijakan dalam mengatasi permasalahan. Demikian juga dengan pemilihan isu strategis yang sesuai dan relevan akan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan pembangunan yang akan ditempuh oleh para pengambil kebijakan. Isu Strategis merupakan kondisi eksternal yang berpengaruh positif maupun negatif yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan sangat menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Permasalahan pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan daerah akan dibagi menjadi dua bagian yaitu permasalahan pembangunan lingkup makro yang terdiri dari masalah pokok, masalah dan akar masalah dan yang kedua adalah permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan. Sedangkan isu strategis yang disusun dikelompokkan berdasarkan isu global, nasional, dan isu regional di Jawa Barat. Identifikasi dan perumusan permasalahan dan isu strategis tersebut merupakan dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan periodisasi Rencana Pembangunan Daerah tersebut.

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Kinerja Pembangunan pada Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan itu dibuat. Tantangan dan permasalahan pembangunan kedepan dari seluruh aspek akan semakin besar,

sehingga kita perlu meningkatkan kinerja pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Sumedang akan menjadi fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026 mendatang. Berikut ini berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumedang yang terbagi atas dua bagian, antara lain Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan pembangunan daerah pada level mikro sektoral / penyelenggaraan urusan pemerintahan.

#### **4.1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level Makro**

##### **a. Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran**

Angka kemiskinan 10,26 Persen pada Tahun 2020 dan meningkat pada Tahun 2021 sebesar 10,71 persen, kemudian turun 10,14 persen pada Tahun 2022, angka kemiskinan tersebut masih sangat tinggi. Namun demikian, walaupun Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kemiskinan yang menurun, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Tentunya diperlukan pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengurangan jumlah penduduk miskin agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan sesuai dengan target akhir RPD tahun 2026.

Permasalahan lain yang sering timbul dalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Rendahnya daya saing juga diiringi dengan belum optimalnya keterampilan sumberdaya manusia, dalam menngahadapi tantangan kerja kedepan. Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, kemiskinan, hingga pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka masih fluktuasi (7,15 persen pada Tahun 2019 meningkat menjadi 9,89 persen pada Tahun 2020, dan menurun kembali pada Tahun 2022 sebesar 7,72 persen). Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam menyongsong Industri 4.0

menjadi permasalahan pembangunan bidang sumber daya manusia yang perlu diperhatikan.

#### **b. Kualitas Infrastruktur Dasar**

Ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan produktif, sehingga meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Kondisi Infrastruktur di Kabupaten Sumedang masih belum merata terutama infrastruktur konektivitas antar wilayah, Irigasi, Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Air Limbah Domestik serta Peningkatan Rumah Tidak Layak huni. Total Panjang jalan Kabupaten sepanjang 774,338 Km untuk kondisi jalan mantap di Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 mencapai 86,54% atau 670,138 km, terdapat 13,46% kondisi jalan yang masih dalam kondisi rusak (Rusak ringan 7,92%/61,33 Km dan Rusak berat 5,54%/42,90 Km) dan sampai saat ini masih terdapat lebar jalan kabupaten yang belum sesuai dengan standar. Kemudian untuk infrastruktur Irigasi masih belum optimal dengan memperhatikan capaian area irigasi 30.069 Ha baru terealisasi sebanyak 20. 747,61 Ha atau 69% pada Tahun 2022. Selain itu untuk Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kondisi saat ini untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari hanya mencapai 52% dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mencapai 90,14% pada tahun 2022. Kemudian untuk kebutuhan Peningkatan Rumah Tidak layak huni dari target 60.000 unit hanya mencapai 56.011 unit pada pada Tahun 2022. Yang menjadi pekerjaan yang tidak mudah salah satunya yaitu pengurangan luasan Kawasan kumuh, sampai saat ini intervensi dalam penanganan Kawasan kumuh masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Luasan Kawasan kumuh seluas 164,69 Ha. Untuk memenuhi capaian target tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, apalagi yang terkait dengan pelayanan dasar. Untuk itu bukan hanya kuantitasnya tapi juga kualitas infrastruktur juga menjadi perhatian.

### **c. Kualitas Sumberdaya Manusia.**

Dalam mengkaji permasalahan pokok sumber daya manusia maka dilakukan analisis data dan informasi untuk mempertajam penelaahan atas permasalahan agar perumusan kebijakan pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Capaian IPM Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 sebesar 72,69 masih di bawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Salah satu permasalahan pembagunan SDM di Kabupaten Sumedang yaitu belum optimalnya kualitas pendidikan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki baik pendidikan formal maupun informal. Dalam penelaahan permasalahan pendidikan akan menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur rata-rata jenjang pendidikan yang diduduki oleh masyarakat Kabupaten Sumedang dimana pada tahun 2022 hanya mencapai 8,72 tahun yang berarti rata-rata penduduk Kabupaten Sumedang hanya mengenyam pendidikan sampai bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8. Angka Rata-rata Lama Sekolah juga menjadi indikator yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga ARLS perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan nilai IPM.

### **d. Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan perekonomian daerah juga didukung oleh sektor-sektor di bidang perekonomian seperti pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan, yang sampai saat ini masih memiliki potensi dan berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Sumedang. Sektor pertanian dan industri pengolahan tersebut cukup memiliki kontribusi dominan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Sumedang. Diharapkan, prospek sektor pertanian dan industri pengolahan akan memberikan multiplier effect terhadap sektor dominan lainnya seperti perdagangan dan transportasi. Dalam mendorong perekonomian tentunya diperlukan pemanfaatan adopsi teknologi digital dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian khususnya di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan lain-lain.

### **e. Tata Kelola Pemerintahan**

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan



pemerintahan. terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka sudah dapat dipastikan bahwa pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional. Kabupaten Sumedang dalam menjalankan roda pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam empat tahun terakhir terkait evaluasi terhadap pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Beberapa catatan perbaikan antara lain penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkatan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, peningkatan penerapan E-Government, mengoptimalkan pengelolaan system manajemen SDM, penguatan pelaksanaan pengendalian internal, optimalisasi implementasi pelayanan public dan pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.

## **4.2. Isu Strategis**

### **4.2.1. Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Internasional**

#### **A. Kebijakan Menghadapi Tantangan Ekonomi**

Perekonomian global mengalami berbagai guncangan dan tantangan. Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan persisten, kondisi keuangan yang semakin ketat, perang Rusia melawan Ukraina, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, dan ketidaksesuaian penawaran-permintaan semakin memperlambat prospek ekonomi global. Meningkatnya kekhawatiran tentang harga pangan dan energi mengakibatkan tekanan biaya hidup di banyak negara, yang ikut serta menambah tekanan inflasi. Selain itu, cuaca ekstrem akibat perubahan iklim menimbulkan risiko penurunan terhadap prospek ekonomi global, dan kenaikan harga energi juga menghambat jalan menuju transisi hijau. Tantangan global yang berkepanjangan telah menyebabkan meningkatnya kerentanan utang dan menghambat jalan menuju pemulihan, yang selanjutnya

berdampak pada kelompok rentan, terutama negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang. Dalam situasi ekonomi ini, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah berkumpul kembali untuk keempat kalinya tahun ini di Washington D.C., untuk mengambil tindakan nyata guna mengatasi tantangan ekonomi global.

Sejalan dengan tantangan ekonomi global saat ini, anggota G20 menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan berkelanjutan dan untuk mengurangi efek luka pandemi untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Seiring dengan tantangan yang semakin meningkat, G20 menekankan pentingnya menjaga respon kebijakan fiskal yang mampu bergerak cepat dan fleksibel, serta langkah-langkah pengendalian yang bersifat sementara dan tepat sasaran untuk menghindari tekanan inflasi yang tinggi. Dalam hal ini, G20 menegaskan kembali pentingnya kerja sama kebijakan makro untuk menjaga stabilitas keuangan, dan kebijakan fiskal jangka panjang yang berkelanjutan, serta melindungi risiko penurunan dan dampak negative efek spillover. G20 juga menegaskan kembali pentingnya kebijakan makroprudensial, kemajuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan, dan transisi berkelanjutan. Untuk mencapai stabilitas harga dan menghindari *spillover*, G20 juga berkomitmen untuk mengkalibrasi laju pengetatan kebijakan moneter secara tepat.

Sehubungan dengan meningkatnya risiko kerawanan pangan dan energi, G20 berkomitmen untuk mempertimbangkan semua alat yang diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan dan energi serta tekanan biaya hidup yang dialami di banyak negara. G20 menyoroti pentingnya kerja sama untuk memastikan respons global yang terkoordinasi untuk mengatasi kerawanan pangan. G20 akan terus mencatatkan kemajuannya melalui koordinasi strategis dengan Presidensi G20 India tahun depan.

Untuk mendukung dunia dalam menghadapi pandemi saat ini dan potensi pandemi di masa depan, G20 merevitalisasi arsitektur kesehatan global untuk meningkatkan tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mendukung pencegahan, kesiapsiagaan, dan

respon pandemi (PPR). Tahun ini, G20 mengukir sejarah melalui pengumpulan *Financial Intermediary Fund* (FIF) yang diselenggarakan oleh Bank Dunia untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pembiayaan untuk pencegahan dan respon pandemi di masa depan. Total komitmen FIF dari donor penggagas adalah sebesar USD 1,4 miliar, dan anggota mendorong tambahan komitmen secara sukarela. G20 juga menyambut baik keanggotaan dan perwakilan inklusif PPR FIF dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor, di mana WHO memegang peran sentral.

Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya, G20 terus menyoroti pentingnya memperkuat arsitektur keuangan internasional. Terkait komitmen G20 untuk meningkatkan ketahanan keuangan global jangka panjang, G20 akan terus memantau risiko peningkatan volatilitas arus modal, *spill over* negatif, dan kondisi pasar tidak merata dengan adanya revisi *Institutional View* (IV) IMF mengenai *Liberalization and Capital Flow Management* dan *BIS Macro-Financial Stability Framework*, yang menuntut kemajuan lebih lanjut dalam operasional *Integrated Policy Framework* dari IMF dan mempertahankan Jaring Pengaman Keuangan Global (GFSN) yang kuat. G20 terus mendukung alokasi penyaluran *Special Drawing Right* (SDR) untuk membantu golongan yang paling rentan serta meningkatkan kapasitas sumber daya *Multilateral Development Banks* melalui tinjauan Kerangka Kecukupan Modal, dan di saat yang sama memastikan penerapan *Common Framework* pada *Debt Treatment* di luar DSSI.

Selama pandemi, Lembaga keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan luar biasa untuk meningkatkan fungsinya sebagai intermediasi dalam mendukung perekonomian. Di saat dukungan kebijakan diperlukan untuk memitigasi dampak negatif dari pandemi, penerapan dukungan kebijakan yang terlalu lama dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan. Saat pemulihan pandemi sedang berlangsung, G20 menantikan laporan akhir exit strategies dan mitigasi *scarring effect* pada sektor keuangan, serta upaya untuk mengatasi kerentanan di Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFI). Selain itu, G20 terus memperkuat sektor keuangan global melalui

peningkatan pemantauan risiko dan melalui optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi. Dalam konteks ini, G20 menyambut baik penilaian FSB mengenai pengawasan dan regulasi “*stablecoin*” global, serta aktivitas pasar asset kripto dan menerima panduan akhir oleh BIS CPMI dan IOSCO yang menegaskan bahwa Prinsip untuk Infrastruktur Pasar Keuangan berlaku dalam pentingnya pengaturan *stablecoin* yang sistematis.

G20 juga berkomitmen untuk terus mengeksplor implikasi keuangan makro dari Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) karena hal ini dapat dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan internasional. G20 juga menyambut baik keberhasilan penyelesaian *Techsprint* G20 2022, inisiatif Bersama antara Presidensi G20 Indonesia dengan *BIS Innovation Hub*, yang telah berkontribusi pada diskusi tentang solusi praktis dan layak untuk menerapkan CBDC. G20 telah mengumumkan pemenang untuk 3 (tiga) kategori dan menghadiahkan Rp770.000.000 bagi setiap pemenang pada G20 *Techsprint 2022 Award Ceremony* dan *Third CBDC Seminar* yang diadakan secara *back-to-back* dengan acara *2022 Annual Meetings of the International Monetary Fund dan World Bank Group*.

G20 terus berkomitmen untuk memajukan impletasi Peta Jalan G20 pada Pembayaran Lintas Batas Negara (CBP) untuk mencapai pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif karena hal ini akan memberikan manfaat yang luas bagi ekonomi di seluruh dunia. Dalam hal ini, G20 menyabut eksplorasi lanjutan tentang bagaimana CBDC berpotensi dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas dan di saat yang sama menjaga stabilitas dan integritas sistem moneter dan keuangan internasional. Dalam konteks ini, G20 menyambut baik diskusi lanjutan tentang sistem pembayaran yang saling terkait dan opsi akses dan interoperabilitas CBDC untuk pembayaran lintas batas. Sebagai wujud implementasi regional dai Peta Jalan G20 pada Pembayaran Lintas Batas Negara, bank sentral pada ASEAN-5 akan menandatangani Perjanjian Umum pada Konektivitas Pembayaran di antara Bank Sentral ASEAN-5 di sela-sela KTT Leaders’ Summit pada November 2022 mendatang.

Guna mendukung proses pemulihan ekonomi dunia yang kuat dan berkelanjutan, negara-negara G20 telah berdiskusi untuk pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses dan infrastruktur yang terjangkau. Para anggota mendukung secara sukarela dan tidak terikat G20/*Global Infrastructure* (GI) Hub Framework tentang cara terbaik dalam menjangkau partisipasi pihak swasta guna meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan, yang mana akan mempertimbangkan situasi negara, serta akan menambahkan investasi dari sumber lain, termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh *Multilateral Development Banks* (MDBs). Selebihnya, dalam mendukung infrastruktur G20 menyokong kebijakan perangkat G20-OECD dalam memobilisasi pendanaan dan keuangan untuk investasi infrastruktur yang inklusif dan berkualitas di berbagai daerah dan kota. Untuk mendukung infrastruktur yang transformatif, G20 juga mendukung InfraTracker 2.0 dan Ringkasan Studi Kasus G20 dalam Infrastruktur Keuangan Digital: Masalah, Praktik dan Inovasi. Anggota G20 juga mendorong kualitas investasi infrastruktur dengan mendiskusikan pembangunan *Quality Infrastructure Investment* (QII) Indicators. Sebagai tambahan, G20 juga mendiskusikan penataan masa depan infrastruktur global.

G20 menekankan pentingnya untuk kemajuan yang lebih lagi dalam agenda keuangan yang berkelanjutan dan mendukung transisi ekonomi hijau guna mencapai target bebas karbon. Dalam hal ini, G20 menitikberatkan peran penting dalam pencapaian agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan target Penjanjian Paris. Sebuah kemajuan dari peta jalan G20 untuk keuangan berkelanjutan yang dibangun di 2021, pada tahun ini Presidensi G20 Indonesia mendukung Laporan Ekonomi Berkelanjutan G20 yang mana mewujudkan 3 (tiga) agenda utama: (i) pembangunan kerangka transisi keuangan yang menyadari aktivitas transisi iklim, termasuk transisi energi, dan meningkatkan kredibilitas komitmen institusi keuangan, (ii) memperbesar keuangan berkelanjutan dengan berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan, dan (iii) mendiskusikan pengungkit kebijakan yang menginsentifkan keuangan dan investasi serta mendukung transisi.

Negara-negara G20 mendukung hasil kerja yang dibawa Presidensi dan Kerjasama Global untuk Keuangan Inklusif dalam memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak muda. Dalam topik keuangan berkelanjutan, negara-negara G20 berdiskusi akan implementasi dari FSB Roadmap yang menunjukkan resiko keuangan dari perubahan iklim yang mana menambah Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20, dan menyambut implementasi atas peta jalan sejauh ini. Sebagai tambahan, negaranegara G20 mendukung inisiatif dalam mempersempit perbedaan data dan mendukung program kerja atas *New Data Gap Initiatives* guna memastikan ketersediaan akan data yang penting untuk mendukung pembuatan keputusan yang berdasarkan data. G20 meminta IMF, FSB dan IAG untuk mulai bekerja serta mendata perbedaan data dan laporan di baliknya yang berjalan selama setengah tahun berjalan di 2023, dengan catatan target yang ambisius dan penyampaian yang akan membutuhkan penghitungan kapasitas nasional secara terhitung, utama, dan situasi negara yang baik guna menghindari tumpang tindih dan duplikasi di tingkat internasional.

Melanjutkan komitmen untuk mendukung semua negara rentan untuk pulih bersama, pulih lebih kuat, G20 menyambut penyaluran sukarela *Special Drawing Rights* (SDR) sebesar USD 80,6 milyar dan menyambut kontribusi sukarela kepada IMF *Resilience and Sustainability Trust* (RST). Fasilitas RST diciptakan sebagai pilihan bagi anggota untuk secara sukarela mengalokasi bagian mereka dalam *Special Drawing Rights* (SDR) yang telah dibagikan untuk mendukung negara rentan dalam mengatasi permasalahan struktural jangka panjang yang memiliki risiko ekonomi makro, termasuk yang berasal dari pandemi dan perubahan iklim. Selanjutnya, G20 sepakat untuk memperkuat *Global Financial Safety Net* dan mendorong Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks/MDB) untuk memperkuat pembiayaan pembangunan guna mendukung pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, G20 menyambut pembahasan awal dan mendorong MBD untuk melanjutkan pembahasan terkait opsi untuk menerapkan rekomendasi Kajian Independen tentang



Kerangka Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Framework/CAF*) dari MDB dalam kerangka tata kelola mereka, dan menantikan laporan perkembangan di Musim Semi 2023. Untuk mengatasi kerentanan utang, khususnya pada negara berpendapatan rendah, G20 mendorong perkembangan lebih lanjut dari implementasi *Common Framework for Debt Treatment* di luar DSSI dalam cara yang terprediksi, tepat waktu, teratur, dan terkoordinasi, dan menyambut kemajuan yang tercapai, termasuk penyediaan penjaminan pembiayaan untuk Zambia serta menyambut perkembangan dari komite kreditur sejauh ini dan mendorong penyelesaian yang tepat waktu untuk penanganan utang bagi Chad dan Ethiopia.

Para anggota berkomitmen untuk mengimplementasi kesepakatan bersejarah terkait paket pajak internasional 2 (dua) pilar G20/OECD. Para anggota mendukung pekerjaan yang tengah berlangsung pada Pilar Satu dan menyambut penyelesaian dari *Global Anti-Base Erosion (GloBE) Model Rules* pada Pilar Dua, yang membuka jalan bagi implementasi yang konsisten pada level dunia sebagai pendekatan umum, dan menantikan penyelesaian Kerangka Implementasi GloBE. Para anggota menyerukan OECD/G20 *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) untuk merampungkan Pilar Satu, dan dengan menandatangani Konvensi Multilateral pada paruh pertama 2023, dan untuk menyelesaikan negosiasi Aturan Subjek Pajak (Subject to Tax Rule/STTR) dalam Pilar Dua yang akan memungkinkan pembangunan Instrumen Multilateral untuk implementasinya. Para anggota juga menegaskan tujuan G20 untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan sehubungan dengan G20 Ministerial Symposium on Tax and Development pada Juli 2022, dan memperhatikan G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Tax. Para anggota mendukung perkembangan yang dicapai dalam mengimplementasikan standar transparansi pajak yang disetujui secara internasional, termasuk upaya regional dan menyambut penandatanganan Deklarasi Bali terkait Asia Initiative.

## **B. Ketahanan Pangan**

Presidensi G20 Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan semua

perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lain. Beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan, seperti the *UN Global Crisis Response Group* (GCRG), the *G7 Global Alliance for Food Security* (GAFS), the *Global Agriculture and Food Security Program* (GAFSP), *International Finance Institutions Action Plan*, dan *Global Development Initiative*. Selain itu, Bank Dunia telah berkomitmen untuk menyediakan 30 juta USD dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun turut menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui *G20 Agricultural Market Information System*.

Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk memanfaatkan semua perangkat kebijakan (*policy tools*) dalam mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk ketahanan pangan. Forum G20 akan terus mengambil langkah bersama secara cepat dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan dan nutrisi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lainnya. Presidensi G20 Indonesia menerapkan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, menurunkan impor dan meningkatkan ekspor pangan. Strategi ini diterapkan pada beberapa komoditas pangan strategis dengan kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam sistem agribisnis pangan, agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing.

### **C. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)**

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari MDGs (Millenium Development Goals), yang telah berakhir pada tahun 2015 yang lalu. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara



berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup. *Sustainable Development Goals* dimulai dari kesepakatan dari pertemuan dunia pada saat September 2015 melalui agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) yang merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *SDGs* dilakukan dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*".

*SDGs* terdiri dari 169 target dan 17 Tujuan antara lain : Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*); Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*); Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*); Kesetaraan Gender (*Gender Equality*); Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*); Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*); Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*); Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*); Berkurangnya Kesenjangan (*Reduce Inequalities*); Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*); Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*); Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*); Ekosistem Lautan (*Life Below Water*); Ekosistem Daratan (*Life on Land*); Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace Justice and Strong Institution*); Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*).

Implementasi dan capaian *SDGs* tentunya sangat diharapkan dan dapat diwujudkan melalui pengembangan kemitraan yang baik antara para pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah, juga diperlukan pengembangan sumberdaya dan kapasitas dalam pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam perencanaan yang ada, baik jangka panjang, jangka menengah

maupun jangka pendek, disamping alokasi anggaran dari pemerintah maupun swasta untuk mendukung setiap tujuan pembangunan yang akan dicapai.

#### **D. Perubahan Iklim (*Global Warming/Climate Change*)**

Kondisi ketahanan lingkungan pada era globalisasi pembangunan saat ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan, hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir ditengah tantangan pembangunan yang diharapkan akan semakin meningkat. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim.

Pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi, lokasi yang tinggi, serta ekosistem-ekosistem pantai. Pemanasan global terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Naiknya intensitas efek rumah kaca yang terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas yaitu sinar infra merah yang dipancarkan oleh bumi menjadikan perubahan iklim global. Jika tidak ada upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan

akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan. Upaya Penanganan masa perubahan iklim dalam konteks pembangunan membutuhkan manajemen perubahan iklim secara efektif, dan pada saat bersamaan mengantisipasi dampak perubahan iklim global jangka panjang secara komprehensif. Disamping itu membutuhkan pendekatan lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal melalui upaya adaptasi dan mitigasi.

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi isu perubahan iklim adalah dengan membuat rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) tingkat nasional dan daerah yang merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Olehnya itu, implementasi dari rencana aksi tersebut diharapkan dapat berjalan dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun di daerah.

#### **E. Pengarusutamaan Gender**

Isu gender akan selalu menjadi permasalahan, sepanjang kaum perempuan belum merasakan hak-haknya dan tidak ada lagi pembangunan yang bias gender. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan jika tidak tertangani akan membawa permasalahan yang akan menghambat pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan kesetaraan dalam aspirasi, pengalaman, kebutuhan dan permasalahan.

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, baik terhadap peran dalam pembangunan maupun peran dalam ekonomi dan politik dapat dihitung melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang

merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yang memperhatikan ketimpangan Gender. Indikator kedua adalah Indeks Pemberdayaan Gender yang merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam berbagai aktivitas kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumberdaya ekonomi.

#### **F. Revolusi Industri 4.0**

Dunia industri global sedang memasuki era baru yang dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 atau yang juga dikenal sebagai era digital. Industri 4.0 merupakan fase baru di revolusi industri yang fokus pada interkonektivitas, otomatisasi, machine learning, dan real time data. Meskipun begitu, dampak dari revolusi industri tidak hanya pada pekerja industri saja namun saat ini semua orang menjadi bagian dari era digital 4.0. Indonesia telah secara aktif memasuki era baru yang ditandai dengan bergeraknya berbagai sektor kehidupan ke arah digital serba otomatis. Fenomena ini bisa kita lihat dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan berbasis digital. Perusahaan tersebut ini menawarkan cara berbisnis baru yang tidak kita temukan puluhan tahun lalu. Sebagai contoh adalah bagaimana peran digitalisasi pada masa pandemi covid-19 yang menunjang segala aktivitas kita disaat adanya pembatasan sosial.

Ciri utama pada era industri 4.0 adalah bagaimana data menjadi sesuatu yang penting yang terhubung ke internet yang bisa dimaksimalkan untuk membantu bisnis termasuk membaca tren permintaan konsumen, mencari target pasar yang tepat hingga mengoptimalkan harga yang sangat penting dalam peningkatan industrialisasi di daerah. Peluang pengembangan industri 4.0 harus segera diwujudkan oleh Kabupaten Sumedang, dimulai dari penyediaan infrastruktur teknologi informasi di seluruh daerah di Kabupaten Sumedang, selanjutnya adalah upaya digitalisasi sektor industri dan UMKM sehingga dapat menunjang seluruh aktivitas dan pemasaran produk di seluruh Kabupaten. Peluang dalam pengembangan industri 4.0 juga berada pada Generasi milenial sebagai generasi yang tumbuh besar di tengah teknologi digital, upaya

menciptakan wirausaha baru berbasis digitalisasi sangat penting untuk mendukung perkembangan revolusi industri 4.0.

#### **4.2.2. Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Nasional**

##### **A. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**

Salah satu misi Presiden Republik Indonesia yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Kualitas manusia menjadi salah satu fokus yang harus segera ditangani, hal ini juga sesuai dengan arahan presiden untuk melakukan percepatan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang tertuang dalam salah satu agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumberdaya Manusia dalam RPJMN 2020-2024 meliputi manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.

##### **B. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**

Kebijakan Nasional pada misi ke-3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 adalah pembangunan yang merata dan berkeadilan, hal ini kemudian dijabarkan ke dalam 7 agenda pembangunan dimana agenda yang ke-2 adalah Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pembangunan kewilayahan menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa - luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii)

meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Isu strategis utama pembangunan kewilayahan dalam RPJMN 2020- 2024 adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia sebesar 18,0 persen, Kawasan Barat Indonesia sebesar 10,3 persen, dan kemiskinan perdesaan yang tinggi (12,9 persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen), (b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa, terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan, dan (e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

### **C. Pengentasan Kemiskinan**

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Dalam hal kemandirian ekonomi, kelompok miskin dan rentan masih sulit bersaing dalam usaha produktif karena daya saing yang rendah, akses terhadap pasar dari produk yang dihasilkan serta kolaborasi usaha yang rendah dan kolaborasi keberantaraan usaha belum optimal.

Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan

dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan social yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

#### **D. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19**

Proses pemulihan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dipengaruhi oleh perkembangan pandemi COVID-19. Penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia pada tahun 2021 mengalami akselerasi dengan puncaknya mencapai lebih dari 50 ribu kasus per hari pada pertengahan Juli 2021 yang disebabkan oleh merebaknya varian Delta yang jauh lebih menular. Lonjakan kasus akibat varian Delta pada bulan Juli 2021 mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan penguatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diikuti dengan PPKM berdasarkan level keketatan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Selain melalui pembatasan kegiatan masyarakat, Pemerintah juga mengimplementasikan program vaksinasi COVID-19 yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2021 dengan target cakupan 208 juta penduduk. Pertambahan kasus COVID-19 terkendali seiring implementasi kebijakan penanggulangan pandemi. Memasuki bulan Agustus, pertambahan kasus baru terus menunjukkan tren penurunan yang berlanjut yang diiringi dengan penurunan *positivity rate* dan *bed occupancy ratio*. Perkembangan positif tersebut memungkinkan Pemerintah untuk mengurangi intensitas kebijakan restriksi mobilitas sehingga aktivitas masyarakat kembali meningkat.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan mengadopsi kebijakan ekonomi untuk menahan dampaknya. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) dimensi utama di dalam stimulus



penanganan COVID-19, yang pertama adalah untuk penanganan kesehatan dan pengendalian wabah sebagai sumber utama penyebab krisis. Dimensi kedua adalah penanganan krisis ekonomi sebagai efek domino dari krisis kesehatan, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan membaik dan akan tumbuh lebih tinggi lagi pada 2022, disertai dengan nilai tukar yang stabil dan inflasi yang terkendali. Perbaikan kondisi ekonomi tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sehubungan dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 dan adanya akselerasi vaksinasi. Pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor juga menunjang prakiraan tersebut. Untuk itu, sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional perlu terus diperkuat untuk mendukung berlanjutnya proses pemulihan ekonomi ke depan.

**E. Bonus Demografi**

Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70% berada pada usia produktif antara 15-64 tahun, sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif yaitu berada pada usia dibawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun 2020-2045. Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2020-2035, dan puncaknya di tahun 2028-2030.

**F. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur**

Salah satu isu strategis dalam RPJMN 2020-2024 adalah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

**4.2.3. Telaahan Kebijakan Provinsi Jawa Barat**

**A. Telaahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025**

Penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 salah satunya dengan mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa



Barat Nomor 7 Tahun 2019. Pembangunan tahun 2024 sampai dengan 2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V (2023-2025). Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V disusun dengan mempertimbangkan isu strategis dan merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.

1) **Isu Strategis**

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- a) Kuantitas dan kualitas penduduk serta persebarannya;
- b) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan Kesehatan;
- c) Pengangguran dan ketenagakerjaan;
- d) Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial;
- e) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- f) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur;
- g) Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat; dan
- h) Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

2) **Visi dan Misi**

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah: **“DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”**.

Pernyataan visi pembangunan Provinsi Jawa Barat diatas, memiliki makna:

1. **Iman dan Takwa** sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah.
2. **Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia** dimaksudkan sebagai provinsi yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut yaitu dalam 7 (tujuh) bidang yang sekaligus penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (beyond the

expectation), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; kedua, masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi; ketiga, pengelolaan pertanian dan kelautan; keempat, energi baru dan terbarukan; kelima, industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif; keenam, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan serta ketujuh, pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Misi sebagai penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang memiliki makna yang penting. Setiap pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai Tahun 2025.

1. Misi Satu: **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing** adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. Misi Dua: **Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah**; adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Misi Tiga: **Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari**; adalah mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
4. Misi Empat: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**; adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat; membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan efesiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.
5. Misi Lima: **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan**; adalah mengurangi kesenjangan social secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana dasar, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

### 3) **Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan Daerah tahap kelima RPJPD (2023-2025) memberi arahan untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2025. Tahap kelima RPJPD yang merupakan tahap terakhir dari pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk mencapai keunggulan Jawa Barat di segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat memiliki sifat keberlanjutan dengan kecenderungan yang semakin lama semakin meningkat. Secara lebih spesifik, keunggulan tersebut diindikasikan oleh 7 (tujuh) bidang yang sekaligus menjadi penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (*beyond the expectation*), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; kedua, masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi; ketiga, pengelolaan pertanian dan kelautan; keempat,

energi baru dan terbarukan; kelima, industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif; keenam, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan; serta ketujuh, pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia. Pencapaian keunggulan tersebut memiliki makna bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki daya saing dan keberhasilan pembangunan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional juga relatif lebih tinggi daripada daerah lain.

Keberhasilan pencapaian pembangunan tahap kelima ditandai dengan indikator kinerja sebagai berikut: (a). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,23–76,01 (dengan metode baru); (b). Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,67%–6,09%; (c). Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,12%; (d). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 50,01–

52,00; (e). Indeks Refomasi Birokrasi kategori A; (f). Persentase Penduduk Miskin sebesar 6,80%–6,27%; (g). Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,45%–7,26%; dan (h). Indeks Gini sebesar 0,35–0,30.

Pencapaian target kinerja pembangunan untuk tahap akhir periode RPJPD Jawa Barat diatas dilakukan melalui berbagai prioritas pembangunan sebagai berikut:

**Bidang Pendidikan.** Prioritas Pembangunan pendidikan pada periode 2018-2023 adalah Tuntas Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana, yang didukung dengan pola dan kultur belajar siswa yang dikembangkan ke arah pembentukan budaya kualitas melalui proses pembelajaran yang demokratis dan menyenangkan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya.

Upaya-upaya yang terus dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Adapun pengembangan pendidikan

menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum internasional.

Pada periode juga ditempuh upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya. Mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multimedia yang telah diperoleh.

Sedangkan upaya pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi, diprioritaskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

**Bidang Kesehatan.** Prioritas pembangunan bidang kesehatan diupayakan melalui peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan perbaikan dan pemenuhan kualitas gizi, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi), serta terwujudnya pemberian penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkualitas dengan memperhatikan pemerataan pelayanan kesehatan dan tetap membuka peluang bagi peran serta swasta khususnya dalam pengembangan pelayanan medik.

**Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.** Prioritas pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan pada pemerataan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat, sehingga tidak terdapat lagi daerah tertinggal di seluruh wilayah Jawa Barat. Seluruh masyarakat Jawa Barat telah menikmati sarana dan prasarana baik dasar maupun yang bersifat pelayanan

wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini ditempuh dengan upaya-upaya penataan ruang telah dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, di semua tingkat pemerintahan (didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir).

**Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.**

Prioritas pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di arahkan pada Percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan.

**Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.** Prioritas pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diarahkan pada Memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari serta penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia.

**Bidang Sosial.** Prioritas pembangunan bidang sosial diarahkan pada pemantapan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, penguatan peran dan fungsi PSKS dalam penanganan PMKS; dan peningkatan keberdayaan PMKS dengan mengefektifkan sistem perlindungan dan jaminan sosial; serta peningkatan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

**Bidang Tenaga kerja.** Prioritas pembangunan bidang tenaga kerja diarahkan pada Peningkatan kompetensi dan daya saing, melalui upaya- upaya peningkatan sarana, prasarana dan penerapan kurikulum yang terkait dengan dunia kerja dan kewirausahaan pada pendidikan formal; Pembudayaan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.

**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.**

Prioritas pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan

kesehatan; pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat aktif di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat; dan peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

**Bidang Pangan.** Prioritas pembangunan pangan diarahkan pada: peningkatan kualitas, keragaman dan keamanan pangan, melalui upaya-upaya peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat.

**Bidang Pertanahan.** Prioritas pembangunan bidang pertanahan diarahkan pada terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

**Bidang Lingkungan Hidup.** Prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup diarahkan pada kemantapan daya dukung lingkungan Jawa Barat harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan, dilakukan melalui upaya-upaya perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, memelihara fungsi dan kualitas infrastruktur alam, infrastruktur buatan, sarana dan prasarana lingkungan yang terbangun.

**Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.** Prioritas pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan pada: peningkatan pengelolaan kependudukan di Jawa Barat melalui upaya Pengendalian kependudukan.

**Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.** Prioritas pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan modernisasi BUMDes menjadi sumber utama pendapatan desa.

**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.** Prioritas pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan pada Mewujudkan keluarga kecil dan berkualitas, peningkatan penggunaan data penduduk sebagai dasar



acuan pembangunan dan memantapkan persebaran penduduk yang mandiri dan berkualitas.

**Bidang Perhubungan.** Prioritas pembangunan bidang perhubungan diarahkan pada pemantapan infrastruktur wilayah yang telah terbangun, untuk mendukung pencapaian tujuan RPJPD berikutnya, dengan tetap memperhatikan kualitas kerjasama pemerintah dengan swasta dan masyarakat, sebagai stakeholder pembangunan. Pada tahap ini akan ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, berkembangnya sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport), mantapnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, mantapnya pengendalian banjir dan kekeringan, tersedianya jaringan irigasi yang berkelanjutan, mantapnya pelayanan telekomunikasi, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi dilakukan melalui penyelesaian pembangunan jalan tol yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya termasuk pada ruas Cileunyi- Nagreg-Ciamis sebagai jalan tol antar kota, peningkatan kualitas dan kemantapan jaringan jalan, serta pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi laut dan jalan kereta api yang telah terbangun pada tahap sebelumnya. Sedangkan pada pengembangan infrastruktur transportasi udara, dilakukan penyelesaian pembangunan Bandar Udara Pusat Penyebaran Primer Kertajati di Majalengka, penyelesaian pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Kalijati di Subang, Bandar Udara Cibeureum di Tasikmalaya, serta Bandar Udara Atang Sanjaya di Bogor, serta pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi udara yang telah terbangun sebelumnya.

**Bidang Komunikasi dan Informatika.** Prioritas pembangunan komunikasi dan informatika diarahkan pada peningkatan inovasi kualitas pelayanan informasi, melalui upaya-upaya peningkatan inovasi teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dan peningkatan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.



**Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.** Prioritas pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah diarahkan pada pemantapan koperasi dan usaha kecil dengan peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil, pengembangan struktur ekonomi koperasi dan usaha kecil serta penyerapan tenaga kerja dan investasi.

**Bidang Penanaman Modal.** Prioritas pembangunan bidang penanaman modal diarahkan pada Penciptaan Jawa Barat sebagai daerah tujuan utama investasi skala nasional dan internasional.

**Bidang Kepemudaan dan Olahraga.** Prioritas pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada mempertahankan kemandirian pemuda dan mendorong daya saing pemuda Jawa Barat di skala internasional baik di bidang politik, ekonomi, budaya serta IPTEK. Sedangkan pembangunan olahraga Jawa Barat diarahkan untuk tetap mempertahankan keunggulan olahraga Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional, serta menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat Jawa Barat.

**Bidang Statistik.** Prioritas pembangunan statistik diarahkan pada peningkatan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah melalui upaya-upaya peningkatan akurasi, kecepatan pemenuhan Data Pembangunan.

**Bidang Persandian.** Prioritas pembangunan bidang persandian diarahkan pada pengamanan informasi, melalui upaya peningkatan kualitas keamanan informasi.

**Bidang Kebudayaan.** Prioritas pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pada pemantapan ketahanan budaya Jawa Barat dalam kehidupan global, mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan menjadikan budaya Jawa Barat, termasuk nilai-nilai luhur yang dikandungnya, sebagai bagian dari interaksi sosial masyarakat Jawa Barat dalam pergaulan masyarakat berskala regional, nasional maupun internasional.

**Bidang Perpustakaan.** Prioritas pembangunan bidang perpustakaan diarahkan pada peningkatan kualitas perpustakaan di Jawa Barat melalui upaya peningkatan peran perpustakaan guna menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis dan produktif.

**Bidang Kearsipan.** Prioritas pembangunan bidang kearsipan diarahkan pada peningkatan kualitas kinerja kearsipan daerah melalui upaya peningkatan kualitas sistem kearsipan.

**Bidang Kelautan dan Perikanan.** Prioritas pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada Pengembangan perikanan komersial di Pantai Selatan dan Pantai Utara, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (*marine culture*), pengembangan kota-kota pantai (*coastal cities*), pengembangan wisata kelautan dan pengembangan usaha eko-konservasi.

**Bidang Pariwisata.** Prioritas pembangunan bidang pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan baik sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pariwisata Jawa Barat. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan, alam, budaya, dan manusia. Pengembangan pariwisata harus mendukung upaya konservasi/preservasi, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan dukungan spesifik daerah.

**Bidang Pertanian.** Prioritas pembangunan bidang pertanian diarahkan pada kemenangan persaingan, baik nasional maupun global melalui upaya-upaya penguatan keunggulan kompetitif; terpenuhinya konsumsi Provinsi Jawa Barat dan domestik; tingginya daya terima pasar internasional; dan nilai tambah ekspor yang tinggi. Kegiatan pertanian pada tahap ini dicirikan dengan komitmen yang tinggi terhadap tujuan memenangkan keunggulan kompetitif di pasaran ciri bisnis yang berorientasi pada efisiensi, kualitas, keamanan dan keberlanjutan.

**Bidang Kehutanan.** Prioritas Pembangunan bidang kehutanan diarahkan pada peningkatan kualitas fungsi hutan melalui upaya peningkatan manfaat ekonomi hutan berwawasan lingkungan.

**Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.** Prioritas pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral diarahkan

pada peningkatan kemantapan sektor energi yang sudah tercapai terus terjaga dan ditingkatkan sehingga pada tahapan ini adalah masa pemeliharaan pasokan energi, mantapnya desa mandiri energi, mantapnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan energi.

**Bidang Perdagangan.** Prioritas pembangunan bidang perdagangan diarahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, pemberdayaan produk dalam negeri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.

**Bidang Perindustrian.** Prioritas pembangunan bidang perindustrian diarahkan pada penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbarukan, penanganan industri ramah lingkungan, dan penguatan jaringan antar industri, didukung oleh pengembangan SDM industri yang berdaya saing.

**Bidang Transmigrasi.** Prioritas Pembangunan bidang Transmigrasi diarahkan pada: Penataan persebaran penduduk baik didalam maupun keluar wilayah provinsi melalui upaya-upaya kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi, peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (*Resettlement*) dan warga sekitar.

**Bidang Perencanaan.** Prioritas Pembangunan bidang Perencanaan Pembangunan diarahkan pada: Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui upaya-upaya Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan, serta kualitas proses perencanaan pembangunan dengan kerjasama multipihak.

**Bidang Keuangan.** Prioritas pembangunan bidang keuangan diarahkan pada Penguatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

**Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.** Prioritas pembangunan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan

kualitas sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan serta pengembangan budaya organisasi yang solid.

**Bidang Penelitian dan Pengembangan.** Prioritas pembangunan bidang penelitian dan pengembangan diarahkan pada mempertahankan dan terus mengembangkan inovasi IPTEK serta pemantapan provinsi berbasis teknologi informasi sebagai rujukan nasional.

**Fungsi lain.** Prioritas pembangunan fungsi lain untuk bidang Keagamaan di Jawa Barat diarahkan pada peningkatan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama melalui upaya-upaya pengimplementasian dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyelesaian berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama, serta pengimplementasian dan pengaktualisasian pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

Prioritas pembangunan Bidang Politik diarahkan pada membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah otonom di Jawa Barat serta penguatan kerjasama antar institusi.

Prioritas Pembangunan bidang Hukum dan HAM diarahkan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi; Peningkatan kualitas lembaga legislatif melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD.

#### 4) **Sasaran Pokok**

Pada umumnya, sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat merupakan proses kontinum yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahap, yaitu berupa indikator kinerja yang makin membaik dari tahap ke tahap sehingga target kinerja akhir periode tahun ke-20 dapat dicapai. Dalam mewujudkan misi

pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan sasaran pokok setiap tahapan pembangunan, yaitu:

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Terpadu dan Dilaksanakan Secara Adil, Merata, dan Terjangkau.

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi pertama, Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahap pertama sebesar 71,12 dan tahap kedua sebesar 73,58 dengan menggunakan perhitungan metode lama. Adapun target Indeks Pembangunan Manusia antara 71,04 sampai dengan 71,54 pada tahap ketiga, lalu pada tahap keempat antara 74,10 sampai dengan 74,68 dan tahap kelima antara 75,23 sampai dengan 76,01.

2. Meningkatnya Perekonomian Daerah

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi kedua, Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Daerah. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja yaitu Laju pertumbuhan ekonomi. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahap pertama sebesar 6,21 persen dan tahap kedua sebesar 6,33 persen. Adapun target Laju Pertumbuhan Ekonomi antara 5,76 persen sampai dengan 5,81 persen pada tahap ketiga, lalu pada tahap keempat antara 5,67 persen sampai dengan 5,89 persen, dan tahap kelima antara 5,67 sampai dengan 6,09 persen.

3. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Secara Alamiah Maupun Penduduk Migrasi

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi ketiga, Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Asri dan Lestari. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk. Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahap pertama sebesar 1,71 persen dan tahap kedua sebesar 1,78 persen.

Adapun target Laju Pertumbuhan Penduduk antara 1,78 persen sampai dengan 1,34 persen pada tahap ketiga, lalu tahap keempat antara 1,34 persen sampai dengan 1,12 persen, dan tahap kelima sebesar 1,12 persen.

4. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi ketiga, Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Asri dan Lestari. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahap kedua sebesar 47,61 persen. Adapun target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 47,80 persen pada tahap ketiga, lalu pada tahap keempat antara 48,00 persen sampai dengan 50,00 persen, dan tahap kelima antara 50,01 persen sampai dengan 52,00 persen.

5. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Perolehan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahap ketiga kategori BB. Adapun target perolehan Indeks Reformasi Birokrasi kategori A pada tahap keempat dan kelima.

6. Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi kelima, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin. Capaian Persentase Penduduk Miskin pada tahap pertama sebesar 12,74 persen dan tahap kedua sebesar 9,61 persen. Adapun target Persentase Penduduk Miskin pada tahap ketiga sebesar 7,17 persen, lalu pada tahap keempat antara 7,17 persen sampai dengan 6,80 persen, dan tahap kelima antara 6,80 persen sampai dengan 6,27 persen.

7. Menurunnya Tingkat Pengangguran

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahap pertama sebesar 12,08 persen dan tahap kedua sebesar 9,16 persen. Adapun target Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahap ketiga sebesar 8,0 persen, lalu pada tahap keempat antara 8,0 persen sampai dengan 7,45 persen, dan tahap kelima antara 7,45 sampai dengan 7,26 persen.

8. Menurunnya Tingkat Ketimpangan

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi kelima, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja Indeks Gini. Capaian Indeks gini pada tahap pertama sebesar 0,36 dan tahap kedua sebesar 0,41. Adapun target Indeks gini pada tahap ketiga sebesar 0,38, lalu pada tahap keempat antara 0,38 sampai dengan 0,35 dan tahap kelima antara 0,35 sampai dengan 0,30.

**B. Telaahan RTRW Provinsi Jawa Barat**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 menjadi salah satu dokumen yang harus dipedomani dalam penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Mempedomani RTRW bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana tata ruang.

Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45 persen dari Wilayah Daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042;
2. Tersedianya ruang untuk Ketahanan Pangan;



3. Terwujudnya Ruang Investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
4. Terwujudnya ruang untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dalam sistem Wilayah yang terintegrasi; dan
5. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam Penataan Ruang.

Strategi Penataan Ruang meliputi:

1. Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya, meliputi:
  - a) Menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur-Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;
  - b) Meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
  - c) Meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.
2. Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi, meliputi:
  - a) Meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;



- b) Mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
  - c) Meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
  - d) Meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
  - e) Menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan
  - f) Pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
3. Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi, meliputi:
- a) Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya-Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;
  - b) Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
  - c) Mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan

- Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
- d) Mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
  - e) Mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
  - f) Mengembangkan system telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
  - g) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
  - h) Mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;
  - i) Mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
  - j) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
  - k) Meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.
4. Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung, meliputi:
- a) Meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;

- b) Membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghin dari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
  - c) Meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
  - d) Mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
  - e) Mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - f) Meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
  - g) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
  - h) Mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
  - i) Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
  - j) Meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;
  - k) Mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
  - l) Mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.
5. Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional, meliputi:
- a) Mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;

- b) Mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
  - c) Melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
  - d) Merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
  - e) Memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
  - f) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan
  - g) Pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.
6. Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, meliputi:
- a) Merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
  - b) Mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
  - c) Pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
  - d) Mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan

- e) Mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a) Meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
  - b) Menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
  - c) Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
  - d) Mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek- Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.
8. Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a) Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan
  - b) Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang

- memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
- c) Strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**4.2.4. Telaahan RPJMD dan RPD Kabupaten Berbatasan Kabupaten Sumedang**

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 juga memperhatikan dokumen RPJMD dan RPD daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

**Tabel 4.1**  
**Telaahan RPJMD/RPD Kabupaten Berbatasan Kabupaten Sumedang**

| No | Daerah Lain     | Periode RPJMD/RPD     | Visi/Misi RPJMD/Tujuan RPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keterangan                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kabupaten Garut | RPJMD Tahun 2019-2024 | <p><b>VISI :</b></p> <p><b>”GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”</b></p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.</li> <li>2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.</li> <li>3. Mewujudkan pemerataan</li> </ol> | Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 |

| No | Daerah Lain         | Periode RPJMD/RPD       | Visi/Misi RPJMD/Tujuan RPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keterangan                                                                                                                                    |
|----|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                         | <p>pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang.</p> <p>4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.</p>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
| 2. | Kabupaten Subang    | RPD Tahun 2024 - 2026   | <p><b>Tujuan RPD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</li> <li>2. Mewujudkan Kesejahteran Masyarakat</li> <li>3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan</li> <li>4. Mewujudkan pemanfaatan ruang dalam upayapemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana</li> <li>5. Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel</li> </ol> | Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 - 2026                             |
| 3. | Kabupaten Indramayu | RPJMD Tahun 2021 - 2026 | <p>VISI :</p> <p><b>“TERWUJUDNYA INDRAMYU BERMARTABAT : BERSIH, RELIGIUS, MAJU, ADIL, MAKMUR DAN HEBAT”</b></p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan efektivitas tata Kelola pemerintahan yang bersih, melayani, melindungi, transparan, akuntabel,</li> </ol>                                                                                                                                                                     | Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramyu Tahun 2021-2026 |

| No | Daerah Lain | Periode<br>RPJMD/RPD | Visi/Misi<br>RPJMD/Tujuan RPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keterangan |
|----|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |             |                      | <p>profesional serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan kata kunci<br/><b>PERWUJUDAN REFORMASI BIROKRASI;</b></p> <p>2. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan serta pemajuan kebudayaan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Dengan kata kunci<br/><b>FASILITASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERMASYARAKAT;</b></p> <p>3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan merata. Dengan kata kunci<br/><b>PENINGKATAN KESEJAHTERAAN;</b></p> <p>4. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya, sehingga mampu berdikari. Dengan kata kunci<br/><b>PENANGGULANGAN KEMISKINAN;</b></p> <p>5. Meningkatkan pelayanan Pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan kata kunci<br/><b>PENINGKATAN DAYA SAING SDM;</b></p> <p>6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan efektivitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup. Dengan kata kunci<br/><b>PENINGKATAN</b></p> |            |



| No | Daerah Lain           | Periode RPJMD/RPD       | Visi/Misi RPJMD/Tujuan RPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keterangan                                                                                                                                          |
|----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                         | <b>INFRASTRUKTUR;</b><br>dan<br>7. Meningkatkan ekonomi dan daya saing melalui pengelolaan potensi unggulan daerah. Dengan kata kunci <b>PENINGKATAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
| 4. | Kabupaten Majalengka  | RPD Tahun 2024 - 2026   | <b>Tujuan RPD :</b><br>1. Meningkatnya Pembangunan Manusia<br>2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan<br>3. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026                        |
| 5. | Kabupaten Tasikmalaya | RPJMD Tahun 2021 – 2026 | <b>VISI :</b><br><b>“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”</b><br><br><b>MISI :</b><br>1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah<br>2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;<br>3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan<br>4. Mewujudkan iklim investasi yang | Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 |

| No | Daerah Lain       | Periode<br>RPJMD/RPD    | Visi/Misi<br>RPJMD/Tujuan RPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keterangan                                                                                                                 |
|----|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                         | kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| 6. | Kabupaten Bandung | RPJMD Tahun 2021 - 2026 | <b>VISI:</b><br><b>“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”</b><br><br><b>MISI :</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangkitkan Daya Saing Daerah</li><li>2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata</li><li>3. Mengoptimalkan pembangunan daeberbasis partisipasi masyarakat yamenjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkakearifan lokal dan berwawasan lingkungan</li><li>4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan</li><li>5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah</li></ol> | Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 |

#### **4.2.5. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026**

Berdasarkan penelaahan faktor internal berupa permasalahan pembangunan dan kebijakan Provinsi Jawa Barat, serta penelaahan faktor eksternal yang meliputi penelaahan isu internasional, isu/kebijakan nasional, dan telaahan RPD daerah sekitar, maka dapat dirumuskan isu strategis daerah. Isu strategis merupakan hal-hal yang berdaya ungkit, bersifat penting untuk pembangunan jangka menengah, dan gambaran permasalahan atau tantangan yang akan ditangani atau dijawab, serta potensi dan peluang yang akan diambil atau dioptimalkan.

Adapun isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2026 meliputi:

##### **1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

- a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.
- b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.
- c. Penerapan zero new stunting dan penanganan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria.
- d. Peningkatan standar hidup layak masyarakat.
- e. Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, pembangunan pemuda, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana.
- f. Pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk.

##### **2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan**

- a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar.
- b. Penerapan UMKM dan industri hijau.
- c. Percepatan digitalisasi ekonomi.
- d. Penerapan pertanian ekologis.
- e. Pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM.
- f. Pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian dan perikanan.
- g. Peningkatan nilai investasi dan kualitas usaha.
- h. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- i. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan.
- j. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan.

- k. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
- l. Mitigasi, adaptasi, dan penanggulangan bencana.
- m. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- n. Penerapan circular ekonomi.

**3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**

- a. Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir.
- b. Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat.
- c. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur, dan Kawasan Cekungan Bandung.
- d. Penyediaan transportasi massal perkotaan.
- e. Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah.
- f. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah.
- g. Penyediaan hunian layak huni.
- h. Pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik.
- i. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

**4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah**

- a. Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional.
- b. Deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum.
- c. Penataan dan penguatan organisasi.
- d. Penataan tata laksana proses bisnis, dan SOP serta keterbukaan informasi.
- e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur.
- f. Penguatan akuntabilitas.
- g. Penguatan pengawasan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

- i. Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

#### **4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Sumedang**

Berdasarkan hasil telaahan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penetapan isu-isu strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dirumuskan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola. Hasil perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2024 sampai dengan 2026 meliputi:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
  - a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.
  - b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta peningkatan gerakan hidup sehat.
  - c. Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular serta penerapan zero new stunting.
  - d. Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pembangunan pemuda dan ketahanan keluarga.
  - e. Peningkatan kompetensi angkatan kerja yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
  - f. Peningkatan efektivitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Pertumbuhan ekonomi
  - a. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan peternakan.
  - b. Peningkatan ketahanan pangan daerah.
  - c. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
  - d. Optimalisasi pemanfaatan kebudayaan daerah dalam menunjang pariwisata.

- e. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri kecil dan menengah.
  - f. Percepatan penggunaan teknologi informasi pada setiap sektor ekonomi.
  - g. Peningkatan nilai investasi daerah.
  - h. Penerapan ekonomi sirkular.
3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan
- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah.
  - b. Mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim.
  - c. Peningkatan dan pemertaan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak).
  - d. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas lingkungan serta hunian layak huni.
  - e. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
  - f. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
  - g. Penataan ruang yang mendukung pengembangan kawasan segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta penanggulangan kawasan rawan bencana.
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- a. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.
  - b. Penguatan penegakan regulasi daerah.
  - c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur.
  - d. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
  - e. Peningkatan dan pemertaan kualitas pelayanan public.
  - f. Peningkatan profesionalisme ASN.
  - g. Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah.

**Tabel 4.2**  
**Keselarasan Isu Strategis Nasional dengan Isu Strategis Kabupaten Sumedang**

| ISU STRATEGIS                                                          |                                                                                                                 |                                                   |                                                             |                                            |                                                                    |                                                               |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NASIONAL                                                               | KABUPATEN SUMEDANG                                                                                              | NASIONAL                                          | KABUPATEN SUMEDANG                                          | NASIONAL                                   | KABUPATEN SUMEDANG                                                 | NASIONAL                                                      | KABUPATEN SUMEDANG                                                 |
| PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK                               | ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING                                                          | PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN            | PERTUMBUHAN EKONOMI                                         | PEMERATAAN PEMBANGUNAN                     | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN    | PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPERMERINTAHAN | REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN                   |
| (1)                                                                    | (2)                                                                                                             | (3)                                               | (4)                                                         | (5)                                        | (6)                                                                | (7)                                                           | (8)                                                                |
| Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata                   | Pemerataan pelayanan pendidikan khusus, formal dan non formal didukung sarana prasarana pendidikan yang memadai | Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri | Peningkatan nilai inverstasi daerah                         | Percepatan pengentasan kemiskinan          |                                                                    | Demokrasi substantif                                          |                                                                    |
| Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan                         |                                                                                                                 |                                                   | Pengembangan sektor perdagangan melalui teknologi informasi | Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan |                                                                    | Reformasi kelembagaan dan birokrasi                           | Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berbasis digital (SPBE) |
| Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan |                                                                                                                 |                                                   | Optimalisasi pengembangan dan pertumbuhan UMKM              | Pemerataan pembangunan wilayah             | Mitigasi dan penanggulangan bencana serta Adaptasi Perubahan Iklim |                                                               | Peningkatan profesionalisme ASN                                    |

| ISU STRATEGIS                                           |                                                                  |                                        |                                                                |                                                        |                                                                                                                                               |                                                              |                                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NASIONAL                                                | KABUPATEN SUMEDANG                                               | NASIONAL                               | KABUPATEN SUMEDANG                                             | NASIONAL                                               | KABUPATEN SUMEDANG                                                                                                                            | NASIONAL                                                     | KABUPATEN SUMEDANG                                    |
| PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK                | ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING           | PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN | PERTUMBUHAN EKONOMI                                            | PEMERATAAN PEMBANGUNAN                                 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN                                                                               | PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN | REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN      |
| (1)                                                     | (2)                                                              | (3)                                    | (4)                                                            | (5)                                                    | (6)                                                                                                                                           | (7)                                                          | (8)                                                   |
| Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat | Optimalisasi peningkatan pelayanan PPKS                          | Percepatan industri dan pariwisata     | Pengembangan dan pembangunan kawasan industri                  |                                                        | Optimalisasi Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan kawasan segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta Penanggulangan kawasan Rawan Bencana |                                                              | Optimalisasi kualitas pelayanan publik                |
|                                                         | Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan ketahanan keluarga |                                        | Pengembangan pariwisata melalui optimalisasi kebudayaan daerah | Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi | Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah                                                                                |                                                              | Akselerasi efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur |
|                                                         | Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan                   | Pembangunan ekonomi maritim            |                                                                |                                                        | Penyediaan Infrastruktur dasar yang merata dan terjangkau (Air bersih dan Sanitasi layak)                                                     | Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi              | Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah     |



| ISU STRATEGIS                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                                  |                        |                                                                     |                                                              |                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NASIONAL                                 | KABUPATEN SUMEDANG                                                               | NASIONAL                                                         | KABUPATEN SUMEDANG                                                               | NASIONAL               | KABUPATEN SUMEDANG                                                  | NASIONAL                                                     | KABUPATEN SUMEDANG                               |
| PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK | ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING                           | PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN                           | PERTUMBUHAN EKONOMI                                                              | PEMERATAAN PEMBANGUNAN | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN     | PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN | REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN |
| (1)                                      | (2)                                                                              | (3)                                                              | (4)                                                                              | (5)                    | (6)                                                                 | (7)                                                          | (8)                                              |
|                                          | Optimalisasi prevelensi stunting menuju zero stunting                            | Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani | Optimalisasi peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan peternakan |                        | Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan                   | Politik luar negeri bebas aktif                              |                                                  |
| Reformasi ketenagakerjaan                | Peningkatan kompetensi angkatan kerja yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja |                                                                  | Stabilisasi ketahanan pangan                                                     |                        | Peningkatan Pengelolaan Persampahan melalui pemberdayaan masyarakat | Penguatan ketahanan dan keamanan                             | Penguatan penegakan regulasi daerah              |
|                                          |                                                                                  |                                                                  | Pemantapan ketahanan energi dan air                                              |                        |                                                                     |                                                              |                                                  |
|                                          |                                                                                  |                                                                  | Komitmen terhadap lingkungan hidup                                               |                        |                                                                     |                                                              |                                                  |

**Tabel 4.3**  
**Keselarasan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dengan Isu Strategis Kabupaten Sumedang**

| ISU STRATEGIS                                                                                                |                                                                                                                 |                                          |                              |                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PROVINSI                                                                                                     | KABUPATEN SUMEDANG                                                                                              | PROVINSI                                 | KABUPATEN SUMEDANG           | PROVINSI                                                               | KABUPATEN SUMEDANG                                              | PROVINSI                                                                                                                                  | KABUPATEN SUMEDANG                                                 |
| KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA                                                                  | ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING                                                          | PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN        | PERTUMBUHAN EKONOMI          | PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR DASAR                 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN | REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI DAERAH                                                                                                    | ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN               |
| (1)                                                                                                          | (2)                                                                                                             | (3)                                      | (4)                          | (5)                                                                    | (6)                                                             | (7)                                                                                                                                       | (8)                                                                |
| Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi | Pemerataan pelayanan pendidikan khusus, formal dan non formal didukung sarana prasarana pendidikan yang memadai | Penerapan pertanian ekologis             |                              | Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir     |                                                                 | Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang professional | Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berbasis digital (SPBE) |
| Peningkatan kualitas dan aksesibilitas utara dan selatan Jawa Barat                                          | Peningkatan kompetensi angkatan kerja yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja                                | Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan | Stabilisasi ketahanan pangan | Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah utara dan selatan Jawa Barat | Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah  |                                                                                                                                           | Peningkatan profesionalisme ASN                                    |

| ISU STRATEGIS                                                            |                                                        |                                                            |                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PROVINSI                                                                 | KABUPATEN SUMEDANG                                     | PROVINSI                                                   | KABUPATEN SUMEDANG  | PROVINSI                                                                                                                         | KABUPATEN SUMEDANG                                                                                                                            | PROVINSI                                                                                              | KABUPATEN SUMEDANG                                    |
| KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA                              | ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING | PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN                          | PERTUMBUHAN EKONOMI | PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR DASAR                                                                           | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN                                                                               | REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI DAERAH                                                                | ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN  |
| (1)                                                                      | (2)                                                    | (3)                                                        | (4)                 | (5)                                                                                                                              | (6)                                                                                                                                           | (7)                                                                                                   | (8)                                                   |
| Penerapan zero new stunting dan penanganan AIDS Tuberkulosis dan Malaria | Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan         | Pembentukan sentra pertanian, perikanan dan UMKM           |                     | Pengembangan dan pembangunan Kawasan industry Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur, dan Kawasan Cekungan Bandung | Optimalisasi Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan kawasan segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta Penanggulangan kawasan Rawan Bencana | Deregulasi peraturan perundangundangan , peraturan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum | Penguatan penegakan regulasi daerah                   |
|                                                                          | Optimalisasi prevelensi stunting menuju zero stunting  | Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim |                     | Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah                     | Penyediaan Infrastruktur dasar yang merata dan terjangkau (Air bersih dan Sanitasi layak)                                                     | Penataan dan penguatan organisasi                                                                     | Akselerasi efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur |
| Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                 | Optimalisasi peningkatan pelayanan PPKS                | Penerapan UMKM dan industri hijau                          |                     | Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah                                                             |                                                                                                                                               | Penataan tata laksana proses bisnis dan SOP serta keterbukaan informasi                               |                                                       |

| ISU STRATEGIS                                                                                             |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                  |                                                             |                                                                     |                                        |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| PROVINSI                                                                                                  | KABUPATEN SUMEDANG                                               | PROVINSI                                                                                                    | KABUPATEN SUMEDANG                                                               | PROVINSI                                                    | KABUPATEN SUMEDANG                                                  | PROVINSI                               | KABUPATEN SUMEDANG                                   |
| KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA                                                               | ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING           | PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN                                                                           | PERTUMBUHAN EKONOMI                                                              | PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR DASAR      | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN     | REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI DAERAH | ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN |
| (1)                                                                                                       | (2)                                                              | (3)                                                                                                         | (4)                                                                              | (5)                                                         | (6)                                                                 | (7)                                    | (8)                                                  |
| Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana | Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan ketahanan keluarga | Percepatan digitalisasi ekonomi                                                                             | Pengembangan sektor perdagangan melalui teknologi informasi                      | Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan           | Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan                   | Penataan sistem manajemen SDM aparatur |                                                      |
|                                                                                                           |                                                                  | Penerapan circular ekonomi                                                                                  |                                                                                  | Pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestic | Peningkatan Pengelolaan Persampahan melalui pemberdayaan masyarakat | Penguatan akuntabilitas                |                                                      |
|                                                                                                           |                                                                  | Pengembangan ekonomi local pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian dan perikanan | Optimalisasi peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan peternakan | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis                         | Mitigasi dan penanggulangan bencana serta Adaptasi Perubahan Iklim  | Penguatan pengawasan                   | Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah    |

| ISU STRATEGIS                               |                                                        |                                                        |                                                                |                                                        |                                                                 |                                            |                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVINSI                                    | KABUPATEN SUMEDANG                                     | PROVINSI                                               | KABUPATEN SUMEDANG                                             | PROVINSI                                               | KABUPATEN SUMEDANG                                              | PROVINSI                                   | KABUPATEN SUMEDANG                                                                 |
| KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA | ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING | PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN                      | PERTUMBUHAN EKONOMI                                            | PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR DASAR | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN | REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI DAERAH     | ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN                               |
| (1)                                         | (2)                                                    | (3)                                                    | (4)                                                            | (5)                                                    | (6)                                                             | (7)                                        | (8)                                                                                |
|                                             |                                                        |                                                        | Optimalisasi pengembangan dan pertumbuhan UMKM                 | Penyediaan transportasi massal perkotaan               |                                                                 | Kualitas pelayanan public                  | Optimalisi kualitas pelayanan publik                                               |
|                                             |                                                        |                                                        | Pengembangan pariwisata melalui optimalisasi kebudayaan daerah |                                                        |                                                                 | Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan | Penerapan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah |
|                                             |                                                        | Penerapan link and match industri kecil industri besar | Pengembangan dan pembangunan kawasan industri                  |                                                        |                                                                 |                                            |                                                                                    |
|                                             |                                                        |                                                        | Peningkatan nilai inverstasi daerah                            |                                                        |                                                                 |                                            |                                                                                    |

| ISU STRATEGIS                               |                                                        |                                                |                     |                                                        |                                                                 |                                        |                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| PROVINSI                                    | KABUPATEN SUMEDANG                                     | PROVINSI                                       | KABUPATEN SUMEDANG  | PROVINSI                                               | KABUPATEN SUMEDANG                                              | PROVINSI                               | KABUPATEN SUMEDANG                                   |
| KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA | ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING | PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN              | PERTUMBUHAN EKONOMI | PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR DASAR | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN | REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI DAERAH | ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN |
| (1)                                         | (2)                                                    | (3)                                            | (4)                 | (5)                                                    | (6)                                                             | (7)                                    | (8)                                                  |
|                                             |                                                        | Mitigasi, adaptasi, dan penanggulangan bencana |                     |                                                        |                                                                 |                                        |                                                      |

4.2.7. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan urusan, evaluasi hasil RPJMD periode 2018-2023 dan didukung informasi dari perangkat daerah. Penyajian permasalahan pembangunan pada subbab ini meliputi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah Pokok menggambarkan masalah utama dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab yang dimuat pada kolom Masalah, dan selanjutnya Akar Masalah merupakan penyebab lebih rinci dari munculnya Masalah. Penyajian permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dimuat apda tabel di bawah.

Tabel 4.4  
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang

| Masalah Pokok                                     | Permasalahan                                                                                          | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                               | (2)                                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                                                       |
| Pendidikan                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| Belum meratanya pelayanan pendidikan yang memadai | Pelayanan Pendidikan belum Optimal yang didukung sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia yg memadai | Literasi peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum pada jenjang SD sebesar 57,12% dan jenjang SMP 62,81% di Kabupaten Sumedang sehingga masih perlu peningkatan (Capaian Literasi)                             |
|                                                   |                                                                                                       | Masih rendahnya Numerasi peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum pada jenjang SD sebesar 24,50% dan jenjang SMP 29,75% di Kabupaten Sumedang (Capaian Numerasi)                                              |
|                                                   |                                                                                                       | Karakter peserta didik pada jenjang SD sebesar 89,74% dan jenjang SMP 47,93% di Kabupaten Sumedang sehingga masih perlu dikembangkan (Capaian Surver Karakter)                                                            |
|                                                   |                                                                                                       | Persentase Sebaran Guru Sekolah Dasar (Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru PAI, dan Guru PJOK) masih rendah yaitu 50,30% (Jumlah Guru Ideal jenjang Sekolah Dasar sebanyak 6.313 orang, Keadaan Guru saat ini sebanyak 4.269 |

| Masalah Pokok | Permasalahan | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)           | (2)          | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |              | orang, sehingga kebutuhan guru saat ini sebanyak 2.044 orang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |              | Persentase Sebaran Guru Sekolah Menengah Pertama (Kepala Sekolah, Guru PAI, Guru PKn, Guru B.Indo, Guru Math, Guru IPA, Guru IPS, Guru Ing, Guru SenBud/Muatan Lokal, Guru Prakarya, Guru BK, dan Guru PJOK) masih rendah yaitu 45,58% (Jumlah Guru Ideal jenjang Sekolah Dasar sebanyak 2.145 orang, Keadaan Guru saat ini sebanyak 1.484 orang, sehingga kebutuhan guru saat ini sebanyak 661 orang) |
|               |              | Masih rendahnya Jumlah pendidik yang memiliki ijazah S1/D4, S2, dan S3 pada jenjang PAUD yaitu 37,16% dari total pendidik di seluruh satuan PAUD formal maupun nonformal (Proporsi Pendidik Berijazah Minimal S1/D4)                                                                                                                                                                                   |
|               |              | Masih rendahnya Rasio Penilik PAUD DIKMAS yang saat ini 1:27 lembaga sedangkan rasio ideal adalah 1:10 lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |              | Masih rendahnya Rasio Pengawas TK yang saat ini 1:20 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:15 satuan Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |              | Masih rendahnya Rasio Pengawas SD yang saat ini 1:14 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:10 satuan Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |              | Masih rendahnya Rasio Pengawas SMP yang saat ini 1:11 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:7 satuan Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |              | Rendahnya Persentase peserta didik yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD, yaitu 49,22% dari seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD (Angka Kesiapan Sekolah)                                                                                                                                                                                           |
|               |              | Masih terdapat sekolah yang kekurangan RKB terutama di wilayah padat penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |              | Masih terdapat bangunan sekolah yang rusak dan membahayakan siswa dan membahayakan warga sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Masalah Pokok                                                                  | Permasalahan                                                         | Akar Masalah                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                            | (2)                                                                  | (3)                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                |                                                                      | Masih banyak sekolah sekolah yang kekurangan TIK dalam mendukung proses belajar mengajar contohnya dlam melaksanakan AKM. Serta msih terdapat sekolah sekolah yang tidak terjangkau oleh jringan internet |
| <b>Kesehatan</b>                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Pelayanan kesehatan yang belum merata di setiap wilayah                        | Pelayanan kesehatan belum optimal                                    | Tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian Balita (AKI/AKB)                                                                                                                                          |
|                                                                                |                                                                      | Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan                                                                                                                                  |
|                                                                                |                                                                      | Masih terdapat kesulitan akses ke pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                     |
|                                                                                |                                                                      | Jumlah tempat tidur di RSUD masih belum ideal                                                                                                                                                             |
|                                                                                |                                                                      | Belum optimalnya UHC (Universal Health Coverage)                                                                                                                                                          |
|                                                                                | Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting | Masih terdapatnya kasus stunting                                                                                                                                                                          |
|                                                                                | Pengendalian penyakit menular dan tidak menular belum optimal        | Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) dan Tidak Menular                                                                                                          |
|                                                                                | Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal                        | Pola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)                                                                                                                                                              |
| <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Belum meratanya Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah | Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis Masih kurang Memadai     | Lebar Jalan Kabupaten dan jalan strategis rata- rata kurang memenuhi standar Jalan Kabupaten                                                                                                              |
|                                                                                |                                                                      | Akses Jalan menuju akses ke Pariwisata kondisi nya rusak sedang                                                                                                                                           |
|                                                                                |                                                                      | Akses Jalan menuju akses ke Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE kondisinya rusak sedang                                                                                                                   |
|                                                                                |                                                                      | Kondisi Jalan dan Saluran Drainase Jalan Kabupaten yang terlintasi oleh akses jalur tol kondisinya rusak berat                                                                                            |
|                                                                                |                                                                      | Jalan Kabupaten yang berada di perbatasan wilayah kondisinya masih rusak berat.                                                                                                                           |

| Masalah Pokok             | Permasalahan                                         | Akar Masalah                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                       | (2)                                                  | (3)                                                                                                                            |
| Rendahnya Sumber daya air | Cakupan Area Irigasi masih Rendah                    | Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air yang belum optimal                                                     |
|                           |                                                      | Jaringan irigasi masih banyak mengalami kerusakan                                                                              |
|                           |                                                      | Banyak sungai dan sumber daya air lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor                           |
|                           |                                                      | Banyaknya lokasi jaringan irigasi yang terdampak oleh bencana banjir/longsor                                                   |
|                           |                                                      | Perubahan fungsi ruang pertanian menjadi perumahan/pemukiman dan infrastruktur lainnya                                         |
|                           | Ketersediaan Air Minum belum mencukupi secara merata | Penurunan Kapasitas sumber air baku karena alih fungsi lahan                                                                   |
|                           |                                                      | Berkurangnya kapasitas sumber air baku pada saat musim kemarau                                                                 |
|                           |                                                      | Kondisi WTP yang sudah tidak optimal                                                                                           |
|                           |                                                      | Tingkat kebocoran air pada jalur transmisi dan distribusi yang masih cukup tinggi                                              |
|                           |                                                      | Bangunan SPAM perdesaan terbangun ada yang terbengkalai                                                                        |
|                           |                                                      | Pembinaan terhadap keberlanjutan kelompok masyarakat pengelola SPAM kurang optimal                                             |
|                           | Rumah Tangga Bersanitasi                             | Perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat dalam hidup sehat                                                                    |
|                           |                                                      | Masyarakat masih ada yang belum memiliki Sarana dan prasarana sanitasi (basis data Podes)                                      |
|                           |                                                      | Penyediaan tanah/lahan untuk membangun sanitasi komunal sangat sulit sehingga saat ini limbah domestik masih dibuang ke sungai |
|                           | Masih Rendah kondisi bangunan yang sesuai standar    | Gedung pemerintahan belum memiliki PBG dan SLF                                                                                 |
|                           |                                                      | Kurangnya pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Umum                                                                               |

| Masalah Pokok                                                                                     | Permasalahan                                                                           | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                               | (2)                                                                                    | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Belum Optimalnya Penataan Ruang untuk mendukung Proyek Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten | Dokumen Tata Ruang belum sesuai dengan perubahan regulasi dan perkembangan pembangunan | Perlu dilaksanakan reviu Rencana Tata Ruang Wilayah dikarenakan banyaknya dinamika regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                   |                                                                                        | Investasi belum berjalan secara optimal dikarenakan baru ada 1 (satu) RDTR yang sudah terkoneksi dengan OSS                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                   |                                                                                        | Perkembangan alih fungsi lahan sehingga perlu adanya pemutakhiran data                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                   |                                                                                        | Perlu dilaksanakan pemutakhiran dokumen Rencana Detail Tata Ruang karena adanya peraturan perundangan terbaru mengenai penataan ruang                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                        | Perlu disusunnya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang, serta kebijakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                   | Masih Rendahnya Ketaatan Penata Ruangan                                                | Terdapat pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak masyarakat dan dunia usaha belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam rencana tata ruang, khususnya terkait dengan arahan pemanfaatan ruang sehingga perlu dilaksanakan pengendalian terhadap rencana tapak yang sudah disahkan                                                                      |
| Masih rendahnya Pelayanan Jasa Kontruksi                                                          | Belum tertibnya pelayanan Jasa Konstruksi                                              | Tenaga kerja Konstruksi belum bersertifikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                   |                                                                                        | Layanan Data dan Informasi Jasa Konstruksi pada SIMJAKON belum Optimal (Profil Tenaga Kerja Konstruksi dan BUJK, Pasar Jasa Konstruksi, Materal dan Peralatan Jasa Konstruksi, Pelatihan Jasa Konstruksi, Profil Kecelakaan Kerja proyek Jasa Konstruksi, Peraturan Jasa Konstruksi, Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan |
|                                                                                                   |                                                                                        | Penyedia Jasa Konstruksi belum mempunyai SBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                   |                                                                                        | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi belum Optimal.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Masalah Pokok                                                                         | Permasalahan                                                      | Akar Masalah                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                   | (2)                                                               | (3)                                                                                                                                                                                        |
| Belum merata dan terjangkau ketersediaan infrastruktur dasar, Perumahan dan pemukiman | Penanganan Infrastruktur Perumahan dan pemukiman belum optimal    | Belum optimalnya penanganan limbah domestic, tidak berfungsinya IPLT, belum adanya operator khusus yang mengelola Air Limbah domestik, kesadaran masyarakat terhadap sanitasi masih rendah |
|                                                                                       |                                                                   | Belum Optimalnya Penanganan Kawasan Kumuh                                                                                                                                                  |
|                                                                                       |                                                                   | Belum adanya database Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dan Permukiman yang tidak memenuhi standar                                                                           |
|                                                                                       |                                                                   | Belum tersusunnya Dokumen RP3KP selaku dokumen perencanaan sektoral bidang perumahan permukiman serta legalisasinya (Perda/Perbup)                                                         |
|                                                                                       |                                                                   | Backlog Rumah di Kabupaten Sumedang Masih Tinggi                                                                                                                                           |
|                                                                                       |                                                                   | Rasio Rumah Tidak Layak Huni masih rendah                                                                                                                                                  |
| Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| Belum Optimalnya Penguatan Penegakan regulasi Daerah                                  | Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal | Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan daerah                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                   | Belum efektifnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat                                                                                        |
|                                                                                       |                                                                   | Terdapatnya Regulasi yang tumpang tindih                                                                                                                                                   |
|                                                                                       |                                                                   | Daya Dukung pembinaan dan pemberdayaan anggota Satlinmas kurang optimal. Banyak anggota Linmas yang telah berusia lanjut sehingga berpengaruh kepada kualitas SDM Satlinmas                |
|                                                                                       |                                                                   | Kurang minatnya warga masyarakat pemuda/pemudi yang ingin menjadi anggota linmas                                                                                                           |
| Sebagian besar wilayah yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim               | Penanggulangan dan Penanganan Bencana belum optimal               | Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.                                                           |

| Masalah Pokok                                                                                                 | Permasalahan                                                                        | Akar Masalah                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                           | (2)                                                                                 | (3)                                                                                                    |
|                                                                                                               |                                                                                     | Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana   |
|                                                                                                               |                                                                                     | Belum memadainya Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana             |
|                                                                                                               |                                                                                     | Kurangnya Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana                        |
| Sosial                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                        |
| Pelayanan PPKS yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya                                                   | Penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih belum Optimal                            | Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum akurat (Valid)                                |
|                                                                                                               |                                                                                     | Peran Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal                                   |
|                                                                                                               |                                                                                     | Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial tingkat desa                                      |
|                                                                                                               |                                                                                     | Sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memadai.                                                   |
| Tenaga kerja                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                        |
| Masih terdapatnya mismatch dan miseducation antara kompetensi angkatan kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja | Kompetensi Pencari Kerja masih rendah                                               | Program pelatihan yang disediakan oleh LPK swasta masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja |
|                                                                                                               |                                                                                     | Masih rendahnya kuantitas dan kualitas lulusan BLK/LPK di dalam pasar kerja                            |
|                                                                                                               | Tidak sebandingnya antara jumlah pencari kerja dengan ketersediaan kesempatan Kerja | Kurang efektivitasnya informasi pasar kerja                                                            |
|                                                                                                               |                                                                                     | Belum optimalnya Keppres 04 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan                          |
|                                                                                                               |                                                                                     | Masih rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas komunikasi antara pekerja dengan pengusaha            |
|                                                                                                               |                                                                                     | Masih adanya permasalahan hubungan antara pekerja dengan pengusaha                                     |
|                                                                                                               | Belum memadainya SDM Pndukung Ketenaga kerjaan                                      | Kurangnya tenaga fungsional mediator hubungan industrial                                               |
|                                                                                                               |                                                                                     | Belum tersedianya SDM fungsional pengantar kerja                                                       |

| Masalah Pokok                                          | Permasalahan                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                    | (2)                                                                                     | (3)                                                                                                                                                           |
|                                                        |                                                                                         | Masih kurangnya tenaga SDM instruktur BLK yang berkompeten                                                                                                    |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak           |                                                                                         |                                                                                                                                                               |
| Responsif Gender                                       | Rendahnya kualitas hidup perempuan                                                      | Masih rendahnya kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan                                                                             |
|                                                        |                                                                                         | Belum tersedianya data terbaru mengenai organisasi wanita yang aktif                                                                                          |
|                                                        |                                                                                         | Partisipasi perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum masih rendah                                                                                  |
|                                                        |                                                                                         | Masih rendahnya tingkat kesejahteraan anak                                                                                                                    |
|                                                        | Masih Adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak                               | Perempuan dan anak masih menjadi sasaran utama tindak kekerasan                                                                                               |
|                                                        |                                                                                         | Kurangnya sosialisasi mengenai Lembaga-lembaga perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak                                                             |
| Pangan                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                               |
| Ketahanan pangan yang rentan terhadap disrupsi ekonomi | Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat | Belum meratanya ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah.                                                                                            |
|                                                        |                                                                                         | Tingginya potensi penduduk yang terkena rawan pangan; dan                                                                                                     |
|                                                        |                                                                                         | Lemahnya akses data dan informasi harga pasokan dan akses pangan.                                                                                             |
|                                                        |                                                                                         | Intervensi/penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi.                                               |
|                                                        |                                                                                         | Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang. |
|                                                        |                                                                                         | Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal.                                                                                                   |
|                                                        |                                                                                         | Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dimasyarakat sebagai sumber pangan bergizi dan pendapatan keluarga.                                                   |

| Masalah Pokok                              | Permasalahan                                                                                                 | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                        | (2)                                                                                                          | (3)                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                                                                              | Belum optimalnya sosialisasi keamanan PSAT kepada masyarakat, produsen, dan pelaku usaha.                                                                                                                               |
|                                            |                                                                                                              | Kesadaran pelaku usaha untuk registrasi PSAT-PDUK masih rendah, karena kesadaran dan pemahaman keamanan PSAT masih rendah.                                                                                              |
|                                            |                                                                                                              | Terbatasnya sarana dan prasarana untuk uji lab keamanan PSAT.                                                                                                                                                           |
|                                            | Rendahnya diversifikasi pangan                                                                               | Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras.                                                                                                                                                        |
|                                            |                                                                                                              | Masih rendahnya konsumsi panganekaragaman pangan masyarakat.                                                                                                                                                            |
|                                            |                                                                                                              | Belum optimalnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting). |
|                                            |                                                                                                              | Kurangnya Promosi Pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) di tingkat masyarakat.                                                                                                                         |
|                                            |                                                                                                              | Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang.                                                           |
|                                            | <b>Pertanahan</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Belum optimalnya kinerja bidang Pertanahan | Proses Pengadaan lahan untuk kepentingan umum, penanganan sengketa tanah dan pemanfaatan Tanah belum optimal | Terkendalanya pembebasan lahan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana pelayanan umum lainnya                                                                                                                 |
|                                            |                                                                                                              | Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Tol CISUMDAWU, Bendungan Jatigede, dan Bendungan Sadawarna oleh Pemerintah Daerah Kabupaten                                                                         |
|                                            |                                                                                                              | Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Eks HGU serta Sengketa Penguasaan Hutan, dan permasalahan LC Kelurahan Situ                                                                      |

| Masalah Pokok                                                                                                         | Permasalahan                                                                                                              | Akar Masalah                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                   | (2)                                                                                                                       | (3)                                                                                         |
| Lingkungan Hidup                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                             |
| Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                          | Degradasi kualitas lingkungan hidup                                                         |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Peningkatan timbunan sampah                                                                 |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Penyelenggaraan prasarana sarana persampahan belum optimal                                  |
| Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                             |
| Belum meratanya Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil                                              | Penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatatan sipil belum optimal                                                      | Belum Optimalnya proses pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk                              |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Jangkauan pelayanan yang sangat luas                                                        |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Ketersediaan blangko KTP dari Pusat terbatas alokasinya untuk daerah                        |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Belum optimalnya proses pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil.                                 |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Belum Optimalnya pencatatan peristiwa penting lainnya (kelahiran, kematian, perkawinan dll) |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Pemanfaatan data penduduk yang masih belum maksimal penggunaannya                           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Akses ke Data Center sangat terbatas sehingga menghambat pelayanan Data Kependudukan        |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Belum Optimalnya Penggunaan Layanan Daring                                                  |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                             |
| Masih rendahnnya junlah Desa Mandiri                                                                                  | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mendorong Pertumbuhan Perekonomian belum optimal | Belum optimalnya pengelolaan BUMDes                                                         |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Belum optimalnya penyediaan kebutuhan dan data untuk Desa Wisata dan Inovasi Desa           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna di desa                                     |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Masih rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan desa                                     |
|                                                                                                                       |                                                                                                                           | Belum optimalnya fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa                                 |



| Masalah Pokok                                                          | Permasalahan                                                               | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                    | (2)                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                        |                                                                            | dari mulai penyusunan RPJMDes, RKPdes, RAPBDes dan APBDes                                                                                                                                                    |
|                                                                        |                                                                            | Kualitas Pengelolaan Desa Dalam Siskeudes, Pemanfaatan Potensi Desa dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sesuai Standar belum optimal                                  |
| Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |
| Masih Tingginya Angka TFR                                              | Belum optimalnya pengendalian penduduk melalui KB                          | Tingginya angka Pasangan Usia Subur Muda                                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                            | Struktur penduduk usia muda tinggi                                                                                                                                                                           |
|                                                                        |                                                                            | Masih cukup tinggi angka kelahiran                                                                                                                                                                           |
|                                                                        |                                                                            | Masih tingginya cakupan yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                                                                 |
|                                                                        |                                                                            | Tingginya pernikahan dibawah usia 20 tahun                                                                                                                                                                   |
|                                                                        |                                                                            | Rendahnya kesertaan KB Pria                                                                                                                                                                                  |
|                                                                        |                                                                            | Masih rendahnya capaian KB MKJ                                                                                                                                                                               |
| Kemandirian keluarga peserta KB belum optimal                          | Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I masih tinggi    | Rendahnya motivasi keluarga pra sejahtera dalam berwirausaha                                                                                                                                                 |
|                                                                        |                                                                            | Belum optimalnya penyuluhan tentang pemberdayaan ekonomi terhadap keluarga Pra sejahtera                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                            | Bantuan modal untuk usaha masih terkendala                                                                                                                                                                   |
| Perhubungan                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |
| Masih rendahnya kenyamanan, Keselamatan dan Ketertiban Pengguna Jalan. | Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan | Belum berhasilnya penanganan masalah kemacetan di simpul titik kemacetan Kabupaten Sumedang, yaitu simpangan pusat aktifitas di ibukota, Pasar dan Alun-alun Tanjungsari, pertigaan Cimalaka, dan Jatinangor |
|                                                                        |                                                                            | Belum optimalnya pengelolaan parkir termasuk pengendalian parkir liar                                                                                                                                        |
|                                                                        |                                                                            | Belum optimalnya pelayanan terminal tipe C yang sudah ada dan Belum Adanya Terminal Barang sesuai kewenangan kabupaten                                                                                       |

| Masalah Pokok                        | Permasalahan                                             | Akar Masalah                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                  | (2)                                                      | (3)                                                                                                                                                                                        |
|                                      |                                                          | Belum memadainya koordinasi terkait pembatasan angkutan barang yang melalui jalan arteri di Kabupaten Sumedang, sehingga berakibat pada kemacetan, polusi, rawan kecelakaan, dan lain-lain |
|                                      |                                                          | Belum memadainya Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan dalam mendukung Program Prioritas daerah                                                          |
|                                      |                                                          | Belum memadainya trayek angkutan penumpang antar kecamatan                                                                                                                                 |
|                                      |                                                          | Minimnya sarana dan prasarana uji kendaraan                                                                                                                                                |
|                                      |                                                          | Belum adanya pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi air Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) dan dampak aktifitas Pariwisata di sekitar Waduk                       |
|                                      |                                                          | Belum adanya Dokumen Perencanaan Tataan Transportasi Lokal sesuai perkembangan Tata ruang dan perubahan regulasi.                                                                          |
|                                      |                                                          | Belum optimalnya sosialisasi keselamatan berlalu lintas                                                                                                                                    |
|                                      |                                                          | Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan kualifikasi teknis dalam bidang Perhubungan                                                                                  |
| Komunikasi Dan Informatika           |                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| Literasi Digital masih belum optimal | Layanan komunikasi dan informasi masih perlu peningkatan | Sistem pengendalian dan pengawasan komunikasi belum optimal;                                                                                                                               |
|                                      |                                                          | Kurangnya kewenangan dalam penanganan permasalahan komunikasi;                                                                                                                             |
|                                      |                                                          | Peran dan fungsi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat lainnya dalam diseminasi informasi belum optimal;                                               |
|                                      |                                                          | Belum optimalnya peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Perangkat Daerah dalam                                                                  |

| Masalah Pokok                                         | Permasalahan                                                    | Akar Masalah                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                   | (2)                                                             | (3)                                                                                                      |
|                                                       |                                                                 | pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);                                                          |
|                                                       |                                                                 | Partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelayanan publik masih rendah                                     |
|                                                       |                                                                 | Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik;  |
|                                                       |                                                                 | Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi public                                             |
|                                                       |                                                                 | Kurangnya kapasitas Back Up listrik untuk NOC (Network Operation Control);                               |
|                                                       |                                                                 | Kurangnya Infrastruktur pendukung NOC (Network Operation Control);                                       |
|                                                       |                                                                 | Kurangnya Kapasitas Bandwidth Internet untuk mengcover kebutuhan Internet setiap OPD Kabupaten Sumedang; |
|                                                       |                                                                 | Kurangnya Pengembangan Keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikasi di bidang Informatika.     |
| Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah                   |                                                                 |                                                                                                          |
| Lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi Koperasi dan UMKM | Melemahnya peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat | Kurangnya pengetahuan sumber daya aparatur dalam pemanfaatan IT                                          |
|                                                       |                                                                 | Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi                                                |
|                                                       |                                                                 | Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya                                                     |
|                                                       |                                                                 | Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi                                                       |
|                                                       |                                                                 | Lemahnya manajemen koperasi                                                                              |
|                                                       |                                                                 | Rendahnya tingkat kewirausahaan koperasi                                                                 |
|                                                       | Peningkatan UMKM belum optimal                                  | Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha                                                               |
|                                                       |                                                                 | Database UMKM belum tersedia secara akurat                                                               |
|                                                       |                                                                 | Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing                                                          |

| Masalah Pokok                                  | Permasalahan                                                                          | Akar Masalah                                                                                                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                            | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                               |
|                                                |                                                                                       | Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan                                                          |
| Penanaman Modal                                |                                                                                       |                                                                                                                   |
| Belum Optimalnya Iklim Investasi Daerah        | Jumlah penanaman modal di Kabupaten Sumedang belum sebanding dengan potensi investasi | Belum adanya peta data potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah                |
|                                                |                                                                                       | Belum adanya data potensi investasi yang sudah diolah dan dikembangkan menjadi peluang investasi melalui analisis |
|                                                |                                                                                       | Belum adanya data peluang investasi unggulan daerah (sudah dilakukan analisis) sebagai bahan promosi              |
|                                                |                                                                                       | Belum adanya dokumen strategi promosi investasi sebagai bahan atau acuan pelaksanaan kegiatan promosi             |
| Kepemudaan Dan Olahraga                        |                                                                                       |                                                                                                                   |
| Masih Rendahnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan | Masih rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam mendorong percepatan pembangunan   | Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan                                                            |
|                                                |                                                                                       | Belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan kepemudaan                            |
|                                                |                                                                                       | Belum maksimalnya sarana dan prasarana kepemudaan                                                                 |
|                                                |                                                                                       | Rendahnya daya kreasi generasi muda                                                                               |
|                                                |                                                                                       | Masih tingginya kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang                                                |
|                                                |                                                                                       | Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi pemuda maupun kelompok kepemudaan berprestasi                            |
|                                                | Masih minimnya jumlah atlet berprestasi                                               | Belum maksimalnya prestasi keolahragaan di event-event Kejuaraan regional Jawa Barat maupun Nasional              |
|                                                |                                                                                       | Rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga                                                                      |
|                                                |                                                                                       | Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan                                                          |
|                                                |                                                                                       | belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan keolahragaan                          |

| Masalah Pokok                                 | Permasalahan                               | Akar Masalah                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                           | (2)                                        | (3)                                                                                                       |
|                                               |                                            | Pembinaan maupun pembibitan belum terencana dengan baik                                                   |
|                                               |                                            | Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kejuaraan                                                              |
|                                               |                                            | Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi atlet maupun tenaga keolahragaan berprestasi                     |
| Masih rendahnya prestasi olahraga             | Masih minimnya jumlah atlet berprestasi    | Belum maksimalnya prestasi keolahragaan di event-event Kejuaraan regional Jawa Barat maupun Nasional      |
|                                               |                                            | Rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga                                                              |
|                                               |                                            | Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan                                                  |
|                                               |                                            | belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan keolahragaan                  |
|                                               |                                            | Belum optimalnya Pembinaan maupun pembibitan para atlet;                                                  |
|                                               |                                            | Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kejuaraan                                                              |
|                                               |                                            | Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi atlet maupun tenaga keolahragaan berprestasi                     |
|                                               |                                            | Masih kurangnya dukungan fasilitas sarana dan prasarana olahraga                                          |
| Statistik                                     |                                            |                                                                                                           |
| Ketersediaan data yang akurat dan berkualitas | Masih rendahnya kualitas Data dan realtime | Masih kurangnya pemahaman terhadap Pengelolaan Data dari setiap produsen data                             |
|                                               |                                            | Masih banyak data yang belum disampaikan oleh Produsendata kepada walidata                                |
|                                               |                                            | Beberapa data yang dikumpulkan masih belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan dimensi kualitas data |
|                                               |                                            | Masih adanya perbedaan konsep dan defisini data antara produsen data                                      |
|                                               |                                            | Masih terdapat kesalahan dalam Proses input data dari produsen data                                       |

| Masalah Pokok                                                             | Permasalahan                                                                     | Akar Masalah                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                       | (2)                                                                              | (3)                                                                                                                                  |
|                                                                           |                                                                                  | Masih banyak Perangkat Daerah selaku produsen data yang belum melakukan Updating data secara periodik sesuai dengan waktu rilis data |
|                                                                           |                                                                                  | Masih kurangnya SDM dalam pengelolaan data                                                                                           |
| Persandian                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                      |
| Pengamanan Informasi daerah                                               | Masih Rendahnya Pengamanan Skor Informasi daerah                                 | Pemahaman pengguna aplikasi dalam aspek keamanan informasi masih renda                                                               |
|                                                                           |                                                                                  | Belum optimalnya penggunaan tahapan dalam pembangunan sistem elektronik yang ada                                                     |
|                                                                           |                                                                                  | Sarana prasarana masih belum memadai, seperti : laptop, pc, lisensi aplikasi pentest, lisensi windows, lisensi antivirus.            |
|                                                                           |                                                                                  | Kurangnya alat pendukung dalam menjalankan monitoring keamanan informasi                                                             |
| Kebudayaan                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                      |
| Belum optimalnya pemanfaatan kebudayaan daerah dalam menunjang pariwisata | Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan | Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kebudayaan                                                                             |
|                                                                           |                                                                                  | Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya                                                                                |
|                                                                           |                                                                                  | Pelaksanaan event seni budaya/promosi budaya masih terbatas                                                                          |
|                                                                           |                                                                                  | Pelestarian situs cagar budaya belum optimal (masih banyak yang tidak terpelihara)                                                   |
|                                                                           |                                                                                  | Belum optimalnya sosialisasi dan implemntasi Sumedang Puseur Budaya Sunda;                                                           |
| Perpustakaan                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                      |
| Masih Rendahnya Indeks Literasi                                           | Sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai                                  | Koleksi bahan pustaka sangat terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat                                             |
|                                                                           |                                                                                  | Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai                                                                   |
|                                                                           |                                                                                  | Layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka                                                            |

| Masalah Pokok                                               | Permasalahan                                                   | Akar Masalah                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                         | (2)                                                            | (3)                                                                                                                                                                              |
|                                                             |                                                                | Masyarakat Kabupaten Sumedang banyak tersebar di desa-desa, sehingga akses terhadap pelayanan perpustakaan daerah sangat terbatas, sementara perpustakaan desa kurang berkembang |
|                                                             |                                                                | Jangkauan perpustakaan keliling sangat terbatas                                                                                                                                  |
|                                                             |                                                                | Minat baca masyarakat masih rendah                                                                                                                                               |
| Kearsipan                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                  |
| Rendahnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Belum adanya kesamaan persepsi di setiap PD terhadap kearsipan | Masih rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap kearsipan                                                                                                                         |
|                                                             |                                                                | Belum adanya peraturan yang mengatur tentang jadwal retensi arsip                                                                                                                |
|                                                             |                                                                | Belum adanya fitur pada aplikasi Super e-Office untuk penyusutan arsip                                                                                                           |
|                                                             |                                                                | Masih rendahnya pemeliharaan kearsipan                                                                                                                                           |
| Kelautan Dan Perikanan                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                  |
| Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan             | Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan                 | Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan                                                                                                                      |
|                                                             |                                                                | Penggunaan pakan yang tidak tepat                                                                                                                                                |
|                                                             |                                                                | Masih rendahnya Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Perikanan terutama untuk Kelompok Perikanan                                                             |
|                                                             |                                                                | Belum adanya pusat atau sentra produksi perikanan dan pengolahan, dan belum terpetakannya potensi antar wilayah                                                                  |
|                                                             |                                                                | Perubahan iklim dan cuaca                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                | Belum optimalnya penerapan teknologi perikanan                                                                                                                                   |
|                                                             |                                                                | Belum optimalnya pemanfaatan Potensi Perairan Umum Daratan (PUD)                                                                                                                 |
|                                                             |                                                                | Belum adanya orientasi bisnis dalam usaha budidaya, penangkapan dan pengolahan perikanan                                                                                         |

| Masalah Pokok              | Permasalahan                                     | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                        | (2)                                              | (3)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            |                                                  | Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perikanan                                                                                                                                                                                            |
|                            |                                                  | Belum optimalnya kelembagaan perikanan                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                  | Rendahnya kualitas benih ikan                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah       | Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat, sebagai akibat terdapatnya beberapa masyarakat yang tidak menyukai konsumsi utuh ikan, sehingga diperlukan upaya diversifikasi olahan perikanan dan Optimalisasi Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN) |
|                            | Pasar yang tidak efisien                         | Kurangnya akses ke pasar                                                                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                  | Harga yang tidak stabil                                                                                                                                                                                                                              |
| Pariwisata                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rendahnya kunjungan wisata | Sarana prasarana pariwisata masih kurang memadai | Akses menuju destinasi wisata kurang memadai                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                                                  | Terbatasnya promosi pariwisata seni dan budaya                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                  | Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan                                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                  | Masih rendahnya atraksi pariwisata                                                                                                                                                                                                                   |
|                            |                                                  | Belum tersedianya amenities dilokasi wisata                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                                                  | Masih rendahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan                                                                                                                                                                                                   |
|                            | Sub sektor ekonomi kreatif belum berkembang      | Pengetahuan masyarakat dan ASN mengenai ekonomi kreatif masih kurang                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                  | Kurangnya kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI)                                                                                                                                                                                   |
|                            |                                                  | Masih kurangnya infrastruktur serta sarana dan prasarana ekonomi kreatif                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                  | Belum terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                                                  | Peran komunitas pelaku ekonomi kreatif belum maksimal                                                                                                                                                                                                |
|                            |                                                  | Kualitas SDM ekonomi kreatif masih kurang                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Masalah Pokok                                                                   | Permasalahan                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                             | (2)                                                                     | (3)                                                                                                                                                            |
|                                                                                 |                                                                         | Masih kurangnya event-event untuk apresiasi dan promosi ekonomi kreatif                                                                                        |
|                                                                                 |                                                                         | Masih kurangnya konsumsi dan pemanfaatan produk ekonomi kreatif                                                                                                |
|                                                                                 |                                                                         | Belum terciptanya sistem distribusi produk ekonomi kreatif yang efektif                                                                                        |
|                                                                                 |                                                                         | Forum komunitas pelaku ekonomi kreatif belum terbentuk sampai tingkat kecamatan                                                                                |
| Pertanian                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                |
| Masih Rendahnya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; | Pasar yang tidak efisien                                                | Kurangnya akses ke pasar                                                                                                                                       |
|                                                                                 |                                                                         | Ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dirantai pasokan atau monopoli                                                                                        |
|                                                                                 | Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan usaha pertanian | Rendahnya kualitas SDM petani                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                         | Rendahnya regenerasi petani.                                                                                                                                   |
|                                                                                 |                                                                         | Rendahnya kapasitas petani milenial                                                                                                                            |
|                                                                                 |                                                                         | Terbatasnya jumlah SDM penyuluh pertanian; dan                                                                                                                 |
|                                                                                 |                                                                         | Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh.                                                                                                                       |
|                                                                                 | Produksi komoditas pertanian yang rendah                                | Ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida non organik                                                                                                 |
|                                                                                 |                                                                         | Sulitnya akses terhadap pupuk                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                         | Biaya produksi yang tinggi                                                                                                                                     |
|                                                                                 |                                                                         | Terbatasnya penyebaran dan penyediaan benih unggul bersertifikat                                                                                               |
|                                                                                 |                                                                         | Belum optimalnya penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)                                                                                                 |
|                                                                                 |                                                                         | Rendahnya dukungan sarana prasarana dalam rangka penerapan budidaya pertanian yang ramah lingkungan.                                                           |
|                                                                                 |                                                                         | Rendahnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dalam budidaya pertanian yang baik, Good Handling Practices (GHP) dalam penanganan pascapanen yang baik, |

| Masalah Pokok                               | Permasalahan                            | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                         | (2)                                     | (3)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                         | dan Good Manufacturing Practices (GMP) dalam sistem yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan diawasi sesuai dengan standar kualitas.                                                                                            |
|                                             |                                         | Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan (Pemetaan Cluster Pertanian).                                                                                                                                                                            |
|                                             |                                         | Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) serta percepatan tanam baik kuantitas maupun kualitas. |
|                                             |                                         | Teknologi bidang pertanian dan Digitalisasi Pertanian masih rendah                                                                                                                                                                                  |
|                                             |                                         | Alih Fungsi Lahan Pertanian.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             |                                         | Minimnya Akses terhadap permodalan.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                         | Perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim                                                                                                                                                                                                              |
|                                             | Persaingan dengan produk impor          | Rendahnya kualitas produk pertanian                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             | Rendahnya nilai tambah produk pertanian | Terbatasnya Pengolahan Hasil Pertanian dan promosi produk pertanian                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                         | Kurangnya investasi dalam teknologi bidang pertanian                                                                                                                                                                                                |
| Masih Rendahnya Nilai Tukar Petani Peternak | Pasar yang tidak efisien                | Kurangnya negosiasi harga                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             |                                         | Kurangnya akses ke pasar                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             |                                         | Tidak adanya jaminan kualitas                                                                                                                                                                                                                       |
|                                             | Persaingan yang tidak sehat             | Struktur pasar yang tidak sehat                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             |                                         | Belum optimalnya kelembagaan peternakan.                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | Kurangnya akses teknologi modern        | Rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM peternak terhadap teknologi dan inovasi.                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                         | Belum optimalnya pemanfaatan teknologi usaha peternakan.                                                                                                                                                                                            |
|                                             | Rendahnya produksi peternakan           | Semakin berkurangnya lahan untuk budidaya peternakan dan sumber pakan sebagai akibat pembangunan                                                                                                                                                    |

| Masalah Pokok                            | Permasalahan                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (1)                                      | (2)                                                                             | (3)                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|                                          |                                                                                 | proyek strategis nasional, pemukiman, dan pembangunan lainnya                                                                                                                                                       |                                                              |
|                                          |                                                                                 | Usaha budidaya peternakan sebagian besar masih merupakan usaha sambilan / belum berorientasi bisnis                                                                                                                 |                                                              |
|                                          |                                                                                 | Masih kurangnya sarana pendukung usaha peternakan seperti Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Sumber Air Peternakan, Puskesmas / Klinik Hewan, Pusat Promosi, Instalasi Pembibitan, Kawasan Peternakan dan sebagainya. |                                                              |
|                                          |                                                                                 | Harga pakan dan bahan baku pakan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, dimana pakan merupakan komponen terbesar biaya produksi peternakan.                                                                   |                                                              |
|                                          |                                                                                 | Masih adanya serangan wabah penyakit ternak                                                                                                                                                                         |                                                              |
|                                          |                                                                                 | Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana produksi peternakan.                                                                                                                                                   |                                                              |
|                                          | Rendahnya nilai tambah produk peternakan                                        | Rendahnya kualitas pakan ternak                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                          |                                                                                 | Belum optimalnya pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.                                                                                                                                    |                                                              |
|                                          |                                                                                 | Kurangnya manajemen peternakan yang baik                                                                                                                                                                            |                                                              |
|                                          |                                                                                 | Biaya produktifitas yang tinggi.                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|                                          | Pasar yang tidak efisien                                                        | Kurangnya akses ke pasar                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|                                          |                                                                                 | Harga yang tidak stabil                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|                                          | Kehutanan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                          | Belum Optimalnya Perekonomian masyarakat sekitar Taman Hutan Rakyat             | Kreativitas ekonomi masyarakat sekitar penyangga Tahura belum optimal                                                                                                                                               | Kurang efisiensinya pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura); |
| Hutan Kota belum dikembangkan            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| Perdagangan                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| Usaha Perdagangan yang kurang berkembang | Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan | Belum adanya kesepakatan kerjasama antara distributor, koperasi dan pelaku usaha perdagangan untuk melakukan sistem jaringan usaha                                                                                  |                                                              |

| Masalah Pokok                                        | Permasalahan                               | Akar Masalah                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                  | (2)                                        | (3)                                                                                                       |
|                                                      |                                            | Kurang fahamnya masyarakat untuk melakukan perdagangan secara online                                      |
|                                                      | Revitalisasi Pasar Rakyat                  | Belum terwujudnya kesepakatan antara warga pasar dengan Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan pasar |
|                                                      |                                            | Masih terdapatnya lahan-lahan belum bersertifikat yang akan diperuntukan pembangunan pasar                |
|                                                      |                                            | Belum adanya data valid mengenai perdagangan besar dan eceran yang tersebar di Kabupaten Sumedang         |
|                                                      | Akses permodalan                           | Kurangnya informasi permodalan bagi pelaku usaha                                                          |
|                                                      | Kurangnya infrastruktur yang memadai       | Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan                                                       |
| Perindustrian                                        |                                            |                                                                                                           |
| Laju Pertumbuhan Industri pengolahan masih rendah    | Kurangnya tingkat investasi                | Kurangnya akses terhadap permodalan                                                                       |
|                                                      |                                            | Kondisi ekonomi yang kurang stabil                                                                        |
|                                                      |                                            | Biaya produksi yang tinggi                                                                                |
|                                                      |                                            | Kurangnya dukungan infrastruktur                                                                          |
|                                                      |                                            | Sertifikasi hasil industri belum menyeluruh                                                               |
|                                                      |                                            | Masih kurangnya promosi peluang investasi                                                                 |
|                                                      | Kurangnya penerapan teknologi dan inovasi  | Kurangnya SDM yang terampil                                                                               |
|                                                      |                                            | Resistensi dari pekerja                                                                                   |
|                                                      | Kurangnya pemasaran                        | Masih kurangnya promosi produk IKM                                                                        |
|                                                      |                                            | Belum optimalnya pemasaran produk IKM                                                                     |
| Transmigrasi                                         |                                            |                                                                                                           |
| Belum optimalnya jumlah transmigran yang ditempatkan | Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi | Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi                                                                |
|                                                      |                                            | Belum tersedianya lahan untuk transmigrasi                                                                |

| Masalah Pokok                                                              | Permasalahan                                                                     | Akar Masalah                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                        | (2)                                                                              | (3)                                                                                                                     |
|                                                                            |                                                                                  | Masih rendahnya kuantitas SDM bidang transmigrasi                                                                       |
|                                                                            |                                                                                  | Belum tersedianya SDM fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat                                                           |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                        |                                                                                  |                                                                                                                         |
| Perencanaan                                                                |                                                                                  |                                                                                                                         |
| Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran                                   | Terdapat Beberapa Program pada Perencanaan yang tidak terdanai pada Penganggaran | Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan                                                  |
|                                                                            |                                                                                  | Belum semua Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian pembangunan yang berkategori baik                                 |
|                                                                            |                                                                                  | Perencanaan belum optimal sesuai dengan hasil evaluasi pembangunan                                                      |
|                                                                            |                                                                                  | Kurangnya pemahaman akan kedudukan perencanaan pembangunan                                                              |
| Keuangan                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                         |
| Belum sebandingnya antara pendapatan dan kebutuhan                         | Kebutuhan Belanja tidak sebanding dengan pendapatan                              | Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah                                                                            |
|                                                                            |                                                                                  | Masih rendahnya kualitas dokumen keuangan daerah                                                                        |
| Pendapatan Daerah                                                          |                                                                                  |                                                                                                                         |
| Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung Pembangunan Daerah | Pengelelolaan Potensi PAD dan Pajak Daerah belum optimal                         | Belum optimalnya pelayanan pajak                                                                                        |
|                                                                            |                                                                                  | Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah                                                                |
|                                                                            |                                                                                  | Belum adanya dukungan sistem yang terintegrasi                                                                          |
|                                                                            |                                                                                  | Kualitas layanan pendataan masih rendah                                                                                 |
|                                                                            |                                                                                  | Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur |
|                                                                            |                                                                                  | Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian                                                                         |
|                                                                            |                                                                                  | Belum Optimalnya pemutakhiran data potensi pajak daerah                                                                 |
|                                                                            |                                                                                  | Belum memiliki data potensi pendapatan daerah                                                                           |

| Masalah Pokok                               | Permasalahan                             | Akar Masalah                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                         | (2)                                      | (3)                                                                                                                                           |
|                                             |                                          | Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah                                                                                       |
|                                             |                                          | Belum dilakukan penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar                                                                            |
|                                             |                                          | Ketersediaan data piutang yang tidak valid                                                                                                    |
|                                             |                                          | Belum adanya sistem terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi                                                                             |
|                                             |                                          | Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah secara elektronik                                                     |
|                                             |                                          | Pembayaran pajak belum tepat waktu;                                                                                                           |
|                                             |                                          | Belum optimalnya penanganan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan                                                                               |
|                                             |                                          | Belum optimalnya jangkauan pelayanan Pajak Daerah bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Sumedang                                               |
| Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan        |                                          |                                                                                                                                               |
| Belum Optimalnya Indeks Profesionalitas ASN | Kualitas dan Kompetensi ASN belum Merata | Belum optimal dan terpetakannya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan, kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi secara riil |
|                                             |                                          | Tambahan Penghasilan Pegawai masih berdasarkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan perilaku dan kehadiran kerja tanpa target kinerja   |
|                                             |                                          | Masih kurangnya aparatur yang memiliki kualifikasi teknik serta distribusi PNS yang belum merata secara kualitas dan kuantitas                |
|                                             |                                          | Belum optimalnya pengevaluasian kinerja dan disiplin pegawai yang terintegrasi                                                                |
|                                             |                                          | Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan yang baik, bersih dan melayani                        |
|                                             |                                          | Beberapa pelayanan administrasi kepegawaian di BKPSDM belum seluruhnya berbasis teknologi informasi                                           |
|                                             |                                          |                                                                                                                                               |

| Masalah Pokok                                                | Permasalahan                                                    | Akar Masalah                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                          | (2)                                                             | (3)                                                                                                                                        |
|                                                              |                                                                 | Belum optimalnya dan terintegrasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian |
| <b>Penelitian dan Pengembangan</b>                           |                                                                 |                                                                                                                                            |
| Hasil penelitian belum seluruhnya diimplementasikan          | Dokumen Kajian belum optimal menjadi dasar pelaksanaan kegiatan | Terbatasnya fungsional peneliti                                                                                                            |
|                                                              |                                                                 | Belum optimalnya penyebaran informasi arah rencana penelitian dan pengembangan                                                             |
| <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                   |                                                                 |                                                                                                                                            |
| <b>Sekretariat Daerah</b>                                    |                                                                 |                                                                                                                                            |
| Belum Optimalnya Perumusan Kebijakan pada Sekretariat Daerah | Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah          | Bagian Tata Pemerintahan                                                                                                                   |
|                                                              |                                                                 | Belum optimalnya pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan                                                                                |
|                                                              |                                                                 | Belum adanya penegasan tentang batas wilayah kecamatan, kelurahan dan desa                                                                 |
|                                                              |                                                                 | Masih rendahnya respon OPD dalam penyusunan LKPJ dan LPPD                                                                                  |
|                                                              |                                                                 | Bagian Hukum                                                                                                                               |
|                                                              |                                                                 | Belum tercapainya target program pembentukan Perda sesuai dengan yang ditetapkan                                                           |
|                                                              |                                                                 | Belum tersedianya pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum dan pustakawan                                 |
|                                                              |                                                                 | Bagian Organisasi                                                                                                                          |
|                                                              |                                                                 | Masih adanya OPD yang belum menyusun dan menerapkan SOP dan standar pelayanan                                                              |
|                                                              |                                                                 | Belum adanya evaluasi kelembagaan, analisa jabatan dan analisa Beban kerja sesuai dengan SOTK yang baru                                    |
|                                                              |                                                                 | Masih rendahnya respon dan pemahaman OPD terhadap dukungan data penyusunan LAKIP                                                           |
|                                                              |                                                                 | Belum tersedianya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan analis dan penyusun                                                |

| Masalah Pokok | Permasalahan | Akar Masalah                                                                               |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)           | (2)          | (3)                                                                                        |
|               |              | Bagian Kerjasama                                                                           |
|               |              | Belum adanya regulasi daerah yang mengatur kerjasama daerah                                |
|               |              | Belum adanya SOP yang mengatur administrasi kerjasama OPD                                  |
|               |              | Rendahnya respon OPD terkait potensi kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti            |
|               |              | Kurangnya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai tupoksi                     |
|               |              | Belum tersedianya data potensi kerjasama                                                   |
|               |              | Bagian Perekonomian                                                                        |
|               |              | Masih rendahnya dukungan data terkait dengan evaluasi kinerja BUMD dan perekonomian daerah |
|               |              | Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi analisis ekonomi daerah   |
|               |              | Tingkat responsif pelayanan informasi analisa ekonomi daerah yang belum optimal            |
|               |              | Belum adanya SOP yang mengatur sistem informasi ekonomi daerah                             |
|               |              | Bagian Kesejahteraan Rakyat                                                                |
|               |              | Belum optimalnya koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat                                 |
|               |              | Belum adanya OPD teknis yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan                      |
|               |              | Tingkat responsif OPD yang masih rendah                                                    |
|               |              | Masih adanya kegiatan-kegiatan teknis                                                      |
|               |              | Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi                           |
|               |              | Bagian Pengendalian Pembangunan                                                            |
|               |              | Masih rendahnya dukungan data pelaksanaan pembangunan dari OPD terkait                     |



| Masalah Pokok | Permasalahan | Akar Masalah                                                                                                    |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)           | (2)          | (3)                                                                                                             |
|               |              | Belum optimalnya pelayanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan OPD             |
|               |              | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ)                                                                 |
|               |              | Belum tersedianya pejabat fungsional PPBJ                                                                       |
|               |              | Tingkat responsif pelayanan yang masih belum optimal                                                            |
|               |              | Belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana PBJ                                                     |
|               |              | Belum optimalnya layanan informasi pengadaan barang dan jasa                                                    |
|               |              | Bagian Umum                                                                                                     |
|               |              | Belum tersedianya SOP pelayanan kerumah tanggaan Setda dan pimpinan daerah                                      |
|               |              | Tingkat responsif dan kualitas pelayanan yang masih belum optimal                                               |
|               |              | Belum adanya pemisahan tugas antara pelayanan rumah tangga pimpinan daerah dan di lingkungan Sekretariat Daerah |
|               |              | Belum tersedianya pejabat pejabat fungsional arsiparis                                                          |
|               |              | Bagian Humas dan Protokol                                                                                       |
|               |              | Tingkat pelayanan publikasi pimpinan daerah yang masih belum optimal                                            |
|               |              | Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan protokoler daerah                                                     |
|               |              | Masih rendahnya tingkat responsivitas OPD terkait pengaduan masyarakat                                          |
|               |              | Bagian Keuangan                                                                                                 |
|               |              | Masih adanya keterlambatan pelaporan keuangan Setda                                                             |
|               |              | Masih rendahnya kualitas kompetensi pengelola keuangan di lingkungan Setda                                      |

| Masalah Pokok                                                                                                                       | Permasalahan                                   | Akar Masalah                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                 | (2)                                            | (3)                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                     |                                                | Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi perencanaan                                                                                      |
|                                                                                                                                     |                                                | Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan                                                                                                           |
| Sekretariat DPRD                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                   |
| Belum optimalnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD                             | Belum Optimalnya kinerja Sekretariat DPRD      | Kurang optimalnya kajian produk hukum terkait permasalahan daerah sebagai bahan Raperda Inisiatif DPRD                                                            |
|                                                                                                                                     |                                                | Kurangnya tenaga fungsional analisis produk hukum daerah                                                                                                          |
|                                                                                                                                     |                                                | Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah masih bersifat administrasi belum sampai ke tingkat teknis operasional dilapangan                                |
|                                                                                                                                     |                                                | Kurangnya SDM pengolah data dan informasi berbasis teknologi                                                                                                      |
| UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                   |
| Inspektorat Daerah                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                   |
| Belum optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah di Kabupaten Sumedang | Belum Meratanya Kapasitas dan Kapabilitas APIP | Tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 3;                                                                                                                 |
|                                                                                                                                     |                                                | Penerapan Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah masih rendah                                                                                                     |
|                                                                                                                                     |                                                | Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah belum optimal                                                                                                               |
|                                                                                                                                     |                                                | Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan dengan rekomendasi belum optimal                                                                               |
|                                                                                                                                     |                                                | Temuan penyimpangan terhadap APBD masih terjadi                                                                                                                   |
|                                                                                                                                     |                                                | Masih terdapat kesenjangan (GAP) kapasitas APIP, khususnya dalam sertifikasi perjenjangan dan DIKLAT substansitif pengawasan akibat minimnya sumber daya anggaran |
|                                                                                                                                     |                                                | Masih terdapat kesenjangan (GAP) infrastuktur penunjang pengawasan, khususnya alat uji dan teknisnya                                                              |
|                                                                                                                                     |                                                | Masih belum otpimalnya manajemen pengawasan, khususnya penegakan kode etik bagi APIP, sehingga masih                                                              |

| Masalah Pokok                                   | Permasalahan                                | Akar Masalah                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                             | (2)                                         | (3)                                                                                                                                         |
|                                                 |                                             | terindikasikan terdapat oknum yang menerima gratifikasi dan suap                                                                            |
|                                                 |                                             | Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas                                                            |
|                                                 |                                             | Pemberian konsultasi pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa belum optimal                                                              |
| UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                         |                                             |                                                                                                                                             |
| Kesatuan Bangsa Dan Politik                     |                                             |                                                                                                                                             |
| Belum optimalnya tingkat cipta kondisi kondusif | Masih adanya potensi konflik dan unjuk rasa | Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi                                                                                                     |
|                                                 |                                             | Gangguan PEKAT masih tinggi                                                                                                                 |
|                                                 |                                             | Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing                                                                                                 |
|                                                 |                                             | Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada                                                                                                 |
|                                                 |                                             | Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik social                                                                                    |
|                                                 |                                             | Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi                                                                                                     |
|                                                 |                                             | Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social                                                                                      |
|                                                 |                                             | Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM                                                                                            |
|                                                 |                                             | Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.) |
|                                                 |                                             | Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara                    |
|                                                 |                                             | Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi                                                                                               |
|                                                 |                                             | Pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara                                                                  |
|                                                 |                                             | Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah)                                                                               |

| Masalah Pokok | Permasalahan                                                 | Akar Masalah                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)           | (2)                                                          | (3)                                                                                                                  |
|               |                                                              | Peran ormas di masyarakat belum optimal                                                                              |
|               |                                                              | Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas                                                                     |
|               |                                                              | Belum terbentuknya sistem informasi ormas                                                                            |
|               |                                                              | Sinergitas antar lembaga masih kurang terutama forum-forum strategis masyarakat (contoh FKUB, FKDM, FPK, Forkopinda) |
|               | Masih rendahnya partisipasi dalam mendukung proses demokrasi | Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol                                                   |
|               |                                                              | Belum optimalnya pendidikan politik                                                                                  |
|               |                                                              | Belum optimalnya Tim Pemantauan Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang                                    |

## **BAB V**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **5.1. Tujuan dan Sasaran**

Perencanaan Tahun 2024-2026 merupakan periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024-2026 bukan merupakan rencana atau janji kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024, sesuai amanat Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten dengan pembangunan provinsi dan nasional. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan strategis daerah selama periode tahun 2024- 2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Mengingat RPJP Daerah merupakan pedoman bagi rencana pembangunan terkait lainnya, maka penentuan tujuan dan sasaran, arah umum pembangunan jangka panjang, dan pentahapan pembangunan untuk periode lima tahunan merupakan bagian penting dalam RPJPD Kabupaten Sumedang. Arah umum pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang tahun 2005–2025 secara umum diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah, yaitu **“KABUPATEN**

## **SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005–2025, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri;
3. Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia.

Dengan visi di atas, menjadikan corak masyarakat dan daerah Kabupaten Sumedang yang ingin diwujudkan pada tahun 2025 mendatang adalah daerah yang dihuni oleh masyarakat yang makin sejahtera, yang senantiasa bersikap arif dan berkemampuan produktif dan mempertimbangkan kesinambungan lingkungan hidup daerahnya, serta makin mengindahkan prasyarat terbangunannya tatanan masyarakat berkesadaran hukum tinggi guna mewujudkan sistem sosial dan politik yang demokratis. Untuk memperkuat kondisi sejahtera dan demokratis tersebut, maka diperlukan pula kelangsungan kehidupan agama yang akan menyeimbangkan kebutuhan ragawi dan ukhrowi, yang dibangun oleh penghormatan yang makin baik terhadap kesalehan sosial dan keragaman dalam keyakinan beragama dalam satu kesatuan sistem keagamaan nasional yang dilindungi Undang Undang Dasar 1945. Sebagai ukuran dalam mewujudkan Kabupaten Sumedang yang sejahtera, agamis dan demokratis untuk 20 tahun mendatang diarahkan untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat, ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Meningkatnya tingkat pendidikan formal masyarakat, yang dilihat dari tercapainya target pendidikan dasar dan memasuki tahapan pendidikan menengah.
  - b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan di daerah yang berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat yang makin mendorong kesamaan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.
  - c. Meningkatnya penguasaan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu mengimplementasikan dalam perikehidupan masyarakat daerah yang makin produktif.
  - d. Terwujudnya pendidikan yang berdayaguna dengan kebutuhan kecakapan hidup sepanjang hayat.
  - e. Terciptanya kondisi lingkungan sehat sesuai standar kesehatan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan sosial.
  - f. Terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, dengan tidak membedakan kawasan perdesaan dan perkotaan, yang ditandai dengan penurunan kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan kelahiran yang tidak diinginkan, peningkatan kesehatan kaum ibu dan remaja perempuan serta penurunan kasus penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit endemik lainnya.
  - g. Terwujudnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang berkeadilan dan berdaya saing.
  - h. Terwujudnya sistem kehidupan sosial dengan kondisi yang stabil sehingga dapat mendukung terciptanya perikehidupan masyarakat yang dilandasi kearifan budaya daerah.
  - i. Terwujudnya kesalehan sosial yang menjadi perekat dalam lingkungan kehidupan masyarakat daerah yang semakin tercermin dalam perilaku silih asah, silih asih dan silih asuh.
  - j. Terwujudnya keluarga sebagai basis persemaian nilai-nilai budaya, pendidikan dan kesehatan.
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing serta keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah baik di kawasan perdesan maupun perkotaan.
- b. Meningkatnya kekokohan perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional, nasional dan internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi agribisnis, pariwisata dan industri.
- c. Meningkatnya akses yang lebih berkeadilan terhadap sumberdaya ekonomi bagi seluruh masyarakat.
- d. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan tingkat harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- e. Meningkatnya perlindungan regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosio ekonomi daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif.
- f. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat yang ditopang oleh makin produktifnya pendayagunaan potensi agribisnis, pariwisata dan industri.
- g. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto, yang berdampak terhadap penurunan kemiskinan.
- h. Meningkatnya pendayagunaan pemanfaatan potensi agribisnis, pariwisata dan industri yang selaras dengan kearifan lokal dan sosial masyarakat.
- i. Meningkatnya ketersediaan dan kontribusi infrastruktur perekonomian daerah yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan skala regional, nasional dan internasional.
- j. Meningkatnya kerjasama antar domain pemerintahan dalam penyediaan infrastruktur yang memadai.
- k. Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, komunikasi, energi termasuk di dalamnya energi alternatif, dan sumberdaya air yang andal dan terintegrasi, efisien, efektif dan modern serta berkualitas yang sejalan



dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- l. Terwujudnya penataan ruang yang serasi, seimbang dan berkelanjutan.
  - m. Terwujudnya pengembangan wilayah perbatasan dengan kabupaten tetangga, kawasan strategis dan desa pusat pertumbuhan.
  - n. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdayasaing secara berkesinambungan, berbasis pada keunggulan potensi daerah guna mendukung pembangunan.
3. Terwujudnya masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila, ditandai oleh hal-hal berikut:
- a. Meningkatkan jatidiri dan karakter masyarakat yang makin beriman dan bertakwa dalam keragaman keyakinan beragama dan beribadat yang dijamin kelangsungannya oleh pemerintah.
  - b. Menguatnya kemitraan dan tanggungjawab dalam pembangunan pendidikan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan di daerah.
  - c. Meningkatnya silaturahmi antar umat beragama dan intern umat beragama dalam mewujudkan kesalehan sosial.
  - d. Menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan aparatur pemerintah serta memperkuat silaturahmi antar dan inter umat beragama untuk menguatkan pengamalan agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang proporsional.
  - b. Meningkatnya aksesibilitas, transparansi pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.

- c. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin efisien dan efektif serta peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah daerah.
  - d. Meningkatnya profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap.
  - e. Terwujudnya kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif.
  - f. Terselenggaranya otonomi desa yang makin efektif.
  - g. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang makin meningkat.
5. Terwujudnya masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia, ditandai oleh hal-hal berikut:
- a. Terwujudnya penyelenggaraan kelembagaan demokrasi daerah, baik pada suprastruktur maupun infrastruktur politik serta meningkatnya budaya hukum dan HAM.
  - b. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
  - c. Terwujudnya kemitraan dengan media dalam menyampaikan kepentingan masyarakat daerah.
  - d. Meningkatnya penegakan hukum secara adil, dalam kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode tahun 2018-2023 serta memperhatikan RPJMN tahun 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023.

Dalam rangka perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, visi, dan misi RPJPD tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menpan PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penjabaran ke dalam tujuan dimaksudkan untuk

merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, sedangkan penjabaran ke dalam sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja.

Penyelenggaraan pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya telah membuahkan hasil yang diharapkan, meskipun masih terdapat target-target yang belum tercapai, untuk itu diperlukan perencanaan yang lebih baik lagi agar kinerja pembangunan dapat lebih optimal. Dalam Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2025 serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023, maka perlu adanya kerangka yang jelas menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasara akan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan yang dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan diuraikan dalam Tabel 5.1.

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026**

| No  | Tujuan/Sasaran                                                                                                                        | Indikator Tujuan/Sasaran         | Satuan | Kondisi Awal |             | Target Tahun |             |             | Kondisi Akhir |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|     |                                                                                                                                       |                                  |        | 2022         | 2023        | 2024         | 2025        | 2026        |               |
| 1   | Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter                                                                             | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin   | 72,69        | 72,40-73,37 | 73,11-73,99  | 73,74-74,59 | 74,40-75,30 | 74,40-75,30   |
| 1.1 | Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)     | Tahun  | 8,72         | 8,81-9,00   | 8,89-9,05    | 9,00-9,10   | 9,06-9,20   | 9,06-9,20     |
|     |                                                                                                                                       | Harapan Lama Sekolah (HLS)       | Tahun  | 12,99        | 13,05-13,12 | 13,06-13,16  | 13,07-13,17 | 13,08-13,18 | 13,08-13,18   |
| 1.2 | Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan                                                                         | Angka Harapan Hidup (AHH)        | Tahun  | 72,91        | 72,70-73,20 | 73,00-73,32  | 73,24-73,63 | 73,33-73,69 | 73,33-73,69   |
| 1.3 | Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender                               | Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | Poin   | 95,09        | 95,26-95,44 | 95,19-95,62  | 95,29-95,16 | 95,38-95,69 | 95,38-95,69   |
|     |                                                                                                                                       | Indesk Pemberdayaan Gender (IDG) | Poin   | 72,23        | 70,25-71,15 | 70,95-72,18  | 71,77-73,43 | 73,00-75,05 | 73,00-75,05   |
| 1.4 | Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat                                                                 | Indeks Kerukunan Umat Beragama   | Poin   | 75,32        | 74,5        | 75           | 75,5        | 76          | 76            |
| 1.5 | Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan                                                                                     | Indeks Pembangunan Pemuda        | Poin   | 44           | 45          | 46           | 47          | 48          | 48            |
| 2   | Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif                                                                                         | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)   | Persen | 5,03         | 5,20-6,20   | 5,30-6,50    | 5,50-6,82   | 5,65-7,00   | 5,65-7,00     |

| No  | Tujuan/Sasaran                                                                        | Indikator Tujuan/Sasaran                                                           | Satuan    | Kondisi Awal |             | Target Tahun |             |             | Kondisi Akhir |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|     |                                                                                       |                                                                                    |           | 2022         | 2023        | 2024         | 2025        | 2026        |               |
| 2.1 | Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan                                        | Persen    | 6,85         | 5,00-5,85   | 7,56-8,45    | 8,04-9,23   | 8,23-10,61  | 8,23-10,61    |
|     |                                                                                       | Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar, Eceran, reparasi mobil dan sepeda Motor | Persen    | 4,71         | 4,84-5,60   | 5,59-7,50    | 6,37-8,28   | 7,18-9,09   | 7,18-9,09     |
|     |                                                                                       | Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                        | Persen    | 4,18         | 2,44-3,59   | 3,28-4,94    | 3,48-5,15   | 3,69-5,35   | 3,69-5,35     |
|     |                                                                                       | Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                       | Persen    | 8,15         | 3,25-3,81   | 8,01-9,75    | 9,44-10,13  | 9,82-10,86  | 4,96-5,53     |
| 2.2 | Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah            | Indeks Kualitas Infrastruktur                                                      | Poin      | 77,64        | 80,43       | 81,40        | 83,17       | 84,62       | 84,62         |
| 2.3 | Meningkatnya Iklim Investasi Daerah                                                   | Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang                       | Persen    | -29,03       | 10,00       | 10,00        | 12,00       | 13,00       | 13,00         |
| 3   | Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat                                                  | Tingkat Kemiskinan                                                                 | Persen    | 10,14        | 9,70-7,56   | 9,50-7,26    | 9,43-7,40   | 9,28-7,25   | 9,28-7,25     |
|     |                                                                                       | Gini Ratio                                                                         | Ratio     | 0,39         | 0,37-0,34   | 0,36-0,33    | 0,35-0,32   | 0,34-0,31   | 0,34-0,31     |
| 3.1 | Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan                               | Nilai komposit FSVA                                                                | Persen    | 59,71        | 62,21       | 64,71        | 67,21       | 69,71       | 69,71         |
| 3.2 | Meningkatnya kesejahteraan sosial                                                     | PDRB Per Kapita (ADHB)                                                             | Juta (Rp) | 34,46        | 33,85-34,70 | 36,20-38,32  | 38,18-40,24 | 40,15-42,72 | 40,15-42,72   |

| No       | Tujuan/Sasaran                                                            | Indikator Tujuan/Sasaran          | Satuan          | Kondisi Awal  |               | Target Tahun  |               |              | Kondisi Akhir |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|          |                                                                           |                                   |                 | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026         |               |
| 3.3      | Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing    | Tingkat Pengangguran Terbuka      | Persen          | 7,72          | 8,18-6,95     | 7,00-6,47     | 6,75-5,94     | 6,22-5,15    | 6,22-5,15     |
| 3.4      | Meningkatnya Perekonomian Perdesaan                                       | Indeks Desa Membangun             | Poin            | 0,77          | 0,78          | 0,79          | 0,80          | 0,81         | 0,81          |
| <b>4</b> | <b>Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh</b>      | <b>Indeks Resiko Bencana</b>      | <b>Poin</b>     | <b>119,39</b> | <b>114,39</b> | <b>109,39</b> | <b>104,39</b> | <b>99,39</b> | <b>99,39</b>  |
| 4.1      | Meningkatnya Ketahan Daerah                                               | Indeks Ketahanan Daerah           | Poin            | 0,49          | 0,52          | 0,53          | 0,54          | 0,55         | 0,55          |
| 4.2      | Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | Poin            | 63,35         | 63,83         | 65,55         | 66,96         | 70,53        | 70,53         |
| <b>5</b> | <b>Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif</b> | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b> | <b>Poin</b>     | <b>71,03</b>  | <b>74,52</b>  | <b>78,02</b>  | <b>81,51</b>  | <b>85</b>    | <b>85</b>     |
| 5.1      | Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN                            | Indeks Profesionalitas ASN        | Poin            | 63,78         | 65            | 68            | 71            | 74           | 74            |
| 5.2      | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah       | Nilai Sakip Kabupaten             | Kategori / Skor | BB (76)       | A (80)        | A (82)        | A (82)        | A (86)       | A (86)        |
|          |                                                                           | Nilai LPPD Kabupaten              | Skor            | 3,40          | 3,65          | 3,76          | 3,78          | 3,80         | 3,80          |
| 5.3      | Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik                                    | Indeks Pelayanan Publik           | Poin            | 4,66          | 4,70          | 4,71          | 4,72          | 4,75         | 4,75          |

| No  | Tujuan/Sasaran                                                                                     | Indikator Tujuan/Sasaran                              | Satuan | Kondisi Awal |      | Target Tahun |      |      | Kondisi Akhir |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|------|--------------|------|------|---------------|
|     |                                                                                                    |                                                       |        | 2022         | 2023 | 2024         | 2025 | 2026 |               |
| 5.4 | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Poin   | 3,52         | 4,20 | 4,30         | 4,35 | 4,40 | 4,40          |

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang dengan Isu Strategis Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 5.2.

**Tabel 5.2**  
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026**

| ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN RPD TAHUN 2024-2026 |                                                                                                                             | TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1                                                | Pelayanan kesehatan yang belum merata di setiap wilayah;                                                                    | <b>Tujuan 1</b> : Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter<br><b>Sasaran 2</b> : Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan                                           |
| 1.2                                                | Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting;                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3                                                | Belum meratanya pelayanan pendidikan yang memadai;                                                                          | <b>Sasaran 1</b> : Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdayasaing yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi                                                   |
| 1.4                                                | Pelayanan PPKS yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya;                                                                | <b>Tujuan 3</b> : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat<br><b>Sasaran 2</b> : Meningkatnya kesejahteraan sosial                                                                                            |
| 1.5                                                | Daya saing pemberdayaan perempuan yang masih belum optimal;                                                                 | <b>Tujuan 1</b> : Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter<br><b>Sasaran 3</b> : Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender |
| 1.6                                                | Masih terdapatnya <i>mismatch</i> dan <i>miseducation</i> antara kompetensi angkatan kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja | <b>Tujuan 3</b> : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat<br><b>Sasaran 3</b> : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing                                                       |
| 2                                                  | ISU PERTUMBUHAN EKONOMI                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1                                                | Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang masih rendah;                                                  | <b>Tujuan 2</b> : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif<br><b>Sasaran 1</b> : Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan                               |



| ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN RPD TAHUN 2024-2026 |                                                                                  | TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2                                                | Ketahanan pangan yang rentan terhadap disrupsi ekonomi;                          | <b>Tujuan 3</b> : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat<br><b>Sasaran 1</b> : Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.3                                                | Lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi UMKM;                                        | <b>Tujuan 2</b> : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif<br><b>Sasaran 1</b> : Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan                                                                                                                                                                            |
| 2.4                                                | Belum optimalnya pemanfaatan kebudayaan daerah dalam menunjang pariwisata;       | <b>Tujuan 2</b> : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif<br><b>Sasaran 1</b> : Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan<br><b>Tujuan 1</b> : Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter<br><b>Sasaran 4</b> : Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat |
| 2.5                                                | Belum optimalnya Pengembangan dan pembangunan kawasan industri;                  | <b>Tujuan 2</b> : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif<br><b>Sasaran 1</b> : Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan                                                                                                                                                                            |
| 2.6                                                | Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan; | <b>Tujuan 2</b> : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif<br><b>Sasaran 1</b> : Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan                                                                                                                                                                            |
| 2.7                                                | Belum optimalnya peningkatan nilai Investasi Daerah                              | <b>Tujuan 2</b> : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif<br><b>Sasaran 3</b> : Meningkatnya Iklim Investasi Daerah                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                                  | <b>ISU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1                                                | Belum meratanya Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah;  | <b>Tujuan 2</b> : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif<br><b>Sasaran 2</b> : Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah                                                                                                                                                                                       |

| ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN RPD TAHUN 2024-2026 |                                                                                                                                                    | TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2                                                | Sebagian besar wilayah yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim;.                                                                          | <p><b>Tujuan 4 :</b> Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh</p> <p><b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Ketahanan Daerah</p>                                                                                                                                                                             |
| 3.3                                                | Belum merata dan terjangkau ketersediaan infrastruktur dasar (Air bersih dan Sanitasi layak)                                                       | <p><b>Tujuan 2 :</b> Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif</p> <p><b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah</p>                                                                                                                                                |
| 3.4                                                | Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;                             | <p><b>Tujuan 4 :</b> Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh</p> <p><b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>                                                                                                                                            |
| 3.5                                                | Masih tingginya jumlah timbulan sampah yang belum terkelola dengan baik;                                                                           | <p><b>Tujuan 4 :</b> Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh</p> <p><b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>                                                                                                                                            |
| 3.6                                                | Belum Optimalnya Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan kawasan segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta Penanggulangan kawasan Rawan Bencana. | <p><b>Tujuan 2 :</b> Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif</p> <p><b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah</p> <p><b>Tujuan 4 :</b> Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh</p> <p><b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Ketahanan Daerah</p> |
| <b>4</b>                                           | <b>ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1                                                | Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE);                                                                              | <p><b>Tujuan 5 :</b> Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif</p> <p><b>Sasaran 4 :</b> Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan berbasis pemanfaatan teknologi digital</p>                                                                                                                    |
| 4.2                                                | Belum optimalnya penguatan penegakan regulasi daerah;                                                                                              | <b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.3                                                | Masih rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur                                                                                         | <b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                     |

| ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN RPD TAHUN 2024-2026 |                                                                                                     | TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4                                                | Belum optimalnya kualitas pelayanan publik                                                          | <b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik                              |
| 4.5                                                | Masih rendahnya profesionalisme ASN                                                                 | <b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN                      |
| 4.6                                                | Belum optimalnya Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah | <b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah |

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun 2024-2026, dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### **6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penentuan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024-2026 bukan hanya mengacu pada RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 semata. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2024-2026 akan tetap melanjutkan semangat (spirit) dari Visi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Tahun 2018-2023 yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Sumedang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (Simpati) pada Tahun 2023"**. Visi Sumedang Simpati ini

telah menghasilkan berbagai pencapaian kinerja yang sangat baik dan berbagai prestasi pada tingkat provinsi dan nasional. Maka pada RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 sipirit dari Sumedang Simpati akan dilanjutkan menjadi fokus kebijakan pada dengan spirit baru yaitu ”**BEYOND SIMPATT**”.

Fokus Kebijakan dengan istilah *Beyond* Simpati pada tahun 2024-2026 diarahkan pada pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, dimana peran Pemerintah harus dapat menggali potensi-potensi daerah dari berbagai sektor sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya melalui pengembangan wirausaha-wirausaha baru serta terciptanya lapangan kerja, maka fokus kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**I. *Factors Condition***, menjelaskan bahwa setiap fokus kebijakan tentunya dapat memanfaatkan dan mengembangkan kondisi dan potensi serta sumberdaya yang ada yang terdiri atas:

**1. *Human Resources* atau dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kekuatan pertama dari SDM di Kabupaten Sumedang adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki potensi, kompetensi dan berkinerja baik dalam mendukung kebijakan. Pada Tahun 2022 capaian Indeks Profesional ASN di Kabupaten mencapai nilai 63,78 point. Kekuatan kedua SDM di Kabupaten Sumedang adalah generasi muda. Hal ini tercermin dari bonus demografi Kabupaten Sumedang yang di dominasi generasi Z dan Generasi milenial, hal ini menjadi faktor penting untuk menghasilkan SDM dan angkatan kerja yang kompetitif.

**2. *Physical Resources***

Secara geografi Kabupaten Sumedang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Cekungan Bandung dan Kawasan Industri Rebana. Selain itu, terdapat beberapa bendungan di Kabupaten Sumedang sebagai salah satu potensi pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian daerah

**3. *Infrastructure***

Terbangunnya Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang menyebabkan aksesibilitas untuk menjangkau Kawasan-

kawasan pariwisata dan rencana Kawasan Industri akan semakin mudah, sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Sumedang.

#### **4. *Technology Innovation***

Dukungan teknologi dan inovasi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang akan lebih dioptimalkan, sehingga pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan akan lebih efisien dan efektif.

**II. *Government Policy/Regulation***, menjelaskan bahwa fokus kebijakan pemerintah daerah harus berdasarkan kajian-kajian ilmiah dan harus menyentuh langsung kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat serta fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus kebijakan *government policy/regulation* meliputi:

- 1. *Visionary***, yaitu kebijakan pemerintah harus mendorong pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan solusi strategis dan jangka Panjang. Kebijakan tersebut juga bersifat taktis dimasa kini, tidak bersifat sektoral dan tidak hanya memberi implikasi terbatas;
- 2. *Digital Base***, yaitu setiap data dan implementasi kegiatan harus berbasis digital agar dapat transparansi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;
- 3. *Reach Out***, yaitu setiap keputusan harus menjangkau dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat
- 4. *Fiscal dan Monitoring***, yaitu proses dalam pengambilan kebijakan harus memperhatikan kondisi fiskal (anggaran) dengan pengawasan yang ketat agar anggaran tersebut tepat sasaran, sesuai dengan prinsip efisien, efektifitas dan ekonomis;
- 5. *Real Sector***, yaitu setiap kebijakan harus realistis sesuai dengan kebutuhan yang prioritas yang telah di tetapkan dalam perencanaan.

**III. *Leading Industries*** yang menjelaskan bahwa fokus pembangunan harus adanya menentukan sektor industri yang menjadi penggerak industri lainnya. Selaras dengan itu pertumbuhan industri yang eksisiting harus terus berkembang.

Tentunya setiap daerah memiliki industri unggulan (*leading industries*) sesuai potensi dan karakteristik wilayah. Adapun berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah, *leading industries* Kabupaten Sumedang terdiri atas:

1. **Manufacturing**, yaitu Kabupaten Sumedang telah memiliki sejumlah pabrik tekstil sebagai industri skala besar yang dapat menyerap tenaga kerja di wilayah Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor. Selain itu terdapat industri manufaktur skala kecil lainnya yang terus berkembang seperti industri Batik dan *Cloathing brand* lokal.
2. **Hi-Tech/IT**, yaitu fokus pengembangan Teknologi dan Informasi sebagai salah satu potensi yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri di Kabupaten Sumedang;
3. **Green Industries**, potensi lainnya di Kabupaten Sumedang adalah pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi ciri khas. Beberapa potensi yang perlu terus di kembangkan terkait industri ini antara lain pengolahan makanan, industri kerajinan tangan, industri mebel serta terdapat potensi industri kreatif yang terus berkembang.

**IV. Supporting Industries**, merupakan bagian penting lainnya dalam fokus pembangunan tahun 2024-2026, karena memberikan dukungan pada industri utama dan membantu meningkatkan efisiensi produksi:

1. **Institutions**, merupakan organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan industri. Institusi ini terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga dan organisasi industri lainnya seperti KADIN dan APINDO;
2. **Enterprises**, atau perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung industri, baik sebagai industri utama maupun sebagai industri pendukung. Beberapa peran enterprises dalam mendukung industri adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi dan kualitas melalui pengemasan yang menarik serta produk tersebut dapat

tersertifikasi secara legal, promosi produk secara offline maupun online;

**3. *Linkages/Network***, tentunya dengan adanya jaringan antar Lembaga/organisasi dan pemerintahan akan sangat membantu dalam peningkatan produksi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah.

**V. *Demand Condition/Buyers***, sebagai rangkaian akhir dari sebuah siklus industri yang perlu diperhatikan dalam fokus pembangunan. Tentunya penciptaan produk-produk unggulan harus memperhatikan kualitas sehingga menarik para buyer untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa. Sasaran pemasaran untuk buyer tentunya bukan hanya lokal tapi perlu merambah pemasaran regional dan Global atau Luar negeri.

Spirit fokus kebijakan *Beyond Simpati* kedepannya akan mewujudkan *Governement Competitive* yaitu Pemerintah Kabupaten Sumedang mampu bersaing dengan dunia usaha dengan memanfaatkan potensi dari berbagai sektor dengan di dukung Inovasi dan teknologi. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga akan fokus pada perubahan mindset dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Perubahan mindset ini berlandaskan Agama, Budaya dan dukungan teknologi. Muara fokus kebijakan *Beyond Simpati* ini akan mengarah pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang pada 3 (tiga) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1 berikut ini:



**Tabel 6.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026**

| No | <b>VISI KABUPATEN SUMEDANG</b><br><b>SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025</b> |                                                           |                                                                                                                               |                                                            |                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | Misi                                                                                      | Tujuan                                                    | Sasaran                                                                                                                       | Strategi                                                   | Arah Kebijakan                                                      |
| 1  | Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat        | Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter | Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdayasaing yang didukung Teknologi Informasi Digital | Peningkatan akses dan mutu pendidikan                      | Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan pendidikan   |
|    |                                                                                           |                                                           |                                                                                                                               |                                                            | Meningkatkan minat baca                                             |
|    |                                                                                           |                                                           |                                                                                                                               |                                                            | Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan              |
|    |                                                                                           |                                                           | Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan                                                                 | Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan             | Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan kesehatan    |
|    |                                                                                           |                                                           |                                                                                                                               |                                                            | Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kesehatan                  |
|    |                                                                                           |                                                           |                                                                                                                               |                                                            | Peningkatan promosi dan prevensi kesehatan                          |
|    |                                                                                           |                                                           |                                                                                                                               | Peningkatan pelayanan, advokasi dan KIE Keluarga Berencana | Peningkatan kualitas pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana |
|    |                                                                                           |                                                           | Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan                                                                           | Meningkan peran, pemberdayaan dan                          | Penguatan kelembagaan dan jejaring perempuan, anak dan lansia       |

| No | <b>VISI KABUPATEN SUMEDANG</b><br><b>SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025</b> |        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Misi                                                                                      | Tujuan | Sasaran                                                               | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arah Kebijakan                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                           |        | terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender                   | perlindungan perempuan, anak dan lansia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perlindungan perempuan anak dan lansia                                                                                                                            |
|    |                                                                                           |        | Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat | Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama                                                                          |
|    |                                                                                           |        |                                                                       | <p>Rerekonstruksi nilai-nilai budaya, obyek kebudayaan, pranata kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, sarana, dan prasarana kebudayaan.</p> <p>Pengelolaan nilai-nilai budaya, obyek kebudayaan, pranata kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, sarana, dan prasarana kebudayaan untuk ketertataan nilai budaya yang patut untuk di revitalisasi.</p> <p>Penerapan nilai-nilai budaya, obyek kebudayaan, pranata kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, sarana, dan prasarana kebudayaan untuk ketertataan nilai budaya</p> | Meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan |

| No | <b>VISI KABUPATEN SUMEDANG</b><br><b>SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025</b>                            |                                               |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Misi                                                                                                                 | Tujuan                                        | Sasaran                                                                                    | Strategi                                                                              | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                                      |                                               |                                                                                            | yang patut untuk di reaktualisasi.                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                      |                                               | Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional | Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya   | Peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga penyelenggaraan pertandingan olahraga                                                                                          |
|    |                                                                                                                      |                                               |                                                                                            |                                                                                       | Pengembangan fasilitasi dan pendampingan usaha pemuda                                                                                                                                |
| 2  | Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri | Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif | Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan      | Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan | Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan perikanan. Pengembangan korporasi petani, pengembangan prasarana pertanian |
|    |                                                                                                                      |                                               |                                                                                            | Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah                                   | Pengelolaan industri kecil melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan digitalisasi promosi dan pemasaran produk UMKM                                                                 |
|    |                                                                                                                      |                                               |                                                                                            | Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian                              | Meningkatkan sarana dan prasarana, promosi, keamanan perdagangan dan perlindungan konsumen                                                                                           |

| No | <b>VISI KABUPATEN SUMEDANG</b><br><b>SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025</b> |        |                                                                            |                                                                      |                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Misi                                                                                      | Tujuan | Sasaran                                                                    | Strategi                                                             | Arah Kebijakan                                                                                                      |
|    |                                                                                           |        |                                                                            | Mengembangkan pariwisata unggulan daerah                             | Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, prasarana penunjang kegiatan pariwisata           |
|    |                                                                                           |        | Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah | Pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas wilayah | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan.                                                       |
|    |                                                                                           |        |                                                                            |                                                                      | Peningkatan pelayanan air baku/air bersih dan sanitasi layak                                                        |
|    |                                                                                           |        |                                                                            |                                                                      | Peningkatan kualitas jaringan irigasi, peningkatan sistem pengendalian banjir, peningkatan sistem prasarana lainnya |
|    |                                                                                           |        |                                                                            | Pengembangan sarana prasarana sistem transportasi darat dan air      | Peningkatan penyediaan terminal, moda transportasi dan perlengkapan jalan                                           |
|    |                                                                                           |        |                                                                            | Pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman   | Penataan, pengendalian pembangunan perumahan dan penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman                 |
|    |                                                                                           |        | Meningkatnya Iklim Investasi Daerah                                        | Perluasan jaringan investasi                                         | Menjalin kerjasama investasi antar daerah dan investor, serta                                                       |

| No | <b>VISI KABUPATEN SUMEDANG</b><br><b>SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025</b> |                                      |                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Misi                                                                                      | Tujuan                               | Sasaran                                                                | Strategi                                                                                | Arah Kebijakan                                                                                                            |
|    |                                                                                           | Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat |                                                                        |                                                                                         | meningkatkan kemudahan berinvestasi                                                                                       |
|    |                                                                                           |                                      | Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan                | Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan            | Mengendalikan sistem stok bahan pangan, menyediakan sarpras pendukungnya & memperbaiki pola konsumsi diversifikasi pangan |
|    |                                                                                           |                                      | Meningkatnya kesejahteraan sosial                                      | Peningkatan kualitas masyarakat golongan miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial | Pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan                                                                           |
|    |                                                                                           |                                      |                                                                        |                                                                                         | Penguatan penyaluran bantuan social dan perlindungan sosial                                                               |
|    |                                                                                           |                                      |                                                                        |                                                                                         | Peningkatan pemberdayaan sosial                                                                                           |
|    |                                                                                           |                                      |                                                                        |                                                                                         | Optimalisasi rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial                                                         |
|    |                                                                                           |                                      | Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing | Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan Koperasi dan UKM                              | Melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro                                                |
|    |                                                                                           |                                      |                                                                        | Pelayanan bagi pencari kerja                                                            | Peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja                                                 |
|    |                                                                                           |                                      |                                                                        | Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja                                              | Meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit,                                                                    |

| No | <b>VISI KABUPATEN SUMEDANG</b><br><b>SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025</b> |                                                               |                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Misi                                                                                      | Tujuan                                                        | Sasaran                                                        | Strategi                                                                                             | Arah Kebijakan                                                                                                                |
|    |                                                                                           |                                                               |                                                                |                                                                                                      | meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja di perusahaan                                      |
|    |                                                                                           |                                                               | Meningkatnya Perekonomian Perdesaan                            | Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa                                      | Penataan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa                                                                   |
|    |                                                                                           |                                                               |                                                                | Pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat                                               | Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa                                                                                     |
|    |                                                                                           | Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh | Meningkatnya Ketahanan Daerah                                  | Peningkatan upaya penanggulangan bencana                                                             | Peningkatan pelayanan informasi, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana |
|    |                                                                                           |                                                               |                                                                | Meningkatkan penataan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan berdaya saing | Peningkatan kinerja penataan ruang.                                                                                           |
|    |                                                                                           |                                                               | Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup                                                | Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup                                                              |
| 3  | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik                                             | Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang                     | Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN                 | Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur                                                     | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)                               |

| No | <b>VISI KABUPATEN SUMEDANG</b><br><b>SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025</b> |                          |                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Misi                                                                                      | Tujuan                   | Sasaran                                                                                   | Strategi                                                                                                            | Arah Kebijakan                                                                                                          |
|    |                                                                                           | inovatif dan kolaboratif | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta capaian Kinerja Pemerintahan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan Daerah. | Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah |
|    |                                                                                           |                          |                                                                                           | Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah                                                                   | Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah                                                       |
|    |                                                                                           |                          |                                                                                           | Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah                                                                 | Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah                                             |
|    |                                                                                           |                          | Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik                                                    | Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik                                                                        | Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik                                                            |
|    |                                                                                           |                          | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan berbasis pemanfaatan teknologi digital         | Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ( <i>e-Government</i> )          | Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan                                         |

## **6.2. Program Pembangunan**

Penjabaran lebih detail dari tujuan dan sasaran tertuang dalam arah kebijakan yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai tiga tahun ke depan dalam RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

### **6.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026**

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD tahun 2020-2025, pada tahap/periode akhir RPJPD Tahun 2025, Kabupaten Sumedang diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern.

Adapun prioritas RPD untuk tahun 2024-2026, dalam rangka mencapai sasaran pokok tersebut adalah :

- 1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;** peningkatan penerapan pendidikan berorientasi iptek dan dunia usaha, pemantapan kapasitas dan kerjasama lembaga pendidikan, Peningkatan akses masyarakat pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, serta perluasan pola perilaku hidup sehat, pelestarian norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, pelestarian peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan,
- 2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;** pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan, optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal, sinergitas fungsional perekonomian perkotaan dan perdesaan (*rural urban linkage*),
- 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;** Mempertahankan kondisi pelayanan prasaran dan sarana dasar yang berkualitas, mantap, dan terjangkau, infrastruktur pendukung yang kondusif terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian, akuntabilitas yang didukung proses koleksi dan distribusi barang, jasa dan orang, pelayanan sumberdaya air.



- 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;** peningkatan kesejahteraan sosial, penyediaan pangan dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meperluas lapangan kerja serta fasilitasi kewirausahaan;
- 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;** Penataan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan sistem pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana.
- 6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;** Pemantapan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah, pemantapan kapasitas organisasi masyarakat dan politik, pemeliharaan kesadaran, kepatuhan dan penegakan serta penataan produk hukum daerah.

Ekonomi daerah berkelanjutan (Sustainable Regional Economy) adalah sebuah pendekatan dalam pengembangan ekonomi yang berfokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif pada tingkat regional atau daerah. Pendekatan ini mengakui pentingnya keterkaitan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan utama dari ekonomi daerah berkelanjutan adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan lingkungan dan sosial yang ada di daerah tersebut. Hal ini melibatkan pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inovatif, dan perlindungan lingkungan untuk kepentingan generasi masa depan.

Beberapa strategi yang digunakan dalam pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan antara lain: pengembangan energi terbarukan, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, pengembangan industri kreatif, dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi yang dilakukan dapat memberikan manfaat

jangka panjang bagi seluruh stakeholder yang terlibat serta dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

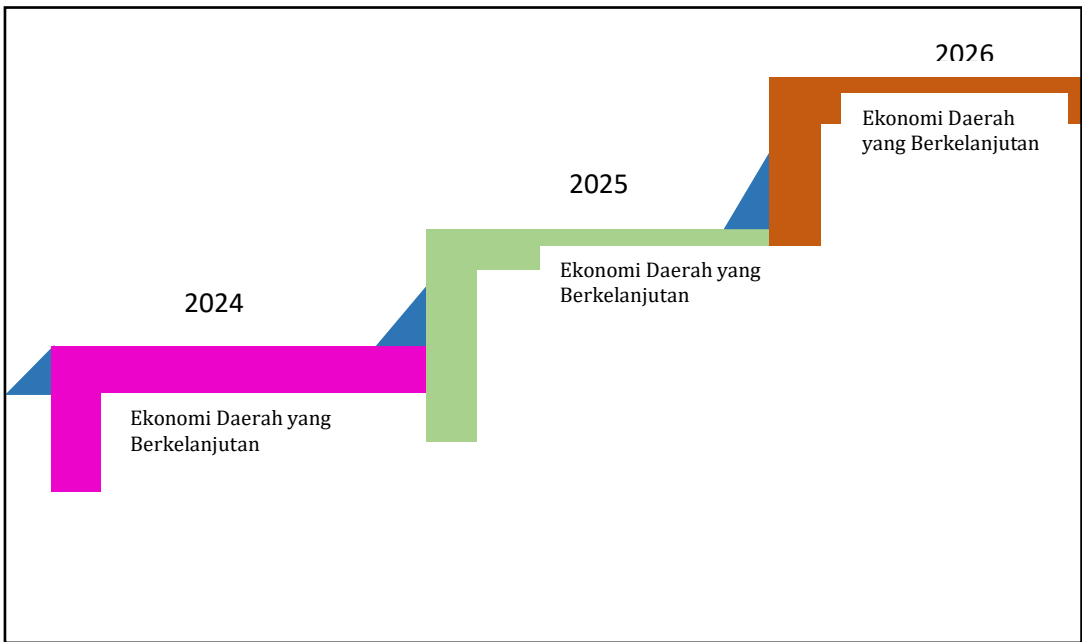
Ada beberapa komponen ekonomi daerah berkelanjutan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat regional atau daerah. Beberapa komponen tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan: Pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang berarti pertumbuhan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.
2. Lingkungan hidup: Komponen lingkungan hidup harus diperhatikan dalam pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan, termasuk pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan perlindungan lingkungan.
3. Sosial: Aspek sosial dalam pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kesenjangan sosial.
4. Keterlibatan masyarakat: Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah berkelanjutan, termasuk dalam hal partisipasi dalam pengembangan infrastruktur, industri lokal, dan sektor pariwisata.
5. Inovasi dan teknologi: Pengembangan inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan harus menjadi bagian dari pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan, termasuk dalam hal penggunaan energi terbarukan dan teknologi hijau.
6. Pemerintah daerah: Peran pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi daerah berkelanjutan sangat penting, termasuk dalam hal pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan

VI-16 fokus pembangunan. Fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPD setiap tahun. Penetapan Fokus RPD Tahun 2024-2026 disajikan pada Gambar berikut ini.

**Gambar 6.1**  
**Fokus RPD Tahun 2024-2026**



Sumber : BAPPPPEDA, 2022

**6.2.2. Program Perangkat Daerah**

Sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing Perangkat Daerah (PD) diselaraskan dengan RPD Kabupaten Sumedang, yang juga mengacu pada program yang tertera pada Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menjalankan rencana pembangunan diperlukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk memudahkan dalam koordinasi dan memandu arah pelaksanaan program dilakukan pembagian kelompok program yang membidik tujuan dan sasaran serta pencapaian target kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, maka disusun Program Prioritas sebagaimana Tabel dibawah ini:

**Tabel 6.2**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2024-2026**

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                                                                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                   | Kondisi Awal |             | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |             |           |             |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|------------------|
|       |                                                                                                                                  |                                                                                 |              |             | 2024                                           |           | 2025        |           | 2026        |           |               |           |                  |
|       |                                                                                                                                  |                                                                                 | 2022         | 2023        | Target                                         | Rp (juta) | Target      | Rp (juta) | Target      | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                | 3                                                                               | 4            | 5           | 6                                              | 7         | 8           | 9         | 10          | 11        | 12            | 13        | 14               |
| 1     | Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter                                                                        | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)                                         | 72,69        | 72,40-73,37 | 73,11-73,99                                    |           | 73,74-74,59 |           | 74,40-75,30 |           | 74,40-75,30   |           |                  |
| 1.1   | Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdayasaing yang didukung Teknologi Informasi Komunikasi | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)                                            | 8,72         | 8,81-9,00   | 8,89-9,05                                      |           | 9,00-9,10   |           | 9,06-9,20   |           | 9,06-9,20     |           |                  |
|       |                                                                                                                                  | Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)                                              | 12,99        | 13,05-13,12 | 13,06-13,16                                    |           | 13,07-13,17 |           | 13,08-13,18 |           | 13,08-13,18   |           |                  |
| 1.1.1 | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                                   | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Dalam Pendidikan SD (Persen)   | 89,39        | 91,89       | 94,39                                          | 150.760   | 96,89       | 166.591   | 98,89       | 183.719   | 99            | 501.069   | Dinas Pendidikan |
|       |                                                                                                                                  | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Dalam Pendidikan SMP (Persen) | 90,27        | 92,27       | 94,27                                          | 77.324    | 96,27       | 85.056    | 98,27       | 93.561    | 98,27         | 255.941   |                  |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                         | Kondisi Awal |             | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |             |           |             |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|------------------------------|
|       |                                                                             |                                                                                       |              |             | 2024                                           |           | 2025        |           | 2026        |           |               |           |                              |
|       |                                                                             |                                                                                       | 2022         | 2023        | Target                                         | Rp (juta) | Target      | Rp (juta) | Target      | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                              |
| 1     | 2                                                                           | 3                                                                                     | 4            | 5           | 6                                              | 7         | 8           | 9         | 10          | 11        | 12            | 13        | 14                           |
|       |                                                                             | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan (Persen) | 53,47        | 63,47       | 73,47                                          | 23.833    | 83,47       | 26.216    | 93,47       | 28.838    | 93,47         | 78.887    |                              |
|       |                                                                             | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini (Persen)   | 92,04        | 93,74       | 95,44                                          | 21.475    | 97,14       | 22.723    | 98,84       | 24.995    | 98,84         | 69.194    |                              |
| 1.1.2 | Program Pengembangan Kurikulum                                              | Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka (Persen)                         | 21,61        | 40,3        | 68,34                                          | 1.650     | 94,33       | 1.850     | 100         | 1.850     | 100           | 5.350     |                              |
| 1.1.3 | Program pendidik dan tenaga kependidikan                                    | Proporsi GTK Penggerak (Persen)                                                       | 5            | 10          | 25                                             | 1.050     | 30          | 1.050     | 30          | 1.050     | 30            | 3.150     |                              |
| 1.1.4 | Program Pembinaan Perpustakaan                                              | Tingkat Kegemaran Membaca (Persen)                                                    | 48,71        | 50,6        | 60,60                                          | 927       | 65,60       | 1.019     | 70,60       | 1.121     | 70,60         | 3.067     | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 1.2   | Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan               | Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)                                                     | 72,91        | 72,70-73,20 | 73,00-73,32                                    |           | 73,24-73,63 |           | 73,33-73,69 |           | 73,33-73,69   |           |                              |
| 1.2.1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk (Rasio)                        | 0,17         | 0,19        | 0,22                                           | 64.563    | 0,23        | 84.801    | 0,25        | 111.705   | 0,25          | 261.069   | Dinas Kesehatan              |
|       |                                                                             | Cakupan Pelayanan                                                                     | 50           | 55          | 60                                             | 52.779    | 65          | 59.566    | 70          | 69.027    | 70            | 181.372   |                              |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------|
|       |                                                             |                                                                                              |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                  |
|       |                                                             |                                                                                              | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                  |
| 1     | 2                                                           | 3                                                                                            | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14               |
|       |                                                             | Kesehatan Dasar Masyarakat (Persen)                                                          |              |      |                                                |           |        |           |        |           |               |           |                  |
|       |                                                             | Presentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Persen)                        | 28           | 33   | 40                                             | 750       | 50     | 875       | 60     | 1.180     | 60            | 2.805     |                  |
|       |                                                             | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi (Persen)                     | 100          | 100  | 100                                            | 700       | 100    | 850       | 100    | 1.000     | 100           | 2.550     |                  |
|       |                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Yang Sesuai (Persen) Standard                            | 84           | 85   | 86                                             | 7.416     | 88     | 8.158     | 90     | 8.973     | 90            | 24.547    |                  |
| 1.2.3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Presentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Standar Kompetensi (Persen)                        | 86           | 87   | 88                                             | 1.800     | 89     | 2.800     | 90     | 3.300     | 90            | 7.900     |                  |
| 1.2.4 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan Dan Minuman Sesuai Standar (Persen) | 84           | 86   | 87                                             | 1.900     | 88     | 2.950     | 92     | 3.300     | 92            | 8.150     |                  |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                                                     | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                  |                                                                                                                                   |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                                                                                   |
|       |                                                  |                                                                                                                                   | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                                                                   |
| 1     | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                                                                                |
| 1.2.5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Presentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri (Persen)                                                                            | 20           | 26    | 31                                             | 1.450     | 36     | 1.800     | 41     | 2.040     | 41            | 5.290     | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.2.6 | Program Pengendalian Penduduk                    | Persentase Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan (Dokumen) | 5            | 5     | 10                                             | 206       | 10     | 227       | 10     | 249       | 10            | 682       |                                                                                                   |
|       |                                                  | Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa (Persen)                                                          | 100          | 85    | 40                                             | 512       | 60     | 563       | 100    | 620       | 100           | 1.695     |                                                                                                   |
| 1.2.7 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)        | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 (Persen)                                                        | 75,37        | 75,67 | 75,97                                          | 3.230     | 76,27  | 3.553     | 76,57  | 3.908     | 76,57         | 10.690    |                                                                                                   |
|       |                                                  | Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed) (Persen)                                                                | 9,05         | 9,04  | 9,01                                           | 6.433     | 8,98   | 7.076     | 8,95   | 7.783     | 8,95          | 21.292    |                                                                                                   |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                                | Kondisi Awal |             | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |             |           |             |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                         |                                                                                                              |              |             | 2024                                           |           | 2025        |           | 2026        |           |               |           |                                                                                                   |
|       |                                                                                                         |                                                                                                              | 2022         | 2023        | Target                                         | Rp (juta) | Target      | Rp (juta) | Target      | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                                                                   |
| 1     | 2                                                                                                       | 3                                                                                                            | 4            | 5           | 6                                              | 7         | 8           | 9         | 10          | 11        | 12            | 13        | 14                                                                                                |
| 1.3   | Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender | Indeks Pembangunan Gender (IPD) (Poin)                                                                       | 95,09        | 95,26-95,44 | 95,19-95,62                                    |           | 95,29-95,16 |           | 95,38-95,69 |           | 95,38-95,69   |           |                                                                                                   |
|       |                                                                                                         | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)                                                                      | 72,23        | 70,25-71,15 | 70,95-72,18                                    |           | 71,77-73,43 |           | 73,00-75,05 |           | 73,00-75,05   |           |                                                                                                   |
| 1.3.1 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                               | Persentase OPD Responsip Gender (Persen)                                                                     | 45,16        | 61,29       | 65                                             | 1.117     | 75          | 1.229     | 100         | 1.351     | 100           | 3.697     | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.3.2 | Program Perlindungan Perempuan                                                                          | Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Persen)                                                  | 100          | 0,0035      | 0,0036                                         | 1.107     | 0,0042      | 1.217     | 0,0047      | 1.339     | 0,0047        | 3.663     |                                                                                                   |
| 1.3.3 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                   | Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga Bagi Perempuan (Persen)                                | 100          | 16,53       | 33,06                                          | 1.392     | 66,13       | 1.532     | 80          | 1.685     | 80            | 4.609     |                                                                                                   |
| 1.3.4 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                                        | Persentase Forum Anak, Termasuk Forum Anak Yang Ada Di Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan (Persen) | 46,15        | 65,38       | 69,07                                          | 618       | 75,65       | 680       | 100         | 748       | 100           | 2.046     |                                                                                                   |



| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                                                                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                        | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                        |                                                                                                      |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                                                           |
|       |                                                                                                                                        |                                                                                                      | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                                           |
| 1     | 2                                                                                                                                      | 3                                                                                                    | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                                                        |
| 1.3.5 | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                                       | Persentase Pendampingan Khusus Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan (Persen)                        | 100          | 0,02 | 0,023                                          | 1.442     | 0,026  | 1.587     | 0,028  | 1.745     | 0,028         | 100       |                                                                           |
| 1.3.6 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                                                                                        | Persentase Ketersedian Data Gender Dan Anak (Persen)                                                 | 100          | 33,3 | 42                                             | 309       | 71     | 340       | 100    | 374       | 100           | 1.023     |                                                                           |
| 1.4   | Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat                                                                  | Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)                                                                | 75,32        | 74,5 | 75                                             |           | 75,5   |           | 76     |           | 76            |           |                                                                           |
| 1.4.1 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (Persen)                 | 73,33        | 40   | 94,17                                          | 176       | 95,83  | 594       | 100    | 662       | 100           | 1.432     | 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br><br>2. Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.4.2 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (Orang) | 0            | 100  | 250                                            | 4.130     | 100    | 4.143     | 100    | 4.397     | 450           | 12.670    |                                                                           |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                          | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------|
|       |                                                                                                           |                                                                                        |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                  |
|       |                                                                                                           |                                                                                        | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                  |
| 1     | 2                                                                                                         | 3                                                                                      | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14               |
| 1.4.3 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                             | Cakupan Ormas Yang Di Bina Kategori Aktif (Persen)                                     | 19,38        | 19,38 | 38,76                                          | 110       | 100    | 121       | 100    | 285       | 100           | 516       |                  |
| 1.4.4 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                  | Jumlah Orang Yang Dibina Dilingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Orang) | 0            | 150   | 180                                            | 357       | 210    | 393       | 260    | 432       | 260           | 1.182     |                  |
| 1.4.5 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Potensi Konflik Sosial Yang Tertangani (Potensi Konflik)                        | 15           | 15    | 14                                             | 4.179     | 13     | 4.597     | 12     | 5.056     | 12            | 13.832    |                  |
| 1.4.6 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                      | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman Dan Keindahan) (Persen)  | 72           | 78    | 83                                             | 2.513     | 89     | 2.947     | 94     | 3.705     | 94            | 9.166     |                  |
|       |                                                                                                           | Persentase Pelanggaran Perda Dan Perbup Yang Ditangani (Persen)                        | 91           | 92    | 92                                             | 789       | 93     | 1.013     | 96     | 1.274     | 96            | 3.076     |                  |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                     | Kondisi Awal |        | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                         |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|
|       |                                                        |                                                                                                   |              |        | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                                          |
|       |                                                        |                                                                                                   | 2022         | 2023   | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                          |
| 1     | 2                                                      | 3                                                                                                 | 4            | 5      | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                                       |
|       |                                                        | Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT) (Rasio)          | 0,67         | 0,74   | 0,81                                           | 420       | 0,89   | 500       | 0,98   | 600       | 0,98          | 1.520     | 3. Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.4.7 | Program Pengembangan Kebudayaan                        | Presentase OPK yang dikembangkan (Persen)                                                         | 36,36        | 45,45  | 55                                             | 902       | 73     | 992       | 100    | 1.091     | 100           | 2.984     |                                                          |
| 1.4.8 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya       | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Persen)                                                | 13,61        | 15,31  | 17                                             | 75        | 19     | 83        | 20     | 91        | 20            | 248       |                                                          |
| 1.5   | Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan      | Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)                                                                  | 44           | 45     | 46                                             |           | 47     |           | 48     |           | 48            |           |                                                          |
| 1.5.1 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan   | Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Orang) | 94.582       | 95.282 | 95.982                                         | 990       | 96.682 | 1.089     | 97.382 | 1.198     | 97.382        | 3.277     | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga    |
| 1.5.2 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)                                                            | 60           | 30     | 20                                             | 3.515     | 21     | 3.866     | 70     | 4.253     | 70            | 11.633    |                                                          |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                        | Kondisi Awal |           | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |           |           |            |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
|       |                                                                                       |                                                                                                      |              |           | 2024                                           |           | 2025      |           | 2026       |           |               |           |                                                    |
|       |                                                                                       |                                                                                                      | 2022         | 2023      | Target                                         | Rp (juta) | Target    | Rp (juta) | Target     | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                    |
| 1     | 2                                                                                     | 3                                                                                                    | 4            | 5         | 6                                              | 7         | 8         | 9         | 10         | 11        | 12            | 13        | 14                                                 |
| 1.5.3 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                                            | Jumlah Organisasi Kepramukaan (Kwarcab) Yang Difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi (Organisasi) | 1            | 1         | 1                                              | 500       | 1         | 550       | 1          | 605       | 1             | 1.655     |                                                    |
| 2     | Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif                                         | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)                                                              | 5,03         | 5,20-6,20 | 5,30-6,50                                      |           | 5,50-6,82 |           | 5,65-7,00  |           | 5,65-7,00     |           |                                                    |
| 2.1   | Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (Persen)                                                 | 6,85         | 5,00-5,85 | 7,56-8,45                                      |           | 8,04-9,23 |           | 8,23-10,61 |           | 8,23-10,61    |           |                                                    |
| 2.1.1 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                          | Jumlah Dokumen Regulasi Perencanaan Dan Pembangunan Industry (Dokumen)                               | 0            | 1         | 1                                              | 475       | 1         | 523       | 1          | 575       | 1             | 1.572     | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.1.2 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                               | Persentase Saran Teknis Terhadap Izin Yang Dikeluarkan (Persen)                                      | 75           | 83,33     | 87,5                                           | 100       | 90        | 110       | 91,67      | 121       | 91,67         | 331       |                                                    |
| 2.1.3 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                                | Persentase Pelaku Industri Yang Mengakses Sistem Informasi Industri Nasional (Persen)                | 5,12         | 6,84      | 8,57                                           | 150       | 10,29     | 165       | 12,02      | 182       | 12,02         | 497       |                                                    |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                               | Kondisi Awal |           | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |           |           |           |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
|        |                                                                          |                                                                                             |              |           | 2024                                           |           | 2025      |           | 2026      |           |               |           |                                                    |
|        |                                                                          |                                                                                             | 2022         | 2023      | Target                                         | Rp (juta) | Target    | Rp (juta) | Target    | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                    |
| 1      | 2                                                                        | 3                                                                                           | 4            | 5         | 6                                              | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12            | 13        | 14                                                 |
| 2.1.4  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro (Persen)                                                | 29,41        | 30,62     | 31,36                                          | 710       | 32,09     | 781       | 32,82     | 859       | 32,82         | 2.349     |                                                    |
| 2.1.5  | Program Pengembangan UMKM                                                | Persentase Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (Persen)                            | 1,79         | 2,39      | 3,35                                           | 750       | 4,32      | 825       | 5,28      | 908       | 5,28          | 2.483     |                                                    |
| 2.1.6  | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                           | Persentase Koperasi Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dan Perlindungan (Persen)                 | 9,96         | 30,28     | 60,16                                          | 150       | 80,08     | 165       | 100       | 182       | 100           | 497       |                                                    |
|        |                                                                          | Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor (Persen) | 4,71         | 4,84-5,60 | 5,59-7,50                                      |           | 6,37-8,28 |           | 7,18-9,09 |           | 7,18-9,09     |           |                                                    |
| 2.1.17 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                             | Persentase Fasilitasi Perizinan Pendaftaran Perusahaan (Persen)                             | 100          | 100       | 100                                            | 440       | 100       | 484       | 100       | 532       | 100           | 1.456     | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.1.18 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                        | Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Distibusi Perdagangan (Persen)               | 77,78        | 77,78     | 88,89                                          | 627       | 88,89     | 690       | 100       | 759       | 100           | 2.075     |                                                    |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                             | Kondisi Awal |           | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |           |           |           |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH               |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|
|        |                                                                    |                                                                           |              |           | 2024                                           |           | 2025      |           | 2026      |           |               |           |                                |
|        |                                                                    |                                                                           | 2022         | 2023      | Target                                         | Rp (juta) | Target    | Rp (juta) | Target    | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                |
| 1      | 2                                                                  | 3                                                                         | 4            | 5         | 6                                              | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12            | 13        | 14                             |
| 2.1.19 | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Tingkat Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persen)   | 94,74        | 100       | 100                                            | 425       | 100       | 468       | 100       | 514       | 100           | 1.407     |                                |
| 2.1.20 | Program Pengembangan Ekspor                                        | Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir (Persen)                   | 75           | 75        | 83,33                                          | 525       | 91,67     | 578       | 100       | 635       | 100           | 1.738     |                                |
| 2.1.21 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                     | Persentase Alat Metrologi Yang Sesuai Standard (Persen)                   | 32,03        | 34,14     | 36,26                                          | 275       | 38,37     | 303       | 40,49     | 333       | 40,49         | 910       |                                |
| 2.1.22 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri               | Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang (Persen) | 55           | 63,33     | 71,67                                          | 275       | 80        | 303       | 88,33     | 333       | 88,33         | 910       |                                |
|        |                                                                    | Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan (Persen)      | 4,18         | 2,44-3,59 | 3,28-4,94                                      |           | 3,48-5,15 |           | 3,69-5,35 |           | 3,69-5,35     |           |                                |
| 2.1.23 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                              | Poduksi Perikanan Tangkap (Ton)                                           | 1409,36      | 1519,58   | 1641,15                                        | 774       | 1780,65   | 808       | 1940,91   | 784       | 1940,91       | 2.366     | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 2.1.24 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                             | Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                         | 8411,71      | 8574,11   | 8745,59                                        | 2.788     | 8964,23   | 3.044     | 9233,16   | 3.194     | 9233,16       | 9.025     |                                |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                         | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------|
|        |                                                                         |                                                                                                       |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                      |
|        |                                                                         |                                                                                                       | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                      |
| 1      | 2                                                                       | 3                                                                                                     | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                   |
| 2.1.25 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                        | Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                | 33,33        | 25    | 40                                             | 500       | 42,86  | 550       | 50     | 605       | 50            | 1.655     |                                      |
| 2.1.26 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                   | Wilayah Perairan Umum Darat Yang Diawasi Sumberdaya Perikanannya (Wilayah)                            | 10           | 10    | 11                                             | 123       | 11     | 135       | 11     | 148       | 11            | 405       |                                      |
| 2.1.27 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Jumlah Kasus Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Yang Dikendalikan (Persen) | 96,76        | 96,85 | 96,92                                          | 965       | 97,44  | 1.040     | 100    | 1.243     | 100           | 3.248     |                                      |
| 2.1.28 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | Persentase Luas Areal Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Persen)                      | 13,77        | 14,05 | 14,33                                          | 1.385     | 14,62  | 1.524     | 14,91  | 1.676     | 14,91         | 4.584     | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|        |                                                                         | Jumlah Wilayah Yang Terkendali Dari Bencana Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Wilayah)         | 22           | 26    | 26                                             | 100       | 26     | 110       | 26     | 121       | 26            | 331       | Dinas Perikanan dan Peternakan       |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                           | Kondisi Awal |           | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|
|        |                                                         |                                                                         |              |           | 2024                                           |           | 2025       |           | 2026       |           |               |           |                                                       |
|        |                                                         |                                                                         | 2022         | 2023      | Target                                         | Rp (juta) | Target     | Rp (juta) | Target     | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                       |
| 1      | 2                                                       | 3                                                                       | 4            | 5         | 6                                              | 7         | 8          | 9         | 10         | 11        | 12            | 13        | 14                                                    |
| 2.1.28 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian    | Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Ton)                               | 910.715      | 921.559   | 935.276                                        | 12.559    | 953.853    | 13.815    | 977.549    | 15.196    | 977.549       | 41.570    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                  |
|        |                                                         | Peningkatan Populasi Ternak (Persen)                                    | 5,85         | 5,5       | 6,47                                           | 3.418     | 7,5        | 3.760     | 8,34       | 4.136     | 8,34          | 11.314    | Dinas Perikanan dan Peternakan                        |
| 2.1.29 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) (Kali/Tahun)                         | 2,38         | 2,43      | 2,47                                           | 19.662    | 2,52       | 23.769    | 2,57       | 30.301    | 2,57          | 73.731    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                  |
|        |                                                         | Jumlah Infrastruktur Peternakan Yang Disediakan Dan Dikembangkan (Unit) | 13           | 6         | 26                                             | 1.245     | 26         | 1.370     | 26         | 1.506     | 26            | 4.121     | Dinas Perikanan dan Peternakan                        |
| 2.1.30 | Program Penyuluhan Pertanian                            | Cakupan Bina Kelompok Petani (Persen)                                   | 26,86        | 33,58     | 40,29                                          | 1.089     | 47,01      | 1.198     | 53,72      | 1.318     | 53,72         | 3.605     | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                  |
|        |                                                         | Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum (Persen)   | 8,15         | 3,25-3,81 | 8,01-9,75                                      |           | 9,44-10,13 |           | 9,82-10,86 |           | 9,82-10,86    |           |                                                       |
| 2.1.31 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata     | Presentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Yang Dikembangkan (Persen)   | 35,71        | 37,5      | 44                                             | 347       | 50         | 382       | 55         | 420       | 55            | 1.150     | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |



| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                               | Kondisi Awal |          | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |           |           |           |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------|
|        |                                                                                                    |                                                                             |              |          | 2024                                           |           | 2025      |           | 2026      |           |               |           |                                     |
|        |                                                                                                    |                                                                             | 2022         | 2023     | Target                                         | Rp (juta) | Target    | Rp (juta) | Target    | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                     |
| 1      | 2                                                                                                  | 3                                                                           | 4            | 5        | 6                                              | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12            | 13        | 14                                  |
| 2.1.32 | Program Pemasaran Pariwisata                                                                       | Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah Yang Dipromosikan (Lokasi)               | 1            | 1        | 2                                              | 670       | 3         | 737       | 3         | 811       | 3             | 2.218     |                                     |
| 2.1.33 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Karya Ekonomi Kreatif Yang Memiliki HAKI (Karya)                     | 8            | 10       | 12                                             | 385       | 14        | 424       | 16        | 466       | 16            | 1.274     |                                     |
| 2.1.34 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | Jumlah Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan (Orang) | 200          | 445      | 515                                            | 1.330     | 585       | 1.463     | 655       | 1.609     | 655           | 4.402     |                                     |
| 2.2    | Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasaran dalam pengembangan wilayah                          | Indeks Kualitas Infrastruktur (Poin)                                        | 77,64        | 80,43    | 81,4                                           |           | 83,17     |           | 84,62     |           | 84,62         |           |                                     |
| 2.2.1  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                          | Luas Lahan yang terairi (Ha)                                                | 20.633,4     | 21054,31 | 21.454,31                                      | 24.341    | 21.814,31 | 26.775    | 22.154,31 | 29.452    | 22.154,31     | 80.567    | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                                                                                                                              | Kondisi Awal |         | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |         |           |         |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|------------------|
|       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |              |         | 2024                                           |           | 2025    |           | 2026    |           |               |           |                  |
|       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | 2022         | 2023    | Target                                         | Rp (juta) | Target  | Rp (juta) | Target  | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                  |
| 1     | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                          | 4            | 5       | 6                                              | 7         | 8       | 9         | 10      | 11        | 12            | 13        | 14               |
| 2.2.2 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota (Persen) | 244.688      | 245.847 | 246.288                                        | 11.050    | 247.888 | 12.155    | 249.488 | 13.371    | 249.488       | 36.576    |                  |
| 2.2.3 | Program Penataan Bangunan Gedung                                 | Persentase Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana) Yang Laik Fungsi (Persen)                                                                                             | 15,45        | 36,52   | 57,58                                          | 935       | 78,65   | 2.559     | 99,72   | 4.741     | 99,72         | 8.235     |                  |
| 2.2.4 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya                      | Jumlah kumulatif Bangunan dan Lingkungannya yang tertata (Bangunan)                                                                                                                                        | 53           | 55      | 59                                             | 8.900     | 63      | 9.660     | 67      | 10.606    | 67            | 29.166    |                  |
| 2.2.5 | Program Penyelenggaraan Jalan                                    | Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Persen)                                                                                                                                  | 60,04        | 61,49   | 62,13                                          | 117.929   | 64,07   | 127.960   | 65,36   | 141.164   | 65,36         | 387.053   |                  |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                         | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                      | Kondisi Awal |          | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |          |           |          |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
|        |                                                               |                                                                                    |              |          | 2024                                           |           | 2025     |           | 2026     |           |               |           |                                                    |
|        |                                                               |                                                                                    | 2022         | 2023     | Target                                         | Rp (juta) | Target   | Rp (juta) | Target   | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                    |
| 1      | 2                                                             | 3                                                                                  | 4            | 5        | 6                                              | 7         | 8        | 9         | 10       | 11        | 12            | 13        | 14                                                 |
| 2.2.6  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah        | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Persen)                                      | 95,84        | 95,91    | 96,12                                          | 3.313     | 96,36    | 5.196     | 96,61    | 5.203     | 96,61         | 13.712    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2.2.7  | Program Pengembangan Permukiman                               | Persentase Pemukiman Yang Tertata (Persen)                                         | 10,49        | 26,57    | 51,05                                          | 5.140     | 75,52    | 3.968     | 100      | 3.968     | 100           | 13.075    |                                                    |
| 2.2.8  | Program Pengembangan Perumahan                                | Jumlah Rumah Layak Huni Yang Terlayani (Unit)                                      | 30           | 55       | 80                                             | 3.450     | 105      | 3.795     | 130      | 4.175     | 130           | 11.420    |                                                    |
| 2.2.9  | Program Kawasan Permukiman                                    | Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani (Persen)                          | 81,34        | 81,34    | 81,97                                          | 7.905     | 82,43    | 9.040     | 82,89    | 11.065    | 82,89         | 28.009    |                                                    |
| 2.2.10 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh                | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Dicegah (Hektar)                                | 154835,3     | 154835,3 | 154835,3                                       | 2.108     | 154835,3 | 2.108     | 154835,3 | 2.108     | 154835,3      | 6.323     |                                                    |
| 2.2.11 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU (Persen) | 38,36        | 53,42    | 83,56                                          | 13.160    | 91,78    | 14.476    | 100      | 15.924    | 70,89         | 43.560    |                                                    |
| 2.2.12 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan                       | Konektivitas Kabupaten Kota (Persen)                                               | 45           | 53,03    | 64,94                                          | 1.000     | 69,97    | 1.100     | 75       | 1.210     | 75            | 3.310     | Dinas Perhubungan                                  |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                         | Kondisi Awal |           | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |           |           |           |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
|       |                                                                                 |                                                                       |              |           | 2024                                           |           | 2025      |           | 2026      |           |               |           |                                                    |
|       |                                                                                 |                                                                       | 2022         | 2023      | Target                                         | Rp (juta) | Target    | Rp (juta) | Target    | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                    |
| 1     | 2                                                                               | 3                                                                     | 4            | 5         | 6                                              | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12            | 13        | 14                                                 |
|       | Angkutan Jalan (LLAJ)                                                           | Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Jalan (Persen)                 | 46,39        | 46,59     | 47,26                                          | 15.907    | 47,93     | 17.151    | 48,59     | 18.901    | 48,59         | 51.959    |                                                    |
| 2.3   | Meningkatnya Iklim Investasi Daerah                                             | Persentase Peningkatan Penanaman Modal Di Kabupaten Sumedang (Persen) | -29,03       | 10        | 10                                             |           | 12        |           | 13        |           | 13            |           |                                                    |
| 2.3.1 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                      | Persentase Minimal Pemberian Insentif Penanaman Modal (Persen)        | 45           | 47,37     | 52,63                                          | 303       | 57,89     | 333       | 63,16     | 366       | 60            | 1.001     | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.3.2 | Program Promosi Penanaman Modal                                                 | Persentase Minat Investasi Di Sumedang (Persen)                       | n/a          | 20        | 20                                             | 292       | 30        | 321       | 50        | 353       | 50            | 965       |                                                    |
| 3     | Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat                                            | Tingkat Kemiskinan (Persen)                                           | 10,14        | 9,70-7,56 | 9,50-7,26                                      |           | 9,43-7,40 |           | 9,28-7,25 |           | 9,28-7,25     |           |                                                    |
|       |                                                                                 | Gini Ratio (Poin)                                                     | 0,39         | 0,37-0,34 | 0,36-0,33                                      |           | 0,35-0,32 |           | 0,34-0,31 |           | 0,34-0,31     |           |                                                    |
| 3.1   | Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan                         | Nilai Komposit FSVA (Persen)                                          | 59,71        | 62,21     | 64,71                                          |           | 67,21     |           | 69,71     |           | 69,71         |           |                                                    |
| 3.1.1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Ketersediaan Pangan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)                           | 233,36       | 245,03    | 257,28                                         | 2.294     | 270,15    | 2.523     | 283,66    | 2.776     | 283,66        | 7.593     | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan               |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                               | Kondisi Awal |             | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |             |           |             |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|------------------|
|       |                                                                   |                                                                                                             |              |             | 2024                                           |           | 2025        |           | 2026        |           |               |           |                  |
|       |                                                                   |                                                                                                             | 2022         | 2023        | Target                                         | Rp (juta) | Target      | Rp (juta) | Target      | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                  |
| 1     | 2                                                                 | 3                                                                                                           | 4            | 5           | 6                                              | 7         | 8           | 9         | 10          | 11        | 12            | 13        | 14               |
| 3.1.2 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu (Kg/Kapita/Tahun)                               | 14,98        | 15,43       | 15,89                                          | 1.461     | 16,37       | 1.607     | 16,86       | 1.768     | 16,86         | 4.837     |                  |
| 3.1.3 | Program Penanganan Kerawanan Pangan                               | Presentase Tertanganinya Daerah Kerawanan Pangan (Persen)                                                   | 100          | 100         | 100                                            | 510       | 100         | 561       | 100         | 617       | 100           | 1.688     |                  |
| 3.1.4 | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                | Jumlah Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (Nomor Register)                                            | 30           | 50          | 70                                             | 260       | 90          | 286       | 110         | 315       | 270           | 861       |                  |
| 3.2   | Meningkatnya kesejahteraan sosial                                 | PDRB Per Kapita (ADHB) (Juta Rp)                                                                            | 34,46        | 33,85-34,70 | 36,20-38,32                                    |           | 38,18-40,24 |           | 40,15-42,72 |           | 40,15-42,72   |           |                  |
| 3.2.1 | Program Pemberdayaan Sosial                                       | Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Menerima Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan Social (Persen) | 7,22         | 9,03        | 12,64                                          | 275       | 16,25       | 275       | 19,86       | 275       | 19,86         | 825       | Dinas Sosial     |
|       |                                                                   | Persentase PSKS Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Social (Persen)                              | 58,33        | 58,33       | 66,67                                          | 1.770     | 75          | 1.835     | 83,33       | 1.986     | 83,33         | 5.591     |                  |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                                                                                                                                                                                     | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------|
|       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                  |
|       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                  |
| 1     | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14               |
| 3.2.2 | Program Rehabilitasi Sosial             | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar (Persen) | 58,47        | 65,3  | 71,66                                          | 4.795     | 78,02  | 6.235     | 84,33  | 7.270     | 84,33         | 18.300    |                  |
| 3.2.3 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Masyarakat (DTKS) Yang Menerima Jaminan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Persen)                                                                                                                                                                      | 61,77        | 62,12 | 62,47                                          | 3.600     | 62,83  | 4.500     | 63,19  | 4.868     | 63,19         | 12.968    |                  |
| 3.2.4 | Program Penanganan Bencana              | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (Persen)                                                                                                                                                                       | 100          | 100   | 100                                            | 1.369     | 100    | 1.625     | 100    | 1.800     | 100           | 4.794     |                  |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |           | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |           |           |           |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                        |                                                                              |              |           | 2024                                           |           | 2025      |           | 2026      |           |               |           |                                                                                                   |
|       |                                                                        |                                                                              | 2022         | 2023      | Target                                         | Rp (juta) | Target    | Rp (juta) | Target    | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                                                                   |
| 1     | 2                                                                      | 3                                                                            | 4            | 5         | 6                                              | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12            | 13        | 14                                                                                                |
| 3.2.5 | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)           | Cakupan Kelompok Ketahanan Yang Aktif (Persen)                               | 18,3         | 20,87     | 50                                             | 1.063     | 60        | 1.170     | 70        | 1.287     | 70            | 3.519     | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak |
|       |                                                                        | Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (Persen)                                 | 22,75        | 22,1      | 22,1                                           | 1.063     | 22,1      | 1.170     | 22,1      | 1.287     | 22,1          | 3.519     |                                                                                                   |
| 3.3   | Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)                                        | 7,72         | 8,18-6,95 | 7,00-6,47                                      |           | 6,75-5,94 |           | 6,22-5,15 |           | 6,22-5,15     |           |                                                                                                   |
| 3.3.1 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                 | Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Persen) | 15,24        | 17,77     | 20,31                                          | 1.615     | 21,33     | 1.673     | 25,39     | 1.836     | 25,39         | 5.124     | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                               |
|       |                                                                        | Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (Orang)                         | 50           | 100       | 150                                            | 950       | 200       | 1.045     | 250       | 1.150     | 600           | 3.145     |                                                                                                   |
| 3.3.2 | Program Penempatan Tenaga Kerja                                        | Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan (Persen)               | 10,2         | 15,19     | 20,18                                          | 1.115     | 25,17     | 1.221     | 30,16     | 1.343     | 30,16         | 3.678     |                                                                                                   |
| 3.3.3 | Program Hubungan Industrial                                            | Persentase Perusahaan                                                        | 10           | 11,5      | 21                                             | 703       | 26        | 783       | 31        | 862       | 31            | 2.348     |                                                                                                   |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                                                                 | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH  |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-------------------|
|       |                                           |                                                                                                                                               |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                   |
|       |                                           |                                                                                                                                               | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                   |
| 1     | 2                                         | 3                                                                                                                                             | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                |
|       |                                           | Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Persen) |              |      |                                                |           |        |           |        |           |               |           |                   |
| 3.3.4 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi  | Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunannya (KK)                                                                    | 71           | 76   | 81                                             | 760       | 86     | 836       | 91     | 920       | 258           | 2.516     |                   |
| 3.3.5 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Jumlah Satuan Pemukiman Yang Dibina (KK)                                                                                                      | 25           | 25   | 25                                             | 100       | 25     | 110       | 25     | 121       | 75            | 331       |                   |
| 3.4   | Meningkatnya Perekonomian Perdesaan       | Indeks Desa Membangun (Poin)                                                                                                                  | 0,77         | 0,78 | 0,79                                           |           | 0,8    |           | 0,81   |           | 0,81          |           |                   |
| 3.4.1 | Program Penataan Desa                     | Persentase Desa Yang Tertata (Persen)                                                                                                         | 22           | 25   | 26                                             | 200       | 30     | 220       | 37     | 363       | 37            | 783       | Dinas Pemberdayaa |



| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                    | Kondisi Awal |        | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------|
|       |                                                                                     |                                                                  |              |        | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                     |
|       |                                                                                     |                                                                  | 2022         | 2023   | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                     |
| 1     | 2                                                                                   | 3                                                                | 4            | 5      | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                  |
| 3.4.2 | Program Peningkatan Kerjasama Desa                                                  | Persentase Desa Yang Terfasilitasi Kerjasama Antar Desa (Persen) | n/a          | n/a    | 0,37                                           | 100       | 0,74   | 110       | 1,11   | 121       | 1,11          | 331       | n Masyarakat dan Desa               |
| 3.4.3 | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                              | Persentasi Desa Tertib Administrasi Sesuai Aturan (Persen)       | 30           | 50     | 61,11                                          | 7.213     | 68,52  | 8.009     | 81,48  | 8.737     | 81,48         | 23.959    |                                     |
| 3.4.4 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Yang Aktif (Persen) | 89           | 60     | 80                                             | 1.310     | 80     | 1.661     | 100    | 1.925     | 100           | 4.896     |                                     |
| 4     | Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh                       | Indeks Resiko Bencana (Poin)                                     | 119,39       | 114,39 | 109,39                                         |           | 104,39 |           | 99,39  |           | 99,39         |           |                                     |
| 4.1   | Meningkatnya Ketahan Daerah                                                         | Indeks Ketahanan Daerah (Poin)                                   | 0,49         | 0,52   | 0,53                                           |           | 0,54   |           | 0,55   |           | 0,55          |           |                                     |
| 4.1.1 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                              | Persentase Ketersediaan RTR (Persen)                             | 38           | 42,31  | 50,00                                          | 570       | 57,69  | 480       | 61,54  | 480       | 61,54         | 1.530     | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
|       |                                                                                     | Persentase Pelayanan Pemanfaatan Ruang (Persen)                  | 24,61        | 49,22  | 64,36                                          | 200       | 77,18  | 220       | 90,00  | 242       | 90,00         | 662       |                                     |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                                       | Kondisi Awal |         | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |         |           |         |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                     |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------|
|       |                                                                  |                                                                                                                     |              |         | 2024                                           |           | 2025    |           | 2026    |           |               |           |                                      |
|       |                                                                  |                                                                                                                     | 2022         | 2023    | Target                                         | Rp (juta) | Target  | Rp (juta) | Target  | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                      |
| 1     | 2                                                                | 3                                                                                                                   | 4            | 5       | 6                                              | 7         | 8       | 9         | 10      | 11        | 12            | 13        | 14                                   |
| 4.1.2 | Program Penanggulangan Bencana                                   | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Orang)                                         | 760.687      | 798.721 | 838.657                                        | 100       | 880.589 | 110       | 924.618 | 121       | 924.618       | 331       | Badan Penanggulang an Bencana Daerah |
|       |                                                                  | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Orang)                   | 2.935        | 3.081   | 3.235                                          | 2.808     | 3.396   | 3.095     | 3.565   | 3.406     | 3.565         | 9.309     |                                      |
|       |                                                                  | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)                        | 2.538        | 2.411   | 2.290                                          | 325       | 2.175   | 358       | 2.066   | 393       | 2.066         | 1.076     |                                      |
| 4.2   | Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)                                                                             | 63,35        | 63,83   | 65,55                                          |           | 66,96   |           | 70,53   |           | 70,53         |           |                                      |
| 4.2.1 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Kapasitas Pelayanan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Permukiman Terhadap Jumlah Rumah Tangga (Persen) | 0            | 21,94   | 25,81                                          | 1.595     | 28,55   | 3.270     | 31,73   | 3.585     | 31,73         | 8.450     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                                                       | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------|
|       |                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                      |
|       |                                                                                                          |                                                                                                                                     | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                      |
| 1     | 2                                                                                                        | 3                                                                                                                                   | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                   |
| 4.2.2 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                     | Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Dokumen) | 0            | 0    | 8                                              | 1.950     | 3      | 825       | 2      | 600       | 13            | 3.375     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 4.2.3 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Dokumen)                                                                 | 0            | 17   | 97                                             | 200       | 97     | 220       | 97     | 235       | 291           | 655       |                                      |
| 4.2.4 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                       | Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan (Unit)                                                                | 2            | 2    | 4                                              | 525       | 8      | 580       | 15     | 661       | 15            | 1.766     |                                      |
| 4.2.5 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Tindakan Verifikasi Terhadap Permohonan Perizinan Berusaha Pengelolaan Limbah B3 (Persen)                                | 100          | 100  | 100                                            | 125       | 100    | 200       | 100    | 300       | 100           | 625       |                                      |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                                                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                                                                                  | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------|
|       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                  |
|       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                  |
| 1     | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                              | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14               |
| 4.2.6 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Perizinan Berusaha Diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Persen)                | 100          | 100  | 100                                            | 195       | 100    | 215       | 100    | 236       | 100           | 645       |                  |
| 4.2.7 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH           | Persentase Kecamatan Yang Teridentifikasi Dan Memiliki MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Yang Diakui (Persen) | n/a          | n/a  | 25                                             | 130       | 50     | 265       | 25     | 135       | 100           | 530       |                  |
| 4.2.8 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup (Persen)                                           | n/a          | n/a  | 23                                             | 200       | 32     | 220       | 41     | 240       | 41            | 660       |                  |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                   | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------|
|        |                                                                    |                                                                 |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                   |
|        |                                                                    |                                                                 | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                   |
| 1      | 2                                                                  | 3                                                               | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                |
| 4.2.9  | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat              | Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (Penghargaan)        | n/a          | n/a   | 30                                             | 100       | 30     | 110       | 30     | 115       | 90            | 325       |                                   |
| 4.2.10 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                      | Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (Persen)   | n/a          | n/a   | 100                                            | 100       | 100    | 110       | 100    | 121       | 100           | 331       |                                   |
| 4.2.11 | Program Pengelolaan Persampahan                                    | Persentase Pengelolaan Sampah (Persen)                          | 35,14        | 43,58 | 51,66                                          | 4.824     | 59,77  | 5.070     | 65,89  | 6.174     | 65,89         | 16.068    |                                   |
| 4.2.12 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya        | Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Poin)         | 63           | 64    | 65                                             | 700       | 66     | 650       | 66     | 695       | 66            | 2.045     |                                   |
| 5      | Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif | Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)                               | 71,03        | 74,52 | 78,02                                          |           | 81,51  |           | 85     |           | 85            |           |                                   |
| 5.1    | Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN                     | Indeks Profesionalitas ASN (Poin)                               | 63,78        | 65    | 68                                             |           | 71     |           | 74     |           | 74            |           |                                   |
| 5.1.1  | Program Kepegawaian Daerah                                         | Persentase Pengadaan ASN Sesuai Dengan Formasi Jabatan (Persen) | 86           | 87    | 88                                             | 1.329     | 89     | 1.462     | 90     | 1.608     | 90            | 4.399     | Badan Kepegawaian dan Pengembanga |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                        | Kondisi Awal |        | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                     |                                                                                      |              |        | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                                                     |
|       |                                                                     |                                                                                      | 2022         | 2023   | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                                     |
| 1     | 2                                                                   | 3                                                                                    | 4            | 5      | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                                                  |
|       |                                                                     | Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Standar Kualifikasi Jabatan (Persen)         | 84           | 85     | 86                                             | 1.214     | 87     | 1.335     | 88     | 1.469     | 88            | 4.018     | n Sumber Daya manusia                                               |
|       |                                                                     | Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Persen)                       | 84           | 86     | 87                                             | 2.949     | 88     | 3.244     | 89     | 3.568     | 89            | 9.761     |                                                                     |
|       |                                                                     | Persentase ASN Yang Berkinerja Baik (Persen)                                         | 95           | 96     | 97                                             | 361       | 98     | 397       | 99     | 437       | 99            | 1.196     |                                                                     |
| 5.2   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah | Nilai Sakip Kabupaten (Kategori / Skor)                                              | BB (76)      | A (80) | A (82)                                         |           | A (82) |           | A (86) |           | A (86)        |           |                                                                     |
|       |                                                                     | Nilai LPPD Kabupaten (Skor)                                                          | 3,65         | 3,7    | 3,76                                           |           | 3,78   |           | 3,8    |           | 3,8           |           |                                                                     |
| 5.2.1 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah   | Tingkat Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Program Pembangunan Daerah (Persen) | 96,3         | 97,04  | 97,78                                          | 1.390     | 98,52  | 1.529     | 99,26  | 1.682     | 99,26         | 4.602     | Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembanga n Daerah |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                                  | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|
|       |                                                                    |                                                                                                                |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                         |
|       |                                                                    |                                                                                                                | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                         |
| 1     | 2                                                                  | 3                                                                                                              | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                      |
| 5.2.2 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia (Persen) | 94,01        | 94,51 | 95                                             | 700       | 95,39  | 770       | 95,74  | 848       | 95,74         | 2.318     |                         |
|       |                                                                    | Persentase Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian Dan SDA (Persen)                 | 84,23        | 84,65 | 85,06                                          | 821       | 85,49  | 903       | 85,84  | 993       | 85,84         | 2.716     |                         |
|       |                                                                    | Persentase Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (Persen)        | 90,07        | 90,89 | 91,55                                          | 1.206     | 92,21  | 1.326     | 92,88  | 1.459     | 92,88         | 3.991     |                         |
| 5.2.3 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                         | Persentase Implementasi Hasil Penelitian Dan Inovasi (Persen)                                                  | 89,78        | 90    | 90,9                                           | 682       | 91,81  | 750       | 92,73  | 825       | 93,58         | 2.257     |                         |
| 5.2.4 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                              | Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Persen)                                         | 43,47        | 45,67 | 44,62                                          | 5.299     | 45,15  | 5.909     | 47,9   | 6.501     | 47,9          | 17.709    | Badan Pendapatan Daerah |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                           | Kondisi Awal |             | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |             |           |             |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH               |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|
|       |                                                         |                                                                                         |              |             | 2024                                           |           | 2025        |           | 2026        |           |               |           |                                |
|       |                                                         |                                                                                         | 2022         | 2023        | Target                                         | Rp (juta) | Target      | Rp (juta) | Target      | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                |
| 1     | 2                                                       | 3                                                                                       | 4            | 5           | 6                                              | 7         | 8           | 9         | 10          | 11        | 12            | 13        | 14                             |
| 5.2.5 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                     | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran (Waktu)                                             | Tepat waktu  | Tepat waktu | Tepat waktu                                    | 3.080     | Tepat waktu | 3.672     | Tepat waktu | 4.377     | Tepat waktu   | 11.129    | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
|       |                                                         | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Terhadap Rencana Anggaran Kas (Persen) | 95           | 97          | 97                                             | 488.265   | 98          | 529.395   | 99          | 573.974   | 99            | 1.591.634 |                                |
|       |                                                         | Persentase Ketepatan Penyampaian LKPD (Persen)                                          | 95           | 96          | 98                                             | 2.519     | 100         | 3.004     | 100         | 3.581     | 100           | 9.104     |                                |
| 5.2.6 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                 | Persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) (Persen)                        | 90           | 91          | 91                                             | 2.300     | 93          | 2.530     | 95          | 2.783     | 95            | 7.613     |                                |
| 5.2.7 | Program Penyelenggaraan Pengawasan                      | Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti (Persen)          | 72           | 75          | 80                                             | 4.050     | 85          | 4.450     | 90          | 4.905     | 90            | 13.405    | Inspektorat Daerah             |
| 5.2.8 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP (Persen)                | 68           | 75          | 80                                             | 2.650     | 84          | 2.915     | 88          | 3.207     | 88            | 8.772     |                                |



| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                                       | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH   |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
|        |                                                    |                                                                                                                     |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                    |
|        |                                                    |                                                                                                                     | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                    |
| 1      | 2                                                  | 3                                                                                                                   | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                 |
| 5.2.9  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD (Persen)                                                                | 100          | 100  | 33,94                                          | 21.091    | 32,12  | 25.069    | 33,94  | 29.086    | 100           | 75.247    | Sekretariat DPRD   |
|        |                                                    | Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD (Persen)                                                           | 100          | 100  | 32,52                                          | 4.396     | 33,33  | 4.836     | 34,15  | 5.320     | 100           | 14.552    |                    |
| 5.2.10 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat      | Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraansosial Dan Kesejahteraanmasya rakat Yang Ditindaklanjuti | n/a          | n/a  | 100                                            | 1.595     | 100    | 1.755     | 100    | 1.930     | 100           | 5.279     | Sekretariat Daerah |
|        |                                                    | Presentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kewilayahan                                         | 100          | 100  | 100                                            | 755       | 100    | 830       | 100    | 913       | 100           | 2.498     |                    |
|        |                                                    | Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraansosial Dan Kesejahteraanmasya rakat Yang Ditindaklanjuti | n/a          | n/a  | 100                                            | 11.222    | 100    | 12.344    | 100    | 13.578    | 100           | 37.143    |                    |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                               | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------|
|        |                                                             |                                                                                             |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                     |
|        |                                                             |                                                                                             | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                     |
| 1      | 2                                                           | 3                                                                                           | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                  |
|        |                                                             | Presentase Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum                                                  | 100          | 100  | 100                                            | 740       | 100    | 814       | 100    | 895       | 100           | 2.449     |                                     |
|        |                                                             | Persentase Dokumen Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Ke Dalam Perjanjian Kerjasama | 95,52        | 100  | 100                                            | 385       | 100    | 424       | 100    | 466       | 100           | 1.274     |                                     |
| 5.2.11 | Program Perekonomian dan Pembangunan                        | Presentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian Dan SDA Yang Ditindaklanjuti                | n/a          | n/a  | 100                                            | 1.252     | 100    | 1.412     | 100    | 1.571     | 100           | 4.235     |                                     |
|        |                                                             | Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Yang Diselenggarakan                        | n/a          | n/a  | 90                                             | 380       | 95     | 417       | 100    | 459       | 100           | 1.256     |                                     |
|        |                                                             | Tingkat Kematangan Ukpbj (Level)                                                            | 2            | 5    | 3                                              | 506       | 4      | 557       | 5      | 612       | 5             | 1.675     |                                     |
| 5.2.12 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)                                                     | A            | A    | A                                              | 770.092   | A      | 847.316   | A      | 931.869   | A             | 2.549.277 | Dinas Pendidikan                    |
|        |                                                             |                                                                                             | A            | A    | A                                              | 447.431   | A      | 474.868   | A      | 499.759   | A             | 1.422.059 | Dinas Kesehatan                     |
|        |                                                             |                                                                                             | A            | A    | A                                              | 25.351    | A      | 38.891    | A      | 38.891    | A             | 103.132   | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| No | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                   |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
|    |                                       |                                               |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                                    |
|    |                                       |                                               | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                    |
| 1  | 2                                     | 3                                             | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                                 |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 8.479     | A      | 9.327     | A      | 10.260    | A             | 28.067    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 14.400    | A      | 15.710    | A      | 16.661    | A             | 46.771    | Satuan Polisi Pamong Praja                         |
|    |                                       |                                               | BB           | A    | A                                              | 2.784     | A      | 3.057     | A      | 3.361     | A             | 9.203     | Badan Penanggulang an Bencana Daerah               |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 10.281    | A      | 9.972     | A      | 10.666    | A             | 30.919    | Dinas Sosial                                       |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 8.239     | A      | 9.143     | A      | 10.061    | A             | 27.444    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                |
|    |                                       |                                               | BB           | BB   | BB                                             | 25.059    | BB     | 27.538    | A      | 30.104    | A             | 82.701    | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan               |
|    |                                       |                                               | BB           | A    | A                                              | 9.267     | A      | 10.047    | A      | 10.978    | A             | 30.292    | Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil           |
|    |                                       |                                               | BB           | A    | A                                              | 8.230     | A      | 8.758     | A      | 9.488     | A             | 26.476    | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa            |

| No | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                                                                  |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |                                               |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                                                                                   |
|    |                                       |                                               | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                                                                   |
| 1  | 2                                     | 3                                             | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                                                                                |
|    |                                       |                                               | BB           | BB   | BB                                             | 13.352    | BB     | 8.758     | A      | 16.156    | A             | 38.266    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                                       |                                               | BB           | BB   | BB                                             | 20.613    | A      | 23.022    | A      | 25.288    | A             | 68.924    | Dinas Perhubungan                                                                                 |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 8.134     | A      | 8.252     | A      | 8.445     | A             | 24.831    | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik                                           |
|    |                                       |                                               | n/a          | n/a  | A                                              | 12.427    | A      | 13.670    | A      | 15.037    | A             | 41.134    | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian                              |
|    |                                       |                                               | BB           | A    | A                                              | 9.613     | A      | 10.574    | A      | 11.631    | A             | 31.818    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                            |
|    |                                       |                                               | BB           | A    | A                                              | 9.066     | A      | 9.973     | A      | 10.970    | A             | 30.010    | Dinas Arsip dan Perpustakaan                                                                      |

| No | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                                   |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |                                               |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                                                    |
|    |                                       |                                               | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                                    |
| 1  | 2                                     | 3                                             | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                                                 |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 15.754    | A      | 17.439    | A      | 19.293    | A             | 52.485    | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 8.615     | A      | 9.477     | A      | 10.425    | A             | 28.517    | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga             |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 37.115    | A      | 38.686    | A      | 38.399    | A             | 114.201   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                               |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 59.666    | A      | 65.633    | A      | 72.196    | A             | 197.496   | Sekretariat Daerah                                                 |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 49.072    | A      | 52.110    | A      | 55.811    | A             | 156.994   | Sekretariat DPRD                                                   |
|    |                                       |                                               | BB           | A    | A                                              | 13.664    | A      | 15.031    | A      | 16.534    | A             | 45.228    | Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|    |                                       |                                               | BB           | A    | A                                              | 109.548   | A      | 127.375   | A      | 147.491   | A             | 384.415   | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                     |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 15.318    | A      | 16.770    | A      | 18.446    | A             | 50.535    | Badan Pendapatan Daerah                                            |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 10.209    | A      | 11.230    | A      | 12.353    | A             | 33.791    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia             |

| No | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH      |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|
|    |                                       |                                               |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                       |
|    |                                       |                                               | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                       |
| 1  | 2                                     | 3                                             | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                    |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 16.748    | A      | 18.428    | A      | 20.261    | A             | 55.437    | Inspektorat Daerah    |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 3.048     | A      | 3.160     | A      | 3.283     | A             | 9.491     | Kecamatan Wado        |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 2.570     | A      | 2.779     | A      | 3.064     | A             | 8.412     | Kecamatan Jatinunggal |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 3.555     | A      | 3.844     | A      | 4.065     | A             | 11.465    | Kecamatan Darmaraja   |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 2.633     | A      | 2.788     | A      | 2.972     | A             | 8.394     | Kecamatan Cibugel     |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 2.906     | A      | 3.193     | A      | 3.292     | A             | 9.391     | Kecamatan Cisitu      |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 3.403     | A      | 3.733     | A      | 4.015     | A             | 11.151    | Kecamatan Situraja    |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 3.153     | A      | 3.468     | A      | 3.815     | A             | 10.437    | Kecamatan Conggeang   |
|    |                                       |                                               | BB           | A    | A                                              | 3.131     | A      | 3.452     | A      | 3.753     | A             | 10.335    | Kecamatan Paseh       |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 2.527     | A      | 2.786     | A      | 2.941     | A             | 8.254     | Kecamatan Surian      |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 2.605     | A      | 2.795     | A      | 3.057     | A             | 8.457     | Kecamatan Buahdua     |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 3.338     | A      | 3.635     | A      | 3.964     | A             | 10.937    | Kecamatan Tanjungsari |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 2.768     | A      | 2.978     | A      | 3.192     | A             | 8.938     | Kecamatan Sukasari    |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 3.395     | A      | 3.715     | A      | 4.106     | A             | 11.215    | Kecamatan Pamulihan   |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 3.175     | A      | 3.266     | A      | 3.593     | A             | 10.034    | Kecamatan Cimanggung  |
|    |                                       |                                               | A            | A    | A                                              | 3.476     | A      | 3.845     | A      | 4.230     | A             | 11.551    | Kecamatan Jatinangor  |

| No  | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                  |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------|
|     |                                        |                                               |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                   |
|     |                                        |                                               | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                   |
| 1   | 2                                      | 3                                             | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                |
|     |                                        |                                               | A            | A    | A                                              | 3.203     | A      | 3.486     | A      | 3.670     | A             | 10.359    | Kecamatan Rancakalong             |
|     |                                        |                                               | A            | A    | A                                              | 7.699     | A      | 8.661     | A      | 9.487     | A             | 25.846    | Kecamatan Sumedang Selatan        |
|     |                                        |                                               | A            | A    | A                                              | 7.128     | A      | 7.681     | A      | 8.222     | A             | 23.030    | Kecamatan Sumedang Utara          |
|     |                                        |                                               | A            | A    | A                                              | 2.471     | A      | 2.736     | A      | 3.010     | A             | 8.217     | Kecamatan Ganeas                  |
|     |                                        |                                               | A            | A    | A                                              | 2.827     | A      | 3.102     | A      | 3.412     | A             | 9.340     | Kecamatan Tanjungkerta            |
|     |                                        |                                               | A            | A    | A                                              | 2.718     | A      | 2.876     | A      | 3.078     | A             | 8.672     | Kecamatan Tanjungmedar            |
|     |                                        |                                               | A            | A    | A                                              | 3.248     | A      | 3.555     | A      | 3.746     | A             | 10.549    | Kecamatan Cimalaka                |
|     |                                        |                                               | A            | A    | A                                              | 3.200     | A      | 3.459     | A      | 3.823     | A             | 10.482    | Kecamatan Cisarua                 |
|     |                                        |                                               | A            | A    | A                                              | 2.295     | A      | 2.452     | A      | 2.687     | A             | 7.434     | Kecamatan Tomo                    |
|     |                                        |                                               | A            | A    | A                                              | 3.210     | A      | 3.528     | A      | 3.881     | A             | 10.618    | Kecamatan Ujungjaya               |
|     |                                        |                                               | A            | A    | A                                              | 3.038     | A      | 3.359     | A      | 3.645     | A             | 10.041    | Kecamatan Jatigede                |
|     |                                        |                                               | BB           | A    | A                                              | 4.793     | A      | 5.272     | A      | 5.799     | A             | 15.864    | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 5.3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik (Poin)                | 4,66         | 4,7  | 4,71                                           |           | 4,72   |           | 4,75   |           | 4,75          |           |                                   |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                          | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                        |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------------|
|       |                                                         |                                                                                                        |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                         |
|       |                                                         |                                                                                                        | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                         |
| 1     | 2                                                       | 3                                                                                                      | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                      |
| 5.3.1 | Program Pendaftaran Penduduk                            | Perekaman KTP Elektronik (Persen)                                                                      | 98           | 99   | 99                                             | 876       | 99     | 920       | 99     | 996       | 99            | 2.792     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|       |                                                         | Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA (Persen)                       | 33           | 43   | 47                                             | 548       | 50     | 575       | 53     | 623       | 53            | 1.745     |                                         |
|       |                                                         | Persentase Kepemilikan KK (Persen)                                                                     | 97           | 98   | 99                                             | 767       | 99     | 805       | 99     | 872       | 99            | 2.443     |                                         |
| 5.3.2 | Program Pencatatan Sipil                                | Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun (Persen)                                              | 98           | 99   | 99                                             | 550       | 99     | 750       | 99     | 900       | 99            | 2.200     |                                         |
|       |                                                         | Persentase Kepemilikan Akte Kematian (Persen)                                                          | 15           | 20   | 30                                             | 125       | 40     | 200       | 50     | 250       | 50            | 575       |                                         |
|       |                                                         | Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim (Persen)                                              | 5            | 6    | 7                                              | 125       | 8      | 138       | 9      | 150       | 9             | 413       |                                         |
| 5.3.3 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Instansi Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (Instansi) | 52           | 55   | 55                                             | 775       | 55     | 900       | 55     | 1.000     | 55            | 2.675     |                                         |



| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                 | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
|       |                                                                                           |                                                                                               |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                                    |
|       |                                                                                           |                                                                                               | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                    |
| 1     | 2                                                                                         | 3                                                                                             | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                                 |
| 5.3.4 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap Response Timerate Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)             | 15           | 15    | 15                                             | 3.663     | 15     | 3.793     | 15     | 4.119     | 15            | 11.576    | Satuan Polisi Pamong Praja                         |
| 5.3.5 | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                         | Persentasi Permohonan Penanaman Modal Yang Terfasilitasi (Persen)                             | 80           | 93    | 93                                             | 563       | 93     | 619       | 95     | 681       | 80            | 1.864     | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 5.3.6 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                          | Persentase Kepatuhan Investor Terhadap Kebijakan Penanaman Modal Dan PTSP (Persen)            | 70           | 75    | 75                                             | 80        | 80     | 88        | 80     | 97        | 80            | 266       |                                                    |
| 5.3.7 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal                             | Persentase Tersedianya Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Kabupaten/Kota (Persen) | 80           | 83,33 | 85                                             | 29        | 85     | 31        | 85     | 35        | 85            | 95        |                                                    |
| 5.3.8 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                 | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                                         | 100          | 100   | 100                                            | 69        | 100    | 100       | 100    | 119       | 100           | 288       | Kecamatan Cimalaka                                 |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH  |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                   |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                   |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                |
| 5.3.9  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 71,43        | 80,36 | 84,82                                          | 425       | 89,29  | 468       | 100    | 608       | 100           | 1.501     |                   |
| 5.3.10 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 20        | 100    | 22        | 100    | 29        | 100           | 71        |                   |
| 5.3.11 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 35        | 100    | 38        | 100    | 50        | 100           | 123       |                   |
| 5.3.12 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 21,43        | 42,86 | 57,14                                          | 76        | 71,43  | 78        | 100    | 134       | 100           | 288       |                   |
| 5.3.13 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 95        | 100    | 146       | 100    | 155       | 100           | 396       | Kecamatan Buahdua |
| 5.3.14 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 83,33        | 88,1  | 92,86                                          | 510       | 97,62  | 610       | 100    | 660       | 100           | 1.780     |                   |
| 5.3.15 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 45        | 100    | 50        | 100    | 75        | 100           | 170       |                   |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH      |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                       |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                       |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                    |
| 5.3.16 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100  | 100                                            | 66        | 100    | 48        | 100    | 50        | 100           | 164       |                       |
| 5.3.17 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 35,71        | 50   | 71,43                                          | 145       | 85,71  | 165       | 100    | 198       | 100           | 507       |                       |
| 5.3.18 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100  | 100                                            | 50        | 100    | 55        | 100    | 105       | 100           | 210       | Kecamatan Rancakalong |
| 5.3.19 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 81,25        | 87,5 | 100                                            | 447       | 100    | 503       | 100    | 584       | 100           | 1.534     |                       |
| 5.3.20 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100  | 100                                            | 20        | 100    | 30        | 100    | 62        | 100           | 112       |                       |
| 5.3.21 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100  | 100                                            | 35        | 100    | 22        | 100    | 24        | 100           | 81        |                       |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                         | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH           |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|----------------------------|
|        |                                                           |                                                                                       |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                            |
|        |                                                           |                                                                                       | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                            |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                                     | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                         |
| 5.3.22 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)             | 80           | 100   | 100                                            | 75        | 100    | 117       | 100    | 189       | 100           | 381       | Kecamatan Sumedang Selatan |
| 5.3.23 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                                 | 100          | 100   | 100                                            | 280       | 100    | 308       | 100    | 391       | 100           | 979       |                            |
| 5.3.24 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                                 | 83,33        | 89,29 | 95,24                                          | 3.745     | 97,62  | 3.999     | 100    | 4.387     | 100           | 12.131    |                            |
| 5.3.25 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)                 | 100          | 100   | 100                                            | 65        | 100    | 55        | 100    | 61        | 100           | 181       |                            |
| 5.3.26 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)          | 100          | 100   | 100                                            | 80        | 100    | 33        | 100    | 36        | 100           | 149       |                            |
| 5.3.27 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA / Kelurahan Minimal Berkategori Baik (Persen) | 50           | 64,29 | 78,57                                          | 195       | 92,86  | 215       | 100    | 236       | 100           | 645       |                            |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH   |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                    |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                    |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                 |
| 5.3.28 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 265       | 100    | 291       | 100    | 321       | 100           | 877       | Kecamatan Jatigede |
| 5.3.29 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 50           | 62,5  | 75                                             | 628       | 87,5   | 674       | 100    | 741       | 100           | 2.042     |                    |
| 5.3.30 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 74        | 100    | 94        | 100    | 120       | 100           | 287       |                    |
| 5.3.31 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 48        | 100    | 36        | 100    | 40        | 100           | 124       |                    |
| 5.3.32 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 54,55        | 72,73 | 81,82                                          | 186       | 90,91  | 208       | 100    | 262       | 100           | 656       |                    |
| 5.3.33 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 143       | 100    | 159       | 100    | 175       | 100           | 477       | Kecamatan Tomo     |
| 5.3.34 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 50           | 62,5  | 75                                             | 445       | 87,5   | 548       | 100    | 600       | 100           | 1.593     |                    |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH     |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|----------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                      |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                      |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                   |
| 5.3.35 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 17        | 100    | 25        | 100    | 28        | 100           | 69        |                      |
| 5.3.36 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 58        | 100    | 52        | 100    | 57        | 100           | 167       |                      |
| 5.3.37 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 55,56        | 66,67 | 77,78                                          | 100       | 88,89  | 126       | 100    | 150       | 100           | 375       |                      |
| 5.3.38 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 290       | 100    | 319       | 100    | 351       | 100           | 959       | Kecamatan Jatinangor |
| 5.3.39 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 67,71        | 72,92 | 83,33                                          | 788       | 93,75  | 867       | 100    | 954       | 100           | 2.609     |                      |
| 5.3.40 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 55        | 100    | 60        | 100    | 66        | 100           | 181       |                      |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH   |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                    |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                    |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                 |
| 5.3.41 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 51        | 100    | 34        | 100    | 38        | 100           | 123       |                    |
| 5.3.42 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 8,33         | 50    | 66,67                                          | 156       | 83,33  | 172       | 100    | 189       | 100           | 516       |                    |
| 5.3.43 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 117       | 100    | 129       | 100    | 183       | 100           | 428       | Kecamatan Situraja |
| 5.3.44 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 54,17        | 58,33 | 66,67                                          | 455       | 80     | 510       | 100    | 568       | 100           | 1.533     |                    |
| 5.3.45 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 30        | 100    | 33        | 100    | 44        | 100           | 107       |                    |
| 5.3.46 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 40        | 100    | 45        | 100    | 50        | 100           | 135       |                    |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH     |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|----------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                      |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                      |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                   |
| 5.3.47 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 13,33        | 40    | 60                                             | 120       | 80     | 131       | 100    | 179       | 100           | 429       | Kecamatan Cimanggung |
| 5.3.48 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 159       | 100    | 175       | 100    | 192       | 100           | 525       |                      |
| 5.3.49 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 73,86        | 79,55 | 90,91                                          | 513       | 96,59  | 564       | 100    | 620       | 100           | 1.696     |                      |
| 5.3.50 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 22        | 100    | 24        | 100    | 27        | 100           | 73        |                      |
| 5.3.51 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 69        | 100    | 43        | 100    | 47        | 100           | 158       |                      |
| 5.3.52 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 9,09         | 54,55 | 72,73                                          | 126       | 90,91  | 3.978     | 100    | 438       | 100           | 4.542     |                      |



| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH   |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                    |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                    |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                 |
| 5.3.53 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 183       | 100    | 251       | 100    | 298       | 100           | 732       | Kecamatan Sukasari |
| 5.3.54 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 59,52        | 71,43 | 83,33                                          | 510       | 95,24  | 584       | 100    | 698       | 100           | 1.792     |                    |
| 5.3.55 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 34        | 100    | 41        | 100    | 50        | 100           | 125       |                    |
| 5.3.56 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 59        | 100    | 32        | 100    | 35        | 100           | 126       |                    |
| 5.3.57 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 14,29        | 28,57 | 57,14                                          | 116       | 85,71  | 151       | 100    | 168       | 100           | 435       |                    |
| 5.3.58 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 246       | 100    | 270       | 100    | 297       | 100           | 813       | Kecamatan Surian   |
| 5.3.59 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 74,07        | 81,48 | 92,59                                          | 441       | 96,30  | 485       | 100    | 657       | 100           | 1.582     |                    |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH    |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                     |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                     |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                  |
| 5.3.60 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 25        | 100    | 28        | 100    | 31        | 100           | 84        |                     |
| 5.3.61 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 56        | 100    | 56        | 100    | 61        | 100           | 173       |                     |
| 5.3.62 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 66,67        | 77,78 | 88,89                                          | 81        | 100    | 89        | 100    | 97        | 100           | 267       |                     |
| 5.3.63 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 181       | 100    | 222       | 100    | 273       | 100           | 676       | Kecamatan Darmaraja |
| 5.3.64 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 67,71        | 72,92 | 83,33                                          | 540       | 93,75  | 615       | 100    | 750       | 100           | 1.905     |                     |
| 5.3.65 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 20        | 100    | 30        | 100    | 40        | 100           | 90        |                     |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                  |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                  |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14               |
| 5.3.66 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 46        | 100    | 30        | 100    | 50        | 100           | 126       |                  |
| 5.3.67 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 8,33         | 50    | 66,67                                          | 90        | 83,33  | 135       | 100    | 185       | 100           | 410       |                  |
| 5.3.68 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 141       | 100    | 175       | 100    | 221       | 100           | 537       | Kecamatan Cisit  |
| 5.3.69 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 75           | 81,25 | 87,5                                           | 416       | 93,75  | 457       | 100    | 553       | 100           | 1.426     |                  |
| 5.3.70 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 25        | 100    | 28        | 100    | 30        | 100           | 83        |                  |
| 5.3.71 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 45        | 100    | 50        | 100    | 54        | 100           | 149       |                  |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH    |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                     |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                     |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                  |
| 5.3.72 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 10           | 40    | 60                                             | 40        | 80     | 28        | 100    | 173       | 100           | 240       | Kecamatan Conggeang |
| 5.3.73 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 110       | 100    | 121       | 100    | 133       | 100           | 364       |                     |
| 5.3.74 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 67,71        | 72,92 | 83,33                                          | 421       | 93,75  | 463       | 100    | 509       | 100           | 1.393     |                     |
| 5.3.75 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 7         | 100    | 8         | 100    | 8         | 100           | 23        |                     |
| 5.3.76 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 17        | 100    | 18        | 100    | 20        | 100           | 55        |                     |
| 5.3.77 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 8,33         | 50    | 66,67                                          | 28        | 83,33  | 30        | 100    | 33        | 100           | 91        |                     |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH      |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                       |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                       |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                    |
| 5.3.78 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 75        | 100    | 83        | 100    | 90        | 100           | 248       | Kecamatan Paseh       |
| 5.3.79 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 62,5         | 68,75 | 75                                             | 421       | 93,75  | 463       | 100    | 509       | 100           | 1.393     |                       |
| 5.3.80 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 35        | 100    | 39        | 100    | 42        | 100           | 116       |                       |
| 5.3.81 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 77        | 100    | 30        | 100    | 33        | 100           | 140       |                       |
| 5.3.82 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 10           | 50    | 70                                             | 70        | 80     | 124       | 100    | 180       | 100           | 374       |                       |
| 5.3.83 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 211       | 100    | 254       | 100    | 280       | 100           | 745       | Kecamatan Tanjungsari |
| 5.3.84 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 493       | 100    | 544       | 100    | 599       | 100           | 1.637     |                       |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH    |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                     |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                     |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                  |
| 5.3.85 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 116       | 100    | 127       | 100    | 154       | 100           | 397       |                     |
| 5.3.86 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 88        | 100    | 97        | 100    | 106       | 100           | 291       |                     |
| 5.3.87 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 100          | 100   | 100                                            | 119       | 100    | 143       | 100    | 178       | 100           | 439       |                     |
| 5.3.88 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 125       | 100    | 137       | 100    | 137       | 100           | 400       | Kecamatan Pamulihan |
| 5.3.89 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 83,33        | 87,88 | 92,42                                          | 514       | 95,45  | 565       | 100    | 616       | 100           | 1.695     |                     |
| 5.3.90 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 39        | 100    | 52        | 100    | 58        | 100           | 148       |                     |

| No     | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH  |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-------------------|
|        |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                   |
|        |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                   |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                |
| 5.3.91 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 48        | 100    | 52        | 100    | 57        | 100           | 157       |                   |
| 5.3.92 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 54,55        | 63,64 | 72,73                                          | 82        | 90,91  | 100       | 100    | 110       | 100           | 293       |                   |
| 5.3.93 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 105       | 100    | 136       | 100    | 169       | 100           | 410       | Kecamatan Cisarua |
| 5.3.94 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 62,5         | 71,43 | 89,29                                          | 440       | 94,64  | 484       | 100    | 532       | 100           | 1.456     |                   |
| 5.3.95 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 70        | 100    | 77        | 100    | 85        | 100           | 232       |                   |
| 5.3.96 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 70        | 100    | 77        | 100    | 36        | 100           | 183       |                   |

| No      | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------|
|         |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                  |
|         |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                  |
| 1       | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14               |
| 5.3.97  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 0            | 57,14 | 71,43                                          | 100       | 85,71  | 150       | 100    | 176       | 100           | 426       | Kecamatan Ganeas |
| 5.3.98  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 183       | 100    | 201       | 100    | 221       | 100           | 605       |                  |
| 5.3.99  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 50           | 62,5  | 75                                             | 377       | 87,5   | 414       | 100    | 456       | 100           | 1.247     |                  |
| 5.3.100 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 21        | 100    | 23        | 100    | 25        | 100           | 70        |                  |
| 5.3.101 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 41        | 100    | 29        | 100    | 32        | 100           | 101       |                  |
| 5.3.102 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 12,5         | 25    | 50                                             | 70        | 75     | 76        | 100    | 84        | 100           | 230       |                  |



| No      | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH       |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------------|
|         |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                        |
|         |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                        |
| 1       | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                     |
| 5.3.103 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 160       | 100    | 176       | 100    | 193       | 100           | 529       | Kecamatan Ujungjaya    |
| 5.3.104 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 74,07        | 86,42 | 91,36                                          | 523       | 96,3   | 582       | 100    | 640       | 100           | 1.744     |                        |
| 5.3.105 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 42        | 100    | 46        | 100    | 51        | 100           | 139       |                        |
| 5.3.106 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 85        | 100    | 87        | 100    | 96        | 100           | 268       |                        |
| 5.3.107 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 8,33         | 50    | 66,67                                          | 81        | 83,33  | 92        | 100    | 101       | 100           | 274       |                        |
| 5.3.108 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 112       | 100    | 123       | 100    | 136       | 100           | 371       | Kecamatan Tanjungkerta |
| 5.3.109 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 67,71        | 72,92 | 83,33                                          | 469       | 93,75  | 516       | 100    | 568       | 100           | 1.554     |                        |

| No      | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------|
|         |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                  |
|         |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                  |
| 1       | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14               |
| 5.3.110 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan                 | 100          | 100   | 100                                            | 15        | 100    | 16        | 100    | 18        | 100           | 48        |                  |
| 5.3.111 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 38        | 100    | 42        | 100    | 46        | 100           | 126       |                  |
| 5.3.112 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 8,33         | 50    | 66,67                                          | 67        | 83,33  | 82        | 100    | 90        | 100           | 239       |                  |
| 5.3.113 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 290       | 100    | 340       | 100    | 397       | 100           | 1.026     |                  |
| 5.3.114 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 83,33        | 89,74 | 94,87                                          | 2.642     | 97,44  | 3.057     | 100    | 3.480     | 100           | 9.179     |                  |
| 5.3.115 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 64        | 100    | 105       | 100    | 140       | 100           | 309       |                  |

| No      | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                         | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------|
|         |                                                           |                                                                                       |              |      | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                  |
|         |                                                           |                                                                                       | 2022         | 2023 | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                  |
| 1       | 2                                                         | 3                                                                                     | 4            | 5    | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14               |
| 5.3.116 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)          | 100          | 100  | 100                                            | 121       | 100    | 30        | 100    | 45        | 100           | 196       |                  |
| 5.3.117 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA / Kelurahan Minimal Berkategori Baik (Persen) | 80           | 100  | 100                                            | 171       | 100    | 245       | 100    | 320       | 100           | 736       |                  |
| 5.3.118 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                                 | 100          | 100  | 100                                            | 85        | 100    | 94        | 100    | 128       | 100           | 306       | Kecamatan Wado   |
| 5.3.119 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                                 | 81,25        | 87,5 | 93,75                                          | 177       | 100    | 388       | 100    | 526       | 100           | 1.092     |                  |
| 5.3.120 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)                 | 100          | 100  | 100                                            | 6         | 100    | 7         | 100    | 13        | 100           | 26        |                  |
| 5.3.121 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)          | 100          | 100  | 100                                            | 23        | 100    | 25        | 100    | 47        | 100           | 95        |                  |

| No      | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH  |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-------------------|
|         |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                   |
|         |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                   |
| 1       | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                |
| 5.3.122 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 10           | 50    | 80                                             | 21        | 100    | 23        | 100    | 70        | 100           | 114       | Kecamatan Cibugel |
| 5.3.123 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 93        | 100    | 119       | 100    | 141       | 100           | 352       |                   |
| 5.3.124 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 28,57        | 42,86 | 71,43                                          | 529       | 85,71  | 625       | 100    | 754       | 100           | 1.907     |                   |
| 5.3.125 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 25        | 100    | 32        | 100    | 38        | 100           | 95        |                   |
| 5.3.126 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 26        | 100    | 30        | 100    | 35        | 100           | 91        |                   |
| 5.3.127 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 14           | 29    | 43                                             | 115       | 72     | 169       | 100    | 200       | 100           | 484       |                   |

| No      | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH       |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------------|
|         |                                                           |                                                                              |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                        |
|         |                                                           |                                                                              | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                        |
| 1       | 2                                                         | 3                                                                            | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                     |
| 5.3.128 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 120       | 100    | 165       | 100    | 204       | 100           | 489       | Kecamatan Tanjungmedar |
| 5.3.129 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 80,25        | 86,42 | 92,59                                          | 368       | 96,3   | 417       | 100    | 492       | 100           | 1.277     |                        |
| 5.3.130 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)        | 100          | 100   | 100                                            | 20        | 100    | 40        | 100    | 50        | 100           | 110       |                        |
| 5.3.131 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 38        | 100    | 30        | 100    | 35        | 100           | 103       |                        |
| 5.3.132 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)    | 55,56        | 66,67 | 77,78                                          | 70        | 88,89  | 140       | 100    | 175       | 100           | 385       |                        |
| 5.3.133 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)                        | 100          | 100   | 100                                            | 135       | 100    | 157       | 100    | 172       | 100           | 464       | Kecamatan Jatinunggal  |
| 5.3.134 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)                        | 50           | 62,5  | 75                                             | 435       | 87,5   | 509       | 100    | 557       | 100           | 1.501     |                        |

| No      | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                                                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                                                                                         | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                                                        |
|         |                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                                                        |
| 1       | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                     | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                                                     |
| 5.3.135 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                                 | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)                                                                                 | 100          | 100   | 100                                            | 17        | 100    | 25        | 100    | 28        | 100           | 69        |                                                        |
| 5.3.136 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                   | Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)                                                                          | 100          | 100   | 100                                            | 33        | 100    | 28        | 100    | 30        | 100           | 90        |                                                        |
| 5.3.137 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                 | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)                                                                             | 55,56        | 66,67 | 77,78                                          | 73        | 88,89  | 91        | 100    | 95        | 100           | 259       |                                                        |
| 5.4     | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Poin)                                                                                          | 3,52         | 4,2   | 4,3                                            |           | 4,35   |           | 4,4    |           | 4,4           |           |                                                        |
| 5.4.1   | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik                                                | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Daerah (Persen) | 60           | 60    | 70                                             | 3.389     | 80     | 3.727     | 90     | 4.100     | 90            | 11.216    | Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian |

| No    | Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program                         | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program                                       | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           | Kondisi Akhir |           | PERANGKAT DAERAH             |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------------------|
|       |                                                               |                                                                                     |              |       | 2024                                           |           | 2025   |           | 2026   |           |               |           |                              |
|       |                                                               |                                                                                     | 2022         | 2023  | Target                                         | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target        | Rp (juta) |                              |
| 1     | 2                                                             | 3                                                                                   | 4            | 5     | 6                                              | 7         | 8      | 9         | 10     | 11        | 12            | 13        | 14                           |
| 5.4.2 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                      | Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik (Persen) | 100          | 100   | 100                                            | 4.788     | 100    | 5.963     | 100    | 7.192     | 100           | 17.944    |                              |
| 5.4.3 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks Kami) (Persen)             | 54,26        | 62,02 | 69,77                                          | 768       | 73,64  | 845       | 77,52  | 929       | 77,52         | 2.543     |                              |
| 5.4.4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistic (Persen)                | n/a          | n/a   | 100                                            | 304       | 100    | 334       | 100    | 368       | 100           | 1.007     |                              |
| 5.4.5 | Program Pengelolaan Arsip                                     | Tingkat Ketersediaan Arsip (Persen)                                                 | 16,48        | 26,76 | 38,35                                          | 495       | 48,68  | 545       | 60,43  | 599       | 60,43         | 1.638     | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 5.4.6 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                   | Tingkat Keberadaan Arsip (Persen)                                                   | 80           | 100   | 100                                            | 391       | 100    | 430       | 100    | 473       | 100           | 1.294     |                              |

### **6.3. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial**

#### **6.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang**

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang mempedomani RTRW Kabupaten Sumedang melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW pada periode berkenaan. RPD yang disusun diharapkan selaras dan mengadaptasi rencana yang dimuat dalam RTRW untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis penataan ruang.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) baik secara vertikal maupun horizontal. SPPR dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW, dengan menyelaraskan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dalam kaitannya dengan penyelarasan Dokumen RPD dan RTRW, dokumen SPPR ini menjadi instrumen yang dapat dipergunakan dalam melakukan sinkronisasi antara program dalam dokumen RPD agar selaras dengan program pemanfaatan ruang yang termuat dalam RTRW. Dengan demikian, program-program pembangunan yang bersifat spasial dapat memiliki lokus yang jelas dan berbasis ruang.

Sesuai dengan pendekatan penyusunan perencanaan berdasarkan substansinya, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan pendekatan holistik, tematik integratif, dan spasial. Dalam sub bab ini, disajikan deskripsi pendekatan spasial yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Dalam konteks mewujudkan keselarasan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPD Tahun 2024-2026, maka strategi dan arah kebijakan kewilayahan ditujukan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.



Adapun tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 Pasal 4 yaitu “Mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindustrian secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 6.3**  
**Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah**

| Aspek                            | Kebijakan Penataan Ruang                                                  | Strategi Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kebijakan Penataan Ruang Wilayah | a. Pengembangan Kawasan Agribisnis Komoditas Unggulan Kabupaten Sumedang; | a. Mengembangkan informasi pasar komoditas unggulan;<br>b. Mengembangkan kelembagaan agribisnis komoditas unggulan;<br>c. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil komoditas unggulan;<br>d. Meningkatkan nilai dan daya saing komoditas unggulan;<br>e. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;<br>f. Meningkatkan produksi komoditas pertanian;<br>g. Meningkatkan pengolahan hasil produksi pertanian; dan<br>h. Meningkatkan pengolahan pasca panen dan pemasaran yang berorientasi ekspor. |
|                                  | b. Pengembangan Kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten;           | a. Mengembangkan sentra produksi unggulan di kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing kecamatan;<br>b. Mempertahankan dan mengendalikan fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan;<br>c. Meningkatkan produktivitas, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan pertanian;<br>d. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian agribisnis; dan                                                                                                                                                 |

| Aspek | Kebijakan Penataan Ruang                                                                        | Strategi Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                 | e. Mengembangkan industri pembenihan dan diversifikasi tanaman pangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | c. Pengembangan Kawasan perikanan dan peternakan di seluruh Wilayah Kabupaten;                  | a. Menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya;<br>b. Mengendalikan melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan;<br>c. Meningkatkan produksi dengan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;<br>d. Meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan ladang penggembalaan;<br>e. Mengembangkan Kawasan peternakan diarahkan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;<br>f. Mengembangkan Kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif;<br>g. Mengendalikan budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk; dan<br>h. Mengembangkan industri pengolahan hasil ternak untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak. |
|       | d. Penetapan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Daya Tarik Wisata yang berbasis Ekowisata; | a. Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan;<br>b. Mengembangkan obyek daya tarik wisata dan agrowisata komoditas unggulan;<br>c. Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur penunjang pariwisata;<br>d. Melakukan promosi pariwisata dan daya Tarik wisata;<br>e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Aspek | Kebijakan Penataan Ruang                                                                                  | Strategi Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                           | <p>pariwisata;</p> <p>f. Mendatangkan investasi dari dunia usaha;</p> <p>g. Mengembangkan pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal;</p> <p>h. Mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam; dan</p> <p>i. Melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.</p>                                                               |
|       | e. Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri, sentra industri kecil dan industri rumah tangga;          | <p>a. Mengembangkan Kawasan Industri manufaktur di Wilayah timur;</p> <p>b. Mengembangkan sentra kerajinan dan industri rumah tangga;</p> <p>c. Mengembangkan Kawasan Industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan</p> <p>d. Mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.</p>                                                                                                                                                               |
|       | f. Peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; | <p>a. Meningkatkan dan mengendalikan fungsi Hutan lindung;</p> <p>b. Meningkatkan dan mengendalikan fungsi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dan Kawasan perlindungan setempat;</p> <p>c. Meningkatkan nilai ekonomi Kawasan Lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pertanian, peternakan, pariwisata, dan industri yang ramah lingkungan; dan</p> <p>d. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Lindung.</p> |

| Aspek | Kebijakan Penataan Ruang                                                                                                                                 | Strategi Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | g. Peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang;                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan sistem pusat kegiatan di Wilayah timur;</li> <li>b. Mengendalikan sistem pusat kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal di Wilayah barat;</li> <li>c. Mengembangkan Kawasan Perkotaan; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan PPL serta terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.</li> </ul>                                                                                     |
|       | h. Peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi Wilayah;              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menata sistem transportasi untuk kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;</li> <li>b. Mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian Wilayah dan yang menghubungkan Kawasan Perdesaan–Perkotaan;</li> <li>c. Memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah tidak aktif;</li> <li>d. Melaksanakan pembangunan jalur kereta api beserta fasilitas penunjangnya; dan</li> <li>e. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk keperluan penyelenggaraan penyeberangan waduk.</li> </ul> |
|       | i. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan sistem penyediaan energi;</li> <li>b. Meningkatkan pelayanan telekomunikasi;</li> <li>c. Meningkatkan sistem pelayanan sumber daya air;</li> <li>d. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Aspek | Kebijakan Penataan Ruang                        | Strategi Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | sosial dan fasilitas umum;                      | <div>e. Mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;</div> <div>f. Mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan; dan</div> <div>g. Menetapkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | j. Penataan kawasan ibukota Perkotaan Sumedang; | <div>a. Menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;</div> <div>b. Mengembangkan permukiman perkotaan yang mendorong penggunaan tanah yang lebih Efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada Wilayah yang perkotaan cepat tumbuh;</div> <div>c. Mengembangkan permukiman yang diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;</div> <div>d. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan efisiensi energi di Kawasan Permukiman perkotaan;</div> <div>e. Mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;</div> <div>f. Mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan Wilayah di sekitar daerah;</div> <div>g. Mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan</div> <div>h. Mengendalikan dan penataan pertumbuhan Kawasan Permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.</div> |

| Aspek | Kebijakan Penataan Ruang                                    | Strategi Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | k. Pengembangan kawasan pendidikan di kabupaten;            | a. Memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan pendidikan di Kawasan Jatinangor sesuai dengan KSP Pendidikan Jatinangor; dan<br>b. Mengendalikan kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi pendidikan yang belum berkembang optimal di wilayah PKW.                                                                                                                                                                                                         |
|       | l. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede; | a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;<br>b. Membangun kerjasama dengan pihak pengelola Waduk Jatigede;<br>c. Memberlakukan insentif dan disinsentif bagi pihak pengembang;<br>d. Menggali potensi daerah sebagai pusat wisata unggulan;<br>e. Menjadikan tujuan wisata skala nasional dan internasional; dan<br>f. Mengendalikan dampak pengembangan.                                                                                             |
|       | m. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; dan         | a. Membangun konektivitas dan aksesibilitas Kawasan;<br>b. Meningkatkan status dan kualitas Jalan kabupaten;<br>c. Menyelaraskan pengembangan dengan Kawasan perbatasan;<br>d. Mengembangkan potensi Daerah Kabupaten;<br>e. Mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan Kawasan;<br>f. Mendorong pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan basis-basis Kawasan penyangga sebagai basis rantai pasokan; dan<br>g. Mengawal pertumbuhan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. |
|       | n. Pengamanan fungsi Kawasan untuk                          | a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

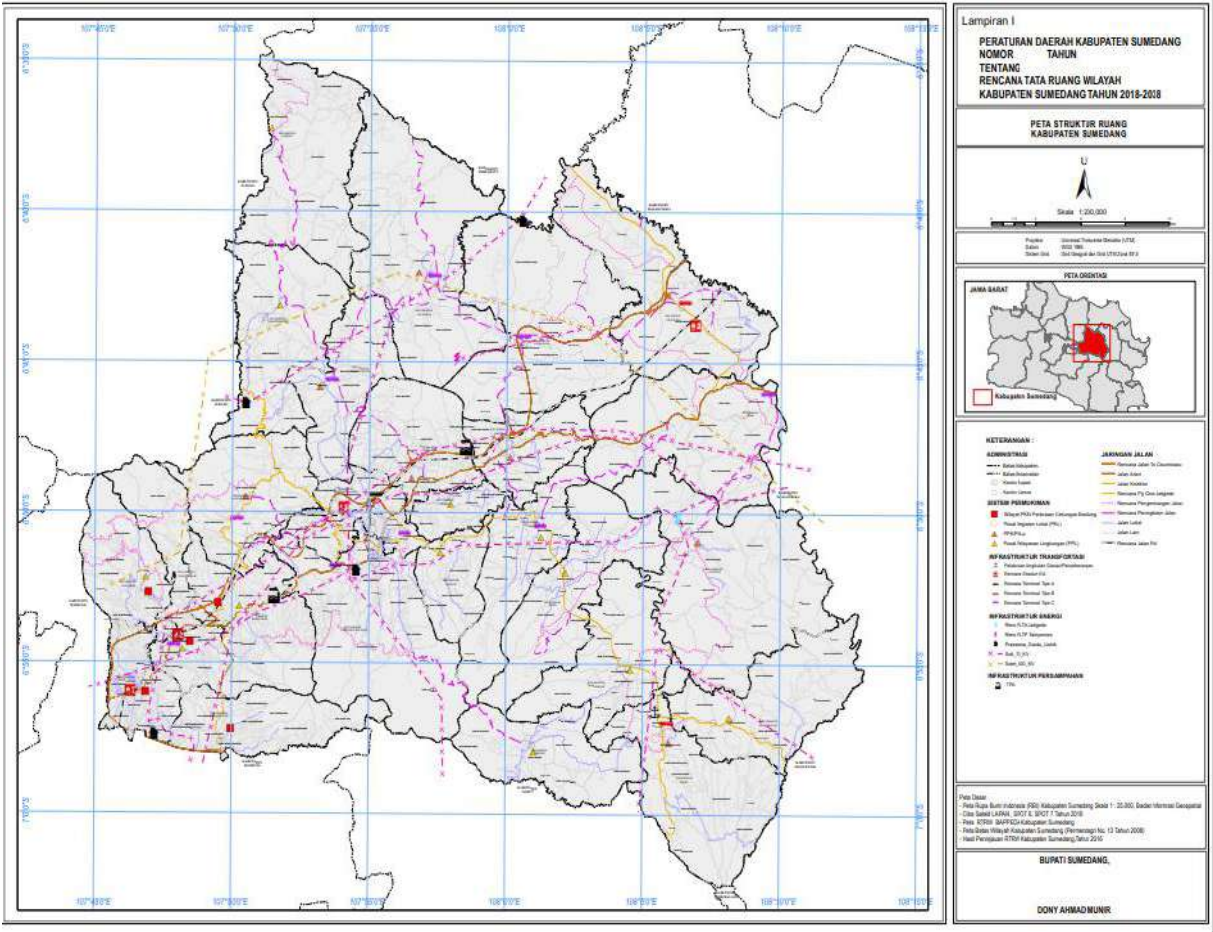
| Aspek | Kebijakan Penataan Ruang        | Strategi Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | pertahanan dan keamanan Negara. | <div>b. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan khusus pertahanan dan keamanan;</div> <div>c. Mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan</div> <div>d. Turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan Tentara Nasional Indonesia.</div> |

Sumber : RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Lebih lanjut untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan rencana struktur ruang yang memuat rencana pengembangan sistem pusat kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, kawasan strategis memperhatikan kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, adapun kawasan strategis kabupaten ditentukan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi dan ketahanan pangan. Arahana pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.



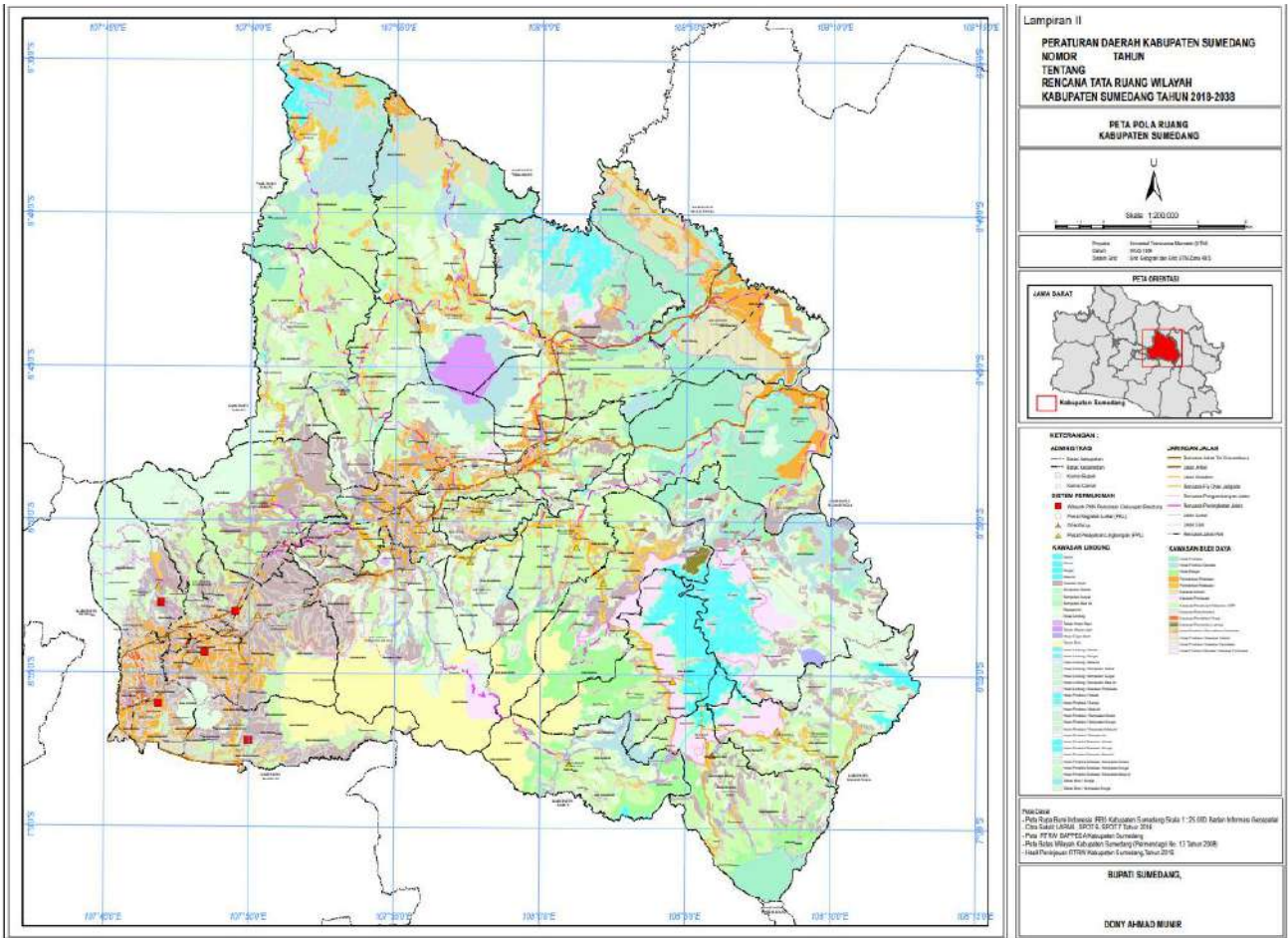
Gambar 6.2  
Peta Rencana Struktur Ruang



Sumber : RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038



Gambar 6.3  
Peta Rencana Pola Ruang



Sumber : RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

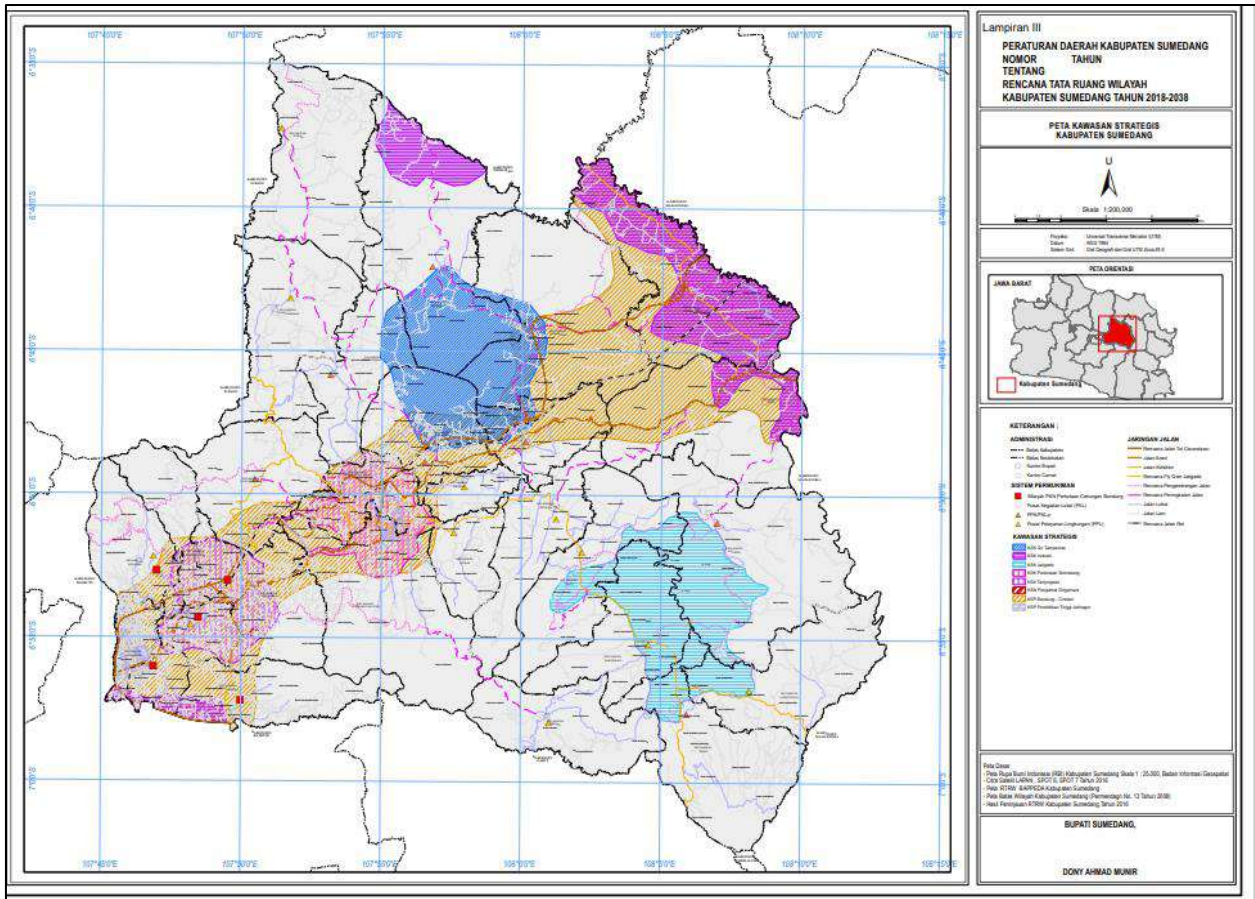
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) tersebut di atas  
sebagaimana penjelasan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.4  
Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Sumedang

| No | Sudut Kepentingan                                  | Lokasi                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi                                | a. Kawasan Industri Ujungjaya;<br>b. Kawasan Waduk Jatigede;<br>c. Kawasan Industri Buahdua; dan<br>d. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede. |
| 2  | Sosial Budaya                                      | a. Kawasan Kampung Sunda di Kawasan Jatigede; dan<br>b. Kawasan budaya tradisional di Kecamatan Rancakalong.                                       |
| 3  | Pendayagunaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tinggi | Kawasan Gunung Tampomas dan sekitarnya.                                                                                                            |
| 4  | Ketahanan Pangan                                   | Tersebar di seluruh wilayah kabupaten                                                                                                              |

Sumber : RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

**Gambar 6.4**  
**Kawasan Strategis Kabupaten**



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038

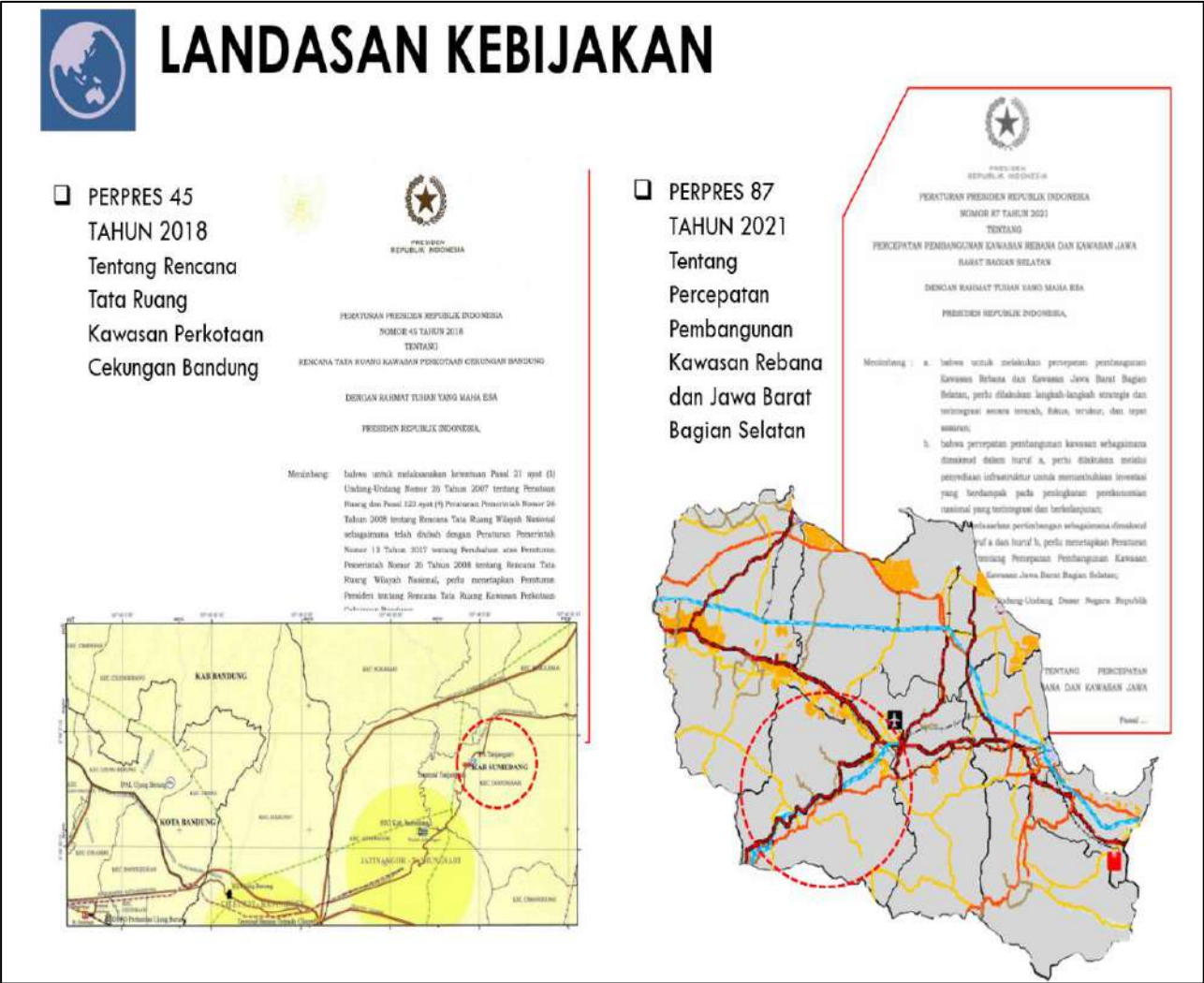
Sebagian wilayah Kabupaten Sumedang merupakan bagian dari kawasan strategis nasional (KSN) yaitu termasuk pada Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, meliputi Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan, wilayah Kabupaten Sumedang merupakan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengan sebutan Kawasan Perkotaan Jatinangor-Tanjungsari.

6.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan

Terdapat 2 (dua) Peraturan Presiden yang berlaku di Kabupaten Sumedang yang terkait dengan pembangunan berbasis kawasan yaitu Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Gambar 6.5  
Kawasan Strategis Kabupaten



Sumedang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, dalam hal tata kelola kawasan perkotaan ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah menyusun Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan



Kawasan Perkotaan Jatinangor, dalam peraturan daerah ini wilayah kecamatan yang masuk kedalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung disebut dengan Kawasan Perkotaan Jatinangor.

Memperhatikan ketentuan peraturan tentang perkotaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan bahwa Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RP2P adalah rencana pentahapan penyediaan layanan Perkotaan beserta strategi pendanaan indikatif yang merupakan bagian dari dokumen rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang, namun demikian peraturan tentang penyusunan RP2P saat ini belum tersusun sehingga dalam RPD ini perlu adanya indikasi program yang mengakomodir:

- a. rencana sistem Pelayanan Perkotaan merupakan bagian dari program pembangunan daerah; dan
- b. rencana pendanaan indikatif merupakan bagian dari kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah.

Operasionalisasi RP2P dalam RPD diintegrasikan ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana sistem Pelayanan Perkotaan, meliputi :

- a. rencana penyediaan layanan Perkotaan;
- b. rencana pengoperasian dan pemeliharaan layanan Perkotaan;
- c. rencana pembinaan sumber daya manusia dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Perkotaan; dan
- d. rencana pengembangan teknologi dan inovasi dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Perkotaan dengan pendekatan kota cerdas.

Rencana pendanaan indikatif merupakan perkiraan biaya pemenuhan rencana sistem Pelayanan Perkotaan. Pemetaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dalam rencana pembangunan sebagaimana pada table berikut ini :.

**Tabel 6.5**  
**Pemetaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan**

| Kegiatan                     | Sub Kegiatan                             | Aktivitas                                                                                             | Kalsifikasi | Jenis/ Pendekatan | Sub Jenis                                               | Perangkat Daerah/Stakeholders |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Penyediaan Layanan Perkotaan | Penyediaan fasilitas Pelayanan Perkotaan | Pembangunan, Pengembangan, Revitalisasi, peremajaan, regenerasi, pemugaran, atau pembangunan kembali. | Fasum       | Prasarana         | Jaringan jalan dan perlengkapan keselamatan lalu lintas | DPUTR; Dishub                 |
|                              |                                          |                                                                                                       |             |                   | Sistem penyediaan air minum                             | DPUTR; PDAM                   |
|                              |                                          |                                                                                                       |             |                   | Jaringan drainase                                       | DPUTR                         |
|                              |                                          |                                                                                                       |             |                   | Sistem pengelolaan air limbah                           | DLHK; Perkimtan               |
|                              |                                          |                                                                                                       |             |                   | Sistem pengelolaan persampahan                          | DLHK                          |
|                              |                                          |                                                                                                       |             |                   | Sistem proteksi kebakaran                               | Satpol PP                     |
|                              |                                          |                                                                                                       |             |                   | Terminal atau stasiun                                   | Dishub                        |

| Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktivitas | Kalsifikasi | Jenis/<br>Pendekatan | Sub Jenis                                         | Perangkat<br>Daerah/Stakeholders |
|----------|--------------|-----------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |              |           |             |                      | Jalur pejalan kaki dan penyeberangan              | DPUTR; Dishub                    |
|          |              |           |             |                      | Jalur sepeda dan kendaraan listrik                | DPUTR; Dishub                    |
|          |              |           |             |                      | Jalur evakuasi bencana                            | DPUTR; BPBD                      |
|          |              |           |             | Sarana               | Sarana pemerintahan                               | DPUTR; PD lainnya                |
|          |              |           |             |                      | Sarana pendidikan                                 | DPUTR; Disdik                    |
|          |              |           |             |                      | Sarana kesehatan                                  | DPUTR; Dinkes                    |
|          |              |           |             |                      | Sarana transportasi                               | Dishub                           |
|          |              |           |             |                      | Sarana peribadatan                                | Setda                            |
|          |              |           |             |                      | Sarana perdagangan                                | Diskopukmpp; DPUTR               |
|          |              |           |             |                      | Sarana kebudayaan, rekreasi, gelanggang olahraga, | Disparbudpora; DPUTR: Swasta     |

| Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktivitas | Kalsifikasi | Jenis/<br>Pendekatan | Sub Jenis                                                             | Perangkat<br>Daerah/Stakeholders |
|----------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |              |           |             |                      | gedung pertunjukan, dan apresiasi seni                                |                                  |
|          |              |           |             |                      | Sarana keuangan dan perekonomian                                      | BUMD; BUMN; Swasta               |
|          |              |           |             |                      | Sarana ruang terbuka hijau                                            | DLHK; Swasta                     |
|          |              |           |             |                      | Sarana penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi | Bappppeda; Diskominfo            |
|          |              |           |             |                      | Museum dan perpustakaan                                               | Disparbudpora; Disarpus; DPUTR   |
|          |              |           |             |                      | Tempat pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran                     | Pemda; BUMD; BUMN; Swasta        |
|          |              |           |             | Utilitas umum        | Jaringan listrik                                                      | PLN; Pemerintah                  |
|          |              |           |             |                      | Jaringan teknologi                                                    | BUMN; Swasta                     |

| Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktivitas | Kalsifikasi | Jenis/<br>Pendekatan                                                                                                | Sub Jenis                              | Perangkat<br>Daerah/Stakeholders                   |
|----------|--------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |              |           |             |                                                                                                                     | informasi dan komunikasi               |                                                    |
|          |              |           |             |                                                                                                                     | Jaringan gas dan pengisian bahan bakar | BUMN; Swasta                                       |
|          |              |           | Fasos       | Fasilitas komunitas adat, pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial, dan/atau konsultasi kesejahteraan keluarga |                                        | DLHK; Disparbudpora; Dinsos; Setda; Dinkes; DP3AKB |
|          |              |           |             | Fasilitas penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan korban kekerasan dalam rumah tangga            |                                        | Dinsos; DP3AKB                                     |
|          |              |           |             | Fasilitas rehabilitasi bekas korban                                                                                 |                                        | Dinsos; Dinkes; DP3AKB                             |



| Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktivitas | Kalsifikasi | Jenis/<br>Pendekatan                                                                                | Sub Jenis | Perangkat<br>Daerah/Stakeholders                              |
|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|          |              |           |             | penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan masyarakat tidak mampu; |           |                                                               |
|          |              |           |             | Fasilitas perlindungan jaminan sosial;                                                              |           | Dinsos                                                        |
|          |              |           |             | Fasilitas siap tanggap darurat bencana, termasuk sistem deteksi dini kebencanaan                    |           | BPBD; Dinsos; DPUTR; Disperkimtan; PDAM; Stakeholders lainnya |
|          |              |           |             | Fasilitas pencatatan informasi cuaca dan mitigasi bencana                                           |           | BPBD; Stakeholders lainnya                                    |
|          |              |           |             | Fasilitas layanan informasi dan data                                                                |           | PD; Kecamatan; Desa                                           |

| Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktivitas | Kalsifikasi | Jenis/<br>Pendekatan                                                           | Sub Jenis | Perangkat<br>Daerah/Stakeholders |
|----------|--------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
|          |              |           |             | Fasilitas pemadam kebakaran                                                    |           | Satpolpp                         |
|          |              |           |             | Fasilitas layanan untuk tenaga kerja                                           |           | Disnaker                         |
|          |              |           |             | Fasilitas pemakaman                                                            |           | DLHK                             |
|          |              |           |             | Fasilitas perlindungan hukum;                                                  |           | Setda                            |
|          |              |           |             | Fasilitas pembinaan usaha kecil dan menengah, serta pengembangan potensi lokal |           | Diskopukmpp                      |
|          |              |           |             | Fasilitas sanggar seni                                                         |           | Disparbudpora                    |
|          |              |           |             | Fasilitas pendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta                    |           | Satpolpp                         |

| Kegiatan | Sub Kegiatan                                                                                           | Aktivitas                                                                                                                 | Kalsifikasi                           | Jenis/<br>Pendekatan     | Sub Jenis                                       | Perangkat<br>Daerah/Stakeholders                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                        |                                                                                                                           |                                       | perlindungan masyarakat. |                                                 |                                                                                 |
|          | Pembinaan sumber daya manusia dalam penyediaan fasilitas Pelayanan Perkotaan                           | Penempatan tenaga ahli dan terampil yang kompeten di bidangnya                                                            |                                       |                          |                                                 | BKPSDM; PD lainnya                                                              |
|          |                                                                                                        | Pembinaan kompetensi oleh pemerintah atau Badan Hukum penyedia layanan                                                    |                                       |                          |                                                 | BKPSDM; Stakeholders lainnya                                                    |
|          | Pengembang an teknologi dan inovasi dengan pendekatan kota cerdas dalam penyediaan fasilitas Pelayanan | Efisiensi dan efektivitas penyediaan fasilitas Pelayanan Perkotaan sesuai kemajuan teknologi yang sudah terstandardisasi; | Manajemen permintaan terhadap layanan | Tata kelola birokrasi    | Perbaikan pelayanan publik                      | Semua PD yang melayani masyarakat secara langsung (DPMPTSP; Disduk; DPUTR, dll) |
|          |                                                                                                        |                                                                                                                           |                                       |                          | Efisiensi birokrasi                             | Semua PD                                                                        |
|          |                                                                                                        |                                                                                                                           |                                       |                          | Efisiensi dan transparansi penyusunan kebijakan | Semua PD                                                                        |

| Kegiatan | Sub Kegiatan                                                                                                    | Aktivitas                                                                                     | Kalsifikasi                                                             | Jenis/<br>Pendekatan | Sub Jenis                                                               | Perangkat<br>Daerah/Stakeholders                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          | Perkotaan (Inovasi, kolaborasi, dan/atau pemanfaatan teknologi digital sesuai dengan kebutuhan warga Perkotaan) | Penerapan keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku | Penerapan teknologi digital sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi | Ekonomi              | Pengembangan ekosistem bisnis yang berdaya saing dan kemudahan berusaha | DPMPTSP; Diskopukmpp                            |
|          |                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                      | Pemasaran usaha masyarakat secara digital                               | Diskopukmpp; Diskominfo; Stakeholder lainnya    |
|          |                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                      | Menyejahterakan masyarakat                                              | Semua PD                                        |
|          |                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                      | Transparansi transaksi keuangan                                         | Badan Usaha                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                      | Pemasaran perkotaan secara digital.                                     | Badan Usaha                                     |
|          |                                                                                                                 | Penjaminan kualitas bangunan untuk penggunaan jangka panjang.                                 |                                                                         | Kehidupan berkota    | Pelayanan Perkotaan yang terjangkau dan terintegrasi                    | DPUTR; Disperkimtan; PDAM; Stakeholders lainnya |
|          |                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                      | Lingkungan hunian yang                                                  | Disperkimtan                                    |

| Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktivitas | Kalsifikasi | Jenis/<br>Pendekatan                 | Sub Jenis                                                               | Perangkat<br>Daerah/Stakeholders                |
|----------|--------------|-----------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |              |           |             |                                      | aman dan nyaman bagi masyarakat                                         |                                                 |
|          |              |           |             |                                      | Lingkungan kerja dan kegiatan warga Kotaan lainnya yang aman dan nyaman | DPUTR; Disperkintan; PDAM; Stakeholders lainnya |
|          |              |           |             | Masyarakat (Pemberdayaan masyarakat) | Terbuka terhadap informasi, tidak diskriminatif, dan tidak intoleransi  | Diskominfo; PD Lainnya                          |
|          |              |           |             |                                      | Beradaptasi dengan kemajuan teknologi                                   | Diskominfo; PD Lainnya                          |
|          |              |           |             |                                      | Disiplin dan teratur dalam melakukan kegiatan di Kotaan                 | Satpolpp                                        |

| Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktivitas | Kalsifikasi | Jenis/<br>Pendekatan | Sub Jenis                                                     | Perangkat<br>Daerah/Stakeholders                          |
|----------|--------------|-----------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |              |           |             | Lingkungan           | Menerapkan budaya saling menghormati dan berbudi pekerti      | Pemerintah; Stakeholders lainnya                          |
|          |              |           |             |                      | Tata kelola limbah, sampah, dan pencemaran udara              | DLHK; Disperkimtan                                        |
|          |              |           |             |                      | Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana                 | Pemerintah; masyarakat; badan usaha; stakeholders lainnya |
|          |              |           |             |                      | Berketahanan iklim dan bencana                                | Pemerintah; masyarakat; badan usaha; stakeholders lainnya |
|          |              |           |             |                      | Pengelolaan berwawasan lingkungan dan energi ramah lingkungan | Pemerintah; masyarakat; badan usaha; stakeholders lainnya |
|          |              |           |             |                      | Perbaikan wajah Perkotaan                                     | Pemerintah; masyarakat; badan usaha; stakeholders lainnya |

| Kegiatan                                         | Sub Kegiatan                    | Aktivitas                                                                                   | Kalsifikasi | Jenis/<br>Pendekatan | Sub Jenis                                                                             | Perangkat<br>Daerah/Stakeholders                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                 |                                                                                             |             | Mobilitas.           | Efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang                                 | Dishub                                                                                   |
|                                                  |                                 |                                                                                             |             |                      | Transportasi ramah lingkungan dan menyehatkan                                         | Dishub                                                                                   |
|                                                  |                                 |                                                                                             |             |                      | Pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi | Dishub                                                                                   |
| Pengoperasian dan pemeliharaan layanan Perkotaan | Pengoperasian Layanan Perkotaan | Pembinaan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian fasilitas Pelayanan Perkotaan; |             |                      |                                                                                       | Pemerintah dan Badan Usaha yang melaksanakan pengoperasian fasilitas pelayanan perkotaan |

| Kegiatan | Sub Kegiatan                   | Aktivitas                                                               | Kalsifikasi | Jenis/<br>Pendekatan | Sub Jenis | Perangkat<br>Daerah/Stakeholders                                                         |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                | Pengelolaan secara transparan dan akuntabel sesuai standar yang berlaku |             |                      |           |                                                                                          |
|          |                                | Penerapan kemajuan teknologi digital dengan pendekatan kota cerdas      |             |                      |           |                                                                                          |
|          |                                | Integrasi antar-platform sistem pengoperasian                           |             |                      |           |                                                                                          |
|          | Pemeliharaan layanan Perkotaan | Pemeriksaan kualitas fasilitas Pelayanan Perkotaan secara berkala       |             |                      |           | Pemerintah dan Badan Usaha yang melaksanakan pengoperasian fasilitas pelayanan perkotaan |
|          |                                | Perawatan fasilitas Pelayanan Perkotaan                                 |             |                      |           |                                                                                          |



| Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktivitas                                                                                                     | Kalsifikasi | Jenis/<br>Pendekatan | Sub Jenis | Perangkat<br>Daerah/Stakeholders |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------------------|
|          |              | Pembinaan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia dalam pemeliharaan fasilitas Pelayanan Perkotaan |             |                      |           |                                  |

Sumber : Hasil Analisis, 2023

\*Keterangan : Judul Kegiatan Menyesuiakan terhadap istilah dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan

Selanjutnya seluruh wilayah Kabupaten Sumedang adalah merupakan bagian dari Kawasan Rebana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Kawasan Rebana adalah pengembangan baru berbasis perkotaan yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan, dimana ke-tujuh kabupaten/kota tersebut memiliki keterkaitan fungsional dan berbasis aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi .

Rencana induk berfungsi sebagai pedoman bagi menteri, kepala lembaga untuk menetapkan kebijakan sectoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pebangunan sesuai dengan kewenangan yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing, serta menjadi pedoman bagi gubernur, dan bupati/wali kota untuk menyusun kebijakan percepatan pembangunan kawasan.

Terdapat 19 (Sembilan belas) proyek pembangunan yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, baik kewenangan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi maupun lintas kewengan antara pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana dalam Tabel 6.6:

**Tabel 6.6**  
**Daftar Program/Proyek Perpres No. 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan Di Kabupaten Sumedang**

| No | Program                                                         | Kategori (P1/P2) | Perencanaan/ Persiapan |         | Konstruksi |         | Penanggung Jawab        | Indikasi Anggaran (Juta Rupiah) (Perpres) | Resume Sumber Dana      |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------|------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                                                 |                  | Mulai                  | Selesai | Mulai      | Selesai | (Perpres)               |                                           |                         |
| 1  | Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Seksi 3-6)  | P1               |                        |         | 2021       | 2023    | Kementerian PUPR        | 5.580.000                                 | BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU |
| 16 | Pelebaran Jalan Legok - Conggeang (Interchange Cisumdawu-Legok) | P1               | 2022                   | 2022    | 2023       | 2024    | Kementerian PUPR;       | 34.400                                    | APBN - APBD             |
| 17 | Pelebaran Jalan Conggeang – Buah dua                            | P2               | 2024                   | 2024    | 2025       | 2026    | Kementerian PUPR (DAK); | 25.000                                    | APBN - APBD             |

| No | Program                                                                                       | Kategori<br>(P1/P2) | Perencanaan/<br>Persiapan |         | Konstruksi |         | Penanggung<br>Jawab     | Indikasi<br>Anggaran<br>(Juta<br>Rupiah)<br>(Perpres) | Resume<br>Sumber<br>Dana              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                               |                     | Mulai                     | Selesai | Mulai      | Selesai | (Perpres)               |                                                       |                                       |
| 18 | Pelebaran Jalan Cimalaka – Cipadung (Interchange Cisumdawu – Cimalaka)                        | P1                  | 2022                      | 2022    | 2023       | 2024    | Kementerian PUPR;       | 36.600                                                | APBN - APBD                           |
| 19 | Pelebaran Jalan Conggeang – Ujungjaya                                                         | P2                  | 2024                      | 2024    | 2025       | 2027    | Kementerian PUPR (DAK); | 91.000                                                | APBN - APBD                           |
| 24 | Pelebaran Jalan Pangkalan Damri – Kiarapayung ( <i>Exit Ramp</i> Cisumdawu – Jatinangor)      | P1                  | 2022                      | 2022    | 2023       | 2024    | Kementerian PUPR;       | 22.500                                                | APBN - APBD                           |
| 1  | Reaktivasi Rel KA Rancaekek – Tanjungsari                                                     | P1                  | 2021                      | 2022    | 2023       | 2025    | Kementerian Perhubungan | 1.200.000                                             | APBN                                  |
| 2  | Pembangunan Kereta Cepat Bandung – Kertajati                                                  | P2*                 | 2022                      | 2023    | 2024       | 2030    | Kementerian Perhubungan | 20.000.000                                            | BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU               |
| 7  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I  | P1                  | 2021                      | 2022    | 2023       | 2026    | Kementerian PUPR;       | 2.100.000                                             | APBN - APBD - BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU |
| 8  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap II | P2*                 | 2021                      | 2022    | 2023       | 2025    | Kementerian PUPR;       | 3.100.000                                             | APBN - APBD - BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU |
| 11 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Cipanas                                        | P2                  | 2022                      | 2024    | 2025       | 2025    | Kementerian PUPR;       | 200.000                                               | APBN - APBD                           |
| 1  | Pembangunan Waduk/Bendungan Kadumalik                                                         | P2                  | 2021                      | 2023    | 2024       | 2027    | Kementerian PUPR        | 1.300.000                                             | APBN                                  |
| 6  | Pembangunan Gedung Pusat Budaya                                                               | P1                  | 2022                      | 2022    | 2023       | 2024    | Pemerintah Daerah       | 25.000                                                | APBD                                  |
| 7  | Penataan Kawasan Waduk Jatigede sebagai Destinasi Wisata                                      | P1                  | 2022                      | 2023    | 2024       | 2030    | Kemenko Perekonomian;   | 200.000                                               | APBN - BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU        |
| 9  | Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Korporasi Petani                                     | P2                  | 2022                      | 2023    | 2024       | 2027    | Kementerian Pertanian;  | 89.560                                                | APBN - APBD                           |
| 10 | Pengembangan desa digital                                                                     | P1                  | 2022                      | 2022    | 2023       | 2024    | Kementerian Kominfo;    | 100.000                                               | APBN - APBD                           |
| 14 | Pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Tampomas                      | P2*                 | 2022                      | 2023    | 2024       | 2030    | Kementerian ESDM        | 3.220.000                                             | APBN - BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU        |

| No | Program                                                         | Kategori<br>(P1/P2) | Perencanaan/<br>Persiapan |         | Konstruksi |         | Penanggung<br>Jawab | Indikasi<br>Anggaran<br>(Juta<br>Rupiah)<br>(Perpres) | Resume<br>Sumber<br>Dana      |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |                                                                 |                     | Mulai                     | Selesai | Mulai      | Selesai | (Perpres)           |                                                       |                               |
| 16 | Pengembangan<br>Pembangkit Tenaga<br>Air (PLTA) Jatigede        | P2                  |                           |         | 2022       | 2024    | Kementerian<br>ESDM | 668.370                                               | APBN                          |
| 17 | Pengembangan<br>Pembangkit Listrik<br>Tenaga Air (PLTA)<br>Wado | P2*                 | 2022                      | 2022    | 2023       | 2028    | Kementerian<br>ESDM | 1.200.000                                             | BUMN/BU<br>MD/SWAS<br>TA/KPBU |

Sumber : Perpres No. 87/2021, Hasil Pendetailan Program, 2023

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan disyahkan pada tanggal 9 September 2021, setelah disyahkan segera diimplimentasikan sebagaimana target waktu yang ditetapkan, proses percepatan terus dilakukan sehingga perlu adanya sinkronisasi dengan perencanaan diberbagai tingkatan pemerintahan serta perlu adanya rencana aksi lebih lanjut agar mencapai outcome yang diharapkan dari proyek-proyek tersebut, atas dasar hal tersebut maka program-program ini perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah.

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan, disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tanggungjawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang telah disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang merupakan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab OPD.

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya hingga akhir periode RPD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (outcomes). Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh OPD.

Disamping itu, disajikan pula rancangan secara proyektif mengenai rencana atau target capaian setiap tahun perencanaan selama kurun waktu lima tahun, sehingga didapatkan gambarannya tentang prospek pencapaian target tersebut bagi masyarakat di satu sisi, serta menjadi acuan kinerja bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan itu, kebutuhan pendanaan yang dapat difasilitasi bagi setiap program prioritas tersebut juga digambarkan secara proyektif, berdasarkan evaluasi terhadap kerangka pendanaan yang dapat dicapai pada lima tahun anggaran terakhir.

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026**

| No         | Jenis Belanja                     | Kondisi Awal                |                             | Proyeksi                    |                             |                             |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |                                   | 2022 *unaudit               | 2023                        | 2024                        | 2025                        | 2026                        |
| (1)        | (2)                               | (3)                         | (4)                         | (5)                         | (6)                         | (7)                         |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                    |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>5.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>            | <b>1.967.401.426.401,00</b> | <b>2.134.972.336.184,00</b> | <b>1.961.323.996.881,00</b> | <b>1.943.407.057.362,00</b> | <b>1.989.367.678.727,00</b> |
| 5.1.1      | Belanja Pegawai                   | 1.169.624.519.375,00        | 1.255.084.934.591,00        | 1.255.084.934.591,00        | 1.255.084.934.591,00        | 1.255.084.934.591,00        |
| 5.1.2      | Belanja Barang dan Jasa           | 733.747.913.310,00          | 673.184.501.593,00          | 588.238.062.290,00          | 617.822.122.771,00          | 656.682.744.136,01          |
| 5.1.3      | Belanja Subsidi                   | 95.782.500,00               | 350.000.000,00              | 450.000.000,00              | 500.000.000,00              | 600.000.000,00              |
| 5.1.4      | Belanja Bunga                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 5.1.5      | Belanja Hibah                     | 57.220.254.016,00           | 193.362.870.000,00          | 100.000.000.000,00          | 50.000.000.000,00           | 50.000.000.000,00           |
| 5.1.6      | Belanja Bantuan Sosial            | 6.712.957.200,00            | 12.990.030.000,00           | 17.551.000.000,00           | 20.000.000.000,00           | 27.000.000.000,00           |
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Modal</b>              | <b>470.908.866.968,00</b>   | <b>217.570.638.977,00</b>   | <b>691.871.541.700,00</b>   | <b>807.234.791.024,00</b>   | <b>1.460.678.724.340,00</b> |
| 5.2.1      | Belanja Modal Tanah               | 27.007.255.100,00           | 1.202.500.000,00            | 33.254.033.200,0            | 41.005.548.300,00           | 50.490.131.000,00           |
| 5.2.2      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 183.985.337.475,00          | 54.799.095.687,00           | 184.812.477.000,0           | 205.733.249.300,00          | 275.674.489.000,00          |
| 5.2.3      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 129.991.095.312,00          | 75.150.624.290,00           | 213.866.705.500,0           | 251.785.990.424,00          | 431.874.415.340,00          |

| No                           | Jenis Belanja                              | Kondisi Awal                |                             | Proyeksi                    |                             |                             |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                              |                                            | 2022 *unaudit               | 2023                        | 2024                        | 2025                        | 2026                        |
| (1)                          | (2)                                        | (3)                         | (4)                         | (5)                         | (6)                         | (7)                         |
| 5.2.4                        | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 116.106.286.763,00          | 82.864.099.000,00           | 246.137.593.000,0           | 294.362.761.000,00          | 687.724.297.000,00          |
| 5.2.5                        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 13.275.041.363,00           | 516.900.000,00              | 13.800.733.000,0            | 14.347.242.000,00           | 14.915.392.000,00           |
| 5.2.6                        | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 543.850.955,00              | 3.037.420.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>5.3</b>                   | <b>Belanja Tak Terduga</b>                 | <b>2.786.124.220,00</b>     | <b>13.155.296.795,00</b>    | <b>30.000.000.000,00</b>    | <b>30.000.000.000,00</b>    | <b>30.000.000.000,00</b>    |
| <b>5.4</b>                   | <b>Belanja Transfer</b>                    | <b>389.605.052.943,00</b>   | <b>429.624.477.900,00</b>   | <b>460.836.600.471,00</b>   | <b>483.622.369.378,00</b>   | <b>508.397.234.678,00</b>   |
| 5.4.1                        | Belanja Bagi Hasil                         | 29.486.323.500,00           | 30.551.048.900,00           | 35.304.107.100,00           | 42.578.052.500,00           | 57.352.917.800,00           |
| 5.4.2                        | Belanja Bantuan Keuangan                   | 360.118.729.443,00          | 399.073.429.000,00          | 425.532.493.371,00          | 441.044.316.878,00          | 451.044.316.878,00          |
| <b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b> |                                            | <b>2.830.701.470.532,00</b> | <b>2.795.322.749.856,00</b> | <b>3.144.032.139.052,00</b> | <b>3.264.264.217.764,00</b> | <b>3.480.046.405.093,00</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT</b>       |                                            | <b>57.259.838.819,84</b>    | <b>1.500.000.000,00</b>     | <b>(41.000.000.000,00)</b>  | <b>5.409.181.435,00</b>     | <b>6.000.000.000,00</b>     |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023

**Tabel 7.2**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026**

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan    | Indikator Program (outcome)                                                  | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                                 |                                                                              |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                                 |                                                                              |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                             | (3)                                                                          | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| I       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                              |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |                                                                              |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan                                  | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD         | Persen | 89,39                    | 91,89      | 94,39                                          | 150.760   | 96,89      | 166.591   | 98,89      | 183.719   | 99                                     | 501.069   | Dinas Pendidikan                  |
|         |                                                                 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP       | Persen | 90,27                    | 92,27      | 94,27                                          | 77.324    | 96,27      | 85.056    | 98,27      | 93.561    | 98,27                                  | 255.941   |                                   |
|         |                                                                 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan | Persen | 53,47                    | 63,47      | 73,47                                          | 23.833    | 83,47      | 26.216    | 93,47      | 28.838    | 93,47                                  | 78.887    |                                   |
|         |                                                                 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini   | Persen | 92,04                    | 93,74      | 95,44                                          | 21.475    | 97,14      | 22.723    | 98,84      | 24.995    | 98,84                                  | 69.194    |                                   |



| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan                | Indikator Program (outcome)                                     | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                                             |                                                                 |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                                             |                                                                 |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                                         | (3)                                                             | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 1.01.03 | Program Pengembangan Kurikulum                                              | Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka            | Persen | 21,61                    | 40,30      | 68,34                                          | 1.650     | 94,33      | 1.850     | 100        | 1.850     | 100                                    | 5.350     |                                   |
| 1.01.04 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                    | Proporsi GTK penggerak                                          | Persen | 5                        | 10         | 25                                             | 1.050     | 30         | 1.050     | 30         | 1.050     | 30                                     | 3.150     |                                   |
| 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                        |                                                                 |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk          | Rasio  | 0,17                     | 0,19       | 0,22                                           | 64.563    | 0,23       | 84.801    | 0,25       | 111.705   | 0,25                                   | 261.069   | Dinas Kesehatan                   |
|         |                                                                             | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat                    | Persen | 50                       | 55         | 60                                             | 52.779    | 65         | 59.566    | 70         | 69.027    | 70                                     | 181.372   |                                   |
|         |                                                                             | Presentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi    | Persen | 28                       | 33         | 40                                             | 750       | 50         | 875       | 60         | 1.180     | 60                                     | 2.805     |                                   |
|         |                                                                             | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 700       | 100        | 850       | 100        | 1.000     | 100                                    | 2.550     |                                   |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab   |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                     |
|         |                                                              |                                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                     |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                |
|         |                                                              | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang sesuai standar                             | Persen | 84                       | 85         | 86                                             | 7.416     | 88         | 8.158     | 90         | 8.973     | 90                                     | 24.547    |                                     |
| 1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki standar kompetensi                        | Persen | 86                       | 87         | 88                                             | 1.800     | 89         | 2.800     | 90         | 3.300     | 90                                     | 7.900     |                                     |
| 1.02.04 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman  | Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar | Persen | 84                       | 86         | 87                                             | 1.900     | 88         | 2.950     | 92         | 3.300     | 92                                     | 8.150     |                                     |
| 1.02.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan             | Presentase Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri                                       | Persen | 20                       | 26         | 31                                             | 1.450     | 36         | 1.800     | 41         | 2.040     | 41                                     | 5.290     |                                     |
| 1.03    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                     |
| 1.03.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                    | Luas Lahan yang terairi (Ha)                                                        | Hektar | 20.633,4                 | 21054,31   | 21.454,31                                      | 24.341    | 21.814,31  | 26.775    | 22.154,31  | 29.452    | 22.154,31                              | 80.567    | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan     | Indikator Program (outcome)                                                                                                                                                     | Satuan       | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab    |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|         |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |              | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                      |
|         |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |              |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                      |
| (1)     | (2)                                                              | (3)                                                                                                                                                                             | (4)          | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                 |
| 1.03.03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota | Rumah Tangga | 244.688                  | 245.847    | 246.288                                        | 11.050    | 247.888    | 12.155    | 249.488    | 13.371    | 249.488                                | 36.576    |                                      |
| 1.03.04 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase kapasitas pelayanan sarana prasarana pengelolaan sampah permukiman terhadap jumlah rumah tangga                                                                      | Persen       | 0                        | 21,94      | 25,81                                          | 1.595     | 28,55      | 3.270     | 31,73      | 3.585     | 31,73                                  | 8.450     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 1.03.05 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Persentase rumah tinggal bersanitasi                                                                                                                                            | Persen       | 95,84                    | 95,91      | 96,12                                          | 3.313     | 96,36      | 5.196     | 96,61      | 5.203     | 96,61                                  | 13.712    | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  |
| 1.03.06 | Program Pengembangan Permukiman                                  | Persentase pemukiman yang tertata                                                                                                                                               | Persen       | 10,49                    | 26,57      | 51,05                                          | 5.140     | 75,52      | 3.968     | 100        | 3.968     | 100                                    | 13.075    | Dinas Perumahan, Kawasan             |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                                                           | Satuan   | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab   |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                                       |          | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                     |
|         |                                                              |                                                                                                       |          |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                     |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                                                   | (4)      | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                |
|         |                                                              |                                                                                                       |          |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           | Permukiman dan Pertanahan           |
| 1.03.07 | Program Penataan Bangunan Gedung                             | Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | Persen   | 15,45                    | 36,52      | 57,58                                          | 935       | 78,65      | 2.559     | 99,72      | 4.741     | 99,72                                  | 8.235     | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.08 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya                  | Jumlah kumulatif Bangunan dan Lingkungannya yang tertata                                              | Bangunan | 53                       | 55         | 59                                             | 8.900     | 63         | 9.660     | 67         | 10.606    | 67                                     | 29.166    |                                     |
| 1.03.09 | Program Penyelenggaraa n Jalan                               | Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik                                      | Persen   | 60,04                    | 61,49      | 62,13                                          | 117.929   | 64,07      | 127.960   | 65,36      | 141.164   | 65,36                                  | 387.053   |                                     |
| 1.03.10 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                         | Persentase tenaga Operator/Teknis/ Analis yang memiliki Sertifikat Kompetensi                         | Persen   | 71,76                    | 64,21      | 72,77                                          | 605       | 81,34      | 637       | 89,90      | 701       | 89,90                                  | 1.943     |                                     |
| 1.03.11 | Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang                      | Persentase ketersediaan RTR                                                                           | Persen   | 38                       | 42,31      | 50,00                                          | 570       | 57,69      | 480       | 61,54      | 480       | 61,54                                  | 1.530     |                                     |
|         |                                                              | Persentase pelayanan                                                                                  | Persen   | 24,61                    | 49,22      | 64,36                                          | 200       | 77,18      | 220       | 90,00      | 242       | 90,00                                  | 662       |                                     |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Program (outcome)                                               | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
|         |                                                                                           |                                                                           |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                    |
|         |                                                                                           |                                                                           |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                    |
| (1)     | (2)                                                                                       | (3)                                                                       | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                               |
|         |                                                                                           | pemanfaatan ruang                                                         |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                    |
| 1.04    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               |                                                                           |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                    |
| 1.04.02 | Program Pengembangan Perumahan                                                            | Jumlah rumah layak huni yang terlayani                                    | Unit   | 30                       | 55         | 80                                             | 3.450     | 105        | 3.795     | 130        | 4.175     | 130                                    | 11.420    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.04.03 | Program Kawasan Permukiman                                                                | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani                          | Persen | 81,34                    | 81,34      | 81,97                                          | 7.905     | 82,43      | 9.040     | 82,89      | 11.065    | 82,89                                  | 28.009    |                                                    |
| 1.04.04 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh                                            | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Dicegah                                | Hektar | 154835,31                | 154835,31  | 154835,3                                       | 2.108     | 154835,3   | 2.108     | 154835,3   | 2.108     | 154835,31                              | 6.323     |                                                    |
| 1.04.05 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                             | Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | Persen | 38,36                    | 53,42      | 83,56                                          | 13.160    | 91,78      | 14.476    | 100        | 15.924    | 100                                    | 43.560    |                                                    |
| 1.05    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                           |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                    |
| 1.05.02 | Program Peningkatan Ketentraman                                                           | Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan,                            | Persen | 72                       | 78         | 83                                             | 2.513     | 89         | 2.947     | 94         | 3.705     | 94                                     | 9.166     | Satuan Polisi                                      |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                                               | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab    |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                           |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                      |
|         |                                                              |                                                                                           |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                      |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                                       | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                 |
|         | dan Ketertiban Umum                                          | Ketertiban, dan Ketentraman)                                                              |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           | Pamong Praja                         |
|         |                                                              | Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani                                    | Persen | 91                       | 92         | 92                                             | 789       | 93         | 1.013     | 96         | 1.274     | 96                                     | 3.076     |                                      |
|         |                                                              | Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang setiap RT)          | Rasio  | 0,67                     | 0,74       | 0,81                                           | 420       | 0,89       | 500       | 0,98       | 600       | 0,98                                   | 1.520     |                                      |
| 1.05.03 | Program Penanggulanga n Bencana                              | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | Orang  | 760.687                  | 798.721    | 838.657                                        | 100       | 880.589    | 110       | 924.618    | 121       | 924.618                                | 331       | Badan Penanggula ngan Bencana Daerah |
|         |                                                              | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Orang  | 2.935                    | 3.081      | 3.235                                          | 2.808     | 3.396      | 3.095     | 3.565      | 3.406     | 3.565                                  | 9.309     |                                      |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Program (outcome)                                                                        | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                                                           |                                                                                                    |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                                                           |                                                                                                    |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                                                       | (3)                                                                                                | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
|         |                                                                                           | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana               | Orang  | 2.538                    | 2.411      | 2.290                                          | 325       | 2.175      | 358       | 2.066      | 393       | 2.066                                  | 1.076     |                                   |
| 1.05.04 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)                        | Menit  | 15                       | 15         | 15                                             | 3.663     | 15         | 3.793     | 15         | 4.119     | 15                                     | 11.576    | Satuan Polisi Pamong Praja        |
| 1.06    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         |                                                                                                    |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 1.06.02 | Program Pemberdayaan Sosial                                                               | Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima bantuan sosial melalui pemberdayaan sosial | Persen | 7,22                     | 9,03       | 12,64                                          | 275       | 16,25      | 275       | 19,86      | 275       | 19,86                                  | 825       | Dinas Sosial                      |
|         |                                                                                           | Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                              | Persen | 58,33                    | 58,33      | 66,67                                          | 1.770     | 75,00      | 1.835     | 83,33      | 1.986     | 83,33                                  | 5.591     |                                   |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                                                                                                                                                                                                              | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 1.06.04 | Program Rehabilitasi Sosial                                  | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar | Persen | 58,47                    | 65,30      | 71,66                                          | 4.795     | 78,02      | 6.235     | 84,33      | 7.270     | 84,33                                  | 18.300    |                                   |
| 1.06.05 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                      | Persentase masyarakat (DTKS) yang menerima jaminan sosial pemenuhan kebutuhan dasar                                                                                                                                                                      | Persen | 61,77                    | 62,12      | 62,47                                          | 3.600     | 62,83      | 4.500     | 63,19      | 4.868     | 63,19                                  | 12.968    |                                   |
| 1.06.06 | Program Penanganan Bencana                                   | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                                                                                                                                                                       | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 1.369     | 100        | 1.625     | 100        | 1.800     | 100                                    | 4.794     |                                   |



| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan          | Indikator Program (outcome)                                                     | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|         |                                                                       |                                                                                 |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                      |
|         |                                                                       |                                                                                 |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                      |
| (1)     | (2)                                                                   | (3)                                                                             | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                 |
| 1.06.07 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                              | Persentase pengelolaan Makam Pahlawan                                           | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 261       | 100        | 144       | 100        | 180       | 100                                    | 585       |                                      |
| II      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                 |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                      |
| 2.07    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                               |                                                                                 |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                      |
| 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat             | Persen | 15,24                    | 17,77      | 20,31                                          | 1.615     | 21,33      | 1.673     | 25,39      | 1.836     | 25,39                                  | 5.124     | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si |
|         |                                                                       | Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                    | Orang  | 50                       | 100        | 150                                            | 950       | 200        | 1.045     | 250        | 1.150     | 600                                    | 3.145     |                                      |
| 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja                                       | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan                           | Persen | 10,2                     | 15,19      | 20,18                                          | 1.115     | 25,17      | 1.221     | 30,16      | 1.343     | 30,16                                  | 3.678     |                                      |
| 2.07.05 | Program Hubungan Industrial                                           | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS | Persen | 10                       | 11,5       | 21                                             | 703       | 26         | 783       | 31         | 862       | 31                                     | 2.348     |                                      |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Program (outcome)                                                | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                            |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                                                                  |
|         |                                                                         |                                                                            |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                                                                  |
| (1)     | (2)                                                                     | (3)                                                                        | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                                                                             |
|         |                                                                         | Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                                                                  |
| 2.08    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                            |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                                                                  |
| 2.08.02 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan               | Persentase OPD Responsip Gender                                            | Persen | 45,16                    | 61,29      | 65                                             | 1.117     | 75         | 1.229     | 100        | 1.351     | 100                                    | 3.697     | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03 | Program Perlindungan Perempuan                                          | Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan                         | Persen | 100                      | 0,0035     | 0,0036                                         | 1.107     | 0,0042     | 1.217     | 0,0047     | 1.339     | 0,0047                                 | 3.663     |                                                                                                  |
| 2.08.04 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                   | Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan       | Persen | 100                      | 16,53      | 33,06                                          | 1.392     | 66,13      | 1.532     | 80         | 1.685     | 80                                     | 4.609     |                                                                                                  |
| 2.08.05 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                         | Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak                               | Persen | 100                      | 33,3       | 42                                             | 309       | 71         | 340       | 100        | 374       | 100                                    | 1.023     |                                                                                                  |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan                    | Indikator Program (outcome)                                                                         | Satuan            | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|         |                                                                                 |                                                                                                     |                   | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                      |
|         |                                                                                 |                                                                                                     |                   |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                      |
| (1)     | (2)                                                                             | (3)                                                                                                 | (4)               | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                 |
| 2.08.06 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                | Persentase forum anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Persen            | 46,15                    | 65,38      | 69,07                                          | 618       | 75,65      | 680       | 100        | 748       | 100                                    | 2.046     |                                      |
| 2.08.07 | Program Perlindungan Khusus Anak                                                | Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan                                | Persen            | 100                      | 0,02       | 0,023                                          | 1.442     | 0,026      | 1.587     | 0,028      | 1.745     | 0,028                                  | 4.774     |                                      |
| 2.09    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                               |                                                                                                     |                   |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                      |
| 2.09.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Ketersediaan pangan Pokok                                                                           | Kg/kapita/ tahun  | 233,36                   | 245,03     | 257,28                                         | 2.294     | 270,15     | 2.523     | 283,66     | 2.776     | 283,66                                 | 7.593     | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu                                         | Kg/ Kapita/ Tahun | 14,98                    | 15,43      | 15,89                                          | 1.461     | 16,37      | 1.607     | 16,86      | 1.768     | 16,86                                  | 4.837     |                                      |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan             | Indikator Program (outcome)                                                          | Satuan         | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                          |                                                                                      |                | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                      |
|         |                                                                          |                                                                                      |                |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                      |
| (1)     | (2)                                                                      | (3)                                                                                  | (4)            | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                                 |
| 2.09.04 | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                      | Presentase Tertanganinya Daerah kerawanan pangan                                     | Persen         | 100                      | 100        | 100                                            | 510       | 100        | 561       | 100        | 617       | 100                                    | 1.688     |                                                      |
| 2.09.05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                       | Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan                                      | Nomor Register | 30                       | 50         | 70                                             | 260       | 90         | 286       | 110        | 315       | 270                                    | 861       |                                                      |
| 2.10    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                    |                                                                                      |                |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                      |
| 2.10.04 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                              | Jumlah Penanganan Sengketa Tanah yang di fasilitasi                                  | Kasus          | 2                        | 2          | 2                                              | 660       | 2          | 726       | 2          | 799       | 10                                     | 2.185     | Dinas Perumahan, Kawasan Permukimaa n dan Pertanahan |
| 2.10.05 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Jumlah lokasi ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan | Lokasi         | 9                        | 15         | 20                                             | 1.650     | 25         | 1.815     | 30         | 1.997     | 30                                     | 5.462     |                                                      |
| 2.11    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                              |                                                                                      |                |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                      |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan                                             | Indikator Program (outcome)                                                                                               | Satuan  | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|         |                                                                                                          |                                                                                                                           |         | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                      |
|         |                                                                                                          |                                                                                                                           |         |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                      |
| (1)     | (2)                                                                                                      | (3)                                                                                                                       | (4)     | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                 |
| 2.11.02 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                     | Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Dokumen | 0                        | 0          | 8                                              | 1.950     | 3          | 825       | 2          | 600       | 13                                     | 3.375     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                      | Jumlah dokumen hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup                                                                 | Dokumen | 0                        | 17         | 97                                             | 200       | 97         | 220       | 97         | 235       | 291                                    | 655       |                                      |
| 2.11.04 | Program Pengelolaan Keanekaragama n Hayati (KEHATI)                                                      | Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan                                                             | Unit    | 2                        | 2          | 4                                              | 525       | 8          | 580       | 15         | 661       | 15                                     | 1.766     |                                      |
| 2.11.05 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Persentase tindakan verifikasi terhadap permohonan perizinan berusaha pengelolaan Limbah B3                               | Persen  | 100                      | 100        | 100                                            | 125       | 100        | 200       | 100        | 300       | 100                                    | 625       |                                      |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan                                                            | Indikator Program (outcome)                                                                                                                           | Satuan      | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |             | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |             |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                                                                                     | (3)                                                                                                                                                   | (4)         | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 2.11.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumedang                | Persen      | 100                      | 100        | 100                                            | 195       | 100        | 215       | 100        | 236       | 100                                    | 645       |                                   |
| 2.11.07 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH           | Persentase kecamatan yang teridentifikasi dan memiliki MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH yang diakui | Persen      | n/a                      | n/a        | 25                                             | 130       | 50         | 265       | 25         | 135       | 100                                    | 530       |                                   |
| 2.11.08 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyukluhan lingkungan hidup                                          | Persen      | n/a                      | n/a        | 23,00                                          | 200       | 32         | 220       | 41         | 240       | 41                                     | 660       |                                   |
| 2.11.09 | Program Penghargaan                                                                                                     | Jumlah penghargaan                                                                                                                                    | Penghargaan | n/a                      | n/a        | 30                                             | 100       | 30         | 110       | 30         | 115       | 90                                     | 325       |                                   |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan              | Indikator Program (outcome)                                             | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|         |                                                                           |                                                                         |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                         |
|         |                                                                           |                                                                         |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                         |
| (1)     | (2)                                                                       | (3)                                                                     | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                    |
|         | Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                         | bidang lingkungan hidup                                                 |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                         |
| 2.11.10 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                             | Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti                    | Persen | n/a                      | n/a        | 100                                            | 100       | 100        | 110       | 100        | 121       | 100                                    | 331       |                                         |
| 2.11.11 | Program Pengelolaan Persampahan                                           | Persentase Pengelolaan Sampah                                           | Persen | 35,14                    | 43,58      | 51,66                                          | 4.824     | 59,77      | 5.070     | 65,89      | 6.174     | 65,89                                  | 16.068    |                                         |
| 2.12    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                         |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                         |
| 2.12.01 | Program Pendaftaran Penduduk                                              | Perekaman KTP Elektronik                                                | Persen | 98                       | 99         | 99                                             | 876       | 99         | 920       | 99         | 996       | 99                                     | 2.792     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|         |                                                                           | Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Persen | 33                       | 43         | 47                                             | 548       | 50         | 575       | 53         | 623       | 53                                     | 1.745     |                                         |
|         |                                                                           | Persentase Kepemilikan KK                                               | Persen | 97                       | 98         | 99                                             | 767       | 99         | 805       | 99         | 872       | 99                                     | 2.443     |                                         |
| 2.12.02 | Program Pencatatan Sipil                                                  | Persentase Kepemilikan Akte                                             | Persen | 98                       | 99         | 99                                             | 400       | 99         | 544       | 99         | 650       | 99                                     | 1.594     |                                         |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                                                 | Satuan   | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab      |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                             |          | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                        |
|         |                                                              |                                                                                             |          |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                        |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                                         | (4)      | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                   |
|         |                                                              | Kelahiran 0-18 Tahun                                                                        |          |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                        |
|         |                                                              | Persentase Kepemilikan Akte Kematian                                                        | Persen   | 15                       | 20         | 30                                             | 240       | 40         | 326       | 50         | 390       | 50                                     | 956       |                                        |
|         |                                                              | Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim                                            | Persen   | 5                        | 6          | 7                                              | 160       | 8          | 218       | 9          | 260       | 9                                      | 638       |                                        |
| 2.12.03 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan      | Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Instansi | 52                       | 55         | 55                                             | 775       | 55         | 900       | 55         | 1.000     | 55                                     | 2.675     |                                        |
| 2.13    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |                                                                                             |          |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                        |
| 2.13.02 | Program Penataan Desa                                        | Persentase desa yang tertata                                                                | Persen   | 22                       | 25         | 26                                             | 200       | 30         | 220       | 37         | 363       | 37                                     | 783       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.03 | Program Peningkatan Kerjasama Desa                           | Persentase Desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa                                     | Persen   | n/a                      | n/a        | 0,37                                           | 100       | 0,74       | 110       | 1,11       | 121       | 1,11                                   | 331       |                                        |
| 2.13.04 | Program Administrasi                                         | Persentasi Desa Tertib                                                                      | Persen   | 30                       | 50         | 61,11                                          | 7.213     | 68,52      | 8.009     | 81,48      | 8.737     | 81,48                                  | 23.959    |                                        |



| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan                        | Indikator Program (outcome)                                                                                             | Satuan  | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                     |                                                                                                                         |         | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                                                                  |
|         |                                                                                     |                                                                                                                         |         |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                                                                  |
| (1)     | (2)                                                                                 | (3)                                                                                                                     | (4)     | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                                                                             |
|         | Pemerintahan Desa                                                                   | Administrasi sesuai aturan                                                                                              |         |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                                                                  |
| 2.13.05 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif                                                                 | Persen  | 89                       | 60         | 80                                             | 1.310     | 80         | 1.661     | 100        | 1.925     | 100                                    | 4.896     |                                                                                                  |
| 2.14    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA             |                                                                                                                         |         |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                                                                  |
| 2.14.02 | Program Pengendalian Penduduk                                                       | Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | Dokumen | 5                        | 5          | 10                                             | 206       | 10         | 227       | 10         | 249       | 10                                     | 682       | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|         |                                                                                     | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa                                                         | Persen  | 100                      | 85         | 40                                             | 512       | 60         | 563       | 100        | 620       | 100                                    | 1.695     |                                                                                                  |
| 2.14.03 | Program Pembinaan                                                                   | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan                                                                          | Persen  | 75,37                    | 75,67      | 75,97                                          | 3.230     | 76,27      | 3.553     | 76,57      | 3.908     | 76,57                                  | 10.690    |                                                                                                  |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Program (outcome)                               | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                               |                                                           |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                               |                                                           |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                           | (3)                                                       | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
|         | Keluarga Berencana (KB)                                       | menikah usia 15-49                                        |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
|         |                                                               | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | Persen | 9,05                     | 9,04       | 9,01                                           | 6.433     | 8,98       | 7.076     | 8,95       | 7.783     | 8,95                                   | 21.292    |                                   |
| 2.14.04 | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)  | Cakupan kelompok ketahanan yang aktif                     | Persen | 18,30                    | 20,87      | 50                                             | 1.063     | 60         | 1.170     | 70         | 1.287     | 70                                     | 3.519     |                                   |
|         |                                                               | Rata-rata usia kawin Pertama                              | Tahun  | 22,75                    | 22,1       | 22,1                                           | 1.063     | 22,1       | 1.170     | 22,1       | 1.287     | 22,1                                   | 3.519     |                                   |
| 2.15    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                        |                                                           |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 2.15.02 | Program Penyelenggara n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Konektivitas Kabupaten Kota                               | Persen | 45                       | 53,03      | 64,94                                          | 1.000     | 69,97      | 1.100     | 75         | 1.210     | 75                                     | 3.310     | Dinas Perhubunga n                |
|         |                                                               | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan              | Persen | 46,39                    | 46,59      | 47,26                                          | 15.907    | 47,93      | 17.151    | 48,59      | 18.901    | 48,59                                  | 51.959    |                                   |
| 2.16    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA         |                                                           |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Program (outcome)                                                                                                                  | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                           |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|         |                                                                |                                                                                                                                              |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                             |
|         |                                                                |                                                                                                                                              |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                             |
| (1)     | (2)                                                            | (3)                                                                                                                                          | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                                        |
| 2.16.02 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik                        | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah | Persen | 60                       | 60         | 70                                             | 3.389     | 80         | 3.727     | 90         | 4.100     | 90                                     | 11.216    | Dinas Komunikasi Dan Informatika , Persandian dan Statistik |
| 2.16.03 | Program Aplikasi Informatika                                   | Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik                                                                   | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 4.788     | 100        | 5.963     | 100        | 7.192     | 100                                    | 17.944    |                                                             |
| 2.17    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |                                                                                                                                              |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                             |
| 2.17.02 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                     | Persentase rekomendasi pelayanan izin usaha simpan pinjam                                                                                    | Persen | 4,38                     | 6,37       | 7,97                                           | 100       | 9,96       | 110       | 11,95      | 121       | 11,95                                  | 331       | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian          |
| 2.17.03 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                    | Persentase pengawasan dan pemeriksaan Koperasi                                                                                               | Persen | 23,90                    | 39,84      | 59,76                                          | 100       | 79,68      | 110       | 100        | 121       | 100                                    | 331       |                                                             |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan             | Indikator Program (outcome)                                                      | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                                          |                                                                                  |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                                          |                                                                                  |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                                      | (3)                                                                              | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 2.17.04 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                             | Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi | Persen | 23,90                    | 39,84      | 59,76                                          | 125       | 79,68      | 138       | 100        | 151       | 100                                    | 414       |                                   |
| 2.17.05 | Program Pendidkan dan Latihan Perkoperasian                              | Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian        | Persen | 29,88                    | 39,84      | 49,80                                          | 117       | 59,76      | 128       | 69,72      | 141       | 69,72                                  | 386       |                                   |
| 2.17.06 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                           | Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan               | Persen | 9,96                     | 30,28      | 60,16                                          | 150       | 80,08      | 165       | 100        | 182       | 100                                    | 497       |                                   |
| 2.17.07 | Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase Pemberdayaan usaha mikro                                              | Persen | 29,41                    | 30,62      | 31,36                                          | 710       | 32,09      | 781       | 32,82      | 859       | 32,82                                  | 2.349     |                                   |
| 2.17.08 | Program Pengembangan UMKM                                                | Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil                          | Persen | 1,79                     | 2,39       | 3,35                                           | 750       | 4,32       | 825       | 5,28       | 908       | 5,28                                   | 2.483     |                                   |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Program (outcome)                                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                  |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
|         |                                                               |                                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                    |
|         |                                                               |                                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                    |
| (1)     | (2)                                                           | (3)                                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                               |
| 2.18    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                    |                                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                    |
| 2:18:02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | Persentase minimal pemberian insentif penanaman modal                               | Persen | 45                       | 47,37      | 52,63                                          | 303       | 57,89      | 333       | 63,16      | 366       | 60                                     | 1.001     | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2:18:03 | Program Promosi Penanaman Modal                               | Persentase minat investasi di Sumedang                                              | Persen | n/a                      | 20         | 20                                             | 292       | 30         | 321       | 50         | 353       | 50                                     | 965       |                                                    |
| 2:18:04 | Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi                            | Persen | 80                       | 93         | 93                                             | 563       | 93         | 619       | 95         | 681       | 80                                     | 1.864     |                                                    |
| 2:18:05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP           | Persen | 70                       | 75         | 75                                             | 80        | 80         | 88        | 80         | 97        | 80                                     | 266       |                                                    |
| 2:18:06 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota | Persen | 80                       | 83,33      | 85                                             | 29        | 85         | 31        | 85         | 35        | 85                                     | 95        |                                                    |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                                              | Satuan     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                       |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                          |            | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                         |
|         |                                                              |                                                                                          |            |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                         |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                                      | (4)        | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                                    |
| 2.19    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA           |                                                                                          |            |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                         |
| 2.19.02 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan         | Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata | Orang      | 94.582                   | 95.282     | 95.982                                         | 990       | 96.682     | 1.089     | 97.382     | 1.198     | 97.382                                 | 3.277     | Dinas Pariwisata, kebudayaan , Kepemudaa n dan Olahraga |
| 2.19.03 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan       | Peningkatan Prestasi Olahraga                                                            | Medali     | 60                       | 30         | 20                                             | 3.515     | 21         | 3.866     | 70         | 4.253     | 70                                     | 11.633    |                                                         |
| 2.19.04 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                   | Jumlah organisasi kepramukaan (kwardcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi | Organisasi | 1                        | 1          | 1                                              | 500       | 1          | 550       | 1          | 605       | 1                                      | 1.655     |                                                         |
| 2.20    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                         |                                                                                          |            |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                         |
| 2.20.02 | Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral                  | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik                              | Persen     | n/a                      | n/a        | 100                                            | 304       | 100        | 334       | 100        | 368       | 100                                    | 1.007     | Dinas Komunikasi Dan Informatika , Persandian           |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Program (outcome)                                    | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                           |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|         |                                                                |                                                                |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                             |
|         |                                                                |                                                                |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                             |
| (1)     | (2)                                                            | (3)                                                            | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                                        |
|         |                                                                |                                                                |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           | dan Statistik                                               |
| 2.21    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                          |                                                                |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                             |
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase Tingkat Kematangan keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Persen | 54,26                    | 62,02      | 69,77                                          | 768       | 73,64      | 845       | 77,52      | 929       | 77,52                                  | 2.543     | Dinas Komunikasi Dan Informatika , Persandian dan Statistik |
| 2.22    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                          |                                                                |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                             |
| 2.22.02 | Program Pengembangan Kebudayaan                                | Presentase OPK yang dikembangkan                               | Persen | 36,36                    | 45,45      | 55                                             | 902       | 73         | 992       | 100        | 1.091     | 100                                    | 2.984     | Dinas Pariwisata, kebudayaan , Kepemudaa n dan Olahraga     |
| 2.22.03 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                      | Presentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan              | persen | 25                       | 30         | 40                                             | 30        | 50         | 33        | 60         | 36        | 60                                     | 99        |                                                             |
| 2.22.04 | Program Pembinaan Sejarah                                      | Presentase sejarah lokal yang direvitalisasi dan               | persen | 13,51                    | 15,2       | 17                                             | 110       | 19         | 121       | 20         | 133       | 20                                     | 364       |                                                             |
| 2.22.05 | Program Pelestraian dan                                        | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                      | persen | 13,61                    | 15,31      | 17                                             | 75        | 19         | 83        | 20         | 91        | 20                                     | 248       |                                                             |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                             |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                             |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                         | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
|         | Pengelolaan Cagar Budaya                                     |                             |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 2.22.06 | Program Pengelolaan Permuseuman                              | Jumlah pengunjung museum    | orang  | 1.850                    | 2.000      | 2.250                                          | 55        | 2.500      | 61        | 2.750      | 67        | 2.750                                  | 182       |                                   |
| 2.23    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                      |                             |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 2.23.02 | Program Pembinaan Perpustakaan                               | Tingkat Kegemaran Membaca   | Persen | 48,71                    | 50,6       | 60,60                                          | 927       | 65,60      | 1.019     | 70,60      | 1.121     | 70,60                                  | 3.067     | Dinas Arsip dan Perpustakaan      |
| 2.24    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                         |                             |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 2.24.02 | Program Pengelolaan Arsip                                    | Tingkat Ketersediaan Arsip  | Persen | 16,48                    | 26,76      | 38,35                                          | 495       | 48,68      | 545       | 60,43      | 599       | 60,43                                  | 1.638     | Dinas Arsip dan Perpustakaan      |
| 2.24.03 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                  | Tingkat Keberadaan Arsip    | Persen | 80                       | 100        | 100                                            | 391       | 100        | 430       | 100        | 473       | 100                                    | 1.294     |                                   |
| III     | UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                            |                             |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 3.25    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN            |                             |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |



| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                            | Satuan  | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                       |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                        |         | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                         |
|         |                                                              |                                                                        |         |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                         |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                    | (4)     | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                                    |
| 3.25.03 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                        | Poduksi Perikanan Tangkap                                              | Ton     | 1409,36                  | 1519,58    | 1641,15                                        | 774       | 1780,65    | 808       | 1940,91    | 784       | 1940,91                                | 2.366     | Dinas Perikanan dan Peternakan                          |
| 3.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                       | Produksi Perikanan Budidaya                                            | Ton     | 8411,71                  | 8574,11    | 8745,59                                        | 2.788     | 8964,23    | 3.044     | 9233,16    | 3.194     | 9233,16                                | 9.025     |                                                         |
| 3.25.05 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan        | Wilayah Perairan Umum Darat yang Diawasi Sumberdaya Perikanannya       | Wilayah | 10                       | 10         | 11                                             | 140       | 11         | 154       | 11         | 169       | 11                                     | 463       |                                                         |
| 3.25.06 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan             | Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persen  | 33,33                    | 25         | 40                                             | 220       | 42,86      | 242       | 50         | 266       | 50                                     | 728       |                                                         |
| 3.26    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                        |                                                                        |         |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                         |
| 3.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata          | Presentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan           | Persen  | 35,71                    | 37,5       | 44                                             | 347       | 50         | 382       | 55         | 420       | 55                                     | 1.150     | Dinas Pariwisata, kebudayaan , Kepemudaa n dan Olahraga |
| 3.26.03 | Program Pemasaran Pariwisata                                 | Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah                                     | Lokasi  | 1                        | 1          | 2                                              | 670       | 3          | 737       | 3          | 811       | 3                                      | 2.218     |                                                         |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan                                       | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|         |                                                                                                    |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                      |
|         |                                                                                                    |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                      |
| (1)     | (2)                                                                                                | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                 |
|         |                                                                                                    | yang dipromosikan                                                   |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                      |
| 3.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Karya Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI                     | Karya  | 8                        | 10         | 12                                             | 385       | 14         | 424       | 16         | 466       | 16                                     | 1.274     |                                      |
| 3.26.05 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan | Orang  | 200                      | 445        | 515                                            | 1.330     | 585        | 1.463     | 655        | 1.609     | 655                                    | 4.402     |                                      |
| 3.27    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                               |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                      |
| 3.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                               | Jumlah Produksi Komoditas Pertanian                                 | Ton    | 910.715                  | 921.559    | 935.276                                        | 12.559    | 953.853    | 13.815    | 977.549    | 15.196    | 977.549                                | 41.570    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|         |                                                                                                    | Peningkatan Populasi Ternak                                         | Persen | 5,85                     | 5,5        | 6,47                                           | 3.418     | 7,5        | 3.760     | 8,34       | 4.136     | 8,34                                   | 11.314    | Dinas Perikanan dan Peternakan       |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Program (outcome)                                                                  | Satuan      | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                                              |             | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                      |
|         |                                                                         |                                                                                              |             |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                      |
| (1)     | (2)                                                                     | (3)                                                                                          | (4)         | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                 |
| 3.27.03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)                                                           | Kali/ Tahun | 2,38                     | 2,43       | 2,47                                           | 19.662    | 2,52       | 23.769    | 2,57       | 30.301    | 2,57                                   | 73.731    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|         |                                                                         | Jumlah Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dan Dikembangkan                             | Unit        | 13                       | 6          | 26                                             | 1.245     | 26         | 1.370     | 26         | 1.506     | 26                                     | 4.121     | Dinas Perikanan dan Peternakan       |
| 3.27.04 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Jumlah Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan | Persen      | 96,76                    | 96,85      | 96,92                                          | 915       | 97,44      | 985       | 100        | 1.133     | 100                                    | 3.032     |                                      |
| 3.27.05 | Program Pengendalian Dan Penanggulanga n Bencana Pertanian              | Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                      | persen      | 13,77                    | 14,05      | 14,33                                          | 1.385     | 14,62      | 1.524     | 14,91      | 1.676     | 14,91                                  | 4.584     | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|         |                                                                         | Jumlah Wilayah yang Terkendali dari Bencana Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)          | Wilayah     | 22                       | 26         | 26                                             | 100       | 26         | 110       | 26         | 121       | 26                                     | 331       | Dinas Perikanan dan Peternakan       |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                           | Satuan      | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                       |             | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                    |
|         |                                                              |                                                                       |             |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                    |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                   | (4)         | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                               |
| 3.27.06 | Program Perizinan Usaha Pertanian                            | Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan                              | Rekomendasi | 4                        | 10         | 10                                             | 160       | 10         | 154       | 10         | 269       | 10                                     | 583       |                                                    |
| 3.27.07 | Program Penyuluhan Pertanian                                 | Cakupan bina kelompok petani                                          | persen      | 26,86                    | 33,58      | 40,29                                          | 1.089     | 47,01      | 1.198     | 53,72      | 1.318     | 53,72                                  | 3.605     | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan               |
| 3.28    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                         |                                                                       |             |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                    |
| 3.28.04 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya  | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi                      | Poin        | 63                       | 64         | 65                                             | 700       | 66         | 650       | 66         | 695       | 66                                     | 2.045     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan               |
| 3.30    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                       |                                                                       |             |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                    |
| 3.30.02 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                 | Persentase fasilitasi perizinan pendaftaran perusahaan                | Persen      | 100                      | 100        | 100                                            | 440       | 100        | 484       | 100        | 532       | 100                                    | 1.456     | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.03 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan            | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan | Persen      | 77,78                    | 77,78      | 88,89                                          | 627       | 88,89      | 690       | 100        | 759       | 100                                    | 2.075     |                                                    |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan       | Indikator Program (outcome)                                      | Satuan  | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
|         |                                                                    |                                                                  |         | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                    |
|         |                                                                    |                                                                  |         |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                    |
| (1)     | (2)                                                                | (3)                                                              | (4)     | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                               |
| 3.30.04 | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Tingkat ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting   | Persen  | 94,74                    | 100        | 100                                            | 425       | 100        | 468       | 100        | 514       | 100                                    | 1.407     |                                                    |
| 3.30.05 | Program Pengembangan Ekspor                                        | Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir                   | Persen  | 75                       | 75         | 83,33                                          | 525       | 91,67      | 578       | 100        | 635       | 100                                    | 1.738     |                                                    |
| 3.30.06 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen                    | Persentase alat metrologi yang sesuai standar                    | Persen  | 32,03                    | 34,14      | 36,26                                          | 275       | 38,37      | 303       | 40,49      | 333       | 40,49                                  | 910       |                                                    |
| 3.30.07 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri               | Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang | Persen  | 55                       | 63,33      | 71,67                                          | 275       | 80         | 303       | 88,33      | 333       | 88,33                                  | 910       |                                                    |
| 3.31    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                           |                                                                  |         |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                    |
| 3.31.02 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                       | Jumlah dokumen regulasi perencanaan dan pembangunan industri     | Dokumen | 0                        | 1          | 1                                              | 475       | 1          | 523       | 1          | 575       | 1                                      | 1.572     | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.31.03 | Program Pengendalian                                               | Persentase saran teknis terhadap                                 | Persen  | 75                       | 83,33      | 87,5                                           | 100       | 90         | 110       | 91,67      | 121       | 91,67                                  | 331       |                                                    |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                                  | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab   |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                              |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                     |
|         |                                                              |                                                                              |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                     |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                          | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                |
|         | Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                           | izin yang dikeluarkan                                                        |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                     |
| 3.31.04 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional       | Persentase pelaku industri yang mengakses sistem informasi industri nasional | Persen | 5,12                     | 6,84       | 8,57                                           | 150       | 10,29      | 165       | 12,02      | 182       | 12,02                                  | 497       |                                     |
| 3.32    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                      |                                                                              |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                     |
| 3.32.03 | Program Pembangunan Kawasan Trasmigrasi                      | Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya        | KK     | 71                       | 76         | 81                                             | 450       | 86         | 495       | 91         | 545       | 258                                    | 1.490     | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 3.32.04 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi                    | Jumlah satuan pemukiman yang dibina                                          | KK     | 25                       | 25         | 25                                             | 50        | 25         | 75        | 25         | 83        | 75                                     | 208       |                                     |
| IV      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                          |                                                                              |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                     |
| 4.01    | SEKRETARIAT DAERAH                                           |                                                                              |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                     |
| 4.01.02 | Program Pemerintahan dan                                     | Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan,                                | Persen | n/a                      | n/a        | 100                                            | 1.595     | 100        | 1.755     | 100        | 1.930     | 100                                    | 5.279     | Sekretariat Daerah                  |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                                                                          | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|      |                                                              |                                                                                                                      |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|      |                                                              |                                                                                                                      |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                                                                                                                  | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
|      | Kesejahteraan Rakyat                                         | Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang ditindaklanjuti                                               |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
|      |                                                              | Presentase Tertib Administrasi Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Kewilayahan                                         | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 755       | 100        | 830       | 100        | 913       | 100                                    | 2.498     |                                   |
|      |                                                              | Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang ditindaklanjuti | Persen | n/a                      | n/a        | 100                                            | 11.222    | 100        | 12.344    | 100        | 13.578    | 100                                    | 37.143    |                                   |
|      |                                                              | Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                                           | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 740       | 100        | 814       | 100        | 895       | 100                                    | 2.449     |                                   |
|      |                                                              | Persentase dokumen kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti                                                        | Persen | 95,52                    | 100        | 100                                            | 385       | 100        | 424       | 100        | 466       | 100                                    | 1.274     |                                   |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                                  | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                              |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                              |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                          | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
|         |                                                              | ke dalam perjanjian kerjasama                                                |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 4.01.03 | Program Perekonomian dan Pembangunan                         | Presentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti | Persen | n/a                      | n/a        | 100                                            | 1.252     | 100        | 1.412     | 100        | 1.571     | 100                                    | 4.235     |                                   |
|         |                                                              | Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang diselenggarakan         | Persen | n/a                      | n/a        | 90                                             | 380       | 95         | 417       | 100        | 459       | 100                                    | 1.256     |                                   |
|         |                                                              | Tingkat Kematangan UKPBJ                                                     | Level  | 2                        | 5          | 3                                              | 506       | 4          | 557       | 5          | 612       | 5                                      | 1.675     |                                   |
| 4.02    | SEKRETARIAT DPRD                                             |                                                                              |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 4.02.02 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD           | Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD                                  | Persen | 100                      | 100        | 33,94                                          | 21.091    | 32,12      | 25.069    | 33,94      | 29.086    | 100                                    | 75.247    | Sekretariat DPRD                  |
|         |                                                              | Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD                             | Persen | 100                      | 100        | 32,52                                          | 4.396     | 33,33      | 4.836     | 34,15      | 5.320     | 100                                    | 14.552    |                                   |
| V       | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                          |                                                                              |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |



| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan       | Indikator Program (outcome)                                                                           | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                    |                                                                                                       |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                                    |
|         |                                                                    |                                                                                                       |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                                    |
| (1)     | (2)                                                                | (3)                                                                                                   | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                                               |
| 5.01    | PERENCANAAN                                                        |                                                                                                       |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                                    |
| 5.01.02 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah                           | Persen | 96,3                     | 97,04      | 97,78                                          | 1.390     | 98,52      | 1.529     | 99,26      | 1.682     | 99,26                                  | 4.602     | Badan Perencanaaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persen | 94,01                    | 94,51      | 95                                             | 700       | 95,39      | 770       | 95,74      | 848       | 95,74                                  | 2.318     |                                                                    |
|         |                                                                    | Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA                 | Persen | 84,23                    | 84,65      | 85,06                                          | 821       | 85,49      | 903       | 85,84      | 993       | 85,84                                  | 2.716     |                                                                    |
|         |                                                                    | Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang                                      | Persen | 90,07                    | 90,89      | 91,55                                          | 1.206     | 92,21      | 1.326     | 92,88      | 1.459     | 92,88                                  | 3.991     |                                                                    |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                                    | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |             | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |             |           |             |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                |        | Tahun 2022               | Tahun 2023  | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025  |           | Tahun 2026  |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                                |        |                          |             | Target                                         | Rp (Juta) | Target      | Rp (Juta) | Target      | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                            | (4)    | (5)                      | (6)         | (7)                                            | (8)       | (9)         | (10)      | (11)        | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
|         |                                                              | Infrastruktur dan Kewilayahan                                                  |        |                          |             |                                                |           |             |           |             |           |                                        |           |                                   |
| 5.02    | KEUANGAN                                                     |                                                                                |        |                          |             |                                                |           |             |           |             |           |                                        |           |                                   |
| 5.02.02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                          | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran                                            | Waktu  | Tepat waktu              | Tepat waktu | Tepat waktu                                    | 3.080     | Tepat waktu | 3.672     | Tepat waktu | 4.377     | Tepat waktu                            | 11.129    | Badan Keuangan dan Aset Daerah    |
|         |                                                              | persentase realisasi penyerapan anggaran belanja terhadap rencana anggaran kas | Persen | 95                       | 97          | 97                                             | 488.265   | 98          | 529.395   | 99          | 573.974   | 99                                     | 1.591.634 |                                   |
|         |                                                              | persentase Ketepatan Penyampaian LKPD                                          | Persen | 95                       | 96          | 98                                             | 2.519     | 100         | 3.004     | 100         | 3.581     | 100                                    | 9.104     |                                   |
| 5.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                      | persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)                        | Persen | 90                       | 91          | 91                                             | 3.339     | 93          | 3.981     | 95          | 4.746     | 95                                     | 12.067    |                                   |
| 5.02.04 | Program Pengelolaan                                          | Persentase Pajak Daerah terhadap                                               | Persen | 43,47                    | 45,67       | 44,62                                          | 5.299     | 45,15       | 5.909     | 47,9        | 6.501     | 47,9                                   | 17.709    | Badan Pendapatan Daerah           |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                      |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                        |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                        |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                                   |
|         | Pendapatan Daerah                                            | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                        |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                        |
| 5.03    | KEPEGAWAIAN                                                  |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                        |
| 5.03.02 | Program Kepegawaian Daerah                                   | Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan              | Persen | 86                       | 87         | 88                                             | 1.329     | 89         | 1.462     | 90         | 1.608     | 90                                     | 4.399     | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia |
|         |                                                              | Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan | Persen | 84                       | 85         | 86                                             | 1.214     | 87         | 1.335     | 88         | 1.469     | 88                                     | 4.018     |                                                        |
|         |                                                              | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi               | Persen | 84                       | 86         | 87                                             | 2.949     | 88         | 3.244     | 89         | 3.568     | 89                                     | 9.761     |                                                        |
|         |                                                              | Persentase ASN yang berkinerja baik                                 | Persen | 95                       | 96         | 97                                             | 361       | 98         | 397       | 99         | 437       | 99                                     | 1.196     |                                                        |
| 5.05    | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                  |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                        |
| 5.05.02 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                   | Persentase Implementasi Hasil Penelitian dan Inovasi                | Persen | 89,78                    | 90         | 90,9                                           | 682       | 91,81      | 750       | 92,73      | 825       | 93,58                                  | 2.257     | Badan Perencanaan Pembangunan                          |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                           | Satuan   | Kondisi Kinerja Awal RPD |                 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |                 |           |                 |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab      |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                       |          | Tahun 2022               | Tahun 2023      | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025      |           | Tahun 2026      |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                        |
|         |                                                              |                                                                       |          |                          |                 | Target                                         | Rp (Juta) | Target          | Rp (Juta) | Target          | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                        |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                   | (4)      | (5)                      | (6)             | (7)                                            | (8)       | (9)             | (10)      | (11)            | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                   |
|         |                                                              | Indeks Inovasi Daerah                                                 | Kategori | Sangat Inovatif          | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif                                | 649       | sangat inovatif | 714       | sangat inovatif | 785       | sangat inovatif                        | 2.148     | an, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| VI      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                         |                                                                       |          |                          |                 |                                                |           |                 |           |                 |           |                                        |           |                                        |
| 6.01    | INSPEKTORAT DAERAH                                           |                                                                       |          |                          |                 |                                                |           |                 |           |                 |           |                                        |           |                                        |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pengawasan                          | Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti | Persen   | 72                       | 75              | 80                                             | 4.050     | 85              | 4.450     | 90              | 4.905     | 90                                     | 13.405    | Inspektorat Daerah                     |
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi      | Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP       | Persen   | 68                       | 75              | 80                                             | 2.650     | 84              | 2.915     | 88              | 3.207     | 88                                     | 8.772     |                                        |
| VII     | UNSUR KEWILAYAHAN                                            |                                                                       |          |                          |                 |                                                |           |                 |           |                 |           |                                        |           |                                        |
| 1       | KECAMATAN CIMALAKA                                           |                                                                       |          |                          |                 |                                                |           |                 |           |                 |           |                                        |           |                                        |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan                        | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                          | Persen   | 100                      | 100             | 100                                            | 69        | 100             | 100       | 100             | 119       | 100                                    | 288       | Kecamatan Cimalaka                     |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
|         | Dan Pelayanan Publik                                         |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 71,43                    | 80,36      | 84,82                                          | 425       | 89,29      | 468       | 100        | 608       | 100                                    | 1.501     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 20        | 100        | 22        | 100        | 29        | 100                                    | 71        |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 35        | 100        | 38        | 100        | 50        | 100                                    | 123       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 21,43                    | 42,86      | 57,14                                          | 76        | 71,43      | 78        | 100        | 134       | 100                                    | 288       |                                   |
| 2       | KECAMATAN BUAHDUA                                            |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan                        | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 95        | 100        | 146       | 100        | 155       | 100                                    | 396       | Kecamatan Buahdua                 |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
|         | Dan Pelayanan Publik                                         |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 83,33                    | 88,10      | 92,86                                          | 510       | 97,62      | 610       | 100        | 660       | 100                                    | 1.780     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 45        | 100        | 50        | 100        | 75        | 100                                    | 170       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 66        | 100        | 48        | 100        | 50        | 100                                    | 164       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 35,71                    | 50         | 71,43                                          | 145       | 85,71      | 165       | 100        | 198       | 100                                    | 507       |                                   |
| 3       | KECAMATAN RANCAKALONG                                        |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 50        | 100        | 55        | 100        | 105       | 100                                    | 210       | Kecamatan Rancakalongo            |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 81,25                    | 87,5       | 100                                            | 447       | 100        | 503       | 100        | 584       | 100                                    | 1.534     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 20        | 100        | 30        | 100        | 62        | 100                                    | 112       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 35        | 100        | 22        | 100        | 24        | 100                                    | 81        |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 80                       | 100        | 100                                            | 75        | 100        | 117       | 100        | 189       | 100                                    | 381       |                                   |
| 4       | KECAMATAN SUMEDANG SELATAN                                   |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 280       | 100        | 308       | 100        | 391       | 100                                    | 979       | Kecamatan Sumedang Selatan        |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                                  | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                              |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                              |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                          | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                                 | Persen | 83,33                    | 89,29      | 95,24                                          | 3.745     | 97,62      | 3.999     | 100        | 4.387     | 100                                    | 12.131    |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan                 | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 65        | 100        | 55        | 100        | 61        | 100                                    | 181       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum             | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani          | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 80        | 100        | 33        | 100        | 36        | 100                                    | 149       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA / Kelurahan minimal Berkategori Baik | Persen | 50                       | 64,29      | 78,57                                          | 195       | 92,86      | 215       | 100        | 236       | 100                                    | 645       |                                   |
| 5       | KECAMATAN JATIGEDE                                           |                                                                              |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                                 | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 265       | 100        | 291       | 100        | 321       | 100                                    | 877       | Kecamatan Jatigede                |



| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 50                       | 62,5       | 75,00                                          | 628       | 87,50      | 674       | 100        | 741       | 100                                    | 2.042     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 74        | 100        | 94        | 100        | 120       | 100                                    | 287       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 48        | 100        | 36        | 100        | 40        | 100                                    | 124       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 54,55                    | 72,73      | 81,82                                          | 186       | 90,91      | 208       | 100        | 262       | 100                                    | 656       |                                   |
| 6       | KECAMATAN TOMO                                               |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 143       | 100        | 159       | 100        | 175       | 100                                    | 477       | Kecamatan Tomo                    |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 50                       | 62,5       | 75                                             | 445       | 87,5       | 548       | 100        | 600       | 100                                    | 1.593     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 17        | 100        | 25        | 100        | 28        | 100                                    | 69        |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 58        | 100        | 52        | 100        | 57        | 100                                    | 167       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 55,56                    | 66,67      | 77,78                                          | 100       | 88,89      | 126       | 100        | 150       | 100                                    | 375       |                                   |
| 7       | KECAMATAN JATINANGOR                                         |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 290       | 100        | 319       | 100        | 351       | 100                                    | 959       | Kecamatan Jatinangor              |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 67,71                    | 72,92      | 83,33                                          | 788       | 93,75      | 867       | 100        | 954       | 100                                    | 2.609     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 55        | 100        | 60        | 100        | 66        | 100                                    | 181       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 51        | 100        | 34        | 100        | 38        | 100                                    | 123       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 8,33                     | 50         | 66,67                                          | 156       | 83,33      | 172       | 100        | 189       | 100                                    | 516       |                                   |
| 8       | KECAMATAN SITURAJA                                           |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 117       | 100        | 129       | 100        | 183       | 100                                    | 428       | Kecamatan Situraja                |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 54,17                    | 58,33      | 66,67                                          | 455       | 80         | 510       | 100        | 568       | 100                                    | 1.533     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 30        | 100        | 33        | 100        | 44        | 100                                    | 107       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 40        | 100        | 45        | 100        | 50        | 100                                    | 135       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 13,33                    | 40         | 60                                             | 120       | 80         | 131       | 100        | 179       | 100                                    | 429       |                                   |
| 9       | KECAMATAN CIMANGGUNG                                         |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Point  | 100                      | 100        | 100                                            | 159       | 100        | 175       | 100        | 192       | 100                                    | 525       | Kecamatan Cimanggun g             |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 73,86                    | 79,55      | 90,91                                          | 513       | 96,59      | 564       | 100        | 620       | 100                                    | 1.696     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 22        | 100        | 24        | 100        | 27        | 100                                    | 73        |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 69        | 100        | 43        | 100        | 47        | 100                                    | 158       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 9,09                     | 54,55      | 72,73                                          | 126       | 90,91      | 398       | 100        | 438       | 100                                    | 961       |                                   |
| 10      | KECAMATAN SUKASARI                                           |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 183       | 100        | 251       | 100        | 298       | 100                                    | 732       | Kecamatan Sukasari                |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 59,52                    | 71,43      | 83,33                                          | 510       | 95,24      | 584       | 100        | 698       | 100                                    | 1.792     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 34        | 100        | 41        | 100        | 50        | 100                                    | 125       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 59        | 100        | 32        | 100        | 35        | 100                                    | 126       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 14,29                    | 28,57      | 57,14                                          | 116       | 85,71      | 151       | 100        | 168       | 100                                    | 435       |                                   |
| 11      | KECAMATAN SURIAN                                             |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 246       | 100        | 270       | 100        | 297       | 100                                    | 813       | Kecamatan Surian                  |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 74,07                    | 81,48      | 92,59                                          | 441       | 96,30      | 485       | 100        | 657       | 100                                    | 1.582     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 25        | 100        | 28        | 100        | 31        | 100                                    | 84        |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 56        | 100        | 56        | 100        | 61        | 100                                    | 173       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 66,67                    | 77,78      | 88,89                                          | 81        | 100        | 89        | 100        | 97        | 100                                    | 267       |                                   |
| 12      | KECAMATAN DARMARAJA                                          |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 181       | 100        | 222       | 100        | 273       | 100                                    | 676       | Kecamatan Darmaraja               |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 67,71                    | 72,92      | 83,33                                          | 540       | 93,75      | 615       | 100        | 750       | 100                                    | 1.905     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 20        | 100        | 30        | 100        | 40        | 100                                    | 90        |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 46        | 100        | 30        | 100        | 50        | 100                                    | 126       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 8,33                     | 50         | 66,67                                          | 90        | 83,33      | 135       | 100        | 185       | 100                                    | 410       |                                   |
| 13      | KECAMATAN CISITU                                             |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 141       | 100        | 175       | 100        | 221       | 100                                    | 537       | Kecamatan Cisitu                  |



| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 75                       | 81,25      | 87,5                                           | 416       | 93,75      | 457       | 100        | 553       | 100                                    | 1.426     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 25        | 100        | 28        | 100        | 30        | 100                                    | 83        |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 45        | 100        | 50        | 100        | 54        | 100                                    | 149       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 10                       | 40         | 60                                             | 40        | 80         | 28        | 100        | 173       | 100                                    | 240       |                                   |
| 14      | KECAMATAN CONGGEANG                                          |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 110       | 100        | 121       | 100        | 133       | 100                                    | 364       | Kecamatan Conggeang               |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 67,71                    | 72,92      | 83,33                                          | 421       | 93,75      | 463       | 100        | 509       | 100                                    | 1.393     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 7         | 100        | 8         | 100        | 8         | 100                                    | 23        |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 17        | 100        | 18        | 100        | 20        | 100                                    | 55        |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 8,33                     | 50         | 66,67                                          | 28        | 83,33      | 30        | 100        | 33        | 100                                    | 91        |                                   |
| 15      | KECAMATAN PASEH                                              |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 75        | 100        | 83        | 100        | 90        | 100                                    | 248       | Kecamatan Paseh                   |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 62,5                     | 68,75      | 75                                             | 421       | 93,75      | 463       | 100        | 509       | 100                                    | 1.393     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 35        | 100        | 39        | 100        | 42        | 100                                    | 116       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 77        | 100        | 30        | 100        | 33        | 100                                    | 140       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 10                       | 50         | 70                                             | 70        | 80         | 124       | 100        | 180       | 100                                    | 374       |                                   |
| 16      | KECAMATAN TANJUNGSARI                                        |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 211       | 100        | 254       | 100        | 280       | 100                                    | 745       | Kecamatan Tanjungsari             |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 493       | 100        | 544       | 100        | 599       | 100                                    | 1.637     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 116       | 100        | 127       | 100        | 154       | 100                                    | 397       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 88        | 100        | 97        | 100        | 106       | 100                                    | 291       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 119       | 100        | 143       | 100        | 178       | 100                                    | 439       |                                   |
| 17      | KECAMATAN PAMULIHAN                                          |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 125       | 100        | 137       | 100        | 151       | 100                                    | 414       | Kecamatan Pamulihan               |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 83,33                    | 87,88      | 92,42                                          | 514       | 95,45      | 565       | 100        | 622       | 100                                    | 1.701     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 39        | 100        | 52        | 100        | 58        | 100                                    | 148       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 48        | 100        | 52        | 100        | 57        | 100                                    | 157       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 54,55                    | 63,64      | 72,73                                          | 82        | 90,91      | 100       | 100        | 110       | 100                                    | 293       |                                   |
| 18      | KECAMATAN CISARUA                                            |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 105       | 100        | 136       | 100        | 169       | 100                                    | 410       | Kecamatan Cisarua                 |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 62,5                     | 71,43      | 89,29                                          | 440       | 94,64      | 484       | 100        | 532       | 100                                    | 1.456     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 70        | 100        | 77        | 100        | 85        | 100                                    | 232       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 70        | 100        | 77        | 100        | 36        | 100                                    | 183       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 0                        | 57,14      | 71,43                                          | 100       | 85,71      | 150       | 100        | 176       | 100                                    | 426       |                                   |
| 19      | KECAMATAN GANEAS                                             |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 183       | 100        | 201       | 100        | 221       | 100                                    | 605       | Kecamatan Ganeas                  |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 50                       | 62,5       | 75                                             | 377       | 87,5       | 414       | 100        | 456       | 100                                    | 1.247     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 21        | 100        | 23        | 100        | 25        | 100                                    | 70        |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 41        | 100        | 29        | 100        | 32        | 100                                    | 101       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 12,5                     | 25         | 50                                             | 70        | 75         | 76        | 100        | 84        | 100                                    | 230       |                                   |
| 20      | KECAMATAN UJUNGJAYA                                          |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 160       | 100        | 176       | 100        | 193       | 100                                    | 529       | Kecamatan Ujungjaya               |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 74,07                    | 86,42      | 91,36                                          | 523       | 96,30      | 582       | 100        | 640       | 100                                    | 1.744     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 42        | 100        | 46        | 100        | 51        | 100                                    | 139       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 85        | 100        | 87        | 100        | 96        | 100                                    | 268       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 8,33                     | 50         | 66,67                                          | 81        | 83,33      | 92        | 100        | 101       | 100                                    | 274       |                                   |
| 21      | KECAMATAN TANJUNGKERTA                                       |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 112       | 100        | 123       | 100        | 136       | 100                                    | 371       | Kecamatan Tanjungkerta            |



| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 67,71                    | 72,92      | 83,33                                          | 469       | 93,75      | 516       | 100        | 568       | 100                                    | 1.554     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 15        | 100        | 16        | 100        | 18        | 100                                    | 48        |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 38        | 100        | 42        | 100        | 46        | 100                                    | 126       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 8,33                     | 50         | 66,67                                          | 67        | 83,33      | 82        | 100        | 90        | 100                                    | 239       |                                   |
| 22      | KECAMATAN SUMEDANG UTARA                                     |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 292       | 100        | 321       | 100        | 353       | 100                                    | 966       | Kecamatan Sumedang Utara          |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                                  | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                              |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                              |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                          | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                                 | Persen | 83,33                    | 89,74      | 94,87                                          | 2.642     | 97,44      | 2.906     | 100        | 3.197     | 100                                    | 8.746     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan                 | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 64        | 100        | 70        | 100        | 77        | 100                                    | 211       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum             | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani          | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 121       | 100        | 23        | 100        | 26        | 100                                    | 171       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA / Kelurahan minimal Berkategori Baik | Persen | 80                       | 100        | 100                                            | 171       | 100        | 188       | 100        | 207       | 100                                    | 566       |                                   |
| 23      | KECAMATAN WADO                                               |                                                                              |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                                 | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 85        | 100        | 94        | 100        | 128       | 100                                    | 306       | Kecamatan Wado                    |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 81,25                    | 87,5       | 93,75                                          | 177       | 100        | 388       | 100        | 526       | 100                                    | 1.092     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 6         | 100        | 7         | 100        | 13        | 100                                    | 26        |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 120       | 100        | 132       | 100        | 164       | 100                                    | 416       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 10                       | 50         | 80                                             | 21        | 100        | 23        | 100        | 70        | 100                                    | 114       |                                   |
| 24      | KECAMATAN CIBUGEL                                            |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Point  | 100                      | 100        | 100                                            | 93        | 100        | 119       | 100        | 141       | 100                                    | 352       | Kecamatan Cibugel                 |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 28,57                    | 42,86      | 71,43                                          | 529       | 85,71      | 625       | 100        | 754       | 100                                    | 1.907     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 25        | 100        | 32        | 100        | 38        | 100                                    | 95        |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 26        | 100        | 30        | 100        | 35        | 100                                    | 91        |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 14                       | 29         | 43                                             | 115       | 72         | 169       | 100        | 200       | 100                                    | 484       |                                   |
| 25      | KECAMATAN TANJUNGMEDAR                                       |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 120       | 100        | 165       | 100        | 204       | 100                                    | 489       | Kecamatan Tanjungme dar           |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 80,25                    | 86,42      | 92,59                                          | 368       | 96,30      | 417       | 100        | 492       | 100                                    | 1.277     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 20        | 100        | 40        | 100        | 50        | 100                                    | 110       |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 38        | 100        | 30        | 100        | 35        | 100                                    | 103       |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 55,56                    | 66,67      | 77,78                                          | 70        | 88,89      | 140       | 100        | 175       | 100                                    | 385       |                                   |
| 26      | KECAMATAN JATINUNGGAL                                        |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase masyarakat yang diberikan layanan                        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 135       | 100        | 157       | 100        | 172       | 100                                    | 464       | Kecamatan Jatinunggal             |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome)                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                     |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                              |                                                                     |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                        | Persen | 50                       | 62,5       | 75                                             | 435       | 87,5       | 509       | 100        | 557       | 100                                    | 1.501     |                                   |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan        | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 17        | 100        | 25        | 100        | 28        | 100                                    | 69        |                                   |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                      | 100        | 100                                            | 33        | 100        | 28        | 100        | 30        | 100                                    | 90        |                                   |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik    | Persen | 55,56                    | 66,67      | 77,78                                          | 73        | 88,89      | 91        | 100        | 95        | 100                                    | 259       |                                   |
| VIII    | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                      |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 8.01    | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                  |                                                                     |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                   |
| 8.01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan                     | Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan             | Persen | 73,33                    | 40         | 94,17                                          | 176       | 95,83      | 594       | 100        | 662       | 100                                    | 1.432     | Badan Kesatuan                    |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan                                                                           | Indikator Program (outcome)                                                                  | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|         |                                                                                                                                        |                                                                                              |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|         |                                                                                                                                        |                                                                                              |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)     | (2)                                                                                                                                    | (3)                                                                                          | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
|         | Karakter Kebangsaan                                                                                                                    | karakter kebangsaan                                                                          |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           | Bangsa dan Politik                |
| 8.01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Jumlah orang yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | Orang  | 0                        | 100        | 250                                            | 4.130     | 100        | 4.143     | 100        | 4.397     | 450                                    | 12.670    |                                   |
| 8.01.04 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n                                                                         | Cakupan Ormas yang di bina kategori aktif                                                    | Persen | 19,38                    | 19,38      | 38,76                                          | 110       | 100        | 121       | 100        | 285       | 100                                    | 516       |                                   |
| 8.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                                               | Jumlah orang yang dibina dilingkup bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya               | Orang  | 0                        | 150        | 180                                            | 357       | 210        | 393       | 260        | 432       | 260                                    | 1.182     |                                   |

| Kode    | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan                                              | Indikator Program (outcome)                   | Satuan          | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
|         |                                                                                                           |                                               |                 | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                    |
|         |                                                                                                           |                                               |                 |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                    |
| (1)     | (2)                                                                                                       | (3)                                           | (4)             | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                               |
| 8.01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani | Potensi Konflik | 15                       | 15         | 14                                             | 4.179     | 13         | 4.597     | 12         | 5.056     | 12                                     | 13.832    |                                                    |
| X       | NON URUSAN                                                                                                |                                               |                 |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                    |
| X.XX    |                                                                                                           |                                               |                 |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           |                                                    |
| X.XX.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                               | Nilai SAKIP perangkat daerah                  | Kategori        | A                        | A          | A                                              | 770.092   | A          | 847.316   | A          | 931.869   | A                                      | 2.549.277 | Dinas Pendidikan                                   |
|         |                                                                                                           |                                               |                 | A                        | A          | A                                              | 447.431   | A          | 474.868   | A          | 499.759   | A                                      | 1.422.059 | Dinas Kesehatan                                    |
|         |                                                                                                           |                                               |                 | A                        | A          | A                                              | 25.351    | A          | 38.891    | A          | 38.891    | A                                      | 121.062   | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                |
|         |                                                                                                           |                                               |                 | A                        | A          | A                                              | 8.479     | A          | 9.327     | A          | 10.260    | A                                      | 28.067    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |



| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab        |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
|      |                                                              |                             |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                          |
|      |                                                              |                             |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                          |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                         | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                     |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 14.400    | A          | 15.710    | A          | 16.661    | A                                      | 46.771    | Satuan Polisi Pamong Praja               |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | A          | A                                              | 2.784     | A          | 3.057     | A          | 3.361     | A                                      | 9.203     | Badan Penanggula ngan Bencana Daerah     |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 10.281    | A          | 9.972     | A          | 10.666    | A                                      | 30.919    | Dinas Sosial                             |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 8.239     | A          | 9.143     | A          | 10.061    | A                                      | 27.444    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si     |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | BB         | BB                                             | 25.059    | BB         | 27.538    | A          | 30.104    | A                                      | 82.701    | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan     |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | A          | A                                              | 9.267     | A          | 10.047    | A          | 10.978    | A                                      | 30.292    | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                              |                             |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                                                                    |
|      |                                                              |                             |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                                                                    |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                         | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                                                                               |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | A          | A                                              | 8.230     | A          | 8.758     | A          | 9.488     | A                                      | 26.476    | Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Desa                                                          |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | BB         | BB                                             | 13.352    | BB         | 8.758     | A          | 16.156    | A                                      | 38.266    | Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga n Anak |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | BB         | BB                                             | 20.613    | A          | 23.022    | A          | 25.288    | A                                      | 68.924    | Dinas Perhubunga n                                                                                 |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 8.134     | A          | 8.252     | A          | 8.445     | A                                      | 24.831    | Dinas Komunikasi , Informatika , Persandian dan Statistik                                          |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                                    |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|      |                                                              |                             |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                                      |
|      |                                                              |                             |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                                      |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                         | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                                                 |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 12.427    | A          | 13.670    | A          | 15.037    | A                                      | 41.134    | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | A          | A                                              | 9.613     | A          | 10.574    | A          | 11.631    | A                                      | 31.818    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | A          | A                                              | 9.066     | A          | 9.973     | A          | 10.970    | A                                      | 30.010    | Dinas Arsip dan Perpustakaan                                         |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 15.754    | A          | 17.439    | A          | 19.293    | A                                      | 52.485    | Dinas Perikanan dan Peternakan                                       |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 8.615     | A          | 9.477     | A          | 10.425    | A                                      | 28.517    | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga               |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab                                  |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|      |                                                              |                             |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                                                    |
|      |                                                              |                             |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                                                    |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                         | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                                                               |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 37.115    | A          | 38.686    | A          | 38.399    | A                                      | 114.201   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                               |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 59.666    | A          | 65.633    | A          | 72.196    | A                                      | 197.496   | Sekretariat Daerah                                                 |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 49.072    | A          | 52.110    | A          | 55.811    | A                                      | 156.994   | Sekretariat DPRD                                                   |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | A          | A                                              | 13.664    | A          | 15.031    | A          | 16.534    | A                                      | 45.228    | Badan Perencanaaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | A          | A                                              | 109.548   | A          | 127.375   | A          | 147.491   | A                                      | 384.415   | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                     |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 15.318    | A          | 16.770    | A          | 18.446    | A                                      | 50.535    | Badan Pendapatan Daerah                                            |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |               | Perangkat Daerah Penanggung jawab                      |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|      |                                                              |                             |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |               |                                                        |
|      |                                                              |                             |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta)     |                                                        |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                         | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)          | (15)                                                   |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 10.209    | A          | 11.230    | A          | 12.353    | A                                      | 33.791        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 16.748    | A          | 18.428    | A          | 20.261    | A                                      | 55.437        | Inspektorat Daerah                                     |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 3.048     | A          | 3.160     | A          | 3.283     | A                                      | 9.490.889.363 | Kecamatan Wado                                         |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 2.570     | A          | 2.779     | A          | 3.064     | A                                      | 8.412         | Kecamatan Jatinunggal                                  |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 3.555     | A          | 3.844     | A          | 4.065     | A                                      | 11.465        | Kecamatan Darmaraja                                    |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 2.633     | A          | 2.788     | A          | 2.972     | A                                      | 8.394         | Kecamatan Cibugel                                      |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 2.906     | A          | 3.193     | A          | 3.292     | A                                      | 9.391         | Kecamatan Cisitu                                       |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 3.403     | A          | 3.733     | A          | 4.015     | A                                      | 11.151        | Kecamatan Situraja                                     |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 3.153     | A          | 3.468     | A          | 3.815     | A                                      | 10.437        | Kecamatan Conggeang                                    |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|      |                                                              |                             |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|      |                                                              |                             |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                         | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | A          | A                                              | 3.131     | A          | 3.452     | A          | 3.753     | A                                      | 10.335    | Kecamatan Paseh                   |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 2.527     | A          | 2.786     | A          | 2.941     | A                                      | 8.254     | Kecamatan Surian                  |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 2.605     | A          | 2.795     | A          | 3.057     | A                                      | 8.457     | Kecamatan Buahdua                 |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 3.338     | A          | 3.635     | A          | 3.964     | A                                      | 10.937    | Kecamatan Tanjungsari             |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 2.768     | A          | 2.978     | A          | 3.192     | A                                      | 8.938     | Kecamatan Sukasari                |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 3.548     | A          | 3.783     | A          | 4.170     | A                                      | 11.502    | Kecamatan Pamulihan               |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | A          | A                                              | 3.175     | A          | 3.266     | A          | 3.593     | A                                      | 10.034    | Kecamatan Cimanggun g             |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 3.476     | A          | 3.845     | A          | 4.230     | A                                      | 11.551    | Kecamatan Jatinangor              |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 3.203     | A          | 3.486     | A          | 3.670     | A                                      | 10.359    | Kecamatan Rancakalon g            |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 7.699     | A          | 8.661     | A          | 9.487     | A                                      | 25.846    | Kecamatan Sumedang Selatan        |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|      |                                                              |                             |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|      |                                                              |                             |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                         | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 7.273     | A          | 7.498     | A          | 7.745     | A                                      | 22.516    | Kecamatan Sumedang Utara          |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 2.469     | A          | 2.721     | A          | 2.993     | A                                      | 8.183     | Kecamatan Ganeas                  |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 2.827     | A          | 3.102     | A          | 3.412     | A                                      | 9.340     | Kecamatan Tanjungker ta           |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 2.718     | A          | 2.876     | A          | 3.078     | A                                      | 8.672     | Kecamatan Tanjungme dar           |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 3.248     | A          | 3.548     | A          | 3.738     | A                                      | 10.535    | Kecamatan Cimalaka                |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 3.200     | A          | 3.459     | A          | 3.823     | A                                      | 10.482    | Kecamatan Cisarua                 |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 2.295     | A          | 2.452     | A          | 2.687     | A                                      | 7.434     | Kecamatan Tomo                    |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 3.210     | A          | 3.528     | A          | 3.881     | A                                      | 10.618    | Kecamatan Ujungjaya               |
|      |                                                              |                             |        | A                        | A          | A                                              | 3.038     | A          | 3.359     | A          | 3.645     | A                                      | 10.041    | Kecamatan Jatigede                |
|      |                                                              |                             |        | BB                       | A          | A                                              | 4.793     | A          | 5.272     | A          | 5.799     | A                                      | 15.864    | Badan Kesatuan                    |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |                                        |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|      |                                                              |                             |        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                                     |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |           |                                   |
|      |                                                              |                             |        |                          |            | Target                                         | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target     | Rp (Juta) | Target                                 | Rp (Juta) |                                   |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                         | (4)    | (5)                      | (6)        | (7)                                            | (8)       | (9)        | (10)      | (11)       | (12)      | (13)                                   | (14)      | (15)                              |
|      |                                                              |                             |        |                          |            |                                                |           |            |           |            |           |                                        |           | Bangsa dan Politik                |



## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, untuk menggambarkan capaian kinerja pemerintahan daerah secara umum digunakan indikator makro.

#### **8.1. INDIKATOR MAKRO**

Indikator makro adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Lebih lanjut penetapan Indikator Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel 8.1 berikut.

**Tabel 8.1**  
**Indikator Makro Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2024-2026**

| No | INDIKATOR                          | SATUAN      | TARGET      |             |             | KONDISI AKHIR |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |                                    |             | 2024        | 2025        | 2026        |               |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   | Poin        | 73,11-73,99 | 73,74-74,59 | 74,40-75,30 | 74,40-75,30   |
| 2  | Tingkat Kemiskinan                 | Persen      | 9,50-7,26   | 9,43-7,40   | 9,28-7,25   | 9,28-7,25     |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen      | 7,00-6,47   | 6,75-5,94   | 6,22-5,15   | 6,22-5,15     |
| 4  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)     | Persen      | 5,30-6,50   | 5,50-6,82   | 5,65-7,00   | 5,65-7,00     |
| 5  | Gini Ratio                         | Poin        | 0,36-0,33   | 0,35-0,32   | 0,34-0,31   | 0,34-0,31     |
| 6  | PDRB per Kapita (ADHB)             | Juta Rupiah | 36,20-38,32 | 38,18-40,24 | 40,15-42,72 | 40,15-42,72   |

**8.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel 8.2.

**Tabel 8.2**  
**Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026**

| No | Indikator                                                                          | Satuan | Kondisi Awal |             | Target Tahun |             |             | Kondisi Akhir |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|    |                                                                                    |        | 2022         | 2023        | 2024         | 2025        | 2026        |               |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                                   | Poin   | 72,69        | 72,40-73,37 | 73,11-73,99  | 73,74-74,59 | 74,40-75,30 | 74,40-75,30   |
| 2  | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)                                                       | Tahun  | 8,72         | 8,81-9,00   | 8,89-9,05    | 9,00-9,10   | 9,06-9,20   | 9,06-9,20     |
| 3  | Harapan Lama Sekolah (HLS)                                                         | Tahun  | 12,99        | 13,05-13,12 | 13,06-13,16  | 13,07-13,17 | 13,08-13,18 | 13,08-13,18   |
| 4  | Angka Harapan Hidup (AHH)                                                          | Tahun  | 72,91        | 72,70-73,20 | 73,00-73,32  | 73,24-73,63 | 73,33-73,69 | 73,33-73,69   |
| 5  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                    | Poin   | 95,09        | 95,26-95,44 | 95,19-95,62  | 95,29-95,16 | 95,38-95,69 | 95,38-95,69   |
| 6  | Indesk Pemberdayaan Gender (IDG)                                                   | Poin   | 72,23        | 70,25-71,15 | 70,95-72,18  | 71,77-73,43 | 73,00-75,05 | 73,00-75,05   |
| 7  | Indeks Kerukunan Umat Beragama                                                     | Poin   | 75,32        | 74,5        | 75           | 75,5        | 76          | 76            |
| 8  | Indeks Pembangunan Pemuda                                                          | Poin   | 44           | 45          | 46           | 47          | 48          | 48            |
| 9  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)                                                     | Persen | 5,03         | 5,20-6,20   | 5,30-6,50    | 5,50-6,82   | 5,65-7,00   | 5,30-6,50     |
| 10 | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan                                        | Persen | 6,85         | 5,00-5,85   | 7,56-8,45    | 8,04-9,23   | 8,23-10,61  | 8,23-10,61    |
| 11 | Laju pertumbuhan sector perdagangan besar, Eceran, reparasi mobil dan sepeda Motor | Persen | 4,71         | 4,84-5,60   | 5,59-7,50    | 6,37-8,28   | 7,18-9,09   | 7,18-9,09     |

| No | Indikator                                                    | Satuan          | Kondisi Awal |             | Target Tahun |             |             | Kondisi Akhir |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|    |                                                              |                 | 2022         | 2023        | 2024         | 2025        | 2026        |               |
| 12 | Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  | Persen          | 4,18         | 2,44-3,59   | 3,28-4,94    | 3,48-5,15   | 3,69-5,35   | 3,69-5,35     |
| 13 | Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Persen          | 8,15         | 3,25-3,81   | 8,01-9,75    | 9,44-10,13  | 9,82-10,86  | 4,96-5,53     |
| 14 | Indeks Kualitas Infrastruktur                                | Poin            | 77,64        | 80,43       | 81,4         | 83,17       | 84,62       | 84,62         |
| 15 | Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang | Persen          | -29,03       | 10          | 10           | 12          | 13          | 13            |
| 16 | Tingkat Kemiskinan                                           | Persen          | 10,14        | 9,70-7,56   | 9,50-7,26    | 9,43-7,40   | 9,28-7,25   | 9,28-7,25     |
| 17 | Gini Ratio                                                   | Ratio           | 0,39         | 0,37-0,34   | 0,36-0,33    | 0,35-0,32   | 0,34-0,31   | 0,34-0,31     |
| 18 | Nilai komposit FSVA                                          | Persen          | 59,71        | 62,21       | 64,71        | 67,21       | 69,71       | 69,71         |
| 19 | PDRB Per Kapita (ADHB)                                       | Juta (Rp)       | 34,46        | 33,85-34,70 | 36,20-38,32  | 38,18-40,24 | 40,15-42,72 | 40,15-42,72   |
| 20 | Tingkat Pengangguran Terbuka                                 | Persen          | 7,72         | 8,18-6,95   | 7,00-6,47    | 6,75-5,94   | 6,22-5,15   | 6,22-5,15     |
| 21 | Indeks Desa Membangun                                        | Poin            | 0,77         | 0,78        | 0,79         | 0,8         | 0,81        | 0,81          |
| 22 | Indeks Resiko Bencana                                        | Poin            | 119,39       | 114,39      | 109,39       | 104,39      | 99,39       | 99,39         |
| 23 | Indeks Ketahanan Daerah                                      | Poin            | 0,49         | 0,52        | 0,53         | 0,54        | 0,55        | 0,55          |
| 24 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                             | Poin            | 63,35        | 63,83       | 65,55        | 66,96       | 70,53       | 70,53         |
| 25 | Indeks Reformasi Birokrasi                                   | Poin            | 71,03        | 74,52       | 78,02        | 81,51       | 85          | 85            |
| 26 | Indeks Profesional ASN                                       | Poin            | 63,78        | 65          | 68           | 71          | 74          | 74            |
| 27 | Nilai Sakip Kabupaten                                        | Kategori / Skor | BB (76)      | A (80)      | A (82)       | A (82)      | A (86)      | A (86)        |

| No | Indikator                                             | Satuan | Kondisi Awal |      | Target Tahun |      |      | Kondisi Akhir |
|----|-------------------------------------------------------|--------|--------------|------|--------------|------|------|---------------|
|    |                                                       |        | 2022         | 2023 | 2024         | 2025 | 2026 |               |
| 28 | Nilai LPPD Kabupaten                                  | Skor   | 3,4          | 3,65 | 3,76         | 3,78 | 3,8  | 3,8           |
| 29 | Indeks Pelayanan Publik                               | Poin   | 4,66         | 4,7  | 4,71         | 4,72 | 4,75 | 4,75          |
| 30 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Poin   | 3,52         | 4,2  | 4,3          | 4,35 | 4,4  | 4,4           |

**8.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah ukuran yang menggambarkan keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tingkat dampak (impact) disajikan pada Tabel 8.3. dan Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tingkat hasil (Outcome) disajikan pada Tabel 8.4.

**Tabel 8.3**  
**Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Dampak (Impact)**  
**Tahun 2024-2026**

| No | Indikator                                                                                   | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                               | Perangkat Daerah |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                             | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                       |                  |
| 1  | 2                                                                                           | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                     | 10               |
| A  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                             |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                       |                  |
| I  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                       |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                       |                  |
| 1  | Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum (Persen)  | 46,84                    | 53,53      | 58,88                       | 64,77      | 71,25      | 71                                     | 1. Program Pengelolaan Pendidikan<br>2. Program Pengembangan Kurikulum<br>3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Dinas Pendidikan |
| 2  | Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum (Persen) | 26,77                    | 30,11      | 33,12                       | 36,43      | 40,08      | 40                                     |                                                                                                                       |                  |
| 3  | Nilai Siswa dengan Tingkat Karakter yang memenuhi kriteria Minimal (Skor)                   | 0                        | 2,10       | 2,16                        | 2,23       | 2,29       | 2                                      |                                                                                                                       |                  |
| II | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                        |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                       |                  |

| No  | Indikator                                                         | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perangkat Daerah                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                                   | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 1   | 2                                                                 | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                                            |
| 1   | Ratio Kematian Ibu (Rasio)                                        | 0,001                    | 0,00095    | 0,0009                      | 0,00085    | 0,0008     | 0,0008                                 | 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman<br>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | <b>Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah</b> |
| 2   | Ratio Kematian Bayi (Rasio)                                       | 0,018                    | 0,016      | 0,014                       | 0,012      | 0,01       | 0,01                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 3   | Akreditasi RS Sesuai Standar Nasional (Persen)                    | 84                       | 85         | 86                          | 88         | 90         | 90                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 4   | Prevalensi Stunting (Persen)                                      | 12                       | 9          | 8                           | 7          | 6          | 6                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 5   | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) (IKM) Bidang Kesehatan (Poin) | 91                       | 92         | 93                          | 94         | 95         | 95                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 6   | Angka Kematian Karena Penyakit DBD (CFR DBD) (Persen)             | <1                       | <1         | <1                          | <1         | <1         | <1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| III | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |



| No | Indikator                                                                                                                                                                                                  | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                               | Perangkat Daerah                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                            | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                       |                                                                                                 |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                     | 10                                                                                              |
| 1  | Presentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Persen)                                                                                                      | 68,62                    | 70,02      | 71,35                       | 72,55      | 73,68      | 73,68                                  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                             | <b>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b><br><b>2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b> |
| 2  | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (Persen) | 81,56                    | 81,95      | 82,10                       | 82,63      | 83,16      | 83,16                                  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                      |                                                                                                 |
| 3  | Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak (Persen)                                                                                                                                                 | 95,84                    | 95,91      | 96,12                       | 96,36      | 96,61      | 96,61                                  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                |                                                                                                 |
| 4  | Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata (Persen)                                                                                                                                                | 66,25                    | 68,75      | 73,75                       | 78,75      | 83,75      | 83,75                                  | 1. Program Penataan Bangunan Gedung<br>2. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya |                                                                                                 |

| No | Indikator                                                               | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                 | Perangkat Daerah                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                         | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                         |                                                    |
| 1  | 2                                                                       | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                       | 10                                                 |
| 5  | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (Persen)                        | 86,54                    | 90,85      | 91,50                       | 93,43      | 94,72      | 94,72                                  | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                           |                                                    |
| 6  | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan (Persen) | n/a                      | n/a        | 33,34                       | 66,68      | 100        | 100                                    | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                                    |                                                    |
| 7  | Ketaatan Terhadap RTR (Persen)                                          | 69,64                    | 70,00      | 72,25                       | 73,31      | 75,38      | 75,38                                  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                                  |                                                    |
| 8  | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Poin)                         | 29                       | 30         | 31                          | 32         | 32         | 32                                     | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                        |                                                    |
| IV | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN             |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                         |                                                    |
| 1  | Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)                                          | 80,21                    | 80,26      | 80,32                       | 80,37      | 80,43      | 80,43                                  | 1. Program Pengembangan Perumahan<br>2. Program Kawasan Permukiman<br>3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |

| No | Indikator                                                                                 | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                   | Perangkat Daerah           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                                                                           | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                           |                            |
| 1  | 2                                                                                         | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                         | 10                         |
| V  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                           |                            |
| 1  | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada (Persen)                              | 91                       | 92         | 92                          | 93         | 96         | 96                                     | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                      | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2  | Cakupan pelayanan bencana kebakaran (Persen)                                              | 90                       | 90         | 90                          | 90         | 90         | 90                                     | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |                            |
| 4  | Persentase Penanganan Pra Bencana (Persen)                                                | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | Program Penanggulangan Bencana                                                            | Badan Penanggulangan       |
| 5  | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Persen)                                    | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    |                                                                                           |                            |
| 6  | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persen)                                              | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    |                                                                                           |                            |
| VI | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                           |                            |

| No | Indikator                                                               | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                         | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 1  | 2                                                                       | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                              | 10                                  |
| 1  | Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya (Persen)             | 65                       | 75         | 80                          | 85         | 90         | 90                                     | 1. Program Pemberdayaan Sosial<br>2. Program Rehabilitasi Sosial<br>3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial<br>4. Program Penanganan Bencana<br>5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Dinas Sosial                        |
| B  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                |                                     |
| I  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                 |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 1  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)                             | 16                       | 20         | 20                          | 21         | 23         | 23                                     | 1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja<br>2. Program Penempatan Tenaga Kerja<br>3. Program Hubungan Industrial                                                              | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 2  | Presentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Persen)       | 10                       | 12         | 21                          | 26         | 31         | 31                                     |                                                                                                                                                                                                |                                     |
| II | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                |                                     |

| No         | Indikator                                                                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perangkat Daerah                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 1          | 2                                                                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                                                                      |
| 1          | Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan dan perlindungan hukum (Persen) | 23,94                    | 26,6       | 29,55                       | 38,87      | 77,67      | 77,67                                  | 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan<br>2. Program Perlindungan Perempuan<br>3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga<br>4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak<br>5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)<br>6. Program Perlindungan Khusus Anak | <b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> |
| <b>III</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>                                            |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |

| No        | Indikator                                                                    | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                       | Perangkat Daerah                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|           |                                                                              | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| 1         | 2                                                                            | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                        |
| 1         | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)                                             | 93,9                     | 94,2       | 94,5                        | 94,7       | 95,0       | 95,0                                   | 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan<br>2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat<br>3. Program Penanganan Kerawanan Pangan<br>4. Program Pengawasan Keamanan Pangan | <b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>               |
| <b>IV</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>                                 |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| 1         | Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi (Persen) | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | 1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan<br>2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan                                                                                                                 | <b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan</b> |
| <b>V</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                           |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |

| No | Indikator                                                                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                                                                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 1  | 2                                                                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                          |
| 1  | Persentase pengawasan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Persen) | 54                       | 56         | 70                          | 75         | 80         | 80                                     | 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup<br>2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup<br>3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)<br>4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup<br>5. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup<br>6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | <b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b> |
| 2  | Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) (Poin)                        | 127,88                   | 130,18     | 130,35                      | 131        | 131,45     | 131,45                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 3  | Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Poin)                                                      | 58,82                    | 61,04      | 61,15                       | 61,25      | 61,5       | 61,5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 4  | Persentase peningkatan pengembangan generasi lingkungan (Persen)                              | 0                        | 33,33      | 50                          | 66,67      | 70         | 70                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |

|   |                                                 |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Poin) | 25 | 28 | 35 | 39 | 41 | 41 | (KEHATI)<br>7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH<br>8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat<br>9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat<br>10. Program Pengelolaan Persampahan |  |
|---|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



| No  | Indikator                                                                 | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                      | Perangkat Daerah                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                                           | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                              |                                         |
| 1   | 2                                                                         | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                            | 10                                      |
| VI  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                              |                                         |
| 1   | Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Persen)                          | 97                       | 98         | 99                          | 99         | 99         | 99                                     | 1. Program Pendaftaran Penduduk<br>2. Program Pencatatan Sipil<br>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2   | Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (Persen)                      | 93                       | 93         | 94                          | 95         | 96         | 96                                     |                                                                                                                              |                                         |
| 3   | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan (Poin)                     | 91                       | 92         | 93                          | 93         | 94         | 94                                     |                                                                                                                              |                                         |
| VII | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA               |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                              |                                         |

| No          | Indikator                                                                      | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                  | Perangkat Daerah                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 1           | 2                                                                              | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                                    |
| 1           | Presentase Status Desa Mandiri dengan optimalisasi potensi desa (Persen)       | 30                       | 50         | 61,11                       | 68,52      | 81,48      | 81,48                                  | 1. Program Penataan Desa<br>2. Program Peningkatan Kerjasama Desa<br>3. Program Administrasi Pemerintahan Desa<br>4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat | <b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>                                         |
| <b>VIII</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 1           | Total Fertility Rate (TFR) (Kelahiran)                                         | 2,07                     | 2,04       | 2,04                        | 2,02       | 2,00       | 2,00                                   | 1. Program Pengendalian Penduduk<br>2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                                                         | <b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan</b> |
| 2           | Persentase Keluarga Pra Sejahtera (Persen)                                     | 3.97                     | 3.76       | 2,81                        | 2,78       | 2,75       | 2,75                                   | 3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)                                                                                                                                          |                                                                                       |

| No | Indikator                                                                         | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                       | Perangkat Daerah                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                                                                                   | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                               |                                                         |
| 1  | 2                                                                                 | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                             | 10                                                      |
|    |                                                                                   |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                               | Perlindungan Anak                                       |
| IX | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                            |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                               |                                                         |
| 1  | Cakupan Kelancaran, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Persen)           | 45,80                    | 50,80      | 56,13                       | 58,97      | 61,8       | 61,8                                   | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                 | Dinas Perhubungan                                       |
| X  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                             |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                               |                                                         |
| 1  | Persentase Masyarakat dalam Memahami Program Prioritas Pemerintah Daerah (Persen) | n/a                      | 60         | 70                          | 80         | 90         | 90                                     | 1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik<br>2. Program Aplikasi Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik |
| 2  | Indeks Layanan SPBE (Poin)                                                        | 3,4                      | 3,4        | 3,8                         | 4          | 4,2        | 4,2                                    |                                                                               |                                                         |
| XI | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                    |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                               |                                                         |

| No  | Indikator                                                   | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perangkat Daerah                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| 1   | 2                                                           | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                  |
| 1   | Persentase Koperasi Modern (Persen)                         | 0,80                     | 1,99       | 3,98                        | 5,98       | 7,97       | 7,97                                   | 1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam<br>2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi<br>3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi<br>4. Program Pendidkan dan Latihan Perkoperasian<br>5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi<br>6. Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)<br>7. Program Pengembangan UMKM | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindusrtian Dan Perdagangan |
| 2   | Jumlah Usaha Mikro Yang Berkembang (Unit Usaha)             | 14.888                   | 15.038     | 15.188                      | 15.338     | 15.488     | 15.488                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| XII | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                  |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| 1   | Jumlah nilai investasi di Sumedang (Juta Rupiah)            | 1.927.391                | 2.505.608  | 3.000.000                   | 3.500.000  | 3.750.000  | 10.250.000                             | 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal<br>2. Program Promosi Penanaman Modal<br>3. Program Pelayanan Penanaman Modal<br>4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                       | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu                  |
| 2   | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) Bidang Perizinan (Poin) | 92,10                    | 93         | 93                          | 93         | 95         | 95                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |

| No   | Indikator                                                      | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                               | Perangkat Daerah                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      |                                                                | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                       |                                                         |
| 1    | 2                                                              | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                     | 10                                                      |
|      |                                                                |                          |            |                             |            |            |                                        | 5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal                                                                                                      |                                                         |
| XIII | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA             |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                       |                                                         |
| 1    | Presentase Organisasi Pemuda yang aktif (Persen)               | 51,55                    | 56,70      | 58,76                       | 60,82      | 62,89      | 62,89                                  | 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan<br>2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan<br>3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga   |
| 2    | Jumlah prestasi olahraga yang di Raih dalam satu tahun (Orang) | 20                       | 20         | 20                          | 20         | 20         | 60                                     |                                                                                                                                                                       |                                                         |
| XIV  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                           |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                       |                                                         |
| 1    | Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)                | n/a                      | n/a        | 3                           | 3,5        | 4          | 4                                      | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                                                                                                            | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik |
| XV   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                          |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                       |                                                         |

| No           | Indikator                                                                            | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                         | Perangkat Daerah                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|              |                                                                                      | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 1            | 2                                                                                    | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                               | 10                                                      |
| 1            | Score Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Poin)                                        | 350                      | 400        | 450                         | 475        | 500        | 500                                    | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi                                                                                                                                                   | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik |
| <b>XVI</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                                         |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 1            | Jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu (OPK) | 11                       | 11         | 11                          | 11         | 11         | 11                                     | 1. Program Pengembangan Kebudayaan<br>2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional<br>3. Program Pembinaan Sejarah<br>4. Program Pelestraian dan Pengelolaan Cagar Budaya<br>5. Program Pengelolaan Permuseuman | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga   |
| <b>XVII</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>                                       |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 1            | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)                                        | 12,44                    | 12,54      | 12,64                       | 12,74      | 12,84      | 12,84                                  | Program Pembinaan Perpustakaan                                                                                                                                                                                  | Dinas Arsip Dan Perpustakaan                            |
| <b>XVIII</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>                                          |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |

| No        | Indikator                                                             | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                  | Perangkat Daerah                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |                                                                       | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| 1         | 2                                                                     | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                        | 10                                    |
| 1         | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen) | 24                       | 40         | 56                          | 65         | 73         | 73                                     | 1. Program Pengelolaan Arsip<br>2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                                                                                                                           | <b>Dinas Arsip Dan Perpustakaan</b>   |
| <b>C</b>  | <b>UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                              |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| <b>I</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>              |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| 1         | Produksi Perikanan (Ton)                                              | 9821,07                  | 10093,69   | 10386,74                    | 10744,88   | 11174,07   | 11174,07                               | 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap<br>2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya<br>3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan<br>4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | <b>Dinas Perikanan dan Peternakan</b> |
| <b>II</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>                          |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| 1         | Kunjungan wisata (Orang)                                              | 700.000                  | n/a        | 1.050.000                   | 1.207.500  | 1.388.625  | 1.388.625                              | 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                                                                                                                   | <b>Dinas Pariwisata, Kebudayaan,</b>  |

| No         | Indikator                                                        | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perangkat Daerah                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                  | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 1          | 2                                                                | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                                   |
| 2          | Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (Sub Sektor) | 16                       | 16         | 16                          | 16         | 16         | 16                                     | 2. Program Pemasaran Pariwisata<br>3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual<br>4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                         | <b>Kepemudaan Dan Olahraga</b>                                                       |
| <b>III</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                      |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 1          | Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian (Persen)     | -7,68                    | 1,19       | 1,49                        | 1,99       | 2,48       | 2,48                                   | 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian<br>4. Program Penyuluhan Pertanian<br>5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | <b>1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan<br/>2. Dinas Perikanan dan Peternakan</b> |



| No | Indikator                                                              | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perangkat Daerah                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| 1  | 2                                                                      | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                   |
| 2  | Peningkatan Produksi Peternakan (Persen)                               | 5,88                     | 5,248      | 5,67                        | 6,33       | 7          | 7                                      | 6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner<br>8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner<br>9. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian |                                      |
| 3  | Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Persen) | 23,08                    | 80,77      | 80,77                       | 80,77      | 80,77      | 80,77                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| IV | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                   |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| 1  | Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Poin)                               | 58,82                    | 61,04      | 61,15                       | 61,25      | 61,50      | 61,50                                  | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya                                                                                                                                                                                                                            | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| V  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                 |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |

| No         | Indikator                                       | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perangkat Daerah                                                           |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                 | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 1          | 2                                               | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                         |
| 1          | Tingkat Stabilisasi Sektor Perdagangan (Persen) | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | 1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan<br>2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan<br>3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting<br>4. Program Pengembangan Ekspor<br>5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen<br>6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | <b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan</b> |
| <b>VI</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b> |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 1          | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil (Persen)  | 5,12                     | 6,84       | 8,57                        | 10,29      | 12,02      | 12,02                                  | 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri<br>2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota<br>3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                                                                                                                                                         | <b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan</b> |
| <b>VII</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>  |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |

| No | Indikator                                   | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                             | Perangkat Daerah                    |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                             | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                     |                                     |
| 1  | 2                                           | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                   | 10                                  |
| 1  | Jumlah Trasmigran Yang di tempatkan (Orang) | 71                       | 76         | 81                          | 86         | 91         | 91                                     | 1. Program Pembangunan Kawasan Trasmigrasi<br>2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi          | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| D  | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN        |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                     |                                     |
| I  | INSPEKTORAT                                 |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                     |                                     |
| 1  | Kapabilitas APIP (Level)                    | 3                        | 3          | 4                           | 4          | 4          | 4                                      | 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan<br>2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat Daerah                  |
| 2  | Maturitas SPIP (Level)                      | 3                        | 3          | 4                           | 4          | 4          | 4                                      |                                                                                                     |                                     |
| E  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN         |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                     |                                     |
| I  | PERENCANAAN                                 |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                     |                                     |

| No  | Indikator                                              | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                       | Perangkat Daerah                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                               |                                                                         |
| 1   | 2                                                      | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                             | 10                                                                      |
| 1   | Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Persen) | 91,92                    | 92,3       | 92,66                       | 92,96      | 93,34      | 93,34                                  | 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah<br>2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | <b>Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b> |
| II  | KEUANGAN                                               |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                               |                                                                         |
| 1   | Opini BPK terhadap laporan keuangan (Predikat)         | WTP                      | WTP        | WTP                         | WTP        | WTP        | WTP                                    | 1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah              | <b>1. Badan Keuangan dan Aset Daerah<br/>2. Badan Pendapatan Daerah</b> |
| 2   | Persentase PAD terhadap Pendapatan (Persen)            | 17,77                    | 18,99      | 22,67                       | 25,9       | 30,4       | 30,4                                   |                                                                                                                                               |                                                                         |
| III | KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                  |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                               |                                                                         |
| 1   | Indeks Sistem Merit (Poin)                             | 315                      | 340        | 350                         | 355        | 360        | 360                                    | Program Kepegawaian Daerah                                                                                                                    | <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia</b>           |

| No        | Indikator                                                                                                                                | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                     | Perangkat Daerah                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                          | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                             |                                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                        | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                           | 10                                                                      |
| <b>IV</b> | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>                                                                                                       |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                             |                                                                         |
| 1         | Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Persen)                                                                                   | 91,92                    | 92,3       | 92,66                       | 92,96      | 93,34      | 93,34                                  | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                                                  | <b>Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b> |
| <b>F</b>  | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                                               |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                             |                                                                         |
| <b>I</b>  | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                                                                |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                             |                                                                         |
| 1         | Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen) | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>2. Program Perekonomian dan Pembangunan | <b>Sekretariat Daerah</b>                                               |
| 2         | Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang Perekonomian dan Pembangunan (Persen)          | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    |                                                                                             |                                                                         |

| No   | Indikator                                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                    | Perangkat Daerah |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |                                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                            |                  |
| 1    | 2                                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                          | 10               |
| II   | SEKRETARIAT DPRD                                              |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                            |                  |
| 1    | Tingkat fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Persen) | 100                      | 100        | 33,23                       | 32,72      | 34,05      | 34,05                                  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                                         | Sekretariat DPRD |
| G    | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                       |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                            |                  |
| VIII | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                   |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                            |                  |
| 1    | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif (Persen)                       | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan<br>2. Program Pemberdayaan | Badan Kesatuan   |

| No        | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perangkat Daerah          |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|           |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 1         | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                        |
| 2         | Tingkat Bina Demokratisasi (Persen) | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan<br>3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya<br>4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial<br>5. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | <b>Bangsa dan Politik</b> |
| <b>IX</b> | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>            |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |

| No | Indikator                                    | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah          |
|----|----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                              | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 1  | 2                                            | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                        |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) (Persen) | 86                       | 90         | 90,5                        | 90,6       | 90,75      | 90,75                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Cimalaka</b> |



| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah         |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                       |
| 2  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 88,40                    | 90,00      | 90,50                       | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Buahdua</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah             |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                           |
| 3  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 88,28                    | 90         | 90,5                        | 90,5       | 90,5       | 90,5                                   | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Rancakalong</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah                |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                              |
| 4  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 89,77                    | 90         | 90,5                        | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Sumedang Utara</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah                  |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                |
| 5  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 87,98                    | 90,00      | 90,50                       | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Sumedang Selatan</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah   |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                 |
| 6  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 87,98                    | 90         | 90,5                        | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Jatigede |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah      |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                    |
| 7  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 89,34                    | 90         | 90                          | 90         | 90         | 90                                     | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Tomo</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah            |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                          |
| 8  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 87,98                    | 90         | 90,20                       | 90,30      | 90,35      | 90,35                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Jatinangor</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah   |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                 |
| 9  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 88,28                    | 90         | 90,30                       | 90,50      | 90,70      | 90,70                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Situraja |



| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah            |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                          |
| 10 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 88                       | 88         | 90,3                        | 90,5       | 90,6       | 90,6                                   | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Cimanggung</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah          |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                        |
| 11 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 88                       | 90         | 90                          | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Sukasari</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah        |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                      |
| 12 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 88,05                    | 90         | 91                          | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Surian</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah           |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                         |
| 13 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 87,98                    | 90         | 90,50                       | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Darmaraja</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10               |
| 14 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 87,63                    | 90         | 90,5                        | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Cisitu |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah           |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                         |
| 15 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 89                       | 90         | 90,5                        | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Conggeang</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10               |
| 16 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 88,41                    | 90         | 90,5                        | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Paseh  |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah             |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                           |
| 17 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 89                       | 90         | 90,5                        | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Tanjungsari</b> |



| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah           |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                         |
| 18 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 87,1                     | 90         | 90                          | 90,51      | 90,71      | 90,71                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Pamulihan</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah  |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                |
| 19 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 88,24                    | 90         | 90,5                        | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Cisarua |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah        |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                      |
| 20 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 90                       | 90         | 90,5                        | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Ganeas</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah    |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                  |
| 21 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 87,63                    | 90         | 90,5                        | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Ujungjaya |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah              |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                            |
| 22 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 88,28                    | 90         | 90,5                        | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Tanjungkerta</b> |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10               |
| 23 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 87,98                    | 90         | 90,5                        | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Wado   |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah  |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                |
| 24 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 88,56                    | 90         | 91                          | 92         | 93         | 93                                     | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Cibugel |

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah              |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| 1  | 2                                   | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                            |
| 25 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 88,05                    | 90         | 90,5                        | 90,58      | 90,99      | 90,99                                  | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Tanjungmedar</b> |



| No       | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah             |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|          |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 1        | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                           |
| 26       | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)           | 87,80                    | 90         | 90                          | 90         | 90         | 90                                     | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Kecamatan Jatinunggal</b> |
| <b>X</b> | <b>NON URUSAN</b>                             |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 1        | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 77,33                    | 80         | 82                          | 84         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dinas Pendidikan</b>      |
| 2        | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 87,4                     | 90         | 92                          | 94         | 95         | 95                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dinas Kesehatan</b>       |

| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah                                   |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                                                    |
| 1  | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                           | 10                                                 |
| 3  | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 89,44                    | 90         | 92                          | 94         | 95         | 95                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rumah Sakit Umum                                   |
| 4  | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 81,15                    | 82         | 84                          | 86         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                |
| 5  | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 68                       | 75         | 80                          | 82         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 6  | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 69,23                    | 80         | 82                          | 84         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Satuan Polisi Pamong Praja                         |

| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah                               |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                                                |
| 1  | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                           | 10                                             |
| 7  | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 70,79                    | 75         | 80                          | 82         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>     |
| 8  | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 86,53                    | 87         | 89                          | 91         | 94         | 94                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Dinas Sosial</b>                            |
| 9  | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 81,2                     | 82         | 84                          | 86         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>     |
| 10 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 80,53                    | 82         | 84                          | 86         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>    |
| 11 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 87,4                     | 89         | 90                          | 92         | 95         | 95                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> |

| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                                                                                                  |
| 1  | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                           | 10                                                                                               |
| 12 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 78,49                    | 80         | 82                          | 84         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                           |
| 13 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 74,25                    | 80         | 82                          | 84         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 14 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 75,13                    | 80         | 82                          | 84         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Perhubungan                                                                                |
| 15 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 84,3                     | 85         | 87                          | 89         | 92         | 92                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik                                          |

| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah                                                            |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                                                                             |
| 1  | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                           | 10                                                                          |
| 16 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 71,43                    | 75         | 80                          | 82         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian</b> |
| 17 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 93,75                    | 94         | 95                          | 96         | 97         | 97                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>               |
| 18 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 76,05                    | 80         | 82                          | 84         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Dinas Arsip dan Perpustakaan</b>                                         |
| 19 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 72,1                     | 80         | 82                          | 84         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Dinas Perikanan dan Peternakan</b>                                       |

| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah                                              |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                                                               |
| 1  | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                           | 10                                                            |
| 20 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 88,59                    | 90         | 92                          | 94         | 95         | 95                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga</b> |
| 21 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 57,2                     | 80         | 82                          | 84         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>                   |
| 22 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 88,83                    | 90         | 92                          | 94         | 95         | 95                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Sekretariat Daerah</b>                                     |
| 23 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 77,76                    | 80         | 82                          | 84         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Sekretariat DPRD</b>                                       |
| 24 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 94,88                    | 95         | 96                          | 97         | 98         | 98                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan</b>          |

| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah                                       |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                                                        |
| 1  | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                           | 10                                                     |
|    |                                               |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                             | Pengembangan Daerah                                    |
| 25 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 89,39                    | 90         | 91                          | 93         | 95         | 95                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Badan Keuangan dan Aset Daerah                         |
| 26 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 85,63                    | 87         | 89                          | 91         | 94         | 94                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Badan Pendapatan Daerah                                |
| 27 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 82,9                     | 85         | 87                          | 89         | 92         | 92                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah                         |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                                          |
| 1  | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                           | 10                                       |
| 28 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 88,92                    | 90         | 91                          | 93         | 95         | 95                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Inspektorat Daerah</b>                |
| 29 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 78,14                    | 80         | 82                          | 84         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b> |
| 30 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 85,01                    | 87,1       | 88                          | 89         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Wado</b>                    |
| 31 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 83,65                    | 75         | 75                          | 78         | 80         | 80                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Jatinunggal</b>             |
| 32 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 84,98                    | 85         | 87                          | 89         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Darmaraja</b>               |



| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                     |
| 1  | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                           | 10                  |
| 33 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 85,03                    | 87         | 89                          | 90         | 91         | 91                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Cibugel   |
| 34 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 72,33                    | 75         | 80                          | 82         | 85         | 85                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Cisitu    |
| 35 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 76,1                     | 80         | 82                          | 84         | 85         | 85                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Situraja  |
| 36 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 74,63                    | 75         | 80                          | 82         | 85         | 85                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Conggeang |
| 37 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 80                       | 85         | 88                          | 89         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Paseh     |

| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah      |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                       |
| 1  | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                           | 10                    |
| 38 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 84,9                     | 85         | 87                          | 89         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Surian      |
| 39 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 65,95                    | 75         | 80                          | 82         | 85         | 85                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Buahdua     |
| 40 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 76.53                    | 80         | 82                          | 84         | 87         | 87                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Tanjungsari |
| 41 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 50,88                    | 75         | 80                          | 82         | 85         | 85                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Sukasari    |
| 42 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 78,44                    | 80         | 82                          | 84         | 87         | 87                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Pamulihan   |

| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah                  |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                                   |
| 1  | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                           | 10                                |
| 43 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 77,65                    | 80         | 82                          | 84         | 87         | 87                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Cimanggung</b>       |
| 44 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 85,14                    | 87         | 88                          | 89         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Jatinangor</b>       |
| 45 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 82,4                     | 83         | 85                          | 89         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Rancakalong</b>      |
| 46 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 84,2                     | 85         | 87                          | 89         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Sumedang Selatan</b> |
| 47 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 79,83                    | 81         | 85                          | 87         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Sumedang Utara</b>   |

| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah              |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                               |
| 1  | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                           | 10                            |
| 48 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 76,04                    | 78         | 80                          | 82         | 85         | 85                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Ganeas</b>       |
| 49 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 78,93                    | 80         | 82                          | 84         | 87         | 87                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Tanjungkerta</b> |
| 50 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 84,9                     | 85         | 87                          | 89         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Tanjungmedar</b> |
| 51 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 79,43                    | 80         | 82                          | 84         | 87         | 87                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Cimalaka</b>     |
| 52 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 84,1                     | 85         | 87                          | 89         | 90         | 90                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Cisarua</b>      |

| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah           |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                            |
| 1  | 2                                             | 3                        | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8                                      | 9                                                           | 10                         |
| 53 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 78,29                    | 80         | 82                          | 84         | 85         | 85                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Tomo</b>      |
| 54 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 67,44                    | 75         | 80                          | 82         | 85         | 85                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Ujungjaya</b> |
| 55 | Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai) | 70,43                    | 75         | 80                          | 82         | 85         | 85                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <b>Kecamatan Jatigede</b>  |

**Tabel 8.4**  
**Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Hasil (Outcome)**  
**Tahun 2024-2026**

| No       | Indikator Outcome                                                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                        | Perangkat Daerah        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|          |                                                                                       | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                |                         |
| (1)      | (2)                                                                                   | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                            | (10)                    |
| <b>A</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                |                          |            |                             |            |            |                                        |                                |                         |
| <b>I</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                                          |                          |            |                             |            |            |                                        |                                |                         |
| 1        | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD (Persen)         | 89,39                    | 91,89      | 94,39                       | 96,89      | 98,89      | 98,89                                  | Program Pengelolaan Pendidikan | <b>Dinas Pendidikan</b> |
| 2        | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP (Persen)       | 90,27                    | 92,27      | 94,27                       | 96,27      | 98,27      | 98,27                                  |                                |                         |
| 3        | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan (Persen) | 53,47                    | 63,47      | 73,47                       | 83,47      | 93,47      | 93,47                                  |                                |                         |
| 4        | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini (Persen)   | 92,04                    | 93,74      | 95,44                       | 97,14      | 98,84      | 98,84                                  |                                |                         |

| No  | Indikator Outcome                                                        | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                     | Perangkat Daerah |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                          | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                             |                  |
| (1) | (2)                                                                      | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                         | (10)             |
| 5   | Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka (Persen)            | 21,61                    | 40,30      | 68,34                       | 94,33      | 100        | 100                                    | Program Pengembangan Kurikulum                                              |                  |
| 6   | Proporsi GTK penggerak (Persen)                                          | 5                        | 10         | 25                          | 30         | 30         | 30                                     | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                    |                  |
| II  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                     |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                             |                  |
| 1   | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (Rasio)           | 0,17                     | 0,19       | 0,22                        | 0,23       | 0,25       | 0,25                                   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan  |
| 2   | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat (Persen)                    | 50                       | 55         | 60                          | 65         | 70         | 70                                     |                                                                             |                  |
| 3   | Presentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Persen)    | 28                       | 33         | 40                          | 50         | 60         | 60                                     |                                                                             |                  |
| 4   | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (Persen) | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    |                                                                             |                  |

| No  | Indikator Outcome                                                                            | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                              | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                  |
| (1) | (2)                                                                                          | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                         | (10)             |
| 5   | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang sesuai standar (Persen)                             | 84                       | 85         | 86                          | 88         | 90         | 90                                     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |                  |
| 6   | Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki standar kompetensi (Persen)                        | 86                       | 87         | 88                          | 89         | 90         | 90                                     |                                                             |                  |
| 7   | Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar (Persen) | 84                       | 86         | 87                          | 88         | 92         | 92                                     |                                                             |                  |
| 8   | Presentase Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri (Persen)                                       | 20                       | 26         | 31                          | 36         | 41         | 41                                     |                                                             |                  |
| III | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                 |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                             |                  |



| No  | Indikator Outcome                                                                                                                                                                              | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                          | Perangkat Daerah                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                  |                                             |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                            | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                              | (10)                                        |
| 1   | Luas Lahan yang terairi (Ha)                                                                                                                                                                   | 20633,40                 | 21054,31   | 21454,31                    | 21814,31   | 22154,31   | 22154,31                               | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        | <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>  |
| 2   | Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota (Rumah Tangga) | 244.688                  | 245.847    | 246.288                     | 247.888    | 249.488    | 249.488                                | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |                                             |
| 3   | Persentase kapasitas pelayanan sarana prasarana pengelolaan sampah permukiman terhadap jumlah rumah tangga (Persen)                                                                            | n/a                      | 22         | 26                          | 29         | 32         | 32                                     | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | <b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b> |

| No  | Indikator Outcome                                                                                              | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                | Perangkat Daerah                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                                                                | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                        |                                            |
| (1) | (2)                                                                                                            | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                    | (10)                                       |
| 4   | Persentase rumah tinggal bersanitasi (Persen)                                                                  | 95,8                     | 95,9       | 96,1                        | 96,4       | 96,6       | 96,6                                   | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b> |
| 6   | Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi (Persen) | 15,5                     | 36,5       | 57,6                        | 78,7       | 99,7       | 99,7                                   | Program Penataan Bangunan Gedung                       |                                            |
| 7   | Jumlah kumulatif Bangunan dan Lingkungannya yang tertata (Bangunan)                                            | 53                       | 55         | 59                          | 63         | 67         | 67                                     | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya            |                                            |
| 8   | Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Persen)                                      | 60,04                    | 61,49      | 62,13                       | 64,07      | 65,36      | 65,36                                  | Program Penyelenggaraa n Jalan                         |                                            |
| 9   | Persentase tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi (Persen)                        | 71,8                     | 64,21      | 72,8                        | 81,34      | 89,90      | 89,90                                  | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                   |                                            |
| 10  | Persentase ketersediaan RTR (Persen)                                                                           | 38,0                     | 42,3       | 50,0                        | 57,7       | 61,5       | 61,5                                   | Program Penyelenggaraa                                 |                                            |

| No  | Indikator Outcome                                                                  | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                        | Perangkat Daerah                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                    | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                |                                                           |
| (1) | (2)                                                                                | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                            | (10)                                                      |
| 11  | Persentase pelayanan pemanfaatan ruang (Persen)                                    | 24,6                     | 49,2       | 64,36                       | 77,18      | 90,00      | 90,00                                  | n Penataan Ruang                               |                                                           |
| IV  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                 |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                |                                                           |
| 1   | Jumlah rumah layak huni yang terlayani (Unit)                                      | 30                       | 55         | 80                          | 105        | 130        | 130                                    | Program Pengembangan Perumahan                 | <b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan</b> |
| 2   | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Persen)                          | 81,34                    | 81,34      | 81,97                       | 82,43      | 82,89      | 82,89                                  | Program Kawasan Permukiman                     |                                                           |
| 3   | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Dicegah (Ha)                                    | 154.835                  | 154.835    | 154.835                     | 154.835    | 154.835    | 154.835                                | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh |                                                           |
| 4   | Persentase pemukiman yang tertata (Persen)                                         | 10,5                     | 26,6       | 51,1                        | 75,5       | 100        | 100                                    | Program Pengembangan Permukiman                |                                                           |
| 5   | Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (Persen) | 38,36                    | 53,43      | 83,56                       | 91,78      | 100        | 100                                    | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan      |                                                           |

| No  | Indikator Outcome                                                                         | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                          | Perangkat Daerah           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                           | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                  |                            |
| (1) | (2)                                                                                       | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                              | (10)                       |
|     |                                                                                           |                          |            |                             |            |            |                                        | Utilitas Umum (PSU)                                                              |                            |
| V   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                  |                            |
| 1   | Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman) (Persen)      | 72                       | 78         | 83                          | 89         | 94         | 94                                     | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                              | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2   | Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani (Persen)                           | 91                       | 92         | 92                          | 93         | 96         | 96                                     | Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani                           |                            |
| 3   | Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang setiap RT) (Rasio)  | 0,67                     | 0,74       | 0,81                        | 0,89       | 0,98       | 0,98                                   | Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang setiap RT) |                            |

| No  | Indikator Outcome                                                                                | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                   | Perangkat Daerah                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                  | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                           |                                     |
| (1) | (2)                                                                                              | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                                       | (10)                                |
| 4   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)                      | 760687                   | 798721     | 838657                      | 880589     | 924618     | 924618                                 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Oran) | 2935                     | 3081       | 3235                        | 3396       | 3565       | 3565                                   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |                                     |
| 6   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)     | 2538                     | 2411       | 2290                        | 2175       | 2066       | 2066                                   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      |                                     |

| No  | Indikator Outcome                                                                                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                     | Perangkat Daerah           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                             | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                             |                            |
| (1) | (2)                                                                                                         | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                         | (10)                       |
| 7   | Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)                         | 15                       | 15         | 15                          | 15         | 15         | 15                                     | Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Satuan Polisi Pamong Praja |
| VI  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                           |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                             |                            |
| 1   | Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima bantuan sosial melalui pemberdayaan social (Persen) | 7,22                     | 9,03       | 12,64                       | 16,25      | 19,86      | 19,86                                  | Program Pemberdayaan Sosial                                                 | Dinas Sosial               |
| 2   | Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan social (Persen)                              | 58,33                    | 58,33      | 66,67                       | 75,00      | 83,33      | 83,33                                  |                                                                             |                            |

| No  | Indikator Outcome                                                                                                                                                                                                                                                 | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                  | Perangkat Daerah |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                          |                  |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                      | (10)             |
| 3   | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar (Persen) | 58,47                    | 65,30      | 71,66                       | 78,02      | 84,33      | 84,33                                  | Program Rehabilitasi Sosial              |                  |
| 4   | Persentase masyarakat (DTKS) yang menerima jaminan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (Persen)                                                                                                                                                                      | 61,77                    | 62,12      | 62,47                       | 62,83      | 63,19      | 63,19                                  | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial  |                  |
| 5   | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (Persen)                                                                                                                                                                       | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | Program Penanganan Bencana               |                  |
| 6   | Persentase pengelolaan Makam Pahlawan (Persen)                                                                                                                                                                                                                    | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan |                  |
| B   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                             |                          |            |                             |            |            |                                        |                                          |                  |

| No  | Indikator Outcome                                                                                                                                                   | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                | Perangkat Daerah                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                        |                                     |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                 | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                    | (10)                                |
| I   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                                             |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                        |                                     |
| 1   | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Persen)                                                                                        | 15,24                    | 17,77      | 20,31                       | 21,33      | 25,39      | 25,39                                  | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 2   | Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (Orang)                                                                                                                | 50                       | 100        | 150                         | 200        | 250        | 600                                    |                                                        |                                     |
| 3   | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Persen)                                                                                                      | 10,2                     | 15,19      | 20,18                       | 25,17      | 30,16      | 30,16                                  | Program Penempatan Tenaga Kerja                        |                                     |
| 4   | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Persen) | 10                       | 11,5       | 21                          | 26         | 31         | 31                                     | Program Hubungan Industrial                            |                                     |
| II  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                             |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                        |                                     |
| 1   | Persentase OPD Responsip Gender (Persen)                                                                                                                            | 45,16                    | 61,29      | 65                          | 75         | 100        | 100                                    | Program Pengarusutamaan Gender dan                     | Dinas Pengendalian Penduduk dan     |



| No  | Indikator Outcome                                                                                            | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                         | Perangkat Daerah                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                              | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                 |                                                                         |
| (1) | (2)                                                                                                          | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                             | (10)                                                                    |
|     |                                                                                                              |                          |            |                             |            |            |                                        | Pemberdayaan Perempuan                          | <b>Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> |
| 2   | Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Persen)                                                  | 100                      | 0,0035     | 0,0036                      | 0,0042     | 0,0047     | 0,0047                                 | Program Perlindungan Perempuan                  |                                                                         |
| 3   | Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan (Persen)                                | 100                      | 16,53      | 33,06                       | 66,13      | 80         | 80                                     | Program Peningkatan Kualitas Keluarga           |                                                                         |
| 4   | Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak (Persen)                                                        | 100                      | 33,3       | 42                          | 71         | 100        | 100                                    | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak |                                                                         |
| 5   | Persentase forum anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Persen) | 46,15                    | 65,38      | 69,07                       | 75,65      | 100        | 100                                    | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                |                                                                         |
| 6   | Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan (Persen)                                | 100                      | 0,02       | 0,023                       | 0,026      | 0,028      | 0,028                                  | Program Perlindungan Khusus Anak                |                                                                         |

| No  | Indikator Outcome                                                              | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                         | Perangkat Daerah                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                                                                | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                 |                                      |
| (1) | (2)                                                                            | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                             | (10)                                 |
| III | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                              |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                 |                                      |
| 1   | Ketersediaan pangan Pokok (Kg/ Kapita/Tahun)                                   | 233,36                   | 245,03     | 257,28                      | 270,15     | 283,66     | 283,66                                 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2   | Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu (Kg/ Kapita/Tahun) | 14,98                    | 15,43      | 15,89                       | 16,37      | 16,86      | 16,86                                  | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               |                                      |
| 3   | Presentase Tertanganinya Daerah kerawanan pangan (Persen)                      | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             |                                      |
| 4   | Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (Nomor Register)               | 30                       | 50         | 70                          | 90         | 110        | 270                                    | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                              |                                      |
| IV  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                          |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                 |                                      |

| No  | Indikator Outcome                                                                                                                   | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                  | Perangkat Daerah                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                     | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                          |                                                    |
| (1) | (2)                                                                                                                                 | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                      | (10)                                               |
| 1   | Jumlah Penanganan Sengketa Tanah yang di fasilitasi (Kasus)                                                                         | 2                        | 2          | 2                           | 2          | 2          | 10                                     | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                              | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 2   | Jumlah lokasi ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan (Lokasi)                                       | 9                        | 15         | 20                          | 25         | 30         | 30                                     | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan |                                                    |
| V   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                         |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                          |                                                    |
| 1   | Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Dokumen) | 0                        | 0          | 8                           | 3          | 2          | 13                                     | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan               |
| 2   | Jumlah dokumen hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup (Dokumen)                                                                 | 0                        | 17         | 97                          | 97         | 97         | 291                                    | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup      |                                                    |

| No  | Indikator Outcome                                                                                                                               | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                                 | Perangkat Daerah |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                 | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                                         |                  |
| (1) | (2)                                                                                                                                             | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                                                                     | (10)             |
| 3   | Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan (Unit)                                                                            | 2                        | 2          | 4                           | 8          | 15         | 15                                     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                      |                  |
| 4   | Persentase tindakan verifikasi terhadap permohonan perizinan berusaha pengelolaan Limbah B3 (Persen)                                            | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                |                  |
| 5   | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Persen) | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |                  |

| No  | Indikator Outcome                                                                                                                                              | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                       | Perangkat Daerah |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                               |                  |
| (1) | (2)                                                                                                                                                            | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                                                           | (10)             |
| 6   | Persentase kecamatan yang teridentifikasi dan memiliki MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH yang diakui (Persen) | n/a                      | n/a        | 25                          | 50         | 25         | 100                                    | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH |                  |
| 7   | Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyukluhan lingkungan hidup (Persen)                                          | n/a                      | n/a        | 23,00                       | 32         | 41         | 41                                     | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                    |                  |
| 8   | Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup (Penghargaan)                                                                                                       | 0                        | 0          | 30                          | 30         | 30         | 90                                     | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                                         |                  |

| No  | Indikator Outcome                                                                | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                       | Perangkat Daerah                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                                                  | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                               |                                         |
| (1) | (2)                                                                              | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                           | (10)                                    |
| 9   | Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti (Persen)                    | n/a                      | n/a        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup |                                         |
|     |                                                                                  |                          |            |                             |            |            |                                        |                                               |                                         |
| 10  | Persentase Pengelolaan Sampah (Persen)                                           | 35,14                    | 43,58      | 51,66                       | 59,77      | 65,89      | 65,89                                  | Program Pengelolaan Persampahan               |                                         |
| VI  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |                          |            |                             |            |            |                                        |                                               |                                         |
| 1   | Perekaman KTP Elektronik                                                         | 98                       | 99         | 99                          | 99         | 99         | 99                                     | Program Pendaftaran Penduduk                  | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2   | Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (Persen) | 33                       | 43         | 47                          | 50         | 53         | 53                                     |                                               |                                         |
| 3   | Persentase Kepemilikan KK (Persen)                                               | 97                       | 98         | 99                          | 99         | 99         | 99                                     |                                               |                                         |
| 4   | Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun (Persen)                        | 98                       | 99         | 99                          | 99         | 99         | 99                                     | Program Pencatatan Sipil                      |                                         |

| No         | Indikator Outcome                                                                                      | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                 | Perangkat Daerah                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|            |                                                                                                        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                         |                                                |
| (1)        | (2)                                                                                                    | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                     | (10)                                           |
| 5          | Persentase Kepemilikan Akte Kematian (Persen)                                                          | 15                       | 20         | 40                          | 50         | 60         | 60                                     |                                                         |                                                |
| 6          | Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim (Persen)                                              | 50                       | 60         | 61                          | 63         | 64         | 64                                     |                                                         |                                                |
| 7          | Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (Instansi) | 52                       | 52         | 52                          | 52         | 52         | 52                                     | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |                                                |
| <b>VII</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                                     |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                         |                                                |
| 1          | Persentase desa yang tertata (Persen)                                                                  | 22,22                    | 25,00      | 26,00                       | 30,00      | 37,00      | 37,04                                  | Program Penataan Desa                                   | <b>Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa</b> |
| 2          | Persentase Desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa (Persen)                                       | 0                        | 0          | 0,37                        | 0,74       | 1          | 1,11                                   | Program Peningkatan Kerjasama Desa                      |                                                |
| 3          | Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai aturan (Persen)                                             | 30                       | 50         | 61,11                       | 68,52      | 81,48      | 81,48                                  | Program Administrasi Pemerintahan Desa                  |                                                |

| No          | Indikator Outcome                                                                                                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                              | Perangkat Daerah                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                       | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                      |                                                                                                         |
| (1)         | (2)                                                                                                                                   | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                                  | (10)                                                                                                    |
| 4           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Persen)                                                                      | 89                       | 60         | 80                          | 80         | 100        | 100                                    | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat |                                                                                                         |
| <b>VIII</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                                                        |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                      |                                                                                                         |
| 1           | Jumlah Dokumen kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan (Dokumen) | 5                        | 5          | 10                          | 10         | 10         | 10                                     | Program Pengendalian Penduduk                                                        | <b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> |
| 2           | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (Persen)                                                              | 100                      | 85         | 40                          | 60         | 100        | 100                                    |                                                                                      |                                                                                                         |
| 3           | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (Persen)                                                            | 75,37                    | 75,67      | 75,97                       | 76,27      | 76,57      | 76,57                                  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                            |                                                                                                         |



| No  | Indikator Outcome                                                                                        | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                        | Perangkat Daerah               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                          | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                |                                |
| (1) | (2)                                                                                                      | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                            | (10)                           |
| 4   | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) (Persen)                                       | 9,05                     | 9,04       | 9,01                        | 8,98       | 8,95       | 8,95                                   | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)   |                                |
| 5   | Cakupan kelompok ketahanan yang aktif (Persen)                                                           | 18,3                     | 20,87      | 50                          | 60         | 70         | 70                                     |                                                                |                                |
| 6   | Persentase keluarga berwirausaha (Persen)                                                                | n/a                      | n/a        | 1,17                        | 1,21       | 1,25       | 1,25                                   |                                                                |                                |
| 7   | Rata-rata usia kawin pertama (Tahun)                                                                     | 22,75                    | 22,1       | 22,1                        | 22,1       | 22,1       | 22,1                                   |                                                                |                                |
| IX  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                   |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                |                                |
| 1   | Konektivitas Kabupaten Kota (Persen)                                                                     | 45                       | 53,03      | 64,94                       | 69,97      | 75         | 75                                     | Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan              |
| 2   | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan (Persen)                                                    | 46,39                    | 46,59      | 47,26                       | 47,93      | 48,59      | 48,59                                  |                                                                |                                |
| X   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                    |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                |                                |
| 1   | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan | 60                       | 60         | 70                          | 80         | 90         | 90                                     | Program Informasi Dan Komunikasi Publik                        | Dinas Komunikasi, Informatika, |

| No  | Indikator Outcome                                                                         | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                      | Perangkat Daerah                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                           | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                              |                                                                     |
| (1) | (2)                                                                                       | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                          | (10)                                                                |
|     | Program Prioritas Pemerintah Daerah (Persen)                                              |                          |            |                             |            |            |                                        |                                              | Persandian Dan Statistik                                            |
| 2   | Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik (Persen)       | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | Program Aplikasi Informatika                 |                                                                     |
| XI  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                            |                          |            |                             |            |            |                                        |                                              |                                                                     |
| 1   | Persentase rekomendasi pelayanan izin usaha simpan pinjam (Persen)                        | 4,38                     | 6,37       | 7,97                        | 9,96       | 11,95      | 11,95                                  | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam   | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindusrtian Dan Perdagangan |
| 2   | Persentase pengawasan dan pemeriksaan Koperasi (Persen)                                   | 23,90                    | 39,84      | 59,76                       | 79,68      | 100        | 100                                    | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  |                                                                     |
| 3   | Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi (Persen) | 23,90                    | 39,84      | 59,76                       | 79,68      | 100        | 100                                    | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi |                                                                     |

| No  | Indikator Outcome                                                                  | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                  | Perangkat Daerah      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                    | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                          |                       |
| (1) | (2)                                                                                | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                      | (10)                  |
| 4   | Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian (Persen) | 29,88                    | 39,84      | 49,80                       | 59,76      | 69,72      | 69,72                                  | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                             |                       |
| 5   | Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan (Persen)        | 9,96                     | 30,28      | 60,16                       | 80,08      | 100        | 100                                    | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                           |                       |
| 6   | Persentase Pemberdayaan usaha mikro (Persen)                                       | 29,41                    | 30,62      | 31,36                       | 32,09      | 32,82      | 32,82                                  | Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) |                       |
| 7   | Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil (Persen)                   | 1,79                     | 2,39       | 3,35                        | 4,32       | 5,28       | 5,28                                   | Program Pengembangan UMKM                                                |                       |
| XII | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                         |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                          |                       |
| 1   | Persentase minimal pemberian insentif penanaman modal (Persen)                     | 45                       | 47,37      | 52,63                       | 58         | 63         | 60                                     | Program Pengembangan Iklim                                               | Dinas Penanaman Modal |

| No   | Indikator Outcome                                                                            | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                       | Perangkat Daerah             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                                                              | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                               |                              |
| (1)  | (2)                                                                                          | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                           | (10)                         |
|      |                                                                                              |                          |            |                             |            |            |                                        | Penanaman Modal                                               | Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2    | Persentase minat investasi di Sumedang (Persen)                                              | n/a                      | 20         | 20                          | 30         | 50         | 50                                     | Program Promosi Penanaman Modal                               |                              |
| 3    | Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terasilitasi (Persen)                             | 80                       | 93         | 93                          | 93         | 95         | 80                                     | Program Pelayanan Penanaman Modal                             |                              |
| 4    | Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP (Persen)           | 70                       | 75         | 75                          | 80         | 80         | 80                                     | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              |                              |
| 5    | Persentase Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota (Persen) | 80                       | 83,33      | 85                          | 85         | 85         | 85                                     | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal |                              |
| XIII | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                           |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                               |                              |

| No  | Indikator Outcome                                                                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                | Perangkat Daerah                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                       | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                        |                                                         |
| (1) | (2)                                                                                                   | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                    | (10)                                                    |
| 1   | Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata (Orang)      | 94582                    | 95282      | 95982                       | 96682      | 97382      | 97382                                  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan   | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga   |
| 2   | Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)                                                                | 60                       | 30         | 20                          | 21         | 70         | 70                                     | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan |                                                         |
| 3   | Jumlah organisasi kepramukaan (kwardcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi (Organisasi) | 1                        | 1          | 1                           | 1          | 1          | 1                                      | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan             |                                                         |
| XIV | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                  |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                        |                                                         |
| 1   | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik (Persen)                                  | 0                        | 0          | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral            | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik |
| XV  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                 |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                        |                                                         |

| No         | Indikator Outcome                                                       | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                        | Perangkat Daerah                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|            |                                                                         | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                |                                                                |
| (1)        | (2)                                                                     | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                            | (10)                                                           |
| 1          | Persentase Tingkat Kematangan keamanan Informasi (Indeks KAMI) (Persen) | 54,26                    | 62,02      | 69,77                       | 73,64      | 77,52      | 77,52                                  | Program Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi | <b>Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik</b> |
| <b>XVI</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                            |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                |                                                                |
| 1          | Presentase OPK yang dikembangkan (Persen)                               | 36,36                    | 45,45      | 55                          | 73         | 100        | 77,52                                  | Program Pengembangan Kebudayaan                                | <b>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga</b>   |
| 2          | Presentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (Persen)              | 25                       | 30         | 40                          | 50         | 60         | 0                                      | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                      |                                                                |
| 3          | Presentase sejarah lokal yang direvitalisasi dan inventarisasi (Persen) | 13,51                    | 15,2       | 17                          | 19         | 20         | 100                                    | Program Pembinaan Sejarah                                      |                                                                |
| 4          | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Persen)                      | 13,61                    | 15,31      | 17                          | 19         | 20         | 60                                     | Program Pelestraian dan Pengelolaan Cagar Budaya               |                                                                |

| No    | Indikator Outcome                                 | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                     | Perangkat Daerah             |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|       |                                                   | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                             |                              |
| (1)   | (2)                                               | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                         | (10)                         |
| 5     | Jumlah pengunjung museum (Orang)                  | 1850                     | 2000       | 2250                        | 2500       | 2750       | 20                                     | Program Pengelolaan Permuseuman             |                              |
| XVII  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN           |                          |            |                             |            |            |                                        |                                             |                              |
| 1     | Tingkat Kegemaran Membaca (Persen)                | 48,71                    | 50,6       | 60,60                       | 65,60      | 70,60      | 70,6                                   | Program Pembinaan Perpustakaan              | Dinas Arsip Dan Perpustakaan |
| XVIII | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN              |                          |            |                             |            |            |                                        |                                             |                              |
| 1     | Tingkat Ketersediaan Arsip (Persen)               | 16,48                    | 26,76      | 38,35                       | 48,68      | 60,43      | 60,43                                  | Program Pengelolaan Arsip                   | Dinas Arsip Dan Perpustakaan |
| 2     | Tingkat Keberadaan Arsip (Persen)                 | 80                       | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip |                              |
| C     | UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                 |                          |            |                             |            |            |                                        |                                             |                              |
| I     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |                          |            |                             |            |            |                                        |                                             |                              |
| 1     | Poduksi Perikanan Tangkap (Ton)                   | 1409,36                  | 1519,58    | 1641,15                     | 1780,65    | 1940,91    | 1940,91                                | Program Pengelolaan                         | Dinas Perikanan              |

| No  | Indikator Outcome                                                               | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                               | Perangkat Daerah                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                 | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                             | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                   | (10)                                                  |
|     |                                                                                 |                          |            |                             |            |            |                                        | Perikanan Tangkap                                     | dan<br>Peternakan                                     |
| 2   | Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                               | 8411,71                  | 8574,11    | 8745,59                     | 8964,23    | 9233,16    | 9233,16                                | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                |                                                       |
| 3   | Wilayah Perairan Umum Darat yang Diawasi Sumberdaya Perikanannya (Wilayah)      | 10                       | 10         | 11                          | 11         | 11         | 11                                     | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |                                                       |
| 4   | Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Persen) | 33,33                    | 25         | 40                          | 42,86      | 50         | 50                                     | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan      |                                                       |
| II  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                           |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                       |                                                       |
| 1   | Presentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan (Persen)           | 35,71                    | 37,5       | 44                          | 50         | 55         | 55                                     | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata   | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga |



| No  | Indikator Outcome                                                           | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                            | Perangkat Daerah                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                                                             | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                    |                                      |
| (1) | (2)                                                                         | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                                                | (10)                                 |
| 2   | Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah yang dipromosikan (Lokasi)               | 1                        | 1          | 2                           | 3          | 3          | 3                                      | Program Pemasaran Pariwisata                                                                       |                                      |
| 3   | Jumlah Karya Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI (Karya)                     | 8                        | 10         | 12                          | 14         | 16         | 16                                     | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |                                      |
| 4   | Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan (Orang) | 200                      | 445        | 515                         | 585        | 655        | 655                                    | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    |                                      |
| III | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                        |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                    |                                      |
| 1   | Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Ton)                                   | 910.715                  | 921.559    | 935.276                     | 953.853    | 977.549    | 977.549                                | Program Penyediaan Dan Pengembangan                                                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| No  | Indikator Outcome                                                                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                 | Perangkat Daerah                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                                                                                       | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                         |                                      |
| (1) | (2)                                                                                                   | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                     | (10)                                 |
| 2   | Peningkatan Populasi Ternak (Persen)                                                                  | 5,85                     | 5,5        | 6,47                        | 7,5        | 8,34       | 8,34                                   | Sarana Pertanian                                                        | Dinas Perikanan dan Peternakan       |
| 3   | Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) (Kali/Tahun)                                                       | 2,38                     | 2,43       | 2,47                        | 2,52       | 2,57       | 2,57                                   | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 4   | Jumlah Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dan Dikembangkan (Unit)                               | 13                       | 6          | 26                          | 26         | 26         | 26                                     |                                                                         | Dinas Perikanan dan Peternakan       |
| 5   | Persentase Jumlah Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan (Persen) | 96,76                    | 96,85      | 96,92                       | 97,44      | 100        | 100                                    | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |                                      |
| 6   | Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Persen)                      | 13,77                    | 14,05      | 14,33                       | 14,62      | 14,91      | 14,91                                  | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 7   | Jumlah Wilayah yang Terkendali dari Bencana                                                           | 22                       | 26         | 26                          | 26         | 26         | 26                                     |                                                                         | Dinas Perikanan                      |

| No  | Indikator Outcome                                               | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                                                 | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                                       |
| (1) | (2)                                                             | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                         | (10)                                  |
|     | Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Wilayah)               |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                             | dan<br>Pernakan                       |
| 8   | Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan (Rekomendasi)          | 4                        | 10         | 10                          | 10         | 10         | 10                                     | Program Perizinan Usaha Pertanian                           |                                       |
| 9   | Cakupan bina kelompok petani (Persen)                           | 26,86                    | 33,58      | 40,29                       | 47,01      | 53,72      | 53,72                                  | Program Penyuluhan Pertanian                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  |
| IV  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                            |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                             |                                       |
| 1   | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (Poin)         | 63                       | 64         | 65                          | 66         | 66         | 66                                     | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  |
| V   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                          |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                             |                                       |
| 1   | Persentase fasilitasi perizinan pendaftaran perusahaan (Persen) | 100                      | 100        | 100                         | 100,00     | 100,00     | 100                                    | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, |

| No  | Indikator Outcome                                                              | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                            | Perangkat Daerah              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                    |                               |
| (1) | (2)                                                                            | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                | (10)                          |
| 2   | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Persen) | 77,78                    | 78         | 88,89                       | 88,89      | 100,00     | 100                                    | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                  | Perindustrian Dan Perdagangan |
| 3   | Tingkat ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Persen)        | 94,74                    | 100        | 100                         | 100,00     | 100,00     | 100                                    | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |                               |
| 4   | Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir (Persen)                        | 75                       | 75         | 83,33                       | 91,67      | 100,00     | 100                                    | Program Pengembangan Ekspor                                        |                               |
| 5   | Persentase alat metrologi yang sesuai standar (Persen)                         | 32,03                    | 34,14      | 36,26                       | 38,37      | 40,49      | 40,49                                  | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                     |                               |
| 6   | Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang (Persen)      | 55                       | 63,33      | 71,67                       | 80         | 88         | 88,33                                  | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri               |                               |

| No  | Indikator Outcome                                                                     | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                 | Perangkat Daerah                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                       | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                         |                                                                     |
| (1) | (2)                                                                                   | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                     | (10)                                                                |
| VI  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                              |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                         |                                                                     |
| 1   | Jumlah dokumen regulasi perencanaan dan pembangunan industri (Dokumen)                | n/a                      | 1          | 1                           | 1          | 1          | 1                                      | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri            | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan |
| 2   | Persentase saran teknis terhadap izin yang dikeluarkan (Persen)                       | 75                       | 83,33      | 87,5                        | 90         | 91,67      | 91,67                                  | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota |                                                                     |
| 3   | Persentase pelaku industri yang mengakses sistem informasi industri nasional (Persen) | 5,12                     | 6,84       | 8,57                        | 10,29      | 12,02      | 12,02                                  | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional  |                                                                     |
| VII | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                               |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                         |                                                                     |
| 1   | Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya (KK)            | 71                       | 76         | 81                          | 86         | 91         | 258                                    | Program Pembangunan Kawasan Trasmigrasi                 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi                                 |

| No  | Indikator Outcome                                                                    | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                 | Perangkat Daerah                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                      | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                         |                                          |
| (1) | (2)                                                                                  | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                     | (10)                                     |
| 2   | Jumlah satuan pemukiman yang dibina (KK)                                             | 25                       | 25         | 25                          | 25         | 25         | 75                                     | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi               |                                          |
| D   | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                 |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                         |                                          |
| I   | INSPEKTORAT DAERAH                                                                   |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                         |                                          |
| 1   | Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti (Persen)       | 72                       | 75         | 80                          | 85         | 90         | 90                                     | Program Penyelenggaraa n Pengawasan                     | Inspektorat Daerah                       |
| 2   | Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP (Persen)             | 68                       | 75         | 80                          | 84         | 88         | 88                                     | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |                                          |
| E   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                  |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                         |                                          |
| II  | PERENCANAAN                                                                          |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                         |                                          |
| 1   | Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah (Persen) | 96,3                     | 97,04      | 97,78                       | 98,52      | 99,26      | 99,26                                  | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi          | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian |

| No  | Indikator Outcome                                                                                              | Kondisi Kinerja Awal RPD |             | Target Capaian Setiap Tahun |             |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                            | Perangkat Daerah               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                | Tahun 2022               | Tahun 2023  | Tahun 2024                  | Tahun 2025  | Tahun 2026  |                                        |                                                                    |                                |
| (1) | (2)                                                                                                            | (3)                      | (4)         | (5)                         | (6)         | (7)         | (8)                                    | (9)                                                                | (10)                           |
|     |                                                                                                                |                          |             |                             |             |             |                                        | Pembangunan Daerah                                                 | Dan Pengembangan Daerah        |
| 2   | Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen) | 94,01                    | 94,51       | 95                          | 95,39       | 95,74       | 95,74                                  | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |                                |
| 3   | Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Persen)                 | 84,23                    | 84,65       | 85,06                       | 85,49       | 85,84       | 85,84                                  |                                                                    |                                |
| 4   | Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)        | 90,07                    | 90,89       | 91,55                       | 92,21       | 92,88       | 92,88                                  |                                                                    |                                |
| III | KEUANGAN                                                                                                       |                          |             |                             |             |             |                                        |                                                                    |                                |
| 1   | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran (Waktu)                                                                    | Tepat waktu              | Tepat waktu | Tepat waktu                 | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu                            | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2   | Persentase realisasi penyerapan anggaran belanja terhadap rencana anggaran kas (Persen)                        | 95                       | 97          | 97                          | 98          | 99          | 99                                     |                                                                    |                                |

| No        | Indikator Outcome                                                            | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                 | Perangkat Daerah                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                         |                                                               |
| (1)       | (2)                                                                          | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                     | (10)                                                          |
| 3         | Persentase Ketepatan Penyampaian LKPD (Persen)                               | 95                       | 96         | 98                          | 100        | 100        | 100                                    | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                                               |
| 4         | Persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) (Persen)             | 90                       | 91         | 91                          | 93         | 95         | 95                                     |                                         |                                                               |
| 5         | Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Persen)       | 43,47                    | 45,67      | 44,62                       | 45,15      | 47,9       | 47,9                                   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   | <b>Badan Pendapatan Daerah</b>                                |
| <b>IV</b> | <b>KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                 |                          |            |                             |            |            |                                        |                                         |                                                               |
| 1         | Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan (Persen)              | 86                       | 87         | 88                          | 89         | 90         | 90                                     | Program Kepegawaian Daerah              | <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia</b> |
| 2         | Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan (Persen) | 84                       | 85         | 86                          | 87         | 88         | 88                                     |                                         |                                                               |
| 3         | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (Persen)               | 84                       | 86         | 87                          | 88         | 89         | 89                                     |                                         |                                                               |



| No  | Indikator Outcome                                                                                                             | Kondisi Kinerja Awal RPD |                 | Target Capaian Setiap Tahun |                 |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                       | Perangkat Daerah                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023      | Tahun 2024                  | Tahun 2025      | Tahun 2026      |                                        |                                               |                                                                  |
| (1) | (2)                                                                                                                           | (3)                      | (4)             | (5)                         | (6)             | (7)             | (8)                                    | (9)                                           | (10)                                                             |
| 4   | Persentase ASN yang berkinerja baik (Persen)                                                                                  | 95                       | 96              | 97                          | 98              | 99              | 99                                     |                                               |                                                                  |
| V   | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                   |                          |                 |                             |                 |                 |                                        |                                               |                                                                  |
| 1   | Persentase Implementasi Hasil Penelitian dan Inovasi (Persen)                                                                 | 89,78                    | 90              | 90,9                        | 91,81           | 92,73           | 93,58                                  | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah    | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 2   | Indeks inovasi daerah (Kategori)                                                                                              | Sangat Inovatif          | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif             | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif                        |                                               |                                                                  |
| F   | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                           |                          |                 |                             |                 |                 |                                        |                                               |                                                                  |
| VI  | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                            |                          |                 |                             |                 |                 |                                        |                                               |                                                                  |
| 1   | Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang ditindaklanjuti (Persen) | n/a                      | n/a             | 100                         | 100             | 100             | 100                                    | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah                                               |
| 2   | Presentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewilayahan (Persen)                                          | 100                      | 100             | 100                         | 100             | 100             | 100                                    |                                               |                                                                  |

| No  | Indikator Outcome                                                                                                             | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                              | Perangkat Daerah |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                                                               | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                      |                  |
| (1) | (2)                                                                                                                           | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                  | (10)             |
| 3   | Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang ditindaklanjuti (Persen) | n/a                      | n/a        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    |                                      |                  |
| 4   | Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Persen)                                                                           | 100                      | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    |                                      |                  |
| 5   | Persentase dokumen kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama (Persen)                          | 95,52                    | 100        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    |                                      |                  |
| 6   | Presentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti (Persen)                                         | n/a                      | n/a        | 100                         | 100        | 100        | 100                                    | Program Perekonomian dan Pembangunan |                  |
| 7   | Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang diselenggarakan (Persen)                                                 | n/a                      | n/a        | 90                          | 95         | 100        | 100                                    |                                      |                  |
| 8   | Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)                                                                                              | 2                        | 5          | 3                           | 4          | 5          | 5                                      |                                      |                  |
| VII | SEKRETARIAT DPRD                                                                                                              |                          |            |                             |            |            |                                        |                                      |                  |

| No   | Indikator Outcome                                                                                    | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                     | Perangkat Daerah                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |                                                                                                      | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                             |                                   |
| (1)  | (2)                                                                                                  | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                                                         | (10)                              |
| 1    | Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD (Persen)                                                 | 100                      | 100        | 33,94                       | 32,12      | 33,94      | 100                                    | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                                                          | Sekretariat DPRD                  |
| 2    | Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD (Persen)                                            | 100                      | 100        | 32,52                       | 33,33      | 34,15      | 100                                    |                                                                                                             |                                   |
| G    | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                              |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                             |                                   |
| VIII | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                          |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                             |                                   |
| 1    | Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (Persen)                 | 73,33                    | 40         | 94,17                       | 95,83      | 100        | 100                                    | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2    | Jumlah orang yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (Orang) | 0                        | 100        | 250                         | 100        | 100        | 450                                    | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan |                                   |

| No  | Indikator Outcome                                                                      | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                                                                   | Perangkat Daerah |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                        | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                                                                           |                  |
| (1) | (2)                                                                                    | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                                                                       | (10)             |
|     |                                                                                        |                          |            |                             |            |            |                                        | Etika Serta Budaya Politik                                                                                |                  |
| 3   | Cakupan Ormas yang di bina kategori aktif (Persen)                                     | 19,38                    | 19,38      | 38,76                       | 100        | 100        | 100                                    | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                             |                  |
| 4   | Jumlah orang yang dibina dilingkup bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Orang) | 0                        | 150        | 180                         | 210        | 260        | 260                                    | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                  |                  |
| 5   | Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani (Potensi Konflik)                        | 15                       | 15         | 14                          | 13         | 12         | 12                                     | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial |                  |
| H   | NON URUSAN                                                                             |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                                                                           |                  |

| No  | Indikator Outcome                       | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program                                                     | Perangkat Daerah                                   |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                                         | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |                                                             |                                                    |
| (1) | (2)                                     | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)                                                         | (10)                                               |
| 1   | Nilai SAKIP perangkat daerah (Kategori) | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pendidikan                                   |
|     |                                         | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |                                                             | Dinas Kesehatan                                    |
|     |                                         | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |                                                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                |
|     |                                         | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |                                                             | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|     |                                         | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja                         |
|     |                                         | BB                       | A          | A                           | A          | A          | A                                      |                                                             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                |
|     |                                         | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |                                                             | Dinas Sosial                                       |
|     |                                         |                          |            |                             |            |            |                                        |                                                             |                                                    |

| No  | Indikator Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program | Perangkat Daerah                                                                |
|-----|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |         |                                                                                 |
| (1) | (2)               | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)     | (10)                                                                            |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                             |
|     |                   | BB                       | BB         | BB                          | BB         | A          | A                                      |         | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                            |
|     |                   | BB                       | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                         |
|     |                   | BB                       | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa                                         |
|     |                   | BB                       | BB         | BB                          | BB         | A          | A                                      |         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan |

| No  | Indikator Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program | Perangkat Daerah                                                     |
|-----|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                   | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |         |                                                                      |
| (1) | (2)               | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)     | (10)                                                                 |
|     |                   |                          |            |                             |            |            |                                        |         | Perlindungan Anak                                                    |
|     |                   | BB                       | BB         | BB                          | A          | A          | A                                      |         | Dinas Perhubungan                                                    |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik              |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
|     |                   | BB                       | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               |

| No  | Indikator Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program | Perangkat Daerah                                       |
|-----|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
|     |                   | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |         |                                                        |
| (1) | (2)               | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)     | (10)                                                   |
|     |                   | BB                       | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Dinas Arsip dan Perpustakaan                           |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Dinas Perikanan dan Peternakan                         |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                   |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Sekretariat Daerah                                     |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Sekretariat DPRD                                       |



| No  | Indikator Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program | Perangkat Daerah                                                  |
|-----|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |         |                                                                   |
| (1) | (2)               | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)     | (10)                                                              |
|     |                   | BB                       | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|     |                   | BB                       | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                    |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Badan Pendapatan Daerah                                           |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Inspektorat                                                       |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Wado                                                    |

| No  | Indikator Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program | Perangkat Daerah      |
|-----|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|-----------------------|
|     |                   | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |         |                       |
| (1) | (2)               | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)     | (10)                  |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Jatinunggal |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Darmaraja   |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Cibugel     |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Cisitu      |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Situraja    |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Conggeang   |
|     |                   | BB                       | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Paseh       |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Surian      |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Buahdua     |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Tanjungsari |

| No  | Indikator Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program | Perangkat Daerah           |
|-----|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|----------------------------|
|     |                   | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |         |                            |
| (1) | (2)               | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)     | (10)                       |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Sukasari         |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Pamulihan        |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Cimanggung       |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Jatinangor       |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Rancakalong      |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Sumedang Selatan |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Sumedang Utara   |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Ganeas           |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Tanjungkerta     |

| No  | Indikator Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Program | Perangkat Daerah                  |
|-----|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------|
|     |                   | Tahun 2022               | Tahun 2023 | Tahun 2024                  | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                        |         |                                   |
| (1) | (2)               | (3)                      | (4)        | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)                                    | (9)     | (10)                              |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Tanjungmedar            |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Cimalaka                |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Cisarua                 |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Tomo                    |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Ujungjaya               |
|     |                   | A                        | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Kecamatan Jatigede                |
|     |                   | BB                       | A          | A                           | A          | A          | A                                      |         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

## **BAB IX PENUTUP**

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan selama 3 (tiga) tahun yang berakhirnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023 sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pada Tahun 2023. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan tahap IV dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 serta Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan RPD sebagai berikut:

1. Pejabat (Pj.) mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.
2. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026.
3. Seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang agar melaksanakan program – program dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.
4. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan Tahun 2026.

5. Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD secara periodik yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
6. Pemerintah Daerah melakukan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah maupun akuntabilitas kinerja pemerintah daerah setiap tahunnya dengan berpedoman kepada RPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, perlu dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang.

  
BUPATI SUMEDANG,  
  
DONY AHMAD MUNIR